BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH
NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2018-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang :

a. bahwa melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan tugas bersama yang salah satunya diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan dituangkan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah;

b. bahwa berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023, menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan situasi dan dinamika hukum saat ini serta telah terjadi perubahan mendasar terkait dengan kebijakan nasional yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, sehingga Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 perlu dilakukan perubahan;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 15).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS
dan
BUPATI BANYUMAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2018-2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 15), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Sistematika dokumen Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun sebagai berikut:

a. BAB I : PENDAHULUAN
b. BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
c. BAB III : GAMBARAN KEUANGAN DAERAH
d. BAB IV : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH
e. BAB V : VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN
f. BAB VI : STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
g. BAB VII : KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
h. BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
i. BAB IX : PENUTUP

2. Ketentuan Pasal 4, dihapus

3. Ketentuan dalam Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 09 AUG 2021

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

Diundangkan di Purwokerto
Pada Tanggal .....
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

WAHYU BUDI SAPTONO
Pembina Utama Madya
NIP. 19640116 199003 1 009

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2021
NOMOR 7

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS, PROVINSI JAWA TENGAH : (7-144/2021)

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2018-2023

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengamanatkan bahwa daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional di segala bidang kehidupan yang berlandaskan pada riset dan inovasi nasional yang berpedoman pada nilai-nilai Pancasila. Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud, disusun secara berjenjang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas telah menyusun dokumen perencanaan daerah berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023. Penyusunan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 telah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025 dan memperhatikan dokumen perencanaan Provinsi Jawa Tengah serta nasional yang berlaku. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala daerah terpilih, dengan berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJMN. RPJMD memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Perangkat Daerah, lintas Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023 merupakan tahap RPJPD Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025 tahap ke-3 dan tahap ke-4.

Memasuki tahun kedua implementasi RPJMD, di awal tahun 2020 terjadi Pandemi COVID-19 yang malanda secara global dan memberikan dampak cukup besar pada multi sektor. Selain sektor kesehatan, kondisi perekonomian daerah dan sosial ekonomi masyakarat juga secara signifikan terdampak pandemi. Kondisi yang ditunjukan dengan menurunnya pertumbuhan ekonomi daerah terutama pada sektor-sektor yang selama ini berkontribusi

besar pada perekonomian di Kabupaten Banyumas seperti industri pengolahan, industri kecil, perdagangan, UMKM, pertanian, dan pariwisata. Kondisi tersebut mendorong Pemerintah Kabupaten Banyumas untuk menata kembali kebijakan pembangunan daerah guna merespon kejadian Pandemi COVID-19.

Dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, maka perlu diintegerasikan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023. Regulasi lainnya adalah regulasi yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan daerah dan penganggaran yang mempengaruhi perubahan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah. Ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang kemudian dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, secara signifikan mengubah struktur dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan penganggaran di daerah. Selain itu, pengelolaan keuangan daerah juga perlu dilakukan penyesuaian dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Untuk itu, perlu dilakukan perubahan terhadap berbagai kebijakan pembangunan daerah dalam dokumen RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 sebagai bentuk adaptasi dari berbagai dinamika faktual global maupun dinamika regulasi nasional.

Dasar perubahan RPJMD adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Di dalam Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, disebutkan bahwa RPJPD, RPJMD, dan RKPD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Lebih lanjut, di dalam Pasal 342 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 juga disebutkan bahwa perubahan RPJPD dan RPJMD dapat dilakukan apabila: a) hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017; b) hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan

bahwa subtansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017; dan c) terjadi perubahan yang mendasar yang mencakup terjadinnya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Banyumas telah melaksanakan evaluasi RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 untuk mewujudkan kosistensi antara kebijakan daerah dan nasional, konsistensi pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah, keselarasan antar dokumen perencanaan, dan kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi RPJMD tersebut berupa rekomendasi untuk melakukan perubahan RPJMD.

Menyikapi dengan adanya rekomendasi hasil evaluasi RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023, maka Pemerintah Kabupaten Banyumas melakukan perubahan RPJMD agar dapat lebih mengarah pada pencapaian visi dan misi pembangunan daerah guna mendukung pencapaian tujuan dan sasaran nasional, serta memberikan arah dalam perbaikan kualitas dokumen perencanaan pembangunan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2018-2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, daerah memiliki kewajiban menyusun rencana pembangunan daerah. Dokumen perencanaan pembangunan daerah terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk kurun waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk kurun waktu 5 tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan tahunan daerah.

Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas telah menyusun dokumen perencanaan daerah berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023. Penyusunan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 telah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025 dan memperhatikan dokumen perencanaan Provinsi Jawa Tengah serta nasional yang berlaku. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala daerah terpilih, dengan berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJMN. RPJMD memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Perangkat Daerah, lintas Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023 merupakan tahap RPJPD Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025 tahap ke-3 dan tahap ke-4.

Memasuki tahun kedua implementasi RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023, di awal tahun 2020 terjadi pandemi COVID-19 yang melanda secara global dan memberikan dampak cukup besar dan multi sektor. Selain sektor kesehatan, kondisi perekonomian daerah dan sosial ekonomi masyarakat juga secara signifikan terdampak pandemi. Kondisi ini ditunjukkan dengan menurunnya pertumbuhan ekonomi daerah terutama pada sektor-sektor yang selama ini

berkontribusi besar pada perekonomian di Kabupaten Banyumas seperti industri pengolahan, konstruksi, perdagangan, UMKM, dan pariwisata, serta meningkatnya kemiskinan dan pengangguran. Kondisi tersebut mendorong Pemerintah Kabupaten Banyumas untuk menata kembali kebijakan pembangunan daerah guna merespon kejadian pandemi COVID-19.

Dinamika kebijakan yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan dan penganggaran juga turut mempengaruhi perubahan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah. Ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, perlu diintegrasikan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023. Kebijakan lainnya secara signifikan mengubah struktur dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan penganggaran di daerah yaitu Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang kemudian dimutakhirkan melalui Kepmendagri Nomor 050-3708 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Untuk itu perlu dilakukan perubahan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 sebagai bentuk adaptasi dari berbagai dinamika faktual global maupun dinamika kebijakan nasional.

Dasar perubahan RPJMD adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta hasil evaluasi RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023.

Berdasarkan pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa RPJPD, RPJMD, dan RKPD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Selanjutnya pada pasal 342 ayat (1) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 disebutkan bahwa perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila a) hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam permendagri tersebut; b) hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan permendagri tersebut; dan c) terjadi perubahan yang mendasar. Perubahan yang mendasar dimaksud meliputi terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

Mengawali pelaksanaan perubahan RPJMD Pemerintah Kabupaten Banyumas telah melaksanakan evaluasi RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 untuk mewujudkan konsistensi antara kebijakan daerah dan nasional, konsistensi pelaksanaan dan hasil rencana

pembangunan daerah, keselarasan antar dokumen perencanaan, kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan, dan menyelaraskan/ mengintegrasikan perubahan kebijakan. Pada evaluasi RPJMD disajikan juga mengenai capaian indikator-indikator Hasil evaluasi RPJMD tersebut berupa rekomendasi untuk melakukan perubahan RPJMD agar dapat lebih mengarah pada pencapaian visi dan misi pembangunan daerah. Selain itu, rekomendasi evaluasi RPJMD dapat mendukung pencapaian tujuan dan sasaran nasional, serta memberikan arah dalam perbaikan kualitas dokumen perencanaan pembangunan.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 dilakukan perubahan melalui beberapa tahapan kegiatan yaitu: 1)Penyusunan Rancangan Awal; 2)Konsultasi Publik; 3)Pembahasan dan Kesepakatan Rancangan Awal dengan DPRD; 4)Konsultasi Rancangan Awal dengan Provinsi; 5)Penyusunan Rancangan; 6)Musrenbang RPJMD perubahan; 7)Penyusunan Rancangan Akhir; 8)Penyusunan Raperda Perubahan Perda RPJMD; 9)Persetujuan Raperda Perubahan Perda RPJMD oleh Bupati dan DPRD; 10)Evaluasi Raperda Perubahan Perda RPJMD oleh Provinsi; dan 11)Penetapan Perubahan Perda RPJMD.

Perubahan RPJMD setelah ditetapkan akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Banyumas yang merupakan perencanaan tahunan daerah, dan menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD). Renstra Perangkat Daerah selanjutnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Peraturan perundang-undangan sebagai dasar penyusunan rancangan perubahan RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4d. Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4419);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140);
9. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
22. Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
23. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca;
24. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
25. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
26. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
27. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 121);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009, Nomor 4 Seri E);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011, Nomor 3 Seri E);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, yang telah diubah menggunakan Keputusan Mendagri Nomor 050-3708 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah;
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 sebagai dokumen perencanaan lima tahunan daerah memiliki keterkaitan dengan beberapa dokumen

perencanaan dan penganggaran daerah. Sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional penyusunan RPJMD merupakan bagian yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan nasional maupun dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya. Integrasi antar dokumen perencanaan pembangunan ini bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan di pusat dan daerah maupun antar waktu/periode. RPJMD harus sinkron dan bersinergi antar daerah, waktu, ruang dan fungsi pemerintah serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Perubahan RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023 disusun dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Banyumas tahun 2005-2025 khususnya tahap ke-3 dan tahap ke-4, RPJMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023 dan RPJMN Tahun 2020-2024.

Keterkaitan/hubungan dokumen perencanaan pembangunan antara pusat dan daerah, antar lembaga pemerintah, maupun antar waktu dapat dilihat di Gambar 1.1.

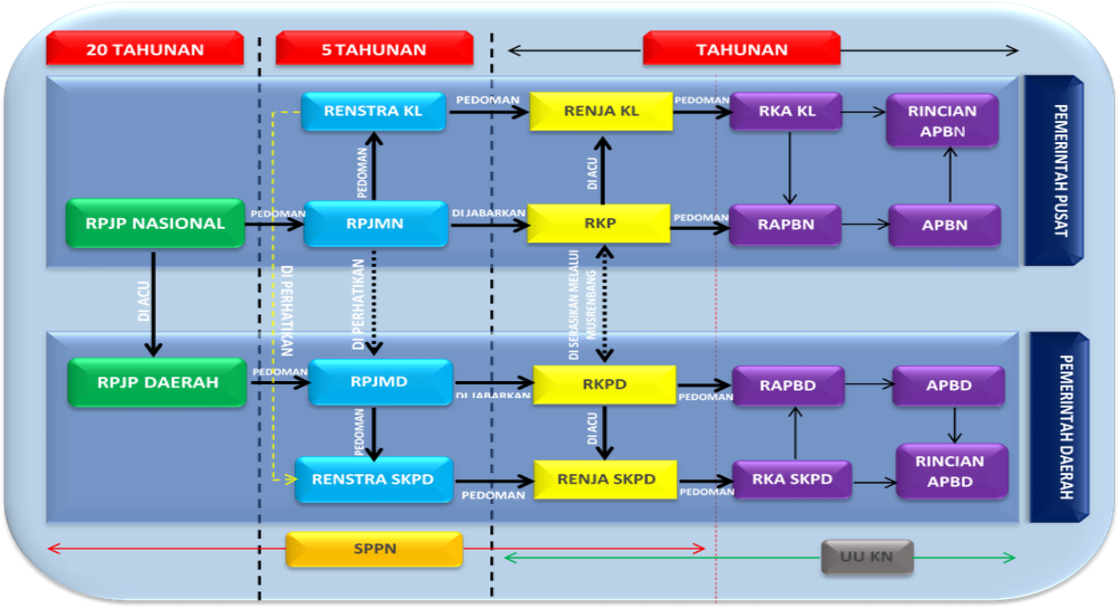

Gambar 1.1.
Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004

Keselarasan amanat dalam RPJPD Tahun 2005-2025, dan RPJMN Tahun 2020-2024 dalam RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 dijabarkan sebagai berikut:

1.3.1. RPJMD dengan RPJMN tahun 2020-2024

Keterkaitan antara RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 dengan RPJMN 2020-2024 menunjukan keselarasan visi RPJMN dengan visi RPJMD pada visi untuk mewujudkan wilayah yang maju dan mandiri. Ada satu misi RPJMN yang tidak terkait dengan RPJMD Kabupaten Banyumas karena misi tersebut adalah kewenangan pusat bukan kewenangan pemerintah daerah kabupaten. Keterkaitan misi RPJMD dengan misi RPJMN diuraikan dalam Tabel 1.1.

Tabel 1.1
Keterkaitan antara RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023 dengan RPJMN tahun 2020-2024

RPJMN Tahun 2020-2024	RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023
Visi: "Terwujudnya Indonesia Maju, Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong"	**Visi:** "Menjadikan Banyumas yang Maju, Adil-Makmur dan Mandiri"
Misi:	**Misi:**
1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia	2. Meningkatkan kualitas hidup warga terutama pemenuhan dan layanan dasar pendidikan dan kesehatan
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing 3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan	3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan 4. Mewujudkan Banyumas sebagai Kabupaten Pelopor Kedaulatan Pangan 5. Menciptakan iklim investasi yang berorientasi perluasan kesempatan kerja yang berbasis potensi lokal dan ramah lingkungan 6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar yang merata dan memadai sebagai daya ungkit pembangunan 7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan industri kerakyatan, Pariwisata, dan Industri Kreatif berbasis sumber daya lokal
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan	5. Menciptakan iklim investasi yang berorientasi perluasan kesempatan kerja yang berbasis potensi lokal dan ramah lingkungan
6. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa	8. Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya serta berkepribadian dengan menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan religius.
7. Penegakkan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya 8. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga 9. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya	1. Mewujudkan Banyumas sebagai Barometer Pelayanan Publik
10. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan	-

1.3.2. RPJMD dengan RPJPD Kabupaten Banyumas

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan penjabaran dari dokumen Rencana Jangka Panjang Daerah sehingga dalam penyusunannya RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 harus mempedomani RPJPD Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025. Keterkaitan antara RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 dan RPJPD Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025 diperlukan untuk menjamin konsistensi dan keberlanjutan arah pembangunan daerah.

Keterkaitan visi dan misi RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023 dengan RPJPD Kabupaten Banyumas tahun 2005-2025 tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 1.2.
Keterkaitan antara RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 dengan RPJPD Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025

RPJPD KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2005-2025	RPJMD KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2018-2023
Visi : Banyumas 2025 Sejahtera, Mandiri, Maju dan Berdaya Saing, Serta Lestari	Visi : Menjadikan Banyumas yang maju, Adil Makmur dan Mandiri
1. Membangun Masyarakat Kabupaten Banyumas yang Sejahtera	2. Meningkatkan kualitas hidup warga terutama pemenuhan dan layanan dasar pendidikan dan kesehatan 8. Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya serta berkepribadian dengan menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan religius
3. Membangun Daerah Kabupaten Banyumas yang Mandiri	3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan 4. Mewujudkan Banyumas sebagai Kabupaten Pelopor Kedaulatan Pangan 7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan industri kerakyatan, Pariwisata, dan Industri Kreatif berbasis sumber daya lokal
4. Membangun Masyarakat Kabupaten Banyumas yang Maju dan Berdaya Saing	1. Mewujudkan Banyumas sebagai barometer pelayanan public 6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar yang merata dan memadai sebagai daya ungkit pembangunan
5. Membangun Daerah Kabupaten Banyumas yang Lestari	5. Menciptakan iklim investasi yang berorientasi perluasan kesempatan kerja yang berbasis potensi lokal dan ramah lingkungan

1.3.3. RPJMD dengan RPJMD Provinsi Jawa Tengah

Sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan dan wilayah penyusunan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 juga memperhatikan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023. Hal ini dilaksanakan melalui penyelarasan visi dan misi dalam RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018 dengan visi dan misi dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023.

Keselarasan antara RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023 dengan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 1.3
Keterkaitan antara RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023 dengan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023

RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023	RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023
Visi: Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, Tetep Mboten Korupsi Mboten Ngapusi	**Visi:** Menjadikan Banyumas yang Maju, Adil-Makmur dan Mandiri
Misi:	**Misi:**
1. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan guyub untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia	8. Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya serta berkepribadian dengan menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan religius.
2. Mempercepat reformasi birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke pemerintah Kabupaten/kota	1. Mewujudkan Banyumas sebagai Barometer Pelayanan Publik
3. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran	3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan 4. Mewujudkan Banyumas sebagai Kabupaten Pelopor Kedaulatan Pangan 5. Menciptakan iklim investasi yang berorientasi perluasan kesempatan kerja yang berbasis potensi lokal dan ramah lingkungan 6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar yang merata dan memadai sebagai daya ungkit pembangunan 7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan industri kerakyatan, Pariwisata, dan Industri Kreatif berbasis sumber daya lokal
4. Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan	2. Meningkatkan kualitas hidup warga terutama pemenuhan dan layanan dasar pendidikan dan kesehatan 5. Menciptakan iklim investasi yang berorientasi perluasan kesempatan kerja yang berbasis potensi lokal dan ramah lingkungan

1.3.4. RPJMD dengan Rencana Strategi Perangkat Daerah

Rencana Strategi Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 disusun berpedoman pada RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023. Renstra PD merupakan dokumen perencanaan tiap perangkat daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

1.3.5. RPJMD dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan penjabaran tahunan dari RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018–2023 yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RKPD disusun berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

1.3.6. RPJMD dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023 telah memperhatikan kesesuaian dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031. RTRW merupakan pedoman keruangan dalam pelaksanaan pembangunan daerah untuk membentuk struktur dan pola ruang wilayah. Kebijakan, strategi, dan indikasi program RTRW menjadi pedoman dalam penyusunan strategi dan program RPJMD. Indikasi program RTRW pada tahap pembangunan jangka menengah yang berkesesuaian dengan periode RPJMD yang disusun menjadi perhatian untuk menjadi program RPJMD, sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten, prioritas daerah, serta janji politik Bupati terpilih.

Beberapa kebijakan, strategi dan indikasi program dalam RTRW Kabupaten Banyumas tidak memiliki keterkaitan dengan program RPJMD dikarenakan perubahan kewenangan daerah terhadap beberapa urusan seperti urusan kehutanan dan energi sumber daya mineral. Kebijakan dan strategi yang tidak memiliki keterkaitan dengan program RPJMD antara lain: kebijakan peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara, strategi mengembangkan jaringan energi dan sumber daya energi alternatif, strategi mengembangkan jaringan transportasi sungai sebagai pendukung sarana wisata, strategi mengendalikan secara ketat pengelolaan lingkungan kawasan peruntukan pertambangan, dan strategi mengembangkan sektor kehutanan dan pengolahan hasil hutan.

1.3.7. RPJMD dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas telah melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk perubahan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023. KLHS RPJMD dimaknai sebagai analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan ke dalam dokumen RPJMD. Penyusunan KLHS Perubahan RPJMD mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, serta Permendagri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Penyusunan KLHS RPJMD agak berbeda dengan penyusunan KLHS untuk dokumen kebijakan, rencana, dan/atau program lainya. Dimana dalam proses penyusunan

KLHS RPJMD tidak menunggu rumusan kebijakan dan program (KRP), namun tahap penyusunannya diawali dengan analisis capaian indikator tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) yang berkesesuaian dengan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). KLHS RPJMD yang disusun sebelum dirumuskannya RPJMD difokuskan pada pencapaian target TPB dan mengakomodasi isu strategis TPB yang mencakup isu lingkungan hidup, ekonomi, sosial, hukum dan tata kelola.

Penyusunan KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 merumuskan skenario Pembangunan Berkelanjutan (PB), berupa alternatif proyeksi kondisi pencapaian (target pencapaian) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan tanpa upaya tambahan dan/atau dengan upaya tambahan sesuai periode RPJMD, dengan tetap memperhatikan masa pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Beberapa skenario KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Banyumas antara lain:

- Dibutuhkan upaya tambahan untuk menurunkan jumlah penduduk miskin yang kembali meningkat dengan terjadinya pandemi COVID-19;
- Dibutuhkan upaya tambahan untuk meningkatkan proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan dan persentase rumah tinggal bersanitasi, serta rasio rumah layak huni yang merupakan kebutuhan dasar masyarakat sekaligus sebagai bagian dari upaya penanggulangan kemiskinan;
- Dibutuhkan upaya tambahan untuk meningkatkan kemandirian daerah dengan meningkatkan rasio penerimaan pajak terhadap PDB, PAD sektor pariwisata;
- Dibutuhkan upaya tambahan untuk menurunkan resiko bencana dan jumlah korban bencana;
- Dibutuhkan upaya tambahan untuk mempertahankan daya dukung air bagi kehidupan sejalan dengan peningkatan penduduk dan air untuk pertanian;
- Daya Dukung Lahan Terbangun (DDLB) Kabupaten Banyumas masih dalam kategori sedang mendekati baik, namun diperkirakan turun, beberapa kecamatan DDLB terlampaui atau buruk;
- Perkiraan timbulan sampah di Kabupaten Banyumas. Sampai dengan 2023 mencapai 450.015 ton per tahun dengan asumsi peningkatan timbulan sampah tersebut berdasarkan perkiraan pertumbuhan penduduk yang mencapai 0, 94% per tahun. Untuk itu diperlukan upaya tambahan untuk pengelolaan sampah agar memenuhi pelayanan penanganan sampah;
- Peningkatan kebutuhan energi sebagai akibat peningkatan penduduk dan kegiatan berbanding lurus dengan peningkatan emisi GRK, dengan demikian diperlukan upaya untuk mengendalikan peningkatan GRK.

Skenario pembangunan hasil analisis KLHS Perubahan RPJMD menjadi pertimbangan dalam perumusan kebijakan rencana pembangunan daerah dalam Perubahan RPJMD dengan mempertimbangkan prioritas dan kemampuan daerah.

1.4. Maksud dan Tujuan

1.4.1. Maksud

Maksud penyusunan perubahan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 adalah dalam rangka sinkronisasi dengan kebijakan nasional terutama dengan ditetapkannya RPJMN Tahun 2020-2024, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, penyesuaian kebijakan pembangunan daerah yang dipengaruhi oleh terjadinya pandemi COVID-19. Perubahan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 ini juga disusun untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 berupa penyesuaian program kegiatan dalam RPJMD, perbaikan indikator dan target, program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD serta perbaikan pengukuran kinerja daerah dan OPD. Perubahan RPJMD juga memperhatikan KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023.

1.4.2. Tujuan

Tujuan penyusunan perubahan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

a. Memberikan gambaran tentang kondisi daerah, permasalahan dan isu strategis, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program pembangunan untuk mencapai visi dan melaksanakan misi kepala daerah;
b. Merumuskan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD yang merupakan dokumen perencanaan tahunan daerah, dan Renstra Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan lima tahun perangkat daerah;
c. Memberikan tolak ukur bagi pemerintah daerah, DPRD dan masyarakat dalam melakukan evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
d. Memberikan arah rencana pembangunan daerah jangka menengah untuk pedoman penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan RKPD Tahun 2022 dan 2023, dan Perubahan RKPD Tahun 2021.

1.5. Sistematika Penulisan RPJMD

Sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, perubahan RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023 disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan
Bab ini berisi tentang latar belakang, dan dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan RPJMD.

Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah

Bab ini berisi tentang gambaran kondisi daerah pada aspek geografis dan demografis, aspek pelayanan umum, aspek kesejateraan masyarakat, dan aspek daya saing daerah.

Bab III Gambaran Keuangan Daerah
Bab ini berisi tentang kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu, dan kerangka pendanaan daerah.

Bab IV Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah
Bab ini berisi tentang permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis pembangunan jangka menengah daerah.

Bab V Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran
Bab ini berisi tentang visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah.

Bab VI Strategi, Arah Kebijakan Dan Program Pembangunan Daerah
Bab ini berisi tentang rumusan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah.

Bab VII Kerangka Pendanaan Pembangunan Dan Program Perangkat Daerah
Bab ini berisi tentang alokasi belanja langsung untuk pendanaan pembangunan, dan rincian program perangkat daerah.

Bab VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Bab ini berisi tentang penetapan indikator kinerja utama dan penetapan indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Bab IX Penutup
Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan perubahan RPJMD.

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

Karakteristik geografi dan demografi wilayah merupakan informasi dasar untuk mengidentifikasi potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia, serta memetakan potensi pengembangan wilayah guna mendukung pembangunan daerah. Wilayah Kabupaten Banyumas memiliki karakteristik geografis sebagai berikut:

Lokasi strategis; Kabupaten Banyumas terletak pada persimpangan perhubungan lintas daerah, yaitu Jawa bagian timur dan barat, serta Jawa bagian utara dan selatan. Lokasi strategis Kabupaten Banyumas telah mendorong pengembangan wilayah Kabupaten Banyumas, dan menjadikan Purwokerto sebagai ibukota Kabupaten Banyumas menjadi pusat pelayanan, tidak hanya bagi wilayah Kabupaten Banyumas tapi juga bagi kabupaten di sekitarnya. Berkembangnya kegiatan kawasan perkotaan Purwokerto meningkatkan mobilitas manusia dan barang, serta perputaran uang. Namun di sisi lain berkembangnya kawasan perkotaan Purwokerto berdampak pada menurunnya daya dukung lingkungan pada kawasan perkotaan, serta alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan bukan pertanian.

Wilayah relatif subur; Dataran rendah di wilayah Kabupaten Banyumas sebagian besar merupakan endapan gunung berapi yang potensial untuk budidaya pertanian tanaman pangan, sedangkan geografis perbukitan dimanfaatkan untuk budidaya tanaman tahunan dan tanaman perkebunan.

Potensial bagi pengembangan wisata alam; Kondisi geografi wilayah Kabupaten Banyumas dengan bentang alam terdiri atas pegunungan/perbukitan, dan dataran rendah. Beberapa kecamatan antara lain Kecamatan Baturraden, Kecamatan Kedungbanteng, Kecamatan Cilongok, dan Kecamatan Sumbang yang sebagian wilayahnya berada di lereng gunung Slamet memiliki keindahan alam yang dapat dikembangkan sebagai destinasi pariwisata.

Rawan bencana, kondisi geografi wilayah Kabupaten Banyumas juga berkorelasi pada potensi bencana di sebagian besar wilayah Kabupaten Banyumas.

Kondisi geografi Kabupaten Banyumas menggambarkan bahwa kondisi alam Kabupaten Banyumas mendukung bagi: 1).Pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa; 2). Pengembangan sektor pertanian baik tanaman pangan maupun perkebunan untuk ketersediaan pangan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat; 3).Pengembangan pariwisata alam sebagai daya ungkit untuk kegiatan ekonomi lainnya. Pengembangan potensi wilayah tersebut dilaksanakan dengan tetap memperhatikan faktor pembatas yang ada, antara lain daya dukung lingkungan dan antisipasi terhadap potensi bencana. Pengelolaan sumberdaya alam juga harus memperhatikan keberlanjutan sumber daya alam agar tetap dapat memberikan manfaat ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan struktur penduduk menurut umur dan rasio ketergantungan Kabupaten Banyumas diperkirakan akan mengalami bonus demografi pada tahun 2030. Untuk dapat meraih peluang bonus demografi berbagai upaya perlu dilakukan mulai dari saat ini untuk menyiapkan penduduk yang berkualitas, mendorong investasi untuk menyediakan lapangan kerja, dengan tetap mengendalikan laju pertambahan penduduk.

2.1.1 Aspek Geografi

2.1.1.1 Letak, Luas, dan Batas Wilayah

Kabupaten Banyumas merupakan bagian dari Provinsi Jawa Tengah yang berada di sebelah barat daya Provinsi. Secara astronomis, Banyumas terletak antara 7o 15’ 05” -7o 37’ 10” Lintang Selatan dan antara 108o 39’ 17” – 109o 27’ 15” Bujur Timur. Batas-batas Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut:

- sebelah utara : Kabupaten Tegal dan Kabupaten Pemalang
- sebelah timur : Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Kebumen
- sebelah selatan: Kabupaten Cilacap
- sebelah barat : Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Brebes

Gambar 2.1
Peta Kedudukan Kabupaten Banyumas dalam Provinsi Jawa Tengah
Sumber: Revisi RTRW Kabupaten Banyumas, 2018

Secara administratif Kabupaten Banyumas terdiri dari 27 kecamatan, 301 Desa, dan 30 Kelurahan dengan pusat pemerintahan berada di Kota Purwokerto. Kabupaten Banyumas memiliki total luas wilayah 132.759 hektar. Wilayah kecamatan terluas adalah Kecamatan Cilongok yang meliputi 7,93% luas Kabupaten Banyumas atau sekitar 10.534 hektar, dan wilayah kecamatan terkecil adalah Kecamatan Purwokerto Barat yaitu 0,56% luas Kabupaten Banyumas atau sekitar 740 hektar. Luas dan persentase luas wilayah kecamatan lainnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.1
Luas Wilayah dan Pembagian Administrasi Kabupaten Banyumas

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan	Luas (Ha)	Persentase
1	Lumbir	10	-	10.266	7,73%
2	Wangon	12	-	6.078	4,58%
3	Jatilawang	11	-	4.816	3,63%
4	Rawalo	9	-	4.964	3,74%
5	Kebasen	12	-	5.400	4,07%
6	Kemranjen	15	-	6.071	4,57%
7	Sumpiuh	11	3	6.001	4,52%
8	Tambak	12	-	5.203	3,92%
9	Somagede	9	-	4.011	3,02%
10	Kalibagor	12	-	3.573	2,69%
11	Banyumas	12	-	3.809	2,87%
12	Patikraja	13	-	4.323	3,26%
13	Purwojati	10	-	3.786	2,85%
14	Ajibarang	15	-	6.650	5,01%
15	Gumelar	10	-	9.395	7,08%
16	Pekuncen	16	-	9.270	6,98%
17	Cilongok	20	-	10.534	7,93%
18	Karanglewas	13	-	3.250	2,45%
19	Kedungbanteng	14	-	6.022	4,54%
20	Baturraden	12	-	4.553	3,43%
21	Sumbang	19	-	5.342	4,02%
22	Kembaran	16	-	2.592	1,95%
23	Sokaraja	18	-	2.992	2,25%
24	Purwokerto Selatan	0	7	1.375	1,04%
25	Purwokerto Barat	0	7	740	0,56%
26	Purwokerto Timur	0	6	842	0,63%
27	Purwokero Utara	0	7	901	0,68%
Jumlah		**301**	**30**	**132.759**	**100%**

Sumber: Kabupaten Banyumas dalam Angka, 2020

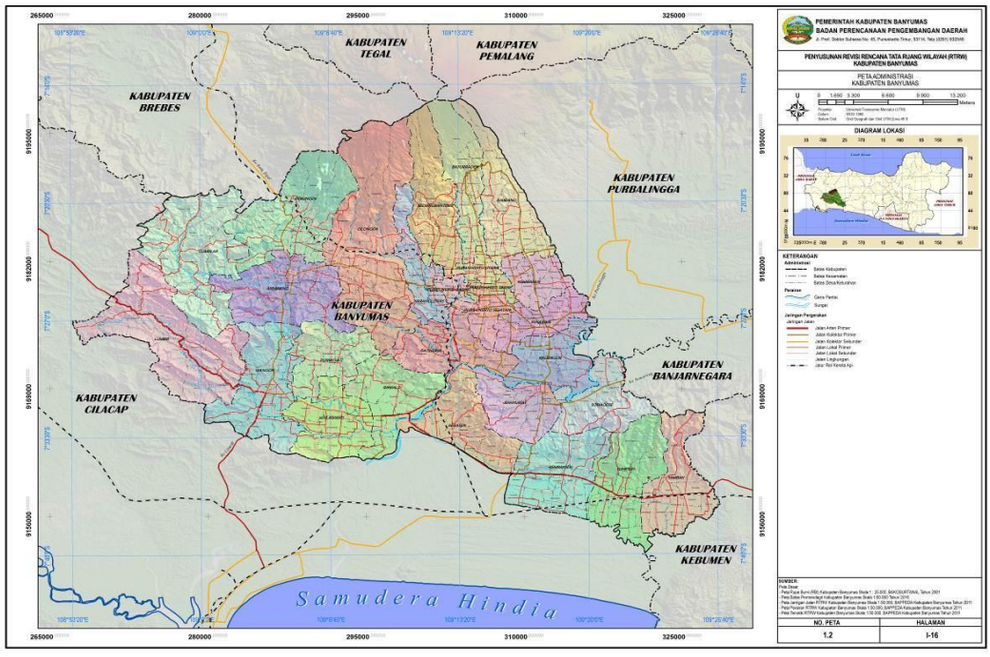

Gambar 2.2
Peta Administrasi Kabupaten Banyumas
Sumber: Revisi RTRW Kabupaten Banyumas, 2018

2.1.1.2 Topografi

Wilayah Kabupaten Banyumas sebesar 62, 29% berada pada ketinggian 25-500 m dpl yaitu seluas 82.695,58 Ha. Wilayah dengan ketinggian tertinggi yaitu Kecamatan Gumelar berada pada 420 meter dpl. Sedangkan wilayah paling rendah terletak di Kecamatan Kemranjen, dengan ketinggian hanya 15 meter dpl.

Wilayah Kabupaten Banyumas berdasarkan bentuk bentang alam dan penyebaran geografisnya, dapat dibagi menjadi 3 (tiga) kategori yaitu:

1. Pegunungan di sebelah utara atau daerah lereng Gunung Slamet dan daerah Pegunungan Serayu Selatan yang membujur hampir sepanjang wilayah kabupaten dan hanya dipisahkan oleh lembah di daerah Jatilawang.
2. Dataran rendah terletak di antara lereng Gunung Slamet dan Pegunungan Serayu Selatan; dan
3. Dataran rendah di sebelah Selatan Pegunungan Serayu Selatan, membujur dari arah Barat sampai dengan perbatasan Kabupaten Kebumen.

Daerah dataran potensial sebagai kawasan budidaya, sedangkan daerah perbukitan dengan faktor pembatas kemiringan dan ketinggian lahan diarahkan untuk kawasan konservasi.

2.1.1.3 Klimatologi

Sebagai daerah beriklim tropis, Kabupaten Banyumas hanya mengenal dua musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Sepanjang tahun 2020 terjadi curah hujan yang fluktuatif selama 145 hari dan beragam menurut bulan. Curah hujan tertinggi tercatat pada bulan Nopember dengan 707 mm^3, sedangkan terendah terjadi pada bulan Agustus sebesar 30 mm^3.

Tabel 2.2
Rata-rata Curah Hujan dan Jumlah Hari Hujan Menurut Bulan di Kabupaten Banyumas Tahun 2020

Bulan	Curah Hujan (mm^3)	Hari Hujan
Januari	421	14
Februari	525	19
Maret	434	14
April	339	11
Mei	301	10
Juni	191	6
Juli	50	2
Agustus	30	1
September	81	3
Oktober	617	20
November	707	24
Desember	658	21

Sumber: Kabupaten Banyumas dalam Angka, 2021

2.1.1.4 Geologi

Kabupaten Banyumas secara fisiografi terletak pada zona pegunungan Serayu Utara, Zona Serayu dan Pegunungan Serayu Selatan. Zona pegunungan Serayu Utara sebagian besar tertutup oleh produk endapan Gunung Slamet sedangkan Pegunungan Serayu Selatan ditempati oleh pegunungan lipatan yang memanjang dari Barat Laut–Tenggara mulai dari Kecamatan Lumbir hingga pegunungan di sekitar Kebasen dan pegunungan di sebelah selatan Banyumas. Antara pegunungan Serayu Utara dengan pegunungan Serayu Selatan dipisahkan oleh zona depresi longitudinal memanjang dari Barat Timur yang disebut zona Serayu. Zona Serayu Selatan pada umumnya ditempati batuan hasil endapan turbidit laut dalam, sedangkan zona Serayu ditempati oleh endapan aluvium gunung api.Secara stratigrafi, Kabupaten Banyumas terdiri atas formasi 1) Endapan Aluvial/Aluvium, 2) Endapan Gunung Api, 3) Formasi Tapak, 4) Formasi Kumbang, 5) Formasi Halang, 6) Anggota Batugamping Formasi Halang, 7). Anggota Breksi Formasi Halang, dan 8) Formasi Rambatan.

Endapan aluvial atau aluvium menempati porsi yang cukup besar di wilayah Kabupaten Banyumas. Penyebarannya di bagian Selatan wilayah Kabupaten Banyumas, yaitu di Kecamatan Kemranjen, Sumpiuh, Tambak, Rawalo, Jatilawang dan Wangon. Kawasan endapan aluvium ini merupakan kawasan yang subur.

Kondisi geologi Kabupaten Banyumas juga menyimpan potensi bahan galian yang mempunyai nilai ekonomis cukup tinggi. Bahan galian yang ada di Kabupaten Banyumas tersebar merata hampir di sebagian besar wilayah Kabupaten Banyumas. Potensi bahan galian yang teridentifikasi adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Potensi Bahan Galian di Kabupaten Banyumas

No	Bahan Galian	Cadangan (Ton)	Penyebaran
1	Andesit	169.090.173,09	Kec. Baturaden, Purwojati, Ajibarang, Gumelar, Wangon, Pekuncen, Karang lewas, Kedungbanteng, Sumbang, Patikraja, dan Cilongok
2	Andesit Homblende	180.451,65	Kec. Kedungbanteng
3	Batu Tempel Adesit	150.536,67	Kec. Kedungbanteng dan Pekuncen
4	Diorit	35.900,00	Kec. Ajibarang & Purwojati
5	Granodiorit	11.566,978	Kec. Kedungbanteng
6	Basalt	21.511.646,08	Kec. Somagede, banyumas, Kebasen, Wangon, Lumbir, Jatilawang, Tambak, Kemranjen, Ajibarang, dan Rawalo
7	Batu Gamping	483.192.403,53	Kec. Ajibarang & Gumelar
8	Phospat	362.900,25	Kec. Ajibarang & Gumelar
9	Kaolin	2.400.000	Kec. Lumbir, Cilongok, Kalibagor, dan Gumelar
10	Pasir	11.597.363,54	S. Serayu, Logawa, Klawing, dan Tajum
11	Trass	560.000	Kec. Kedungbanteng dan Lumbir
12	Sirtu	5.846.340,57	S. Serayu, Logawa, Tajum, Banjaran, Cangkok, dan Krukut
13	Tanah Liat	45.487.328	Seluruh Kabupaten Banyumas
14	Tanah Urug	481.347,28	Seluruh Kabupaten Banyumas
15	Emas	9,6	Kec. Gumelar, Lumbir, Pekuncen, Ajibarang, Cilongok, Kebasen, Rawalo,

No	Bahan Galian	Cadangan (Ton)	Penyebaran
			Banyumas, Sumpiuh, Tambak dan Somagede.

Sumber: RTRW Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031

2.1.1.5 Hidrologi

Kondisi hidrologi menggambarkan potensi sumber daya air yang meliputi distribusi, pergerakan dan kualitas sumber daya air. Kondisi hidrologi dipengaruhi oleh struktur tanah, topografi, geologi, geomorfologi dan curah hujan. Sumberdaya air di wilayah Kabupaten Banyumas meliputi curah hujan, air permukaan (sungai dan mata air) dan air tanah. Sungai-sungai yang ada di wilayah Kabupaten Banyumas mempunyai debit (Q) sebesar 45.456.342 m3/hari atau 16.591.564.830 m3/tahun yang berasal dari sungai besar, seperti Sungai Serayu, Sungai Tajum, Sungai Kranji, Sungai Pelus, Sungai Banjaran, Sungai Logawa serta sungai-sungai kecil lainnya.

Kondisi hidrologi menyediakan potensi sumber daya air yang diperlukan oleh berbagai kegiatan budidaya manusia. Air tanah yang telah termanfaatkan di wilayah Kabupaten Banyumas berasal dari Cekungan Air Tanah Purwokerto–Purbalingga dengan jumlah aliran air tanah bebas (Q1) sebesar 503.000.000 m3/tahun dan jumlah aliran air tanah tertekan (Q2) sebesar 10.000.000 m3/tahun; Cekungan Air Tanah Kroya jumlah aliran air tanah bebas (Q1) sebesar 65.000.000 m3/tahun dan Cekungan Air Tanah Cilacap dengan jumlah aliran air tanah bebas (Q1) sebesar 43.000.000 m3/tahun.

Kabupaten Banyumas termasuk dalam Daerah Aliran Sungai (DAS) Cimeneng, Serayu, Ijo, dan Tipar. Keempat DAS ini mencakup beberapa sungai dan anak sungai yang ada di wilayah Kabupaten Banyumas. Sungai-sungai tersebut merupakan sumber daya pertanian, sumber air baku untuk air minum, dan sumber energi terbarukan. Namun demikian potensi air permukaan dan air tanah di Kabupaten Banyumas tidak merata di seluruh wilayah. Beberapa bagian wilayah Kabupaten Banyumas tidak memiliki potensi air permukaan sedangkan potensi air tanah sulit untuk diperoleh seperti terdapat di beberapa desa di wilayah Kecamatan Gumelar dan Kecamatan Cilongok. Beberapa desa di wilayah Kabupaten Banyumas juga tidak berada pada cekungan air tanah dan memiliki kualitas air tanah yang kurang baik.

Berdasarkan KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 potensi ketersediaan air permukaan dibandingkan dengan kebutuhan air untuk penduduk, irigasi pertanian dan industri maka menunjukkan bahwa daya dukung air Kabupaten Banyumas tahun 2019 sebesar 1,26 yang berarti daya dukung airnya termasuk dalam kategori daya dukung air bersyarat atau sedang. Sebagian besar kecamatan memiliki status daya dukung air sedang atau bersyarat kecuali Kecamatan Jatilawang, Kalibagor, Karanglewas, Kembaran, Kemranjen, Patikraja, Rawalo, Sokaraja, Sumpiuh dan Tambak yang dalam kondisi terlampaui. Kecamatan di Kabupaten Banyumas yang memiliki status daya dukung air kondisi baik karena nilainya lebih dari 3 adalah Kecamatan Gumelar dan Lumbir. Kecamatan dengan daya dukung air terlampaui berdasarkan identifikasi potensi ketersediaan dan kebutuhan disebabkan karena faktor tingginya kebutuhan air untuk pertanian terutama untuk pertanian lahan basah yang relatif besar,

bahkan dibandingkan dengan potensi ketersediaan air permukaannya. Kondisi tersebut pada waktu tertentu dapat menyebabkan konflik kebutuhan antara air untuk kebutuhan sehari-hari penduduk dengan kebutuhan pertanian. Untuk keberlanjutan daya dukung air dilakukan upaya-upaya konservasi sumber daya air dengan pembuatan biopori, sumur resapan, dan konservasi mata air yang diawali dengan pendataan mata air.

2.1.1.6 Penggunaan Lahan

Luas wilayah Kabupaten Banyumas adalah 132.759 Ha atau sekitar 4, 08 % dibanding dari luas wilayah Jawa Tengah (3.254 juta Ha). Luas wilayah tersebut terbagi menjadi lahan sawah, lahan pertanian bukan sawah dan lahan bukan pertanian. Berikut luas wilayah Kabupaten Banyumas menurut penggunaannya.

Tabel 2.4
Luas Wilayah Kabupaten Banyumas Menurut Penggunaan Lahan Tahun 2015–2019

No.	Luas Penggunaan Lahan (Ha)	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Lahan Pertanian	85.187	101.554	102.420	101.272	100.712
	a. Lahan Sawah	32.600	32.528	32.163	31.943	31.915
	b. Lahan Pertanian Bukan Sawah	52.587	69.026	70.257	69.329	68.798
2.	Lahan Bukan Pertanian	47.572	31.205	30.339	31.487	32.047
	Total	132.759	132.759	132.759	132.759	132.759

Sumber: Kabupaten Banyumas Dalam Angka, 2016, Data dan Informasi Kabupaten Banyumas 2017-2020 Diolah

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa, luas penggunaan lahan pertanian yang terdiri dari lahan sawah dan lahan pertanian bukan sawah mengalami penurunan tiap tahunnya, selama 3 tahun terakhir dari 102.420 Ha di tahun 2017 menjadi 101.272 di Tahun 2018 dan menurun kembali menjadi 100.712 di Tahun 2019, sedangkan luas lahan bukan pertanian semakin meningkat dari 30.339 Ha di tahun 2017 menjadi 31.487 Ha di Tahun 2018 dan meningkat kembali menjadi 32.047 Ha di Tahun 2019. Hal ini diakibatkan karena terjadinya kecenderungan penggunaan lahan untuk kawasan terbangun yang semakin meningkat serta kebutuhan untuk kegiatan non pertanian yang semakin meluas. Kawasan terbangun umumnya digunakan untuk pembangunan perumahan/permukiman, industri serta jasa dan perdagangan, sementara Kabupaten Banyumas belum menetapkan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagai salah satu instrument pengendalian alih fungsi lahan.

Dalam KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Banyumas terdapat analisis daya dukung lahan terbangun (DDLB) untuk kepentingan pembangunan. Daya dukung lahan untuk kawasan terbangun mempertimbangkan koefisien luas lahan terbangun, luas wilayah, dan luas lahan terbangun. DDLB Kabupaten Banyumas sebesar 2, 69 termasuk daya dukung lahan permukiman sedang mendekati baik. Hal tersebut dimaksudkan bahwa di Kabupaten Banyumas masih memiliki daya tampung bangunan untuk pengembangan kegiatan terbangun. Jika dilihat DDLB pada setiap kecamatan di Kabupaten Banyumas, kecamatan yang berada pada kategori terlampaui atau buruk terdapat di

seluruh kecamatan di kawasan perkotaan Purwokerto yaitu Kecamatan Purwokerto Barat, Purwokerto Timur, Purwokerto Selatan dan Purwokerto Utara, sedangkan untuk kategori bersyarat/sedang terdapat 15 kecamatan, untuk kategori baik terdapat 8 kecamatan.

Dalam rangka mempertahankan daya dukung lahan tahun 2022-2023 dilaksanakan program kegiatan penyelenggaraan penataan ruang yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan tata ruang, penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B), dan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) sehingga pemanfaatan ruang terutama lahan tidak melebihi daya dukungnya.

2.1.1.7 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Dalam KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Banyumas 2018-2023 kondisi lingkungan hidup digambarkan oleh kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, kinerja jasa ekosistem, kondisi sumber daya alam, bencana dan kerentanan perubahan iklim, emisi gas rumah kaca, serta kemampuan penyediaan keanekaragaman hayati, merupakan muatan dasar KLHS. Hasil analisis kondisi lingkungan hidup menjadi bagian dari gambaran umum kondisi daerah pada aspek geografis dan demografis, yaitu analisis daya dukung dan daya tampung untuk pembangunan daerah.

Kapasitas daya tampung lingkungan hidup meliputi daya tampung lahan yang dituangkan dalam bentuk kemampuan lahan. Sedangkan daya dukung lingkungan hidup meliputi daya dukung pangan, air dan lahan, dengan komposisi bobot untuk tata ruang adalah 30% untuk daya dukung lahan, 30% daya dukung air dan 40% untuk daya dukung pangan. Status daya dukung dalam kondisi baik jika nilainya di atas 3, dinyatakan bersyarat jika nilainya antara 1–3 dan buruk atau terlampaui jika kurang dari 1.

Penentuan daya dukung lingkungan hidup dilakukan dengan cara mengetahui kapasitas lingkungan alam dan sumber daya untuk mendukung kegiatan manusia/penduduk yang menggunakan ruang bagi kelangsungan hidup. Besarnya kapasitas tersebut di suatu tempat dipengaruhi oleh keadaan dan karakteristik sumber daya yang ada di hamparan ruang yang bersangkutan. Kapasitas lingkungan hidup dan sumber daya akan menjadi faktor pembatas dalam penentuan pemanfaatan ruang yang sesuai. Daya dukung lingkungan hidup terbagi menjadi 2 (dua) komponen, yaitu kapasitas penyediaan *(supportive capacity)* dan kapasitas tampung limbah *(assimilative capacity).*

Agar perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di suatu wilayah sesuai dengan kapasitas lingkungan hidup dan sumber daya, maka perencanaan yang dikembangkan harus mengindahkan kemampuan lahan. Perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan akan lahan dan air di suatu wilayah menentukan keadaan surplus atau defisit dari lahan dan air untuk mendukung kegiatan budidaya masyarakat.

Perhitungan daya dukung lingkungan hidup di Kabupaten Banyumas, menggunakan data utama yaitu peta tutupan lahan yang digunakan dalam penyusunan RTRW Kabupaten Banyumas 2018–2038

yang telah mendapatkan persetujuan dari BIG (Badan Informasi Geospasial) dan menjadi rujukan dalam analisis serta rencana tata ruang.

Berdasarkan ketiga perhitungan daya dukung yaitu DD air, DD pangan dan DD lahan bangunan di atas maka dapat disimpulkan untuk daya dukung lingkungan masing-masing kecamatan.

Tabel 2.5
Daya Dukung Lingkungan Kabupaten Banyumas

Kecamatan	DD Terbangun	DD Pangan	DD Air	DD Lingkungan	STATUS
	30%	40%	30%		
Ajibarang	2,49	1,04	1,40	1,58	Bersyarat
Banyumas	1,51	0,81	1,86	1,33	Bersyarat
Baturaden	3,78	1,35	2,68	2,48	Bersyarat
Cilongok	3,45	1,43	1,98	2,20	Bersyarat
Gumelar	5,66	1,38	3,76	3,38	Baik
Jatilawang	2,79	2,06	0,81	1,90	Bersyarat
Kalibagor	2,66	1,45	0,90	1,65	Bersyarat
Karanglewas	2,05	1,67	0,99	1,58	Bersyarat
Kebasen	2,76	1,15	1,26	1,66	Bersyarat
Kedungbanteng	4,32	1,77	2,37	2,72	Bersyarat
Kembaran	1,70	1,53	0,57	1,30	Bersyarat
Kemranjen	2,17	1,99	0,95	1,73	Bersyarat
Lumbir	5,33	1,43	4,76	3,60	Baik
Patikraja	2,86	1,86	0,92	1,88	Bersyarat
Pekuncen	4,07	1,78	1,31	2,33	Bersyarat
Purwojati	2,45	2,28	1,03	1,96	Bersyarat
Purwokerto Barat	0,77	0,29	1,47	0,79	Terlampaui
Purwokerto Selatan	0,85	0,20	1,45	0,77	Terlampaui
Purwokerto Timur	0,63	0,13	1,51	0,69	Terlampaui
Purwokerto Utara	0,85	0,52	1,41	0,89	Terlampaui
Rawalo	3,05	2,07	0,82	1,99	Bersyarat
Sokaraja	1,37	1,41	0,73	1,20	Bersyarat
Somagede	3,82	1,14	1,61	2,09	Bersyarat
Sumbang	2,54	1,81	1,54	1,95	Bersyarat
Sumpiuh	2,89	1,87	0,98	1,91	Bersyarat
Tambak	2,18	2,71	0,88	2,00	Bersyarat
Wangon	2,74	1,33	1,33	1,75	Bersyarat
KAB. BANYUMAS	2,69	1,42	1,26	1,75	Bersyarat

Sumber : KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023, 2020

Berdasarkan daya dukung lingkungan di atas menunjukkan bahwa kondisi daya dukung Kabupaten Banyumas adalah 1, 75 atau dalam kategori sedang atau bersyarat. Ditinjau dari masing-masing kecamatan maka seluruh kecamatan Purwokerto baik barat, selatan, timur dan utara dalam kondisi terlampaui. Daya dukung lingkungan dengan status baik berada di Kecamatan Gumelar dan Lumbir.

Daya dukung terlampaui artinya secara administrasi wilayah tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhan terutama pangan dan air sendiri, serta dari sisi lahan kepadatannya sudah sangat tinggi. Dengan demikian pemenuhan kebutuhan akan air dan pangan di wilayah perkotaan akan tergantung dari wilayah lainnya di Kabupaten Banyumas. Jika dilihat dari sisi lahan terbangun maka model pembangunan vertikal harus menjadi pendekatan yang digunakan dalam pemenuhan kebutuhan permukiman maupun perdagangan jasa. Selain itu pengembangan kawasan perkotaan ke kecamatan sekitarnya juga

menjadi upaya yang perlu dilakukan untuk mengantisipasi daya dukung lahan terbangun di kawasan perkotaan Purwokerto.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan daya dukung lingkungan diperlukan upaya-upaya pengendalian pemanfaatan ruang, pengendalian pencemaran dan pemulihan pencemaran, penyusunan kebijakan lingkungan hidup dan penegakan peraturan lingkungan hidup, peningkatan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan hidup (edukasi dan advokasi lingkungan hidup), serta penyediaan sumber daya manusia Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD).

2.1.1.8 Potensi Pengembangan Wilayah

Potensi pengembangan wilayah Kabupaten Banyumas sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) terdiri atas: kawasan peruntukan pertanian, kawasan pertanian tanaman pangan, kawasan peruntukan hortikultura, peruntukan perkebunan, kawasan peruntukan peternakan, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan pertambangan mineral, kawasan pertambangan panas bumi, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan pariwisata, dan kawasan peruntukan permukiman. Rencana pola ruang yang menggambarkan distribusi peruntukan ruang di wilayah Kabupaten Banyumas, meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya sebagai acuan pengembangan wilayah Kabupaten Banyumas sebagaimana gambar berikut:

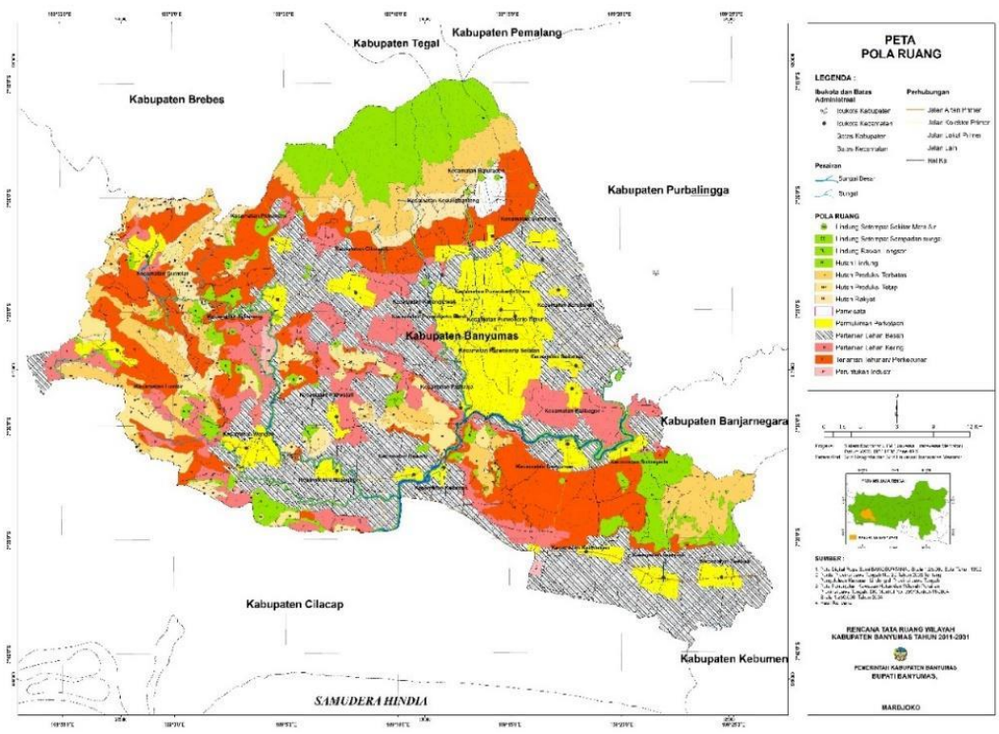

Gambar 2.3
Peta Pola Ruang
Sumber RTRW Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031

Selanjutnya rencana struktur ruang sebagai acuan pengembangan susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi

masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional adalah sebagaimana gambar berikut:

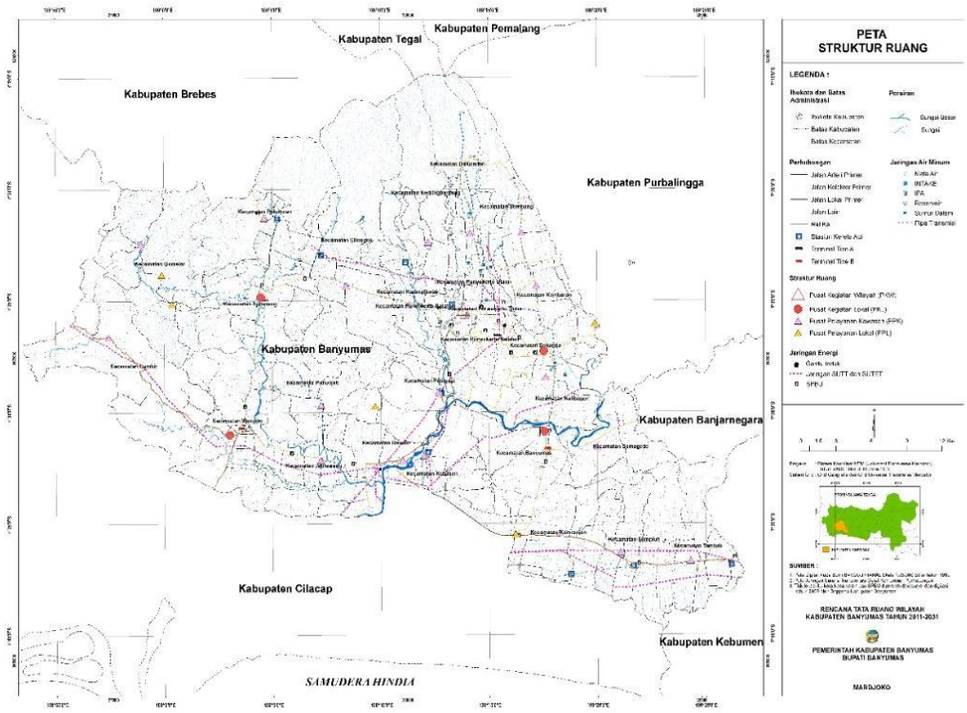

Gambar 2.4
Peta Struktur Ruang
Sumber RTRW Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031

Potensi pengembangan wilayah Kabupaten Banyumas sebagai kawasan strategis provinsi berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 terdiri atas: kawasan strategis Provinsi dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi yaitu Kawasan Agropolitan Mangga Emas (Pemalang, Purbalingga, Tegal, Brebes, Banyumas) dan kawasan pariwisata terpadu Lereng Gunung Slamet dan sekitarnya; kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup yaitu Kawasan Gunung Slamet.

Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dan Perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Provinsi Jawa Tengah Perkotaan Purwokerto ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW). Pusat Kegiatan Wilayah merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota. Perkotaan Purwokerto sebagai Pusat Pengembangan Wilayah merupakan kota utama di wilayah Kabupaten Banyumas dan dalam kerangka sistem perkotaan regional dan nasional merupakan salah satu pengembangan kota pertumbuhan nasional yang diarahkan untuk revitalisasi dan percepatan pengembangan melalui pengembangan dan peningkatan fungsi.

Beberapa kota kecamatan mempunyai tingkat perkembangan wilayah dan tingkat konsentrasi kegiatan yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan kota kecamatan lainnya. Perkotaan tersebut meliputi: 1) perkotaan Ajibarang; 2) perkotaan Wangon; 3) perkotaan Sokaraja; 4) perkotaan Banyumas; dan 5) perkotaan Sumpiuh. Dalam

perubahan RTRW Provinsi Jawa Tengah dan revisi rencana tata ruang wilayah Kabupaten Banyumas perkotaan tersebut akan dikembangkan menjadi Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Pusat Kegiatan Lokal yaitu kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.

Pengembangan PKL diharapkan dapat menjadi pusat kegiatan dan pelayanan wilayah dalam lingkup lokal yang mampu menampung penduduk beserta aktifitasnya dalam kerangka mengurangi arus migrasi ke Kawasan Perkotaan Purwokerto sehingga diharapkan tercapai distribusi pelayanan dan pembangunan di setiap wilayah Kabupaten Banyumas secara seimbang.

Dalam rangka meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi kawasan yang berdampak pada perekonomian regional dan nasional, dilakukan percepatan pembangunan di Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga–Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang. Untuk mendukung pembangunan kawasan tersebut dilakukan pengembangan Kawasan Banjarnegara-Purbalingga-Banyumas-Cilacap-Kebumen (Kawasan Barlingmascakeb), Kawasan Pekalongan-Batang (Kawasan Petanglong), Kawasan Jepara-Kudus-Pati (Kawasan Wanarakuti), Kawasan Rembang-Blora (Kawasan Banglor), dan Kawasan Kota Surakarta Boyolali-Sukoharjo-Karanganyar-Wonogiri-Sragen-Klaten (Kawasan Subosukawonosraten). Sebagai pedoman percepatan pembangunan di kawasan tersebut Pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal–Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang, dengan lampiran Rencana Induk Pembangunan Kawasan (Rencana Induk). Rencana Induk dimaksud berfungsi sebagai pedoman bagi Menteri dan Kepala Lembaga untuk menetapkan kebijakan sektoral dalam rangka pelaksanaan percepatan pembangunan Kawasan dan pedoman untuk penyusunan kebijakan percepatan pembangunan kawasan dimaksud pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota terkait.

Kabupaten Banyumas merupakan bagian Kawasan Barlingmascakeb yang akan dikembangkan untuk mendukung dan memberikan nilai tambah dalam percepatan pembangunan ekonomi kawasan prioritas pengembangan Brebes-Tegal-Pemalang. Berdasarkan Perpres Nomor 79 tahun 2019 di Kabupaten Banyumas terdapat 7 Program/Proyek dalam strategis, yaitu: a. Pembangunan Waduk Kaliurip di Kecamatan Purwojati; b. Pembangunan Jembatan Kali Serayu yang menghubungkan Desa Pegalongan–Desa Mandirancan Kecamatan Patikraja; c. Pembangunan Anjungan Pelayanan Jalan (APJ); d. Pembangunan Fly over Tambaknegara; e. Pembangunan Fly over Veteran; f. Peningkatan Terminal Tipe A; g. Pembangunan STA (Sub Terminal Agrobisnis).

Selain program/proyek strategis tersebut dalam Perpres Nomor 79 juga terdapat program lintas kawasan yang dilaksanakan di Kabupaten Banyumas, yaitu: 1) Pembangunan Tol Pejagan-Cilacap, 2) Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Jawa Tengah, 3) Pengembangan amenitas pariwisata berbasis homestay/desa wisata, 4) Pengembangan ekonomi berbasis koperasi dan UMKM, 5) Pengembangan ekonomi

berbasis pesantren, 6) Penanggulangan dan pencegahan stunting dan gizi buruk, 7) Pengadaan alat kesehatan di 7 RS Provinsi, 8) Pengembangan SDM bidang IPTEK, 9) Pembangunan dan Pengembangan prasarana SMK unggulan (sektor industri, pariwisata, industri kreatif, ketahanan pangan, kemaritiman).

Kesiapan dan progres pelaksanaan proyek strategis tersebut sampai dengan tahun 2020 antara lain sebagai berikut:

- Detail Engginering Design (DED) Anjungan Pelayanan Jalan telah disusun pada tahun 2018;
- Pembangunan Jembatan Kali Serayu Desa Pegalongan Kecamatan Patikraja-Desa Mandirancan Kecamatan Kebasen pada tahun 2021 masih proses pembangunan bangunan atas, pengaman bawah dan sebagian oprit jembatan dengan anggaran 18, 5 Milyar dengan anggaran APBD. Usulan dukungan anggaran untuk akses jalan di tolak oleh Pemerintah Pusat dikarenakan akses jalan tersebut tidak masuk dalam proyek strategis Perpres 79 Tahun 2019. Konstruksi jembatan sebagian besar sudah ditangani dengan APBD dengan bantuan gelagar dari Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebesar 10 Milyar;
- Pembangunan Fly Over Tambaknegara telah dikoordinasikan dengan Pemerintah namun masih belum ada gambaran trase, meskipun telah dilaksanakan uji tanah di sekitar lokasi oleh Kementrian PUPR. Sehingga belum bisa diputuskan langkah berikutnya. Tanpa trase berarti belum diketahui titik-titik sebagai acuan perhitungan pengadaan tanah dan seterusnya;
- Pembangunan Fly Over Veteran sudah terdapat usulan trase dari Kementrian Perhubungan, namun belum ada tindak lanjut, sehingga juga belum bisa melangkah lebih lanjut sebelum ada persetujuan trase;
- Tahun 2020 disusun dokumen pengadaan tanah embung Kaliurip. Paket pekerjaan tersebut sudah termasuk studi kelayakan embung Kaliurip. Selanjutnya tahun 2021 disusun dokumen UKL/ UPL dan proses pengadaan tanah.

Koordinasi dengan Pemerintah perlu terus dilakukan untuk mengoptimakan pelaksanaan proyek strategis dalam rencana induk. Pemerintah Kabupaten Banyumas perlu memastikan program, kegiatan, dan sub kegiatan pendukung sudah ada dalam dokumen perencanaan.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan dukungan untuk pengembangan pada wilayah pengembangan Barlingmascakeb, khususnya di Kabupaten Banyumas melalui program/kegiatan antara lain: a) Peningkatan aksesibilitas kawasan melalui fasilitasi pembangunan infrastruktur perhubungan strategis, berupa pengadaan tanah untuk pembangunan Bandara Jendral Besar Soedirman Purbalingga, dan FGD reaktivasi jalur KA Purwokerto-Wonosobo; b) Pengembangan angkutan umum massal berbasis jalan (Trans Jateng) pada Koridor Purwokerto – Purbalingga; c) Peningkatan penyediaan air baku melalui pembangunan Waduk Kaliurip Kabupaten Banyumas.

Peningkatan aksesibilitas kawasan dengan pengembangan Bandara Jendral Besar Soedirman dan layanan transportasi masal Trans Jateng membuka peluang pemasaran yang lebih luas bagi barang dan jasa dari Kabupaten Banyumas. Potensi pariwisata di Kabupaten Banyumas dengan dukungan jasa akomodasi dan kemudahan akses

dapat dikembangkan untuk kegiatan Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition/MICE (Pertemuan, Insentif, Konvensi, dan Pameran). Dalam industri pariwisata atau pameran MICE adalah suatu jenis kegiatan pariwisata di mana suatu kelompok besar, biasanya direncanakan dengan matang, berangkat bersama untuk suatu tujuan.

Untuk mendukung pengembangan Bandara Jendral Besar Soedirman Pemerintah Kabupaten Banyumas mengintegrasikan pengembangan angkutan masal BTS yang dengan angkutan masal Trans Jateng yang dikembangkan Provinsi Jawa Tengah, khususnya Jalur Terminal Bulupitu-Kebondalem.

2.1.1.9 Wilayah Rawan Bencana

Berdasarkan RTRW Kabupaten Banyumas tahun 2011-2031, kawasan rawan bencana alam terdiri atas kawasan rawan bencana tanah gerakan tanah, kawasan rawan bencana banjir, kawasan rawan bencana angin topan, dan kawasan rawan bencana alam letusan gunung berapi. Dalam perubahan RTRW Kabupaten Banyumas telah ditambahkan analisis mengenai kawasan rawan bencana kekeringan, namun tidak lagi memasukkan kawasan rawan bencana angin topan atau puting beliung.

Karakteristik geografi wilayah tidak hanya membentuk potensi bagi pengembangan wilayah namun juga menjadi potensi bagi terjadinya bencana. Potensi bencana di Kabupaten Banyumas terdiri atas bencana gerakan tanah baik karena kemiringan lahan maupun dilalui sesar/patahan, rawan bencana banjir, kekeringan, dan rawan letusan gunung berapi. Wilayah rawan bencana gerakan tanah atau sering lebih dikenal dengan longsor merupakan jenis bencana yang terdapat di hampir seluruh kecamatan. Hal ini terkait dengan kondisi fisik sebagian wilayah Kabupaten Banyumas yang berada pada tingkat kelerengan tinggi, serta adanya sesar atau patahan yang juga mempengaruhi kerawanan bencana gerakan tanah. Terkait dengan bencana alam lainnya juga terdapat wilayah yang rawan terhadap letusan gunung api yang bersumber dari Gunung Slamet. Terdapat 5 kecamatan yang berada di sekitar Gunung Slamet yaitu Kecamatan Baturraden, Karanglewas, Kedungbanteng, Purwokerto Utara dan Sumbang. Bencana alam lain di Kabupaten Banyumas adalah banjir dan kekeringan yang memiliki keterkaitan dengan iklim, yang masing-masing tersebar di 7 kecamatan dan 16 kecamatan. Wilayah yang tidak memiliki kerawanan bencana terdapat di 3 kecamatan berdasarkan pemetaan bencana yaitu Kecamatan Kembaran, Purwokerto Barat dan Purwokerto Timur.

Tabel 2.6
Wilayah Rawan Bencana di Kabupaten Banyumas

KECAMATAN	Banjir	Gerakan Tanah	Sesar	Kekering an	Letusan Gunung Api
Ajibarang		√	√	√	
Banyumas	√	√			
Baturraden		√			√
Cilongok		√	√		
Gumelar		√		√	
Jatilawang		√		√	
Kalibagor	√			√	
Karanglewas		√	√		√

KECAMATAN	Banjir	Gerakan Tanah	Sesar	Kekering an	Letusan Gunung Api
Kebasen	√	√	√	√	
Kedungbanteng		√			√
Kembaran					
Kemranjen	√	√	√	√	
Lumbir		√		√	
Patikraja		√		√	
Pekuncen		√	√		
Purwojati		√	√	√	
Purwokerto Barat					
Purwokerto Selatan				√	
Purwokerto Timur					
Purwokerto Utara					√
Rawalo		√		√	
Sokaraja				√	
Somagede	√	√	√	√	
Sumbang					√
Sumpiuh	√	√	√	√	
Tambak	√	√		√	
Wangon		√	√	√	

Sumber: KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023, 2020

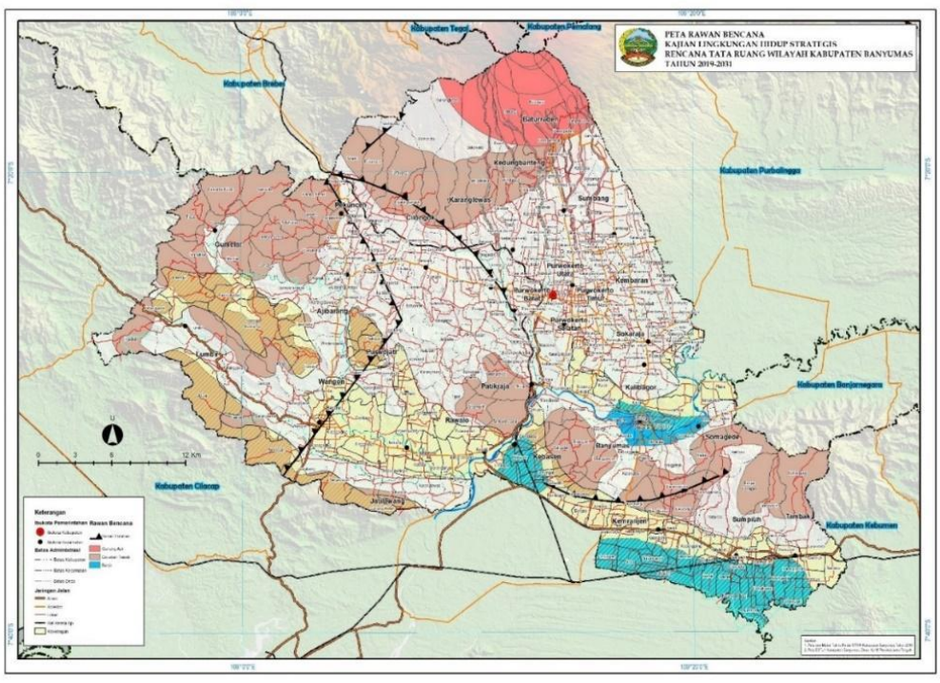

Gambar 2.5
Peta Rawan Bencana Kabupaten Banyumas
Sumber: KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023, 2020

Berdasarkan analisis dari Data Informasi Bencana Indonesia (http://dibi.bnpb.go.id/dibi/), Kabupaten Banyumas mengalami peningkatan kejadian longsor, angin puting beliung dan banjir selama dua puluh tahun terakhir (1998-2019), dengan kejadian tertinggi untuk longsor sebanyak 167 kejadian, angin puting beliung 108 kejadian, dan banjir 63 kejadian. Adapun salah satu dampak signifikan dari kejadian bencana tersebut adalah jumlah rumah yang mengalami rusak berat

karena kejadian bencana yang mengindikasikan kondisi mutu bangunan yang kurang baik, yaitu 642 rumah karena longsor, 599 rumah karena banjir, dan 531 rumah karena angin puting beliung.

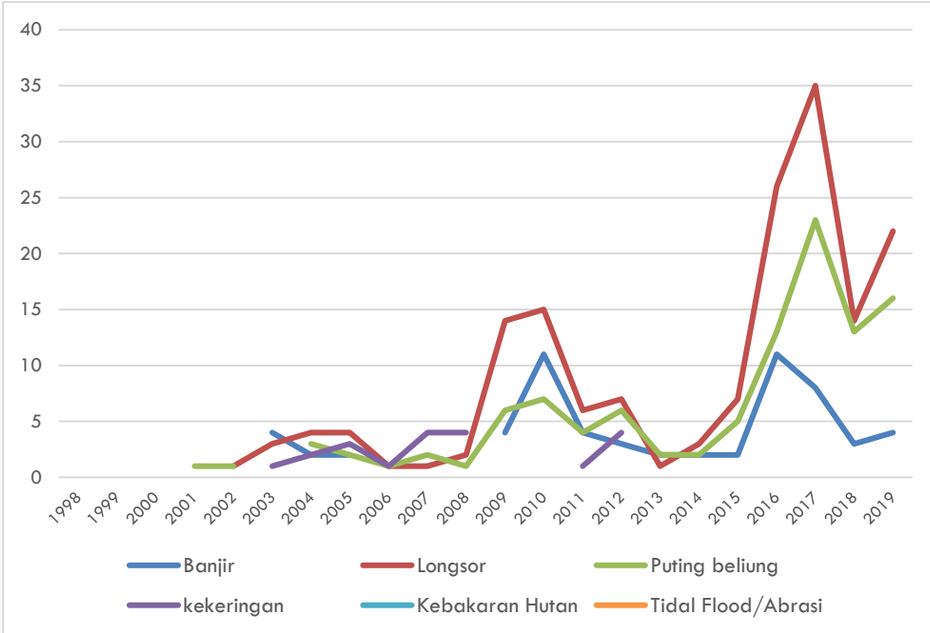

Gambar 2.6
Grafik Kejadian Bencana Kabupaten Banyumas 1998 – 2019
Sumber: KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023, 2020

Selanjutnya berdasarkan data Indeks Risiko Bencana Indonesia, Kabupaten Banyumas memiliki indeks 207.2 yaitu kategori risiko tinggi, terdiri dari risiko tinggi terhadap banjir, gempa bumi, tanah longsor, gunung meletus, kekeringan, dan kebakaran lahan dan hutan, dan risiko sedang terhadap cuaca ekstrem. Berdasarkan hasil pemodelan multi risiko bencana di Kabupaten Banyumas, setidaknya 51,785 % wilayah Kabupaten Banyumas termasuk ke dalam risiko tinggi, 18,960% termasuk ke dalam risiko sedang dan 29,255% termasuk ke dalam risiko rendah terhadap bencana banjir dan tanah longsor (Gunadi et al, 2015). Berdasarkan dokumen Kajian Risiko Bencana Provinsi Jawa Tengah 2016-2020, Kabupaten Banyumas memiliki potensi luasan bahaya banjir seluas 54,682 hektar dengan potensi kerugian 1,4 triliun rupiah dan potensi luasan bahaya cuaca ekstrem seluas 100,507 hektar, dengan potensi kerugian 5,8 triliun rupiah.

Beberapa wilayah di Kabupaten Banyumas diidentifikasi sebagai wilayah rawan bencana banjir meliputi Kecamatan Banyumas, Kalibagor, Kebasen, Tambak, Somagede, Sumpiuh, dan Kemranjen, sebagaimana gambar berikut:

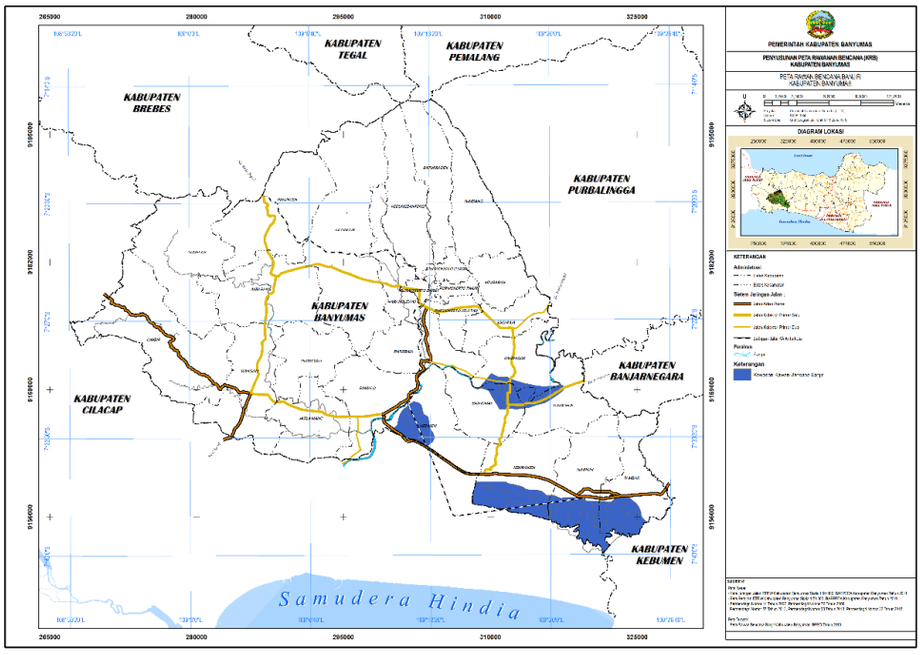

Gambar 2.7
Peta Rawan Bencana Banjir Kabupaten Banyumas
Sumber: Penyusunan RTRW Kabupaten Banyumas

Banjir yang terjadi di Kabupaten Banyumas terjadi karena topografi wilayah, pengaruh iklim dan karena kondisi drainase yang kurang optimal. Banjir di kawasan perkotaan diperburuk dengan banyaknya sampah yang masuk dan menumpuk di saluran air pembuangan. Beberapa kejadian banjir di Purwokerto lebih banyak disebabkan oleh permasalahan drainase yang secara teknis tidak mampu menampung hujan lebat serta banyaknya penumpukan sampah akibat rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengelola lingkungan. Selain itu juga meningkatnya kawasan terbangun yang tidak diikuti sistem pengelolaan drainase yang terintegrasi akan menimbulkan dampak genangan atau banjir lokal yang bisa terjadi baik di dataran tinggi maupun rendah.

Terkait dengan tingkat kerentanan terhadap iklim yang ditentukan oleh indikator yang mempengaruhi keterpaparan, sensitivitas, dan kapasitas adaptasi suatu sistem. Ketiga faktor tersebut berubah menurut waktu sejalan dengan dilaksanakannya kegiatan pembangunan dan upaya-upaya adaptasi. Tingkat keterpaparan dan tingkat sensitivitas dapat dicerminkan oleh kondisi biofisik dan lingkungan, serta kondisi sosial-ekonomi. Untuk mendukung upaya pengurangan risiko dan dampak iklim tersebut, Direktorat Jenderal Pengendalian Iklim melalui Direktorat Adaptasi iklim mengembangkan Sistem Informasi Indeks dan Data Kerentanan Iklim (SIDIK) yang menyajikan data dan informasi kerentanan iklim di seluruh Indonesia. Saat ini SIDIK memanfaatkan data sosial ekonomi, demografi, geografi, dan lingkungan infrastruktur dari PODES. Tujuan dari pemetaan tersebut adalah untuk menyajikan informasi kerentanan iklim untuk mendukung kebijakan pembangunan dalam upaya perencanaan adaptasi serta pengurangan risiko dan dampak iklim. Berikut tingkat kerentanan perubahan iklim di Kabupaten Banyumas.

Tabel 2.7
Tingkat Kerentanan terhadap Perubahan Iklim di Kabupaten Banyumas

Kategori	Desa	Persen (%)
Tidak Rentan	21	6
Kurang Rentan	85	26
Agak Rentan	225	68

Sumber: KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023, 2020

Berdasarkan tabel di atas kategori agak rentan lebih besar dibandingkan dengan kategori kerentanan terhadap perubahan iklim lainnya, sehingga kewaspadaan terhadap potensi bencana perubahan iklim perlu ditingkatkan di seluruh wilayah Kabupaten Banyumas.

2.1.1.10 Kinerja Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional, Pemerintah Kabupaten Banyumas memiliki kewajiban untuk menyusun inventarisasi GRK. Penyusunan inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) di Kabupaten Banyumas yang telah dilaksanakan secara berkelanjutan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) terhadap sumber-sumber emisi GRK. Inventarisasi GRK Tahun 2020 memuat tingkat emisi GRK di Kabupaten Banyumas tahun 2019, dan status dan kecenderungan emisi selama 5 (lima) tahun terakhir (periode 2015-2019).

Inventarisasi GRK tahun 2020 berupaya mencakup seluruh sektor dan kategori yang penting dan signifikan menghasilkan emisi GRK di wilayah Kabupaten Banyumas dengan sumber data tahun 2019. Kabupaten Banyumas hanya dapat memenuhi 22 kategori dari 32 kategori berdasarkan aplikasi pada SIGNSMART, sedangkan 8 data dinyatakan tidak tersedia *(Not Applicable)*, 1 data tidak diestimasikan *(Not Estimated)* yaitu data konsumsi karbonat untuk industri makanan dan minuman di Kabupaten Banyumas, dan 1 data telah dimasukkan ke dalam kategori lainnya *(Including Elsewhere)* yaitu pada kategori Pembakaran Bahan Bakar di Sektor Lainnya (Pertanian, Perikanan, dll).

Hasil perhitungan tingkat emisi di Kabupaten Banyumas tahun 2019 disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.8
Tingkat Emisi Gas Rumah Kaca Kabupaten Banyumas Tahun 2019

NO.	SEKTOR	CO_2 Eq (Gg)
1.	Pengadaan dan Penggunaan Energi	1.663,03
2.	Proses Industri dan Penggunaan Produk (IPPU)	878,21
3.	Pertanian	841,28
4.	Kehutanan dan Penggunaan Lahan Lainnya	351,66
5.	Pengelolaan Limbah	180,33
	TOTAL	**3.914,51**

Sumber: Hasil Perhitungan pada Aplikasi SIGNSMART, 2020

Dari kelima sektor tersebut, dapat dilihat proporsi kontribusi emisi GRK pada grafik berikut ini:

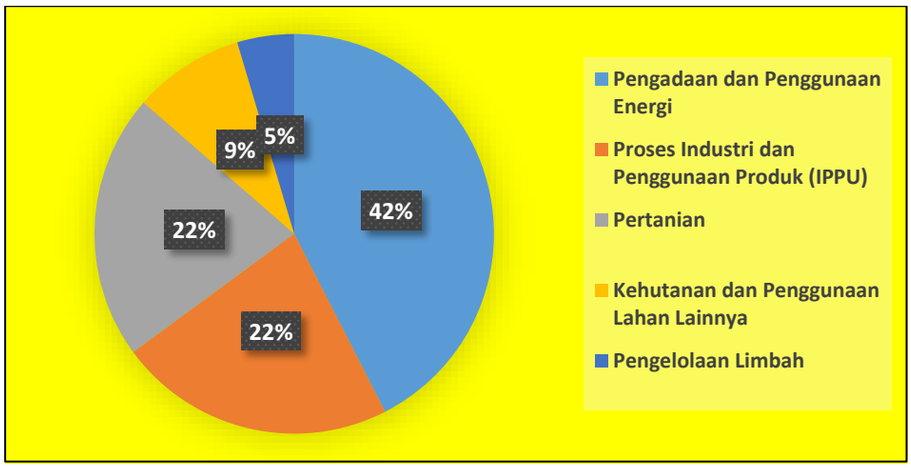

Gambar 2.8
Proporsi Emisi GRK per Sektor Penghasil Emisi di Kabupaten Banyumas Tahun 2019
Sumber : Diolah dari Hasil Perhitungan pada Aplikasi SIGNSMART, 2020

Status dan kecenderungan emisi GRK Kabupaten Banyumas pada tahun 2015-2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.9
Status Emisi GRK di Kab. Banyumas Tahun 2015-2019

No.	SEKTOR	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Pengadaan dan Penggunaan Energi	3.378,70	3.899,56	4.949,27	4.297,39	1.663,03
2.	Proses Industri dan Penggunaan Produk (IPPU)	77,45	836,65	1.051,65	642,71	878,21
3.	Pertanian	699,47	719,81	697,32	772,99	841,28
4.	Kehutanan dan Penggunaan Lahan Lainnya	-901,71	-67,26	1.639,27	1.794,21	351,66
5.	Pengelolaan Limbah	116,74	131,51	144,91	154,40	180,33
	TOTAL	**3.370,66**	**5.520,27**	**8.482,41**	**7.661,71**	**3.914,51**

Sumber : Hasil Perhitungan pada Aplikasi SIGNSMART, 2020

Gambaran status emisi tersebut disajikan pada grafik berikut ini.

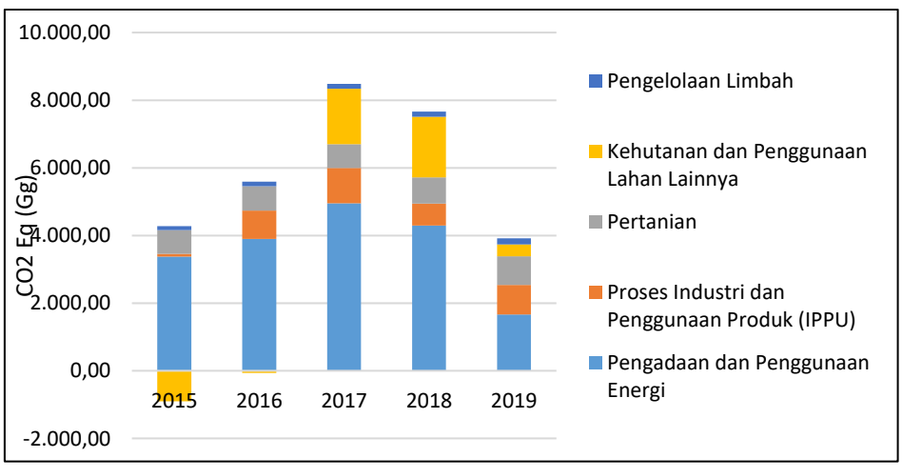

Gambar 2.9
Status Emisi GRK di Kabupaten Banyumas Tahun 2015-2019

Sumber : Diolah dari Hasil Perhitungan pada Aplikasi SIGNSMART, 2020

Berdasarkan hasil perhitungan pada aplikasi SIGNSMART, dapat diketahui tren emisi total GRK beserta kecenderungannya sebagaimana disajikan pada grafik sebagai berikut:

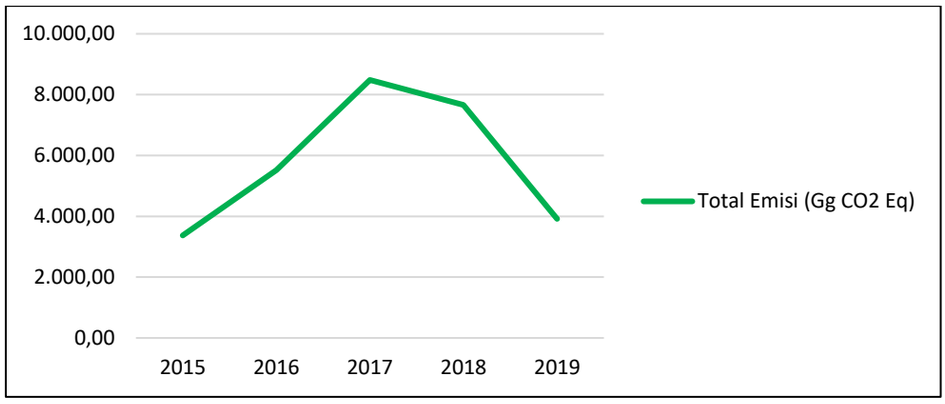

Gambar 2.10
Tren dan Kecenderungan Emisi GRK di Kabupaten Banyumas Tahun 2015-2019
Sumber: Diolah dari Hasil Perhitungan pada Aplikasi SIGNSMART, 2020

Berdasarkan hasil kalkulasi emisi di Tahun 2020 ini, maka didapatkan hasil bahwa status emisi dan serapan GRK pada Tahun 2019 cenderung menurun jika dibandingkan dengan status emisi dan serapan pada Tahun 2016, 2017, dan 2018, namun demikian cenderung meningkat dibandingkan status emisi dan serapan pada Tahun 2015.

Berdasarkan analisis katagori kunci terhadap sub kategori berdasarkan IPCC 2006, terdapat 9 subkategori emisi yang menjadi kunci utama dan menyumbang hingga 95% dari total emisi GRK, baik pada analisa yang mencakup sektor *Land Use, Land Use Change and Forestry* (LULUCF), maupun analisa yang tidak mencakup sektor LULUCF, dengan 5 subkategori terbesar secara berturut-turut meliputi emisi pada Transportasi, Budidaya Padi, Industri Mineral – Proses Penggunaan Karbonat Lainnya, Industri Mineral – Produksi Semen, dan Industri Manufaktur dan Konstruksi. Penentuan kategori kunci ini diperlukan sebagai pertimbangan dalam penyusunan dan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah (RAD) Gas Rumah Kaca.

2.1.2 Aspek Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Banyumas pada akhir tahun 2020 sebesar 1.873.196 jiwa yang terdiri dari 945.119 laki-laki dan 928.007 perempuan. Sebaran penduduk di Kabupaten Banyumas masih belum merata. Kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak adalah Kecamatan Cilongok sebanyak 131.753 jiwa, sedangkan jumlah penduduk paling sedikit di Kecamatan Purwojati sebanyak 39.840 jiwa.

Tabel 2.10
Jumlah Penduduk Kabupaten Banyumas Tahun 2016–2020

No.	Jenis Kelamin	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2019*	2020*
1.	Laki-laki	824.717	831.816	838 798	845.732	928.093	945.119
2.	Perempuan	825.908	833.209	840 326	847.274	912.059	928.077
3.	Total	1.650.625	1.665.025	1 679 124	1.693.006	1.840.152	1.873.196

No.	Jenis Kelamin	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2019*	2020*
4.	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	0,89	0,87	0,84	0.83		1,8

Sumber: BPS Kabupaten Banyumas, 2019-2020
**= berdasarkan data pendaftaran penduduk Dindukcapil Kabupaten Banyumas*

Dengan luas wilayah Kabupaten Banyumas 1.327,59 kilometer persegi dan jumlah penduduk sebanyak 1.873.196 jiwa, maka rata–rata kepadatan penduduk Kabupaten Banyumas pada tahun 2020 adalah 1.411 jiwa/km2. Kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan Purwokerto Barat yaitu 7.462 jiwa/km2, dan kepadatan penduduk terendah di Kecamatan Lumbir yaitu 525 jiwa/km2. Kepadatan penduduk di Kabupaten Banyumas masih terpusat di 4 kecamatan pada kawasan perkotaan Purwokerto yaitu Kecamatan Purwokerto Selatan, Kecamatan Purwokerto Utara, Kecamatan Purwokerto Barat, dan Kecamatan Purwokerto Timur.

Pemusatan penduduk di kawasan perkotaan perlu didukung dengan penyediaan permukiman dengan infrastruktur yang memadai untuk mencegah timbulnya permukiman liar dan permukiman kumuh. Di sisi lain peningkatan jumlah penduduk juga perlu dikendalikan karena keterbatasan daya dukung lingkungan kawasan perkotaan. Kepadatan penduduk Kabupaten Banyumas per kecamatan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.11
Kepadatan Penduduk per Kecamatan Kabupaten Banyumas
Tahun 2020

No	Kecamatan	Luas	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk Jiwa/Km2
1.	Lumbir	102.66	53.865	525
2.	Wangon	60.78	88.514	1.456
3.	Jatilawang	48.16	72.235	1.500
4.	Rawalo	49.64	56.613	1.140
5.	Kebasen	53.99	70.971	1.315
6.	Kemranjen	60.71	77.188	1.271
7.	Sumpiuh	60.01	61.760	1.029
8.	Tambak	52.03	53.689	1.032
9.	Somagede	40.11	40.022	998
10.	Kalibagor	35.73	59.051	1.653
11.	Banyumas	38.09	56.312	1.478
12.	Patikraja	43.23	62.476	1.445
13.	Purwojati	37.86	39.840	1.052
14.	Ajibarang	66.53	108.407	1.629
15.	Gumelar	93.95	56.847	605
16.	Pekuncen	92.70	80.518	869
17.	Cilongok	105.34	131.753	1.251
18.	Karanglewas	32.48	69.338	2.135
19.	Kedungbanteng	60.22	92.466	1.535
20.	Baturraden	45.53	84.060	1.846
21.	Sumbang	53.42	96.231	1.801
22.	Kembaran	25.92	56.224	2.169
23.	Sokaraja	29.92	64.314	2.150
24.	Purwokerto Selatan	13.75	76.378	5.555
25.	Purwokerto Barat	7.40	55.220	7.462
26.	Purwokerto Timur	8.42	59.410	7.056

No	Kecamatan	Luas	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk Jiwa/Km2
27.	Purwokerto Utara	9.01	49.494	5.493
	Jumlah	1,327,59	1.873.196	1.411

Sumber: BPS Kabupaten Banyumas tahun 2020

Berdasarkan data jumlah penduduk menurut kelompok umur rasio ketergantungan penduduk Kabupaten Banyumas pada tahun 2020 adalah 47, 96. Rasio ketergantungan menggambarkan banyaknya penduduk yang harus ditanggung penduduk usia kerja, rasio ketergantungan 47,96 menggambarkan bahwa 100 orang penduduk usia produktif mempunyai tanggungan sebanyak 48 orang yang belum produktif atau dianggap tiddak produktif lagi.

Tabel 2.12
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Banyumas Tahun 2020

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah	Rasio Jenis Kelamin
	Laki - Laki	Perempuan		
0-4	65.205	60.370	125.575	108,01
5–9	73.409	69.218	142.627	106,05
10–14	75.917	70.198	146.115	108,15
15-19	72.106	67.763	139.869	106,41
20-24	71.836	67.810	139.646	105,94
25-29	69.037	64.717	133.754	106,68
30-34	64.921	62.488	127.409	103,89
35-39	71.939	70.497	142.436	102,05
40-44	69.032	69.178	138.210	99,79
45-49	65.037	67.429	132.466	96,45
50-54	57.098	60.177	117.275	94,88
55-59	50.737	54.802	105.539	92,58
60-64	43.422	45.964	89.386	94,47
65-69	34.673	32.791	67.464	105,74
70-74	22.805	23.917	46.722	95,35
75+	37.945	40.758	78.703	93,10
Jumlah	945.119	928.077	1.873.196	101,84
0-14	214.531	199.786	414.317	107,38
15-64	635.165	630.825	1.265.990	100,69
65+	95.423	97.466	192.889	97,90
Angka Ketergantungan (%)			47,96	

Sumber: BPS Kabupaten Banyumas, 2020

Dengan rasio ketergantungan yang terus menurun Kabupaten Banyumas akan mengalami bonus demografi. Bonus demografi adalah dampak transisi demografi yang menurunkan proporsi umur penduduk muda dan meningkatkan proporsi penduduk usia kerja. Suatu wilayah mengalami bonus demografi jika penduduk usia produktifnya lebih banyak dibandingkan dengan penduduk usia non produktif. Bonus demografi akan menjadi peluang bagi pengurangan jumlah pengangguran, peningkatan daya saing bangsa, berkembangnya karya kreatif dan inovatif oleh pemuda sebagai kontribusi pembangunan negara, pertumbuhan ekonomi, dan kemajuan negara.

Untuk dapat memanfaatkan peluang bonus demografi 4 prasyarat harus dipenuhi yaitu: penduduk harus berkualitas, penduduk produktif terserap dalam pasar kerja, meningkatnya tabungan di tingkat rumahtangga, dan meningkatnya perempuan yang masuk dalam pasar kerja. Untuk itu Pemerintah Daerah perlu menindaklanjuti dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan lapangan kerja, dan kelangsungan penurunan angka kelahiran sampai tahun 2030.

Untuk melihat lebih rinci gambaran jumlah penduduk Kabupaten Banyumas pada tahun 2020 dapat dilihat pada piramida berikut:

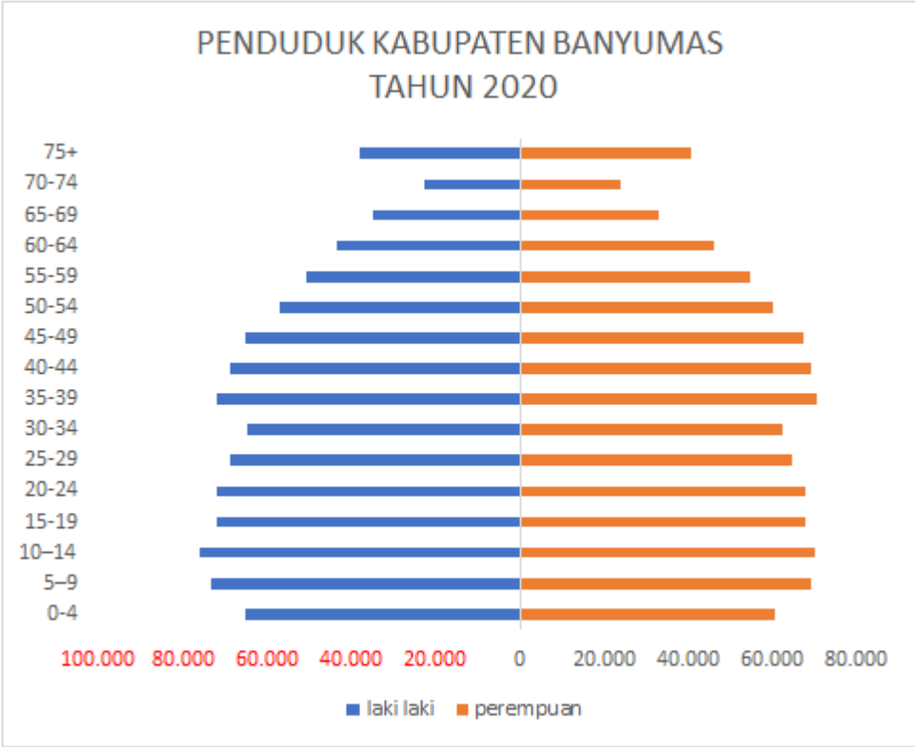

Gambar 2.11
Piramida Penduduk Kabpaten Banyumas Tahun 2020
Sumber: Dindukcapil Kabupaten Banyumas

Piramida di atas menunjukan bahwa jumlah penduduk pada usia produktif antara 15–65 tahun cukup banyak bila dibandingkan usia tidak produktif yaitu usia 0-4 tahun ditambah dengan usia 65 tahun ke atas. Apabila penduduk produktif yang semakin banyak di banding jumlah yang tidak produktif maka Kabupaten Banyumas akan mengalami bonus demografi.

Untuk melihat gambaran jumlah penduduk dalam pekerjaan utamanya dan jenis kelamin pada tahun 2020 dapat dilihat pada diagram berikut:

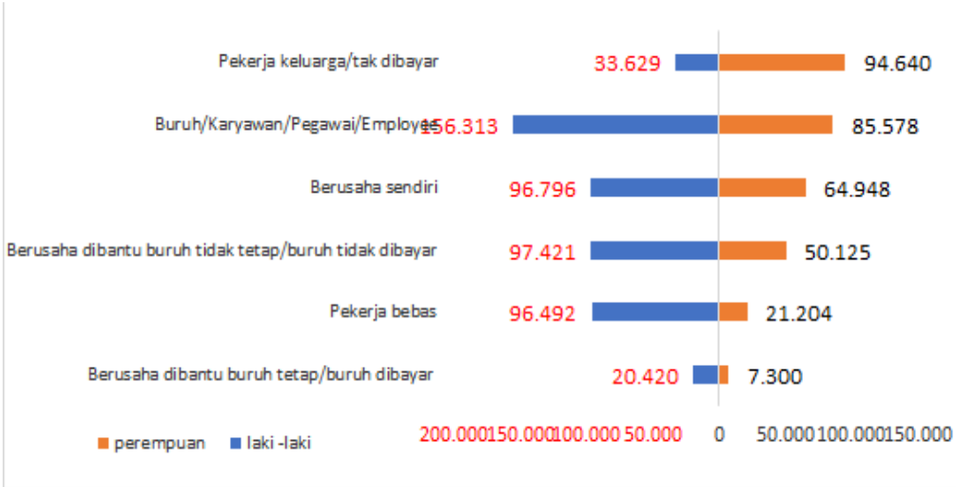

Gambar 2.12
Jumlah Penduduk Dalam Pekerjaan Utamanya dan Jenis Kelamin Tahun 2020
Sumber: BPS Kabupaten Banyumas 2020

Berdasarkan gambar tersebut lapangan pekerjaan di Kabupaten Banyumas masih didominasi penduduk laki-laki dari pada perempuan, dengan perbandingan sekitar 61% pekerja laki-laki dan 39% pekerja perempuan dari penduduk yang bekerja. Dengan masih kecilnya pekerja perempuan maka pemberdayaan perempuan di Kabupaten Banyumas masih rendah. Pekerja perempuan hanya mendominasi untuk jenis perkerjaan utama yang lebih banyak dikerjakan oleh perempuan yaitu pada pekerjaan keluarga/tak dibayar.

Untuk melihat gambaran jumlah penduduk dalam pekerjaan dengan pendidikan tertinggi dapat dilihat pada diagram berikut:

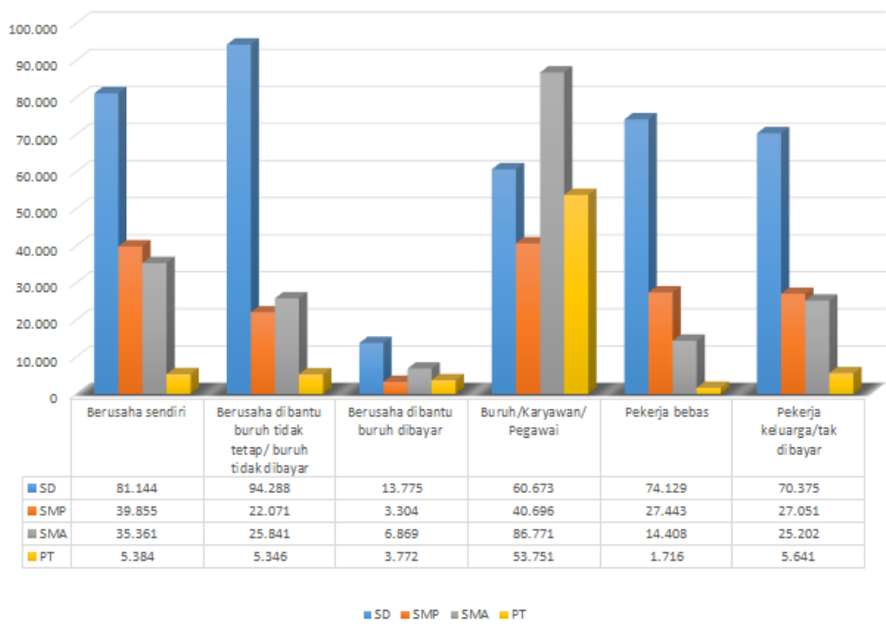

	Berusaha sendiri	Berusaha dibantu buruh tidak tetap/ buruh tidak dibayar	Berusaha dibantu buruh dibayar	Buruh/Karyawan/ Pegawai	Pekerja bebas	Pekerja keluarga/tak dibayar
SD	81.144	94.288	13.775	60.673	74.129	70.375
SMP	39.855	22.071	3.304	40.696	27.443	27.051
SMA	35.361	25.841	6.869	86.771	14.408	25.202
PT	5.384	5.346	3.772	53.751	1.716	5.641

Gambar 2.13
Diagram Jumlah Penduduk usia 15 tahun ke atas Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama dan Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan di Kabupaten Banyumas, 2020
Sumber: BPS Kabupaten Banyumas 2020

Dari data tersebut bisa dilihat bahwa penduduk Kabupaten Banyumas pada tahun 2020 yang bekerja didominasi penduduk dengan tingkat Pendidikan Sekolah Dasar (SD). Untuk lapangan pekerjaan yang dapat menampung tenaga kerja dengan jenjang pendidikan SMA adalah status pekerjaan sebagai buruh/karyawan/pegawai.

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Pembangunan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Namun terjadinya pandemi COVID-19 telah berdampak pada penurunan kesejateraan masyarakat. Beberapa indikator pembangunan kesejahteraan masyarakat yang terdampak pandemi antara lain pertumbuhan ekonomi yang menurun, serta peningkatan penduduk miskin dan pengangguran.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyumas dalam kurun waktu 2015-2019 fluktuatif dengan trend lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional maupun Provinsi Jawa Tengah. Selama kurun waktu tersebut, capaian pertumbuhan ekonomi tertinggi adalah 6,45% tahun 2018 sementara terendah adalah 6,05% tahun 2016. Sedangkan di tahun 2020 pertumbuhan ekonomi baik Nasional, Provinsi maupun Banyumas sendiri mengalami kontraksi akibat Pandemi COVID-19 dengan capaian masing-masing sebesar -2,07% untuk Nasional, -2,65% Jawa Tengah dan –1,65% untuk Banyumas.

Kemiskinan di Kabupaten Banyumas cenderung menurun dalam dalam periode waktu 2015-2019. Pandemi COVID-19 berdampak pada meningkatnya penduduk miskin dari 12,53% pada tahun 2019 menjadi 13,26% pada tahun 2020. Angka pengangguran juga meningkat, dari 4,17 pada tahun 2019 menjadi 6% pada tahun 2020.

2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB

Dengan terjadinya Pandemi COVID-19 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyumas tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar minus 1, 65%. Pemerintah Kabupaten Banyumas telah mengoreksi target pertumbuhan ekonomi sejalan dengan perubahan target pertumbuhan ekonomi nasional dan Provinsi Jawa Tengah.

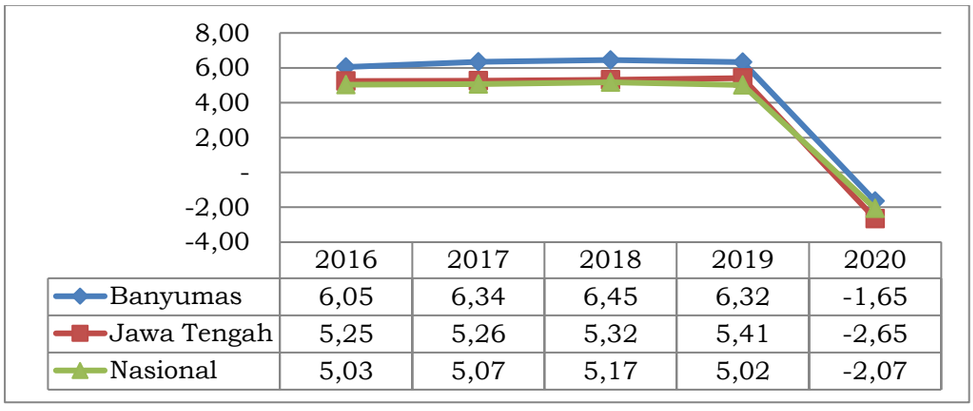

	2016	2017	2018	2019	2020
Banyumas	6,05	6,34	6,45	6,32	-1,65
Jawa Tengah	5,25	5,26	5,32	5,41	-2,65
Nasional	5,03	5,07	5,17	5,02	-2,07

Gambar 2.14
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Banyumas dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020 (%)
Sumber: BPS Kabupaten Banyumas 2021

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Banyumas selama 2016-2020 terus mengalami peningkatan. Pandemi COVID-19 Tahun 2020 telah mempengaruhi kinerja perekonomian Kabupaten Banyumas. Meskipun belum tersedia data publikasi resmi, PDRB Kabupaten Banyumas mengalami penurunan dengan melambatnya kegiatan ekonomi sebagai dampak pembatasan kegiatan masyarakat untuk pencegahan dan penanggulangan COVID-19.

Perkembangan PDRB Kabupaten Banyumas Atas Dasar Harga Konstan dan Atas Harga Berlaku Tahun 2016-2020 disajikan dalam tabel-tabel berikut:

Tabel 2.13
Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Banyumas Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2020 (Miliar Rupiah)

Lapangan Usaha		Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ Agriculture, Forestry and Fishing	4.249,22	4.383,85	4.514,24	4.528,29	4.596,45
B	Pertambangan dan Penggalian/ Mining and Quarrying	1.701,02	1.778,43	1.854,41	1.916,34	1.874,04
C	Industri Pengolahan/ Manufacturing	7.580,82	7.969,58	8.477,60	9.155,02	9.150,31
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ Electricity and Gas	35,87	37,44	39,96	42,03	43,10
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/ Water Supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities	28,40	31,40	33,10	34,48	35,91
F	Konstruksi/ Construction	4.160,01	4.569,34	4.963,73	5.177,00	4.984,97
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles	5.502,26	5.754,68	6.170,05	6.670,47	6.423,63
H	Transportasi dan Pergudangan/ Transportation and Storage	1.280,50	1.360,43	1.448,39	1.563,88	1.065,89
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ Accommodation and Food Service Activities	1.163,81	1.264,32	1.334,79	1.438,32	1.336,53
J	Informasi dan Komunikasi/ Information and Communication	1.955,85	2.250,92	2.464,76	2.754,12	3.134.35
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ Financial and Insurance	1.015,91	1.071,35	1.114,07	1.161,89	1.180,39

Lapangan Usaha		Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
	Activities					
L	Real Estate/ Real Estate Activities	812,54	880,34	929,39	980,32	976,69
M,N	Jasa Perusahaan/ Business Activities	96,14	103,37	112,04	123,34	116,85
0	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/ Public Administration and Defence; Compulsory Social Security	1.026,71	1.051,21	1.086,57	1.126,12	1.111,05
P	Jasa Pendidikan/ Education	1.536,36	1.651,94	1.791,43	1.936,53	1.931,54
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ Human Health and Social Work Activities	308,79	336,29	368,29	395,10	426,04
R,S, T,U	Jasa lainnya/ Other Services Activities	596,81	652,43	711,67	776,07	733,88
PDRB		**33.051,05**	**35.147,31**	**37.414,50**	**39.779,32**	**39.121,62**

Sumber: BPS Kabupaten Banyumas, 2021

Tabel 2.14
Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Banyumas
Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2016-2020 (Miliar Rupiah)

Lapangan Usaha		Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ Agriculture, Forestry and Fishing	5.794,07	5.993,76	6.351,39	6.470,10	6.681,39
B	Pertambangan dan Penggalian/ Mining and Quarrying	2.351,20	2.533,40	2.854,73	2.983,61	2.990,22
C	Industri Pengolahan/ Manufacturing	10.285,88	11.084,84	12.143,97	13.301,27	13.618,07
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ Electricity and Gas	37,92	42,80	47,24	49,74	50,70
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/ Water Supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities	31,52	35,07	37,16	39,37	43,32
F	Konstruksi/ Construction	5.212,69	5.844,85	6.613,48	7.123,21	6.883,64
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles	6.489,92	6.924,28	7.601,53	8.398,41	8.178,31
H	Transportasi dan Pergudangan/ Transportation and Storage	1.506,97	1.621,05	1.743,30	1.922,95	1.344,47

Lapangan Usaha		Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ Accommodation and Food Service Activities	1.403,71	1.540,44	1.645,17	1.795,06	1.671,23
J	Informasi dan Komunikasi/ Information and Communication	1.769,83	2.127,32	2.329,85	2.638,37	3.005,97
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ Financial and Insurance Activities	1.370,84	1.507,59	1.609,03	1.700,08	1.731,55
L	Real Estate/ Real Estate Activities	918,74	1.015,79	1.094,93	1.176,50	1.180,17
M, N	Jasa Perusahaan/ Business Activities	125,24	139,48	154,80	175,03	169,60
0	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/ Public Administration and Defence; Compulsory Social Security	1.379,67	1.453,27	1.527,19	1.609,66	1.609,99
P	Jasa Pendidikan/ Education	2.200,31	2.461,07	2.750,60	3.043,17	2.988,55
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ Human Health and Social Work Activities	405,42	448,15	496,95	541,67	596,59
R,S, T,U	Jasa lainnya/ Other Services Activities	733,00	812,82	894,81	980,66	938,33
PDRB		**42.016,94**	**45.585,98**	**49.896,13**	**53.948,86**	**53.681,12**

Sumber: BPS Kabupaten Banyumas, 2021

Struktur ekonomi Kabupaten Banyumas tidak lagi didominasi oleh pertanian. Kontribusi lapangan usaha pertanian terus menurun mekipun masih dapat tumbuh. Pada masa pandemi lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan mampu bertahan dan tetap tumbuh untuk berkontribusi pada perekonomian daerah. Pertumbuhan tertinggi pada tahun 2020 dicapai oleh lapangan usaha informasi dan komunikasi yaitu sebesar 13,81 persen, dan pertumbuhan terendah ada pada lapangan usaha transportasi dan pergudangan sebesar minus 31,84 persen.

Pertumbuhan PDRB secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.15
Persentase Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Banyumas ADHK 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2020

Lapangan Usaha		ADHK (%)				
		2016	2017	2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2,85	3,17	2,97	0,31	1,51
B	Pertambangan dan Penggalian	4,06	4,55	4,27	3,34	-2,21
C	Industri Pengolahan	5,40	5,13	6,37	7,99	-0,05
D	Pengadaan Listrik & Gas	7,16	4,36	6,76	5,16	2,55
E	Pengadaan Air, Pengel. Sampah, Limbah dan	2,08	10,54	5,43	4,17	4,15

Lapangan Usaha		ADHK (%)				
		2016	2017	2018	2019	2020
	Daur Ulang					
F	Konstruksi	11,26	9,84	8,63	4,30	-3,71
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,66	4,59	7,22	8,11	-3,70
H	Transportasi dan Pergudangan	5,97	6,24	6,47	7,97	-31,84
I	Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	9,38	8,64	5,57	7,76	-7,08
J	Informasi dan Komunikasi	9,25	15,09	9,50	11,74	13,81
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	9,38	5,46	3,99	4,29	1,59
L	Real Estate	6,50	8,34	5,57	5,48	-0,37
M,N	Jasa Perusahaan	7,04	7,52	8,39	10,08	-5,26
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib	1,34	2,39	3,36	3,64	-1,34
P	Jasa Pendidikan	5,82	7,52	8,44	8,10	-0,26
Q	Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	8,82	8,90	9,51	7,28	7,83
R,S,T,U	Jasa Lainnya	7,47	9,32	9,08	9,05	-5,44
PDRB		**6,05**	**6,34**	**6,45**	**6,32**	**-1,65**

Sumber: BPS Kabupaten Banyumas, 2021

Selama tiga tahun terakhir lapangan usaha-lapangan usaha yang memberikan kontribusi terbesar pada PDRB Kabupaten Banyumas adalah lapangan usaha industri pengolahan, kemudian diikuti oleh lapangan usaha perdagangan, dan lapangan usaha konstruksi.

Distribusi PDRB Kabupaten Banyumas selama kurun waktu 2016-2020 menurut lapangan usaha dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.16
Distribusi PDRB Kabupaten Banyumas Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Persen) Tahun 2016-2020

Lapangan Usaha		ADHB (%)				
		2016	2017	2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	13,79	13,15	12,73	11,99	12,45
B	Pertambangan dan Penggalian	5,60	5,56	5,72	5,53	5,57
C	Industri Pengolahan	24,48	24,32	24,34	24,66	25,37
D	Pengadaan Listrik & Gas	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,08	0,08	0,07	0,07	0,08
F	Konstruksi	12,41	12,82	13,25	13,20	12,82
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	15,45	15,19	15,28	15,57	15,23
H	Transportasi dan Pergudangan	3,59	3,56	3,49	3,56	2,50
I	Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	3,34	3,38	3,30	3,33	3,11
J	Informasi dan Komunikasi	4,21	4,67	4,66	4,89	5,60
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,26	3,31	3,22	3,15	3,23
L	Real Estate	2,19	2,23	2,19	2,18	2,20
M,N	Jasa Perusahaan	0,30	0,31	0,31	0,32	0,32
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib	3,28	3,19	3,06	2,98	3,00
P	Jasa Pendidikan	5,24	5,40	5,51	5,64	5,57
Q	Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	0,96	0,98	1,00	1,00	1,11
R,S,T, U	Jasa Lainnya	1,74	1,78	1,79	1,82	1,75
PDRB		**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Sumber: BPS Kabupaten Banyumas, 2021

Ditinjau dari aspek pengeluaran, PDRB Kabupaten Banyumas tahun 2020 didominasi oleh pengeluaran konsumsi rumah tangga yakni sebesar 66,82%, sedangkan pembentukan modal tetap bruto hanya sebesar 36,44%. Pengeluaran konsumsi rumah tangga selama kurun waktu lima tahun mengalami fluktuasi dari sebesar 70,48% tahun 2016 menurun terus sampai tahun 2019 dan kembali meningkat menjadi 66,82% di tahun 2020. Secara rinci data kontribusi PDRB Kabupaten Banyumas menurut pengeluaran selama kurun waktu lima tahun yakni mulai tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.17
Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Banyumas ADHB Menurut Pengeluaran Tahun 2016–2020

No	Komponen Pengeluaran	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga (%)	70,48	69,44	67,66	66,72	66,82
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT (%)	1,16	1,16	1,16	1,20	1,20
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (%)	9,51	9,28	8,90	8,49	8,14
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto (%)	38,19	38,00	38,48	38,57	36,44
5	Perubahan Inventori (%)	0,24	0,32	0,38	0,33	0,32
6	Net Ekspor	-9,59	-8,20	-6,57	-5,32	-12,91
	PDRB Total	100	100	100	100	100

Sumber: BPS Kabupaten Banyumas, 2021

Besarnya pendapatan rata-rata penduduk atau PDRB per Kapita Kabupaten Banyumas tahun 2020 menurun karena terdampak COVID-19. PDRB per Kapita Kabupaten Banyumas tahun 2020 menurun dibandingkam tahun-tahun sebelumnya yang selalu mengalami peningkatan.

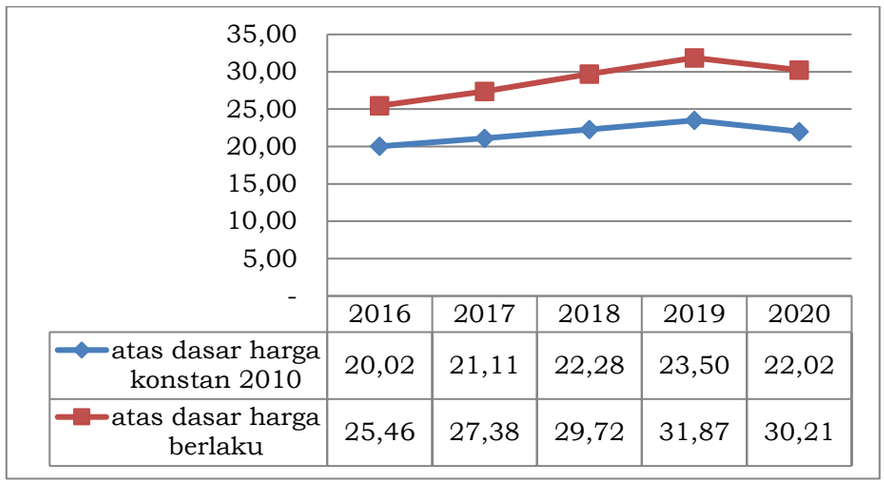

Gambar 2.15
PDRB per Kapita Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2020 (juta rupiah)
Sumber: BPS Kabupaten Banyumas 2017-2021

Seperti terlihat pada grafik dibawah ini, terlihat bahwa PDRB Perkapita Banyumas tahun 2020 sebesar 30,21 Juta Rupiah dan merupakan Kabupaten tertinggi kedua setelah Cilacap yang sebesar 54,01 Juta Rupiah dan jika dibandingkan dengan Jawa Tengah masih dibawah PDRB Perkapita Jawa Tengah yang sebesar 46,20 Juta Rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk Banyumas rata-rata berpendapatan 30,21 Juta Rupiah setahun dan masih merupakan Kabupaten dengan perkembangan perekonomian yang masih menjanjikan.

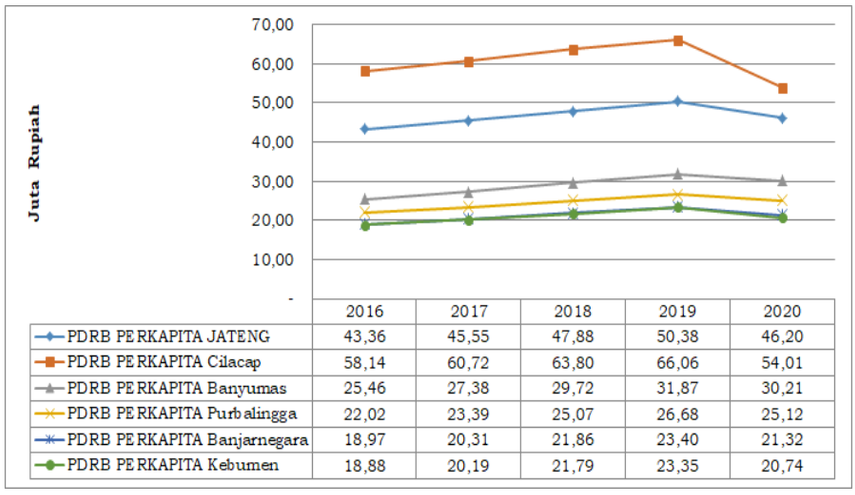

Gambar 2.16
PDRB per Kapita Jateng dan Kabupaten Barlingmascakeb
(juta rupiah)
Sumber: BPS Kabupaten Banyumas 2017-2021

2.2.1.2 Inflasi

Inflasi atau perubahan harga konsumen sering digunakan sebagai satu indikasi stabilitas ekonomi melalui pantauan gejolak harga-harga barang kebutuhan masyarakat. Laju inflasi di Kabupaten Banyumas selama kurun waktu tahun 2016-2020 menunjukan perkembangan yang fluktuatif dengan trend mengalami penurunan dan searah dengan laju inflasi Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Secara umum inflasi di Kabupaten Banyumas terkendali, barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat cukup tersedia dan terdistribusi dengan baik sehingga tidak terjadi gejolak harga yang signifikan mendorong inflasi yang tinggi.

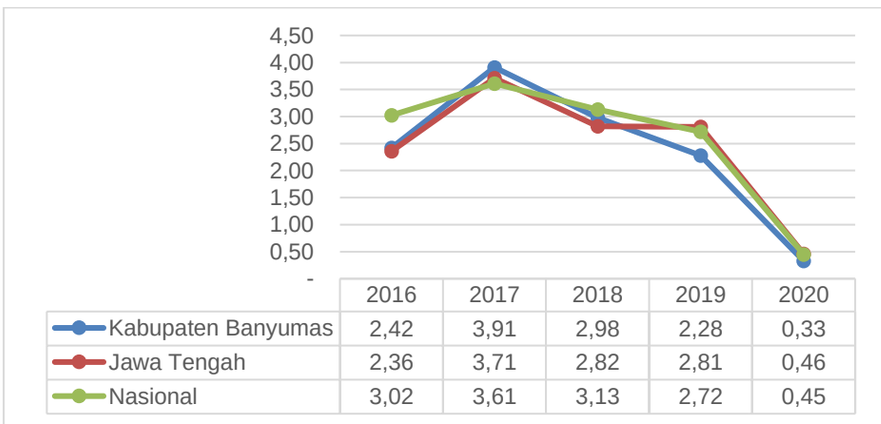

Gambar 2.17
Inflasi Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional
(%) Tahun 2016–2020
Sumber: BPS Kabupaten Banyumas 2016-2020

Selama Januari-Juni 2020 inflasi di Kabupaten Banyumas relatif rendah, bahkan sempat mengalami delfasi sebesar - 0,08% pada bulan April. Rendahnya inflasi dikuatirkan disebabkan karena merosotnya daya beli masyarakat sebagai dampak Pandemi COVID-19. Pemerintah dan pemerintah daerah memberikan berbagai bentuk bantuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat agar perekonomian bergerak kembali.

2.2.1.3 Kemiskinan

Persentase Penduduk Miskin

Pandemi COVID-19 berdampak pada peningkatan kemiskinan. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Banyumas selama kurun waktu 2016–2020 telah mengalami penurunan meskipun masih lebih tinggi dari rata-rata nasional maupun Provinsi Jawa Tengah, pada tahun 2020 meningkat sebesar 5,83% dari 12,53% pada tahun 2019 menjadi 13,26% pada tahun 2020. Perbandingan prosentase penduduk miskin kabupaten Banyumas dengan Kabupaten sekitar pada tahun 2016-2020 dapat dilihat pada grafik berikut:

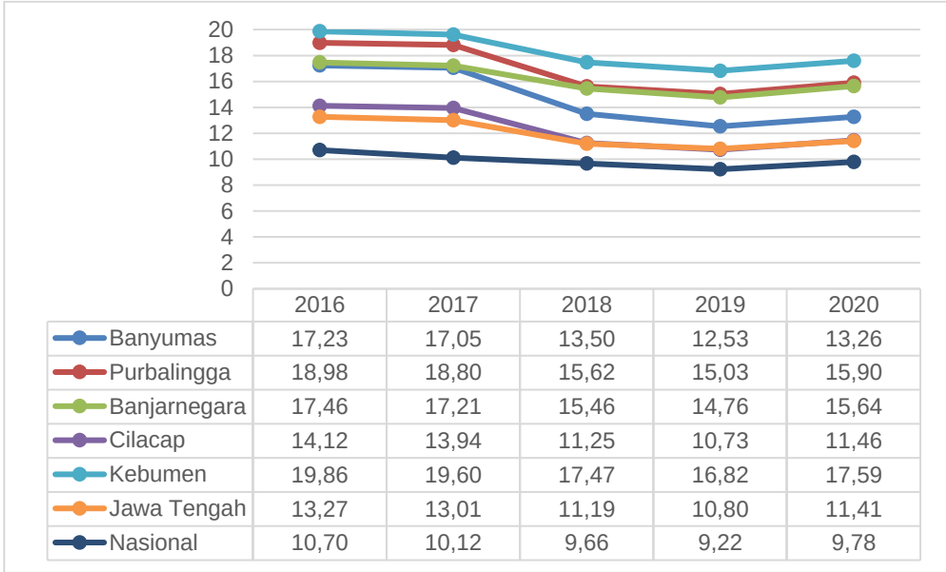

Gambar 2.18
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Banyumas, Kabupaten Sekitar, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2020

Dalam periode 2016-2018 capaian indikator persentase penduduk miskin di Kabupaten Banyumas memenuhi target yang ditentukan dalam perencanaan daerah, sedangkan pada tahun 2019 hanya memenuhi 99,84% dari target, dan pada tahun 2020 hanya tercapai 85% dari target. Dengan kejadian luar biasa pandemi COVID-19 pemerintah dan pemerintah daerah melakukan penyesuaian terhadap target indikator persentase penduduk miskin tahun 2020 dari 11,53% menjadi 12,53%.

Capaian indikator persentase penduduk miskin Kabupaten Banyumas dibandingkan dengan target daerah pada tahun 2016-2020 dapat dilihat pada grafik berikut:

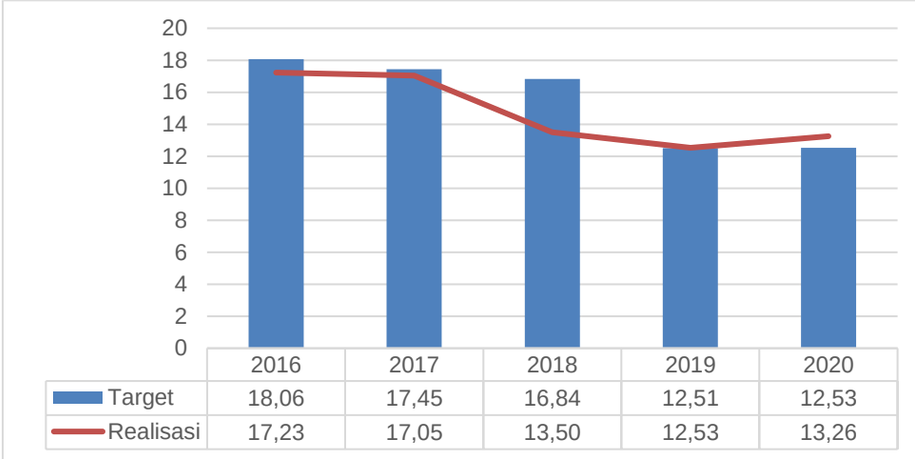

Gambar 2.19
Target dan Realisasi Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2020
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2020

Jumlah Penduduk Miskin

Dalam kurun waktu tahun 2016-2020 jumlah penduduk miskin pada di Kabupaten Banyumas berfluktuasi, dengan kecenderungan menurun, sebagaimana gambar di bawah ini:

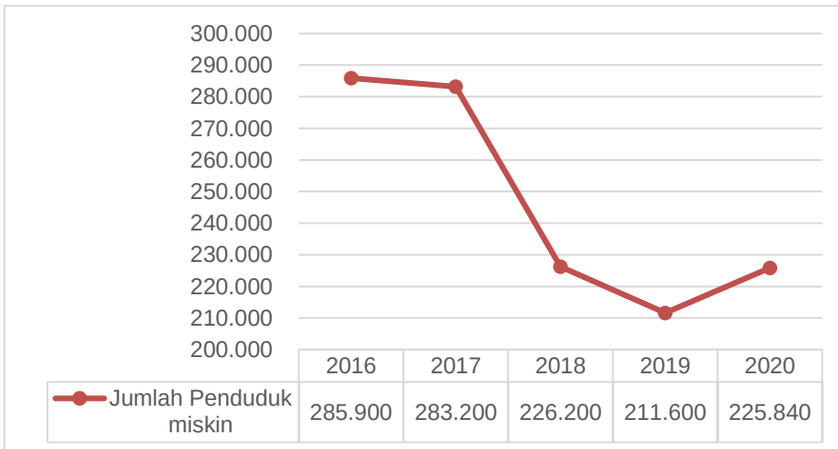

Gambar 2.20
Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Banyumas
Sumber: BPS Kabupaten Banyumas, 2020

Dengan jumlah penduduk yang besar maka jumlah penduduk miskin di Kabupaten Banyumas juga tinggi. Dalam lingkup regional wilayah Barlingmascakeb prosentase penduduk miskin Kabupaten Banyumas tahun 2020 menempati peringkat ke-2 terendah dari 5 kabupaten. Namun dari sisi jumlah penduduk miskin Kabupaten Banyumas memiliki jumlah penduduk miskin tertinggi. Jumlah penduduk miskin bertambah 14.190 jiwa dari 211.650 pada tahun 2019 menjadi 225.840 pada tahun 2020. Perbandingan persentase penduduk miskin dan jumlah penduduk miskin Kabupaten Banyumas dengan kabupaten sekitar pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.18
Persentase Penduduk Miskin dan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Sekitar Tahun 2020

	Cilacap	Banyumas	Purbalingga	Banjarnegara	Kebumen
Jumlah Penduduk Miskin	198.600	225.840	149.480	144.950	211.090
Persentase Penduduk Miskin	11.46	13.26	15.90	15.64	17.59

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2020

Indek Kedalaman Kemiskinan

Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index–P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, menunjukkan semakin besar kesenjangan pendapatan penduduk miskin dengan garis kemiskinan.

Pada periode 2016-2020, indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Banyumas fluktuatif. Capaian indeks kedalaman kemiskinan pada tahun 2020 merupakan angka terendah. Dengan masih tingginya indeks kedalaman kemiskinan menunjukkan pendapatan penduduk miskin di Kabupaten Banyumas masih cukup jauh untuk mendekati garis kemiskinan, agar dapat keluar dari garis kemiskinan.

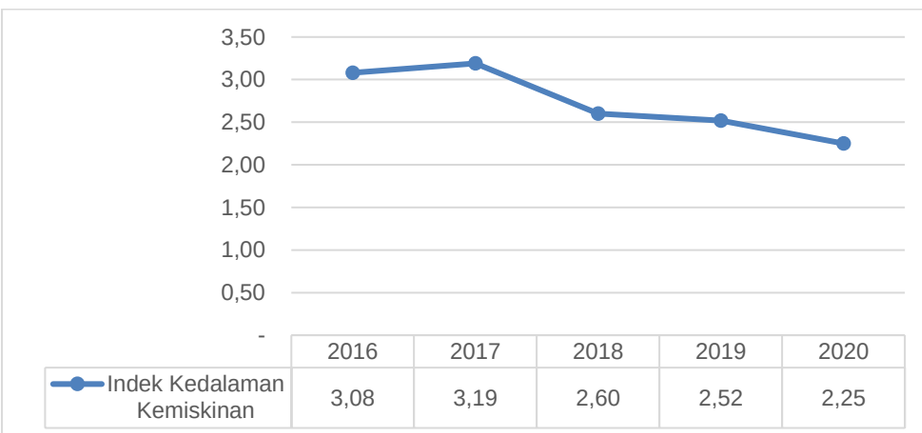

Gambar 2.21
Indek Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Banyumas Tahun 2016–2020
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2020

Indek Keparahan Kemiskinan

Indeks keparahan Kemiskinan *(Poverty Severity Index–P2)* memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Artinya semakin tinggi nilai indeks, maka semakin lebar kesenjangan pendapatan di antara penduduk miskin itu sendiri.

Perkembangan indek keparahan kemiskinan Kabupaten Banyumas pada periode 2016-2020 fluktuatif. Indek Keparahan Kemiskinan Kabupaten Banyumas pada tahun 2016 merupakan angka tertinggi selama kurun waktu 2016-2020. Perkembangan indeks keparahan

kemiskinan di Kabupaten Banyumas dalam lima tahun terakhir (2016-2020) dapat dilihat pada grafik berikut ini:

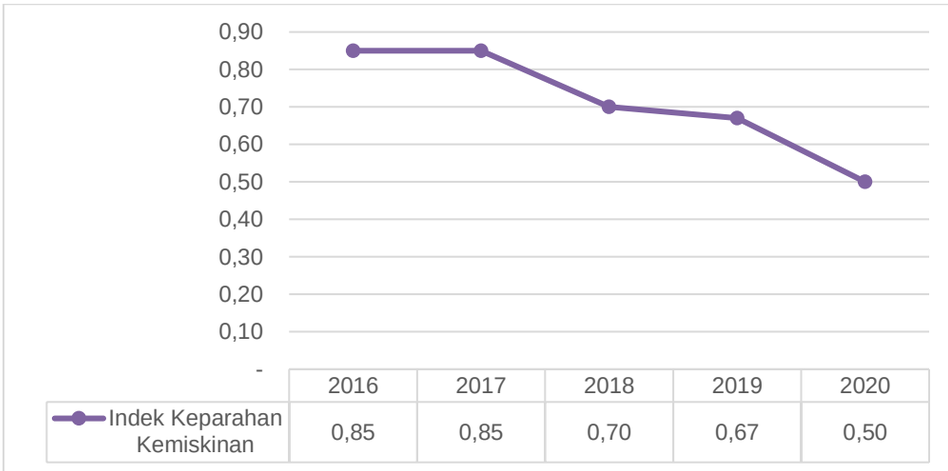

Gambar 2.22
Indek Keparahan Kemiskinan Kabupaten Banyumas
Tahun 2016-2020
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2020

2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

2.2.2.1 Indek Pembangunan Manusia (IPM)

Indek Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Indeks Pembangunan Manusia dihitung berdasarkan data yang menggambarkan empat komponen, yaitu angka harapan hidup, yang mewakili bidang kesehatan, harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah yang mewakili capaian pembangunan di bidang pendidikan, dan pengeluaran per kapita untuk mengukur akses terhadap sumberdaya untuk mencapai standar hidup layak.

Berdasarkan Berita Resmi Statistik Indeks Pembangunan Manusia 2020, BPS, Desember 2020 dari tiga aspek pembangunan manusia kualitas kesehatan dan pendidikan masyarakat Indonesia mengalami peningkatan, namun dari sisi pengeluaran per kapita yang disesuaikan mengalami penurunan. Pandemi COVID-19 membawa pengaruh terhadap pembangunan manusia di Indonesia. Hal ini terlihat dari perlambatan pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2020 dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Banyumas pada tahun 2019 sebesar 71,96 mengalami peningkatan sebesar 0,02 poin menjadi 71,98 pada tahun 2020. Indeks pembangunan manusia di Kabupaten Banyumas termasuk dalam kategori tinggi, dan lebih tinggi dari IPM Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Menurut UNDP, tingkat pembangunan manusia suatu negara atau daerah dapat dikelompokkan dalam beberapa kategori, yakni kategori rendah (0 ≤ IPM < 60), kategori sedang (60 ≤ IPM < 70), kategori tinggi (70 ≤ IPM < 80) dan kategori sangat tinggi (80 ≤ IPM ≤ 100).

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Banyumas pada tahun 2019 sebesar 71,96 mengalami peningkatan sebesar 0,03 menjadi 71,98

pada tahun 2020, termasuk dalam kategori tinggi, dan lebih tinggi dari IPM Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Hal ini berdasarkan kategori United Nations Development Programme (UNDP) yang mengelompokan tingkat pembangunan manusia suatu negara atau daerah dalam beberapa kategori, yakni kategori rendah (0 ≤ IPM < 60), kategori sedang (60 ≤ IPM < 70), kategori tinggi (70 ≤ IPM < 80) dan kategori sangat tinggi (80 ≤ IPM ≤ 100).

Tabel di bawah ini menunjukan IPM Kabupaten Banyumas dan kabupaten sekitarnya, Jawa Tengah dan Nasional tahun 2016-2020.

Tabel 2.19
IPM Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Sekitarnya
Tahun 2016-2020

Kabupaten	Tahun					Pertumbuhan IPM				
	2016	2017	2018	2019	2020	2015-2016	2016-2017	2017-2018	2018 2019	2019-2020
Cilacap	68,60	68,90	69,56	69,98	69,95	1,18	0,44	0,96	0,60	-0,04
Banyumas	70,50	70,75	71,30	71,96	71,98	0,86	0,35	0,78	0,92	0,03
Purbalingga	67,50	67,72	68,41	68,99	68,97	0,75	0,33	1,02	0,85	-0,03
Banjarnegara	65,50	65,86	66,54	67,34	67,45	1,24	0,55	1,03	1,20	0,16
Kebumen	67,40	68,29	68,8	69,60	69,81	0,75	1,32	0,75	1,16	0,03
Jawa Tengah	69,90	70,52	71,12	71,73	71,87	0,58	0,89	0,85	0,86	0,20
Nasional	70,18	70,81	71,39	71,92	71.94	0,91	0,90	0,82	0,74	0,03

Sumber: BPS, 2020

Lebih rinci komponen IPM Kabupaten Banyumas tahun 2019-2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.20
Komponen IPM Kabupaten Banyumas Tahun 2019-2020 dengan Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Sekitar

Wilayah	Angka Harapan Hidup		Harapan Lama Sekolah (Tahun)		Rata-rata lama seklolah (Tahun)		Pengeluaran Disesuaikan (000)	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Cilacap	73,52	73,73	12,49	12,50	6,93	6,97	10 .639	10. 440
Banyumas	73,55	73,72	12,82	12,85	7,42	7,52	11 .703	11. 448
Purbalingga	73,02	73,14	11,98	11,99	7,14	7,24	10 .131	9 .914
Banjarnegara	74,01	74,18	11,45	11,46	6,50	6,74	9 .547	9 .263
Kebumen	73,22	73,40	13,04	13,34	7,53	7,54	9. 066	8. 901
Jawa Tengah	74,23	74,37	12,68	12,70	7,53	7,69	11.102	10 .930
Nasional	71,34	71,47	12,95	12,98	8,34	8,48	11.299	11.013

Sumber: BPS, 2020

Dilihat dari komponen IPM Kabupaten Banyumas tahun 2020 pada komponen kesehatan, pendidikan mengalami peningkatan yang cukup baik namun pada komponen ekonomi (pengeluaran perkapita yang disusuaikan) mengalami penurunan dikarenakan pandemi COVID-19 yang mempengaruhi pengeluaran per kapita dan paritas daya beli masyarakat.

2.2.2.2 Angka Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS). Angka harapan lama sekolah *(Expected Years of Schooling*) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur

tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka HLS dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Indikator ini dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Banyumas setiap tahunnya mengalami peningkatan. Angka harapan lama sekolah pada tahun 2020 sebesar 12,85 tahun lebih tinggi dari angka harapan lama sekolah Provinsi Jawa Tengah, namun lebih rendah dari capaian nasional. Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Banyumas dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan nasional tahun 2016-2020 dapat dilihat pada grafik berikut ini.

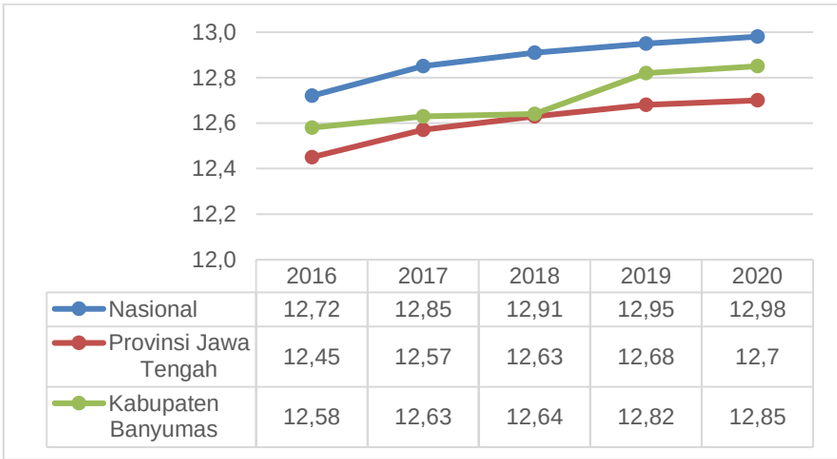

Gambar 2.23
Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Kab. Banyumas
Tahun 2016-2020
Sumber: BPS, 2020

2.2.2.3 Rata-rata Lama Sekolah

Selain angka harapan lama sekolah, indikator pendidikan yang digunakan untuk penghitungan IPM ialah rata-rata lama sekolah (Mean Years of Schooling/MYS). Indikator ini memberikan gambaran tentang rata- rata waktu yang ditempuh penduduk dalam kegiatan pembelajaran secara formal. Populasi yang digunakan UNDP dalam menghitung MYS dibatasi pada penduduk berusia 25 tahun ke atas. Batasan itu dimaksudkan agar angkanya lebih mencerminkan kondisi sebenarnya mengingat penduduk yang berusia kurang dari 25 tahun masih dalam proses sekolah sehingga kurang tepat apabila dihitung MYS-nya.

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal atau rata-rata waktu yang ditempuh penduduk dalam kegiatan pembelajaran secara formal. Cakupan penduduk yang dihitung dalam penghitungan rata-rata lama sekolah adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas. Batasan ini dimaksudkan agar angkanya lebih mencerminkan kondisi sebenarnya, mengingat penduduk yang berusia kurang dari 25 tahun masih dalam proses sekolah hingga belum pantas ditanyakan rata-rata

lama sekolahnya. Dengan memberikan bobot kepada tiap jenjang pendidikan yang ditamatkan.

Rata-rata lama sekolah penduduk di Kabupaten Banyumas pada tahun 2020 yaitu 7,52 tahun lebih rendah dibanding rata-rata lama sekolah di Provinsi Jawa Tengah dan nasional pada tahun yang sama yaitu 7,69 untuk Provinsi Jawa Tengah dan nasional mencapai 8.48 tahun. Perkembangan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional dari tahun 2016-2020 dapat dilihat pada grafik berikut ini:

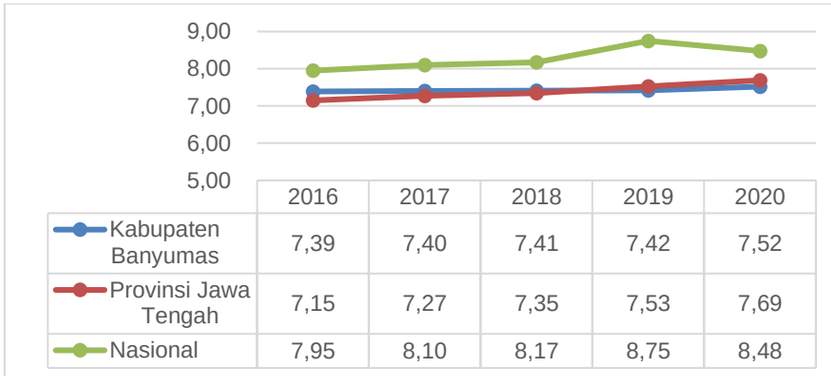

	2016	2017	2018	2019	2020
Kabupaten Banyumas	7,39	7,40	7,41	7,42	7,52
Provinsi Jawa Tengah	7,15	7,27	7,35	7,53	7,69
Nasional	7,95	8,10	8,17	8,75	8,48

Gambar 2.24
Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Banyumas
Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020
Sumber: BPS, 2020

Rata-rata lama sekolah memberikan gambaran kualitas sumber daya manusia, dengan asumsi bahwa semakin lama sekolah akan semakin banyak pengetahuan dan ketrampilan hidup yag dipelajari sehingga lebih bisa diterima di dunia kerja. Hal ini menjadi tantangan dan perhatian Pemerintah daerah dalam bidang pendidikan, bidang tenaga kerja dan atau bidang lainnya untuk dapat memberikan pengetahuan dan ketrampilan penduduk di luar pendidikan formal, guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Banyumas.

2.2.2.4 Usia Harapan Hidup

Usia harapan hidup pada waktu lahir (Expectation of Life/Eo) merupakan gambaran rata-rata umur yang mungkin dapat dicapai oleh seorang bayi yang baru lahir. Usia harapan hidup penduduk Kabupaten Banyumas dari tahun ke tahun mengalami peningkatan.

Berdasarkan data BPS Kabupaten Banyumas 2020 usia harapan hidup di Kabupaten Banyumas adalah 73,72 tahun, dengan angka harapan hidup perempuan 75,55 tahun lebih tinggi dibanding laki-laki 71,80 tahun. Semakin tinggi usia harapan hidup mengindikasikan meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat. Perkembangan Usia Harapan Hidup di Kabupaten Banyumas dengan Provinsi Jawa Tengah dan nasional tahun 2016-2020 dapat dilihat pada grafik berikut:

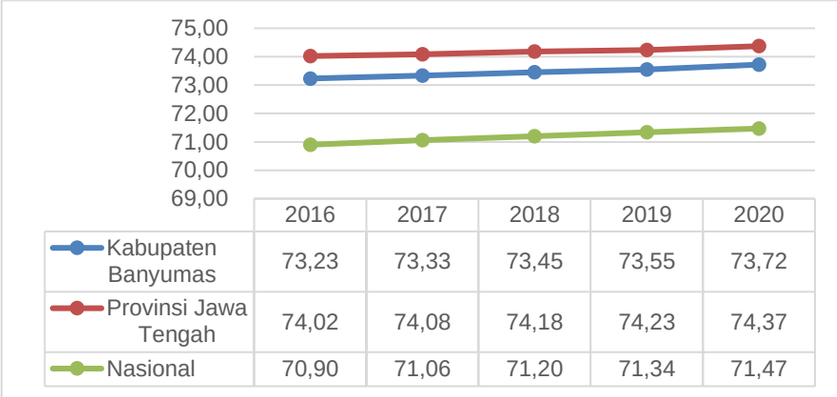

	2016	2017	2018	2019	2020
Kabupaten Banyumas	73,23	73,33	73,45	73,55	73,72
Provinsi Jawa Tengah	74,02	74,08	74,18	74,23	74,37
Nasional	70,90	71,06	71,20	71,34	71,47

Gambar 2.25
Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020
Sumber: BPS, 2020

2.2.2.5 Pengeluaran Perkapita Disesuaikan

Pengeluaran per kapita yang disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (Purcashing Power Parity-PPP). Rata-rata pengeluaran per kapita setahun diperoleh dari Susenas, dihitung dari level provinsi hingga level kabupaten/kota. Rata-rata pengeluaran per kapita dibuat konstan/riil dengan tahun dasar 2012=100. Perhitungan paritas daya beli pada metode baru menggunakan 96 komoditas dimana 66 komoditas merupakan makanan dan sisanya merupakan komoditas non-makanan. Metode penghitungan paritas daya beli menggunakan Metode Rao. Rata-rata pengeluaran per kapita konstan kemudian disesuaikan dengan cara dibagi dengan paritas daya beli (Purcashing Power Parity-PPP). Pengeluaran yang telah dibagi dengan PPP ini disebut dengan pengeluaran per kapita yang disesuaikan.

Indikator ini memberikan gambaran tentang kemampuan masyarakat dalam mengakses sumber daya ekonomi dalam arti luas. Semakin meningkat pendapatan seseorang diharapkan pengeluaran per kapita yang disesuaikan makin meningkat pula. Tetapi hubungan ini tidak selalu benar, terutama bila tingkat kenaikan pendapatan masih lebih rendah dari tingkat kenaikan harga secara umum.

Besarnya pengeluaran per kapita yang disesuaikan Kabupaten Banyumas telah terjadi peningkatan selama periode 2016-2019, namun menurun di tahun 2020 dikarenakan adanya pandemi COVID-19. Hal ini mengindikasikan bahwa IPM sangat sensitif sekali terhadap perubahan ekonomi yang sangat drastis, lain halnya dengan indikator pendidikan dan kesehatan yang dampaknya akan terlihat pada beberapa tahun berikutnya yakni sekitar 3 atau 4 tahun berikutnya. Jadi peningkatan paritas daya beli tersebut seiring dengan perbaikan ekonomi Kabupaten Banyumas yang ditunjukkan dengan meningkatnya pendapatan perkapita. Dengan turunya Pengeluaran per kapita disesuaikan Kabupaten Banyumas tahun 2020 mempengaruhi pula penurunan pendapatan perkapita.

Adapun pengeluaran per kapita disesuakan pada kurun waktu tahun 2016-2020 dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2.26
Pengeluaran per Kapita Disesuaikan Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2020
Sumber: BPS Kabupaten Banyumas 2020

2.2.2.6 Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup

Dalam menjamin kehidupan masyarakat yang sehat diperlukan upaya peningkatan derajat kesehatan yang baik, diawali dari lingkup keluarga melalui fase kehamilan, bayi, anak, remaja, dewasa sampai dengan lanjut usia (lansia). Faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain kecukupan asupan gizi, kesadaran dalam Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) serta kesadaran diri dalam deteksi dini penyakit.

Sasaran prioritas pembangunan kesehatan salah satunya adalah ibu dan anak karena merupakan kelompok rentan yang perlu menjadi fokus perhatian pembangunan kesehatan. Angka Kematian Ibu (AKI) mencerminkan risiko yang dihadapi ibu selama kehamilan, melahirkan, dan masa nifas yang dipengaruhi oleh status gizi ibu keadaan sosial ekonomi, keadaan yang kurang baik menjelang kehamilan kejadian bebagai komplikasi pada kehamilan dan kelahiran, tersedianya dan penggunaan fasilitas pelayanan kesehatan termasuk pelayanan perinatal daan obstetri. Terjadinya angka kematian ibu menujukan keadaan sosial ekonomi yang rendah dan fasilitas pelayanan kesehatan termasuk pelayanan perinatal dan obstetri yang rendah pula.

Angka Kematian Ibu (AKI) tahun 2020 kembali naik menjadi 41,5 (11 kasus) dari sebesar 37,6 (10 kasus) pada tahun 2019. Upaya penurunan AKI tetap menjadi perhatian untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan/SDG's. Angka kematian ibu di Kabupaten Banyumas tahun 2016 s.d. 2020 dapat dilihat pada gambar berikut:

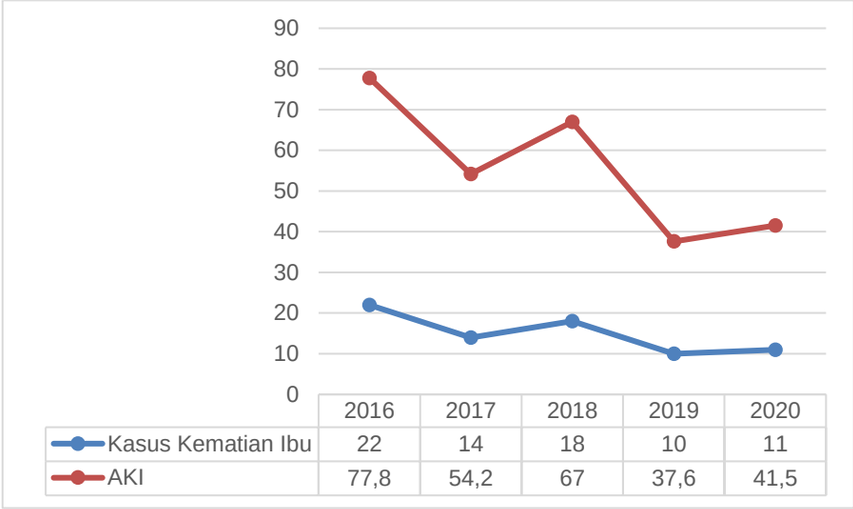

	2016	2017	2018	2019	2020
Kasus Kematian Ibu	22	14	18	10	11
AKI	77,8	54,2	67	37,6	41,5

Gambar 2.27
Angka Kematian Ibu Kabupaten Banyumas Tahun 2016–2020
Sumber Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas, 2020

Kematian ibu juga dipengaruhi baik oleh penyebab langsung maupun tidak langsung. Penyebab langsung kematian ibu terbesar adalah komplikasi obstetrik (90 %) yang dikenal dengan Trias Klasik seperti perdarahan, infeksi dan preeklamsi, atau komplikasi pada saat kehamilan, kelahiran dan selama nifas yang tidak tertangani dengan baik dan tepat waktu.

Upaya percepatan penurunan AKI dapat dilakukan dengan menjamin agar setiap ibu mampu mengakses pelayanan kesehatan yang berkualitas, seperti pelayanan pemeriksaan ibu hamil (Ante Natal Care), pertolongan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan yang kompeten serta pelayanan nifas, dengan melalui beberapa pendekatan yaitu:

Pendekatan infrastruktur: pembangunan infra struktur kesehatan (Rumah sakit, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Poskesdes.); pembangunan infrastruktur jalan akses kesehatan; pembangunan infrastruktur pemukiman (Sanitasi: jambanisasi, air bersih, penataan lingkungan kumuh: Rumah Layak Huni).
Pendekatan sosial: pembinaan poyandu, pembinaan upaya kesehatan kerja, pembinaan desa siaga, pembinaan perilaku hidup bersih dan sehat, pembina dan pemberdayaan kelompok masyarakat terhadap upaya kesehatan masyarakat.
Pendekatan ekonomi: penyaluran hibah uang dana bergulir, program desa mandiri pangan, pembinaan UMKM, pembinaan produksi pangan rumah tangga.

2.2.2.7 Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup

Angka kematian bayi merupakan gambaran kurangnya asupan gizi selama dalam kandungan yang menyebabkan berat badan lahir rendah, kelainan konginetal pada bayi dan kehamilan yang tidak dikehendaki. Angka kematian bayi di Kabupaten Banyumas dalam periode tahun 2016-2020 mengalami penurunan. Kondisi AKB di Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.21
Angka Kematian Bayi Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2020

No	Tahun	Kematian Bayi	
		Kasus	Per 1.000 kh
1	2016	239	8,4
2	2017	218	8,4
3	2018	208	7,2
4	2019	197	7,4
5	2020	187	7,06

Sumber Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas, 2020

Untuk Penanganan Angka Kematian ibu pelaksnaannya lebih pada Kesehatan ibu hamil dimana terdapat pada SPM Kesehatan yaitu Pelayanan Kesehatan ibu hamil yang didukung dengan beberapa indicator seperti: Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil, Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan, Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir, Cakupan pelayanan balita sesuai standar, Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani, Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan, Cakupan kunjungan bayi, Cakupan kunjugan ibu hamil K4, Cakupan pelayanan nifas, Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani, Cakupan pelayanan anak balita, Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani, Cakupan pelayanan ibu hamil K1, Angka Kematian Neonatal, Angka Kelangsungan Hidup bayi, Angka Kematian Bayi, dan Angka kematian balita.

Untuk melihat indikator capaian SPM Kesehatan pada Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sampai dengan tahun 2016-2020 dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 2.22
Capaian Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal pada Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil di Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2018

No.	Indikator SPM Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100	100	100	100	100
	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100	100	100	100	100
3	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	-	-	-	-	96.16
4	Cakupan pelayanan balita sesuai standar	100	100	100	100	100
5	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	100	100	100	100	100
6	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	100	100	100	100	100
7	Cakupan kunjungan bayi	100	100	100	100	100
8	Cakupan kunjugan ibu hamil K4	100	100	100	100	100
9	Cakupan pelayanan nifas	100	100	100	100	100
10	Cakupan neonatus dengan	100	100	100	100	100

No.	Indikator SPM Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
	komplikasi yang ditangani					
11	Cakupan pelayanan anak balita	100	100	100	100	100
12	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	100	100	100	100	100
13	Cakupan pelayanan ibu hamil K1	100	100	100	100	100
14	Angka Kematian Neonatal	5,2	5,84	5,46	4,14	6,42
15	Angka Kelangsungan Hidup bayi	991,6	991,6	992,8	992,6	992,9
16	Angka Kematian Bayi	8,4	8,4	7,2	7,4	7,06
17	Angka kematian balita	10,16	8,97	8,94	9,17	8,95

Sumber Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas, 2020

Capaian SPM Kesehatan pada pelayanan kesehatan ibu hamil sampai dengan tahun 2020 sudah cukup bagus dan untuk tetap meningkatkan kinerja pelayanan ini, pemerintah kabupaten banyumas tetap mendukung dalam perencanaan jangka menengah pada program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak.

2.2.2.8 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Selama kurun waktu lima tahun terakhir TPT Kabupaten Banyumas mengalami perkembangan fluktuatif yaitu sebesar 6% pada tahun 2020 naik dari sebelumnya 4,21% pada tahun 2019, dengan kecenderungan lebih rendah dibanding TPT Provinsi Jawa Tengah sebesar 6,48% dan nasional sebesar 7,07%. Semakin rendah TPT semakin baik, yang berarti menunjukkan jumlah pengangguran di Kabupaten Banyumas lebih rendah dibandingkan pengangguran di Provinsi Jawa Tengah dan Nasional.

Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Banyumas dibandingkan dengan TPT Provinsi Jawa Tengah dan Nasional digambarkan sebagai berikut:

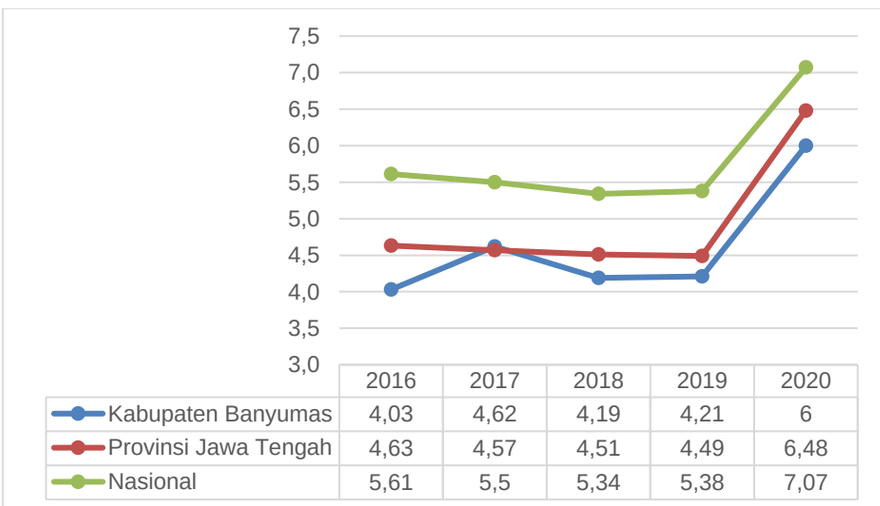

Gambar 2.28
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020 (%)
Sumber: BPS, 2021

Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Banyumas masih menjadi permasalahan pembangunan yang akan datang. Pembatasan

kegiatan masyarakat selama pandemi COVID-19 berdampak pada bertambahnya jumlah pengangguran. Untuk menekan tingkat pengangguran tersebut Pemerintah Kabupaten Banyumas telah mengupayakan penciptaan berbagai lapangan kerja, mendorong pengembangan UMKM, inovasi daerah, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Untuk memperluas lapangan kerja Pemerintah Kabupaten Banyumas berupaya mengembangkan kawasan industri. Beberapa kajian dan regulasi telah disusun untuk mendukung terwujudnya kawasan industri di Kabupaten Banyumas. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas (2011-2031) yang masih berlaku hingga saat ini terdapat total luas kawasan peruntukan industri (KPI) kurang lebih 500 Ha yang berada tersebar di Kecamatan Ajibarang, Wangon, Sokaraja, dan Kemranjen. Dalam draf revisi RTRW direncanakan kawasan peruntukan industri bertambah menjadi kurang lebih 2.000 Ha, berada tersebar di 6 kecamatan yaitu Kecamatan Wangon, Lumbir, Ajibarang, Jatilawang, Rawalo, dan Kalibagor. Kajian terkait pengembangan kawasan industri pada tahun 2020 Dinas Perindustrian dan Perdagangan sudah menyusun Studi Kelayakan dan Masterplan Kawasan Industri.

Upaya lainnya untuk menekan tingkat pengangguran dilakukan antara lain melalui program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja dan pengembangan UMKM, pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan, dan pengembangan penelitian dan inovasi.

2.3. Aspek Pelayanan Umum

Penyelenggaraan pelayanan pemerintah merujuk pada Undang-undang 23 tahun 2014 dikategorikan dalam dua hal, urusan pemerintahan absolut dan urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib dibagi dalam urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar dan urusan pemerintah yang tidak terkait pelayanan dasar. Untuk memastikan penyelenggaraan Pelayanan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara berjalan optimal maka diatru melalui Standar Pelayanan Minimal (SPM). Untuk melihat sejauh mana capaian penyelengaraan pelayanan oleh pemerintah bisa dilihat pada indikator kinerja dari masing-masing bidang.

2.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

2.3.1.1 Pendidikan

Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka partisipasi kasar (APK) digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

Angka partisipasi kasar merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut.

Perkembangan APK Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2020 dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 2.23
Angka Partisipasi Kasar untuk PAUD/TK, SD/MI, dan SMP/MTs di Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2020

No	Angka Partisipasi Kasar	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	APK PAUD/TK	75,90	76,05	77,23	77.25	77,5*
2	APK SD/MI/Paket A	111.66	111.43	108.82	108.19	106,90
3	APK SMP/MTs/Paket B	77.97	90.95	86.79	82,88	85,04

*Sumber: * BPS Kabupaten Banyumas, 2020*

APK PAUD/TK

Angka partisipasi kasar PAUD/TK dan APK SMP/MTs/Paket B sampai dengan tahun 2020 belum mencapai 100%. Angka tersebut menunjukan bahwa belum semua anak usia PAUD mengikuti pendidikan jenjang PAUD. Belum optimalnya APK PAUD/TK perlu menjadi perhatian mengingat pentingnya pendidikan usia dini untuk mempersiapkan pendidikan anak ke jenjang pendidikan selanjutnya, membantu perkembangan emosional dan intelektual anak, dan membentuk kepribadian anak secara positif.

APK SD/MI

APK SD/MI Kabupaten Banyumas tahun 2016-2019 mengalami penurunan dari 111,48 di tahun 2016 menjadi 106,9%. Meskipun mengalami penurunan APK SD/MI masih di atas 100 %, ini menunjukan bahwa anak usia sekolah SD/MI di Kabupaten Banyumas telah masuk dalam pendidikan jenjang SD/MI.

Dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan kabupaten sekitar capaian APK SD/MI Kabupaten Banyumas lebih tinggi dari APK Provinsi Jawa Tengah dan peringkat ketiga di wilayah Barlingmascakeb. Perkembangan APK SD/MI Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dan kabupaten sekitar, sebagaimana gambar berikut:

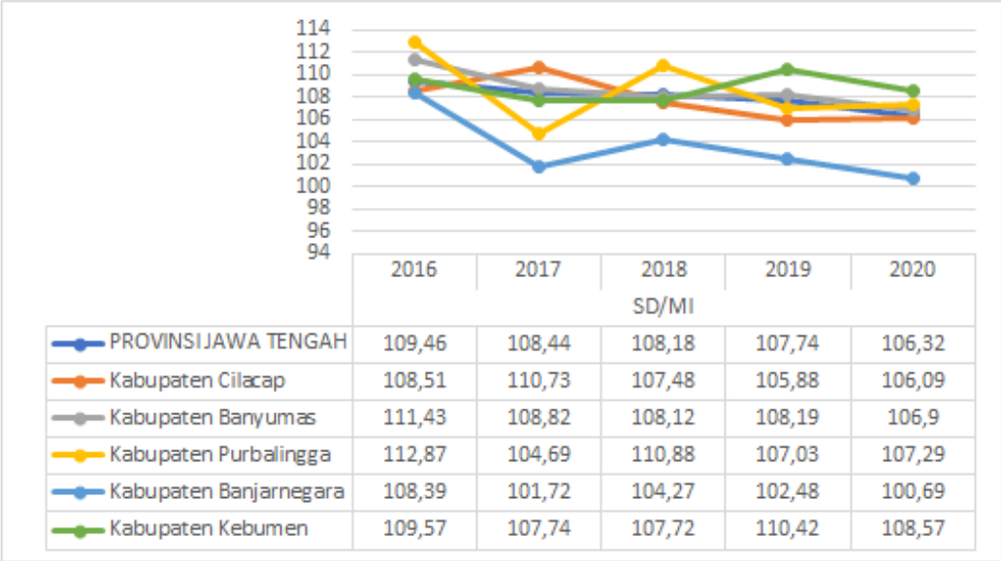

	2016	2017	2018	2019	2020
			SD/MI		
PROVINSI JAWA TENGAH	109,46	108,44	108,18	107,74	106,32
Kabupaten Cilacap	108,51	110,73	107,48	105,88	106,09
Kabupaten Banyumas	111,43	108,82	108,12	108,19	106,9
Kabupaten Purbalingga	112,87	104,69	110,88	107,03	107,29
Kabupaten Banjarnegara	108,39	101,72	104,27	102,48	100,69
Kabupaten Kebumen	109,57	107,74	107,72	110,42	108,57

Gambar 2.29
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI Kabupaten Banyumas, Kabupaten Sekitar dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020 (%)
Sumber: BPS, 2020

APK SMP/MTs

Untuk jenjang pendidikan SMP/MTs/Paket B angka partisipasi kasar belum mencapai 100%, yang mengindikasikan bahwa terdapat anak yang tidak melanjutkan pendidikannya. Hal tersebut menjadi tantangan dalam pengembangan sumber daya manusia untuk memperoleh manfaat dari bonus demografi di Kabupaten Banyumas. APK SMP/MTs Kabupaten Banyumas tahun 2016-2020 mengalami penurunan dari 90,95% pada tahun 2016 menjadi 85,04% pada tahun 2020. Capaian tahun 2020 tersebut di bawah APK Provinsi Jawa Tengah sebesar 93,21% dan paling rendah dibanding Kabupaten sekitar. Capaian APK SMP/MTs Kabupaten Banyumas, wilayah kabupaten sekitar dan Provinsi Jawa Tengah tahun 2016-2020 dapat dilihat pada gambar berikut:

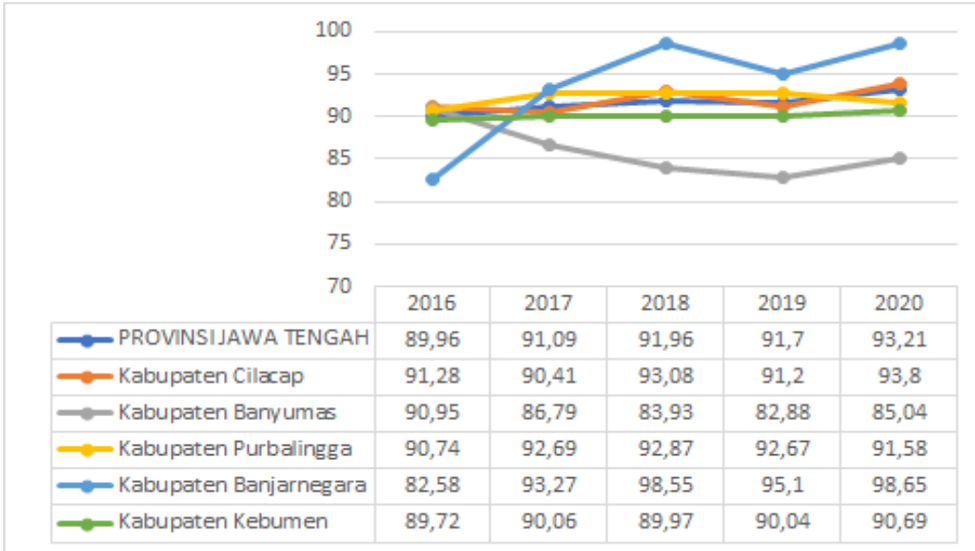

Gambar 2.30
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs Kabupaten Banyumas, Kabupaten Sekitar dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020 (%)
Sumber: BPS, 2020

Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. Bila APK digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan di suatu jenjang pendidikan tertentu tanpa melihat berapa usianya, maka APM mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu.

Angka Partisipasi Murni SD/MI/Paket A dan APM SMP/MTs/Paket B Kabupaten Banyumas tahun 2016-2020 fluktuatif. Angka partisipasi murni Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2020 dapat di lihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.24
Angka Partisipasi Murni untuk SD/MI, dan SMP/MTs di Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2020

No	Angka Partisipasi Murni	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	APM SD/MI/Paket A (%)	98,86	98,75	98,27	98,77	98,54
2	APM SMP/MTs/Paket B (%)	83,01	81,41	80,21	80,73	81,23

Sumber: BPS Kabupaten Banyumas, 2020

Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A

Angka Partisipasi Murni SD/MI Kabupaten Banyumas dari tahun 2016-2020 mengalami penurunan dari 98,86% di tahun 2016 menjadi 98,54% di tahun 2020. APM SD/MI tahun 2020 tersebut masih di atas APM SD/MI Provinsi Jawa Tengah sebesar 97,77%, dan peringkat ke-2 dibandingkan dengan kabupaten sekitar.

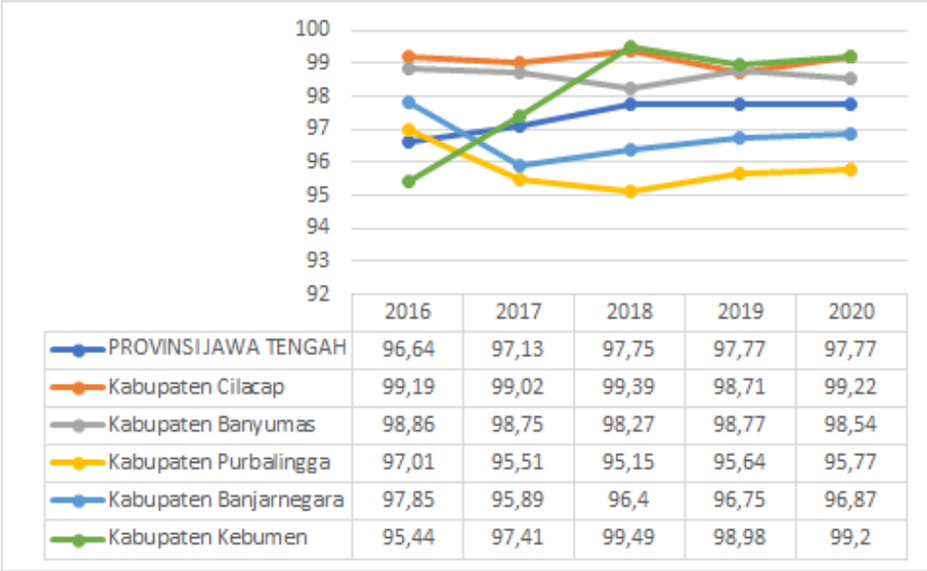

	2016	2017	2018	2019	2020
PROVINSI JAWA TENGAH	96,64	97,13	97,75	97,77	97,77
Kabupaten Cilacap	99,19	99,02	99,39	98,71	99,22
Kabupaten Banyumas	98,86	98,75	98,27	98,77	98,54
Kabupaten Purbalingga	97,01	95,51	95,15	95,64	95,77
Kabupaten Banjarnegara	97,85	95,89	96,4	96,75	96,87
Kabupaten Kebumen	95,44	97,41	99,49	98,98	99,2

Gambar 2.31
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI Kabupaten Banyumas, Kabupaten Sekitar dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020 (%)
Sumber: BPS, 2020

APM SMP/MTs Paket B

APM SMP/MTs Paket B Kabupaten Banyumas tahun 2016-2018 mengalami penurunan dari 83,01 pada tahun 2016 menjadi 81,23 pada tahun 2020. Angka ini lebih besar dari APM SMP/MTs/Paket B Provinsi Jawa Tengah dan peringkat ke-2 dibandingkan kabupaten sekitar.

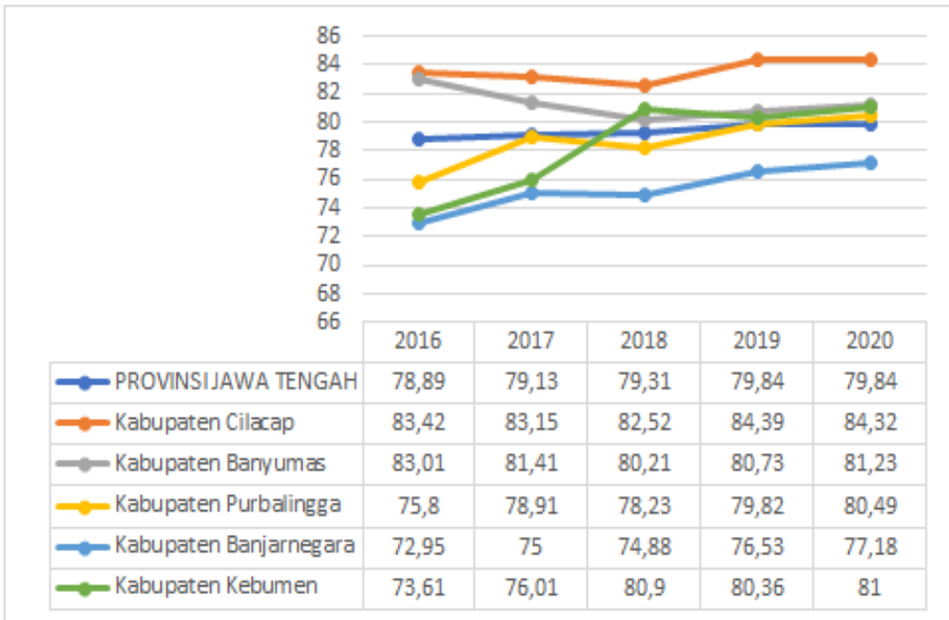

	2016	2017	2018	2019	2020
PROVINSI JAWA TENGAH	78,89	79,13	79,31	79,84	79,84
Kabupaten Cilacap	83,42	83,15	82,52	84,39	84,32
Kabupaten Banyumas	83,01	81,41	80,21	80,73	81,23
Kabupaten Purbalingga	75,8	78,91	78,23	79,82	80,49
Kabupaten Banjarnegara	72,95	75	74,88	76,53	77,18
Kabupaten Kebumen	73,61	76,01	80,9	80,36	81

Gambar 2.32
Angka Partisipasi Murni SMP/MTs di Kabupaten Banyumas, Kabupaten Sekitar dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020
Sumber: BPS Kabupaten Banyumas, 2020

Capaian APM SD/MI/Paket A dan APM SMP/MTs/Paket B masih perlu perhatian dalam rangka pendidikan dasar sembilan tahun dan pembangunan sumber daya manusia.

Rasio Murid terhadap Guru

Untuk menunjang pendidikan di Kabupaten Banyumas selain ketersediaan fasilitas pendidikan hal penting lainnya adalah peran guru. Rasio murid terhadap guru di Kabupaten Banyumas pada semua jenjang pendidikan cukup baik. Namun demikian dengan banyaknya guru yang memasuki masa pensiun pada sampai dengan tahun 2019 perlu menjadi perhatian agar jumlah guru tetap memadai untuk pendidikan di berbagai jenjang. Perkembangan kondisi rasio murid terhadap guru selama kurun waktu 2016-2020 terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.25
Rasio Murid terhadap Guru Jenjang Pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Banyumas Tahun 2016–2020

No.	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	SD/MI					
	Murid	170.332	172,209	173.377	171.541	169.889
	Guru	9.799	9,169	9.267	10.014	10.690
	Rasio Guru terhadap murid	17	19	18	17	15,89
2.	SMP/MTs					
	Murid	79.462	79,225	80.026	82.321	84.113
	Guru	4.390	4,198	4.277	4.446	4.646
	Rasio Guru terhadap murid SMP/MTs	18	19	18	19	18,10

Sumber: BPS Kabupaten Banyumas, 2020

Rasio guru terhadap murid dihitung dengan jumlah guru secara keseluruhan baik yang PNS maupun yang non PNS. Apabila hanya dihitung dengan jumlah guru PNS maka jumlahnya sangat tidak memadai. Rasio murid terhadap guru di Kabupaten Banyumas baik pada jenjang SD maupun SMP sudah cukup bagus. Semakin kecil rasio murid terhadap guru artinya jumlah murid yang dilayani oleh seorang guru semakin kecil, sehingga diharapkan kualitas pengajaran dan perhatian guru terhadap muridnya semakin bagus.

Anak Tidak Sekolah

Anak Tidak Sekolah adalah anak usia sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas (7-18 tahun) yang:

- tidak pernah bersekolah baik di jenjang SD/MI sederajat, SMP/MTs sederajat, atau SMA/MA sederajat
- putus sekolah tanpa menyelesaikan jenjang pendidikannya (putus sekolah di tengah-tengah jenjang SD, SMP, atau SMA)
- putus sekolah tanpa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi (transisi dari jenjang SD ke jenjang SMP atau dari jenjang SMP ke jenjang SMA)

Kabupaten Banyumas dalam melaksanakan Strategi Nasional Penanganan Anak Tidak Sekolah baru mendata anak putus sekolah jenjang pendidikan SD dan SMP dan angka melanjutkan ke jenjang SMP dan SMA.

Angka Putus Sekolah tingkat SD dan SMP Kabupaten Banyumas tahun 2016-2020 mengalami penurunan. Untuk angka putus sekolah jenjang pendidikan SD/MI dari tahun 2016 sebesar 0,033% turun pada

tahun 2017 sebesar 0,026 % dan naik di tahun 2018 dan 2019 sebesar 0,040% dan menurun pada tahun 2020 sebesar 0,034% sedangkan untuk jenjang SMP/MTs angka putus sekolah mengalami penurunan, pada tahun 2016 anak putus sekolah SMP/MTs adalah berjumlah 0,166 dan menurun pada tahun 2020 sebesar 0,102%.

Perkembangan Angka Putus Sekolah jenjang SD/MI dan SMP/MTs pada tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut:

Tabel 2.26
Angka Putus Sekolah SD/MI dan SMP/MTs Kabupaten Banyumas

Angka Putus Sekolah	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah siswa SD/MI	170,183	170,332	172,044	173,278	171,189
Jumlah siswa putus sekolah SD/MI	57	45	68	70	59
Angka Putus Sekolah SD/MI	0.033	0.026	0.040	0.040	0.034
Jumlah siswa SMP/MTs	79,949	79,462	79,333	79,179	80,045
Jumlah siswa putus sekolah	133	124	164	139	82
Angka Putus Sekolah SMP/MTs	0.166	0.156	0.207	0.176	0.102

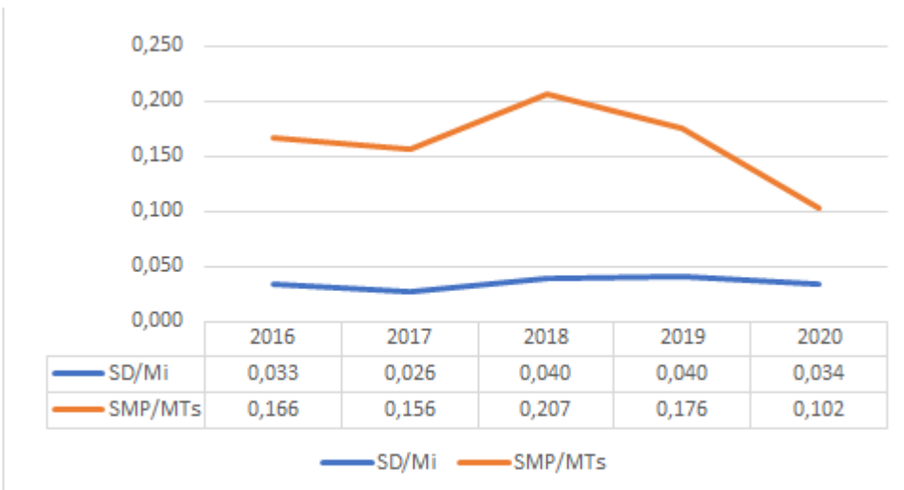

Gambar 2.33
Angka Putus Sekolah SD/MI dan SMP/MTs Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2020
Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, 2020

Angka Melanjutkan

Angka melanjutkan jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Banyumas untuk tahun 2016 dan 2017 untuk jenajang SD/MI yang melanjutkan ke jenajng SMP/MTs sebesar 100% dan untuk tahun 2018 sebesar 101,48% , tahun 2019 sebesar 106,42% dimana disebabkan jumlah murid yang melanjutkan di jenjang SMP/MTs di kabupaten Banyumas ada yang berasal dari luar Kabupaten Banyumas dan di Tahun 2020 sebesar 100% dimana penurunan tersebut dikarenakan telah diterapkan sistem zonasi sekolah dalam wilayah abupaten/Kota di Jawa Tengah.

Untuk Angka melanjutkan pada jenang SMP/MTs ke jenjang SMA/MA pada tahun 2016 sampai tahun 2020 mengalami peningkatan yang fluktuatif di mana tahun 2016 sebesar 94,93% dan di tahun 2020 sebesar 96,2.

Tabel 2.27
Capaian Angka Melanjutkan Jenjang Pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2020

No	Angka Melanjutkan	2016	2017	2018	2019	2020
1	SD/MI ke SMP/MTs	100	100	101,48	106,4	100
2	SMP/MTs ke SMA/SMK/ MAN	94,93	92,47	96,10	96,36	96,2

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, 2020

Kondisi Bangunan Sekolah

Kondisi Bangunan Sekolah jenjang SD

Kondisi bangunan sekolah jenjang SD dalam kondisi baik mengalami penurunan, dari tahun 2016 sebesar 82% menjadi sebesar 71,64% pada tahun 2020, kondisi rusak ringan mengalami kenaikan dari 13,8% pada tahun 2016 menjadi sebesar 19,69% pada tahun 2020 dan kondisi rusak berat mengalami kenaikan dari tahun 2016 sebesar 4,5% menjadi sebesar 8,67% pada tahun 2020.

Rincian kondisi bangunan sekolah jenjang SD dari tahu 2016 sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat pada tabet berikut :

Tabel 2.28
Kondisi Bangunan Sekolah Jenjang SD di Kabupaten Banyumas Tahun 2016–2020 (%)

No	Kondisi Bangunan Sekolah SD	2016	2017	2018	2019	2020
1	Baik	82	88,12	77,6	77,64	71,64
2	Rusak Ringan	13,8	9,43	18,7	18,68	19,69
3	Rusak Berat	4,5	2,45	3,7	3,68	8,67

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, 2020

Kondisi Bangunan Sekolah jenjang SMP

Bangunan sekolah jenjang SMP dalam kondisi baik di Kabupaten Banyumas untuk mendukung proses belajar mengajar cenderung mengalami penurunan dari tahun 2016 sebesar 98,06% menjadi 61,99% di tahun 2020, dengan kondisi rusak ringan mengalami kenaikan dari 0,47% pada tahun 2016 menjadi sebesar 33,47% pada tahun 2020 dan kondisi rusak berat mengalami kenaikan dari tahun 2016 sebesar 1,47% menjadi sebesar 4,54% pada tahun 2020

Rincian kondisi bangunan sekolah jenjang SMP dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.29
Kondisi Bangunan Sekolah Jenjang SMP di Kabupaten Banyumas Tahun 2016–2020

No	Kondisi Bangunan Sekolah SD	2016	2017	2018	2019	2020
1	Baik	98,06	98,57	97,58	97,58	61,99
2	Rusak Ringan	0,47	0,62	1,07	1,07	33,47
3	Rusak Berat	1,47	0,81	1,35	1,35	4,54

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, 2020

2.3.1.2 Kesehatan

Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Sebagai upaya peningkatan kualitas hidup manusia, pembangunan bidang kesehatan merupakan komponen penting untuk mendorong produktivitas masyarakat. Hal ini dikarenakan apabila kondisi kesehatan manusia terjaga, maka dapat memenuhi kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup. Sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan upaya kesehatan dilakukan melalui promotif, preventif, kuratif dan rehabilitative. Upaya pencegahan terhadap kejadian kesakitan dilakukan dengan promotif dan preventif. Sedangkan upaya kuratif dan rehabilitatif antara lain melalui penyediaan sarana prasarana kesehatan perorangan maupun rujukan, serta pemenuhan cakupan tenaga medis dan paramedis untuk pelayanan kesehatan masyarakat. Pemerintah bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat.

Rasio Puskesmas

Puskesmas adalah unit fungsional pelayanan kesehatan terdepan sebagai unit pelaksana teknis dinas kesehatan kota atau kabupaten yang melaksanakan upaya penyuluhan, pencegahan dan penanganan kasus-kasus penyakit di wilayah kerjanya, secara terpadu dan terkoordinasi. Untuk Puskesmas di wilayah Kabupaten Banyumas masih menangani kasus-kasus penyakit secara umum belum menangani kasus penyakit jiwa, dimana penanganan penyakit jiwa ditangani oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banyumas. Jumlah Puskesmas dan Puskesmas Pembantu di Kabupaten Banyumas tahun 2020 sebanyak 79 unit dengan rasio sebesar 0,042, atau 1 unit Puskesmas dan Puskesmas Pembantu melayani 23.711 penduduk. Standar pelayanan puskesmas per 1000 penduduk idealnya adalah 30.000 penduduk sehingga kondisi ketersediaan sarana prasarana puskesmas di Kabupaten Banyumas sampai dengan tahun 2020 sudah terpenuhi.

Tabel 2.30
Rasio Puskesmas dan Puskesmas Pembantu per Satuan Penduduk Tahun 2016-2020

Uraian	2017	2018	2019	2019	2020
Jumlah Penduduk	1.665.025	1.679.524	1.693.006	1.840.152	1.873.196
Jumlah Puskesmas	39	39	39	39	40
Jumlah Puskesmas Pembantu	39	39	39	39	39
Jumlah Puskesmas dan Jumlah Puskesmas Pembantu	78	78	78	78	79
Rasio Puskesmas dan Jumlah Puskesmas Pembantu per 1.000 penduduk	0,047	0,046	0,046	0,046	0,042

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas, 2020

Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk

Berdasarkan jenis dan pengelolaannya, rumah sakit dibagi dalam kategori Rumah Sakit Umum (Pusat, Daerah, Swasta) dan Rumah Sakit Khusus. Sampai dengan tahun 2020 di Kabupaten Banyumas terdapat 23 rumah sakit. Dengan jumlah penduduk Kabupaten Banyumas sebanyak 1.873.196 jiwa, rasio rumah sakit per satuan penduduk di Kabupaten Banyumas tahun 2020 adalah sebesar 0,0123, atau 1 rumah sakit di Kabupaten Banyumas melayani 81.443 jiwa.

Tabel 2.31
Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk Tahun 2016-2020

Uraian	2016		2017	2018	2019	2020
Jumlah Penduduk	1.650.625		1.665.025	1.679.524	1.840.152	1.873.196
Jumlah Rumah Sakit	22		23	23	23	23
Rumah Sakit Umum	15		16	16	16	16
Rumah Sakit Khusus	7		7	7	7	7
Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	0,0133		0,0138	0,0137	0,0125	0,0123

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas, 2020

Rasio Dokter per Satuan Penduduk

Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat didukung ketersediaan tenaga kesehatan. Kecukupan tenaga kesehatan dengan masyarakat yang dilayani baik secara kuantitas maupun kualitas akan memberikan tingkat kepuasan yang semakin tinggi. Rasio tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk digunakan sebagai indikator untuk mengkur ketersediaan tenaga kesehatan. Organisai kesehatan dunia (WHO) dalam laporannya pada tahun 2006 menyebutkan bahwa ambang batas rasio jumlah dokter, perawat dan bidan terhadap jumlah penduduk adalah 2,3 per 1000 penduduk.

Tabel 2.32
Rasio Dokter per Satuan Penduduk Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Penduduk	1.650.625	1.665.025	1.679.524	1.840.152	1.873.196
Jumlah Dokter	655	722	749	887	911
Rasio Dokter Per Satuan Penduduk	0.40	0.43	0.45	0.48	0,49

Sumber: BPS Kabupaten Banyumas 2020

Pada tahun 2020 jumlah dokter umum yang ada di Kabupaten Banyumas sebanyak 991 orang. Dengan demikian rasio dokter per 1.000 penduduk di tahun 2020 sebesar 0,47 atau 1 orang dokter di Kabupaten Banyumas melayani 2.056 penduduk. Rasio dokter per 1.000 penduduk sampai dengan tahun 2020 masih jauh dari standar WHO untuk pemenuhan tenaga dokter yang ideal.

Rasio Tenaga Kesehatan per Satuan Penduduk

Rasio perawat dan bidan per 1.000 penduduk di Kabupaten Banyumas sampai dengan tahun 2020 belum memenuhi standar WHO. Jika dibandingkan dengan kebutuhan tenaga kesehatan berdasarkan target rasio tenaga kesehatan dengan jumlah penduduk dalam Rencana

Pengembangan Tenaga Kesehatan Tahun 2011-2025 hanya tenaga kefarmasian yang telah mencapai target. Berdasarkan dokumen tersebut target rasio tenaga kesehatan per 100.000 penduduk pada tahun 2020 antara lain yaitu: perawat 1: 178, bidan 1: 70 , tenaga kefarmasian 1: 26, dan ahli gizi 1: 7.

Sesuai dengan Kepmenkes No. 81/Menkes/SK/I/2004 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Tingkat Propinsi, Kabupaten/Kota serta Rumah Sakit, terutama dengan mengacu pada metode perhitungan kebutuhan tenaga berdasarkan pendekatan rasio terhadap nilai tertentu, maka ditetapkan sasaran strategis sebagai berikut: perawat 158 per 100.000 penduduk, bidan 75 per 100.000 penduduk, sanitarian 30 per 100.000 penduduk, tenaga gizi 48 per 100.000 penduduk. Untuk Kabupaten Banyumas sampai dengan tahun 2020 jumlah tenaga ahli gizi belum memenuhi standar tersebut, untuk 100.000 penduduk di Kabupaten Banyumas baru tersedia 7 orang ahli gizi.

Tabel berikut menyajikan jumlah dan rasio perawat, bidan, tenaga kefarmasian, dan tenaga gizi di Kabupaten banyumas tahun 2018–2019.

Tabel 2.33
Jumlah dan Rasio Perawat, Bidan, Tenaga Farmasi, dan Tenaga Gizi per 100.000 Penduduk di Kabupaten Banyumas, 2019-2020

Uraian	2019			2020		
	Jumlah	Rasio per Satuan Penduduk	Rasio per 100.000 Penduduk	Jumlah	Rasio per Satuan Penduduk	Rasio per 100.000 Penduduk
Penduduk	1.840.152			1.873.196		
Perawat	2623	0,0014	142,54	3340	0,0018	178,30
Bidan	993	0,0005	53,96	1313	0,0007	70,09
Farmasis	345	0,0002	18,75	497	0,0003	26,53
Ahli Gizi	106	0,0001	5,76	132	0,0001	7,05

Sumber: Data dan Informasi Kabupaten Banyumas 2019-2020

Persentase Balita Gizi Buruk

Dalam rangka pembangunan sumber daya manusia, selain intervensi gizi terhadap bayi Pemerintah Daerah juga memberikan perhatian terhadap asupan gizi balita. Persentase gizi buruk di Kabupaten Banyumas dari tahun 2016–2020 relatif kecil, dan telah mencapai target tujuan pembangunan berkelanjutan tahun 2030 (17%). Persentase gizi buruk di Kabupaten Banyumas dari tahun 2016–2020 dapat dilihat pada gambar berikut ini:

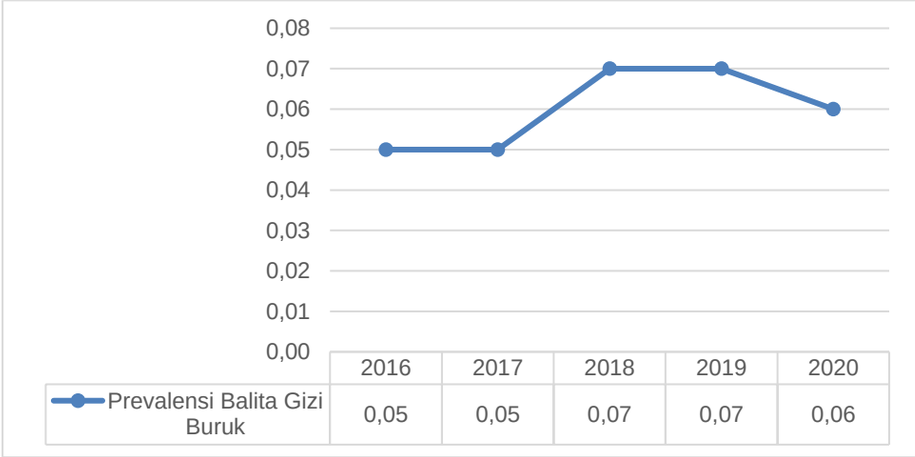

Gambar 2.34
Persentase Balita Gizi Buruk di Kabupaten Banyumas Tahun 2016–2020
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupten Banyumas, 2020

Pravelensi Balita Gizi Kurang

Gizi Kurang adalah gangguan kesehatan akibat kekurangan atau ketidakseimbangan zat gizi yang diperlukan untuk pertumbuhan, aktifitas berpikir dan semua hal yang berhubungan dengan kehidupan. Prevelansi balita gizi kurang Kabupaten Banyumas tahun 2016-2020 dapat dilihat sebagai mana gambar berikut ini:

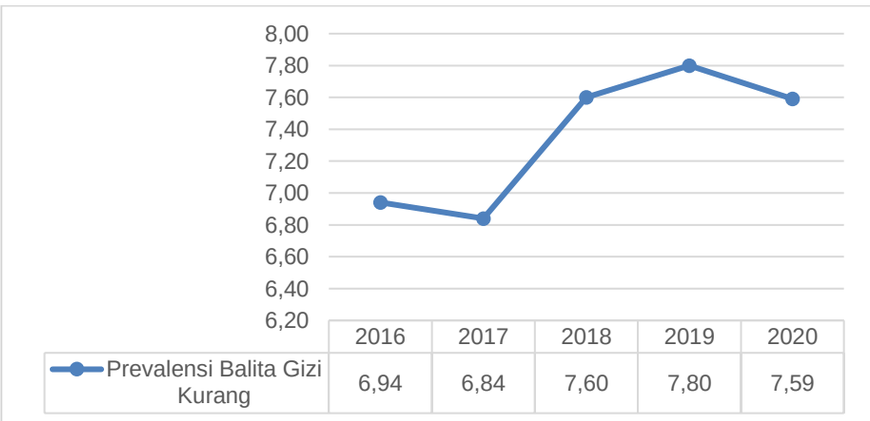

Gambar 2.35
Prevalensi Balita Gizi Kurang (%) Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2020
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupten Banyumas, 2020

Prevalensi balita gizi kurang di Kabupaten Banyumas dari tahun 2016–2019 fluktuatif dengan kecenderungan meningkat namun di tahun 2020 mengalami penurunan dengan angka 7,59 dimana terdapat penurunan sebesar 0,21 poin. Dengan menurunnya prevalensi balita gizi kurang akan menentukan kualitas sumber daya manusia yang akan datang. Peningkatan zat gizi dapat meningkatkan pertumbuhan dan kemampuan berpikir balita yang akan menjadi sumber daya manusia penerus bangsa. Peluang bonus demografi akan optimal dengan banyaknya usia produktif yang disertai dengan kualitas sumber daya manusia.

Prevalensi Balita Stunting

Gizi buruk merupakan salah satu penyebab terjadinya stunting. Kasus stunting di Kabupaten Banyumas pada tahun 2016 masih cukup tinggi sehingga Kabupaten Banyumas menjadi salah satu wilayah prioritas penanganan stunting di tingkat nasional dan provinsi. Pada tahun 2017-2020 kasus stunting mengalami penurunan dari 24,5 menjadi 14,21 %. upaya penurunan ini yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas adalah implementasi gerakan hidup sehat, Intervensi Gizi Spesifik, Intervensi Gizi Sensitif dan Workshop Stunting Dan Strategi Komuniukasi Perubahan Perilaku Pencegahan Stunting bagi masyarakat. Prosentase Kasus Stunting Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.34
Persentase Kasus Stunting Tahun 2016-2020

No	Tahun	% Stunting
		Balita 0-59 bulan
1	2016	24
2	2017	24,5
3	2018	20,4
4	2019	15,96
5	2020	14,21

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas, 2020

Selain pemberian asupan gizi yang seimbang pada usia balita, perlu diperhatikan pula pemenuhan gizi pada bayi usia 0-6 bulan dengan pemberian ASI eksklusif. Perkembangan pemberian ASI Eksklusif pada bayi usia 0-6 bulan ini meningkat dari tahun 2016-2019, namun turun pada tahun 2020. Peningkatan pemahaman tentang inisiasi menyusui dini dan pentingnya ASI eksklusif pada ibu melahirkan perlu terus dilakukan. Tabel 2.35 menunjukkan kondisi pemenuhan ASI Ekslusif pada bayi usia 0-6 bulan.

Tabel 2.35
Cakupan Bayi Usia 0-6 Bulan Yang Mendapatkan ASI Eksklusif (%) Tahun 2016-2020

Tahun	Cakupan (%) ASI
2016	50,2
2017	51,9
2018	63,3
2019	66,1
2020	61,9

Sumber Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas, 2020

Pemberian ASI Ekslusif dan asupan gizi seimbang pada balita merupakan salah satu upaya untuk membentuk SDM berkualitas. Hal tersebut sekaligus menjawab tantangan bonus demografi dalam mempersiapkan SDM sejak usia dini agar nantinya menghasilkan SDM berkualitas dan memiliki daya saing.

Pola Penyakit

Penyakit menular dan tidak menular dipengaruhi oleh faktor perilaku dan lingkungan yang kurang sehat antara lain pola makan yang belum memenuhi gizi seimbang, kurangnya aktivitas fisik, dan menurunnya kualitas kesehatan lingkungan. Kondisi penyakit baik

menular maupun tidak menular. Tabel di bawah ini menggambarkan kondisi penyakit menular dalam kurun waktu 2016-2020.

Tabel 2.36
Kondisi Penyakit Menular Kabupaten Banyumas Tahun 2016–2020

Tahun	IR DBD per 100.000 penduduk	CFR DBD (%)	CDR TB (%)	CR TB (%)	HIV/AIDS	
					Kasus HIV	Kasus AIDS
2016	55,07	1,82	70,02	96	287	163
2017	33,35	1,49	70,1	96	231	125
2018	3,07	3,64	94,2	42,2	221	136
2019	11	5,9	104,40	87,03	327	321
2020	19,95	3,17	77,39	71,42	267	159

Sumber Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas, 2020

Penyakit menular yang menjadi sasaran prioritas program di Kabupaten Banyumas adalah: TB, HIV/AIDS, Demam Berdarah Dengue (DBD). Angka kesakitan DBD cederung terus mengalami penurunan dari tahun 2016-2018 dan mengalami kenaikan pada tahun 2019-2020. Untuk itu upaya pencegahan penyakit menular harus ditingkatkan. Kasus HIV pada tahun 2016-2018 mengalami penurunan dan pada tahun 2019 mengalami kenaikan menjadi 327 dan menurun pada tahun 2020 sebesar 267. Kasus AIDS juga menurun dari tahun 2016-2017, naik pada tahun 2018-2019 dan menurun pada tahun 2020 menjadi 159 kasus AIDS. , dengan demikian HIV/AIDS masih menjadi masalah yang perlu ditangani secara serius, dikarenakan masih rendahnya pemahaman remaja terhadap akibat penyalahgunaan narkoba, dan kecenderungan meningkatnya perilaku yang menyimpang.

Sementara itu kasus positif COVID-19 sampai dengan 20 Januari 2021 adalah sebesar 4.193 terkonfirmasi positif, dengan 3031 orang berhasil sembuh, dan meninggal dunia 205 orang.

Di samping penyebab penyakit menular yang mengakibatkan kematian tidak disampingkan penyebab dari kematian adalah penyakit tidak menular (PTM). Kondisi penyakit tidak menular di Kabupaten Banyumas ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 2.37
Kondisi Penyakit Tidak Menular Kabupaten Banyumas Tahun 2016–2020 (Persentase per jumlah penduduk)

Tahun	Jenis PTM (Prevalensi)	
	Diabetes Milletus	Hipertensi
2015	1,4	2015
2016	1,4	2016
2017	6,9	2017
2018	1,7	2018
2019	1,52	2019
2020	1,37	2020

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas, 2020

Beberapa faktor yang meningkatkan risiko penyakit tidak menular antara lain kemajuan teknologi, mobilisasi penduduk, perilaku dan gaya hidup yang tidak sehat seperti kebiasaan merokok, diet tidak seimbang, kurang aktifitas fisik, dan konsumsi alkohol. Peningkatan PTM tidak saja menimbulkan dampak ekonomi tapi juga mengakibatkan penurunan produktifas karena kasus PTM banyak ditemukan pada usia produktif seperti hipertensi, diabetes mellitus, dan kanker.

Perilaku hidup sehat menjadi hal yang penting untuk ditanamkan pada masyarakat sejak mulai usia dini yang dilakukan melalui program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), Open Defecation Free (ODF) atau bebas buang air besar sembarangan. Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas guna meningkatkan jumlah desa/kelurahan agar terverifikasi sebagai ODF melalui pemberian jamban kepada kepala keluarga dengan mekanisme bantuan keuangan desa. Sampai dengan tahun 2020 telah ditetapkan 12 kecamatan ODF yaitu: Kecamatan Somagede, Lumbir, Gumelar, Wangon, Tambak, Sumpiuh, Banyumas, Cilongok, Jatilawang, Purwokerto Barat, Sokaraja, dan Kalibagor.

2.3.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pembangunan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang memiliki peran strategis tidak hanya karena terdapat sub bidang yang terkait dengan pelayanan dasar namun juga perannya sebagai pendukung keberhasilan pembangunan sektor lainnya. Sejalan dengan tema pembangunan Kabupaten Banyumas tahun 2021 yaitu Penguatan Perekonomian Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat, dibutuhkan infrastruktur penggerak ekonomi yang berkualitas agar mampu mendukung produktivitas dan konektivitas wilayah.

Sumber Daya Air

Sistem jaringan irigasi merupakan salah satu infrastruktur pendukung untuk mencapai ketahanan pangan dengan fungsi melayani ketersediaan air pada daerah irigasi. Jaringan irigasi yang ada di wilayah Kabupaten Banyumas terdiri atas daerah irigasi kewenangan Pemerintah Pusat, daerah irigasi kewenangan Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kabupaten Banyumas. Pembagian kewenangan dalam layanan penyediaan irigasi didasarkan pada luasan daerah irigasi dan ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi.

Tabel 2.38
Luas Daerah Irigasi di Kabupaten Banyumas

No	Kewenangan	Jumlah Daerah Irigasi	Luas (Ha)
1	Pusat	2	6.578
2	Provinsi Jawa Tengah	10	5.084
3	Kabupaten Banyumas	573	23.716
	Jumlah	585	35.378

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas, 2020

Kondisi jaringan irigasi menjadi faktor penting untuk ketahanan pangan dan mendukung pencapaian hasta krida Bupati terkait produksi padi, yaitu produksi padi 500.000 ton sampai dengan tahun 2023. Sejalan dengan hasta krida tersebut adalah hasta krida untuk peningkatan anggaran irigasi, sebagai upaya meningkatkan kondisi jaringan irigasi kabupaten. Kondisi jaringan irigasi kabupaten tahun 2016-2020 diuraikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.39
Kondisi Jaringan Irigasi Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2020

Uraian	Capaian (%)				
	2016	2017	2018	2019	2020
Panjang Jaringan Irigasi Kabupaten	620.933	620.933	641,081	641.081	641.081
Panjang Jaringan Irigasi Kabupaten dalam kondisi baik (%)	62,80	76,02	76,74	78,31	78,62
Panjang Jaringan Irigasi Kabupaten dalam kondisi rusak (%)	37.2	23.98	23,26	21,69	21,38
Rusak ringan	22,7	15,34	14,86	13,67	13,50
Rusak Sedang	7,77	3,41	3,32	2,99	3,10
Rusak berat	6,73	5,23	5.08	5,04	4,78

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas, 2020

Untuk meningkatkan produktivitas padi Pemerintah Kabupaten Banyumas mengikuti Program Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi Terpadu Partisipatif (IPDMIP). Program ini dirancang untuk mewujudkan sasaran pembangunan pertanian di Indonesia, untuk mencapai swasembada beras, dimulai tahun 2017, dan akan selesai pada tahun 2022. Dengan mengikuti IPDMIP Kabupaten Banyumas memperoleh dukungan anggaran untuk pembangunan irigasi sebesar Rp.13.140.654.000,00 dari total anggaran sebesar Rp.28.746.634.752,00 pada tahun 2020. Sehingga anggaran pembangunan irigasi meningkat tajam sebesar 90,4% dari anggaran pembangunan irigasi tahun 2019 (Rp. 15.097.769.939.00). Anggaran tersebut digunakan untuk rehabilitasi jaringan irigasi, perencanaan pengelolaan irigsasi dan pengutan kelembagaan irigasi, serta peningkatan kapasitas petani.

Kondisi jaringan irigasi merupakan salah satu faktor produksi yang penting untuk tanaman padi. Peningkatan anggaran irigasi berkorelasi positif terhadap peningkatan produksi tanaman padi, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.40
Peningkatan Anggaran Irigasi dan Hasil Produksi Padi Tahun 2016-2020

No	Tahun	Anggaran irgasi (x1.000.000)	Produksi Tanaman Padi (ton)
1	2016	154.69,89	368.285,00
2	2017	228.48,41	363.562,00
3	2018	151.41,73	409.054,00
4	2019	150.97,76	368.957,25
5	2020	287.46,63	371.827,14

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas, Dinpertan KP Kabupaten Banyumas, 2020

Program IPDMIP di Kabupaten Banyumas meliputi 7 daerah irigasi (DI) yang disepakati untuk memperoleh intervensi program (DI kesepakatan) yang meliputi DI Curug, DI Demong, DI Karangnangka, DI Jaganala, DI Kediri, DI Pandakraden, dan DI Danayuda dengan luas keseluruhan 3.105 Ha.

Dalam memenuhi kebutuhan suplai air baku, baik untuk irigasi maupun rumah tangga, komersial, dan industri, sampai dengan tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Banyumas telah membangun 10 dan merevitalisasi 5 sumber air baku (situ/telaga). Selain itu di Kabupaten Banyumas terdapat 1 embung yang dibangun oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan 1 embung yang dibangun oleh Balai Besar Wilayah

Sungai Serayu Opak. Sebaran embung di Kabupaten Banyumas dapat dilihat pada gambar berikut:

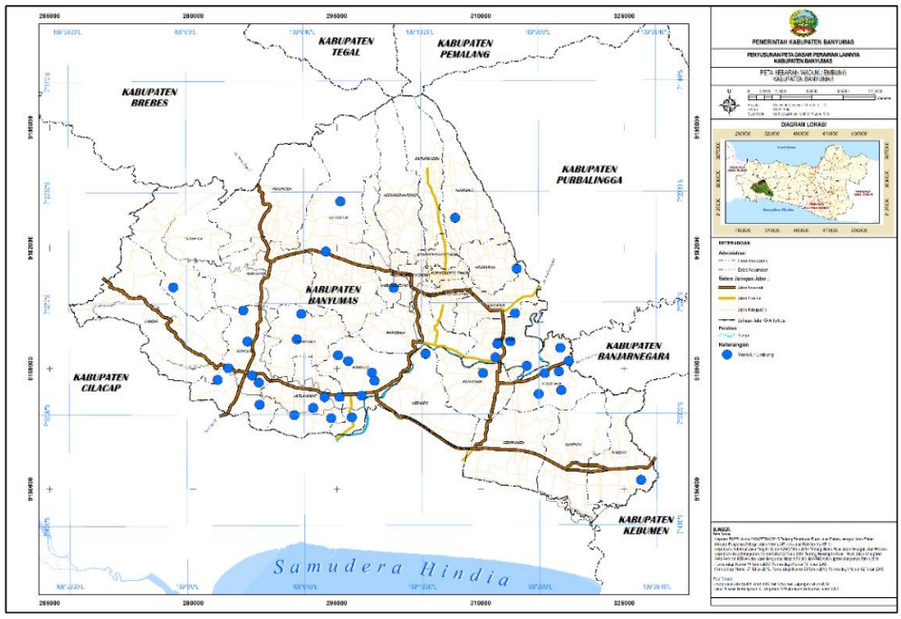

Gambar 2.36
Peta Sebaran Embung di Kabupaten Banyumas
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Dinpertan KP Kabupaten Banyumas, 2020 diolah

Air Minum

Kewenangan kabupaten/kota dalam penyediaan air minum berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah meliputi pengelolaan dan pengembangan SPAM di daerah kabupaten/kota. Penyediaan air dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Satria, Badan Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum berbasis masyarakat dan disediakan mandiri olah masyarakat adalah sebagai pelaksana penyelenggaraan SPAM untuk memenuhi urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang menjadi kebutuhan dasar warga negara guna memenuhi kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Sampai dengan tahun 2020 rumah tangga akses air minum baru menjangkau 74,43% dari seluruh rumah tangga di Kabupaten Banyumas.

Tabel 2.41
Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Air Minum Layak Perkotaan dan Perdesaan Kabupaten Banyumas 2016-2020

No	Tahun	Jumlah Rumah Tangga Berakses Air Minum	Jumlah Seluruh Rumah Tangga	Persentase
1	2016	308,181	445,973	69.10
2	2017	322,466	457,145	70.54
3	2018	331,36	462,173	71.70
4	2019	337,253	467,257	72.18
5	2020	347,792	467,257	74.43

Sumber: Dinperkim Kabupaten Banyumas, 2020

Salah satu tantangan dalam pemenuhan akses air minum layak di Kabupaten Banyumas adalah masih terdapat wilayah rawan kekeringan, terutama dikarenakan ketiadaan sumber air baku, di mana sebagian wilayah rawan kekeringan berada di luar cadangan air tanah.

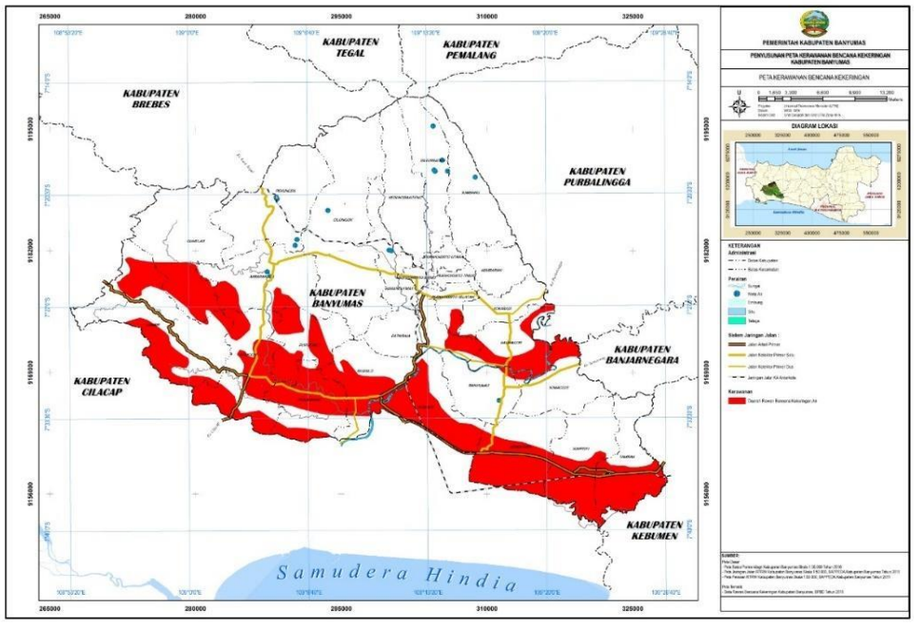

Gambar 2.37
Peta Kerawanan Bencana Kekeringan
Sumber: Penyusunan Peta Kerawanan Bencana Kekeringan Kabupaten Banyumas

Berdasarkan analisis KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 dengan data yang disesuaikan, rata-rata perubahan proporsi rumah tangga dengan akses air minum layak perkotaan dan perdesaan adalah 2,29% per tahun. Tanpa upaya keras tambahan Kabupaten Banyumas tidak dapat mencapat target SDGs akses menyeluruh air minum (100%) pada tahun 2030.

Sesuai dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) akses air minum untuk masyarakat harus memenuhi kriteria sebagai air minum aman, yaitu berasal dari sumber air yang layak, berada di dalam atau di halaman rumah, dapat diakses setiap saat dibutuhkan, dan kualitasnya memenuhi standar kesehatan. Cakupan akses air minum belum seluruhnya memenuhi kriteria aman sebagaimana TPB.

Air Limbah

Berdasarkan data monitoring dan evaluasi sanitasi total berbasis masyarakat Kementrian Kesehatan sampai dengan tahun 2020 rumah tangga berakses sanitasi di Kabupaten Banyumas baru mencapai 88,77%. Capaian tersebut hanya berdasakan akses jamban yang merupakan bagian kecil dari sistem pengelolaan air limbah. Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik di Kabupaten Banyumas masih perlu peningkatan pengelolaan lumpur tinja. Kabupaten Banyumas hanya memiliki 1 instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT) yang memerlukan revitalisasi. Pemerintah Kabupaten Banyumas tengah menata kembali pengelolaan air limbah, mulai dari kelembagaan hingga infrastruktur pendukungnya.

Instalasi pengolahan lumpur tinja yang ada saat ini seluas 0,25 Ha dengan kapasitas tampung sebanyak 23 m3/hari. Kegiatan penyedotan tinja masih belum optimal yaitu sebanyak ± 250 KK/tahun. Sedangkan untuk sarana angkut/truk tinja masih terbatas yaitu 2 unit milik Pemerintah Kabupaten Banyumas dan 4 unit yang terdaftar milik swasta.

Perkembangan capaian rumah tangga berakses sanitasi berdasarkan stbm.org adalah sebagai berikut:

Tabel 2.42
Persentase Rumah Tangga Bersanitasi Kabupaten Banyumas
Tahun 2016-2020

No	Tahun	Jumlah KK Data aktual ter-entry / Data di BPS)	Kemajuan								
			JSP	% Akses JSP	JSSP	% Akses JSSP	Sharing	% Akses Sharing	BABS	% Akses BABS	% Akses Progres
1	2016	480421/475688	253720	53.05	19157	4.01	33371	7.42	174173	35.51	64.49
2	2017	492702/475688	285090	57.76	29026	5.75	50977	10.37	127609	26.12	73.88
3	2018	491040/475688	305521	61.55	34437	6.57	62224	12.25	88858	19.63	80.37
4	2019	502023/475688	337400	66.02	32937	6.64	66584	13.27	65102	14.07	85.93
5	2020	513902/475688	348776	67.53	35006	6.92	73930	14.32	56190	11.23	88.77

Sumber: **http://monev.stbm.kemkes.go.id/monev**, *2020*

Jalan

Keputusan Bupati Banyumas Nomor: 620/302/Tahun 2016 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan di Kabupaten Banyumas Sebagai Ruas-Ruas Jalan Kabupaten menambah panjang jalan kabupaten yang semula sepanjang 804,784 Km menjadi 1.508 Km. Penambahan tersebut berasal dari ruas jalan desa yang menghubungkan antar desa yang kemudian diserahkan kewenangannya menjadi jalan kabupaten. Namun demikian jalan tersebut memiliki jenis permukaan yang berbeda-beda. Berikut jalan kabupaten berdasarkan permukaannya dan gambar jaringan jalan kabupaten di Kabupaten Banyumas.

Tabel 2.43
Panjang Jalan Kabupaten Berdasarkan Jenis Permukaan
Tahun 2020 (Km)

Total Panjang Jalan	Aspal/Penetrasi/ Macadam	Hotmix	Perkerasan Beton	Telford/ kerikil	Tanah /Belum Tembus
1.508,00	707,482	558,630	31,830	197,033	13,025

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas, 2020

Penambahan panjang jalan hotmix menjadi salah satu prioritas Bupati dihitung berdasarkan target penambahan total panjang jalan hotmix sepanjang 570 Km yang dibagi pelaksanaannya dalam 5 tahun atau 20% per tahun dari total target penambahan jalan hotmix (114 km per tahun). Target peningkatan jalan hotmix tahun 2019 dapat dipenuhi sebesar 20,1% atau sepanjang 114 Km, namun untuk tahun 2020 hanya terdapat penambahan jalan hotmix sebesar 9,14% menjadi 29,24%.

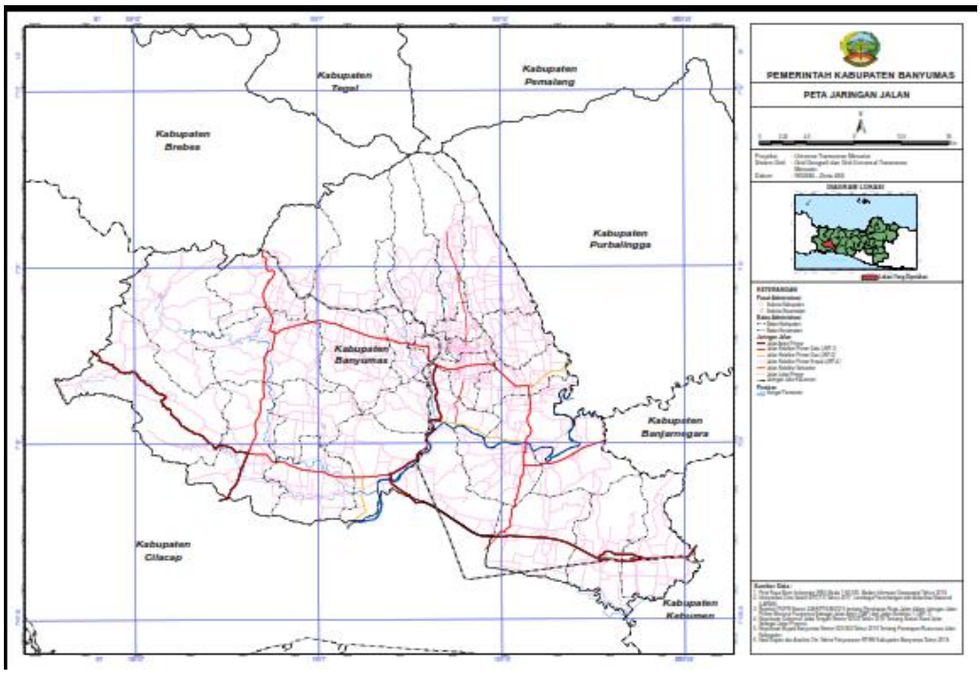

Gambar 2.38
Peta Jaringan Jalan Kabupaten Banyumas
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas, 2020

Pembangunan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang terus berupaya meningkatkan kondisi jalan dan jembatan di Kabupaten Banyumas. Peningkatan kondisi jalan dan jembatan menjadi prioritas untuk mendukung berbagai aktivitas masyarakat, menumbuhkembangkan kegiatan ekonomi dan meningkatkan konektivitas antar wilayah.

Di Kabupaten Banyumas terdapat 915 jembatan dengan total panjang 7.665,57 m. Jembatan kondisi baik dapat dilihat apabila keempat komponen konstruksi dalam kondisi baik. Kondisi konstruksi jembatan di Kabupaten Banyumas sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.44
Kondisi Jembatan di Kabupaten Banyumas Tahun 2020

Konstruksi	Kondisi (Ruas)				
	Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak	Rusak Berat
Bangunan Atas	756	15	79	40	25
Bangunan Bawah	765	17	82	37	14
Pondasi	770	73	-	41	31
Lantai	694	19	124	59	19
Kondisi Secara Umum	720	18	138	0	39

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas, 2020

Tabel 2.45
Data Jembatan di Kabupaten Banyumas Berdasarkan Lebar

Kriteria Lebar Jembatan	Kondisi (Ruas)					
	Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak	Rusak Berat	Jumlah
Jembatan < 2.5 M (Sangat Sempit)	47	0	9	0	47	56
Jembatan 2.5 < 3.5 M (Sempit)	78	8	15	4	78	105
Jembatan 3.5 < 5 M (Sedang)	264	5	57	24	264	350
Jembatan > 5 (Lebar)	331	5	57	11	331	404
JUMLAH	720	18	138	39	720	915

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas, 2020

Tabel 2.46
Kondisi Jalan di Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2020

Uraian	Capaian (%)				
	2016	2017	2018	2019	2020
Panjang Jalan Kabupaten (km)	1.508	1.508	1.508	1.508	1.508
Panjang Jalan Kabupaten dalam kondisi baik	30,28%	34,96%	35,47%	37,87%	47,52%
	456,615 km	527,259 km	534,927 km	571,032 km	716,511 km
Panjang Jalan Kabupaten dalam kondisi sedang (%)	21,42%	20,95%	23,53%	25,83%	28,76%
	323,007 km	315,887 km	354,765 km	389,525 km	433,731 km
Panjang Jalan Kabupaten dalam kondisi rusak (%)	48,30%	44,09%	41,00%	36,30%	23,72%
	728,378 km	664,854 km	618,308 km	547,440 km	357,758 km

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas, 2020

Jasa Konstruksi

Dalam rangka pelaksanaan sub urusan jasa konstruksi Pemerintah Kabupaten Banyumas menyelenggarakan pelatihan tenaga terampil konstruksi. Dalam kurun waktu 2018-2020 telah memberikan pelatihan sertifikasi kompetensi kepada 804 tenaga terampil konstruksi, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.47
Sertifikasi/Pelatihan Tenaga Konstruksi Tahun 2018-2020

No	Jenis Sertifikasi	KODE UNIT KOMPETENSI	2018	2019	2020
1	Tukang Pasang Batu (Tukang Bangunan Umum)	TA 005	181	480	
2	Pelaksana Jembatan	TS044		19	
3	Pelaksana Jalan	TS045		42	
4	Pelaksana Saluran Irigasi	TS031			25
5	Pelaksana Bangunan Gedung/ Pekerjaan Gedung	TS051			24
6	Supervisor K3	TL010			33
7	Bimbingan Teknis Administrasi Teknis Penyedia Jasa				
	Jumlah		181	541	82

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas, 2020

Tata Ruang

Sesuai Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Pasal 11 Ayat 2, pemerintah daerah kabupaten berwenang dalam melaksanakan penataan ruang wilayah kabupaten. Penataan tersebut meliputi perencanaan tata ruang wilayah kabupaten, pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kebupaten. Fungsi rencana tata ruang wilayah kabupaten atau kota di antaranya adalah:

1. Acuan dalam pemanfaatan ruang atau pengembangan wilayah kabupaten atau kota.
2. Acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah kabupaten atau kota.
3. Acuan dalam penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah.
4. Acuan lokasi investasi dalam wilayah kabupaten atau kota yang dilakukan pemerintah, masyarakat, dan swasta.
5. Pedoman untuk penyusunan rencana rinci tata ruang di wilayah kabupaten atau kota.
6. Acuan dalam administrasi pertanahan.

Berdasarkan hal tersebut, tata ruang menjadi dasar dalam perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah maupun pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh pihak swasta maupun masyarakat. Dalam perencanaan pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja tahunan pemerintah daerah, rencana tata ruang menjadi pedoman dalam menentukan lokus suatu rencana pembangunan. Rencana pembangunan yang dilaksanakan harus sesuai dengan ketentuan rencana pola ruang dan struktur ruang yang telah ditetapkan.

Penyusunan rencana pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas telah mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031. Hal ini dapat dilihat dari beberapa pelaksanaan pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas, lokasi peruntukannya telah sesuai dengan RTRW Kabupaten Banyumas. Beberapa contoh diantaranya adalah pengembangan obyek Wisata Baturraden yang berada pada peruntukan Kawasan Pariwisata, pembangunan Rumah Sakit Khusus Mata Purwokerto yang berada pada peruntukan Kawasan Permukiman Perkotaan, pembangunan dan pengembangan beberapa pasar tradisional yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas yang seluruhnya berada pada peruntukan Kawasan Permukiman Perkotaan, pembangunan dan pengembangan beberapa Puskesmas yang seluruhnya berada pada peruntukan Kawasan Permukiman Perkotaan, rencana pembangunan perkantoran Pemda terpadu yang lokasi rencana pada peruntukan Permukiman Perkotaan, dan lain sebagainya.

Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW Kabupaten Banyumas juga diterapkan dalam pemberian izin-izin pembangunan oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas yang dilaksanakan oleh pemeritah provinsi, pusat, swasta maupun masyarakat. Beberapa contohnya antara lain adalah pembangunan Kebun Raya Baturraden yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berada pada peruntukan Kawasan Hutan Produksi Terbatas, pembangunan pabrik semen oleh perusahaan swasta di Kecamatan Ajibarang berada pada peruntukan

Kawasan Peruntukan Industri, pembangunan pusat perbelanjaan berupa Mal yang dilaksanakan oleh swasta pada peruntukan Kawasan Permukiman Perkotaan, pengembangan perumahan oleh developer yang seluruh perizinannya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas berada pada peruntukan Kawasan Permukiman Perkotaan, dan lain sebaginya.

Perangkat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi adalah ketersediaan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Kabupaten Banyumas telah memiliki regulasi rencana tata ruang melalui Perda Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031, dan Perda Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Purwokerto Tahun 2019-2039.

Sebagai salah satu regulasi yang diacu dalam proses perizinan, Rencana Tata Ruang memiliki peranan yang sangat penting. Perda RTRW Kabupaten Banyumas saat ini masih dirasa kurang memadai dalam acuan perizinan berinvestasi, karena sifat dan skalanya yang masih makro dan belum detail menunjukan zona sesuai kondisi eksisting lapangan. Pengembangan kawasan peruntukan industri dalam Perda RTRW saat inipun belum mampu menarik banyak investor karena lahannya yang kurang diminati. Di sisi lain, laju alih fungsi lahan pertanianpun masih cukup tinggi, hal ini dikarenakan RTRW Kabupaten Banyumas yang sifatnya makro tersebut secara hukum masih memiliki celah dalam penafsiran pemanfaatan lahan pertanian maupun permukiman.

Untuk mengatasi beberapa hal ditas sangat diperlukan regulasi yang sifatnya lebih rinci, dalam hal ini adalah RDTR. Penyusunan RDTR di Kabupaten Banyumas harus diperbanyak untuk memberikan kepastian hukum peruntukan tata ruang pada setiap kawasan. Revisi Perda RTRW Kabupaten Banyumas sebagai upaya penyempurnaan Perda RTRW yang sekarang berlaku, saat ini sudah dilaksanakan dan masih berproses di tingkat provinsi.

Sebagai upaya mendukung pertumbuahan ekonomi melalui penanaman investasi di Kabupaten Banyumas, optimalisasi pengembangan kawasan peruntukan industri dan pengendalian alih fungsi lahan, revisi RTRW dan penetapan RDTR sebagai acuan perizinan perlu dilaksanakan percepatan, agar bisa mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah Kabupaten Banyumas dan mendukung kawasan pengembangan prioritas nasional, khususnya Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang.

2.3.1.4. Perumahan dan Kawasan Permukiman

Perumahan dan permukiman merupakan kebutuhan dasar manusia yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945. Namun demikian dukungan Pemerintah Daerah untuk pemenuhan kebutuhan perumahan masih terbatas, terutama dalam penyediaan akses kebijakan pembangunan perumahan dan permukiman dalam RPJMN 2020-2024 adalah meningkatkan akses masyarakat secara bertahap terhadap perumahan dan permukiman layak dan aman yang terjangkau untuk mewujudkan kota yang inklusif dan layak huni.

Kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman meliputi antara lain: penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana kabupaten/kota, fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota, penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan, penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKBG), penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman, penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha, pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah kabupaten/kota, penyelenggaraan PSU perumahan, serta sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum PSU tingkat kemampuan kecil.

Sampai dengan tahun 2020 di Kabupaten Banyumas terdapat backlog rumah sebanyak 153,904 unit. Berdasarkan Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Banyumas 2020 yang disusun dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2020 89,59% rumah tangga di Kabupaten Banyumas telah memiliki rumah. Meskipun tingkat kepemilikan rumah tinggi, dari aspek kelayakan masih terdapat rumah tidak layak huni dan rumah tanpa akses air minum dan sanitasi.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh telah dilaksanakan identifikasi permukiman kumuh yang ditetapkan menjadi Keputusan Bupati Banyumas Nomor: 660/630 Tahun 2020 tentang Lokasi dan Luasan Permukiman Kumuh Perkotaan di Kabupaten Banyumas. Berdasarkan keputusan Bupati tersebut luasan kawasan permukiman kumuh perkotaan di Kabupaten Banyumas adalah 115,7 Ha. Permasalahan permukiman kumuh menjadi salah satu tujuan SDGs/TPB yaitu Tujuan 11 Menjadikan kota dan permukiman yang inklusif, aman tangguh dan berkelanjutan.

Salah satu parameter kumuh adalah banyaknya rumah layak huni. Rasio rumah layak huni menjadi indikator SDGs/TPB Tujuan 11 Menjadikan kota dan permukiman yang inklusif, aman tangguh dan berkelanjutan, Target 11.1. Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar permukiman, serta merata kawasan kumuh.

Jumlah RTLH di Kabupaten Banyumas berdasarkan Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) 2015 adalah 116.677 unit. Sampai dengan tahun 2020 sudah tertangani 90.833 unit RTLH yang belum ditangani. Tingginya penduduk miskin merupakan akar permasalahan tingginya jumlah RTLH di Kabupaten Banyumas. Penduduk miskin memiliki keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya dikarenakan rendahnya tingkat pendidikan, rendahnya produktivitas sehingga penghasilan juga rendah, serta kepemilikan aset.

Tabel 2.48
Perkembangan Rasio Rumah Layak Huni dan Lingkungan Kumuh Perkotaan Kabupaten Banyumas
Tahun 2016-2020

No.	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Rasio rumah layak huni (%)	88,12	88,70	76,30*	78,47*	78,76
2.	Persentase Lingkungan Pemukiman kumuh perkotaan (%)	6,52	6,34	8,69*	7,84*	7,8

Sumber: Dinperkim Kabupaten Banyumas, 2020
*: Terdapat perubahan data dasar

2.3.1.5. Ketentraman dan Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat

Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Kondisi ketentraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat yang kondusif merupakan modal penting yang diperlukan untuk menunjang keberhasilan pembangunan. Ketentraman, ketertiban umum, dan serta perlindungan masyarakat yang kondusif akan memberikan kenyamanan dan kepastian dalam berinvestasi dan berusaha. Indikator untuk mengukur ketentraman dan ketertiban, serta perlindungan masyarakat antara lain cakupan petugas perlindungan masyarakat (Linmas). Jumlah Linmas di Kabupaten Banyumas adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.49
Jumlah Linmas di Kabupaten Banyumas Tahun 2017-2020

Linmas	Tahun			
	2017	2018	2019	2020
Laki-laki (orang)	10.276	10.296	10.320	10.320
Perempuan (orang)	147	151	149	149
Jumlah (orang)	10.423	10.447	10.469	10.469

Sumber: Data dan Informasi Kabupaten Banyumas, 2017-2020

Upaya menciptakan rasa tentram dan aman pada masyarakat merupakan langkah strategis yang turut mempengaruhi keberhasilan pembangunan. Terciptanya dan terpenuhinya rasa tentram dan aman pada masyarakat akan membangun suasana yang kondusif bagi masyarakat untuk melakukan berbagai aktifitas termasuk aktifitas ekonomi. Ketentraman, keteritban, dan keamanan adalah tanggung jawab semua lapisan masyarakat yang didukung dengan sarana dan prasarana yang disediakan pemerintah yang disertai dengan kesadaran masyarakat untuk ikut menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif.

Dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Pemerintah Kabupaten Banyumas menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat. Berdasarkan peraturan daerah tersebut Penyelenggaraan Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum bertujuan untuk: menciptakan suatu situasi dan kondisi yang kondusif dan dinamis agar Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melaksanakan kegiatan dalam rangka memenuhi tugas dan pekerjaannya secara aman, tenteram, tertib dan

teratur, mencegah dan menanggulangi adanya gangguan terhadap ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum, serta menanggulangi dan meniadakan adanya gangguan yang dapat mengakibatkan terganggunya stabilitas keamanan. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.50
Tabel Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Aspek	Tahun			
	2017	2018	2019	2020
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum PERDA dan Perkada (%)	NA	NA	100	100
Persentase Pelaksanaan SOP Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	NA	NA	100	100
Persentase Pemenuhan Sarpras Kelengkapan Satpol PP	NA	NA	NA	100
Persentase penanganan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	NA	NA	100	100
Persentase penanganan pelanggaran PERDA	NA	NA	90	100
Presentase Penegakan PERDA	NA	NA	90	100
Persentase Peningkatan Kapasitas Anggota Satpol PP	NA	NA	NA	100
Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan)	NA	NA	100	100

Sumber: Satpol PP Kabupaten Banyumas, 2020

Penanggulangan bencana

Dalam hal wilayah kebencanaan Kabupaten Banyumas memiliki potensi bencana antara lain gunung berapi, tanah longsor, dan puting beliung. Berdasarkan analisis kajian lingkungan hidup startegis RPJMD Kabupten Banyumas tahun 2018-2023, 50,71% luas wilayah Kabupaten Banyumas berada pada jasa ekosistem perlindungan pencegahan bencana kelas rendah, dan 51,53% luas wilayah berada pada jasa ekosistem pengaturan tata air dan banjir bencana kelas rendah. Dari analisis tersebut diketahui kerentanan desa-desa di Kabupaten Banyumas terhadap perubahan iklim yaitu: bahwa 6 desa pada kategori tidak rentan, 85 desa kurang rentan, dan 225 agak rentan. Hal ini memberikan gambaran resiko bencana di wilayah Kabupaten Banyumas, Kondisi wilayah yang rawan bencana tersebut belum didukung dengan ketersediaan dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB).

Kinerja penanggulangan bencana di Kabupaten Banyumas terkait Peningkatan Mitigasi bencana, meliputi: Sosialisasi kebencanaan pada masyarakat; Penayangan iklan layanan kebencanaan melalui media elektronik, radio, website; Pemasangan EWS dan rambu evakuasi; Latihan dan simulasi kebencanaan; Penyusunan dokumen rekontijensi

banjir, longsor, erupsi gunung berapi; Kerjasama Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana bersama Pemerintah Daerah/Kabupaten pada daerah perbatasan. Terkait dengan penanganan darurat bencana dilakukan melalui pelayanan penanganan darurat dan evakuasi serta pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana. Penanganan pasca bencana dilakukan melalui rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana yang rusak akibat bencana dan pemulihan kembali dampak bencana/pasca bencana. Dalam rangka peningkatan pelayanan, Badan Penanggulangan bencana menjalin kerjasama antar pemangku kepentingan dan stakeholder dalam penanggulangan bencana, penyediaan kebutuhan peralatan yang memadai dan kompetensi sumber daya manusia penanggulangan bencana.

Seluruh kinerja penanggulangan bencana sesuai dengan SPM sudah dilaksanakan 100% namun pada rasio pengurangan resiko bencana baru mencapai 30%, persentase kecamatan yang telah memiliki peta rawan bencana 3,7%, dan persentase SDM dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana baru mencapai 25%.

Rincian kinerja bidang penanggulangan bencana Kabupaten Banyumas tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.51
Perkembangan Indikator Kinerja Kebencanaan Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2020

Indikator Kinerja	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase kejadian bencana tertangani dengan cepat dan tepat (%)	100	100	100	100	100
Rasio pengurangan risiko bencana (%)	29	29	30	30	30
Prosentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap (%)	100	100	100	100	100
Informasi peta rawan bencana (%)	100	100	100	100	100
Prosentase kecamatan yang telah memiliki peta rawan bencana (%)	0	0	0	0	3,7
Persentase SDM dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana (%)	25	25	25	25	25
Prosentase kejadian bencana tertangani dengan cepat dan tepat (%)	100	100	100	100	100

Sumber: BPBD Kabupaten Banyumas, 2020

Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan kebakaran

Penangan kebakaran dilaksanakan oleh Unit Pemadam Kebakaran merupakan unsur pelaksana teknis yang berkedudukan di bawah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas. Unit Pemadam Kebakaran memiliki tugas untuk pencegahan kebakaran, pemadaman kebakaran, dan penanggulangan kebakaran.

Luas wilayah Kabupaten Banyumas menjadi tantangan dalam pelayanan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan kebakaran. Unit Pemadam Kebakaran memiliki beberapa pos pelayanan di beberapa kecamatan untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugasnya. Pos Pemadam Kebakaran tersebut berada di Kecamatan Kembaran, Kecamatan Kemranjen, dan Kecamatan Wangon.

Kinerja Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan kebakaran di Kabupaten Banyumas tahun 2016-2020 telah tercapai 100 % hanya Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK). Dimana wilayah Kabupaten Banyumas yang cukup luas dan baru terdapat 4 wilayah pos pemadam kebakaran.

Tabel 2.52
Perkembangan Indikator Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Kebakaran di Kabupaten Banyumas tahun 2016-2020

No.	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Cakupan Bencana Kebakaran (%)	53	39,83	100	100	100
2	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten (%)	100	100	100	100	100
3	Tingkat waktu tanggap (respons time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK) (%)	39,83	39,83	39,83	53,11	53

Sumber: Satpol PP Kabupaten Banyumas, 2020

2.3.1.5. Sosial

Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial ditujukan kepada perseorangan, keluarga, kelompok dan masyarakat dan diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial diantaranya kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, keterpencilan ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana, korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi: rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial dilakukan bersama oleh pemerintah dan masyarakat.

Pembangunan kesejahteraan sosial dilaksanakan dengan mengembangkan kemampuan dan profesionalitas lembaga-lembaga kesejahteraan sosial dan tenaga kesejahteraan sosial (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial/PSKS) untuk menanggulangi permasalahan kesejahteraan sosial. Selain itu, perlu menggali dan mendayagunakan potensi dan sumber-sumber kesejahteraan sosial, advokasi, dan sinergi untuk mendukung penanganan permasalahan sosial.

Banyaknya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) atau sesuai Permensos Nomor 16 Tahun 2019 disebut Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) merupakan salah satu permasalahan sosial di Kabupaten Banyumas. Secara umum jumlah PPKS menurun hanya

ada kenaikan sedikit pada jumlah lanjut usia terlantar. Meskipun demikian kedepan penanganan kasus penyandang masalah sosial tetap menjadi prioritas, sebab berpotensi menimbulkan permasalahan baru di masyarakat. Perkembangan jumlah PMKS atau yang sekarang disebut dengan PPKS Kabupaten Banyumas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.53
Perkembangan Jumlah PMKS/PPKS di Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2020

No	Jumlah PMKS/PPKS	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Anak Balita Terlantar (orang)	221	244	90	72	17
2	Anak terlantar (orang)	895	1030	559	504	94
3	Anak nakal (orang)	29	57	69	18	6
4	Anak jalanan (orang)	93	61	61	65	7
5	Anak cacat (orang)	1310	1252	938	891	778
6	Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) (orang)	2686	3389	2819	2333	716
7	Wanita yang menjadi Korban Tindak Kekerasan (orang)	5	4	5	4	NA
8	Lanjut Usia terlantar (orang)	2623	3974	2643	2667	1033
9	Penyandang Cacat (orang)	5116	5288	5670	5639	2702
10	Tuna Susila (orang)	220	238	72	74	9
11	Pengemis (orang)	140	139	131	111	22
12	Gelandangan (orang)	20	20	156	90	15
13	Korban Penyalahgunaan NAPZA (orang)	29	17	24	22	15
14	Korban Bencana Alam (orang)	148	204	103	97	9
15	Komunitas Adat Terpencil (KK)	2	1	0	0	0
16	Pemulung (orang)	389	464	287	249	136
17	Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) (orang)	4	3	0	0	0
18	Korban Trafficking (orang)	6	0	5	4	6
19	Fakir Miskin (orang)	-	-	-	-	101234
20	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis (orang)	-	-	-	-	6
21	Korban Bencana Sosial (orang)	-	-	-	-	0
22	Kelompok Minoritas / Waria (orang)	-	-	-	-	0
23	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (LP) (orang)	-	-	-	-	97
24	Korban Tindak Kekerasan (orang)	-	-	-	-	1
25	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS) (orang)	-	-	-	-	3
26	Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus (orang)	-	-	-	-	5
	Jumlah (orang)	15,952	18,402	15,650	14,859	105,293

Sumber: Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah 2020

Jumlah PMKS/PPKS tahun 2016-2019 sebanyak 14.859 dengan 18 komponen dan di tahun 2020 sebanyak 105.293 dengan 26 komponen sesuai dengan hasil Rekapitulasi Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial (PMKS) atau sekarang disebut Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Provinsi Jawa Tengah kenaikan jumlah

PMKS/PPKS di Kabupaten Banyumas pada tahun 2020 dikarenakan adanya tambahan komponen perhitungan PMKS/PPKS.

Peran masyarakat dan lembaga masyarakat dalam penanganan permasalahan sosial ditunjukan dengan bertambahnya sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi, yang hingga tahun 2020 meningkat menjadi 25 panti.

Tabel 2.54
Sarana Sosial di Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	15	23	23	25	25
2	Rumah Singgah	1	1	1	1	1

Sumber: Dinsospermades Kabupaten Banyumas, 2019

Sinergi dalam penanganan masalah sosial antara pemerintah, swasta, maupun masyarakat sebagai tanggung jawab sosial diwujudkan dalam Penanganan Cepat, Tanggap dan Tuntas dalam pendampingan Warga Miskin Penderita Sakit Kronis (Pattas Sosial Mitra Kurir Langit). Pattas Sosial Mitra Kurir Langit dilatarbelakangi permasalahan kemiskinan yang kompleks dan jumlah penduduk miskin yang tinggi di Kabupaten Banyumas. Kemiskinan kerap kali menghalangi masyarakat yang kurang mampu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak. Pemerintah Kabupaten Banyumas melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa membuat inovasi penanganan permasalahan sosial berbasis kemitraan.

Pattas Sosial Mitra Kurir Langit ini bertujuan untuk memberikan pendampingan secara cepat, tanggap, dan tuntas kepada warga miskin yang menderita sakit kronis. Inovasi ini melayani dari kendala maupun hambatan penyiapan administrasi kependudukan, jaminan kesehatan, biaya saat menunggu di rumah sakit, biaya transportasi ambulans, biaya rumah singgah pasien, pendampingan sosial dan psikososial, kebutuhan dasar makan minum, serta pendampingan pasca-perawatan dari rumah sakit.

Inovasi pelayanan sosial tersebut menumbuhkembangkan relawan sosial dan komunitas sosial di masyarakat untuk meningkatkan kepeduliannya membantu warga miskin. Masih terbatasnya pengetahuan dan pemahaman warga miskin untuk mengurus administrasi kependudukan, kesehatan, transportasi, akses bantuan sosial, rumah singgah pasien, dapat dibantu oleh anggota Pattas Sosial Mitra Kurir Langit.

Masyarakat miskin yang mendapatkan pelayanan Pattas Sosial Mitra Kurir Langit sangat terbantu dari sisi biaya pengobatan, transportasi ambulans, perawatan pada pasca rumah sakit dan kebutuhan dasar lainnya. Keberhasilan inovasi ini dapat dilihat dari meningkatnya jumlah penerima manfaat penderita sakit kronis sebanyak 127 orang pada tahun 2018, yang awalnya hanya sebanyak 15 orang tahun 2016 dan 80 orang pada tahun 2017. Indikator sinergitas dalam inovasi ini terus meningkat dengan bertambahnya jumlah anggota pada posisi April 2019 sebanyak 139 anggota.

Permasalahan sosial lainya di Kabupaten Banyumas adalah banyaknya penyandang disabilitas yang tidak memiliki keterampilan dan pekerjaan tetap menyebabkan mereka belum mandiri, sehingga kerap

memilih untuk mengemis atau mengamen di jalan. Hal ini mendorong Pemerintah Kabupaten Banyumas menciptakan inovasi pelayanan publik Gerbang Penyandang Disabilitas Sukses atau Gendis. Melalui program Gendis, penyandang disabilitas diberi bekal keterampilan, dibina hingga menjadi mandiri dan memiliki jiwa wirausaha. Dimulai sejak tahun 2016, Gendis memberikan pembinaan dan bimbingan keterampilan.

Pembekalan keterampilan ini merupakan upaya untuk mengentaskan kemiskinan dan diskriminasi dalam peluang pekerjaan bagi penyandang disabilitas yang selama ini menyebabkan pengangguran. Selain itu, dengan adanya peran dari pihak swasta, organisasi masyarakat, serta paguyuban penyandang disabilitas yang diajak sinergi dan kolaborasi, maka dapat mengeliminasi cara pandang yang tidak benar terhadap penyandang disabilitas. Gendis menjadi wadah bagi Pemerintah Kabupaten Banyumas untuk dapat mempercepat penanganan permasalahan dari penyandang disabilitas dalam usia produktif dalam mengentaskan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial ekonomi.

2.3.2. Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

2.3.2.1. Tenaga Kerja

Pembangunan ketenagakerjaan juga menjadi salah satu faktor penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Keberhasilan pembangunan di bidang ketenagakerjaan ini akan menjadi salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pembangunan perekonomian suatu daerah karena tenaga kerja menjadi salah satu faktor produksi yang memiliki peran sentral dalam menggerakkan aktivitas perekonomian. Kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut:

Penduduk Usia Kerja (PUK)

Penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) berdasarkan aktivitas utamanya menjadi dua kelompok yaitu kelompok angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Dilihat dari komponennya, angkatan kerja dapat dibagi menjadi 2, yaitu angkatan kerja yang bekerja dan angkatan kerja yang tidak bekerja (penganggur terbuka). Pertumbuhan angkatan kerja memiliki arah yang sama dengan pertumbuhan penduduk, akan tetapi pertumbuhan penciptaan kesempatan kerja baru umumnya lebih lambat. Hal ini mengakibatkan tidak semua angkatan kerja dapat terserap oleh lapangan kerja. Ketidakseimbangan antara supply dan demand tenaga kerja sehingga terjadilah pengangguran. Jumlah penduduk usia kerja (PUK) di Kabupaten Banyumas selama periode 2016-2020, cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Tabel 2.55
Banyaknya Penduduk Usia Kerja Menurut Karakteristik Ketenagakerjaan Kabupaten Banyumas, 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Angkatan Kerja	NA	823 279	863.224	868.553	877.555
Bekerja	NA	785 231	827.086	832.017	824.866
Pengangguran	NA	38 048	36.138	36.536	52.689

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Bukan Angkatan Kerja	NA	439 640	415.642	425.859	438.944
Sekolah	NA	107 632	98.634	92.940	94.202
Mengurus Rumah Tangga	NA	262 746	265.411	278.936	282.836
Lainnya	NA	69 262	51.597	53.983	61.906
Jumlah			1.278.866	1.294.412	1.316.499

Sumber: BPS, 2016-2020

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan persentase antara jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja. TPAK berguna untuk melihat potensi penduduk usia kerja (15 tahun keatas) yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. Indikator ini menunjukkan besaran relatif dari persediaan tenaga kerja *(labor supply)* untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Semakin tinggi TPAK menunjukkan semakin besar jumlah penduduk yang berpotensi memproduksi barang dan jasa. TPAK Kabupaten Banyumas pada periode 2016 hingga 2020 menunjukkan angka yang fluktuatif, sebagaimana gambar berikut:

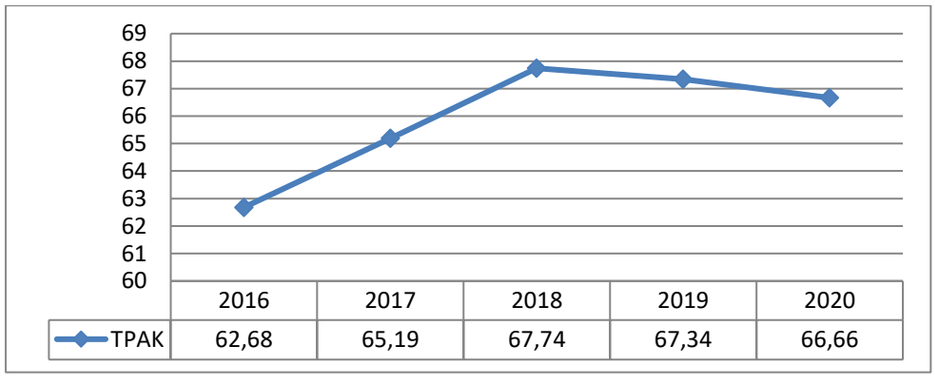

Gambar 2.39
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2020
Sumber: BPS Kabupaten Banyumas, 2020

Penduduk usia kerja atau penduduk yang berusia 15 tahun ke atas di Kabupaten Banyumas tahun 2020 tercatat sebanyak 1.316.499 jiwa. Dari jumlah tersebut, 66,66 persen merupakan penduduk angkatan kerja (bekerja dan pengangguran) sedangkan sisanya sebesar 33,34 persen merupakan penduduk bukan angkatan kerja (bersekolah, mengurus rumah tangga, dan lainnya). TPAK Kabupaten Banyumas tahun 2020 menunjukkan angka 66,66 persen yang artinya bahwa dari 100 orang penduduk usia kerja, sekitar 67 orang termasuk penduduk yang aktif secara ekonomi. Jika dipilah menurut jenis kelamin, hasil Sakernas 2020 menunjukkan bahwa TPAK laki-laki lebih besar dibandingkan perempuan yaitu 81,78 untuk laki-laki dan 51,74 untuk perempuan.

Dalam urusan Tenaga Kerja, terdapat permasalahan dimana besaran pencari kerja terdaftar dan ditempatkan masih rendah dimana pada tahun 2020 sebesar 48,75% menurun jika dibandingkan tahun 2019 sebesar 71,02%. Dimana tahun 2020 terdapat 10.559 pencari kerja dan di tahun 2019 terdapat sebanyak 14.972 pencari kerja. Masih rendahnya penyelesaian kasus dengan perjanjian kerjasama juga masih

ada dengan capaian tahun 2020 sebesar 54,54% dan menurun jika dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 75%. Hal ini dikarenakan pandemi covid-19 yang menjadikan Pemerintah Kabupaten Banyumas harus melakukan refocusing anggaran untuk menangani pandemi tersebut. Sehingga banyak program dan kegiatan yang capaian kinerjanya dibawah target yang sudah ditetapkan.

Kewenangan Pemerintah Kabupaten bidang tenaga kerja meliputi sub urusan pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, dan hubungan industrial. Untuk melaksanakan pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja Kabupaten Banyumas telah memiliki Balai Latihan Kerja untuk pelaksanaan pelatihan antara lain: pelatihan menjahit, las, teknisi handphone, otomotif sepeda motor, prosesing hasil pertanian/pembuatan aneka kue, menjahit garmen, tata rias pengantin, dan tata kecantikan.

2.3.2.2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak. Capaian pembangunan dan pemberdayaan perempuan di Kabupaten Banyumas dapat diketahui dari capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indek Pemberdayaan Gender (IDG). Indeks Pembangunan Gender (IPG)adalah indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhitungkan ketimpangan gender.

Nilai IPG Kabupaten Banyumas dalam kurun waktu 2016-2020 selalu mengalami peningkatan. IPG Kabupaten Banyumas pada tahun 2020 sebesar 88,27 lebih rendah dari Jawa Tengah sebesar 92,18 dan berada di peringkat ke-4 jika dibandingkan dengan kabupaten sekitar. Hal ini menunjukan lebih kecil peran perempuan di Kabupaten Banyumas walaupun setiap tahun mengalami peningkatan.

Perbandingan IPG Kabupaten Banyumas, Kabupaten lain dan Provinsi Jawa Tengah dapat digambarkan pada grafik di bawah ini.

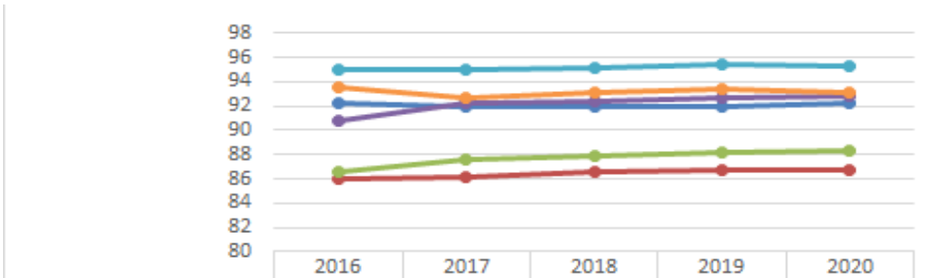

	2016	2017	2018	2019	2020
JAWA TENGAH	92,21	91,94	91,95	91,89	92,18
CILACAP	86,04	86,14	86,53	86,67	86,69
BANYUMAS	86,66	87,62	87,94	88,2	88,27
PURBALINGA	90,74	92,31	92,32	92,68	92,78
BANJARNEGARA	94,98	95,02	95,18	95,38	95,28
KEBUMEN	93,48	92,68	93,09	93,34	93,05

Gambar 2.40
Perbandingan IPG Kabupaten Banyumas, Kabupaten Lain dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020
Sumber: BPS, Tahun 2020

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan indeks komposit yang tersusun dari beberapa variable yang mencerminkan tingkat keterlibatan wanita dalam proses pengambilan keputusan di bidang politik dan ekonomi. IDG mempunyai kegunaan untuk mengukur ketimpangan gender pada bidang-bidang kunci pada partisipasi ekonomi dan politik, serta pengambilan keputusan.

Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Banyumas dalam kurun waktu 2015–2019 mengalami fluktuasi. IDG Kabupaten Banyumas di tahun 2019 sebesar 71,92 lebih rendah dari Jawa Tengah sebesar 72,18 Bila dibandingkan dengan Kabupaten sekitar di Jawa Tengah, IDG Kabupaten Banyumas menempati peringkat ke-2 dari 4 kabupaten. Capaian IDG Jawa Tengah dengan Kabupaten Banyumas dapat digambarkan pada grafik dibawah ini:

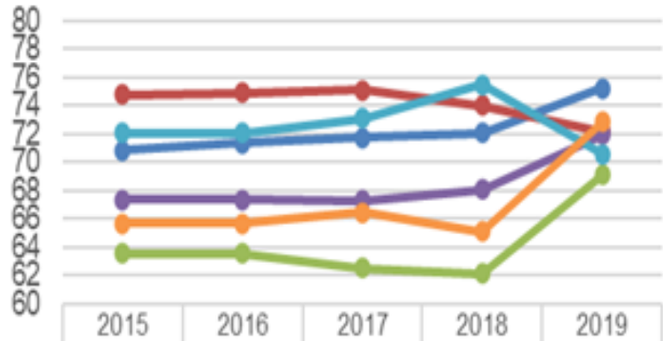

	2015	2016	2017	2018	2019
Nasional	70,83	71,39	71,74	72,1	75,24
Provinsi Jawa Tengah	74,8	74,89	75,1	74,03	72,18
Kabupaten Cilacap	63,53	63,53	62,52	62,11	69,13
Kabupaten Banyumas	67,37	67,37	67,32	68,11	71,92
Kabupaten Purbalingga	72,08	72,08	73,11	75,51	70,6
Kabupaten Banjamegara	65,72	65,72	66,44	65,12	72,84

Gambar 2.41
Capaian IDG Jawa Tengah, Kabupaten Banyumas dan Kabupaten sekitar di Barlingmascakeb Tahun 2015–2019
Sumber: BPS, 2019

Nilai IDG yang masih rendah disebabkan beberapa permasalahan antara lain rendahnya keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif dan eksekutif, rendahnya sumbangan perempuan dalam ekonomi rumah tangga dan sebagian perempuan sebagai pekerja domestik (ibu rumah tangga).

Permasalahan lain terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Banyumas adalah adanya kekerasan terhadap perempuan dan anak yang cenderung meningkat. Banyaknya kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Banyumas pada tabel berikut:

Tabel 2.56
Banyaknya Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Menurut Kecamatan Di Kabupaten Banyumas Tahun 2017-2020 (kasus)

No.	Kecamatan	Kekerasan Terhadap Perempuan				Kekerasan Terhadap Anak			
		2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
1	Lumbir	-	-	-	-	-	1	1	
2	Wangon	-	-	1	1	2	1	1	3
3	Jatilawang	-	-	-	-	-	2	2	
4	Rawalo	-	-	-	-	1	-	-	5
5	Kebasen	-	-	1	-	2	-	1	1
6	Kemranjen	-	-	-	-	-	-	2	
7	Sumpiuh	1	-	-	-	-	2	7	3
8	Tambak	-	-	-	-	2	1	1	1
9	Somagede	-	-	-	-	-	1	1	1
10	Kalibagor	1	-	-	1	2	5	2	1
11	Banyumas	-	3	-	-	2	5	3	-
12	Patikraja	-	1	1	1	-	3	2	2
13	Purwojati	-	-	1	-	-	1	-	2
14	Ajibarang	-	-	-	-	1	2	4	1
15	Gumelar	-	-	-	-	-	4	2	-
16	Pekuncen	-	-	-	1	1	3	2	3
17	Cilongok	-	-	-	1	1	3	5	3
18	Karanglewas	1	3	2	-	2	17	1	1
19	Kedungbanteng	-	-	-	1	-	4	-	2
20	Baturraden	-	1	1	2	3	12	6	5
21	Sumbang	-	2	3		-	10	1	3
22	Kembaran	2	2	3	1	-	4	2	1
23	Sokaraja	2	3	1	2	2	5	3	6
24	Purwokerto Selatan	-	3	2	-	6	7	7	5
25	Purwokerto Barat	2	2	-	1	-	10	7	5
26	Purwokerto Timur	1	1	1	2	1	4	2	2
27	Purwokerto Utara	3	1	1	3	1	5	4	6
	Jumlah	13	22	18	17	29	112	71	62

Sumber: BPS Kabupaten Banyumas, 2020

Untuk penanganan korban kekerasan di Kabupaten Banyumas telah terdapat Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di tingkat kecamatan dan kabupaten sebanyak 27 unit.

2.3.2.3. Pangan

Kabupaten Banyumas telah menyusun regulasi ketahanan pangan dalam bentuk Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan. Tujuan penyelenggaraan Ketahanan Pangan adalah a) meningkatkan produksi pangan Daerah; b) meningkatkan keanekaragaman pangan yang memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan gizi bagi masyarakat; c) mewujudkan tingkat kecukupan pangan, terutama pangan pokok dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat; d) mempermudah dan meningkatkan akses pangan bagi

masyarakat, khususnya masyarakat yang rawan pangan dan gizi; e) meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas pangan; f) meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pangan yang aman, higienis dan bergizi seimbang; g) meningkatkan kesejahteraan bagi petani, peternak, pembudidaya ikan, dan pelaku usaha pangan; dan h) melindungi dan mengembangkan produksi pangan dan industri pengolahan pangan Daerah.

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah Penyelenggaraan Ketahanan Pangan meliputi: perencanaan pangan, kelembagaan, ketersediaan pangan, cadangan pangan, keterjangkauan pangan, distribusi pangan, penganekaragaman pangan, konsumsi pangan dan gizi, keamanan pangan, sistem informasi pangan, penelitian dan pengembangan pangan, pengawasan dan pembinaan, peran serta masyarakat, dan pengembangan sumber daya manusia. Untuk dapat mewujudkan ketahanan pangan di Kabupaten Banyumas masih banyak upaya yang harus dilakukan, terutama terkait perencanaan pangan, pembentukan cadangan pangan daerah, penanganan daerah rawan pangan, serta pengembangan sistem informasi pangan dan gizi.

Sesuai peraturan daerah Penyelenggaraan Ketahanan Pangan Pemerintah Daerah menyelenggarakan cadangan pangan pemerintah yang meliputi pengadaan, pengelolaan, penyaluran cadangan pangan Pemerintah Daerah. Kabupaten Banyumas belum memiliki cadangan pangan pemerintah daerah. Cadangan pangan yang ada di Banyumas baru ada yang dikelola masyarakat berupa lumbung pangan sebanyak 30 lumbung pangan dan yang dikelola Lembaga Usaha Pangan sebanyak 11 lumbung pangan dengan kapasitas rata-rata 40 ton beras, sedangkan pemerintah memiliki gudang cadangan pangan pemerintah dengan kapasitas 100 ton beras namun belum beroperasi.

Ketersediaan pangan mencerminkan pangan yang tersedia untuk dikonsumsi masyarakat sebagai produksi daerah dengan mempertimbangkan penggunaan untuk bibit/benih, industri, kehilangan/susut, ekspor dan stok ditambah impor dan Kabupaten.

Hasil analisis daya dukung pangan/indeks daya dukung lahan untuk pangan KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 diketahui bahwa daya dukung lahan untuk pangan di Kabupaten Banyumas tahun 2019 sebesar 1,42 dengan kondisi surplus 76.304 ton. Sebagian besar daya dukung pangan di Kabupaten Banyumas dalam kondisi sedang atau bersyarat. Terdapat 5 kecamatan yang masuk dalam status terlampaui yaitu 4 kecamatan Purwokerto dan Kecamatan Banyumas yang mana kebutuhan lebih besar dari ketersediaannya. Kecamatan paling tinggi yang memiliki nilai daya dukung pangan adalah Kecamatan Tambak dengan nilai 2,71. Daya dukung pangan tersebut dihitung berdasarkan rasio perbandingan kebutuhan beras terhadap produksi beras di Kabupaten Banyumas, dengan rumus jumlah produksi beras per tahun dibagi dengan jumlah konsumsi beras per tahun.

Kawasan pertanian di Kabupaten Banyumas mencakup Kawasan pertanian lahan basah kurang lebih 32.310 Ha dan Kawasan pertanian lahan kering seluas kurang lebih 13.623 Ha. Kawasan lahan basah terdapat di wilayah Kecamatan Kemranjen, Kecamatan Sumpiuh, Kecamatan Tambak, Kecamatan Kebasen, Kecamatan Rawalo, Kecamatan Jatilawang, Kecamatan Purwojati, Kecamatan Ajibarang,

Kecamatan Cilongok, Kecamatan Kembaran, Kecamatan Sokaraja, Kecamatan Patikraja, dan Kecamatan Wangon. Sementara itu kawasan lahan kering terdapat di Wilayah Kecamatan Kalibagor, Kecamatan Baturaden, Kecamatan Pekuncen, Kecamatan Ajibarang, Kecamatan Gumelar, Kecamatan Lumbir, Kecamatan Kemranjen, Kecamatan Rawalo, Kecamatan Cilongok, Kecamatan Purwojati, Kecamatan Kedungbanteng, Kecamatan Karanglewas, dan Kecamatan Tambak. Dengan potensi tersebut diharapkan hasta krida Bupati Banyumas untuk peningkatan produksi padi akan dapat terwujud.

Pemenuhan pangan tidak hanya dilihat pada aspek kuantitas, tetapi juga memperhatikan kualitasnya, termasuk keragaman pangan dan keseimbangan gizi. Konsumsi pangan yang beragam sangat penting karena tubuh memerlukan 45 jenis zat gizi yang dapat diperoleh dari berbagai jenis makanan dan minuman. Pemenuhan pangan dapat dilihat dari ketersediaan pangan yaitu tingkat ketersediaan energi dan protein. Selengkapnya kinerja urusan pemerintahan bidang pangan sebagai berikut:

Tabel 2.57
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pangan di Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Indeks Ketahanan Pangan	NA	NA	73,99	73,99	79,27
2	Persentase Ketersediaan Pangan Utama (%)	90	90	94	94	109,12
3	Skor Pola Pangan Harapan	90	90,01	90,20	90,8	93,10
4	Tingkat Ketersediaan Energi (%)	NA	91	94	91	91,52
5	Tingkat Ketersediaan Protein (%)	NA	91	94	91	81,26
6	Konsumsi Energi (kkal/kapita/hari)	NA	NA	NA	2.401	2.139,70
7	Konsumsi Protein (gram/kapita/hari)	45,3	45,17	54	48,15	62,30
8	Jumlah daerah rawan pangan yang ditangani (desa)	NA	52	52	53	60
9	Persentase Penanganan daerah rawan pangan (%)	60	62	62	63	71,43
10	Persentase Penguatan Cadangan Pangan	NA	70	75	75	81,97
11	Jumlah lumbung pangan masyarakat	22	24	24	27	30
12	Jumlah Lumbung Pangan Lembaga Usaha Pertanian	4	4	7	11	11
13	Jumlah cadangan pangan pemerintah	NA	NA	NA	0	0
14	Jumlah Lumbung Pangan Pemerintah	NA	NA	NA	1	1

Sumber: Dinpertan KP Kabupaten Banyumas, 2020

Keragaman dan keseimbangan konsumsi pangan pada tingkat keluarga akan menentukan kualitas konsumsi pada tingkat wilayah, baik kabupaten/kota, provinsi, dan nasional. Kualitas konsumsi pangan penduduk ditingkat wilayah (makro) ini dicerminkan dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH). Sedangkan di tingkat keluarga dan individu, asupan makanan sesuai prinsip konsumsi pangan Beragam, Bergizi

Seimbang dan Aman (B2SA) untuk memenuhi kebutuhan zat gizi dapat diketahui dengan melakukan penilaian konsumsi pangan, melalui pendekatan penghitungan porsi.

Dalam Undang-Undang Pangan disebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban mewujudkan penganekaragaman konsumsi pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Tercapainya penganekaragaman konsumsi pangan tersebut diukur melalui pencapaian nilai, komposisi, pola pangan dan gizi seimbang, dengan indikator Pola Pangan Harapan (PPH). Semakin tinggi skor PPH, konsumsi pangan semakin beragam dan bergizi seimbang (maksimal 100).

Skor PPH merupakan indikator mutu gizi dan keragaman konsumsi pangan sehingga dapat digunakan untuk merencanakan kebutuhan konsumsi pangan pada tahun-tahun mendatang. PPH dapat digunakan sebagai pedoman dalam evaluasi dan perencanaan penyediaan, produksi dan konsumsi pangan penduduk, baik secara kuantitas, kualitas, maupun keragamannya dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, budaya, agama dan cita rasa. Skor pola pangan harapan Kabupaten Banyumas tahun 2016-2020 sebagaiman gambar berikut:

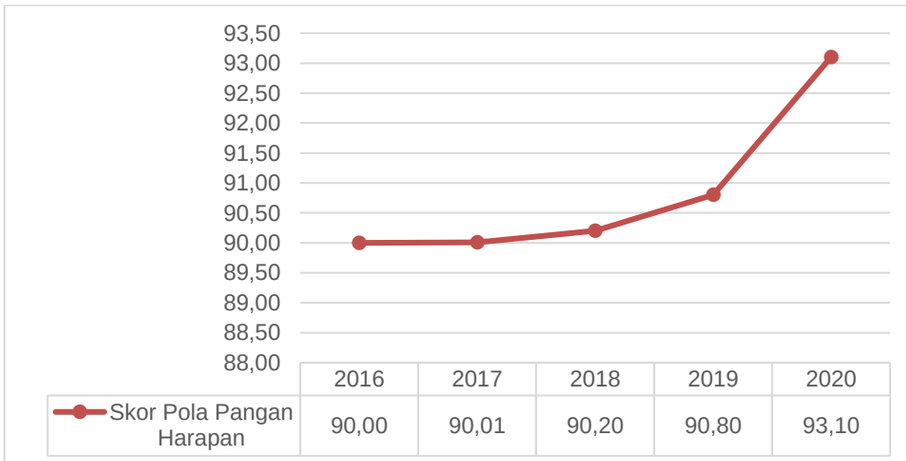

Gambar 2.42
Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Tahun 2016 – 2020
Sumber: Dinas Pertanian dan KP Kab. Banyumas, 2020

2.3.2.4. Pertanahan

Pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pertanahan fokus pada penataan penguasanaan tanah milik pemerintah Kabupaten Banyumas. Namun demikian bukan berarti Pemerintah Kabupaten Banyumas tidak mendukung Program Prioritas Nasional dalam RPJMN 2014-2019 berupa Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Dukungan pemerintah Kabupaten Banyumas diwujudkan dengan menyediakan peralatan dan sumber daya.

Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dilatarbelakangi banyaknya sengketa atas tanah dikarenakan belum adanya kepastian hukum atas tanah. Lambannya proses pembuatan sertifikat tanah sebagai tanda bukti hukum atas kepemilikan tanah menjadi perhatian pemerintah. Untuk menanggulangi permasalahan

tersebut, pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN telah meluncurkan Program Prioritas Nasional berupa PTSL.

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap adalah proses pendaftaran tanah untuk pertama kali, yang dilakukan secara serentak dan meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftarkan di dalam suatu wilayah desa atau kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu. Melalui program ini, pemerintah memberikan jaminan kepastian hukum atau hak atas tanah yang dimiliki masyarakat. Metode PTSL ini merupakan inovasi pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat: sandang, pangan, dan papan. Program tersebut dituangkan dalam Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2017 tentang PTSL dan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018.

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap merupakan wujud pelaksanaan kewajiban pemerintah untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum atas kepemilikan tanah masyarakat. Selain itu sertifikat tesebut dapat menjadi modal pendampingan usaha yang berdaya dan berhasil guna bagi peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat.

Kabupaten Banyumas mempunyai luas wilayah 132.759 Ha dengan jumlah bidang tanah kurang lebih 1.076.945 (NOP tahun 2019) bidang. Dari jumlah tersebut bidang tanah yang terdaftar baru 426.385 bidang (40 %), dan belum terdaftar sebanyak 650.560 bidang (60%). PTSL menjadi program strategis untuk meningkatkan pendaftaran bidang tanah.

Tabel 2.58
Perkembangan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kabupaten Banyumas

	2017	2018	2019
Peta Bidang Tanah (PBT)	24.066	61.400	83.000
Sertifikat Hak Atas Tanah (SHAT)	21.500	50.150	59.000

Sumber: Kantor ATR/BPN Kabupaten Banyumas 2020

Tahun 2020 PTSL di Kabupaten Banyumas mentargetkan 80.000 peta bidang tanah, dan 79.000 SHAT. Jumlah peta bidang tanah tersebut terdiri dari 10.000 partisipatif dan 70.000 bidang non partisipatif. Untuk SHAT terdiri atas 8.750 bidang SHAT Partisipatif, dan SHAT Non Partisipatif 70.250 bidang, pada 58 desa dan 19 kecamatan. Dengan target tersebut Kabupaten Banyumas menjadi wilayah dengan target PTSL terbesar di Jawa Tengah. Diharapkan pada tahun 2023 semua bidang tanah sudah terdaftar atau bersertifikat, dengan target per tahun atau kurang lebih 156.685 bidang per tahun.

2.3.2.5. Lingkungan Hidup

Kondisi lingkungan hidup di Kabupaten Banyumas ditunjukan dengan indeks kualitas lingkungan hidup. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) telah dikembangkan sejak tahun 2009, yang merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional dan menjadi acuan bersama bagi semua pihak dalam mengukur kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Penghitungan IKLH terdiri dari tiga komponen yaitu: Indeks

Kualitas Air (IKA); Indeks Kualitas Udara (IKU); dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL).

Pada tahun 2020 metode perhitungan IKLH berbeda dengan metode yang digunakan pada tahun 2019. Hal tersebut berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor S-318/PPKL/SET/REN.0/12/2020, perihal Metode Perhitungan IKLH 2020-2024.Tabel berikut membandingkan target dan hasil analisis kualitas lingkungan hidup dengan 2 metode yang berbeda.

Tabel 2.59
Target dan Realisasi Indek Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas Tahun 2019-2020

Indikator	2019			2020		
	Target	Realisasi metode awal	Realisasi metode baru	Target	Realisasi metode awal	Realisasi metode baru
IKA	54.20	34.67	38.67	54.40	59.33	49.33
IKU	83.10	82.71	82.71	83.20	85.07	85.07
IKTL	56.50	73.52	38.52	56.50	66.81	42.32
IKLH	63.79	64.62	55.85	63.88	70.04	62.27

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas, 2021

Indeks kualitas lingkungan hidup Kabupaten Banyumas tahun 2020 dengan metode baru adalah 62.27, hal ini berarti bahwa kualitas lingkungan hidup dalam kategori cukup baik.

Selanjutnya berdasarkan kajian KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 status lingkungan Kabupaten Banyumas dapat dilihat pada matriks berikut.

Tabel 2.60
Status Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas

NO.	SUMBER DAYA ALAM/ DDTLH	STATUS	KETERANGAN
A	**KAPASITAS DAYA DUKUNG & DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP**		
A.1	Daya Dukung Air Permukaan	• Kebutuhan air (domestik, industri dan pertanian) mencapai 1.031,41 juta m^3/tahun • Potensi ketersediaan air permukaan sebesar 1.303,19 juta m^3/tahun • Daya Dukung Air Permukaan sebesar 1,26 dengan status sedang (bersyarat)	• Secara total masih mencukupi, beberapa daerah yang rendah di Kembaran, Sokaraja, Rawalo, Jatilawang dan Tambak • Adanya ancaman kekeringan di musim kemarau pada pertanian dan masyarakat di kecamatan yang DDAir rendah • Kecenderungan penurunan daya dukung air akan terus terjadi sampai 2023 • Keterbatasan ketersediaan air berpengaruh pada kualitas sanitasi masyarakat serta produktivitas pertanian
A.2	Daya Dukung Pangan Pokok	• Produksi beras 256.639 ton/tahun • Kebutuhan mencapai 180.335 ton beras • Daya Dukung Pangan Pokok 1,42 dalam status sedang (bersyarat)	• Ketersediaan pangan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Kab. Banyumas dan masih memiliki cadangan • Meskipun ada kecenderungan penurunan daya dukung pangan sampai 2023 tetapi tetap surplus

NO.	SUMBER DAYA ALAM/ DDTLH	STATUS	KETERANGAN
			• Kawasan perkotaan Purwokerto dan Kec. Banyumas memiliki DD Pangan rendah karena rendahnya lahan pertanian
A.3	Daya Dukung Lahan Terbangun	• Daya Dukung Lahan Terbangun 2,69 dengan status sedang • Kawasan perkotaan dalam kondisi rendah	• Masih banyaknya kawasan hutan dan daerah pegunungan yang menjadi kawasan lindung • Masih tersedia kawasan pengembangan lahan terbangun di luar perkotaan • Kecenderungan turun pada tahun 2023
A.4	Daya Dukung Lingkungan	• Komposisi 30% DD Air + 30% DD Terbangun + 40% DD Pangan • Daya Dukung Lingkungan 1,75 dalam kondisi sedang	• Kondisi daya dukung lingkungan mencerminkan kebutuhan dasar di Kabupaten Banyumas dapat dipenuhi dari sumber daya yang dimiliki • Distribusi peran dan fungsi kawasan (perkotaan dan perdesaan) menunjukkan perbedaan daya dukung per kecamatan • Berdasarkan skenario RTRW akan terjadi penurunan daya dukung lingkungan pada 2023 meskipun masih dalam kondisi sedang
B	**KINERJA LAYANAN ATAU JASA EKOSISTEM**		
B.1	JE Penyedia Pangan	• 26% dalam kondisi rendah (di kawasan gunung dan perkotaan) • 42% dalam kondisi tinggi (di kawasan DAS Serayu dan kawasan pertanian lahan basah)	Ruang yang sesuai untuk menyediakan pangan dalam kondisi masih mampu menyediakan pasokan pangan untuk kebutuhan masyarakat dan memiliki cadangan
B.2	JE Penyedia Air	• 25% dalam kondisi rendah sehingga sulit menampung dan menyimpan air (pada kawasan terbangun) • 46% dalam kondisi tinggi dapat menyimpan dan menyediakan air tanah dan permukaan	Kelas dalam jasa ekosistem penyedia air menunjukkan tinggi rendahnya kapasitas penyimpanan air permukaan dan air tanah. Penggunaan air bawah tanah secara berkelanjutan menjadi alternatif pemenuhan air baku
B.3	JE Pengatur Iklim	• 21% dalam kondisi rendah pada kawasan perkotaan • 61% dalam kondisi tinggi pada kawasan hutan di Gunung Slamet dan kawasan perbukitan dengan tutupan kebun campur	Tinggi dan rendahnya kawasan yang berfungsi sebagai pengaturan iklim menunjukkan kualitas tutupan vegetasi lahan yang berdampak iklim mikro
B.4	JE Pengaturan Tata Air dan Banjir	• 27% dalam kondisi rendah pada kawasan perkotaan dan kawasan dengan lereng tinggi • 38% dalam kondisi tinggi pada kawasan hutan, kebun campur, dan badan air yang memiliki fungsi menampung atau menyerap air	Pada kawasan yang berfungsi sebagai pengaturan tata air dan banjir kelas rendah menyebabkan air melimpah pada musim hujan (banjir) dan langka pada musim kemarau (kekeringan)
B.5	JE Perlindungan Pencegahan Bencana	• 28% dalam kondisi rendah terutama pada kawasan terbangun dan • 44% dalam kondisi tinggi pada kawasan hutan	Ruang perlindungan pencegahan bencana yang rendah mengakibatkan wilayah menjadi rawan terhadap bencana alam terutama jenis bencana hidro-meteorologi
B.6	JE Pemurnian Air	• 21% dalam kondisi rendah pada kawasan perkotaan/terbangun	Ruang pemurnian air yang

NO.	SUMBER DAYA ALAM/ DDTLH	STATUS	KETERANGAN
		• 68% dalam kondisi tinggi pada hutan, kawasan kebun campur dan badan air	rendah menyebabkan kemampuan purifikasi air polutan secara alami menjadi rendah dan menurunkan kualitas air permukaan dan tanah
B.7	JE Pengurai Limbah	• 21% dalam kondisi rendah pada kawasan padat perkotaan • 68% dalam kondisi tinggi di kawasan hutan dan kebun campur	Rendahnya kawasan dengan fungsi pengurai limbah menyebabkan kemampuan alam untuk meremediasi berbagai polutan rendah yang menyebabkan pencemaran air dan tanah
B.8	JE Kualitas Udara	• 21% dalam kondisi rendah terutama di kawasan perkotaan • 60% dalam kondisi tinggi terutama pada kawasan hutan dan kebun campur	Rendahnya kawasan yang dapat menyediakan kualitas udara yang baik mengindikasikan rendahnya tutupan vegetasi lahan yang mampu mempurifikasi polusi udara
B.9	JE Pendukung Biodiversity	• 23% dalam kondisi rendah pada kawasan terbangun terutama di pusat kota • 53% dalam kondisi tinggi pada hutan, kawasan kebun campur dan pertanian	Kawasan pendukung biodiversity yang rendahnya menunjukkan tingkat biodiversity yang rendah dan kemampuan yang rendah juga dalam memproduksi bahan obat-obatan alami
C	**SUMBER DAYA ALAM**		
C.1	Pertanian	• Ancaman pengurangan lahan sawah untuk kebutuhan pengembangan lahan terbangun dan infrastruktur • Kontribusi pertanian secara luas terhadap PDRB terus menurun dari 13,15% pada tahun 2017 menjadi 11,99% pada 2019. Kontributor terbesar ke-4 setelah industri, perdagangan dan konstruksi • Pertumbuhan ekonomi dari sektor pertanian juga menurun dari 3,17 pada 2017 menjadi 0,31 pada 2019	Penurunan lahan sawah berdampak menurunnya produksi pangan yang pada akhirnya mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dari sektor pertanian dan ketahanan pangan daerah dan nasional
C.2	Sumber Daya Air	• Sumber air permukaan dari Sungai Serayu, Logawa, dan sungai besar lainnya serta mata air yang berada di kawasan pegunungan. • Peningkatan beban cemar dan sedimentasi menurunkan daya tampung air permukaan dan kualitas sumber daya air	Potensi air permukaan sangat besar di Kabupaten Banyumas, tetapi tantangannya adalah pada kelestarian sumber daya air tersebut yaitu sedimentasi dan pencemaran air yang keduanya menyebabkan kualitas dan kuantitasnya tidak dapat terjaga
C.3	Sumber Daya Mineral	• Potensi besar sumber daya mineral untuk bahan galian antara lain adalah andesit, basalt, tanah liat, tanah urug dan emas • Persebaran potensi sumber daya mineral pada kawasan pegunungan dan perbukitan	Pemanfaatan sumber daya mineral tanpa izin atau mengabaikan reklamasi mengakibatkan peningkatan lahan kritis yang berisiko terhadap peningkatan rawan bencana
D	**RISIKO LINGKUNGAN HIDUP**		
D.1	Kualitas Lingkungan Hidup	• Indeks Kualitas Air dalam kondisi kurang baik yaitu 59,33 • Indeks Kualitas Udara dalam kondisi sangat baik yaitu 85,07 • Indeks Kualitas Tutupan Lahan dalam kategori baik yaitu 66,81 • Indeks Kualitas Lingkungan	• Indeks kualitas air yang kurang baik menunjukkan bahwa kualitas air permukaan dan tanah yang perlu mendapat perhatian sebagai sumber air baku. • Indeks kualitas tutupan lahan

NO.	SUMBER DAYA ALAM/ DDTLH	STATUS	KETERANGAN
		Hidup dalam kondisi baik yaitu 70,04	yang baik menunjukkan masih terjaganya luas hutan. ● Indeks kualitas udara yang sangat baik menunjukkan kontributor polusi udara yang rendah
D.2	Persampahan	● Total timbulan sampah mencapai 850 ton per hari dari rumah tangga (40% berupa anorganik) dan 10 – 15 ton dihasilkan dari non rumah tangga ● Volume sampah yang tertangani di kawasan perkotaan telah mencapai lebih dari 90% ● Pengurangan sampah telah mencapai 21,4% ● TPA yang ada saat ini sudah tidak mampu menampung sampah, sehingga dibutuhkan TPA baru	● Peningkatan layanan sampah mengakibatkan kapasitas tampung sampah pada TPA makin terbatas. ● Perlu adanya perencanaan baru untuk TPA dengan konsep dikelola/dikurangi
D.3	Risiko Bencana	● Data IRBI Banyumas memiliki indeks 207,2 dalam kategori risiko tinggi terhadap banjir, gempa bumi, tanah longsor, gunung api, kekeringan, serta kebakaran lahan dan hutan ● Memiliki jalur patahan yang rawan erosi dan gerakan tanah ● Rawan bencana gunung api di kawasan Gunung Slamet ● Rawan banjir di daerah dataran rendah dan rawan genangan di kawasan perkotaan	● Jenis bencana erosi dan gerakan tanah merusak infrastruktur dan bangunan permukiman serta berdampak secara ekonomi baik langsung maupun tidak langsung ● Peningkatan banjir dan kekeringan mengancam kegiatan pertanian
5	**KERENTANAN DAN KAPASITAS ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM**		
5.1	Kerentanan Perubahan Iklim	● 225 desa (68%) dalam kondisi agak rentan terhadap kapasitas adaptasi perubahan iklim (SIDIK) ● Ancaman perubahan iklim dalam bentuk cuaca ekstrem dan pergeseran musim berdampak pada peningkatan rawan bencana banjir, longsor dan kekeringan	● Kondisi agak rentan masuk dalam kategori sedang dalam kapasitas adaptasi perubahan iklim dengan variasi bencana banjir, longsor dan kekeringan ● Pergeseran iklim dan cuaca ekstrem meningkatkan potensi bencana dan gagal panen di pertanian
5.2	Ruang Terbuka Hijau	● RTH berada di kawasan perkotaan belum mencapai 20% ● Target RTH dalam tata ruang mencapai 30% dengan komposisi 20% publik dan 10% pada lahan privat	Keterbatasan ruang terbuka hijau berdampak pada kawasan resapan air, kawasan penyerap polusi udara serta terbatasnya ruang-ruang sosial bagi masyarakat di kawasan perkotaan
6	**KETAHANAN DAN POTENSI KEANEKARAGAMAN HAYATI**		
6.1	Kondisi Keanekaragaman Hayati	● Indeks keanekaragaman tinggi ada di Lumbir, Rawalo, Baturraden, Kalibagor dan Patikraja ● Indeks keanekaragaman hayati rendah di perkotaan ● Penurunan keanekaragaman hayati antara lain disebabkan oleh pesatnya laju pertumbuhan penduduk dan kegiatan pembangunan akan mengakibatkan peningkatan kebutuhan bahan hayati dan lahan untuk pengembangan pertanian serta kegiatan pembangunan lainnya.	● Ancaman penurunan keanekaragaman hayati dapat mengganggu bahan hayati dan pangan ● Gangguan pada ekosistem di kawasan pertanian menyebabkan ancaman serangga dan tikus pada permukiman penduduk yang dapat mengancam kesehatan masyarakat

NO.	SUMBER DAYA ALAM/ DDTLH	STATUS	KETERANGAN
6.2	Sebaran Jasa Ekosistem Penyedia Biodiversity	• 23% dalam kondisi rendah pada kawasan terbangun terutama di pusat kota • 53% dalam kondisi tinggi pada hutan, kawasan kebun campur dan pertanian	Kawasan pendukung biodiversity yang rendahnya menunjukkan tingkat biodiversity yang rendah dan kemampuan yang rendah juga dalam memproduksi bahan obat-obatan alami

Sumber: KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023, 2020

Berdasarkan status lingkungan tersebut disusun beberapa alternatif skenario lingkungan hidup. Untuk mempertahankan daya dukung air permukaan dapat dilakukan 1) Peningkatan kualitas air sungai agar layak dimanfaatkan sebagai sumber air baku dengan mengurangi beban cemar pada air dari kegiatan industri, rumah tangga, dan pertanian; dan 2) Meningkatkan penangkapan air melalui pembangunan embung dan waduk. Untuk mendukung upaya tersebut dilaksanakan program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, dan program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH), serta program pengelolaan sumber daya air (SDA).

Untuk mewujudkan peningkatan layanan sampah perlu diupayakan untuk mereduksi sampah di tingkat sumber dengan menerapkan bank sampah dan TPS 3R, mengembangkan TPST dan pembangunan TPA sebagai penampungan residu melalui program pengelolaan sampah dan program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat, serta program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional.

2.3.2.6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penyelenggaraan pelayanan kependudukan dan catatan sipil mempunyai peran penting, dikarenakan pelayanan kependudukan dan catatan sipil terkait dan menjadi akses kepada pelayanan publik lainnya. Data administrasi kependudukan menjadi rujukan penting bagi kebijakan-kebijakan di sektor lain seperti bidang politik, sosial dan ekonomi. Administrasi kependudukan merupakan rangkaian penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan yang hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Dalam rangka pelayanan administrasi kependudukan dilaksanakan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang merupakan kesatuan dari beberapa kegiatan administrasi kependudukan yaitu Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

Untuk meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Banyumas tempat perekaman data kependudukan ada di tiap kecamatan yang terhubung dengan jaringan SIAK. Upaya pelayanan akte kelahiran dengan sistem jemput bola ditingkatkan untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat. Karena meskipun pelayanan tersebut gratis bagi sebagian masyarakat terutama yang jauh dari ibu kota Kabupaten memiliki akte kelahiran memerlukan biaya tinggi.

Sehubungan dengan pandemi COVID-19, untuk menekan penyebaran virus tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas yang selama ini memberikan pelayanan dengan tatap muka dan online sejak tanggal 18 Maret 2020 hanya memberikan pelayanan online. Administrasi kependudukan yang dilayani secara online meliputi semua layanan administrasi kependudukan yaitu: akta kelahiran, akta kematian, KTP elektronik, kartu identitas anak (KIA), kartu keluarga, perpindahan ke luar, kedatangan, dan sinkronisasi data untuk BPJS, bank, dan sebagainya.

Namun demikian tidak semua penduduk Kabupaten Banyumas dapat memanfaatkan pelayanan kependudukan secara online, sehingga belum semua penduduk yang wajib KTP dapat memiliki KTP. Pada tahun 2020 cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) mengalami penurunan dari 99,80% pada tahun 2029 menjadi 96,94%. Cakupan penerbitan akta kelahiran mengalami kenaikan dari tahun 2019 sebesar 87,36% menjadi 97,15% pada tahun 2020. Demikian juga dengan Persentase Kepemilikan KK bagi setiap keluarga (%) yang hampir 100 % di tahun 2020 yaitu sebesar 98,33 (mengalami kenaikan dari 98,11% pada tahun 2019).

Kepemilikan KTP, Akte Kelahiran dan KK dan SDM di Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.61
Kepemilikan KTP, Akte Kelahiran dan KK di Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2020

No.	Bidang Urusan/Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah penduduk yang wajib KTP	1.527.297	1.551.071	1.337.689	1.374.934	1.403.957
2	Capaian IKM Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil				86,31	86,46
3.	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	80,02	81,55	98,19	99,80	96,94
,4.	Cakupan penerbitan akta kelahiran	86,60	89,01	84,52	87,38	97,15
5.	Jumlah Keluarga (KK)	655.515	636.101	586.247	603.844	618.937
6.	Persentase Kepemilikan KK bagi setiap keluarga (%)	94,85	95,37	97,90	98,11	98,33
7	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran (%)	84,04	86,6	89.01	84,52	93,15

Sumber: Dinpendukcapil Kabupaten Banyumas, 2020

2.3.2.7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Berdasarkan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, pemberdayaan masyarakat desa meliputi program/kegiatan:

a. pengembangan kapasitas masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam pembangunan Desa melalui pendidikan, pelatihan, dan pembelajaran, penyuluhan, dan Pendampingan Desa;
b. penegakan hak dan kewajiban Desa serta masyarakat Desa; yang dilakukan dengan pengembangan paralegal, bantuan hukum, advokasi kebijakan, pengembangan akuntabilitas sosial, pengembangan keterbukaan informasi Pembangunan Desa, dan pengembangan jurnalisme warga;
c. penguatan kelembagaan Desa dinamis yang dilakukan melalui ketahanan sosial masyarakat Desa dan perdesaan, kaderisasi masyarakat Desa, advokasi kewenangan dan regulasi Desa, konsolidasi partisipasi masyarakat Desa, dan penguatan kerja sama antar Desa, kerja sama Desa dengan pihak ketiga, dan jaringan sosial;
d. penguatan budaya Desa adaptif dilakukan melalui pengembangan modal sosial budaya Desa dan perdesaan, pengembangan Desa inklusif dan desa adat, swakelola Pembangunan Desa, pemajuan kebudayaan Desa, pemberdayaan masyarakat adat, Pemberdayaan Masyarakat Desa berbasis adat dan budaya; dan peningkatan peran Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.

Pembinaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa dilaksanakan oleh pemerintah daerah kabupaten Banyumas meliputi fasilitasi kerja sama antar desa, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat.

Salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat khususnya dalam pembangunan kesehatan adalah posyandu. Posyandu merupakan bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehtan dasar meliputi KB, KIA, Gizi, imunisasi, penanggulangan diare dan ISPA. Jumlah posyandu di Kabupaten Banyumas tahun 2020 adalah 2534 dengan posyandu aktif sebanyak 2446 atau 96,53%.

Upaya pemberdayaan masyarakat lainnya adalah melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). Bumdes adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesarbesarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Pemerintah Kabupaten Banyumas mendorong pengembangan bumdes di 301 desa di Kabupaten Banyumas. Sampai dengan 2020 telah terbentuk 251 bumdes dengan klasifikasi 142 unit bumdes dasar, 91 unit bumdes tumbuh, dan 6 unit bumdes berkembang. Dari 251 Bumdes di Kabupaten Banyumas yang sudah teregistrasi di Kementrian Desa Pembangunan Daerah tertinggal dan transmigrasi sebanyak 223 Bumdes. Kinerja pemberdayaan masyarakat dan desa diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.62
Capaian kinerja bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2020

No.	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Posyandu (unit)	2522	2530	2537	2534	2534
2.	Jumlah Posyandu aktif (unit)	2512	2516	2537	2514	2446
3.	Prosentase Posyandu aktif (%)	99,60	99,45	100	99,21	96,53
,4.	Jumlah Bumdes (unit)	124	178	221	249	269
5.	Jumlah bumdes dasar (unit)	124	174	184	152	146
6.	Jumlah bumdes tumbuh (unit)	0	4	4	90	113
7.	Jumlah bumdes berkembang (unit)	0	0	2	7	8
8.	Jumlah bumdes Maju (unit)	0	0	0	0	2
9.	Jumlah Kawasan Perdesaan yang terbentuk (kawasan)	NA	NA	1	1	3

Sumber: Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas, 2020

2.3.2.8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Struktur penduduk Kabupaten Banyumas tahun 2020 didominasi kelompok usia produktif sebagai sumber daya pembangunan. Kabupaten Banyumas diperkirakan akan mengalami bonus demografi sekitar tahun 2030. Untuk dapat mewujudkan bonus demografi salah satu faktor penting adalah pengedalian penduduk.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan keluarga Berencana telah disiapkan petugas PLKB (Petugas Lapangan Keluarga Berencana). Rasio PLKB dengan desa/Kelurahan di tahun 2020 adalah 2,76 artinya 1 PLKB mendampingi 2–3 desa/kelurahan. Kondisi ini menunjukkan bahwa jumlah PLKB di Kabupaten Banyumas belum sesuai dengan standar pelayanan di mana 1 PLKB melayani 1 desa.

Kinerja Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana selama kurun waktu 2016-2020 dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 2.63
Kinerja Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2020

No.	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah peserta KB aktif	250.652	254.357	229.288	243.562	233.481
2	Cakupan peserta KB aktif (%)	77,92	78,59	74,93	75,47	73,67
3	Jumlah peserta KB baru	41,703	37,263	37.934	31.222	26.781
4	Unmeetneed KB	32.022	30.505	38.241	40.629	42.155
5	Persentase Drop Out (DO) KB	11,2	15,16	17,95	7,39	15,13
6	Persentase peserta KB Mandiri yang tergabung dalam UPPKS (%)	33,7	29,6	33,6	34	32,2
7.	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	60,37	66,88	68,58	70,5	62,13
8.	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	1,72	1,21	NA	NA	NA
9.	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	0,86	0,84	6,27	2,64	1,8
10.	Persentase Keluarga Prasejahtera dan Keluarga Sejahtera 1	42,84	41,9	40,81	39,11	37,48
	Persentase keluarga Pra Sejahtera (%)	20,68	22,26	21,42	20,68	19,94
	Persentase keluarga Pra Sejahtera I (%)	18,43	19,67	19,39	18,43	17,54
11.	Persentase wilayah yang terjangkau pelayanan tenaga lini lapangan KB	100	100	100	100	100
12	Rasio Akseptor KB	77,92	78,59	74,93	75,47	73,67
13.	Jumlah PIK	63	77	94	95	109
14.	Rasio Petugas Pembina KB desa	1	1	1	1	1

No.	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
	(PPKBD) setiap desa/kelurahan					
15.	Rasio PLKB dengan Desa/Kelurahan (orang)	2,09	2,2	2,76	2,76	2,73
16.	Rasio PPKBD dengan Desa/Kelurahan (orang)	1	1	1	1	1
17.	Rata-rata jumlah anak perkeluarga	2,17	2,3	2.72	2.09	2,29

Sumber: Dindukcapil Kabupaten Banyumas, 2020

2.3.2.9. Perhubungan

Pembangunan bidang perhubungan ditujukan untuk mencapai sasaran meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi, dan meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan bidang perhubungan. Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi merupakan upaya mendukung permukiman yang layak dan berkelanjutan, mendorong produktiitas daerah dan pertumbuhan ekonomi, serta pengurangan kecelakaan lalu lintas.

Kecelakaan lalu lintas, korban, dan nilai kerugian akibat kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Banyumas tahun 2018-2020 cenderung meningkat, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.64
Banyaknya Kecelakaan Lalu Lintas, Korban dan Nilai Kerugiannya di Wilayah Kabupaten Banyumas

Kondisi	Tahun		
	2018	2019	2020
Jumlah Kecelakaan	940	1,050	1,574
Korban Meninggal	220	224	217
Korban Luka Berat	1	7	1
Korban Luka Ringan	1,030	1,149	1,765
Kerugian Material (ribu rupiah)	609,790,000	685,580,000	952,820,000

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2018-2020

Banyaknya titik rawan kecelakaan di Kabupaten Banyumas menjadi penyebab banyaknya kecelakaan lalu lintas. Di wilayah Kabupaten Banyumas terdapat 28 titik rawan kecelakaan, baik pada status jalan kabupaten, provinsi dan nasional.

Tabel 2.65
Titik Rawan Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Kabupaten Banyumas dan Banyaknya Kecelakaan Lalu Lintas

NO	Nama Jalan	2018			2019			2020			STATUS JALAN
		MD	LB	LR	MD	LB	LR	MD	LB	LR	
1	Jl. Raya Ajibarang - Gumelar	3	0	10	3	0	6	1	0	14	KABUPATEN
2	Jl. Jend. Sudirman Sokaraja	1	0	8	1	0	17	3	0	13	KABUPATEN
3	Jl. Mentri Supeno, Sokaraja	2	0	8	2	0	10	2	0	14	KABUPATEN
4	Jl. Gatot Subroto Purwokerto	0	0	6	5	0	9	2	0	10	KEBUPATEN
5	Jl. Gatot Subroto Sokaraja –	4	0	20	4	0	30	5	0	31	PROVINSI
6	Jl. Raya Patikraja – Kaliori	7	0	19	0	0	8	2	0	25	PROVINSI
7	Jl. Raya Purwokerto - Pegalongan Gunung Tugel	2	0	8	3	0	6	4	0	16	PROVINSI
8	Jl. Ajibarang - Purwokerto	8	0	39	26	0	114	6	0	45	NASIONAL
9	Jl. Raya Ajibarang - Wangon	8	0	54	5	0	11	8	0	49	NASIONAL

NO	Nama Jalan	2018			2019			2020			STATUS JALAN
		MD	LB	LR	MD	LB	LR	MD	LB	LR	
10	Jl. Jend.Sudirman Purwokerto	3	0	24	7	0	52	8	0	18	NASIONAL
11	Jl. Raya Sumpiuh - Buntu	11	0	25	0	2	49	6	0	15	NASIONAL
12	Jl. Raya Banyumas –	5	0	15	9	0	45	5	0	21	NASIONAL
13	Jl. Raya Sumpiuh - Tambak	10	0	11	1	0	8	11	0	42	NASIONAL
14	Jl. Raya Lumbir - Wangon	9	0	30	1	0	6	7	0	39	NASIONAL
15	Jl. Raya Baturaden	9	0	37	3	0	21	1	0	27	NASIONAL
16	Jl. Raya Rawalo - Jatilawang	5	0	9	13	0	38	2	0	7	NASIONAL
17	Jl. Raya Wangon - Jatilawang	10	0	22	5	0	14	4	0	21	NASIONAL
18	Jl. Raya Cilongok - Purwokerto	11	0	21	0	0	17	6	0	16	NASIONAL
19	Jl. Raya Wangon	0	0	0	11	0	51	2	0	3	NASIONAL
20	Jl. Letjend.Suprapto Sokaraja	3	0	19	1	0	0	8	0	33	NASIONAL
21	Jl. Raya Ajibarang - Bumiayu	1	0	11	3	0	6	8	0	31	NASIONAL
22	Jl. Raya Suparjo Rustam	6	0	10	3	0	20	1	0	16	NASIONAL
23	Jl. Patikraja – Rawalo	5	0	34	0	0	4	1	0	18	NASIONAL
24	Jl. Raya Banyumas –	1	0	14	5	0	6	3	0	22	NASIONAL
25	Jl. Raya Wangon - Cilacap	5	0	10	0	0	1	3	0	28	NASIONAL
26	Jl. Patikraja - Purwokerto	2	0	15	1	1	7	4	1	14	NASIONAL
27	Jl. Yos Sudarso	2	0	6	6	0	15	0	0	9	NASIONAL
28	Jl. Gerilya Purwokerto	1	0	13	2	0	15	1	0	16	NASIONAL
	Jumlah	115	0	419	102	3	500	95	1	490	

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, 2021

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam bidang urusan perhubungan sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dan pencapaian sasaran pembangunan perhubungan Pemerintah Kabupaten Banyumas telah menyediakan sarana dan prasarana lalu lintas yang perkembangannya dari tahun 2016-2020 ditunjukan tabel berikut:

Tabel 2.66
Jumlah Sarana dan Prasarana Lalu Lintas
Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2020

No	Sarana dan prasarana lalu lintas (unit)	Kebutuhan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Terminal*)	8	3	3	3	3	3
2	Halte	100	21	28	53	56	56
3	LPJU	102.743			19.047	19.847	20.886
4	Rambu Lalu Lintas (unit)	10.276	4.290	4.766	5.166	5.700	5.899
5	Rambu (pendahulu Petunjuk Jalan (RPPJ) (unit)	1.685	421	441	449	447	497
6	Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) (unit)	84	58	61	62	64	
7	Warning Lamp (unit)	311	149	155	166	189	190
8	Marka Jalan (m2)	59.940	29.970	38.932	45.868	47.662	48.862

*) kebutuhan terminal di Kabupaten Banyumas sesuai RTRW Kabupaten Banyumas 2011-2031

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, 2020

Jumlah sarana prasarana lalu lintas terus bertambah dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, namun demikian jumlahnya masih belum memenuhi kebutuhan riil sarana prasarana lalu lintas di lapangan.

Bangunan Terminal tipe C yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Banyumas sesuai SK Bupati Banyumas Nomor 480/324 Tahun 2016 yaitu terminal Ajibarang dan Terminal Wangon telah memenuhi sebagian besar standar pelayanan penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2015.

Tabel 2.67
Pemenuhan Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan pada Terminal Wangon dan Terminal Ajibarang Kabupaten Banyumas

No.	Jenis Pelayanan	Tolok Ukur Indikator Terminal Tipe C	Terminal Wangon		Terminal Ajibarang	
			Ketersediaan	Kondisi	Ketersediaan	Kondisi
1	Keselamatan					
	a. Lajur Pejalan Kaki	Tersedia lajur pejalan kaki yang meminimalkan crossing dengan kendaraan bermotor	Ada	Baik	Ada	Baik
	b. Fasilitas jalan	Tersedia fasilitas keselamatan jalan (rambu, marka, penerangan jalan, pagar)	Ada	Baik	Ada	Baik
	c. Jalur Evakuasi	Tersedia jalur evakuasi	Ada	Baik	Ada	Baik
	d. Alat Pemadam Kebakaran	Tersedia alat pemadam kebakaran	Ada	Baik	Ada	Baik
	e. Pos, fasilitas dan petugas kesehatan	Tersedia pos, fasilitas dan petugas kesehatan	Ada	Baik	Ada	Baik
	f. Pos, fasilitas dan petugas pemeriksa kelaikan kendaraan umum	Tersedia pos, fasilitas dan petugas pemeriksa kelaikan kendaraan umum	Tidak ada	-	Tidak ada	-
	g. Informasi fasilitas keselamatan	Tersedia informasi fasilitas keselamatan, petunjuk jalur evakuasi dan titik kumpul yang mudah	Tidak ada	-	Tidak ada	-
	h. Informasi fasilitas kesehatan	Tersedia informasi fasilitas kesehatan yang mudah terlihat	Tidak ada	-	Tidak ada	-
	i. Informasi fasilitas pemeriksaan dan perbaikan ringan kendaraan bermotor	Tersedia informasi fasilitas pemeriksaan kendaraan bermotor yang mudah terlihat	Tidak ada	-	Tidak ada	-
2	Keamanan					
	a. Fasilitas Keamanan	Tersedia pos keamanan	Ada	Baik	Ada	Baik
	b. Media pengaduan gangguan keamanan	Tersedia stiker pada tempat yang strategis dan mudah	Ada	Baik	Ada	Baik
	c. Petugas Keamanan	Minimal 1 (satu) petugas berseragam	Ada	-	Ada	-
3	Kehandalan / Keteraturan					

No.	Jenis Pelayanan	Tolok Ukur Indikator Terminal Tipe C	Terminal Wangon		Terminal Ajibarang	
			Ketersediaan	Kondisi	Ketersediaan	Kondisi
	a. Jadwal kedatangan dan keberangkatan kendaraan serta besaran tarif kendaraan bermotor umum beserta realisasi jadwal	Tersedianya jadwal kedatangan dan keberangkatan kendaraan serta besaran tarif kendaraan bermotor umum secara tertulis beserta realisasi jadwal	Tidak ada	-	Tidak ada	-
	b. Jadwal kendaraan umum dalam trayek lanjutan dan kendaraan umum tidak dalam trayek lanjutan beserta realisasi jadwal	Tersedianya jadwal kendaraan umum dalam trayek lanjutan dan kendaraan umum tidak dalam trayek lanjutan beserta realisasi jadwal secara tertulis	Tidak ada	-	Tidak ada	-
	d. Kantor penyelenggara terminal, ruang kendali dan manajemen sistem informasi terminal	Tersedia kantor penyelenggara terminal Luas disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan pegawai	Ada Ada	Baik Memadai	Ada Ada	Baik Memadai
	e. Petugas Operasional Terminal	Tersedia petugas Operasional terminal yang mengatur operasional terminal	Ada	Memadai	Ada	Memadai
4	Kenyamanan					
	a. Ruang tunggu	Area bersih 100% dan tidak berbau yang berasal dari area terminal	Ada	Rusak sedang	Ada	Rusak sedang
	b. Toilet		Ada	Rusak sedang	Ada	Rusak sedang
	c. Fasilitas peribadatan/ mushola	3 orang (laki-laki atau perempuan)	Ada	-	Ada	Baik
	d. Ruang terbuka hijau	Tersedia ruang terbuka hijau Tersedia tempat sampah	Ada	Baik	Ada	Baik
	e. Rumah makan	Tersedia fasilitas rumah makan sesuai kebutuhan	Ada	Rusak sedang	Ada	Rusak parah
	f. Fasilitas dan Petugas Kebersihan	Tersedia fasilitas dan Petugas Kebersihan	Ada	Baik	Ada	Baik
	g. Tempat istirahat awak kendaraan	Tempat istirahat awak kendaraan	Tidak ada	-	Tidak ada	-
	h. Area merokok (smoking area)	Tersedia smoking area	Tidak ada	-	Tidak ada	-
	i. Drainase	Tersedia drainase yang memadai	Ada	Tidak memadai	Ada	Baik
	j. Lampu penerangan ruangan	tersedia lampu penerangan ruangan dengan intensitas cahaya 300 lux per 100 meter persegi	Ada	-	Ada	-
5	Kemudahan / Keterjangkauan					

No.	Jenis Pelayanan	Tolok Ukur Indikator Terminal Tipe C	Terminal Wangon		Terminal Ajibarang	
			Ketersediaan	Kondisi	Ketersediaan	Kondisi
	k. Letak jalur pemberangkatan	Letak jalur pemberangkatan kendaraan tetap & teratur	Ada	-	Ada	-
	a. Letak jalur kedatangan	Letak jalur pemberangkatan kendaraan tetap & teratur	Ada	-	Ada	-
	b. Informasi Pelayanan	Diletakkan di tempat yang strategis antara lain dekat loket, di pintu masuk dan di ruang tunggu umum, mudah dilihat dan jelas terbaca	Tidak ada	-	Tidak ada	-
		Diletakkan ditempat yang mudah didengar oleh penggunajasa dengan intensitas suara 20 dB lebih besar dari kebisingan yang ada	Tidak ada	-	Tidak ada	-
	c. Informasi angkutan lanjutan	Penempatan mudah terlihat dan jelas terbaca	Tidak ada	-	Tidak ada	-
	d. Tempat naik/turun penumpang	Tinggi platform sama dengan tinggi lantai bus	Tidak ada	-	Tidak ada	-
	e. Tempat Parkir kendaraan umum dan kendaraan pribadi	Tersedia tempat parkir dengan luas disesuaikan dengan lahan yang tersedia	Ada	Baik	Ada	Baik
6	Kesetaraan					
	Ruang ibu menyusui	Tersedia ruang tertutup khusus beserta fasilitas menyusui dan bayi lengkap untuk ibu	Ada	Baik	Ada	Rusak sedang

Sumber: DInhub Kabupaten Banyumas, 2021

Kelaikan kendaraan juga menjadi aspek penting untuk keselamatan dan keamanan transportasi. Dalam aspek kelaikan kendaraan, Pemerintah Kabupaten Banyumas pada tahun 2020 mengalokasikan anggaran untuk pengadaan tambahan alat pengujian kendaraan bermotor guna meningkatkan layanan pengujian kendaraan yang sudah dilakukan secara elektronik dan terintegrasi dengan Sistem Penerbitan Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor milik Kementerian Perhubungan. Namun dengan Pandemi COVID-19 anggaran tersebut dialihkan untuk penanganan pandemi. Penambahan alat pengujian kendaraan bermotor akan dapat memberikan pelayanan yang memadai bagi kendaraan bermotor yang wajib diuji di wilayah Kabupaten Banyumas dan wilayah sekitar, sehingga dapat menjadi sumber PAD bagi Kabupaten Banyumas.

Pelayanan pengujian kendaraan bermotor dan ketersediaan angkutan jalan diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.68
Jumlah penumpang Angkutan Umum, Trayek, dan Uji KIR di Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah penumpang angkutan umum (orang)					
	Bus AKAP	2.802.568	2.688.073	1.238.867	1.124.467	1.053.037
	Bus AKDP	1.393.122	1.380.106	1.300.302	1.220.502	1.105.257
	Mikrobus	2.240.150	2.170.452	244.695	161.801	220.226
	Angkota/Angkudes	1.185.413	1.303.104	153.513	139.556	122.810
2	Jumlah trayek angkutan umum (unit)					
	AKDP (Antar Kota Dalam Provinsi)	570	570	566	582	323
	AKAP (Antar Kota Antar Provinsi)	70	70	70	96	39
	AJDP (Antar Jemput Dalam Provinsi)	90	90	90	85	28
	AJAP (Antar Jemput antar Provinsi)	16	16	16	16	17
	Angkutan Kota	344	344	332	332	328
	Angkutan Desa	506	506	486	888	621
	Taksi	170	170	170	170	160
3	Rasio ijin trayek	0,056	0,064	0,066	0,068	0,071
4	Jumlah angkutan wisata (unit)	104	104	104	118	52
5	Jumlah Kendaraan Wajib Uji	13.486	13.199	13.019	11.626	15.585
6	Jumlah Uji KIR angkutan umum :					
	Mobil penumpang umum	261	321	233	217	43
	Mobil Bus	3.203	3.217	2.955	2.533	1.601
	Mobil Barang	22.909	22.719	21.183	18.610	12.114
	Mobil Gandengan	209	186	158	103	41

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, 2020

Data jumlah penumpang angkota/angkudes mulai tahun 2018 hanya dihitung dari jumlah penumpang yang masuk/keluar melalui terminal tipe C yang menjadi kewenangan Kabupaten Banyumas, sehingga data menurun sangat signifikan.

Sektor transportasi merupakan salah satu sektor yang terdampak pandemi COVID-19. Jumlah trayek angkutan umum pada tahun 2020 ikut terdampak pandemi sehingga jumlahnya mengalami penurunan. Untuk meningkatkan pelayanan transportasi dan meningkatkan konektivitas wilayah Dinas Perhubungan akan mengembangkan angkutan sungai dan angkutan massal perkotaan melalui program *Buy The Service* (BTS).

Penyelenggaraan angkutan sungai merupakan upaya pemanfaatan potensi Sungai Serayu sebagai jalur transportasi dan hibah pemerintah untuk pengembangan angkutan sungai. Pengembangan angkutan sungai didasarkan pada kajian Penyusunan SID Pengembangan Prasarana di Sungai Serayu Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah yang dilaksanakan oleh Kementrian Perhubungan. Berdasarkan kajian tersebut direncanakan prasarana berupa 1 pelabuhan dan 6 halte sungai untuk pengembangan angkutan di Sungai Serayu. Selain untuk memberikan alternatif moda transportasi, angkutan sungai menjadi dukungan bagi pengembangan pariwisata di Kabupaten Banyumas.

Program *Buy The Service* (Pembelian Layanan) untuk angkutan massal perkotaan dilakukan dengan membeli layanan angkutan massal perkotaan kepada operator dengan mekanisne lelang berbasis standar pelayanan minimal atau quality licensing bekerjasama dengan

Kementrian Perhubungan. Program BTS dilatarbelakangi permasalahan kemacetan serta tidak tertatanya sistem transportasi publik yang baik sehingga menyebabkan pemborosan, permasalahan lingkungan kerugian ekonomi, hingga kecelakaan lalu lintas. Di sisi lain angkutan massal perkotaan merupakan *public goods*, sehingga Pemerintah menjadi penanggung risiko dalam penyediaannya. Jalur BRT yang dikembangkan meliputi: 1) Pasar Pon – Ajibarang, 2) Terminal Notog Patikraja – Baturaden, dan 3) Terminal Bulupitu - Terminal Kebondalem. Jalur Terminal Bulupitu - Terminal Kebondalem diintegrasikan dengan Trans Jateng Koridor Purwokerto-Purbalingga. Operasional BTS akan dilaksanakan oleh pihak ketiga yang dipilih melalui mekanisme lelang.

2.3.2.10. Komunikasi dan Informatika

Kewenangan kabupaten/kota dalam penyelenggaraan urusan bidang komunikasi dan informatika meliputi pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/kota, pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pengelolaan *e-government* di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota.

Petunjuk pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2012 yang diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Lingkup Peraturan Gubernur tersebut diantaranya adalah Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID). PPID adalah pejabat yang bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan atau pelayanan informasi di Badan Publik dan bertanggungjawab langsung kepada atasan PPID. Kelembagaan PPID pada Pemerintah Kabupaten Banyumas diatur berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 80 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas. Selanjutnya Kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kabupaten Banyumas ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 480/36 Tahun 2019 Tentang Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.

Penyediaan Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala maupun yang sifatnya serta merta dilakukan melalui website http://ppid.banyumaskab.go.id. Informasi yang tersedia meliputi: a) Informasi Harga Pasar, b) Informasi Produk Hukum, c) Informasi Layanan Pengadaan Barang secara elektronik, d) Informasi Aduan, dan e) Informasi Keuangan Daerah.

Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah melakukan penilaian terhadap Implementasi UU No. 14 Tahun 2008 di kabupaten/kota, meliputi muatan atau content dari website PPID dan visiting ke desk layanan informasi, serta jawaban kuesioner. Hasil penilaian tersebut PPID Kabupaten Banyumas menjadi salah satu pemerintah daerah di Jawa Tengah yang dinilai memiliki tata kelola informasi publik yang

dengan kategori menuju informatif dengan nilai 88.62 pada Ajang Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Award 2019.

Kewenangan pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pengelolaan e-government di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik mengamanatkan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). SPBE bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Sistem pemerintahan berbasis elektronik meliputi unsur-unsur: tata kelola, manajemen, layanan, infrastruktur, aplikasi, keamanan dan audit TIK.

Infrastruktur komunikasi dan informatika di wilayah Kabupaten Banyumas secara umum disediakan oleh swasta dan BUMN, telah menjangkau sebagian besar wilayah. Untuk kepentingan peningkatan pelayanan kepada masyarakat Pemerintah Kabupaten Banyumas menyelenggarakan pelayanan publik berbasis elektronik, baik dalam penyampaian berbagai informasi kepada masyarakat maupun pelayanan publik lainnya. Dengan pelayanan publik berbasis elektronik diharapkan dapat memberikan kemudahan, kecepatan serta keterbukaan pelayanan publik.

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik berbasis elektronik Pemerintah Kabupaten Banyumas telah memiliki infrastruktur pendukung sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.69
Fasilitas Infrastruktur Bidang Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas Tahun 2020

No	Jenis Infrastruktur	Jumlah
1	Website milik pemerintah daerah	357
2	Perangkat Daerah terhubung FO	27
3	Aplikasi pemerintah daerah (dalam e-office)	60
4	Pusat Data Terstandar	1
5	Smart Room	1

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas, 2021

Untuk mendukung penerapan SPBE 27 perangkat daerah di Kabupaten Banyumas telah terhubung dengan fiber optic dan infrastruktur komunikasi dan informatika lain yang disediakan oleh penyedia layanan.

Peran BUMN dan swasta dalam penyediaan infrastruktur komunikasi dan informatika telah memperluas akses terhadap ponsel dan internet. Berdasarkan publikasi Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Banyumas Tahun 2020, pada tahun 2020, pengguna ponsel/komputer telah mencakup 81,42% anggota rumah tangga berusia 5 tahun ke atas, dan 57,60 % anggota rumah tangga anggota rumah tangga di Kabupaten Banyumas telah mengakses internet.

2.3.2.11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Pengembangan koperasi di Kabupaten Banyumas menunjukkan peningkatan jumlah koperasi selama kurun waktu 2016-2020, dari 544

unit pada tahun 2016 meningkat menjadi 558 unit pada tahun 2020. Persentase koperasi aktif juga mengalami peningkatan, dari sebesar 77,02% pada tahun 2016 menjadi 80,65% pada tahun 2020. Namun demikian, persentase koperasi tidak sehat dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dari tahun 2016 sebesar 69,96 menjadi 71,56% pada tahun 2020. Banyaknya koperasi yang tidak sehat dapat mengurangi kepercayaan masyarakat untuk menjadikan koperasi sebagai sarana mewujudkan kedaulatan ekonomi. Untuk itu diperlukan usaha keras dan juga pengawasan serta pembinaan agar koperasi sehat di Kabupaten Banyumas terus meningkat jumlahnya. Salah satunya dengan meningkatkan kualitas SDM bidang perkoperasian dimana koperasi yang ada diikutkan dalam pendidikan dan latihan perkoperasian serta para pembina koperasi juga dipahamkan ketika melakukan penilaian koperasi. Perkembangan koperasi di Kabupaten Banyumas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.70
Perkembangan Capaian Kinerja Koperasi Tahun 2016–2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Koperasi (unit)	544	546	546	554	558
2.	Jumlah Koperasi aktif (unit)	419	422	438	446	450
	Persentase koperasi aktif (%)	77,02	77,29	80,22	80,51	80,65
3.	Jumlah Koperasi sehat (unit)	126	127	128	129	128
	Koperasi Kategori Sehat (%)	30,07	30,09	29,22	28,92	28,44
4.	Jumlah Koperasi tidak sehat (unit)	293	295	310	317	322
	Koperasi Kategori tidak Sehat (%)	69,93	69,91	70,78	71,08	71,56

Sumber: Dinakerkop dan UKM Kabupaten Banyumas, 2020

Peran dan perkembangan koperasi berkaitan erat dengan sektor usaha mikro kecil di Kabupaten Banyumas. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil (UMK) merupakan bagian integral dalam pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Dalam pembangunan bidang ekonomi secara eksplisit UUD 1945 menekankan implementasi azas kekeluargaan (pasal 33 ayat 1) dan penyelenggaraan perekonomian nasional yang berdasar atas demokrasi ekonomi (pasal 33 ayat 4).

Dalam hal ini pemberdayaan UMK, berkaitan langsung dengan kehidupan dan peningkatan kesejahteraan bagi sebagian besar rakyat Indonesia (pro poor). Selain itu, potensi dan peran strategisnya telah terbukti menjadi penopang kekuatan dan pertumbuhan ekonomi nasional (pro growth). Keberadaan UMK yang dominan sebagai pelaku ekonomi nasional juga merupakan subyek vital dalam pembangunan, khususnya dalam rangka perluasan kesempatan berusaha bagi wirausaha baru dan penyerapan tenaga kerja serta menekan angka pengangguran (pro job).

Pertumbuhan usaha mikro kecil di Kabupaten Banyumas menunjukkan perkembangan yang sangat baik. Hal ini terlihat dari tumbuhnya unit UMK dan penyerapan tenaga kerja pada sektor UMK.

Rata-rata setiap unit usaha mempekerjakan 1-3 orang pekerja. Kondisi ini menunjukkan bahwa usaha mikro dan kecil memberikan kontribusi yang positif terhadap penurunan jumlah pengangguran di Kabupaten Banyumas, terutama terkait dengan penyerapan tenaga kerja, penggunaan bahan baku lokal dan perekonomian daerah. Sebagian besar hasil produksi UMK masih dipasarkan di Kabupaten Banyumas dan sekitarnya.

Usaha Mikro Kecil di Kabupaten Banyumas masih terkendala dalam hal perijinan usaha dan permodalan, ketrampilan manajemen dan penggunaan teknologi tepat guna dalam kegiatan usaha. Keterbatasan tersebut menjadikan perkembangan omset usaha dan keuntungan yang diperoleh sebagian besar UMK masih kecil, dengan realisasi peningkatan omzet baru mencapai 1,06% belum mencapai target 2020 sebesar 3% atau baru tercapai 35,33% dan target akhir RPJMD sebesar 6% atau baru tercapai 17,67%.

Jumlah anggota UMKM yang memperoleh fasilitas permodalan usaha di Kabupaten Banyumas sampai dengan tahun 2019 sebanyak 9.205 orang anggota UMKM. Meningkat pada tahun 2020 sebanyak 9.674 orang anggota UMKM atau sebesar11,18% dari total UMKM tahun 2020 sebesar 86.545 UMKM. Sebagian besar UMKM memperoleh program Pemerintah melalui Kredit Usah Usaha Rakyat (KUR) dan dana bergulir dari Pemerintah Kabupaten Banyumas. Karena masih banyaknya UMKM yang belum memperoleh fasilitas permodalan tersebut, maka diperlukan peran pemerintah Kabupaten Banyumas dalam meningkatkan akses permodalan bagi UMKM.

Dalam kegiatan usahanya usaha mikro, kecil dan menengah juga menghadapi tantangan dalam peningkatan mutu dan pemasaran produk UMK. Perkembangan UMK dan jumlah tenaga kerja terserap di Kabupaten Banyumas tahun 2015-2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.71
Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2020

No.	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Usaha Mikro dan Kecil (unit)	66.689	66.973	85.948	86.228	86.645
2.	Jumlah tenaga kerja Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (orang)	95.955	95.955	126.986	128.188	128.952
3.	Jumlah Usaha Mikro dan Kecil yang telah memiliki ijin usaha (unit)	6.720	6.720	6.720	8.653	19.865
4.	Jumlah Usaha Mikro dan Kecil yang telah memperoleh fasilitas permodalan usaha (orang)	7.184	8.020	8.539	9.205	9.674
5.	Persentase Usaha Mikro dan Kecil yang telah memperoleh fasilitas permodalan usaha (%)	10,77	11,97	9,94	10,68	11,17

Sumber: Dinakerkop dan UKM Kabupaten Banyumas, 2020

Pandemi COVID-19 menghambat kegiatan usaha, namun di sisi lain juga memunculkan usaha mikro baru akibat banyaknya pemutusan

hubungan kerja. Dukungan pemerintah dalam peningkatan UMK di Kabupaten Banyumas sangat diperlukan untuk mempercepat pemulihan ekonomi wilayah.

2.3.2.12. Penanaman Modal

Penanaman modal di daerah menjadi bagian penting dalam upaya pengurangan pengangguran. Keberadaan penanam modal (investor) dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat, yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banyumas. Jumlah investor yang masuk ke Kabupaten Banyumas kurun waktu 2016-2020 cenderung mengalami peningkatan. Nilai investasi dan tenaga kerja yang terserap mengalami perkembangan fluktuatif.

Tabel 2.72
Perkembangan Penanaman Modal Kabupaten Banyumas
Tahun 2016-2020

No.	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah investor (PMDN/ PMA)	1.041	102	183	210	413
2.	Jumlah investasi (Juta Rp)	455.696,15	583.401,95	625.635,30	761.621,39	1.077.955,78
3.	Jumlah tenaga kerja terserap (orang)	12.683	1.079	1.406	4.688	4.568
4.	Rasio daya serap tenaga kerja	12,18	10,58	7,68	22,32	11,06

Sumber: DPMPPTSP Kabupaten Banyumas, 2020.

Kinerja urusan penanaman modal Kabupaten Banyumas menentukan daya saing Kabupaten Banyumas. Dari data lima tahunan (2016-2020) di atas menunjukkan volatilitas pola investasi yang masuk ke Kabupaten Banyumas. Meskipun secara besaran dana mengalami perkembangan yang fluktuatif, namun dari jumlah investor mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini menunjukkan posisi Kabupaten Banyumas yang semakin kompetitif, atau semakin menarik bagi investor-investor besar. Investasi besar memang diperlukan untuk menyerap banyak tenaga kerja, sehingga minimal dua hal bisa tereduksi, yaitu kemiskinan dan masalah migrasi penduduk ke kota besar untuk mencari pekerjaan.

Proses pelayanan perizinan di DPMPPTSP Kabupaten Banyumas sudah menunjukkan kinerja yang cukup baik dari 1-10 hari pada tahun 2016 menjadi 1-7 hari pada tahun 2017 dan 2019. Saat ini seluruh daerah sedang menyederhanakan proses perizinan, dengan asumsi semakin sederhana proses, maka waktu pelayanan akan semakin cepat. Pemerintah Kabupaten Banyumas selalu berupaya meningkatkan pelayanan perizinan melalui inovasi-inovasi, khususnya yang berbasis pada pemanfaatan teknologi informasi serta penyederhanaan prosedur.

2.3.2.13. Kepemudaan dan Olah Raga

Pembangunan kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Banyumas kurun waktu tahun 2016-2020 menunjukkan kinerja yang cukup baik. Pemerintah Kabupaten Banyumas melalui Dinas Pemuda Olah Raga Kebudayaan dan Pariwisata memberikan pembinaan kepada organisasi

kepemudaan yang ada, dan memfasilitasi pemuda berprestasi untuk mengikuti kompetisi kepemudaan.

Pembangunan di bidang olahraga menunjukkan perkembangan yang cukup dan menggembirakan. Organisasi olahraga di Kabupaten Banyumas sejak tahun 2016-2020, tercatat sebanyak 202 buah. Fasilitas olahraga berupa prasarana lapangan olahraga di Kabupaten Banyumas cukup tersedia, untuk jumlah lapangan olahraga tercatat pada tahun 2016-2020 tercatat 657.

Perkembangan jumlah organisasi pemuda, organisasi olahraga dan jumlah lapangan olahraga di Kabupaten Banyumas tahun 2016-2020, dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.73
Perkembangan Jumlah Organisasi Pemuda, Organisasi Olahraga dan Lapangan Olahraga Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2020

No.	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah organisasi pemuda (unit)	143	143	143	143	145
	Organisasi kesiswaan (OSIS) (unit)	304	304	304	304	304
	Organisasi Mahasiswa (BEM) (unit)	11	11	11	11	11
	Organisasi KNPI (unit)	1	1	1	1	1
	Organisasi kepramukaan (gudep)	2.606	2.606	2.606	2.606	2.608
2.	Jumlah organisasi pemuda yang telah dibina					
	Organisasi kesiswaan (OSIS) (unit)	304	304	304	304	304
	Organisasi mahasiswa (BEM) (unit)	11	11	11	11	11
	Organisasi KNPI (unit)	1	1	1	1	1
	Organisasi kepramukaan (gudep)	2.606	2.606	2.606	2.606	2.608
3.	Jumlah organisasi olahraga (organisasi)	202	202	202	202	200
4.	Jumlah lapangan olahraga (lapangan)	657	657	657	657	657

Sumber: Dinporabudpar Kabupaten Banyumas, 2020.

Selain beberapa indikator di atas, urusan kepemudaan dan olahraga masih menyimpan berbagai kinerjanya yang bisa mencerminkan kinerjanya yaitu peningkatan perolehan medali di tingkat provinsi dan nasional tahun 2020 sebesar 1,25% menurun jika dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 8,52%. Cakupan pembinaan atlet muda atau pelajar tahun 2020 sebesar 1,56% dan ini juga menurun jika dibandingkan tahun 2019 sebesar 5,43%.

2.3.2.14. Statistik

Urusan pemerintahan bidang statistik dilaksanakan guna menyediakan publikasi data dan informasi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan pemerintah. Penyusunan data statistik yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten adalah adalah statistik sektoral. Data statistik sektoral senantiasa dilakukan update setiap tahunnya, namun demikian data yang diproduksi belum melalui proses validasi data sebagaimana ketentuan penyelenggaraan satu data. Statistik sektoral Kabupaten Banyumas disusun dalam buku Data dan

Informasi Kabupaten Banyumas dan dipublikasikan melalui website Pemerintah Kabupaten Banyumas (www.banyumaskab.go.id), guna memenuhi informasi statistik yang transparan dan murah.

Ketersediaan data statitik dasar dan khusus disediakan oleh Badan Pusat Ststistik (BPS) Kabupaten Banyumas, meliputi antara lain Kabupaten Banyumas Dalam Angka, Kecamatan Dalam Angka, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dapat diperoleh pada website http://banyumaskab.bps.go.id/.

Guna mengoptimalkan pemanfaatan data dan informasi dan meningkatkan pelayanan statistik diperlukan sistem informasi/aplikasi program interface (API) untuk mengintegrasikan sistem informasi yang ada di masing masing organisasi perangkat daerah.

2.3.2.15. Persandian

Untuk keamanan data dan informasi merupakan kebutuhan baru dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Banyumas yang mengembangkan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). Keamanan SPBE merupakan bagian dari arsitektur SPBE. Sejalan dengan meningkatnya perkembangan teknologi informasi, dimana masyarakat dapat mengakses segala jenis informasi termasuk data dan informasi dari pemerintah diperlukan pengamanan data pemerintah.

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik mengamanatkan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus menerapkan Keamanan SPBE. Sampai dengan tahun 2020, 27 OPD di Kabupaten Banyumas telah menggunakan layanan keamanan informasi. Dari 56 OPD (29 dinas/badan dan 27 kecamatan) pada Pemerintah Kabupaten Banyumas baru 43% yang menggunakan layanan keamanan data dan informasi.

Untuk pemenuhan standard keamaan informasi dilaksanakan audit keamanan data ISO 27001. Dinas komunikasi dan informatika sebagai pengelola data dan informasi telah mampu memenuhi standarisasi keamanan data ISO 27001. Namun untuk standarisasi pusat data/data center tahun 2019 tidak dilaksanakan audit dikarenakan data center di Kabupaten Banyumas dalam tahap pengembangan.

2.3.2.16. Kebudayaan

Sebagai tonggak penunjang berdirinya kebudayaan nasional di Indonesia, kebudayaan daerah seringkali dihadapkan pada permasalahan terkait eksistensinya dalam kehidupan masyarakat. Permasalahan yang muncul antara lain semakin melunturnya nilai-nilai serta penghargaan terhadap kebudayaan daerah itu sendiri. Salah satu faktor yang menyebabkan semakin lunturnya minat masyarakat untuk menjaga dan melestarikan kebudayaan lokal adalah minimnya usaha pelestarian kesenian dan kebudayaan daerah, serta menguatnya gempuran budaya asing yang masuk melalui saluran teknologi informasi yang semakin bebas dan cepat. Pemerintah Kabupaten Banyumas mengantisipasi permasalahan tersebut dengan melakukan beberapa program kegiatan yang mengarah kepada pembinaan, pelestarian dan

juga pembangunan sarana prasarana penyelenggaraan kebudayaan lokal beserta dengan unsur yang terbentuk di dalamnya.

Dalam rangka melestarikan kesenian dan kebudayaan dilakukan dengan penyelenggaran festival seni dan budaya yang rutin digelar setiap tahun. Penyelenggaran festival seni dan budaya antara lain menampilkan pagelaran kesenian buncis karawitan, calung dan macapat, serta beberapa kebudayaan lain seperti wayang kulit, lengger dan kesenian kenthongan. Penyelenggaraan festival seni dan budaya meningkat cukup signifikan, namun kualitas pelaksanaannya masih perlu ditingkatkan. Tema maupun isi setiap festival perlu dipertajam, sehingga jelas perbedaan antara masing-masing festival. Pemasaran untuk setiap event tersebut juga perlu dikoordinasi dengan lebih baik lagi, sehingga benar-benar mampu menarik wisatawan seluas-luasnya.

Dukungan pemerintah dalam rangka memberikan ruang untuk mengekpresikan bentuk kesenian dan kebudayaan di Kabupaten Banyumas dilakukan dengan pembangunan dan penyediaan sarana penyelenggaraan seni dan budaya berupa Gedung Kesenian Sutedja. Selain itu beberapa taman juga dilengkapi dengan panggung sehingga sekaligus dapat digunakan untuk kegiatan budaya.

Dalam rangka menjaga serta melestarikan beberapa benda bersejarah, Pemerintah Kabupaten Banyumas melakukan pelestarian terhadap benda, situs dan kawasan cagar budaya. Selama kurun waktu 5 tahun 2015-2019 tercatat terdapat 59 benda bersejarah, berupa benda, situs dan Kawasan cagar budaya telah mendapatkan tindakan pelestarian/konservasi.

Pembinaan terhadap unsur kebudayaan dan seni juga tidak luput dari perhatian pemerintah. Hingga tahun 2020 jumlah kelompok group kesenian di Kabupaten Banyumas tercatat sebanyak 2.508 kelompok. Jumlah kelompok group kesenian yang mendapat pembinaan diupayakan meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2020 sebanyak 201 kelompok group kesenian telah mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Kabupaten Banyumas. Peningkatan porsi pembinaan penting sebagai instrumen untuk meningkatkan kualitas produk kesenian, pembinaan juga penting untuk merawat komitmen dan semangat para pelaku seni.

Kinerja bidang kebudayaan pada tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.74
Kinerja Kebudayaan Kabupaten Banyumas Tahun 2016 – 2020

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Penyelenggaraan festival seni dan budaya (kali)	5	24	24	25	306
2.	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya (unit)	6	6	6	6	6
3.	Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	59	59	59	59	60
4.	Jumlah group kesenian (kelompok)	1.633	1.633	1.633	1.717	2.508
5.	Jumlah group kesenian yang telah dibina (kelompok)	157	157	157	200	201
6.	Jumlah seniman (orang)					
	Penari	1.529	1.529	1.529	8.520	8.525
	Pemain teater	900	900	900	7.400	7.405

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
	Pelukis	112	112	112	112	112
	Pemusik	5.983	5.983	5.983	6.300	6.300

Sumber: Dinporabudpar Kabupaten Banyumas, 2020

2.3.2.17. Perpustakaan

Sebagai salah satu pusat penyebaran ilmu pengetahuan, perpustakaan mempunyai peran dan tujuan yaitu sebagai wahana untuk mencerdaskan bangsa agar tercapai masyarakat yang terdidik dan berwawasan luas. Kabupaten Banyumas dalam kurun waktu 2016-2020 telah memiliki 919 perpustakaan yang terdiri dari 1 perpustakaan daerah, 5 perpustakaan keliling, 820 perpustakaan sekolah, 53 perpustakaan desa, 4 perpustakaan rumah ibadah, 19 taman bacaan masyarakat dan 17 perpustakaan perguruan tinggi. dimana jumlah ini menurun dari tahun 2016 sebesar 1191 perpustakaan dimana jumlah yang paling besar adalah penurunan perhitungan perpustakaan sekolah dimana mulai tahun 2018 jenjang pendidikan SMA sudah bukan kewenangan Kabupaten sehingga kinerja perpustakaan jenjang SMA/SMK/MAN tidak lagi wewenang Kabupaten, dari Jumlah pengunjung perpustakaan daerah terus meningkat dari tahun 2016-2019 namun di tahun 2020 jumlah pengunjung perpustakaan daerah mengalami penurunan dari 1.332.667 pengunjung di tahun 2019 menjadi 587.339 pengunjung atau turun sekitar 44,07% ini dikarenakan di tahun 2020 terjadi bencana Covid 19 sehingga mulai bulan April 2020 Perpustakaan daerah dan perpustakaan lainnya di Kabupaten Banyumas di tutup dan tidak ada pengunjung

Dalam upaya meningkatkan jumlah pengunjung perpustakaan daerah selain penambahan koleksi buku, juga dilakukan penambahan fasilitas berupa internet gratis, serta fasilitas Wifi/Hot Spot secara gratis/free acces. Selain itu Perpustakaan daerah Kabupaten Banyumas akan menggunakan sistem otomasi dalam hal layanan pencarian katalog buku. Capaian indikator Urusan Perpustakaan tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.75
Kinerja Bidang Perpustakaan Tahun 2016-2020

No.	Kondisi	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah perpustakaan (unit)	1.191	1.191	897	897	919
	Perpustakaan Daerah	1	1	1	1	1
	Perpustakaan keliling	4	4	6	6	5
	Perpustakaan Sekolah	1073	1073	798	798	820
	Perpustakaan Desa	52	52	53	53	53
	Perpustakaan Rumah ibadah	4	4	4	4	4
	Taman Bacaan Masyarakat	44	44	18	18	19
	Perustakaan Perguruan Tinggi	13	13	17	17	17
2.	Jumlah Anggota Perpustakaan Daerah (orang)	9.181	12.795	15.403	17.396	17361
3.	Jumlah peminjam buku perpustakaan	69.341	77.638	36.308	32.865	4.594

No.	Kondisi	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
	Daerah pertahun (orang)					
4.	Jumlah Pengunjung Perpustakaan pertahun (orang)	925.127	942.182	1.009.646	1.332.677	587.339
5.	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah (buku)	55.334	59.313	53.164	56.407	61.335
6.	Jumlah Perpustakaan Terbina (%)	NA	NA	NA	20,84	30,64

Sumber: Dinas Arpusda Kabupaten Banyumas, 2020

Tabel 2.76
Jumlah Pengunjung Perpustakaan Kabupaten Banyumas
Tahun 2016 - 2020

No.	Nama	Pengujung Th.2016	Pengujung Th.2017	Pengujung Th.2018	Pengujung Th.2019	Pengujung Th.2020
1.	Perpustakaan Daerah	59.620	61.100	63.244	80.030	51.806
2.	Perpustakaan keliling	23.200	29.408	25.338	20.535	-
3.	Perpustakaan Sekolah SD	32.200	33.352	137.227	268.084	140.918
4.	Perpustakaan SMP	234.400	236.315	248.612	369.588	300.510
5.	Perpustakaan SMA	224.565	225.860	227.210	101.894	78.540
6.	Perpustakaan Perguruan Tinggi	342.500	347.121	296.787	481.246	14.141
7.	Taman Bacaan Masyarakat	8.642	9.026	11.228	11.300	1.424
Jumlah seluruh		925.127	942.182	1.009.646	1.332.677	587.339

Sumber: Dinas Arpusda Kabupaten Banyumas, 2020

2.3.2.18. Kearsipan

Pengelolaan kerasipan merupakan salah satu hal penting yang harus dilakukan dan perlu adanya penyeragaman dan penyamaan persepsi dari masing-masing institusi dalam menyusun dan mengorganisir kearsipan, untuk menunjang tata kelola pemerintahan di Kabupaten Banyumas. Pemerintah Kabupaten Banyumas melalui Perbup Nomor 190 Tahun 2005 tentang Pedoman Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas dan Perbup Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pedoman Penataan Berkas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas telah menyusun pedoman penataan dan klasifikasi arsip sebagai acuan seluruh perangkat daerah dalam menyelenggarakan kearsipan. Selanjutnya pada tahun tahun 2009 diterapkan Sistem Pengelolaan Arsip secara baku sesuai dengan pedoman sebanyak organisasi perangkat daerah dan UPTD serta Arsip di Pemerintahan Desa. Dukungan sumberdaya manusia yang memadai dan kompeten di bidang pengelolaan kearsipan diharapkan penyelenggaraan kearsipan akan optimal. Untuk peningkatan sumber daya manusia pengelola kearsipan selama periode tahun 2015-2017 telah dilaksanakan Bintek Pengelolaan Kearsipan, yang jumlah pesertanya bertambah setiap

tahun. Sampai dengan tahun 2017, 850 orang telah ada mengikuti Bintek Pengelolaan Kearsipan.

Sebagai instansi yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengorganisasian data dan arsip, Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah memiliki inisiatif dengan melakukan penarikan arsip dari instansi pemerintah. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir keterlambatan dan resiko hilang dari arsip-arsip yang ada.

Pengelolaan arsip secara baku telah dilakukan 28 SKPD di Kabupaten Banyumas, sedangkan SKPD Kecamatan, UPT Puskesmas, Unit Pendidikan Kecamatan dan Pemerintahan Desa belum dilakukan pengelolaan arsip secara baku di karenakan sarana dan prasarana yang belum memadai.

Kinerja Bidang Kearsipan Kabupaten Banyumas dari tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut. Kepemilikan Depo arsip 1 buah, Tenaga arsip sampai dengan tahun 2020 berjumlah 2 orang dimana untuk pengelolaan arsip statis dan dinamis di 29 OPD di Kabupaten Banyumas, Nilai Penyelenggaraan Kearsipan sudah cukup bagus dengan nlai 86 di tahun 2020. Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan sampai dengan tahun 2020 sebanyak 115 orang. Persentase pengelolaan arsip statis dalam kondisi baik di Pemerintah Kabupaten Banyumas sebesar 40%. Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku pada tahun 2020 sebesar 14,5%, Persentase unit kerja/OPD yang mempunyai daftar arsip sebesar 14,5% Audit Kearsipan sebanyak 8 SKPD .

Rincian capaian indikator kinerja Pengelollan kearsipan tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.77
Kinerja Kearsipan Kabupaten Banyumas
Tahun 2016-2020

No	Kinerja	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Depo Arsip	Unit	-	-	1	1	1
2.	Tenaga Arsiparis Tingkat Trampil	Orang	2	2	2	2	2
3.	Nilai Penyelenggaraan Kearsipan	Nilai	NA	52	67	75	86
4.	Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	Orang	85	100	54	205	115
5.	Persentase pengelolaan arsip statis dalam kondisi baik di Pemerintah Kabupaten anyumas	%	1,88	2,09	8,13	27,82	40
6.	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	%	9,1	14,54	5,5	10,92	14,5
7.	Persentase unit kerja/OPD yang mempunyai daftar arsip	%	9,1	14,54	5,5	10,92	14,5
8.	Fasilitasi Penataan Arsip pada SKPD	SKPD	5	NA	10	30	25
9.	Audit Kearsipan	SKPD	NA	NA	NA	10	8
10.	Penyusunan Buku Pedoman Kearsipan	Buku	1	1	1	1	1

No	Kinerja	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
11.	Penyusutan Arsip	SKPD	NA	NA	1	NA	NA

Sumber: Dinas Arpusda Kabupaten Banyumas, 2020

2.3.3.Fokus Layanan Urusan Pilihan

2.3.3.1. Kelautan dan Perikanan

Perikanan di Kabupaten Banyumas terdiri dari perikanan tangkap yang berasal dari perairan sungai (perairan umum) dan perikanan budidaya. Luas perikanan tangkap di Kabupaten Banyumas tahun 2019 adalah seluas 1.293 ha, dan luas perikanan budidaya seluas 424,50 ha. Luas lahan perikanan yang ada, sangat berpengaruh terhadap jumlah produksi dan nilai produksinya. Produksi perikanan di Kabupaten Banyumas selama kurun waktu tahun 2016-2020, mengalami trend peningkatan, pada tahun 2016 mencapai 10.859 ton dan di tahun 2020 mencapai 11.850,15 ton.

Konsumsi ikan (kg/Kpt/th.) mengalami peningkatan selama periode tahun 2016-2020. Pada tahun 2020 konsumsi ikan mencapai 21,05 kg/Kpt/th, masih lebih rendah dari konsumsi ikan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2020 sebesar 33 kg/kapita/th dan angka konsumsi ikan nasional tahun 2020 sebesar 56,39 kg/kapita yang naik 3,47 persen dibanding tahun 2019 sebesar 54,5 kg/kapita dan ditargetkan akan naik menjadi 62,5 kg/perkapita pada tahun 2024.

Potensi perikanan Kabupaten Banyumas yang bertumpu pada perikanan budidaya ini menjadikan tingkat konsumsi ikan rendah karena penduduk agak kesulitan memperoleh ikan dengan harga yang terjangkau.

Banyaknya ikan yang ditebar diperairan umum selama kurun waktu 2016-2020 mengalami perkembangan yang fluktuatif mulai dari 408.000 ekor tahun 2016 menjadi 275.000 turun di tahun 2020. Hal ini dikarenakan tahun 2020 terkena dampak refocusing anggaran.

Perkembangan produksi perikanan di Kabupaten Banyumas, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.78
Capaian Kinerja Bidang Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2020

No.	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Produksi perikanan (ton)	10.859,15	11.010,09	11.121,00	11.670,24	11.850,15
2	Konsumsi Ikan (kg/Kpt/th.)	13,78	13,85	14,33	21,00	21,05
3	Penebaran Ikan di perairan umum (ekor/th.)	408.000	756.460	515.000	210.000	275.000
4	Jumlah usaha pengolahan ikan (unit usaha)	NA	NA	NA	168	139
5	Produksi olahan hasil perikanan (ton)	NA	NA	NA	178,35	188,5

Sumber: Dinkannak Kabupaten Banyumas, 2020.

Produksi perikanan yang dihasilkan di Kabupaten Banyumas sebagian dilakukan pengolahan melalui unit-unit usaha yang dimiliki masyarakat. Jumlah usaha pengolahan ikan di Kabupaten Banyumas pada tahun 2019 ada sebanyak 168 unit usaha menurun di tahun 2020 menjadi sebanyak 139 unit usaha dikarenakan Pandemi COVID-19, maka banyak usaha pengolahan ikan yang tidak beroperasi. Dalam upaya peningkatan produksi perikanan sekaligus mengarah pada peningkatan pendapatan masyarakat, maka dilakukan pembinaan terhadap kelompok pembudidaya ikan.

2.3.3.2. Pariwisata

Potensi pariwisata di Kabupaten Banyumas cukup banyak dan beragam jenisnya, umumnya mudah dijangkau karena didukung sarana dan prasarana yang memadai. Namun demikian, masih terdapat beberapa obyek wisata yang belum tergarap secara optimal dan membutuhkan investasi untuk pengembangannya. Berbagai potensi pariwisata tersebut yaitu : Baturraden, Taman Rekreasi Nirwana Manggala, Bendung Gerak Serayu, Wana Wisata, Pancuran Pitu, Pancuran Telu, Goa Sarabadak, Telaga Sunyi, Curug Cipendok, Curug Ceheng, Pemandian Kalibacin, Museum BRI.

Untuk mendukung pengembangan pariwisata di Kabupaten Banyumas disusun kajian *One District One Destination* (ODOD) konsep pengembangan pariwisata berbasis kawasan, dan kajian revitalisasi Kota Lama Banyumas. Selain itu untuk mendukung wisata Sungai Serayu Dinas Perhubungan mengembangkan angkutan sungai yang tidak hanya memberi pilihan moda transportasi juga diharapkan akan mendukung pariwisata di kawasan yang terhubung.

Pengembangan pariwisata dengan model ODOD ini merupakan Strategi yang memiliki prinsip bahwa pengembangan destinasi wisata haruslah meliputi kawasan yang merupakan kumpulan desa atau kecamatan di mana masyarakat secara bersama sama mengembangkan satu karekter atau tema produk pariwisata tertentu yang mewakili identitas bersama kawasan. Kajian ODOD dilakukan untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan pariwisiata perwilayah pengembangan pariwisata Kabupaten Banyumas, menyusun kriteria penentuan destinasi unggulan di setiap perwilayahan, mengidentifikasi destinasi wisata di setiap perwilayahan, menentukan destinasi unggulan dan prioritas di setiap perwilayahan, dan menyusun strategi pengembangan destinasi unggulan dan prioritas di setiap perwilayahan.

Kabupaten Banyumas telah menyusun Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Banyumas (RIPPARKAB) Tahun 2018-2033 yang menetapkan Perwilayahan Kawasan Pengembangan Pariwisata meliputi Kawasan Pengembangan Pariwisata dan Kawasan Strategis Pariwisata (KSP). Berbeda dengan RIPPARKAB hasil dari kajian ODOD adalah penentuan destinasi-destinasi unggulan prioritas. Destinasi unggulan prioritas tersebut yaitu Bukit Pangonan Indah dan Wisata Kota Lama Banyumas yang berada di Kawasan Banyumas Selatan, Taman Bale Kemambang di Kawasan Banyumas Tengah, Hutan Pinus Limpakuwus di Kawasan Banyumas Timur, Gua Alam Darmakradenan dan Pesona Desa Cikakak di Kawasan Banyumas

Barat, dan Wisata Dirgantara/Watu Kumpul yang terletak di Kawasan Banyumas Utara.

Strategi pengembangan destinasi wisata unggulan prioritas dengan pendekatan konektivitas yang berupa: a. Kawasan Banyumas Selatan: pengembangan 2 jalur wisata yaitu Kota Lama-Curug Song-Bukit Cikawak dan Kota Lama-Curug Gemawang-Bukit Pangonan-Wisata Sentana-Bukit Mahameru b. Kawasan Banyumas Timur: pengembangan jalur Hutan Wisata Limpakuwus-Embung Siton-Lorong Blothong c. Kawasan Banyumas Tengah: pengembangan jalur Taman Bale Kemambang-Wisata Edukasi SMKN 3-Tugu Gada Rujak Polo-Embung Bersole d. Kawasan Banyumas Barat: jalur Curug Wanasuta-Kawasan Gua Alam Darmakradenan-Pesona Desa Cikakak-Wisata Pertapan Gerduren e. Kawasan Banyumas Utara: pengembangan jalur wisata Watu Kumpul-Germanggis-Makam Syekh Makhdum Wali-Wisata Air Watu Tumpang. Strategi yang terperinci untuk pengembangan destinasi wisata unggulan dan prioritas membutuhkan kajian yang terpisah-pisah untuk setiap kawasan mengingat perbedaan permasalahan pengembangan pariwisata yang ada di setiap kawasan.

Kajian Pengembangan Kota Lama Banyumas dilatarbelakangi potensi wisata sejarah dan budaya di Kawasan Kota Lama Banyumas. Sejarah dan karakter budaya Banyumas dapat dikemas menjadi daya tarik bagi wisata. Tahapan kajian pengembangan Kota Lama Banyumas meliputi inventarisasi cagar budaya beserta informasinya, penyusunan konsep restorasi dan revitalisasi cagar budaya, pembuatan infrastruktur pendukung, dan konsep pemasaran wisata Kota Lama Banyumas.

Wisatawan yang berkunjung di Kabupaten Banyumas terdiri dari wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara. Dalam kurun waktu tahun 2016-2020, jumlah wisatawan yang berkunjung ke berbagai obyek wisata di Kabupaten Banyumas menunjukkan peningkatan, dengan kunjungan obyek wisata terbanyak pada obyek wisata Baturraden.

Di tahun 2020, jumlah kunjungan wisatawan menurun drastis dikarenakan pembatasan kegiatan untuk pencegahan pandemi COVID-19 Tempat wisata di tutup pada akhir bulan Maret 2020 dan baru dibuka kembali pada awal triwulan III tahun 2020 dengan sejumlah protokol kesehatan di antaranya pembatasan jumlah pengunjung dan pembelian tiket wisata on line.

Dilihat dari lamanya waktu berkunjung, rata-rata lama tinggal wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara hanya satu hari, tidak mengalami perubahan selama kurun waktu tahun 2016-2020. Kondisi ini menunjukkan bahwa berbagai potensi pariwisata di Kabupaten Banyumas memerlukan penanganan yang lebih serius untuk dapat menambah lama tinggal wisatawan, sehingga dapat lebih lama membelanjakan uangnya di Kabupaten Banyumas.

Jumlah wisatawan, lama tinggal dan hotel dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.79
Capaian Kinerja Urusan Pariwisata di Kabupaten Banyumas
Tahun 2016-2020

No.	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020

No.	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah kunjungan wisatawan (wisatawan)	2.013.992	2.111.861	2.363.002	3.580.743	1.866.157
2.	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara (wisatawan)	2.013.544	2.111.367	2.362.794	3.580.485	1.866.083
3.	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisatawan)	448	494	208	258	74
4.	Rata-rata lama tinggal wisatawan nusantara (hari)	1	1	1	1	1
5.	Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara (hari)	1	1	1	1	1
6.	Hotel (buah) - Hotel bintang - Hotel non bintang	 10 172	 4 211	 4 211	 15 168	 16 168
7.	Persentase peningkatan promosi pariwisata	NA	NA	NA	10	0
8.	Jumlah expo dan pameran yang dilaksanakan dan pelatihan pemandu wisata	NA	NA	NA	7	1
9.	Jumlah festival yang dilaksanakan	NA	NA	NA	7	0
10.	SDM Pariwisata tersertifikasi (orang)	NA	NA	NA	36	216

Sumber: Dinporabudpar Kabupaten Banyumas, 2020

Selain beberapa indikator kinerja tersebut, indikator kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD juga sangat penting dalam memberikan kontribusi terhadap kemandirian daerah. Di bawah ini ditampilkan kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD.

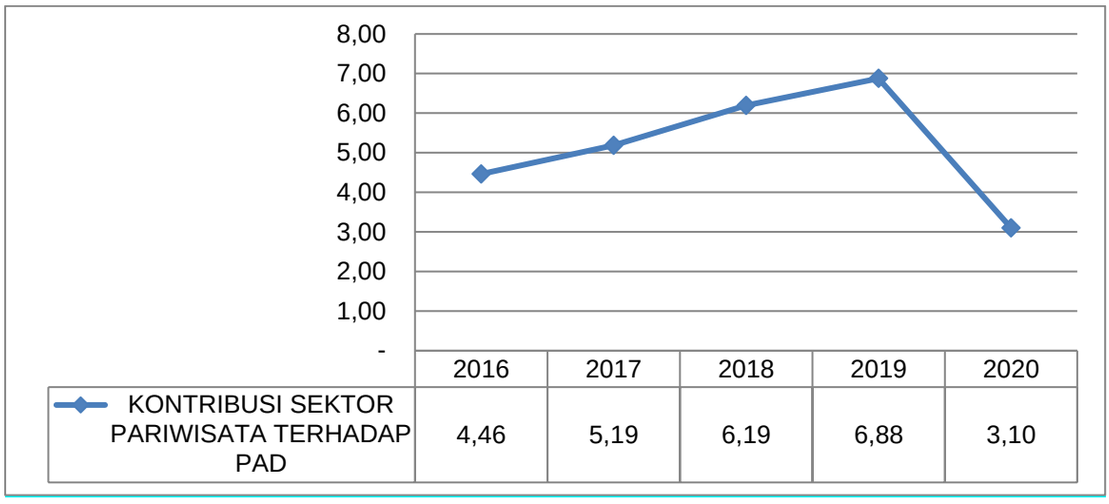

Gambar 2.43
Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD
Kabupaten Banyumas Tahun 2016 – 2020
Sumber: Dinporabudpar Kab. Banyumas, 2020

Infrastruktur pendukung seperti perhotelan sudah cukup memadai di Kabupaten Banyumas. Wisatawan tidak akan kesulitan dalam menemukan akomodasi karena beragamnya jenis hotel yang tersedia. Semua indikator pada tabel di atas menunjukkan perkembangan yang menjanjikan, kecuali indikator lama tinggal wisatawan (dalam negeri dan mancanegara) yang tidak meningkat dari

tahun ke tahun. Ada beberapa faktor yang menjelaskan fenomena tersebut. Pertama, minimnya informasi destinasi wisata di Kabupaten Banyumas, atau meskipun ada tetapi hanya sebatas memberi informasi, belum memasarkan. Kedua, belum adanya paket-paket wisata yang terintegrasi di setiap kawasan wisata, misalnya dari apa produk atau destinasi unggulannya, estimasi durasi waktu kunjungan dan perjalananya, moda transportasi yang melayani, dan sebagainya. Ketiga, masih kurangnya alternatif produk wisata jadi yang layak jual. Sejauh ini pariwisata di Kabupaten Banyumas masih bertumpu pada wisata alam. Potensi wisata lain seperti kekayaan budaya dan heritage belum tergarap maksimal.

2.3.3.3. Pertanian

Komoditi pertanian Kabupaten Banyumas meliputi padi dan bahan pangan utama lokal lainnya (jagung dan kedelai), tanaman hortikultura dan perkebunan. Produksi dan produktivitas komoditi pertanian Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut:

Tabel 2.80
Perkembangan Capaian Kinerja Bidang Urusan Pertanian
Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan (%)	NA	NA	NA	1,03	-8,90
	Produktivitas Tanaman Padi (ton/ha)	5,275	4,975	4,685	5,71	5,81
	Produktivitas jagung (ton/ha)	5.75	5,92	6,50	7,50	6,12
	Produktivitas kedelai (ton/ha)	1,35	1,53	1,34	1,28	1,25
2.	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pertanian	NA	NA	NA	1,48	-1,36
	Produksi Tanaman Padi (ton)	388.194,34	370.946,91	409.053,81	368.957,25	371.827,14
	Produksi jagung (ton)	18.422,81	25.992,20	25.397,44	33.731,73	31.784,58
	Produksi kedelai (ton)	712,43	1.562,01	3.426,95	1.262,66	298,51
3.	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura	NA	NA	NA	1,15	-18,24
4.	Produksi Hortikultura:					
	Durian (ton)	3.094,8	5.286,9	12.751,4	15.559,6	6.159,18
	Pisang (ton)	28.021,3	27.447,3	27.749,5	30.781,4	31.375,6
	Cabe Merah (ton)	4.632	1.568,9	1.724,9	1.376,2	2.000
4.	Produksi Tanaman Perkebunan :					
	Cengkeh (ton)	304,28	310,41	484,16	495,36	523,02
	Kelapa Dalam (ton)	12.727,41	13.283,89	13.905,12	14.108.96	14.330,93
	Kelapa Deres (ton)	43.938,68	54.730,5	53.408,86	54.985,38	55.884,43
	Tembakau (ton)				79,16	77,26
	Pala				52,18	54,45
	Lada				79,21	90,22
	Kopi				196,16	183,04

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
	Cakupan bina kelompok tani (%)	54,58	74,00	38,55	76.05	80,00

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Banyumas 2020

Komoditas peternakan utama di Kabupaten Banyumas meliputi sapi potong, sapi perah, kerbau, kambing dan domba, selama kurun waktu tahun 2016-2020 mengalami perkembangan fluktuatif dimana untuk populasi ayam ras petelur merupakan populasi yang mengalami kenaikan tertinggi kurun waktu 2020 sebesar 83.992 ekor jika dibandingkan tahun 2019. Perkembangan populasi ternak, produksi hasil ternak, angka kesakitan dan kematian ternak di Kabupaten Banyumas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.81
Populasi Ternak, Produksi Hasil Ternak, Angka Kesakitan dan Kematian Ternak Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2020

No.	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Populasi Produksi komoditas Peternakan Utama (ekor)					
	Sapi Potong	12.805	13.460	14.350	14.461	15.253
	Sapi Perah	3.172	2.366	2.279	2.287	2.427
	Kerbau	1.260	1.248	1.279	1.295	1.334
	Kambing	227.124	161.282	165.646	166.101	175.835
	Domba	22.213	13.234	15.190	17.097	17.269
	Ayam Ras Petelur	1.577.825	1.413.592	1.396.358	1.399.852	1.483.844
	Ayam Ras Pedaging	10.054.844	7.868.549	8.208.000	11.741.324	11.706.950
	Ayam Buras / Kampung	1.320.970	1.545.064	1.053.940	1.071.354	1.189.202
	Itik	186.357	249.385	142.061	145.135	150.940
2.	Produksi Daging (ton)	19.255,100	19.471,48	19.994,06	22.405,297	21.786.989
	Sapi	3.739,1	2.891,818	3.064,99	2.674.440	1.699.930
	Kerbau	4,3	2,710	-	-	-
	Kambing	1.733,2	1.379,288	1.127,06	813.362	556.092
	Domba	103,2	103,013	91,68	852.872	74.955
	Babi	87,8	86,064	72,27	11.880	45.210
	Ayam Buras / Kampung	1.525,7	1.189,699	1.127,62	3.141.234	700.789
	Ayam Pedaging	11.754,6	13.407,404	14.144,51	14.025.377	18.189.697
	Itik	307,2	411,485	365,93	64.840	130.592
	Kelinci	-	-	-	197.346	22.989
	Burung Puyuh	-	-	-	13.567	23.023
	Angsa	-	-	-	-	4.390
	Entog	-	-	-	584.773	330.738
	Merpati	-	-	-	25.516	8.585
3.	Produksi Susu (liter):	5.272.222	5.594.690	3.628.600	3.710.518	3.898.029
	Sapi Perah	5.192.222	5.520.183	3.572.900	3.658.567	3.862.424
	Kambing	80.000	74.507	55.700	51.951	35.605
4.	Produksi Telur (ton)	17.764,600	16.910,415	16.126,93	17.917,31	18.095,95
	Ayam Ras	15.286,8	13.725,655	13.558,52	15.265,76	16.217,61
	Ayam Buras	777,3	909,100	777,68	576,28	685,22
	Itik	1.700,5	2.275,5	1.790,73	1.443,78	997,45
	Burung Puyuh	-	-	-	294,99	108,13
	Entog	-	-	-	336,50	87,52
5.	Angka Kesakitan Ternak (Morbiditas) (%)					
	Ternak Besar (%)	14,52	14,50	14,07	14,06	14.06
	Ternak Kecil (%)	1,43	1,41	1,41	1,41	1.40

No.	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
	Ternak Unggas (%)	0,53	0,51	0,5	0,5	0.49
6.	Angka Kematian Ternak (Mortalitas) (%)					
	Ternak besar (%)	2,1	2,0	1,9	1,9	1.80
	Ternak Kecil (%)	4,5	4,3	4,2	4,2	4.10
	Ternak Unggas (%)	0,25	0,23	0,22	0,22	0.22

Sumber: Dinkannak Kabupaten Banyumas, 2020

Di dalam urusan pemerintahan bidang Pertanian, terdapat sub urusan Kesehatan Hewan dan Masarakat Veteriner yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas. Beberapa kinerjanya adalah sebagai berikut:

Pemotongan Ternak di Rumah Potong Hewan (RPH)

Pemotongan hewan ternak mempunyai risiko penyebaran dan/atau penularan penyakit hewan menular termasuk penyakit zoonotik dan/atau penyakit yang ditularkan melalui daging yang mengancam dapat kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan. Untuk menjamin pangan asal hewan khususnya karkas, daging, dan jeroan ternak yang aman, sehat, utuh dan halal diperlukan Rumah Potong Hewan yang memenuhi persyaratan. RPH merupakan unit pelayanan masyarakat dalam penyediaan daging yang aman, sehat, utuh, dan halal, serta berfungsi sebagai sarana untuk melaksanakan: 1) pemotongan hewan secara benar, (sesuai dengan persyaratan kesehatan masyarakat veteriner, kesejahteraan hewan dan syariah agama); 2) b.pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong (ante-mortem inspection) dan pemeriksaan karkas, dan jeroan (post-mortem inspection) untuk mencegah penularan penyakit *zoonotik* ke manusia; dan 3) pemantauan dan surveilans penyakit hewan dan *zoonosis* yang ditemukan pada pemeriksaan *ante-mortem* dan pemeriksaan *post-mortem* guna pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit hewan menular dan zoonosis di daerah asal hewan.

Kabupaten Banyumas telah memiliki beberapa unit RPH yang tersebar di beberapa wilayah kecamatan. Untuk RPH Kembaran dan Purwokerto Timur sudah tidak beroperasi lagi dan digabung menjadi RPH Tambaksari. RPH Banyumas tutup dan menjadi PUSKESWAN. RPH Purwokerto Barat tutup tahun 2020, sehingga RPH yang beroperasi di Banyumas hanya ada 6 RPH. Jumlah pemotongan hewan di RPH adalah sebagai berikut:

Tabel 2.82
Jumlah Pemotongan Hewan di RPH Tahun 2016-2020

NO	RPH	PEMOTONGAN (ekor)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Cilongok	1.496	1.739	1.766	1.980	12
2	Ajibarang	2.771	2.578	2.588	2.319	709
3	Sumpiuh	1.312	1.752	1.961	1.918	7
4	Sokaraja	4.734	5.194	4.362	3.431	413
5	Wangon	4.347	4.412	4.063	1.852	268
6	Tambaksari	-	-	3.198	2.975	2.384
7	Banyumas	114	-	-	-	-
8	Kembaran	90	4.561	-	-	-
9	Purwokerto Timur	5.434	-	-	-	-
10	Purwokerto Barat	2.084	2.087	1.830	292	-
	JUMLAH	22.382	22.323	19.768	14.767	3.793

Dinkanak Kabupaten Banyumas, 2020

Jumlah pemotongan hewan ternak dari tahun 2016 sampai tahun 2020 mengalami penurunan. Untuk tahun 2020 jumlahnya sebesar 3.793 ekor dikarenakan pandemi COVID-19 yang menyebabkan daya beli masyarakat menurun sehingga permintaan terhadap daging menurun.

Pelayanan Kesehatan Hewan di Puskeswan

Dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan dan kesehatan melalui status kesehatan hewan nasional untuk mencapai kondisi kesehatan, produksi dan produktivitas hewan dapat meningkat secara optimal telah dibentuk Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan). Puskeswan merupakan unit pelaksana teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dinas (UPTD) pada Dinas Perikanan dan Peternakan dalam kewenangan penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular di lingkungan pemerintah Kabupaten Banyumas. UPTD Puskeswan mempunyai tugas berupa: a) pelaksanaan penyehatan hewan; b) pemberian pelayanan kesehatan masyarakat veteriner; c) pelaksanaan epidemiologik; d) pelaksanaan informasi veteriner dan kesiagaan darurat wabah; e) pemberian pelayanan jasa veteriner.

Untuk kasus penyakit hewan yang ditangani UPTD Puskeswan Kabupaten Banyumas tahun 2019-2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.83
Penanganan Penyakit Hewan

Tahun	Kasus Penyakit Hewan yang ditangani		
	Sapi	Kambing/Domba	Jumlah
2019	5.458	2.770	8.228
2020	4.241	2.071	6.312
JUMLAH	9.699	4.841	14.540

Dinkanak Kabupaten Banyumas, 2020

Produksi Benih di Balai Pengembangan Budidaya Air Tawar (BPBAT)

Balai Pengembangan Budidaya Air Tawar merupakan unsur pelaksana teknis Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas. tugas BPBAT meliputi: a) penyediaan benih dan calon induk yang sesuai dengan Standar Nasional Indonesia; b) percepatan pengembangan teknologi pembudidayaan ikan; c) pembudidayaan ikan guna penyediaan benih dan calon induk; d) pemberian edukasi teknis pembudidayaan ikan

Sesuai tugas tersebut BPBAT memberikan pelayan publik berupa pelayanan penjualan hasil produksi benih dan calon induk ikan air tawar, pelayanan tekhnologi perikanan, magang mahasiswa, prakerin siswa SMU, pelayanan edukasi bagi anak PAUD, TK, hingga SD dan SMP.

Komoditas yang dihasilakan BPBAT adalah benih dan calon induk ikan gurami, nilem, nila, tawes, mas, dan ikan koi, dengan jumlah produksi sebagai berikut:

Tabel 2.84
Produksi Benih Ikan BPBAT Kabupaten Banyumas

	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Produksi Benih (ekor)	5.795.130	5.047.902	4.875.508	6.224.300	6.986.800

Sumber: Dinkannak Kabupaten Banyumas, 2020

2.3.3.4. Perdagangan

Sektor perdagangan memiliki fungsi strategis dalam perekonomian daerah, merupakan salah satu penyumbang terbesar PDB Kabupaten Banyumas, terutama dari pengembangan perdagangan lokal dan regional, perdagangan skala kecil dan menengah. Kegiatan perdagangan di Kabupaten Banyumas telah dapat meningkatkan aktivitas roda perekonomian daerah. Di bawah ini, merupakan gambar dari kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Banyumas yang sangat berfluktuatif. Dan merupakan sektor kedua terbesar dalam kontribusinya terhadap PDRB Banyumas setelah sektor industri pengolahan. Sehingga diharapkan sektor perdagangan ini setiap tahunnya tetap memberikan kontribusi yang besar.

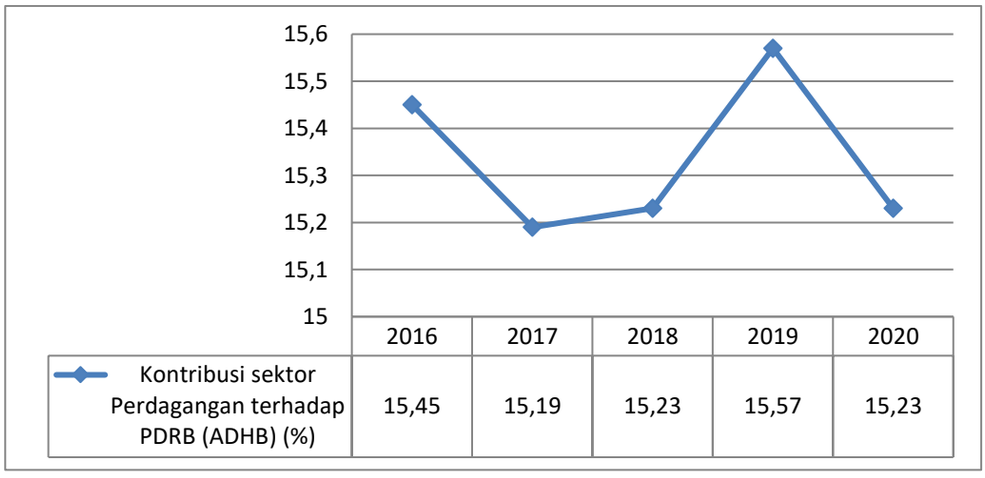

Gambar 2.44
Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB Kabupaten Banyumas
Sumber: BPS Kabupaten Banyumas, 2020

Nilai ekspor komoditas utama di Kabupaten Banyumas selama kurun waktu 2016-2020 menunjukkan perkembangan yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat. Dimana komoditas utama ekspor gula kelapa merupakan indikator hasta krida Bupati dengan target tahun 2021 sebanyak 13.000 ton, tahun 2022 sebanyak 14.000 ton, target 2023 sebanyak 15.000 ton dan target akhir RPJMD sebanyak 30.000 ton. Adapun komoditi gambaran nilai dan volume ekspor komoditi utama Kabupaten Banyumas yaitu kayu olahan, minyak atsiri dan gula kelapa kristal dapat dilihat pada grafik berikut:

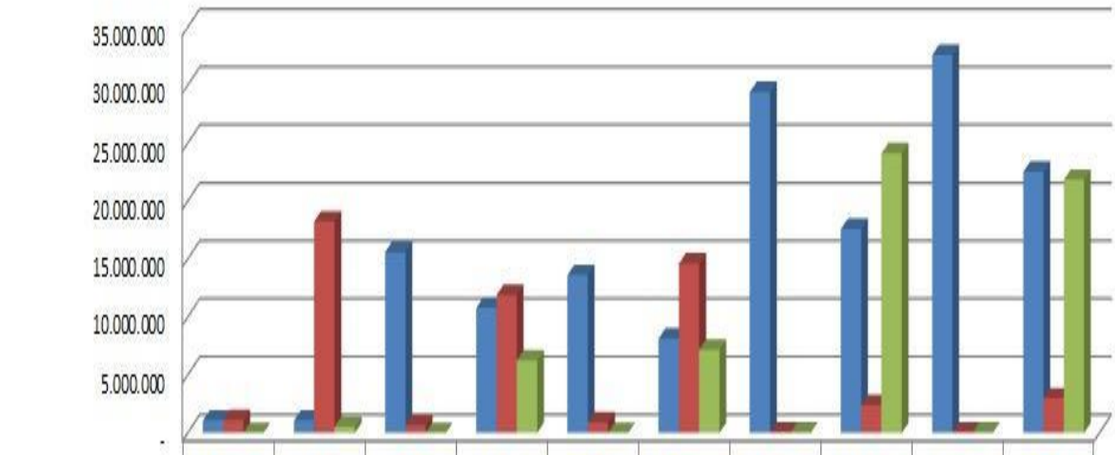

	2016		2017		2018		2019		2020	
	Volume	Nilai (US Dollar)	Volume	Nilai (US Dollar)	Volume	Nilai (US Dollar)	Volume	Nilai (US Dollar)	Volume	Nilai (US Dollar)
Kayu Olahan (m3)	1.078.119	1.076.487	15.618.474	10.790.849	13.615.404	8.152.290	29.406.775	17.607.450	32.596.539	22.521.044
Minyak Atsiri (kg)	1.108.160	18.241.760	655.677	11.900.201	882.290	14.612.565	55.000	2.392.399	48.970	2.987.904
Gula Kelapa Kristal (ton)	492	512.558	6.000	6.256.517	7.200	7.174.377	10.047	24.112.800	12.234	21.846.112

Gambar 2.45
Nilai dan Volume Ekspor Komoditas Utama Menurut Komoditas Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2020
Sumber: BPS Kabupaten Banyumas, 2020

Sarana dan prasarana perdagangan, terutama pasar modern dan pasar tradisional di Kabupaten Banyumas selama kurun waktu 2016-2020 menunjukkan peningkatan. Perkembangan ini memberikan implikasi pada meningkatnya kegiatan perekonomian daerah, terutama digerakan oleh meningkatnya kebutuhan barang dan jasa dalam masyarakat. Perkembangan sarana prasarana Perdagangan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.85
Capaian Kinerja Bidang Perdagangan di Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2020

No.	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah pasar modern (minimarket/ supermarket/ swalayan) (unit)	99	99	101	101	101
2	Jumlah pasar tradisional (unit)	26	26	25	25	26
3	Cakupan Bina Kelompok Pedagang	140	1.118	718	70	96

Sumber: Dinperindag Kabupaten Banyumas, 2020.

. Jumlah pasar tradisional yang dikelola Pemerintah Kabupaten Banyumas sampai dengan tahun 2020 sebanyak 26 unit meningkat 1 pasar yaitu pasar Proliman yang tadinya berstatus pasar desa menjadi pasar yang dikelola Pemerintah Daerah. Pasar tradisional dibangun dalam rangka menampung perdagangan eceran dan melayani kebutuhan masyarakat sehari-hari, untuk itu perlu mendapatkan fasilitasi pengembangan dari Pemerintah Kabupaten Banyumas.

Jumlah pasar modern di Kabupaten Banyumas mengalami peningkatan dari 99 unit tahun 2016 menjadi 101 unit pada tahun 2020 dan 2 pusat perbelanjaan yang terdapat di Purwokerto Selatan dan Purwokerto Timur. Untuk pasar modern tersebut tersebar di pusat-pusat perkembangan perekonomian dan sepanjang jalur utama perekonomian daerah.

Cakupan bina kelompok pedagang mengalami perkembangan yang fluktuatif. Tahun 2016 sebanyak 140 kelompok sedangkan di tahun 2020 sebesar 96 kelompok atau meningkat 26 kelompok jika dibandingkan dengan tahn 2019.

2.3.3.5. Perindustrian

Berkembangnya industri memiliki peran yang sangat strategis dalam pembangunan daerah, terutama terkait dengan penanaman modal, penggunan bahan baku lokal, penyerapan tenaga kerja dan daya ungkit perkembangannya bagi sektor-sektor perekonomian lainnya.

Pertumbuhan industri di Kabupaten Banyumas relatif cukup baik terutama industri menengah dan industri kecil dan mikro. Iklim usaha di Kabupaten Banyumas yang semakin membaik mendorong tumbuhnya industri. Pertumbuhan industri juga berdampak pada peningkatan penyerapan tenaga kerja. Peningkatan jumlah industri di Banyumas tahun 2020 hanya terdapat pada industri kecil seperti yang terlihat pada Tabel 2.85 di bawah ini. Dengan pertumbuhan industri di tahun 2020 hanya sebesar 0,03% atau mengalami penurunan pertumbuhan jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang diakibatkan oleh Pandemi COVID-19. Gambaran perkembangan industri dan tingkat penyerapan tenaga kerja terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.86
Perkembangan Capaian Kinerja Bidang Perindustrian
Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2020

No.	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Unit Industri	42.320	42.530	43.182	43.910	43.921
a.	Industri besar (unit)	6	6	6	6	6
b.	Industri menengah (unit)	77	77	77	77	77
c.	Industri kecil (unit)	42.237	42.447	43.099	43.827	43.839
d.	Industri mikro (non formal) (unit)	-	-	-	-	
2.	Jumlah tenaga kerja yang terserap pada unit industri					
a.	Industri besar (orang)	1.275	1.275	1.275	1.275	1.275
b.	Industri menengah (orang)	5.949	5.949	5.949	5.949	5.949
c.	Industri kecil (orang)	92.500	97.065	97.065	98.080	98.251
3.	Pertumbuhan Industri	0,37	0,50	1,53	1,69	1,73
4.	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	745	820	699	70	153

Sumber: Dinperindag Kabupaten Banyumas, 2020

2.3.3.6. Transmigrasi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pembagian kewenangan urusan pemerintahan bidang transmigrasi ditujukan bagi kabupaten tujuan transmigrasi.

Kabupaten Banyumas sebagai daerah pengirim hanya memfasilitasi pelayanan transmigrasi untuk masyarakat yang berminat mengikuti transmigrasi. Tugas ini dilaksanakan oleh Bidang Pelatihan, Penempatan, Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi, khususnya Seksi Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Banyumas. Pelayanan transmigrasi meliputi: pendaftaran dan seleksi calon transmigran, identifikasi dan legitimasi calon transmigran, publikasi calon transmigran, pemberangkatan calon transmigran, dan penyuluhan dan sosialisasi program transmigrasi.

2.3.4. Fokus Layanan Pendukung

2.3.4.1. Fungsi Administrasi Pemerintahan

Capaian pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas diukur dengan indek reformasi birokrasi oleh KemenPan RB, terhadap dua komponen pelaksanaan reformasi birokrasi, yaitu:

Komponen Pengungkit, terdiri dari: Manajemen Perubahan, Penataan Peraturan Perundang-undangan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan tata laksana, Penataan sistem manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan dan Peningkatan Kualitas pelayanan Publik.

Komponen Hasil, terdiri dari: Nilai Akuntabilitas Kinerja, Survey Internal Integritas Organisasi, Survey Eksternal Persepsi Korupsi, Opini BPK, Survey Eksternal Pelayanan Publik.

Nilai Indek Reformasi Birokrasi Kabupaten Banyumas tahun 2020 menunjukan hasil baik atau “B”, dengan nilai 69,07. Namun demikian masih ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam upaya meningkatkan kualitas dan penataan birokrasi serta mampu lebih menumbuhkan budaya kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas, antara lain:

- Penyusunan Road map reformasi birokrasi agar diselaraskan dengan dokumen Road Map Reformasi Birokrasi Nasional tahun 2020-2025;
- Mengoptimalkan fungsi Tim Reformasi Birokrasi melalui pertemuan secara berkala membahas kemajuan reformasi birokrasi, serta mengkomunikasikan dan memastikan penerapannya sampai ke OPD;
- Menyusun rencana aksi reformasi birokrasi yang menjawab isu-isu strategis terkait masalah reformasi birokrasi tingkat OPD;
- Mengoptimalkan implementasi penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB) dengan melakukan secara berkala untuk menilai perkembangan reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- Meningkatkan pengetahuan terhadap assessor PMPRB Pemerintah Kabupaten Banyumas tentanng kondisi ideal yang diharapkan pada masing-masing area perubahan;
- Mewujudkan budaya kerja positif dengan menugaskan agen perubahan dengan target-target perubahan nyata pada masing-masing unit kerja, serta melakukan monitoring dan evaluasi berkala atas keberhasilan agen perubahan;
- Meningkatkan internalisasi budaya kerja dan perubahan mindset terhadap para pejabat dan pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;

- Melakukan identifikasi dan harmonisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis secara keseluruhan serta melakukan evaluasi atas pelaksanaan system pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan secara berkala.

Tabel 2.87
Kinerja Administrasi Pemerintahan Kabupaten Banyumas
Tahun 2016-2020

No.	Bidang Urusan/Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Cakupan fasilitasi marbot dan petugas tempat ibadah lainnya	NA	NA	NA	0	0
2.	Indek Reformasi Birokrasi	-	63,79	66,68	68,76	69,07
3.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	53,65	60,22	70,95	73,84	74,96
4.	Nilai Evaluasi LKJIP Sekretariat Daerah	53,65	60,22	70,95	73,84	74,96

2.3.4.2. Fungsi Kesekretariatan DPRD

Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas merupakan organisasi perangkat daerah yang menunjang/memberikan fasilitasi kepada anggota DPRD Kabupaten Banyumas.

Sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Kepala Daerah. Sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama dengan Pemerintah Daerah DIY berkewajiban mengatur dan mengelola urusan pemerintahan untuk melaksanakan pembangunan secara menyeluruh.

Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 50 Tahun 2018 mempunyai tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Peran Sekretariat DPRD menjadi strategis untuk menjembatani komunikasi yang harmonis antara Eksekutif dan Legislatif dalam membuat kebijakan daerah dan penyusunan produk hukum daerah guna menunjang program-program pembangunan daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan Permendagri nomor 86 tahun 2017, ada tiga indikator kinerja Sekretariat DPRD, yaitu: tersedianya RKT pada setiap Alat Kelengkapan DPRD, tersusun dan terintegrasinya program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam dokumen rencana lima tahunan (RPJM) maupun dokumen rencana tahunan (RKPD), dan terintegrasinya program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda, dan anggaran ke dalam dokumen perencanaan dan dokumen anggaran Setwan DPRD.

Penyusunan RKT oleh Sekretariat harus melibatkan Alat Kelengkapan DPRD. Selanjutnya untuk program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam dokumen rencana lima tahunan (RPJM) maupun dokumen rencana tahunan (RKPD) sudah tersusun dan terintegrasi.

Secara rinci kinerja di kesekretariatan DPRD dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.88
Kinerja Kesekretariatan DPRD Kabupaten Banyumas
Tahun 2016-2020

No.	Bidang Urusan/Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Indeks Kepuasan DPRD	NA	NA	NA	98	100
2.	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-Alat Kelengkapan DPRD	NA	NA	NA	5	5
3.	Persentase berita positif kegiatan DPRD di media informasi	NA	NA	NA	100	100
4.	Persentase materi bintek yang diaplikasikan dalam tusi anggota dewan	NA	NA	NA	100	100

Sumber: Sekretariat DPRD Kab. Banyumas, 2020

2.3.4.3. Fungsi Pengawasan

Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggara pemerintah daerah. Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa. Inspektorat Kabupaten Banyumas dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas dan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas.

Jumlah temuan pengawasan terus mengalami penurunan dari tahun 2016 sebanyak 562 menjadi 282 pada tahun 2020. Dari 282 temuan tersebut 128 temuan pengawasan telah selesai ditindaklanjuti, dan 32 temuan pengawasan dalam proses tindak lanjut, 122 jumlah

temuan pengawasan belum di tindaklanjuti. Jumlah pengaduan masyarakat terkait pengawasan pada tahun 2020 sebanyak 6 kasus, dan kesemuanya telah ditindaklanjuti. Secara rinci kinerja di bidang pengawasan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.89
Kinerja Pengawasan Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2020

No.	Bidang Urusan/Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah temuan pengawasan (temuan)	562	777	507	485	282
2.	Jumlah temuan pengawasan yang telah selesai ditindaklanjuti (temuan)	476	639	385	220	128
3.	Jumlah temuan pengawasan yang dalam proses tindak lanjut (temuan)	86	73	29	25	32
4.	Jumlah temuan pengawasan belum ditindaklanjuti (temuan)	0	65	93	240	122
5.	Jumlah rekomendasi	562	777	507	485	282
6.	Jumlah rekomendasi selesai ditindaklanjuti	476	306	385	220	128
7.	Jumlah rekomendasi dalam proses tindaklanjut	86	88	29	25	32
8.	Jumlah rekomendasi belum ditindaklanjuti	0	0	93	240	122
9.	Jumlah pengaduan masyarakat (kasus)	5	9	8	9	6
10.	Jumlah pengaduan masyarakat yang telah ditindaklanjuti (kasus)	5	9	8	9	6
11	Level kapabilitas APIP	NA	2	2	3	3
12	Nilai Maturitas SPIP	NA	3	3	3	3,075

Sumber: Inspektorat Kabupaten Banyumas, 2020

2.3.5.Penunjang Urusan Pemerintahan

2.3.5.1. Keuangan

Pemerintah Kabupaten Banyumas sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Opini WTP yang dimaksud adalah bahwa laporan keuangan telah memberikan informasi yang bebas dari salah saji material, selain itu juga pemerintah Kabupaten Banyumas dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik. Opini tersebut menunjukan kinerja keuangan daerah Kabupaten Banyumas terus membaik.

Kontribusi PAD terhadap APBD Kabupaten Banyumas masih rendah. Pemerintah Kabupaten Banyumas kembali melakukan identifikasi potensi PAD dan menentukan target realisasinya. Dari sisi kelembagaan dibentuk Badan Pendapatan daerah Kabupaten banyumas yang ditetapkan dengan Peraturan daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas, dan Peraturan Bupati banyumas Nomor 57 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pendapatan

Daerah Kabupaten Banyumas. Dengan dibentuknya BAPENDA diharapkan dapat mengoptimalkan realisasi pendapatan daerah.

Capaian persentase Belanja Pendidikan (20%) dari tahun 2015-2019 rata-rata mencapai 37%, hal ini melebihi target Kabupaten/Nasional sebesar 20%. Namun bila dilihat alokasi per tahunnya dalam kurun waktu tersebut persentase belanja pendidikan mengalami penurunan. Persentase Belanja Kesehatan (10%) dari tahun 2015-2019 juga melebihi target sebesar 10%, rata-rata belanja kesehatan Kabupaten Banyumas tahun 2015-2019 adalah sekitar 17%.

Proporsi belanja tidak langsung Pemerintah Kabupaten Banyumas dari tahun 2015-2019 rata-rata lebih dari 60%. Belanja tidak langsung yang terlalu besar berarti belanja pembangunan yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat semakin kecil. Meskipun dalam belanja tidak langsung terdapat komponen belanja bantuan keuangan, hibah, dan bantuan sosial kepada masyarakat, proporsi belanja tidak langsung yang terlalu bisa menimbulkan persepsi bahwa Pemerintah Kabupaten Banyumas kurang memihak kepada masyarakatnya.

Tabel 2.90
Kinerja Fungsi Penunjang Keuangan
Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Bagi hasil kabupaten/kota dan desa	%			6.06	16	0,8
2	Kontribusi PAD terhadap APBD	%	18,16	17,64	15	19,99	20,07
3	Opini BPK status WTP terhadap laporan keuangan daerah	%	100	100	100	100	100
4	Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung		34,86% : 65,14%	27,04% : 72,96%	59,34% : 40,66%	58,04% : 41,96 %	64,01% : 35,99%
5	Persentase belanja kesehatan (10%)	%	20,09%	15,34%	20,62	16,41	16,41
6	Persentase belanja pendidikan (20%)	%	37,25%	34,18%	38,43	33,02	33,02
7	Persentase ketepatan waktu penetapan APBD	%	100	100	100	100	100
8	Persentase SILPA	%	13,43%	11,94%	10,64%	8,08%	7,86%

Sumber: Bapenda dan BKAD Kabupaten Banyumas, 2020

2.3.5.2. Perencanaan

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas melaksanakan tugas dan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan. Untuk mendukung tugas tersebut telah dikembangkan aplikasi perencanaan yang terintegrasi dengan aplikasi monitoring dan evaluasi perencanaan, penilaian SAKIP, dan penganggaran. Dengan kebijakan Pemerintah untuk penggunaan SIPD Kementrian Dalam Negeri perencanaan perlu melakukan banyak penyesuaian dengan berbagai perubahan kebijakan yang terjadi.

Perkembangan kinerja selama 5 tahun sebagai data dukung bidang perencanaan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.91
Kinerja Fungsi Penunjang Perencanaan
Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA	1	1	1	1	1
Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA	1	1	1	1	1
Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERBUP	1	1	1	1	1
Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	86,70	81,38	100	97,47	99,52
Kesesuaian program antar dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran perangkat daerah	NA	NA	NA	100	100
Persentase kesesuaian capaian kinerja OPD terhadap RPJMD	NA	NA	NA	40,79	44,03
Persentase kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	NA	NA	NA	100	100
Persentase terpenuhinya aspek kualitas perencanaan	NA	NA	NA	87,5	91,67

Sumber: Bappedalitbang Kabupaten Banyumas, 2020

Kinerja fungsi penunjang perencanaan Kabupaten Banyumas Tahun 2015–2019 telah melaksanakan amanat perencanaan dengan tersususnnya dokumen Perda RPJPD, RPJMD, Perbub RKPD dan Penjabaran Program RKPD ke dalam RKPD sebagai bahan penyusunan perencanaan pembangunan Kabupaten. Banyumas.

2.3.5.3. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan meliputi pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian aparatur sipil negara (ASN), mutasi dan promosi ASN, pengembangan kompetensi ASN, serta penilaian dan evaluasi kinerja aparatur.

Aparatur sipil negara merupakan aset bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Banyumas. Berdasarkan tingkat pendidikan lebih dari 60% ASN di Kabupaten Banyumas telah memiliki jenjang pendidikan D IV, S1, S2, dan S3. Jumlah ASN Kabupaten Banyumas menurut tingkat pendidikan dapat dilihat pada grafik berikut:

Tabel 2.92
Jumlah ASN menurut Tingkat Pendidikan Kabupaten Banyumas
Tahun 2020

Jenjang pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Proporsi (%)
SD	196	7	203	1,72
SLTP	329	29	358	3,03
SLTA	1.063	452	1.515	12,83
D.I	11	13	24	0,20
D.II	70	46	116	0,98
D.III	303	1.009	1.312	11,11
Sarmud	3	2	5	0,04
D.IV	47	132	179	1,52

S-1	2.927	4.660	7.587	64,25
S-2	335	171	506	4,28
S-3	3	1	4	0,03
Jumlah	5.287	6.522	11.809	100,00

Sumber: BKDD Kabupaten Banyumas, 2020

Pada tahun 2020 aparatur sipil negara di Kabupaten Banyumas dengan tingkat pendidikan S1 merupakan jumlah terbanyak yaitu 7.587 orang (64,25%). Urutan kedua adalah ASN dengan tingkat pendidikan SMA sebanyak 1.515 orang (12,83%), dan urutan ke tiga adalah ASN dengan tingkat pendidikan D.III sebanyak 1.312 orang (11,11%).

Berdasarkan golongan kepangkatan ASN Kabupaten Banyumas selalu mengalami perubahan dikarenakan karena kenaikan pangkat regular, pilihan atau penyesuaian pendidikan. Jumlah ASN menurut golongan di Kabupaten Banyumas tahun 2016-2020 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.93
Jumlah ASN Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2020

Jumlah PNS Daerah menurut golongan	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah PNS	14.981	13.306	12.539	12.551	11.809
Golongan I	494	403	354	333	292
Golongan II	2.608	2.567	2.240	2.186	1.999
Golongan III	6.259	5.627	5.576	6.056	5.923
Golongan IV	5.620	4.709	4.369	3.976	3.595

Sumber: BKDD Kabupaten Banyumas, 2020

Sampai tahun 2020 ASN di Kabupaten Banyumas yang paling banyak adalah golongan III sebanyak 5.923 orang (50,16%) sedangkan urutan kedua adalah golongan IV sebanyak 3.595 orang (30,44%) dan urutan ketiga adalah golongan II sebanyak 1.999 orang (16,93%) dan yang terakhir golongan I sebanyak 292 orang (2,47%).

Untuk memenuhi standar kompetensi aparatur sipil negara harus terus mengembangkan kompetensinya agar dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada negara dan masyarakat. Pendidikan dan latihan adalah upaya untuk pengembangan kompetensi sumber daya aparatur, yaitu melalui diklat pengembangan kompetensi jabatan fungsional dan struktural. ASN Kabupaten Banyumas yang telah mengikuti diklat dan lulus, serta memiliki seritifikasi kompetensi tahun 2016-2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.94
Jumlah ASN Yang Mengikuti Diklat

No.	Indikator	Capaian kinerja setiap tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	ASN yang telah mengikuti diklat	983	371	573	573	600
2.	ASN yang telah lulus diklat	983	371	572	572	600
	Jumlah ASN	15.428	14.981	13.306	12.539	12.551
	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	6,37	2,48	4,31	4,57	4,78

Sumber: BKDD Kabupaten Banyumas, 2019.

Untuk tahun 2020 tidak diselenggarakan diklat bagi ASN Kabupaten Banyumas dikarenakan kondisi Pandemi COVID -19.

Pengelolaan data kepegawaian di Kabupaten Banyumas telah menggunakan sistim informasi manajemen data kepegawai (SIMPEG). SIMPEG juga digunakan untuk pelayanan proses kepegawaian *paperless/less paper* yang akan diterapkan secara bertahap. Kinerja bidang kepegawaian lainnya bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.95
Disiplin ASN, Mutasi, Promosi, dan Keterisian SIMPEG Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Disiplin ASN	Orang	31	23	11	15	11
2	Jumlah Mutasi	Orang	5713	209	210	75	52
3	Jumlah pensiun ASN	Orang	2174	573	685	829	698
4	Jumlah Promosi Jabatan Struktural	Orang	1239	200	350	861	122
5	SIMPEG (Entry Update data Pegawai)	Orang	13.656	13.500	12.539	12.551	11.809

Sumber: BKDD Kabupaten Banyumas Tahun 2020

2.3.5.4. Penelitian dan Pengembangan

Penelitian dan Pengembangan

Penelitian dan Pengembangan di Kabupaten Banyumas menunjukan kinerja yang baik. Indikator yaitu Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan telah tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam RKPD maupun RPJMD. Tahun 2020 disusun Rencana Induk Kelitbangan (RIK) untuk meningkatkan penelitian dan pengembangan serta pemanfaatannya di Kabupaten Banyumas. Selanjutnya RIK akan diintegrasikan dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023.

Pelayanan Izin Penelitian

Sebagai bentuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian dan pengembangan di lingkup Pemerintah Kabupaten Banyumas, Bappedalitbang Kabupaten Banyumas melaksanakan pelayanan izin penelitian. Proses izin penelitian ini dimulai dengan proses pernohonan rekomendasi penelitian kepada Kepala Kantor Kesbangpol Kabupaten Banyumas, untuk selanjutnya rekomendasi tersebut sebagai bahan pertimbangan Bappedalitbang dalam menerbitkan izin penelitian.

Selanjutnya mulai Tahun 2019, pelayanan izin penelitian dilaksanakan oleh Mall Pelayanan Publik (MPP) di bawah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DMPPPTSP) Kabupaten Banyumas, berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik dan Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas No. 503/0010/2019 tanggal 3 Januari 2019 Perihal Pemberitahuan Pelayanan Publik di Mal Pelayanan Publik.

Kreativitas dan Inovasi Masyarakat (KRENOVA)

Salah satu tugas dan fungsi pemerintah adalah pelayanan penelitian dan pengembangan daerah yaitu pelayanan penelitian dan pengembangan karya cipta krenova agar kreativitas dan inovasi masyarakat dapat dimanfaatkan secara ekonomi dan sosial. Lomba Krenova merupakan bentuk apresiasi dan penghargaan Pemerintah Kabupaten Banyumas kepada para mitra dan inovator baik perorangan maupun kelompok yang secara nyata mendukung dalam memajukan produk inovasi untuk masyarakat luas. Lomba Krenova diinisiasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan telah dilaksanakan oleh seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

Beppedalitbang Kabupaten Banyumas pada Tahun 2017 telah membentuk suatu Sistem dalam bidang pelayanan litbang terpadu bernama SABERINA (Satuan Bersama Pengembangan Inovasi Daerah), yaitu adalah sistem bergeraknya seluruh lembaga/organisasi dan perorangan dalam penyelenggaraan fungsi pelayanan litbang secara terpadu untuk karya cipta krenova dalam mengakses pembiayaan, penelitian, pengembangan, dan pemanfaatannya.

Berikut data peserta dan inventarisasi hasil kreativitas dan inovasi masyarakat Kabupaten Banyumas Lomba Krenova:

Tabel 2.96
Jumlah Peserta Lomba Krenova Kabupaten Banyumas Tahun 2015-2019

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Peserta Lomba Krenova (inovasi)	128	28	53	58	64

Sumber: Bappedalitbang Kabupaten Banyumas, 2020

Tabel 2.97
Kondisi Perkembangan Hasil Karya Cipta Kreativitas dan Inovasi Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2019

No.	Inovasi	Penjelasan Pemanfaatan	Tahun Krenova
1	Pompa Hidram	Dimanfaatkan masyarakat Desa Kotayasa untuk memenuhi kebutuhan airnya	2012
2	Bel Otomatis Sekolah	Dimanfaatkan oleh banyak sekolah di Kabupaten Banyumas maupun diluar Kabupaten Banyumas	2013
3	All About Hydrogen	Dimanfaatkan di beberapa bengkel di Purwokerto	2016
4	Alusi	Diamnfaatkan dalam pembangunan perumahan di Kecamatan Patikraja	2016
5	Ezycon	Diamnfaatkan dalam pembangunan perumahan di Kecamatan Patikraja	2017
6	Srayer aspalt	Telah digunakan oleh sebagian besar pelaksana pembangunan jalan di Kabupaten Banyumas	2017
7	Batik Kluwung Sumunar	Telah dilakukan penjualan melalui galeri batik di SMA Sokaraja	2017
8	Magic Starter	Sedang dalam uji coba untuk diterapkan pada motor produksi China oleh Djoko Motor Purwokerto	2017
9	Avipodes	Dimanfaatkan untuk pembuatan profil Desa, seperti di Desa Kalisari Cilongok	2017
10	Clay Tepung	Melaksanakan pelatihan di berbagai organisasi	2017
11	Sulam Ngapak	Sudah mencapai ekspor	2019
12	Pemanfaatan Limbah	Penjualan lokal di Sekitar Lumbir	2019

No.	Inovasi	Penjelasan Pemanfaatan	Tahun Krenova
	Kayu		
13	Mesin Uap/Boiler	Dimanfaatkan untuk pembuatan Cincau hitam, nata de coco, dan olahan lainnya di Banyumas	2019
14	Subur/Pupuk Organik dari sampah	Penjualan Lokal di sekitar Tambak	2019
15	ASR	Telah terjual di bahkan sampai ke Kalimantan	2019
16	Kopi KJN	Penjualan Lokal di sekitar Wangon	2019
17	EGROTEK	Penjualan Lokal di sekitar Purwokerto	2019

Sumber: Bappedalitbang Kabupaten Banyumas, 2019

2.3.6. Fungsi Pemerintahan Umum

Pelaksanaan urusan pemerintahan umum sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah adalah meliputi:

a. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
c. Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas kemanan lokal, regional, dan nasional;
d. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
e. Koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
g. Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.

Kinerja pada pelaksanaan urusan Pemerintahan Umum Kabupaten Banyumas pada jumlah unjuk rasa sampai dengan tahun 2020 sebanyak 24 kali menurun dari tahun 2019 berjumlah 47 kali. Prosentase Pemilih yang menyalurkan suaranya pada pemilu pada tahun 2019 sebesar 78,8% dimana seharusnya prosentase tersebut 100% dimana Jumlah Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilu (orang) sama Jumlahnya dengan jumlah pemilih yang menyalurkan hak suaranya pada pemilu (100%) Presentase LSM, Ormas dan Forum lainnya yang berperan aktif dalam kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan cukup tinggi sampai dengan 2020 sebesar 87,8%.

Tabel 2.98
Kinerja Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum
Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2020

No.	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah unjuk rasa (kali)	54	47	47	47	24
2	Jumlah Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilu	Tidak ada pemilu	Tidak ada pemilu	1.350.981	1.373.769	Tidak ada Pemilu

No.	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
	(orang)					
3.	Jumlah pemilih yang menyalurkan hak suaranya pada pemilu.	Tidak ada pemilu	Tidak ada pemilu	1.086.983	1.082.627	Tidak ada Pemilu
4.	Prosentase Pemilih yang menyalurkan suaranya pada pemilu	Tidak ada pemilu	Tidak ada pemilu	74,74	78,8	Tidak ada pemilu
5.	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	2	2	2	2	2
6.	Kegiatan pembinaan politik daerah	7	7	7	7	7
7.	Jumlah LSM Yang Aktif	114	122	134	159	180
8.	Presentase LSM, Ormas dan Forum lainnya yang berperan aktif dalam kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	84,5	82,9	84,3	86,4	87,8

2.3.7. Unsur Kewilayahan

Unsur kewilayah di Kabupaten Banyumas dengan pelaksanaan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan dilaksanakan dalam wilayah Kecamatan dengan indikator kinerja Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik. Sampai dengan tahun 2020 IKM Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Banyumas sebesar 81,46% meningkat dari tahun 2019 sebesar 74,14%.

2.4. Aspek Daya Saing Daerah

Indikator yang digunakan untuk menganalisis daya saing daerah disesuaikan dengan ketersediaan data di Kabupaten Banyumas terdiri atas pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita, pengeluaran konsumsi non pangan perkapita, angka kriminalitas, dan angka ketergantungan.

2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

2.4.1.1. Pengeluaran Konsumsi Non-Pangan Perkapita (Persentase Konsumsi RT Non-Pangan)

Pola pengeluaran merupakan salah satu variabel yang dapat digunakan untuk menilai tingkat kesejahteraan penduduk. Semakin rendah persentase pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran maka semakin baik tingkat kesejahteraan penduduk. Untuk tahun 2019 persentase pengeluaran makanan penduduk Kabupaten Banyumas lebih besar daripada pengeluaran untuk non makanan.

Rata-rata pengeluaran perkapita sebulan untuk non makanan penduduk Banyumas mengalami fluktuasi sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.99
Persentase Konsumsi RT Non-Pangan Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2017

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Konsumsi RT Non-Pangan	52,04	49,75	50.19	52.31	51,08

Sumber: BPS Kabupaten Banyumas, 2017 & 2018

2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

2.4.2.1. Infrastruktur Jalan dan Irigasi

Panjang jalan yang ada di Kabupaten Banyumas di luar jalan desa dan jalan lingkungan adalah 1.716,886 km, dengan prosentase kewenangan jalan terdiri atas jalan kewenangan Kabupaten Banyumas sebesar 87,83%, jalan kewenangan Nasional sebesar 10,24%, dan sisanya merupakan jalan kewenangan Provinsi sebesar 1,93%.

Kondisi jalan yang menjadi kewenangan Kabupaten Banyumas pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.100
Kondisi Infrastruktur Jalan di Kabupaten Banyumas Tahun 2020

Kondisi Ruas Jalan						Total Panjang (km)
Baik		Sedang		Rusak		
Km	%	Km	%	km	%	km
679,15	45,04%	348,31	23,10%	480,54	310,87%	1.508,000

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas, 2020

Kondisi jalan merupakan salah satu komponen penting untuk meningkatkan daya saing daerah. Untuk itu peningkatan kondisi jalan kabupaten terus diupayakan sejalan dengan prioritas pembangunan daerah, prioritas provinsi, dan nasional untuk memperkuat infrastruktur guna mendukung pembangunan ekonomi dan pelayanan dasar.

Berdasarkan Permen PUPR Nomor: 14/PRT/M/2015 kewenangan pengelolaan daerah irigasi Pemerintah Kabupaten Banyumas meliputi 573 daerah irigasi dengan luas areal 23.716 Ha, dan panjang jaringan 641.081 m meliputi jaringan irigasi primer dan sekunder. Jaringan irigasi tersebut sepanjang 502.016 m dengan kondisi baik, dan 139.065,5 m dengan kondisi rusak. Selengkapnya kondisi jaringan irigasi di Kabupaten Banyumas pada tahun 2019 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.101
Kondisi Infrastruktur Jaringan Irigasi di Kabupaten Banyumas Tahun 2020

Jaringan Irigasi	Kondisi Jaringan Irigasi				Total Panjang
	Baik		Rusak		
	M	%	M	%	m

Primer	285.877	74,48%	97.945	25,52%	383.822
Sekunder	218.156	84,80%	39.103	15,20%	257.259
Jumlah	504.033	78,62%	137.048	21,38%	641.081

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas, 2019

Untuk mendukung Hasta Krida Bupati Banyumas terpilih pengembangan pertanian, operasi dan pemeliharaan serta rehabilitasi, jaringan irigasi menjadi kegiatan prioritas pada tahun-tahun yang akan datang.

2.4.2.2. Infrastruktur Perhubungan

Kebutuhan terminal di Kabupaten Banyumas berdasarkan arahan pemanfaatan ruang RTRW Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031 terdiri atas 1 terminal tipe A, 2 terminal tipe B, dan 5 terminal tipe C. Infrastruktur terminal yang ada di Kabupaten Banyumas terdiri atas 1 unit Terminal Tipe A dan 2 unit Terminal Tipe C. Terminal tipe C yang merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten Banyumas ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 480/324/2016 tanggal 4 Maret 2016 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Wangon dan Terminal Penumpang Ajibarang sebagai Terminal Penumpang Tipe C.

Dalam RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2019-2023 ditargetkan penambahan 1 terminal Tipe C di Sokarja. Pembangunan terminal Tipe C tersebut untuk memberi pelayanan akses transportasi masyarakat yang ada di wilayah untuk melakukan aktivitasnya serta untuk mendukung pengembangan transportasi masal yang dikembangkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Sebagai wilayah jalur utama lintasan kereta api, yaitu lintas jalur Utara dengan jalur Selatan di wilayah Kabupaten Banyumas terdapat 1 stasiun besar yaitu Stasiun Besar Purwokerto dan beberapa dan stasiun-stasiun kecil lainnya.

Tabel 2.102
Fasilitas Infrastruktur Perhubungan di Kabupaten Banyumas Tahun 2020

No	Jenis Infrastruktur	Jumlah	Lokasi
1	Perhubungan Darat		
	Jumlah Terminal Kelas A (unit)	1	Purwokerto
	Jumlah Terminal Kelas B (unit)	-	-
	Jumlah Terminal Kelas C (unit)	2	Wangon, Ajibarang
2	Perkeretaapian		
	Jumlah Stasiun	8	Purwokerto, Notog, Kebasen, Karangsari, Legok, Karanggandul, Sumpiuh, Kemranjen, dan Tambak

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, 2020.

Selain infrastruktur dasar, jalan dan perhubungan keberadaan fasilitas wilayah lainnya juga memberi dukungan bagi investasi, antara lain keberadaan fasilitas keuangan dan akomodasi. Berdasarkan data BPS (update sampai dengan tahun 2016) di Kabupaten Banyumas terdapat 64 bank umum (terdiri atas kantor cabang dan kantor cabang pembantu) dan 41 BPR (terdiri atas Kantor Pusat dan Kantor Cabang), 206 hotel bintang maupun non bintang, dan 744 restoran.

2.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi

2.4.3.1. Angka Kriminalitas

Angka kriminalitas menjadi salah satu pertimbangan bagi investor untuk melakukan aktivitas ekonomi di suatu daerah. Kestabilan keamanan diperlukan agar kegiatan usaha yang dilakukan akan berkembang dan memberikan keuntungan bagi investor dan mendatangkan devisa sebagai sumber pendapatan daerah.

Angka kriminalitas yang terjadi di Kabupaten Banyumas dalam kurun waktu tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi, cenderung naik dari tahun 2016 sebesar 1,830 mejadi 2,454 pada tahun 2018, dan menurun di tahun 2019 sebesar 2,266 di tahun 2019 dan 1,730 di tahun 2020. Perkembangan kriminalitas selama tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.103
Jumlah Kriminalitas Tahun 2016–2020

No	Variabel	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Kriminalitas	Kasus	453	448	643	930	638
2.	Jumlah Kriminalitas tertangani	Kasus	302	347	412	417	324
3	Prosentase Kasus Kriminalitas tertangani	%	66,67	77,46	64,07	44,84	50,78
4	Angka Kriminalitas	Angka per 10.000 penduduk	1,830	2,084	2,454	2,266	1,730

Sumber: Polres Banyumas tahun 2020

Dengan meningkatnya angka kriminalitas ini akan mempengaruhi iklim investasi di Kabupaten Banyumas dan angka kriminalitas yang tertangani juga masih belum tercapai sehingga perlu kerja keras dalam penanganan keamanan dan ketertiban di Kabupaten Banyumas.

2.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia

2.4.4.1. Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan *(dependency ratio)* dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang. Rasio ketergantungan merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya rasio ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan penduduk yang tidak produktif lagi. Sedangkan rasio ketergantungan yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Rasio ketergantungan Kabupaten Banyumas tahun tahun 2016-2020 cenderung menurun. Pada tahun 2020 rasio ketergantungan Kabupaten Banyumas adalah 47,96 artinya bahwa setiap 100 penduduk produktif menanggung sekitar 47 penduduk yang tidak produktif. Rasio ketergantungan penduduk ini lebih banyak disumbangkan oleh kelompok produktif (15–64 tahun) yang mencapai 67,6% dari total jumlah penduduk Kabupaten Banyumas. Tingginya

jumlah penduduk produktif menjadi perhatian bagi kemajuan pembangunan.

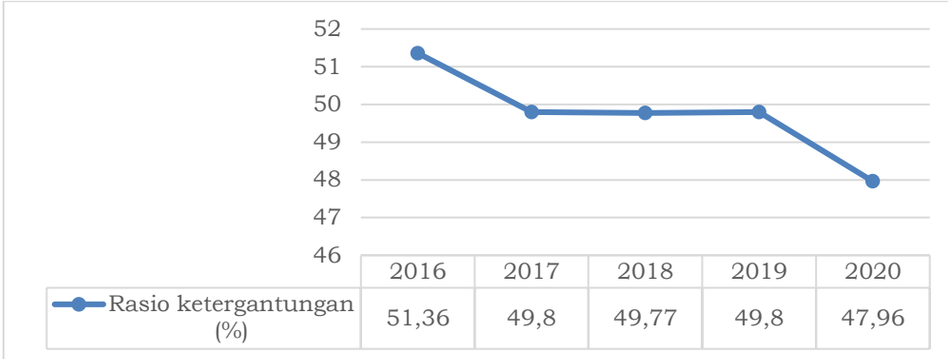

Gambar 2.46
Rasio Ketergantungan Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2020
Sumber: BPS Kabupaten Banyumas, 2016 s.d 2020

2.5. Kondisi Capaian Kinerja Daerah

2.5.1. Kondisi Capaian Kinerja Hasta Krida

Visi RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023 dijabarkan ke dalam delapan Misi yang pelaksanaannya dituangkan dalam program Hasta Krida, yaitu:

1. Mewujudkan Banyumas sebagai Barometer Pelayanan Publik
2. Meningkatkan kualitas hidup warga terutama pemenuhan dan layanan dasar pendidikan dan kesehatan
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan
4. Mewujudkan Banyumas sebagai Kabupaten Pelopor Kedaulatan Pangan
5. Menciptakan iklim investasi yang berorientasi perluasan kesempatan kerja yang berbasis potensi lokal dan ramah lingkungan
6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar yang merata dan memadai sebagai daya ungkit pembangunan
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan industri kerakyatan, pariwisata, dan industri kreatif berbasis sumber daya lokal
8. Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya serta berkepribadian dengan menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan religius.

Gambaran umum kondisi daerah terhadap capaian kinerja Hasta Krida Bupati selama 2 tahun pelaksanaan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 disajikan dengan tabel berikut:

Tabel 2.104
Gambaran Umum Capaian Kinerja Hasta Krida Bupati

No.	Capaian Hasta Krida	2019	2020	Target Akhir RPJMD (Sebelum)	Usulan Retargeting Akhir RPJMD (Sesudah)	Indikator Perubahan /Keterangan	SKPD Penanggung Jawab

No.	Capaian Hasta Krida	2019	2020	Target Akhir RPJMD (Sebelum)	Usulan Retargeting Akhir RPJMD (Sesudah)	Indikator Perubahan /Keterangan	SKPD Penanggung Jawab
1	Pengembangan lapak publik untuk mendukung Mall Pelayanan Publik	103 Perizinan dari 17 Instansi	210 Perizinan dari 26 Instansi	-	2021 : 214 perizinan 2022 : 214 perizinan 2023 : 214 perizinan Target akhir: 214 perizinan	Indikator : Jumlah jenis perizinan pada Mal Pelayanan Publik TIDAK ADA DI RENSTRA	DPMPTSP
2	Mewujudkan 92.000 paket beasiswa	107.328 Paket	102.509 Paket	indikator : - Jumlah penerima beasiswa SD (akademisi dan non akademisi) target akhir : 92.000 siswa - Jumlah penerima beasiswa SMP (akademisi dan non akademisi) target akhir : 40.355 siswa	2021 : 90.000 paket beasiswa per tahun (APBD) 2022 : 90.000 paket beasiswa per tahun (APBD) 2023 : 92.000 paket beasiswa per tahun (APBD) Target akhir : 92.000 paket beasiswa per tahun (APBD) Catatan : selisih dari 92.000 paket beasiswa SD dan SMP dialokasikan dari Kartu Indonesia Pintar (KIP)	Indikator : Jumlah peserta didik SD, SMP yang dibiayai (APBD)	Dindik,
3	Program wajib belajar: Angka Harapan lama Sekolah Angka Rata-rata Lama Sekolah	12,82 7,42	12,85 7,52	2021 : 13,23 2022 : 13,38 2023 : 13,53 2021 : 7,60 2022 : 7,65 2023 : 7,70	2021 : 12,87 2022 : 12,89 2023 : 12,91 Target akhir : 12,91 2021 : 7,53 2022 : 7,54 2023 : 7,55 Target akhir : 7,55	Indikator : Angka Harapan Lama Sekolah Angka Rata-rata Lama Sekolah	Dindik
4	Meningkatkan jangkauan pelayanan kesehatan	144,44/39 Puskesmas	148,2/40 Puskesmas	151/41 Puskesmas	2021 : 100 % 2022 : 100 % 2023 : 100 % Target akhir:100%	Indikator : -Prosentase Jenis UKM UKP sesuai standar yang terpenuhi	Dinkes
5	Program 1 Desa 3 Sarjana	Belum Terlaksana	Belum Terlaksana	3 sarjana/ desa	2021 : 23 sarjana per tahun 2022 : 23 sarjana per tahun 2023 : 23 sarjana per tahun Target akhir : 23 sarjana per 3 tahun	Indikator : Jumlah mahsiswa yang terfasilitasi bantuan sosial program 1 desa 3 sarjana	Bag Kesra Setda
6	Peningkatan ekspor gula kelapa 30.000 Ton	10.047 Ton	12.000 Ton	30,000 Ton	2021 : 13.000 ton 2022 : 14.000 ton 2023 : 15.000 ton	Indikator : Jumlah gula kelapa terekspor	Dinperindag

No.	Capaian Hasta Krida	2019	2020	Target Akhir RPJMD (Sebelum)	Usulan Retargeting Akhir RPJMD (Sesudah)	Indikator Perubahan /Keterangan	SKPD Penanggung Jawab
					Target akhir : 15.000 ton		
7	Peningkatan teknologi safety belt penderes, durian dll	74 unit	210 unit	240 unit	2021 : 0,25% 2022 : 0,50% 2023 : 0,75% Target akhir : 0,75%	Indikator : rasio jumlah petani pengguna safety belt	Dinpertan
8	Produksi padi 500.000 Ton/Tahun	368.957,25 Ton	371.827,51 Ton	500,000 Ton/Th	2021 : 373.000 ton 2022 : 374.000 ton 2023 : 375.000 ton Target akhir : 375.000 ton	Indikator : Produksi Padi	Dinpertan
9	Mengembangkan desa wisata	8 desa wisata	15 desa wisata	14 Desa	2021 : 15 desa 2022 : 15 desa 2023 : 16 desa Target akhir : 16 desa	Indikator : Jumlah Desa Wisata yang dikembangkan	Dinporabudpar
10	Menciptakan 3.000 enterpreneur muda	700 Orang	62 Orang	3.000 Orang	2021: 205 org/th 2022: 210 org/th 2023: 215 org/th Target akhir : 630 org/3 th	Indikator : Jumlah calon entrepreneur (pengusaha UMKM) terlatih bidang kewirausahaan	Dinakerkop UKM
11	Investasi berbasis padat karya	583 M	1.008 M	275 M	2021 : 500 M/th 2022 : 545 M/th 2023 : 600 M/th Target akhir : 1.645 M/3 th	Indikator : Jumlah investasi daerah	DPMPTSP
12	Membangun kawasan industri (Kawasan peruntukan Industri)	5 Kawasan (KPI)	Target : 5 Kawasan (KPI) Realisasi : 4 KPI	6 Kawasan (KPI) Perda lama 4 KPI Perda Baru 6 KPI	2021 : 5 KPI 2022 : 5 KPI 2023 : 5 KPI Target akhir : 5 KPI	Indikator : Jumlah KPI yang ditetapkan	Dinperkim, Dinperindag, DPU
13	Peningkatan anggaran irigasi	- 0,29%	Target : 6 % Realisasi : 20,10%	9 %	2021 : 7 % 2022 : 8 % 2023 : 9 % Target akhir : 9 %	Indikator : Persentase Peningkatan anggaran irigasi primer/sekunder	DPU, Bappedalitbang, BKAD
		3,292 Milyar rupiah	2,368 Milyar rupiah	-	2021 : 5 % 2022 : 6 % 2023 : 7 % Target akhir : 7%	Peningkatan Anggaran irigasi tersier/ perpompaan/ air dangkal/ air dalam	Dinpertan, Bappeda litbang, BKAD
14	Peningkatan jalan hotmix 570 Km	114,56 Km (kum)	166,68 Km (non kum) 52,12 Km (kum)	570 Km	2021 : 195 km (non kum) 28,32 Km (kum) 2022 : 220 km (non kum) 25 Km (kum) 2023 : 245 km (non kum) 25 Km (kum)	Indikator : panjang jalan yang di hotmix	DPU

No.	Capaian Hasta Krida	2019	2020	Target Akhir RPJMD (Sebelum)	Usulan Retargeting Akhir RPJMD (Sesudah)	Indikator Perubahan /Keterangan	SKPD Penanggung Jawab
15	Membangun pasar desa	Belum Terlaksana	Belum Terlaksana	-	2021 : 5 buah 2022 : 5 buah 2023 : 5 buah Target akhir : 15 buah	Indikator : Jumlah lembaga usaha ekonomi mesyarakat desa yang dibina (BUMDES dan Pasar Desa)	Dinsospermades
16	Pengembangan desa wisata	8 desa wisata	15 desa wisata	14 Desa	2021 : 15 desa 2022 : 15 desa 2023 : 16 desa Target akhir : 16 desa	Indikator : Jumlah Desa wisata	Dinporabud par
17	Pengembangan UMKM	1,13 %	0,34 %	0,46 %	2021 : 0,244% 2022 : 0,249% 2023 : 0,254% Target akhir : 0,254 %	Indikator : Persentase pertumbuhan Usaha Mikro	Dinakerkop UKM
18	Bantuan untuk marbot masjid	Belum Terlaksana	Belum Terlaksana		2021 : 332 org/th 2022 : 432 org/th 2023 : 431 org/th Target akhir : 1.097 org/th	Indikator : Jumlah Marbot dan petugas tempat ibadah lainnya yang terfasilitasi bantuan sosial Keterangan : Total masjid 331 desa (masjid jami), dan 134 rumah ibadah lainnya Target 2021 sudah bisa berjalan, masuk dalam APBD, dg (SK Bupati penerima bantuan, bansos insentif)	Bag Kesra Setda
19	KBS untuk santri pesantren	100 Santri	70 Santri	-	2021 : 100 % 2022 : 100 % 2023 : 100 % Target akhir: 100%	Indikator : Prosentase santri pondok pesantren mendapat pelayanan kesehatan dasar (Setiap santri pada pesantren setempat dilayani kesehatan dasarnya di puskesmas setempat)	Dinas Kesehatan
20	KBS, KBP, Tunjangan makan untuk yatim piatu	Belum Terlaksana	750 anak yatim piatu dari 27 kec terfasilitasi	-	● KBS (Jaminan Kesehatan) untuk yatim piatu 2021 : 100% 2022 : 100% 2023 : 100%	Indikator : ● Jumlah peserta KIS PBI yang dikelola 2021 : 50000 org 2022 : 51000 org 2023 : 53000 org	Dinas Kesehatan dan Bagian Kesra Setda

No.	Capaian Hasta Krida	2019	2020	Target Akhir RPJMD (Sebelum)	Usulan Retargeting Akhir RPJMD (Sesudah)	Indikator Perubahan /Keterangan	SKPD Penanggung Jawab
					● KBP untuk yatim piatu 2021 : 100% 2022 : 100% 2023 : 100% ● Tunjangan makan untuk yatim piatu 500 paket 2021 : 100% 2022 : 100% 2023 : 100%	Target akhir : 53000 org Keterangan : KBS yatim piatu masuk dalam KBS secara keseluruhan ● KBP untuk yatim piatu 100 % ● Jumlah anak panti asuhan yang menerima paket bantuan tunjangan makan	

2.5.2. Kondisi Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Gambaran umum kondisi daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan selama 2 tahun pelaksanaan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 disajikan dengan tabel berikut:

Tabel 2.105
Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian		Satuan	Intepretasi
		2019	2020		
A.	**Aspek Kesejahteraan Masyarakat**				
1	Angka Harapan Lama Sekolah	12,63	12,85	Tahun	Belum melampaui target 2020 (13,08 tahun), belum mencapai target akhir RPJMD (13,15 tahun)
2	Angka Rata-rata Lama Sekolah	7,4	7,52	Tahun	Belum melampui target 2020 (7,55 tahun), belum mencapai target akhir RPJMD (7,70 tahun)
3	Angka Usia Harapan Hidup (UHH)	73,33	73,72	Tahun	telah mencapai target 2020 (73,63 tahun) namun belum mencapai target akhir RPJMD (73,93 tahun)
4	Indeks Gini	NA	NA		NA
5	Indeks ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional)	NA	NA		NA
6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	71,96	71,98		Belum mencapai target 2020 (72,55) dan belum mencapai target akhir RPJMD (74,35)
7	Opini BPK status WTP terhadap laporan keuangan daerah	100	100	%	Sesuai target
8	PDRB per kapita	31,87	30,21	juta rupiah	Belum mencapai target 2020 (33 juta rupiah) dan belum mencapai target akhir RPJMD (38,655 juta rupiah)

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian		Satuan	Intepretasi
		2019	2020		
9	Persentase Penanganan daerah rawan pangan	63	71,43	%	Melampaui target 2020 (64%) belum mencapai target akhir RPJMD (100%)
10	Persentase penduduk miskin	12,53	13,26	%	Belum mencapai target 2020 (11,53%) dan belum mencapai target akhir RPJMD (8,56%)
11	Persentase Penguatan cadangan pangan	75	81,97	%	Melampaui target 2020 (80%) dan belum mencapai target akhir RPJMD (86%)
12	Persentase penurunan penduduk miskin	0,97	-0,73	%	Belum mencapai target 2020 (0,98%) dan belum mencapai target akhir RPJMD (4,94%)
13	Persentase Pertumbuhan PDRB (Pertumbuhan Ekonomi)	6,32	-1,65	%	Belum mencapai target 2020 (6,45%) dan belum mencapai target akhir RPJMD (6,65%)
14	Persentase Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	7,99	-0,05	%	Melampaui target 2020 (5,82%) dan target akhir RPJMD (5.86%)
15	Persentase pertumbuhan PDRB sektor perdagangan besar dan eceran reparasi mobil dan sepeda motor	8,11	-3,70	%	Belum mencapai target 2020 (4,48%) dan target akhir RPJMD (4,52)
16	Persentase Pertumbuhan PDRB sektor pertanian Kehutanan dan Perikanan	0,31	1,51	%	Belum Mencapai Target 2020 (3,58%) dan Belum Mencapai Target Akhir RPJMD (4,03%)
17	Skor Pola Pangan Harapan	90,8	93,1		Melampaui target 2020 (91), dan melampaui target akhir RPJMD (91,6)
18	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	67,34	66,66	%	Melampaui target 2020 (66,49%) dan belum mencapai target akhir RPJMD (67,71)
19	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4.21	6	%	Belum mencapai target 2020 (4,23%) dan belum mencapai target akhir RPJMD (3,76%)
B,	**Aspek Daya Saing**				
1	Angka Kriminalitas	530	638	Kasus	Sudah mencapai target 2020 (792) dan belum mencapai target akhir RPJMD (950)
2	Indeks Daya Saing Infrastruktur	65,48	78,00	%	Belum mencapai target 2020 (80,01%) dan belum mencapai target akhir RPJMD (82,56%)
3	Nilai Tukar Petani (NTP)	100,08	NA		-
4	Persentase Pertumbuhan Industri Kreatif	NA	5,65	%	Melampaui target 2020 (5%), belum mencapai target akhir RPJMD (15%)
5	Rasio Ketergantungan	49,8	47,96	%	Melampaui target 2020 (49%), dan target akhir RPJMD (49%)
C,	**Aspek Pelayanan Umum**				
	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil				
1	Cakupan penerbitan akta kelahiran	87,38	97,15	%	Melampaui target 2020 (97%) belum mencapai target akhir RPJMD (100%)
2	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	99,80	96,94	%	Belum mencapai target 2020 (97%) belum mencapai target akhir RPJMD (100%)

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian		Satuan	Intepretasi
		2019	2020		
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bidang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	86,31	86,46		Belum mencapai target 2020 (87,89%) belum mencapai target akhir RPJMD (89,12%)
4	Persentase instansi pengguna data kependudukan yang melakukan perjanjian kerja sama	100	100	%	Sesuai target
5	Persentase kecamatan yang update database kependudukan	100	100	%	Sesuai target
6	Persentase ketersediaan database kependudukan skala kabupaten	100	100	%	Sesuai target
7	Persentase pemohon akta kelahiran yang terlayani	100	100	%	Sesuai target
8	Persentase pemohon akta kematian yang terlayani	100	100	%	Sesuai target
9	Persentase pemohon akta perkawinan yang terlayani	100	100	%	Sesuai target
10	Persentase pemohon Kartu Identitas Anak yang terlayani	100	100	%	Sesuai target
11	Persentase pemohon Kartu Keluarga yang terlayani	100	100	%	Sesuai target
12	Persentase pemohon KTP-Elektronik yang terlayani	100	100	%	Sesuai target
13	Persentase Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	100	100	%	Sesuai target
14	Rasio bayi berakte kelahiran	84,52	93,15	%	Melampaui target 2020 (93%), belum mencapai target akhir RPJMD (98,7%)
15	Rasio pasangan berakte nikah	100	100	%	Sesuai target
	Administrasi Pemerintahan				
16	Cakupan fasilitasi marbot dan petugas tempat ibadah lainnya	0	0	%	Belum terlaksana
17	Indeks Kepuasan DPRD	80	100	%	Melampaui target 2020 (81%), belum mencapai target akhir RPJMD (84%)
18	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan	74,14	81.46	%	Belum mencapai target 2020 (82,88), belum mencapai target akhir RPJMD (86)
19	Indek Reformasi Birokrasi	68.76	69.07		Melampaui target 2020 (68), belum mencapai target akhir RPJMD (75)
20	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	73,84	74,96		Telah mencapai target 2020 (74). Dan belum mencapai target akhir RPJMD (80)
21	Nilai Evaluasi LKJIP Sekretariat Daerah	73.92	86.705		Melampaui target 2020 (73,92) dan target akhir RPJMD (73,95)
22	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiapb Alat-Alat Kelengkapan DPRD	5	5	Doku-men	Sesuai target
23	***Energi dan sumber daya mineral***				
	Kearsipan				

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian		Satuan	Intepretasi
		2019	2020		
24	Nilai penyelenggaraan Kearsipan	52	86	Nilai	Melampaui target 2020 (172), dan melampaui target akhir RPJMD (77)
25	Peningkatan SDM Pengelolaan Kearsipan	205	115	Orang	Belum mencapai target 2020 (185 orang). Dan belum mencapai target akhir RPJMD (1.120 orang)
26	Persentase pengelolaan arsip statis dalam kondisi baik di Pemerintah Kab.Banyumas	27,82	40	%	Sesuai target 2020 (40%), belum mencapai target akhir RPJMD (90%)
27	Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	10,92	14.5	%	Sesuai target 2020 (14,5%), belum mencapai target akhir RPJMD (36,4%)
28	Persentase unit kerja/ OPD yang mempunyai daftar arsip sesuai standar	10,92	14,5	%	Sesuai target 2020 (14,5%), belum mencapai target akhir RPJMD (36,4%)
	Kebudayaan				
29	Persentase jenis kesenian yang dilestarikan	11,32	66,04	%	Melampaui target 2020 (50,94%) dan belum mencapai target akhir RPJMD (100%)
30	Persentase karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	72,73	0	%	Belum mencapai target 2020 (72,73%) dan belum mencapai target akhir RPJMD (100%)
31	Persentase Pelestarian Budaya Banyumas	32,87	72,72	%	Melampaui target 2020 (47,47%), belum mencapai target akhir RPJMD (100%)
32	Persentase penetapan cagar budaya dengan SK Bupati	28	36	%	Belum mencapai target 2020 (44%) dan target akhir RPJMD (100%)
	Kehutanan				
	Kelautan dan perikanan				
33	Konsumsi Ikan	14,5	21,05	kg/ kapita/ tahun	Melampaui target 2020 (14,53%) dan target akhir RPJMD (14,83%)
34	Persentase Peningkatan Produksi Olahan Hasil Perikanan	2,74	5,7	%	Melampaui target 2020 (2%), belum mencapai target akhir RPJMD (10%)
35	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan	4,53	2,07	%	Melampaui target 2020 (1,5%), belum mencapai target akhir RPJMD (7,5%)
36	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	5,05	1,52	%	Sesuai target 2020 (1,5%), belum mencapai target akhir RPJMD (7,5%)
37	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	3,56	2,63	%	Melampaui target 2020 (1,5%), belum mencapai target akhir RPJMD (7,5%)
38	Produksi olahan hasil perikanan	178,35	188,5	Ton	Melampaui target 2020 (177,1 ton) belum mencapai target akhir RPJMD (903,4 Ton)
39	Produksi Perikanan Budidaya	10.767,41	10931,4	Ton	Melampaui target 2020 (10.559 Ton), belum mencapai target akhir RPJMD (53.597 Ton)
40	Produksi Perikanan Tangkap	902,85	926,55	Ton	Melampaui target 2020 (898 Ton), belum mencapai target akhir RPJMD (4.560 Ton)
	Kepegawaian				
41	Indeks Profesionalitas ASN	82,79	67,48		Belum mencapai target 2020 (83,4) dan target akhir RPJMD (83,7)

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian		Satuan	Intepretasi
		2019	2020		
42	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	189	193	jabatan	Melampaui target 2020 (189 jabatan) dan target akhir RPJMD (189 jabatan)
43	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	31	30	jabatan	Belum mencapai target 2020 (31 jabatan) dan belum mencapai target akhir RPJMD (31 jabatan)
44	Persentase jumlah ASN yang menduduki jabatan sesuai dengan syarat jabatan	40	91	%	Melampaui target 2020 (91%), belum mencapai target akhir RPJMD (95%)
	Kepemudaan dan Olah Raga				
45	Persentase organisasi pemuda yang aktif	48	100	%	Melampaui target 2020 (56%) dan target akhir RPJMD (71%)
46	Persentase pertumbuhan pemuda berprestasi	51,48	1,79	%	Melampaui target 2020 (1,31%) dan target akhir RPJMD (45,61%)
	Kesehatan				
47	Angka keberhasilan pengobatan pasien TB RO	70	70,59	%	Sesuai target
48	Angka Kejadian Malaria (API : kasus per 1000 penduduk)	< 0.05	0		Tidak ada kejadian malaria
49	Angka Kelangsungan Hidup bayi	991,57	992,9		Melampaui target 2020 (991,8) dan target akhir RPJMD (992,1)
50	Angka kematian balita	9,17	8,95		Belum mencapai target 2020 (8,8) dan target akhir RPJMD (8,2)
51	Angka Kematian Bayi	7,4	7,06		Melampaui target 2020 (8,01) dan target akhir RPJMD (7,9)
52	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup	37,6	41.5		Melampaui target 2020 (67,5) dan target akhir RPJMD (66,5)
53	Angka Kematian Neonatal	4,14	6,42		Belum memenuhi target 2020 (5,25) dan target akhir RPJMD (4,5)
54	Angka Usia Harapan Hidup (UHH)	73.55	73.72	Tahun	Melampaui target 2020 (73,63 tahun), belum mencapai target akhir RPJMD (73,93 tahun)
55	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	100	100	%	Sesuai target
56	Cakupan Balita Pneumonia yang ditangani	100	100	%	Sesuai target
57	Cakupan desa/ kelurahan mengalami KLB yang dilakukan Penyelidikan epidemiologi	100	100	%	Sesuai target
58	Cakupan Desa / Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	100	100	%	Sesuai target
59	Cakupan Desa Siaga Aktif Mandiri	10	16,62	%	Melampaui target 2020 (11,5%) dan target akhir RPJMD (13%)
60	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional	100	81,3	%	Belum melampui target RPJMD
61	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	100	100	%	Sesuai target
62	Cakupan kunjugan ibu	100	100	%	Sesuai target

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian		Satuan	Intepretasi
		2019	2020		
	hamil K4				
63	Cakupan kunjungan bayi	100	100	%	Sesuai target
64	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	100	100	%	Sesuai target
65	Cakupan pelayanan anak balita	100	100	%	Sesuai target
66	Cakupan pelayanan balita sesuai standar	100	100	%	Sesuai target
67	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (Rumah Sakit)	100	100	%	Sesuai target
68	Cakupan pelayanan ibu hamil K1	100	100	%	Sesuai target
69	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	100	100	%	Sesuai target
70	Cakupan pelayanan kesehatan dasar pada pondok pesantren	100	100	%	Sesuai target
71	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	100	100	%	Sesuai target
72	Cakupan pelayanan nifas	100	100	%	Sesuai target
73	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin	100	100	%	Sesuai target
74	Cakupan penduduk miskin non kuota yang mempunyai JPK	100	100	%	Sesuai target
75	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100	100	%	Sesuai target
76	Cakupan penemuan dan penanganan penderita TBC BTA	100	100	%	Belum memenuhi target RPJMD
77	Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat	100	98,22	%	Sesuai target
78	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	100	100	%	Sesuai target
79	Cakupan Puskesmas	144	148	%	Belum memenuhi target RPJMD
80	Cakupan Puskesmas Pembantu	11.78	11,78	%	Sesuai target
81	Case Fatality Rate DBD (%)	1,47	3,2	%	Sesuai target
82	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kesehatan RSUD Ajibarang	76.78	82.58		Belum memenuhi target 2020 (83) dan target akhir RPJMD (85)
83	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kesehatan RSUD Banyumas	76.78	79		Melampaui target 2020 (76), belum mencapai target akhir RPJMD (85)
84	Indeks kepuasan Masyarakat pelayanan kesehatan	77,5	83,29		Sudah melampui target e akhir RPJMD (79)
85	Non AFP rate per	4,38	1.71		Sesuai target

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian		Satuan	Intepretasi
		2019	2020		
	100,000 penduduk				
86	Penderita diare yang ditangani	100	100	%	sesuai target
87	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	48,63	60,61	%	Belum memenuhi target 2020 dan target akhir RPJMD (100%)
88	Persentase balita gizi kurang mendapatkan PMT	100	100	%	Belum memenuhi target 2020 dan target akhir RPJMD (100%)
89	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100	100	%	Sesuai target
90	Persentase bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR)	5,94	6.87	%	Belum mencapai target 2020 (4%) dan target akhir RPJMD (3%)
91	Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap	100	99.67	%	Belum mencapai target 2020 dan target akhir RPJMD (100%)
92	Persentase bayi usia 0-6 bulan mendapat ASI Eksklusif	66,1	61,9	%	Melampaui target 2020 (56%), belum mencapai target akhir RPJMD (65%)
93	Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) kesehatan	68.18	80	%	Melampaui target 2020 (77,27%), belum mencapai target akhir RPJMD (86,36%)
94	Persentase Desa melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	100	100	%	Belum mencapai target 2020 (75%), belum mencapai target akhir RPJMD (100%)
95	Persentase Desa yang memanfaatkan Dana Desa 10% untuk Bidang Kesehatan	5	59,8	%	Melampaui target 2020 (15%) dan target akhir RPJMD (30%)
96	Persentase Fasyankes primer / sekunder yang memberikan pelayanan sesuai standar	100	100	%	Sesuai target
97	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100	100	%	Sesuai target
98	Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100	100	%	Sesuai target
99	Persentase Jaminan Kesehatan Nasional	71.21	83.14	%	Belum mencapai target 2020 (100%), belum mencapai target akhir RPJMD (100%)
100	Persentase kecamatan dengan Pokjanal Desa Siaga	18.5	59.26	%	Melampaui target 2020 (22,5%) dan target akhir RPJMD (35%)
101	Persentase kecamatan yang melaksanakan STBM	100	100	%	Mudah mencapai target 2020 (100%), belum mencapai target akhir RPJMD (100%)
102	Persentase Kecamatan yang memiliki kebijakan PHBS	100	100	%	Melampaui target 2020 (70%), sesuai target akhir RPJMD 100%)
103	Persentase Kecamatan yang mencapai PHBS Institusi Pendidikan sehat 10 %	100	100	%	Sesuai target
104	Persentase Kecamatan yang mencapai Rumah Tangga sehat 76,5%	79.6	88,5	%	Sesuai target

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian		Satuan	Intepretasi
		2019	2020		
105	Persentase ketersediaan obat sesuai kebutuhan	80	100	%	Sesuai target 2020 (100%), dan target akhir RPJMD (100%)
106	Persentase kunjungan neonatal pertama (KN1)	100	100	%	Sesuai target 2020 (100%), dan target akhir RPJMD (100%)
107	Persentase kunjungan neonatus lengkap dengan MTBM	100	100	%	Sesuai target 2020 (100%), dan target akhir RPJMD (100%)
108	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100	100	%	Sesuai target 2020 (100%), dan target akhir RPJMD (100%)
109	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100	100	%	Sesuai target
110	Persentase orang terdeteksi dini infeksi Hepatitis B	1.82	1	%	Sesuai target
111	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC	100	100	%	Sesuai target
112	Persentase orang usia 15 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	68,52	%	Belum mencapai target 2020 (100%), belum mencapai target akhir RPJMD (100%)
113	Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	25,99	80,55	%	Belum mencapai target 2020 (100%), belum mencapai target akhir RPJMD (100%)
114	Persentase penduduk miskin non kuota terintegrasi JKN	95	100	%	Sudah mencapai target akhir RPJMD (95%)
115	Persentase penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	95	91.97	%	Belum mencapai target 2020 (100%), belum mencapai target akhir RPJMD (100%)
116	Persentase Puskesmas dengan capaian SPM Kesehatan 100%	100	100	%	Sesuai target
117	Persentase Puskesmas melaksanakan kesehatan kerja	61,54	100	%	Melampaui target 2020 (66%), sesuai target akhir RPJMD (100%)
118	Persentase Puskesmas melaksanakan Kesehatan Olah Raga pada kelompok masyarakat	61,54	100	%	Melampaui target 2020 (53%), sesuai target akhir RPJMD (100%)
119	Persentase puskesmas melaksanakan STBM	100	100	%	Sesuai target
120	Persentase Puskesmas Terakreditasi	95	100	%	Sesuai target
121	Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar	65	65	%	Sesuai target 2020 (65%), belum mencapai target akhir RPJMD (95%)
122	Persentase puskesmas yang melaksanakan pengelolaan obat sesuai standar	85	85	%	Sesuai target 2020 (85%), belum mencapai target akhir RPJMD (95%)
123	Persentase rumah tangga mengakses sanitasi dasar yang layak	73.33	88.45	%	Belum mencapai target 2020 dan target akhir RPJMD (100%)

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian		Satuan	Intepretasi
		2019	2020		
124	Persentase sarana kefarmasian yang memenuhi standar	65	65	%	Sesuai target 2020 (65%) dan belum mencapai target akhir RPJMD (95%)
125	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	52,31	64	%	Belum mencapai target 2020 dan target akhir RPJMD (100%)
126	Prevalensi anemia pada ibu hamil	16,53	13.38	%	Melampaui target 2020 (20%) belum mencapai target akhir RPJMD (10%)
127	Prevalensi balita stunting	15,96	14,21	%	Melampaui target 2020 (17%) belum mencapai target akhir RPJMD (14%)
128	Prevalensi Gizi Buruk	0,07	0.06	%	Melampaui target 2020 (0,07%) belum mencapai target akhir RPJMD (0,05%)
129	Prevalensi gizi kurang	7,80	7,59	%	Melampaui target 2020 (7,7%) dan target akhir RPJMD (7,4%)
130	Prevalensi HIV / AIDS (%) dari total populasi	0.17	0.14	%	Sesuai target
131	Prevalensi kurus (wasting) pada anak balita mencapai 9,5%	3,9	3,9	%	Belum mencapai target 2020 (72%) dan target akhir RPJMD (80%)
132	Prevalensi obesitas pada penduduk usia lebih dari 18 tahun	8,42	3,53	%	Melampaui target 2020 (12,1%) dan target akhir RPJMD (11,8%)
133	Prevalensi tekanan darah tinggi	26,3	14,45	%	Melampaui target 2020 (38,5%) dan target akhir RPJMD (37,9%)
134	Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat antimalaria yang tepat	100	100	%	Sesuai Target
135	Proporsi jumlah kasus Tuberculosis yang terdeteksi dalam program DOTS	70,1	77,4	%	Sesuai target 2020, belum mencapai target akhir RPJMD (85%)
136	Proporsi penduduk dengan asupan minimal < 2.100 Kkal/hari	12,53	13,26	%	Belum mencapai target 2020 (70%) dan target akhir RPJMD (64%)
137	Prosentase capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) kesehatan	75	88,47	%	Sesuai target 2020, belum mencapai target akhir RPJMD (85%)
138	Rasio dokter per satuan penduduk	0,49	0,48	%	Melampaui target 2020 (0,19) dan target akhir RPJMD (0,2)
139	Rasio posyandu per satuan balita	20,1	20,1		Belum mencapai target 2020 (20,5) dan target akhir RPJMD (20,7)
140	Rasio Puskesmas persatuan penduduk	0,021	0,02		Sudah mencapai target akhir RPJMD (0,02)
141	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	0,0125	0,013	Rasio	Melampaui target 2020 (0,01) dan target akhir RPJMD (0,01)
142	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	0,35	0,5	%	Melampaui target 2020 dan (0,4) dan target akhir RPJMD (0,4)
143	Tingkat kematian akibat malaria	0	0	%	Tidak ada kejadian malaria
144	Tingkat Kematian karena Tuberculosis (Per 100,000 penduduk)	3	4,43		Belum mencapai target akhir RPJMD (2)

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian		Satuan	Intepretasi
		2019	2020		
145	Tingkat prevalensi Tuberculosis (per 100,000 penduduk)	168	278		belum mencapai target 2020 (164) dan target akhir RPJMD (158)
	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat				
146	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten	53	100	%	Sudah mencapai target 2020 (60%), dan belum mencapai target akhir RPJMD (75%), namun perlu di retargeting karena kekeliruan perhitungan target di awal.
147	Cakupan petugas perlindungan masyarakat (Linmas)	100	100	%	Sesuai target
148	Indeks Demokrasi	72	72		Belum mencapai target 2020 (79.30), dan belum mencapai target akhir RPJMD (86)
149	Informasi peta rawan bencana	100	100	%	Sesuai target
150	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum PERDA dan Perkada	100	100	%	Sesuai target
151	Persentase kecamatan yang telah memiliki peta rawan bencana	0	3,7	%	Belum mencapai target 2020 (37,04%), dan belum mencapai target akhir RPJMD (100%)
152	Persentase kejadian bencana tertangani dengan cepat dan tepat	100	100	%	Sesuai target
153	Persentase konflik sosial yang terselesaikan	100	100	%	Sesuai target
154	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan mengunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	100	100	%	Sesuai target
155	Persentase lembaga keagamaan aktif	5	10	%	Belum mencapai target 2020 (60%), dan belum mencapai target akhir RPJMD (70%)
156	Persentase Pelaksanaan SOP Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	100	%	Sesuai target
157	Persentase Pemenuhan Sarpras Kelengkapan Satpol PP	100	100	%	Sesuai target
158	Persentase pemilih pemula yang memberikan hak pilih pada pemilu /pemilukada	74	78	%	Melampaui target 2020 (75%), sesuai target akhir RPJMD (78%)
159	Persentase penanganan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	100	100	%	Sesuai target
160	Persentase penanganan pelanggaran PERDA	90	100	%	Sesuai target
161	Persentase penegakan perda	90	100	%	Sesuai target
162	Persentase Peningkatan Kapasitas Anggota Satpol PP	100	100	%	Sesuai target
163	Persentase penurunan angka konflik IPOLEKSOSBUDHAN-	5	0	%	Melampaui target, tidak terdapat konflik

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian		Satuan	Intepretasi
		2019	2020		
	KAM				
164	Persentase penurunan konflik SARA	5	50	%	Melampaui target tager 2020 (5) dan Target akhir RPJMD (25)
165	Persentase penurunan konflik sosial	0,7	0,19	%	Belum mencapai target 2020 (5%), dan belum mencapai target akhir RPJMD (25%)
166	Persentase pertumbuhan desa tangguh bencana	12	15	%	Belum mencapai target 2020 (42,3%), dan belum mencapai target akhir RPJMD (66,7%)
167	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100	100	%	Sesuai target
168	Presentase LSM, Ormas dan Forum lainnya yang berperan aktif dalam kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	25	5	%	Belum mencapai target 2020 (30%), dan belum mencapai target akhir RPJMD (45%)
169	Rasio pengurangan resiko bencana	30	30		Belum mencapai target tahun 2020 (35) dan target akhir RPJMD (55)
170	Tingkat partisipasi masyarakat dalam bidang politik	70	78	%	Melampaui target 2020 (75%) dan target akhir RPJMD (75%)
171	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan)	100	100	%	Sesuai target
172	Tingkat waktu tanggap (respons time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK)	100	53	%	Belum mencapai target tahun 2020 dan target RPJMD (100%) serta perlu retargeting karena kekeliruan perhitungan target di awal.
	Keuangan				
173	Kontribusi PAD terhadap APBD	19,99	20,07	%	Melampaui target 2020 (15%), belum mencapai target akhir RPJMD (18%)
174	Opini BPK status WTP terhadap laporan keuangan daerah	100	100	%	Sesuai target
175	Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung	0,37	0,36		Sesuai target 2020 (0,37) dan belum mencapai target akhir RPJMD (0,41)
176	Persentase belanja kesehatan (10%)	12	12	%	Sesuai target
177	Persentase belanja pendidikan (20%)	29	29	%	Sesuai target
178	Persentase ketepatan waktu penetapan APBD	100	100	%	Sesuai target
179	Persentase SILPA	11.94	4,8	%	Melampaui target 2020 (6,6%) tapi belum mencapai target akhir RPJMD (3,94%)
	Komunikasi dan Informatika				
180	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,65	3,09		Melampaui target 2020 (2,9) dan belum mencapai target akhir RPJMD (3,5)
181	Peringkat Tingkat Keterbukaan Informasi Publik	8	8		Belum mencapai target 2020 (peringkat 4) dan target akhir RPJMD (peringkat 2)

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian		Satuan	Intepretasi
		2019	2020		
182	Persentase aplikasi yang dibangun dan dikembangkan	10	40	%	Sesuai target 2020 (40%), belum mencapai target akhir RPJMD (100%)
183	Persentase SDM yang melek IT	10	40	%	Sesuai target 2020 (40%) dan belum mencapai target akhir RPJMD (100%)
184	Rasio Lapak aduan publik berbasis IT	100	100	%	sesuai target
	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah				
185	Persentase koperasi aktif	80,51	80,6	%	Sudah melampaui target 2020 (76,5%) dan target akhir RPJMD (77,25%)
186	Persentase koperasi sehat	25,09	22,4	%	Belum mencapai target 2020 (30,25%) dan target akhir RPJMD (31%)
187	Persentase pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah (IKM)	0,39	1,73	%	Melampaui target 2020 (1,34%) dan belum mencapai target akhir RPJMD (1,98%)
188	Persentase Pertumbuhan UMKM	1,13	0,34	%	Belu mencapai target 2020 (0,47%) dan target akhir RPJMD (0,47%)
189	Persentase Pertumbuhan UMKM dan IKM	0,34	0,34	%	Belum mencapai target 2020 (0,46%) dan target akhir RPJMD (0,46%)
	Lingkungan Hidup				
190	Dokumen RPPLH Kabupaten/Kota	0	1	Dokumen	Sesuai target 2020 (1 dokumen) dan target akhir RPJMD (1 dokumen)
191	Indeks Kualitas Air (IKA)	34,67	49,33		Belum mencapai target 2020 (54,4) dan target akhir RPJMD (55)
192	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	64,62	62,27		Belum mencapai target 2020 (63,88) dan target akhir RPJMD (64,15)
193	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	73,52	42,32		Belum mencapai target 2020 (56,5) dan target akhir RPJMD (56,5)
194	Indeks Kualitas Udara (IKU)	82,71	85,07		Melampaui target 2020 (83,2) dan target akhir RPJMD (83,5)
195	Integrasinya RPPLH dalam Rencana Pembangunan Kabupaten/Kota	0	0	Doku-men	Belum mencapai target akhir RPJMD (1 dokumen)
196	Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota	73,42	73,42		Melampaui target 2020 dan target akhir RPJMD (72)
197	Penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah KabupatenKota lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupatenkota	100	100	%	Sesuai target
198	Persentase cakupan area pelayanan persampahan	52	52	%	Sesuai target 2020 (52%), belum mencapai target akhir RPJMD (58%)
199	Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R	22	22	%	Sesuai target 2020 (22%), belum mencapai target akhir RPJMD (27%)
200	Persentase jumlah sampah yang tertangani	92	97	%	Sesuai target 2020 (97%), belum mencapai target akhir RPJMD (99%)

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian		Satuan	Intepretasi
		2019	2020		
201	Timbulan sampah yang ditangani	92	97	%	Sesuai target 2020 (97%), belum mencapai target akhir RPJMD (99%)
	Pangan				
202	Indeks Ketahanan Pangan	73,99	79,27		Melampaui target 2020 (74,01) dan target akhir RPJMD (74,04)
203	Persentase Ketersediaan Pangan Utama	90	109,12	%	Melampaui target 2020 (95%) dan target akhir RPJMD (97%)
204	Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	70	98,39	%	Melampaui target 2020 (94,43%) dan target akhir RPJMD (97,43%)
205	Persentase Penguatan cadangan pangan	70	81,97	%	Melampaui target 2020 (80%), belum mencapai target akhir RPJMD (86%)
206	Stabilitas harga dan pasokan pangan	95	80	%	Belum mencapai target 2020 (97%) dan target akhir RPJMD (100%)
207	Tingkat ketersediaan energi	91	91,52	%	Belum mencapai target 2020 (93%) dan target akhir RPJMD (96%)
208	Tingkat ketersediaan protein (%)	91	81,26	%	Belum mencapai target 2020 (93%) dan target akhir RPJMD (96%)
	Pariwisata				
209	Jumlah kunjungan wisatawan	3.580.743	1.866.157	wisatawan	Belum mencapai target 2020 (3.134.193 wisatawan) dan target akhir RPJMD (16.598.729 wisatawan)
210	Persentase pertumbuhan desa wisata	57,14	107	%	Melampaui target 2020 (64,29%) dan target akhir RPJMD (100%)
211	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisata (Wisman dan Wisnus)	51,53	-47,88	%	Belum mencapai target 2020 (5,86%) dan target akhir RPJMD (48,48%)
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
212	Persentase advice planning yang dikeluarkan sesuai tata ruang	100	100	%	Sesuai target
213	Persentase bangunan gedung Pemerintah Daerah dalam kondisi baik	57,7	68,27	%	Belum mencapai target 2020 (66,7%) dan target akhir RPJMD (75,7%)
214	Persentase infrastruktur SDA dalam kondisi baik	71,8	78,98	%	Melampaui target 2020 (74,05%) dan target akhir RPJMD (78,8%)
215	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	75,39	79,12	%	Melampaui target 2020 (73,1%) dan target akhir RPJMD (77,6%)
216	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	71,03	47,51	%	Belum mencapai target 2020 (53,06%) dan target akhir RPJMD (68,06%)
217	Persentase kenaikkan anggaran irigasi	0	1.429	%	Melampaui target 2020 (6%)dan target akhir RPJMD (9%)
218	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang	99,979	99,982	%	Sesuai target 2020 (99.982%) dan belum mencapai taget akhir RPJMD (99,985%)
219	Persentase ketersediaan sarpras pusat kantor	0	0	%	Belum ada target di 2019 dan 2020

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian		Satuan	Intepretasi
		2019	2020		
	pemerintahan terpadu				
220	Persentase kinerja perencanaan teknis dan kinerja pembinaan jasa konstruksi	22,47	50.47	%	Melampaui target 2020 (30,23%), belum mencapai target akhir RPJMD (67,65%)
221	Persentase menurunnya pelanggaran tata ruang	0,021	0.018	%	Sesuai target 2020 (0,018) dan me;ampaui target akhir RPJMD (0,015%)
222	Persentase peningkatan jalan hotmix	20,1	29,07	%	Belum mencapai target 2020 (40%) dan target akhir RPJMD (100%)
223	Persentase wilayah yang terkoneksi oleh jalan dalam kondisi baik	85,8	90,94	%	Belum mencapai target 2020 (86,71%) dan target akhir RPJMD (91,24%)
224	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	0,71	0,45		Belum mencapai target 2020 (0,53%) dan target akhir RPJMD (0,68%)
225	Rasio jaringan irigasi	37,69	38,55		Melampaui target 2020 (37,69) dan target akhir RPJMD (37,69%)
226	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	0,89833	0,81950		Belum mencapai target 2020 (0.91293)) dan belum mencapai target akhir RPJMD (0,88659
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				
227	Indeks Desa Membangun	0.66	0.6988		Telah mencapai target 2020 (0,674) dan target akhir RPJMD (0,694)
228	Kelembagaan Kawasan Perdesaan (PKP) yang terbentuk	0	2	lembaga	Sesuai target 2020, belum memenuhi target akhir RPJMD (10 lembaga)
229	Kelulusan sarjana per desa	0	0	Orang	Belum terlaksana
230	Persentase Bumdes yg meningkat stratanya	36,55	9.3	%	Melampaui target 2020 (7%), belum mencapai target akhir RPJMD (37%)
231	Persentase desa dengan administrasi baik	80	100	%	Belum mencapai target 2020 dan target akhir RPJMD 100%
232	Persentase desa yang menghasilkan produk unggulan	0	60	%	Telah Mencapai target akhir RPJMD (50%)
233	Persentase desa yang meningkat prasarananya	0,67	2.3	%	Belum mencapai target 2020 (2,66%) dan target akhir RPJMD (13,29%)
234	Persentase desa yg telah mengembangkan/ memanfaatkan Teknologi Tepat Guna untuk usaha perdesaan	1	0,66	%	Belum mencapai target 2020 (2,66%) dan target akhir RPJMD (3,32%)
235	Persentase pemerintahan desa yang telah melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan UU No.6 Tahun 2014	100	100	%	Sesuai target
236	Persentase PKK aktif	100	100	%	Sesuai target
	Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak				
237	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	100	100	%	Sesuai target

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian		Satuan	Intepretasi
		2019	2020		
238	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	100	100	%	Sesuai target
239	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	100	100	%	Sesuai target
240	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	100	100	%	Sesuai target
241	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	100	100	%	Sesuai target
242	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	100	100	%	Sesuai target
243	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	100	100	%	Sesuai target
244	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	87,62	88,27		Melampaui target 2020 sebesar 87,64 dan target akhir RPJM sebesar 87,67
245	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	67,32	71,92		Melampaui target 2020 sebesar 67,5 dan target akhir RPJM sebesar 67,6
246	Nilai Kabupaten Layak Anak	426	528		Belum melampaui target 2020 sebesar 600 dan target akhir RPJM sebesar 750
247	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	49	49	%	Sesuai target
248	Preferensi kekerasan pada anak perempuan	36,89	4	%	Melampaui target 2020 (33,11%) dan target akhir RPJMD (29,32%)
249	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	18	11	Orang	Belum mencapai target 2020 dan target akhir RPJMD (11 orang)
250	Rasio anak korban kekerasan	0,011	0,012	%	Belum mencapai target 2020 (0,009%) dan target akhir RPJMD (0,006%)
251	Rasio KDRT	0,0019	0,0031	%	Belum mencapai target 2020 (0,0016%) dan target akhir RPJMD (0,0013%)
	Penanaman Modal				

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian		Satuan	Intepretasi
		2019	2020		
252	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	88	89,5		Melampaui target 2020 (87) dan belum mencapai target akhir RPJMD (90)
253	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik (Mal Pelayanan Publik=MPP)	88	89,5		Melampaui target 2020 (80), dan target akhir RPJMD (83)
254	Nilai Investasi Daerah	761	1077	Milyar Rupiah	Melampaui target 2020 (260 M), dan target akhir RPJMD (275 M)
255	Nilai investasi di kawasan industri	0	0	Milyar Rupiah	Belum ada target di 2019 dan 2020
256	Persentase penanganan pengaduan	100	100	%	Sesuai target
257	Persentase Pertumbuhan Nilai investasi Daerah	21,76	41,54	%	Melampaui target 2020 (2%) dan target akhir RPJMD (10)
258	Prosentase pengaduan yang ditangani	100	100	%	Sesuai target
	Pendidikan				
259	Angka Kelulusan (AL) SD / MI / Paket A	100	100	%	Sesuai target
260	Angka Kelulusan (AL) SMP / MTs / Paket B	99,99	100	%	Sesuai target
261	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI/ Paket A ke SMP/MTs/ Paket B	104,39	100	%	Sesuai target
262	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP / MTs/ Paket B ke SMA/SMK/MA/Paket B	92,47	96,2	%	Belum mencapai target 2020 (96,4%) dan target akhir RPJMD (97%)
263	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD	99,71	99,71	%	Sudah mencapai target 2020 (96,4%) dan target akhir RPJMD (97%)
264	Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/ MTs / Paket B (13-15 tahun)	99,64	99,64	%	Sudah mencapai target 2020 (96,4%) dan target akhir RPJMD (97%)
265	Angka Putus Sekolah (APS) SD / MI / Paket A	0,040	0.034	%	Belum mencapai target 2020 (96,4%) dan target akhir RPJMD (97%)
266	Angka Putus Sekolah (APS) SMP / MTs / Paket B	0,176	0	%	Belum mencapai target 2020 (96,4%) dan target akhir RPJMD (97%)
267	Angka rata-rata Nilai UASBN SD	92,47	65,7	%	Belum mencapai target 2020 (96,4%) dan target akhir RPJMD (97%)
268	Angka rata-rata Nilai UN SMP	92,47	88,29	%	Belum mencapai target 2020 (96,4%) dan target akhir RPJMD (97%)
269	APK PAUD/RA/ Sederajat	92,47	77.5	%	Belum mencapai target 2020 (96,4%) dan target akhir RPJMD (97%)
270	APK SD/MI/Paket A	92,47	106.9	%	Belum mencapai target 2020 (96,4%) dan target akhir RPJMD (97%)
271	APK SMP/MTs/Paket B	92,47	85.04	%	Belum mencapai target 2020 (96,4%) dan target akhir RPJMD (97%)
272	APM SD/MI/paket A	92,47	98.54	%	Belum mencapai target 2020 (96,4%) dan target akhir RPJMD (97%)

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian		Satuan	Intepretasi
		2019	2020		
273	APM SMP/MTs/Paket B	92,47	81.23	%	Belum mencapai target 2020 (96,4%) dan target akhir RPJMD (97%)
274	Jumlah penerima beasiswa SD (akademis dan non akademis)	74.928	86.246	pelajar	sesuai target 2020 (87547), belum mencapai target akhir RPJMD (92000 pelajar)
275	Jumlah penerima beasiswa SMP	36.524	37.456	pelajar	Belum mencapai target
276	Persentase kepala satuan pendidikan kesetaraan memiliki ijazah minimal S1/DIV	100	100	%	Sesuai target
277	Persentase kepala satuan pendidikan PAUD memiliki ijazah minimal S1/DIV	100	100	%	Sesuai target
278	Persentase kepala satuan pendidikan PAUD memiliki sertifikat pendidik	100	100	%	Sesuai target
279	Persentase kepala satuan pendidikan PAUD memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk pendidikan anak usia dini formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan pendidikan anak usia dini nonformal dari lembaga pemerintah yang berwenang	100	100	%	Sesuai target
280	Persentase kepala satuan pendidikan SD memiliki ijazah minimal S1/DIV	100	100	%	Sesuai target
281	Persentase kepala satuan pendidikan SD memiliki sertifikat pendidik	99	100	%	Sesuai target
282	Persentase kepala satuan pendidikan SD memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	100	100	%	Sesuai target
283	Persentase kepala satuan pendidikan SMP memiliki ijazah minimal S1/DIV	100	100	%	Sesuai target
284	Persentase kepala satuan pendidikan SMP memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	100	100	%	Sesuai target
285	Persentase pendidik PAUD memiliki ijazah minimal S1/DIV bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain, atau psikologi	100	100	%	Sesuai target
286	Persentase pendidik PAUD memiliki sertifikat profesi guru PAUD	100	100	%	Sesuai target
287	Persentase pendidik SD memiliki ijazah minimal S1/DIV	100	100	%	Sesuai target

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian		Satuan	Intepretasi
		2019	2020		
288	Persentase pendidik SD memiliki sertifikat pendidik	99	100	%	Sesuai target
289	Persentase pendidik SMP memiliki ijazah minimal S1DIV	100	100	%	Sesuai target
290	Persentase pendidik SMP memiliki sertifikat pendidik	100	100	%	Sesuai target
291	Persentase peningkatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Formal Berprestasi	9	10	%	Sudah melampaui target 2020 (9,09%) dan target akhir RPJMD (7,14%)
292	Persentase peningkatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD/Dikmas Berprestasi	9	6	%	Belum mencapai target 2020 (8,33%) dpe target akhir RPJMD (6,83%)
293	Persentase Peningkatan Satuan Pendidikan SD Berprestasi	12	13	%	Sesuai target 2020 (13%), belum mencapai target akhir RPJMD (100%)
294	Persentase peningkatan Satuan Pendidikan SMP Berprestasi	17	14	%	Sesuai target 2020 (14%) belum mencapai target akhir RPJMD (100%)
295	Persentase Peningkatan Siswa SD Berprestasi	9	0	%	Belum mencapai target 2020 (9%) dan target akhir RPJMD (67%)
296	Persentase peningkatan Siswa SMP Berprestasi	12	3	%	Belum mencapai target 2020 (12,5%), dan target akhir RPJMD (51,43%)
297	Persentase satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki tenaga penunjang lainnya	100	100	%	Sesuai target
298	Persentase satuan pendidikan non formal terakreditasi	16	18	%	Sesuai target 2020 (18%),dan belum mencapai target akhir RPJMD (25%)
299	Persentase satuan pendidikan SD memiliki tenaga penunjang lainnya	80	100	%	Sesuai target
300	Persentase Satuan Pendidikan SD Terakreditasi	100	100	%	Sesuai target
301	Persentase satuan pendidikan SMP memiliki tenaga penunjang lainnya	100	100	%	Sesuai target
302	Persentase Satuan Pendidikan SMP Terakreditasi	93,36	95,87	%	Sudah melampaui target 2020 (95%) dan target akhir RPJMD (100%)
303	Persentase Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	77,64	71,64	%	Belum mencapai target 2020 (86,5%) dan target akhir RPJMD (88%)
304	Persentase Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	97,58	61,99	%	Belum mencapai target 2020 (89%) dan target akhir RPJMD (90,5%)
305	Persentase siswa PAUD yang mendapat 1 (satu) set alat mewarnai minimal berjumlah 12 (dua belas) warna dalam kondisi baru tiap semester	100	100	%	Sesuai target
306	Persentase siswa PAUD yang mendapat 6 enam buah buku gambar	100	100	%	Sesuai target

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian		Satuan	Intepretasi
		2019	2020		
	dalam kondisi baru tiap semester				
307	Persentase siswa pendidikan kesetaraan mendapat 1 (satu) set perlengkapan belajar berupa buku tulis dan alat tulis dalam kondisi baru per semester	100	100	%	Sesuai target
308	Persentase siswa pendidikan kesetaraan yang mendapat 1 (satu) paket modul belajar sesuai dengan kurikulum per tahun	100	100	%	Sesuai target
309	Persentase siswa pendidikan menengah yang mendapat 1 (satu) paket buku teks pelajaran sesuai dengan kurikulum per tahun	100	100	%	Sesuai target
310	Persentase siswa pendidikan menengah yang mendapat 1 (satu) set perlengkapan belajar berupa buku tulis dan alat tulis dalam kondisi baru per semester	100	100	%	Sesuai target
311	Persentase siswa sekolah dasar yang mendapat 1 satu paket buku teks pelajaran sesuai dengan kurikulum per tahun	100	100	%	Sesuai target
312	Persentase siswa sekolah dasar yang mendapat 1 (satu) set perlengkapan belajar berupa buku tulis dan alat tulis dalam kondisi baru per semester	100	100	%	Sesuai target
313	Persentase tenaga penunjang lainnya pada satuan pendidikan kesetaraan memiliki ijazah minimal SMA/sederajat	100	100	%	Sesuai target
314	Persentase tenaga penunjang lainnya pada satuan pendidikan SD memiliki ijazah minimal SMA/sederajat	100	100	%	Sesuai target
315	Persentase tenaga penunjang lainnya pada satuan pendidikan SMP memiliki ijazah minimal SMA/sederajat	100	100	%	Sesuai target
316	Persentase tutor pendidikan kesetaraan memiliki jasah minimal S1/DIV	100	100	%	Sesuai target
317	Pesentase kepala satuan pendidikan SMP memiliki sertifikat pendidik	100	100	%	Sesuai target
318	Rasio Guru terhadap murid PAUD	19,3	18		Sesuai terget 2020 (18), belum mencapai target akhir RPJMD (15)

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian		Satuan	Intepretasi
		2019	2020		
319	Rasio Guru terhadap murid SD	18,86	15,89		Sesuai target 2020 (15,89) dan belum mencapai target akhir RPJMD (19,17)
320	Rasio Guru terhadap murid SMP	19,52	18,1		Sesuai target 2020 (18,1) dan belum mencapai target akhir RPJMD (19,57)
	Pendidikan dan Pelatihan				
321	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	0,083	0,09	%	Belum mencapai target 2020 (0,064%), belum mencapai target akhir RPJMD (0,378%)
	Penelitian dan Pengembangan				
322	Persentase pemanfaatan hasil Kelitbangan	50	66,67	%	Melampaui target 2020 (62%), belum mencapai target akhir RPJMD (70%)
	Pengawasan				
323	Indeks Persepsi Korupsi	3,38	3,73		Melampaui target 2020 (3,5%), belum mencapai target akhir RPJMD (3,75%)
324	Persentase tindak lanjut temuan BPK yang diselesaikan	90	94	%	Melampaui target 2020 (78%), belum mencapai target akhir RPJMD (85%)
325	Persentase tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan APIP yang diselesaikan	60	42	%	Belum mencapai target 2020 (72%) dan target akhir RPJMD (78%)
	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				
326	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15 - 19 tahun) per 1000 perempuan usia 15 - 19 tahun (ASFR 15 - 19 tahun)	0,41	1,36	%	Belum mencapai target 2020 (0,28%) dan target akhir RPJMD (0,24%)
327	Angka Kelahiran Total TFR	2,31	2,1	Orang	Melampaui target tahun 2020 (2,28) dan target akhir RPJMD (2,25)
328	Angka pemakaian kontrasepsi CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49 tahun	75,25	73,67	%	Belum mencapai target 2020 (76,39%) dan target akhir RPJMD (76,89%)
329	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	57	79,99	%	Melampaui target 2020 (69%) dan target akhir RPJMD (70%)
330	Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber KB	78,81	76,27	%	Belum mencapai target 2020 (81,31%) dan target akhir RPJMD (82,81%)
331	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	57	80,92	%	Melampaui target 2020 (59%) dan target akhir RPJMD 60%)
332	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	5770	6815	Orang	Melampaui target 2020 (5606 orang) dan target akhir RPJMD (5550 orang)
333	Jumlah kebijakan (Perda /Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	1	0	aturan	Belum mencapai target 2020 dan target akhir RPJMD yaitu 1 aturan
334	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	0,87	1,8	%	Belum mencapai target 2020 (0,85%), dan target akhir RPJMD (0,82%)
335	Persentase Keluarga Prasejahtera dan Keluarga Sejahtera 1	47	74,64	%	Belum mencapai target 2020 (46,8%) dan target akhir RPJMD (46,5%)

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian		Satuan	Intepretasi
		2019	2020		
336	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	36,75	44,3	%	Melampaui target 2020 (39%) dan target akhir RPJMD (42%)
337	Persentase Perangkat Daerah (Dinas / Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	17	23	%	Belum mencapai target 2020 (25%) dan target akhir RPJMD (35%)
338	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	6	8	%	Sesuai target 2020, belum mencapai target akhir RPJMD (10%)
339	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	70	35,73	%	Belum mencapai target 2020 (70%) dan target akhir RPJMD (74%)
340	Persentase wilayah yang terjangkau pelayanan tenaga lini lapangan KB	100	100	%	Sesuai target
341	Rasio Akseptor KB	73	73,67	%	Melampaui target 2020, belum mencapai target akhir RPJMD (74%)
342	Rasio Petugas Pembina KB desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	100	100	%	Sesuai target
343	Rata-rata jumlah anak perkeluarga	2,8	1,4	anak	Melampaui target 2020 (2,5 anak) dan target akhir RPJMD (2,3 anak)
	Perdagangan				
344	Cakupan bina kelompok pedagang/ usaha informal	1118	96	Kelom-pok	Melampaui target 2020 (54 kelompok), belum mencapai target akhir RPJMD (270 kelompok)
345	Jumlah Gula Kelapa Terekspor	6000	12.233,82	Ton	Melampaui target 2020 (12.000 ton), belum mencapai target akhir RPJMD (30.000 ton)
346	Nilai Ekspor Bersih Perdagangan	22.691.050	47.459.487,67	$ USD	Melampaui target 2020 ($US 20 juta) dan target akhir RPJMD ($US 20 juta)
347	Persentase Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor	4,44	-3,70	%	Belum mencapai target 2020 (4,48%) dan target akhir RPJMD (4,52%)
	Perencanaan				
348	Kesesuaian program antar dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran perangkat daerah	100	100	%	Sesuai target
349	Persentase kesesuaian capaian kinerja OPD terhadap RPJMD	40,79	44,03	%	Belum mencapai target 2020 (70%) dan target akhir RPJMD (85%)
350	Persentase kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	100	100	%	Melampaui target 2020 (91%) dan target akhir RPJMD (95%)
351	Persentase terpenuhinya aspek kualitas perencanaan	87,5	91,67	%	Melampaui target 2020 (91%), dan belum mencapai target akhir RPJMD (95%)
	Perhubungan				
352	Persentase ketersediaan terminal	37,5	37,5	%	Belum mencapai target 2020 (50 %) dan target akhir RPJMD (62,5%)

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian		Satuan	Intepretasi
		2019	2020		
353	Persentase pemasangan rambu-rambu	36	43	%	Sesuai target 2020 (43%), belum memenuhi target akhir RPJMD (48%)
354	Prosentase ketersediaan infrastruktur lalu lintas angkutan jalan	39	52	%	Sesuai target 2020 (52%), belum memenuhi target akhir RPJMD (60%)
355	Rasio ijin trayek	0,064	0,071		Sesuai target 2020 (0.071), belum memenuhi target akhir RPJMD (0.077)
	Perindustrian				
356	Cakupan bina kelompok pengrajin	79	153	Kelompok	Melampaui target 2020 (66 kelompok), dan belum mencapai target akhir RPJMD (331 kelompok)
357	Persentase pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah (IKM)	1,69	1,73	%	Melampaui target 2020 (1,34%), dan belum mencapai target akhir RPJMD (331 kelompok)
358	Persentase Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	7,99	-0,05	%	Belum mencapai target 2020 (5,82%) dan target akhir RPJMD (5,86%)
	Perpustakaan				
359	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	27.636	37.364	judul buku	Melampaui target 2020 (36.390 judul buku) dan target akhir RPJMD (36.540 judul buku)
360	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	59.313	61.335	Buku	Melampaui target 2020 (56.250 buku), belum mencapai target akhir RPJMD (61.344 buku)
361	Persentase jumlah perpustakaan terbina	5,55	30,64	%	Melampaui target 2020 (26,38%), belum mencapai target akhir RPJMD (47,22%)
362	Persentase peningkatan budaya baca masyarakat	2,8	37,25	%	Melampaui target 2020 (2,88%) dan target akhir RPJMD (2,93%)
363	Persentase peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan daerah	4,8	3,56	%	Belum mencapai target 2020 (5,93%), belum mencapai target akhir RPJMD (7,89%)
364	Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk	0,048	0,48		Melampaui target 2020 (0,053) dan target akhir RPJMD (0,053)
365	Rata-rata jumlah pengunjung perpustakaan	446	609	Orang	Belum mencapai target 2020 (1.083 orang) belum mencapai target akhir RPJMD (1.365 orang)
	Persandian				
366	Persentase OPD yang menggunakan layanan keamanan informasi	21	43	%	Sesuai target 2020 (43%), belum mencapai target akhir RPJMD (100%)
367	Standarisasi Keamanan Data ISO 27001	17	17	anek	Sesuai target
368	Standarisasi pusat data/data center	17	17	anek	Sesuai target
	Pertanahan				
369	Persentase luas tanah milik Pemkab yang bersertifikat	40,44	50,33	%	Melampaui target 2020 (38,51%) dan target akhir RPJMD (39,47%)
	Pertanian				
370	Persentase Peningkatan Produksi Olahan Hasil Peternakan	6,98	2	%	Sesuai target 2020 (2%), belum mencapai target akhir RPJMD (10%)

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian		Satuan	Intepretasi
		2019	2020		
371	Persentase Peningkatan Produksi Peternakan	6,19	4,99	%	Melampaui target 2020 (3%), belum mencapai target akhir RPJMD (15%)
372	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pertanian	1,48	-1.36	%	Belum mencapai target 2020 (1%), dan belum mencapai target akhir RPJMD (5%)
373	Produksi Daging	19.471	23.429,99	Ton	Melampaui target 2020 (22.357 ton) dan belum mencapai target akhir RPJMD (115.241 ton)
374	Produksi olahan hasil peternakan	534,91	545,61	Ton	Melampaui target 2020 (520.21 ton) dan belum mencapai target akhir RPJMD (2.654,06 ton)
375	Produksi Susu	5.594.500	4.015.464	Liter	Melampaui target 2020 (3.860.000 liter) dan belum mencapai target akhir RPJMD (19.897.000 liter)
376	Produksi tanaman Cabai	1.376,2	2.000	Ton	Melampaui target 2020 (1.832,5 ton) dan belum mencapai target akhir RPJMD (9.244,05 1 ton)
377	Produksi tanaman cengkeh	495,36	523,02	Ton	Melampaui target 2020 (489.97 ton) dan belum mencapai target akhir RPJMD (2.950,17 ton)
378	Produksi tanaman Durian	15.559,6	6.159,18	Ton	Belum mencapai target 2020 (9.879,02 ton), dan target akhir RPJMD (49.648,07 ton)
379	Produksi tanaman Jagung	33.731,73	31.784,58	Ton	Melampaui target 2020 (13.400 ton), dan belum mencapai target akhir RPJMD (67.677 ton)
380	Produksi tanaman Kedelai	1.262,66	298,51	Ton	Belum mencapai target 2020 (1.609,34 ton), dan belum mencapai target akhir RPJMD (8.128,00 ton)
381	Produksi tanaman kelapa dalam	14.108.96	14.330,93	Ton	Melampaui target 2020 (14.174,53 ton) dan belum mencapai target akhir RPJMD (71.563,81 ton)
382	Produksi tanaman kelapa deres	54.985,38	55.884,43	Ton	Melampaui target 2020 (55.388,89 ton) dan belum mencapai target akhir RPJMD (279.792,09 ton)
383	Produksi tanaman kopi	196,16	183,04	Ton	Melampaui target 2020 (146,34 ton) dan belum mencapai target akhir RPJMD (739,11 ton)
384	Produksi tanaman lada	79,21	90,22	Ton	Melampaui target 2020 (60,55 ton) dan belum mencapai target akhir RPJMD (305.81 ton)
385	Produksi tanaman Padi	368.957,25	371.827,14	Ton	Belum mencapai target 2020 (425.000 ton), belum mencapai target akhir RPJMD (22.500.000 ton)
386	Produksi tanaman pala	52,18	54,45	Ton	Melampaui target 2020 (41,62 ton) dan belum mencapai target akhir RPJMD (221.60 ton)
387	Produksi tanaman Pisang	30.781,4	31.375,6	Ton	Melampaui target 2020 (27.599,79 ton) dan belum mencapai target akhir RPJMD (139.066,13 ton)

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian		Satuan	Intepretasi
		2019	2020		
388	Produksi tanaman tembakau	79,16	77,26	Ton	Melampaui target 2020 (14.56 ton) dan target akhir RPJMD (73.53 ton)
389	Produksi Telur	16.910,4	18.309,74	Ton	Melampaui target 2020 (17.724 ton) dan belum mencapai target akhir RPJMD (91.361 ton)
390	Produktivitas tanaman Jagung	7,50	6,12	ton / ha	Belum mencapai target 2020 (6,46 ton/ha), belum mencapai atrget akhir RPJMD (6,6 ton/ha)
391	Produktivitas tanaman Kedelai	1,28	1,25	ton / ha	Belum mencapai target 2020 (1,38 ton/ha), dan belum mencapai target akhir RPJMD (1,43 ton/ha)
392	Produktivitas tanaman Padi	5,71	5,81	ton / ha	Belum mencapai target 2020 (5,89 ton/ha), belum mencapai atrget akhir RPJMD (6,25 ton/ha)
393	Rasio jumlah petani pengguna safety belt	0	0,25	%	Sesuai target 2020 (0,25%), belum mencapai target akhir RPJMD (1%)
	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman				
394	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	78,47	78,76	%	Sesuai target 2020 (78,76%) dan melampaui target akhir RPJMD (77,58%)
395	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	52,03	53,6	%	Belum mencapai target 2020 (53,77%) dan target akhir RPJMD (59,84%)
396	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	74,07	100	%	Melampaui target 2020 (81,48%) dan target akhir RPJMD (96,30%)
397	Jumlah IPAL Komunal	58	72	Unit	Sesuai target 2020 (72),dan belum mencapai target akhir RPJMD (87 unit)
398	Persentase areal kawasan kumuh	20,19	20,187	%	Melampaui target 2020 (20,23%) dan target akhir RPJMD (20,19%)
399	Persentase drainase permukiman dalam kondisi baik	10,59	11,38	%	Belum mencapai target 2020 (11,48%) dan target akhir RPJMD (11,63%)
400	Persentase lingkungan pemukiman kumuh kawasan perkotaan	7,84	7,8	%	Melampaui target 2020 (8,16%) dan target akhir RPJMD (7,84%)
401	Persentase Lingkungan Permukiman yang layak huni	84,27	85,2	%	Melampaui target 2020 (85,17%) dan belum mencapai target akhir RPJMD (88,17%)
402	Persentase penanganan permukiman kumuh	4,87	0,44	%	Belum mencapai target 2020 (6,09%) dan target akhir RPJMD (9,75%)
403	Persentase permukiman yang tertata	7,98	9,32	%	Belum mencapai target 2020 (9,45%) dan target akhir RPJMD (10,18%)
404	Persentase rumah sehat sesuai standar	75,37	78,76	%	Melampaui target 2020 (76,81%) dan target akhir RPJMD (77,58%)
405	Persentase rumah tinggal berakses sanitasi	85,93	88,77	%	Melampaui target 2020 (86%) dan belum mencapai target akhir RPJMD (92%)
406	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	72,18	74,43	%	Melampaui target 2020 (73,37%) dan belum mencapai target akhir RPJMD (77,08%)

407	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan	1,3	1,26	%	Melampaui target 2020 (1,34%) dan belum mencapai target akhir RPJMD (0)
408	Rasio permukiman layak huni	79,81	79,813	%	Belum mencapai target 2020 (79,82%) dan target akhir RPJMD (80,10%)
409	Rasio rumah layak huni	78,47	78,76	%	Melampaui target 2020 (78,34%), belum mencapai target akhir RPJMD (83,95%)
410	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk	36,38	35,33		Belum mencapai target 2020 (39,42%) dan target akhir RPJMD (46,18%)
	Sosial				
411	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	52,45	35,94	%	Belum mencapai target 2020 dan target akhir RPJMD (100%)
412	Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	67,67	18,41	%	Belum mencapai target 2020 dan target akhir RPJMD (100%)
413	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100	100	%	Sesuai target
414	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan mengunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	100	100	%	Sesuai target
415	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100	100	%	Sesuai target
416	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	56,77	19,12	%	Belum mencapai target 2020 dan target akhir RPJMD (100%)
417	Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	9,37	33	%	Melampaui target 2020 (21,47%), dan belum mencapai target akhir RPJMD (100%)
418	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	15,62	8,33	%	Sesuai target 2020 (8,33%) dan target akhir RPJMD (41,67%)
419	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	9,44	15,66	%	Belum mencapai target 2020 (39,58%) dan target akhir RPJMD (60,18%)
420	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	95,36	26,91	%	Belum mencapai target 2020 (100%) dan target akhir RPJMD (100%)
421	Persentase PMKS/PPKS yang memperoleh bantuan sosial	43,19	57,26	%	Melampaui target 2020 (51,51), dan target akhir RPJMD (51,67%)
422	Persentase PMKS/PPKS yang tertangani	43,49	57,36	%	Melampaui target 2020 (52,15), dan target akhir RPJMD (52,33%)
	Statistik				

423	Persentase Data Informasi dan Statistik Yang Terpublikasi dengan baik	100	100	%	Sesuai target
	Tenaga Kerja				
424	Angka sengketa pengusaha pekerja per tahun	0,88	9,38		Sudah melampaui target 2020 (6,16%) dan target akhir RPJMD (6,16%)
425	Persentase besaran pencari kerja yang terdaftar dan ditempatkan	49,58	48,75	%	Belum mencapai target 2020 (57%) dan belum mencapai target akhir RPJMD (63%)
426	Persentase kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama	75	54,54	%	Belum mencapai target 2020 (80%) dan belum mencapai target akhir RPJMD (100%)
	Transmigrasi				
427	Persentase transmigran yang ditempatkan	100	0	%	Belum mencapai target 2020 (100%) dan belum mencapai target akhir RPJMD (100%)

Untuk analisis pencapaian target tujuan pembangunan berkelanjutan/TPB/SDGs, dalam KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 capaian tujuan pembangunan berkelanjutan/TPB/SDGs dikelompokan dalam 6 (enam) kategori, yaitu:

1. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional (SS);
2. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional (SB);
3. Indikator TPB tidak ada target dalam RPJMD daerah tetapi tercapai (TTC);
4. Indikator TPB tidak ada target dalam RPJMD dan belum tercapai (TTT);
5. Indikator TPB yang tidak/belum ada data (NA); dan
6. Indikator TPB tidak sesuai dengan karakteristik daerah (TKD).

Jumlah indikator TPB di Kabupaten Banyumas adalah 222 indikator, meliputi 16 tujuan TPB. Tujuan 14 “Konservasi dan pemanfataan sumber daya laut, samudera dan maritim” tidak sesuai karakteristik Kabupaten Banyumas dan juga bukan merupakan kewenangan kabupaten. Berdasarkan hasil perhitungan dan pengolahan data menunjukkan bahwa indikator TPB di Kabupaten Banyumas yang telah dilaksanakan dalam RPJMD dan mencapai target nasional telah mencapai 28% (62 indikator) dari total 222 indikator yang menjadi kewenangan kabupaten. Berikut proporsi capaiannya sebagaimana tabel dan gambar berikut:

Tabel 2.106
Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

No	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	INDIKATOR	SS	SB	TTC	TTT	NA	TKD
T01	Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di mana pun	24	10	6	2	3	3	0
T02	Menghilangkan kelaparan, pencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan	11	3	1	6	1	0	0
T03	Menjamin kehidupan yang sehat dan	34	9	1	10	9	5	0

No	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	INDIKATOR	SS	SB	TTC	TTT	NA	TKD
	meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia							
T04	Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua	15	5	4	5	0	1	0
T05	Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan	14	5	2	2	0	5	0
T06	Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua	18	5	4	1	5	2	1
T07	Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua	2	0	0	0	0	1	1
T08	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua	19	4	3	3	4	5	0
T09	Membangun infrastruktur yang Tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi	13	2	0	4	0	3	4
T10	Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara	11	1	2	2	0	3	3
T11	Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, Tangguh, dan berkelanjutan	13	2	1	3	2	1	4
T12	Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan	5	0	0	1	0	4	0
T13	Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya	2	0	0	1	1	0	0
T14	Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan	0	0	0	0	0	0	0

No	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	INDIKATOR	SS	SB	TTC	TTT	NA	TKD
T15	Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfataan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati	4	0	0	1	3	0	0
T16	Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan	21	12	2	1	1	5	0
T17	Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan	16	4	1	4	5	1	1
	JUMLAH	**222**	**62**	**27**	**46**	**34**	**39**	**14**
			28%	**12%**	**21%**	**15%**	**18%**	**6%**

Sumber: KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2023, 2020

Keterangan:
SS = Dilaksanakan dalam RPJMD dan telah mencapai target
SB = Dilaksanakan dalam RPJMD tetapi belum mencapai target
TTC = Belum terdapat dalam RPJMD tetapi mencapai target
TTT = belum terdapat dalam RPJMD dan belum mencapai target
NA = Belum ada data
TKD = Tidak sesuai dengan Konteks Daerah

Dari 208 indikator TPB yang menjadi wewenang dan relevan Pemerintah Kabupaten Banyumas telah melaksanakan **89 indikator** dalam RPJMD, sebanyak 62 indikator (28%) di antaranya sudah mencapai target nasional yang ditetapkan dalam Perpres No. 59 Tahun 2017, sisanya yaitu 27 indikator (12%) belum mencapai target nasional yang ditetapkan. Sebanyak 80 indikator (36%) terdapat data dari OPD tetapi belum menjadi indikator dalam RPJMD, dimana 46 indikator (21%) telah tercapai sesuai target nasional. Sisanya 53 indikator (24%) tidak terdapat data dengan rincian 14 indikator tidak sesuai karakteristik Kabupaten Banyumas dan sisanya 39 indikator tidak ditemukan data dari dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas.

Pengkategorian capaian indikator TPB bertujuan untuk memetakan isu strategis yang perlu mendapatkan perhatian dalam pencapaian tujuan pembangunan di Kabupaten Banyumas pada periode RPJMD. Isu strategis yang perlu mendapat perhatian utama adalah

target-target TPB yang memiliki indikator SB, TTT, dan NA yang menunjukkan banyaknya indikator TPB yang belum dilaksanakan dan sudah dilaksanakan namun belum mencapai target nasional, serta perlu adanya penyusunan data sebagai baseline penentuan target TPB. Target TPB yang semua indikatornya sudah mencapai target nasional (SS) juga perlu terus dijalankan untuk mempertahankan capaian indikator tersebut. Berikut grafik capaian TPB Kabupaten Banyumas.

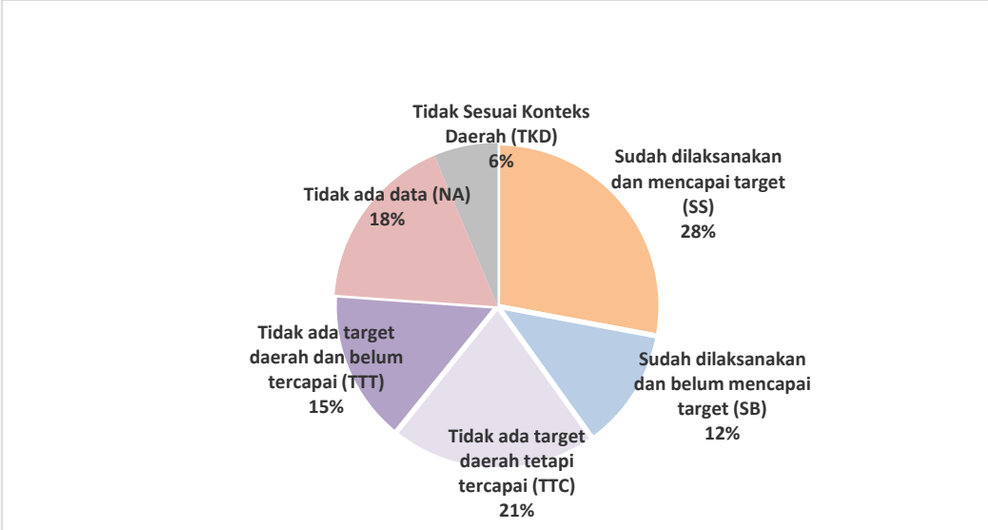

Gambar 2.47
Komposisi Capaian Indikator TPB Kabupaten Banyumas 2020
Sumber: KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023, 2020

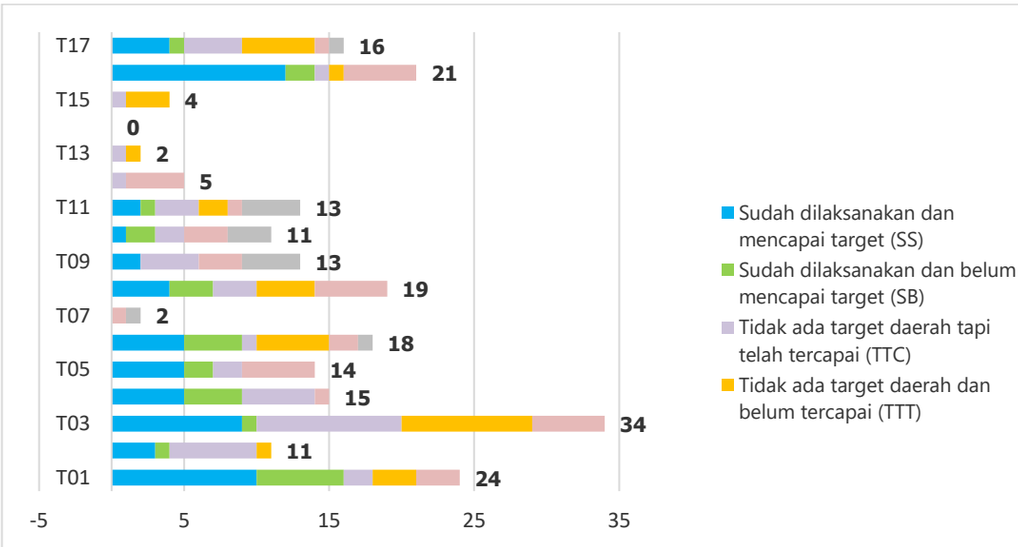

Gambar 2.48
Rincian Capaian Indikator TPB Kabupaten Banyumas 2020

Sumber: KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023, 2020

Berdasarkan penilaian capaian TPB indikator pembangunan di Kabupaten Banyumas terhadap target nasional, maka terdapat 4 TPB yang memiliki indikator yang di analisis terbanyak dan juga memiliki target yang telah tercapai terbanyak yaitu:

- Tujuan 3 yaitu menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia dengan total indikator yang dinilai sebanyak 34 indikator dan sebanyak 18 indikator (52%)

telah mencapai target dan 11 indikator (32%) belum mencapai target dan sisanya 5 indikator belum memiliki data.

- Tujuan 1 yaitu mengakhiri segala bentuk kemiskinan di mana pun dengan indikator yang dinilai sebanyak 24 indikator dan sebanyak 12 indikator (50%) telah mencapai target nasional, 9 indikator (37%) belum mencapai target dan sisanya 3 indikator belum memiliki data.
- Tujuan 16 yaitu menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan dengan total indikator yang dinilai sebanyak 21 indikator dengan capaian yang telah mencapai target sebanyak 13 indikator (61%), 3 indikator (14%) belum mencapai target dan sisanya 5 indikator belum memiliki data.

Hampir seluruh tujuan telah memiliki indikator dengan capaian melebihi target nasional, meskipun proporsinya berbeda-beda. Sedangkan tujuan yang belum memiliki indikator dalam kelompok tercapai adalah tujuan 7 yaitu menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua yang belum memiliki indikator yang mencapai target nasional karena keterbatasan data yang dimiliki untuk bauran energi terbarukan. Meskipun secara kewenangan data tersebut ada di pusat melalui Kementerian ESDM tetapi indikator tersebut didorong untuk dijalankan oleh pemerintah kabupaten/kota dalam rangka meningkatkan produksi dan penggunaan energi terbaharukan sesuai potensi dan kewenangan masing-masing wilayah. Khusus untuk tujuan 14 melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan tidak masuk dalam analisis karena tidak sesuai dengan kewenangan dan konteks Kabupaten Banyumas.

Hasil analisis pencapaian target tujuan pembangunan berkelanjutan sampai dengan tahun 2019 disajikan dengan tabel berikut:

Tabel 2.107
Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Banyumas

NO. INDIKA-TOR	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017)	INDIKATOR RPJMD	2017	2018	2019	STATUS TPB	OPD
1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Menurun menjadi 7-8%	Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan	17,05	13,5	12,53	SB	BAPPEDA LITBANG
1.3.1. (a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	Meningkat menjadi 95%	Jaminan Kesehatan (BPJS, Jamkesda)	100	NA	100	SS	DINKES
1.3.1. (b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Meningkat menjadi 62,4 juta pekerja formal; 3,5 juta pekerja informal	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	72,74	NA	100	SS	DINAKER KOP UKM
1.3.1. (c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	Meningkat menjadi 17,12%	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	9,44	NA	98,36	SS	DINSOS PERMAS DES
1.3.1. (d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	Menurun menjadi 2,8 juta	Persentase PMKS/PPKS yang memperoleh bantuan sosial		27 Kec	27 Kec	SS	DINSOS PERMA DES
1.4.1. (a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya	Meningkat menjadi 70%	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan	100	100	100	SS	DINKES

NO. INDIKA-TOR	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017)	INDIKATOR RPJMD	2017	2018	2019	STATUS TPB	OPD
	di fasilitas kesehatan.		yang memiliki kompetensi kebidanan					
1.4.1. (b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	Meningkat menjadi 63%.	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	100	100	100	SS	DINKES
1.4.1. (c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Meningkat menjadi 65%	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49		70	75,48	TTC	DINKES
1.4.1. (d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	Meningkat menjadi 100%	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	70,54	69,51	74,49	SB	DINPER KIM
1.4.1. (e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	Meningkat menjadi 100%	Persentase rumah tinggal bersanitasi	64,5	82,88	87,79	SB	DINPER KIM
1.4.1. (g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/sederajat.	Meningkat menjadi 94,78%	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	98,75	98,27	98,77	SS	DINDIK
1.4.1. (h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/sederajat.	Meningkat menjadi 82,2%	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	81,41	80,21	80,73	SB	DINDIK
1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	Meningkat menjadi 77,4%.	Cakupan penerbitan akta kelahiran		90,0	93,0	SS	DINDUK CAPIL
1.4.1. (k)	Persentase rumah tangga	Meningkat	Persentase rumah	93,01	NA	99,74	TTT	DPU

NO. INDIKA-TOR	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017)	INDIKATOR RPJMD	2017	2018	2019	STATUS TPB	OPD
	miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.	menjadi 100%	tangga pengguna listrik					
1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Menurun	Korban bencana alam dan bencana sosial (KK)	226			TTT	BPBD
1.5.1. (a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	Meningkat menjadi 39 daerah		4			SB	BPBD
1.5.1. (b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.	Meningkat menjadi 151 ribu	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100%			SS	BPBD
1.5.1. (c)	Pendampingan psikososial korban bencana sosial.	Meningkat menjadi 81,5 ribu	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100%			SS	BPBD
1.5.1. (d)	Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. (SMAB=Sekolah/ Madrasah Aman Bencana)	Meningkat menjadi 450		200			SB	BPBD
1.5.1. (e)	Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.	Menurun menjadi 118,6	Desa tangguh bencana			207,2	TTT	BPBD
1.5.2. (a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	Menurun					NA	BPBD
1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan	ada		Belum ada	Ada	Ada	TTC	BPBD

NO. INDIKA-TOR	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017)	INDIKATOR RPJMD	2017	2018	2019	STATUS TPB	OPD
	daerah.							
1.a.1*	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.	Meningkat	Anggaran untuk program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)				NA	BKAD
1.a.2*	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.	Meningkat	Persentase belanja pendidikan (20%); Persentase belanja kesehatan (10%)				NA	BKAD
2.1.1*	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).	Menurun	Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum (standar yang digunakan Indonesia 2.100 Kkal/kapita/hari)		6%	6%	TTC	DINPER TAN KP
2.1.1. (a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pad a anak balita.	Menurun menjadi 17%	Prevalensi balita gizi kurang	5,6	0,07	0,07	SS	DINKES
2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada	Menurun	Penanganan daerah rawan pangan	27	62	63	SB	DINPER TAN KP

NO. INDIKA-TOR	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017)	INDIKATOR RPJMD	2017	2018	2019	STATUS TPB	OPD
	Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.							
2.1.2. (a)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.	Menurun menjadi 8,5 %	Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum (standar yang digunakan Indonesia 2.100 Kkal/kapita/hari)		6%	6%	TTC	DINPER TAN KP
2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	Menurun			20,4	15,96	TTC	DINKES
2.2.1.(a)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.	Menurun menjadi 28%			20,4	15,96	TTC	DINKES
2.2.2*	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	Menurun	Persentase balita gizi buruk/kurang gizi	5,6	0,07	0,07	SS	DINKES
2.2.2.(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil.	Menurun menjadi 28%		73,41	NA	16,53	TTC	DINKES
2.2.2.(b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	Meningkat menjadi 50%		51,84	NA	66,05	TTC	DINKES
2.2.2.(c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	Meningkat menjadi: skor PPH 92,5; tingkat konsumsi ikan 54,5 kg/kapita/	Konsumsi ikan		90,2	90,8	TTT	DINPER TAN KP

NO. INDIKA-TOR	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017)	INDIKATOR RPJMD	2017	2018	2019	STATUS TPB	OPD
		tahun						
2.3.1*	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).	Meningkat		100,30	100,33	107,00	SS	DINPERTAN KP
3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).	Menurun menjadi 306	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	54,16	67,87	37,62	SS	DINKES
3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	Meningkat menjadi 95%	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	100	100	100	SS	DINKES
3.1.2.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Meningkat menjadi 85 %	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	100	100	100	SS	DINKES
3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	Menurun	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	8,28	8,94	9,18	SB	DINKES
3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	Menurun	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	5,03	5,81	4,14	TTC	DINKES
3.2.2.(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	Menurun menjadi 24	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	8,43	7,84	7,41	SS	DINKES
3.2.2.(b)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	Meningkat menjadi 95%	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	100	100	100	SS	DINKES

NO. INDIKA-TOR	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017)	INDIKATOR RPJMD	2017	2018	2019	STATUS TPB	OPD
3.3.1.(a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	Menurun menjadi <0,5%	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi		0,22	0,15	TTC	DINKES
3.3.2.(a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	Menurun menjadi 245	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	148,2	168	341,8	SS	DINKES
3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.	Menurun	Angka kejadian Malaria	3			TTT	DINKES
3.3.3.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria.	Meningkat menjadi 300		Endemis malaria	Endemis Rendah	Endemis Rendah	TTT	DINKES
3.3.4.(a)	Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B.	Meningkat		0	0,9	1,9	TTC	DINKES
3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).	Menurun		37			TTT	DINKES
3.3.5.(a)	Jumlah provinsi dengan eliminasi Kusta.	Meningkat menjadi 34 provinsi		termasuk			TTT	DINKES
3.3.5.(b)	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I).	Meningkat menjadi 35.		terdapat kasus filariasis			TTT	DINKES
3.4.1.(a)	Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun.	Menurun menjadi 5,4%		3,28			TTC	DINKES
3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.	Menurun menjadi 24,3%		26	17	33	TTT	DINKES
3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	Menurun		13,31	12,29	8,42	TTC	DINKES

NO. INDIKA-TOR	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017)	INDIKATOR RPJMD	2017	2018	2019	STATUS TPB	OPD
3.4.2*	Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri.	Menurun					NA	DINSOS PERMAS DES
3.4.2.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.	Meningkat menjadi 280		Belum ada	Belum ada	Belum ada	TTT	DINKES
3.5.1.(e)	Prevalensi penyalahgunaan narkoba.	Menurun menjadi angka 0,02%					NA	DINSOS PERMAS DES
3.5.2*	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir.	Menurun					NA	DINSOS PERMAS DES
3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	Meningkat menjadi 66%		97,12	75,39	74,9	TTC	DPPKB P3A
3.7.1.(a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Meningkat menjadi 65%	Angka pemakaian kontrasepsi/ CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49	97,12	75,39	74,9	TTC	DPPKB P3A
3.7.1.(b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.	Meningkat menjadi 23,5%	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	35,74	37,38	42,54	TTC	DINKES
3.7.2*	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility	Menurun menjadi 38	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000		0,32	0,0	TTC	DINKES

NO. INDIKA-TOR	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017)	INDIKATOR RPJMD	2017	2018	2019	STATUS TPB	OPD
	Rate/ASFR).		perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19)					
3.7.2.(a)	Total Fertility Rate (TFR).	Menurun menjadi 2,28	Total Fertility Rate (TFR)		2,30	2,10	TTC	DINKES
3.8.1.(a)	Unmet need pelayanan kesehatan.	Menurun menjadi 9,91%		9,43			SS	DINKES
3.8.2*	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.	Meningkat	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan		100	87	TTT	DINKES
3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	Meningkat menjadi minimal 95%	Persentase penduduk berdasarkan jaminan kesehatan	100	NA	100	SS	DINKES
3.9.3.(a)	Proporsi kematian akibat keracunan.	Menurun					NA	DINKES
3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	Menurun		3,28			TTT	DINKES
3.b.1.(a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	Meningkat					NA	DINKES
3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	Meningkat	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	0,23	0,35	0,26	SS	DINKES
4.1.1*	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.	Meningkat					NA	DINDIK
4.1.1.(a)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	Meningkat menjadi 84,2%			99	100	TTC	DINDIK
4.1.1.(b)	Persentase SMP/MTs	Meningkat			93	93,36	TTC	DINDIK

NO. INDIKA-TOR	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017)	INDIKATOR RPJMD	2017	2018	2019	STATUS TPB	OPD
	berakreditasi minimal B.	menjadi 81%						
4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat.	Meningkat menjadi 114,09%	Angka partisipasi kasar	108,82	108,12	108,19	SB	DINDIK
4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/sederajat.	Meningkat menjadi 106,94%	Angka partisipasi kasar	103,5	89	80,5	SB	DINDIK
4.1.1.(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.	Meningkat menjadi 8,8 tahun	Angka rata-rata lama sekolah		7,45	7,72	SB	DINDIK
4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	Meningkat menjadi 77,2%	Angka partisipasi kasar	77,23	77,25	77,31	SS	DINDIK
4.4.1*	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	Meningkat	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi		81,45	99,32	TTC	DINAKER KOP UKM
4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/sederajat; (3) SMA/SMK/MA/sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.	Meningkat	APM SD/MI/ SEDERAJAT	98,75	98,27	98,77	SS	DINDIK
4.5.1*			APM SMP/MTs/ SEDERAJAT	81,41	80,21	80,73	SB	DINDIK
4.5.1*			APM SMA/SMK/MA/ SEDERAJAT	60,91	61,49	62,25	TTC	DINDIK
4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	Meningkat menjadi 96,1%	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	99,32	99,32	100	SS	DINDIK
4.6.1.(b)	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.	Meningkat	Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki	99,87	99,32	100	SS	DINDIK

NO. INDIKA-TOR	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017)	INDIKATOR RPJMD	2017	2018	2019	STATUS TPB	OPD
4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).	Meningkat			85,55	85,63	TTC	DINDIK
4.c.1*	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.	Meningkat		89,95		100	SS	DINDIK
5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	bertambah sebanyak 16					NA	DPPKB P3A
5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Menurun	Rasio KDRT	0,019	0,009	0,008	SS	DPPKB P3A
5.2.1.(a)	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	Menurun menjadi kurang dari 20,48%		36,89	35,63	34,37	SB	DPPKB P3A

NO. INDIKA-TOR	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017)	INDIKATOR RPJMD	2017	2018	2019	STATUS TPB	OPD
5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Menurun					NA	DPPKB P3A
5.2.2.(a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	Meningkat menjadi 70%	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	100			SS	DPPKB P3A
5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	Menurun	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya di bawah 20 tahun		5720	5663	SS	DPPKB P3A
5.3.1.(a)	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.	Meningkat menjadi 21 tahun	Rata-rata usia kawin pertama wanita				NA	DPPKB P3A
5.3.1.(b)	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	Menurun menjadi 38 tahun	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19)				NA	DPPKB P3A
5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen	Meningkat	Proporsi kursi yang diduduki perempuan	18	18	22	SS	DPPKB P3A

NO. INDIKA-TOR	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017)	INDIKATOR RPJMD	2017	2018	2019	STATUS TPB	OPD
	tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.		di DPR					
5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	Meningkat			49	49	TTC	BKDD
5.6.1*	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.	Meningkat					NA	DPPKB P3A
5.6.1.(a)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	Menurun menjadi 9,9%	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	9,43			SS	DPPKB P3A
5.6.1.(b)	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	Meningkat menjadi 85%	Persentase penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	79,81	70	45,8	SB	DPPKB P3A
5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	Meningkat	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	67,63	75	79	TTC	DINKOM INFO
6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	Meningkat menjadi 100%	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	70,54	69,51	74,49	SB	DINPER KIM
6.1.1.(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	Meningkat menjadi 118,6 m3/detik			34,67	34,67	TTT	DPU

NO. INDIKA-TOR	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017)	INDIKATOR RPJMD	2017	2018	2019	STATUS TPB	OPD
6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	Meningkat menjadi 100%	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	70,54	69,51	74,49	SB	DINPER KIM
6.2.1.(a)	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	Meningkat					NA	DINPER KIM
6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	Meningkat menjadi 100%	Persentase rumah tinggal bersanitasi		82,88	87,79	SB	DINPER KIM
6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	Meningkat menjadi 45.000 (skala nasional)				87	TTT	DINPER KIM
6.2.1.(d)	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	Menurun				87	TTT	DINPER KIM
6.2.1.(e)	Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.	Meningkat menjadi 438 kabupaten/kota .		11			SB	DINPER KIM
6.2.1.(f)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	Meningkat					NA	DINPER KIM
6.3.1.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja	Meningkat menjadi 409 kabupaten/kota		Ada	Ada	Ada	SS	DINPER KIM

NO. INDIKA-TOR	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017)	INDIKATOR RPJMD	2017	2018	2019	STATUS TPB	OPD
	(IPLT).							
6.3.1.(b)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.	Meningkat		76,72%			TTT	DINPER KIM
6.3.2.(a)	Kualitas air danau.	Meningkat	Peningkatan Indeks Kualitas Air				TKD	DLH
6.3.2.(b)	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	Meningkat	Peningkatan Indeks Kualitas Air	46,94	52	59,33	SS	DLH
6.4.1.(b)	Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri.	Ada		Belum ada	Belum ada	Belum ada	TTT	DLH
6.5.1.(a)	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	Ada		ada	ada	Ada	TTC	BAPPEDA LITBANG
6.5.1.(c)	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.	8 WS		51			SS	DPU
6.5.1.(f)	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.	10 WS (skala nasional)	Dokumen RPDAST	ada	ada	ada	SS	DPU
6.5.1.(g)	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.	Ada		ada	ada	ada	SS	DPU
7.2.1*	Bauran energi terbarukan.	10-16%					NA	DLH
7.3.1*	Intensitas energi primer.	Menurun menjadi 463,2 SBM (skala nasional)					TKD	
8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita.	Meningkat	Pertumbuhan PDRB	6,05	5	6,32	SS	BAPPEDA LITBANG

NO. INDIKA-TOR	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017)	INDIKATOR RPJMD	2017	2018	2019	STATUS TPB	OPD
8.1.1.(a)	PDB per kapita.	Meningkat menjadi lebih dari Rp 50 juta	PDRB per Kapita	25,47	29,00	31,00	SB	BAPPEDA LITBANG
8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	Meningkat	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja	4,48	4,52	4,78	TTC	BAPPEDA LITBANG
8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	Meningkat			34,3	33,91	TTT	DINAKER KOP UKM
8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal.	51%		30,81	65,7	66,09	TTC	DINAKER KOP UKM
8.3.1.(b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.	Meningkat					NA	DINAKER KOP UKM
8.3.1.(c)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.	25%					NA	DINAKER KOP UKM
8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja.	Meningkat		8.303	10.938	11.875	SS	DINAKER KOP UKM
8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	Menurun	Tingkat pengangguran terbuka	5,5	4,19	4,21	SS	DINAKER KOP UKM
8.5.2.(a)	Tingkat setengah pengangguran.	Menurun				28,22	TTT	DINAKER KOP UKM
8.6.1*	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	Meningkat			57	71,2	TTC	DINAKER KOP UKM
8.9.1*	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB.	Meningkat menjadi 8%	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	3,38	3,3	3,33	SB	DINPORA BUDPAR
8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan	Meningkat	Kunjungan wisata	498	498	258	SB	DINPORA

NO. INDIKA-TOR	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017)	INDIKATOR RPJMD	2017	2018	2019	STATUS TPB	OPD
	mancanegara.	menjadi 20 juta (skala nasional)						BUDPAR
8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	Meningkat	Kunjungan wisata	2.111.367	2.362.002	2.562.654	SS	DINPORA BUDPAR
8.9.1.(c)	Jumlah devisa sektor pariwisata.	Meningkat	PAD sektor pariwisata			12,735 M	TTT	DINPORA BUDPAR
8.9.2*	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.	Meningkat				5,31	TTT	DINPORA BUDPAR
8.10.1*	Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa	Meningkat					NA	DPMP2 TSP
8.10.1.(a)	Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum).	Menurun (mendekat)					NA	DPMP2 TSP
8.10.1.(b)	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.	Meningkat					NA	DINAKER KOP UKM
9.1.1.(b)	Panjang pembangunan jalan tol.	1000 Km (skala nasional)		0			TKD	
9.1.1.(c)	Panjang jalur kereta api.	Bertambah 3.258 Km					TKD	
9.1.2.(b)	Jumlah dermaga penyeberangan.	Meningkat	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/ Terminal Bis	3			TKD	
9.1.2.(c)	Jumlah pelabuhan strategis.	24 pelabuhan (skala nasional)	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/ Terminal Bis	3			TKD	
9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita.	Meningkat	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	24,48	24,35	24,66	SS	DINPERIN DAG
9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.	Lebih tinggi dari pertumbuhan PDB	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	24,48	24,35	24,66	SS	DINPERIN DAG
9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.	Meningkat		12,82%	18,83%	19,71%	TTC	DINPERIN DAG

NO. INDIKA-TOR	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017)	INDIKATOR RPJMD	2017	2018	2019	STATUS TPB	OPD
9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.	Meningkat					NA	DINPERIN DAG
9.3.2*	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.	Meningkat					NA	DINPERIN DAG
9.5.1*	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB.	Meningkat					NA	BAPPEDA LITBANG
9.c.1*	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.	Meningkat	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	29,34	80	90	TTC	DINKOM INFO
9.c.1.(a)	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	Meningkat	Persentase penduduk yang menggunakan Hp/telepon	67,63	75	79	TTC	DINKOM INFO
9.c.1.(b)	Proporsi individu yang menggunakan internet	Meningkat	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	29,34	64	68	TTC	DINKOM INFO
10.1.1*	Koefisien Gini.	Menurun menjadi 0,36	Indeks Gini	0,32	0,3132	0,3132	SS	BAPPEDA LITBANG
10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Menurun menjadi 7-8%	Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan	17,05	13,5	12,53	SB	BAPPEDA LITBANG
10.1.1.(b)	Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan.	80 Kabupaten (skala nasional)					TKD	
10.1.1.(c)	Jumlah desa tertinggal.	Berkurang sebanyak 5.000 desa (skala nasional)					NA	DINSOS PERMAS DES
10.1.1.(d)	Jumlah Desa Mandiri.	Meningkat paling sedikit 2.000 desa		15			SB	DINSOS PERMAS DES
10.1.1.(e)	Rata-rata pertumbuhan	Meningkat					TKD	

NO. INDIKA-TOR	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017)	INDIKATOR RPJMD	2017	2018	2019	STATUS TPB	OPD
	ekonomi di daerah tertinggal.							
10.1.1.(f)	Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal.	Menurun menjadi 14%	Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan				TKD	
10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.	Menurun					NA	DINSOS PERMAS DES
10.3.1.(a)	Indeks Kebebasan Sipil.	Meningkat menjadi 87					NA	BAPPEDA LITBANG
10.3.1.(d)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	tidak ada		Belum ada	Ada	Ada	TTC	BAPPEDA LITBANG
10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Meningkat menjadi: TK formal 62,4 juta; TK informal 3,5 juta	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	72,74	NA	100	TTC	DINAKER KOP UKM
11.1.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	3,7 juta rumah tangga	Rasio rumah layak huni		76,3	77,24	SB	DINPER KIM
11.1.1.(b)	Jumlah kawasan perkotaan metropolitan yang terpenuhi standar pelayanan perkotaan (SPP).	12 kawasan perkotaan metropolitan (skala nasional)					TKD	
11.3.1.(b)	Jumlah Metropolitan baru di luar Jawa sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN).	5 metropolitan (skala nasional)					TKD	

NO. INDIKA-TOR	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017)	INDIKATOR RPJMD	2017	2018	2019	STATUS TPB	OPD
11.3.2.(b)	Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur.	Ada		Ada	Ada	Ada	TTC	BAPPEDA LITBANG
11.4.1.(a)	Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil.	Ada					TKD	
11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Menurun	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana	226			TTT	BPBD
11.5.1. (a)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).	Menurun menjadi 30%				207,2	TTT	BPBD
11.5.1. (c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.	Ada		ada	Ada	Ada	SS	BPBD
11.5.2. (a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	Menurun					NA	BPBD
11.6.1. (a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	Meningkat menjadi 80%	Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan		60	92	SS	DLH
11.6.1. (b)	Jumlah kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan green waste di kawasan perkotaan metropolitan.	Meningkat/ada					TKD	
11.7.1. (a)	Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang.	Meningkat/ada	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB		2	2,026	TTC	DLH
11.b.2*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	Ada			Ada	Ada	TTC	BPBD

NO. INDIKA-TOR	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017)	INDIKATOR RPJMD	2017	2018	2019	STATUS TPB	OPD
12.4.2. (a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	Meningkat menjadi 150 juta ton (skala nasional)	Jumlah limbah B3 yang dikelola				NA	DLH
12.5.1. (a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	20 ton per hari (skala nasional)	Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R		20	22	TTC	DLH
12.6.1. (a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.	Meningkat					NA	DLH
12.7.1. (a)	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.	Meningkat					NA	DLH
12.8.1. (a)	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.	Meningkat					NA	BAPPEDA LITBANG
13.1.1*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	Ada			Ada	Ada	TTC	BPBD
13.1.2*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Menurun	Korban bencana dan bencana sosial (KK)	226			TTT	BPBD
15.1.1. (a)	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.	Meningkat	Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara	11,60%	15,79%	15,79%	TTC	DLH
15.3.1. (a)	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.	5,5 juta ha (skala nasional)	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis		25		TTT	DLH

NO. INDIKA-TOR	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017)	INDIKATOR RPJMD	2017	2018	2019	STATUS TPB	OPD
15.6.1*	Tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata.	Ada		belum ada	belum ada	belum ada	TTT	BAPPEDA LITBANG
15.9.1. (a)	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	Meningkat		belum ada	belum ada	belum ada	TTT	DLH
16.1.1. (a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.	Menurun		6	12	4	TTC	KESBANG POL
16.1.2. (a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.	Menurun					NA	KESBANG POL
16.1.3. (a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	Menurun			677	930	TTT	KESBANG POL
16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.	Meningkat					NA	KESBANG POL
16.2.1. (a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	Menurun	Rasio KDRT	0,019	0,009	0,008	SS	DPPKB P3A
16.2.1. (b)	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.	Menurun	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan	100%	100%	100%	SS	DPPKB P3A

NO. INDIKA-TOR	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017)	INDIKATOR RPJMD	2017	2018	2019	STATUS TPB	OPD
			pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu					
16.2.3. (a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	Menurun					NA	DPPKB P3A
16.5.1. (a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).	Meningkat menjadi 4,0					NA	INSPEKTO RAT
16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	Meningkat		83	100	100	SS	BKAD
16.6.1. (a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Meningkat menjadi: Kementerian/Lembaga: 95%, Provinsi: 85%, Kabupaten:60%, Kota: 65%	Opini BPK	WTP	100	100	SS	BKAD
16.6.1. (b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Meningkat menjadi: Kementerian/Lembaga: 85%, Provinsi: 75%, Kabupaten/ Kota: 50%		Nilai Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat baik	SS	BAPPEDA LITBANG
16.6.1. (c)	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.	Menjadi 80%		Ada		100	SS	SETDA
16.6.1. (d)	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai	Meningkat menjadi:		63,79	66,68	68,97	SS	SETDA

NO. INDIKA-TOR	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017)	INDIKATOR RPJMD	2017	2018	2019	STATUS TPB	OPD
	Indek Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Kementerian/Lembaga 75%, Provinsi: 60%, Kabupaten/ Kota: 45%						
16.6.2. (a)	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Meningkat menjadi: Kementerian: 100%, Lembaga: 100%, Provinsi: 100%, Kabupaten/ Kota: 80%			98	98	SS	SETDA
16.7.1. (a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	Meningkat	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	18	18	22	SB	DPPKB P3A
16.7.1. (b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	Meningkat	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	49	49	49	SS	BKPSDM
16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	Meningkat	Rasio bayi berakta kelahiran		92	93	SS	DINDUK CAPIL
16.9.1. (a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.	Meningkat menjadi 77,4%	Cakupan penerbitan akta kelahiran	89	92	93	SS	DINDUK CAPIL
16.9.1. (b)	Persentase anak yang memiliki	Meningkat	Rasio bayi berakta		92	93	SS	DINDUK

NO. INDIKA-TOR	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017)	INDIKATOR RPJMD	2017	2018	2019	STATUS TPB	OPD
	akta kelahiran.	menjadi 85%	kelahiran					CAPIL
16.10.2. (c)	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.	Meningkat					NA	DINKOM INFO
16.b.1. (a)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	tidak ada		tidak ada	tidak ada	tidak ada	SB	BAPPEDA LITBANG
17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	Meningkat	Persentase PAD terhadap pendapatan	19,24	19,85		SS	BKAD
17.1.1. (a)	Persentase PAD terhadap pendapatan	Meningkat		19,2	19,85	19,19	TTT	BKAD
17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	Meningkat		6,24	6,37		TTC	BKAD
17.6.2. (b)	Tingkat penetrasi akses tetap pita lebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan.	Meningkat menjadi: Perkotaan (20 Mbps) 71% rumah tangga dan 30% populasi; Perdesaan (10 Mbps) 49% rumah tangga dan 6%	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	29,34	80	90	TTC	DINKOM INFO

NO. INDIKA-TOR	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017)	INDIKATOR RPJMD	2017	2018	2019	STATUS TPB	OPD
		populasi						
17.6.2. (c)	Proporsi penduduk terlayani mobile broadband	Meningkat menjadi: Perkotaan 100% populasi; Perdesaan 52% populasi.	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	29,34	80	90	TTT	DINKOM INFO
17.8.1*	Proporsi individu yang menggunakan internet.	Meningkat	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	29,34	80	90	TTT	DINKOM INFO
17.8.1. (a)	Persentase kabupaten 3T yang terjangkau layanan akses telekomunikasi universal dan internet.	100%					TKD	
17.17.1. (a)	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	Ada		Belum ada	Belum ada	Belum ada	TTT	BAPPEDA LITBANG
17.17.1. (b)	Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	Ada			100	100	TTC	BAPPEDA LITBANG
17.18.1. (a)	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik.	Meningkat		98,67	100	100	SS	BPS
17.18.1. (b)	Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama.	Meningkat		86,67	86,67	90	SB	BPS

NO. INDIKA-TOR	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017)	INDIKATOR RPJMD	2017	2018	2019	STATUS TPB	OPD
17.18.1. (c)	Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa).	Meningkat					NA	BPS
17.18.1. (d)	Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target.	Meningkat			46	169	TTC	BAPPEDA LITBANG
17.19.2. (b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	Ada		Belum ada	Belum ada	Belum ada	TTT	DINDUK CAPIL
17.19.2. (c)	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website.	Meningkat		10200	21634	41878	SS	BPS
17.19.2. (d)	Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS).	Meningkat		98,67	99,73	100	SS	BPS

BAB III
GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Kondisi Perekonomian Global, Nasional dan Jawa Tengah

Pertumbuhan ekonomi global sejak tahun 2019 telah mengalami penurunan akibat perang dagang Amerika Serikat dengan China. Perlambatan ekonomi pada tahun 2020 pun diperburuk oleh menyebarnya virus corona yang saat ini telah menjangkiti 213 negara. Selain itu, proses pemulihan pun akan memakan waktu lebih lama dari yang dibayangkan. Revisi proyeksi yang disebabkan oleh pertumbuhan konsumsi, investasi, ekspor dan impor yang kian tertekan hampir di seluruh negara di dunia. Pasalnya, banyak negara dunia yang mengalami disrupsi di dalam aktivitas perekonomian domestik akibat pembatasan sosial dan lockdown yang diterapkan untuk menekan angka persebaran COVID-19, dan investasi swasta cenderung tertahan lantaran perusahaan cenderung menunda belanja modal ditengah ketidakpastian yang tinggi. Pandemi ini pun tak membuat negara maju seperti Amerika Serikat, Tiongkok, Jepang atau berbagai negara maju lainnya tangguh dalam menghadapi perlambatan ekonomi. Indonesia sebagai negara berkembang harus merasakan kontraksi minus pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020 terkontraksi minus 2,07 persen.

Memburuknya kinerja pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020 disebabkan oleh dampak pandemi Covid-19. Meskipun pemerintah pusat telah berusaha keras mendorong kinerja perekonomian melalui stimulus fiskal atau peran dari instrumen APBN di dalam penanganan pandemi COVID-19 dan program pemulihan ekonomi, namun akibat belitan wabah COVID-19 sejak Maret 2020 hingga Desember 2020 yang menyebabkan dilakukan banyak pembatasan aktivitas sosial dan ekonomi, maka pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 mengalami kontraksi.

Berbagai kebijakan, baik pada sisi fiskal yang dengan terus menerus melakukan upaya pemulihan melalui insentif dari sisi perpajakan, belanja negara, baik dari pusat dan daerah, serta dukungan dari pembiayaan diharapkan akan terus mendorong berbagai kegiatan sektoral dan di daerah. Pemerintah akan berkoordinasi dengan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, serta Lembaga Penjamin Simpanan, untuk memastikan sektor keuangan dapat terjaga stabilitasnya dan bisa mendukung pemulihan ekonomi. Realisasi APBN Tahun 2020 secara keseluruhan maupun program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sudah mengalami akselerasi yang signifikan. Pemerintah Indonesia terus mendorong momentum pemulihan ekonomi ini dengan berbagai kebijakan yang ada. Penyerapan belanja APBN 2020 dan program PEN terus akan diakselerasi untuk menangani masalah kesehatan akibat COVID-19. Program untuk menjaga daya beli masyarakat akan diteruskan, juga dukungan bagi aktivitas dunia usaha.

Untuk memastikan agar tren pemulihan ekonomi yang menunjukkan pembalikan nyata bisa terus berjalan, perlu dukungan dari masyarakat.

Pandemi COVID-19 telah memberikan dampak pada menurunnya aktivitas produksi dan konsumsi barang dan jasa yang terindikasi dari pelemahan ekonomi global dan menurunnya aktivitas ekonomi nasional dan Jawa Tengah sebagai dampak dari kebijakan pencegahan penyebaran pandemi COVID-19. Terdapat beberapa dampak yang sangat signifikan mempengaruhi perekonomian Jawa Tengah diantaranya jumlah perusahaan di Jawa Tengah sebanyak 318 perusahaan seperti garmen, tekstil, meubel yang ikut terdampak; jumlah pekerja PHK sebanyak 7.880 orang dan dirumahkan 45.650 orang. Kondisi tersebut menjadi salah satu penyebab pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah mengalami kontraksi. Berbagai upaya dilakukan untuk pemulihan perekonomian diantaranya kebijakan New Normal (perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas seperti biasa namun dengan selalu menerapkan protokol kesehatan) yang mulai diterapkan pada awal bulan Juni 2020 yang cukup berpengaruh terhadap perbaikan perekonomian Jawa Tengah. Hal ini ditandai dengan perbaikan pertumbuhan ekonomi *year on year* yang awalnya terkontraksi sebesar minus 5,91 persen pada triwulan II 2020 menjadi minus 3,34 persen pada triwulan IV.

Secara keseluruhan, akibat dililit wabah COVID-19 maka kinerja perekonomian Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2020 mengalami kontraksi. Berdasarkan rilis dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada 5 Februari 2021, pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah tahun 2020 sebesar minus 2,65 persen (y-on-y) atau mengalami pertumbuhan minus terendah dalam 22 tahun terakhir sejak krisis ekonomi dan politik tahun 1998.

Pandemi COVID-19 juga berdampak pada kondisi kesejahteraan masyarakat di Jawa Tengah. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran. Pada bulan September 2020, jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah mencapai 4.119,93 ribu orang (11,84 persen), bertambah sebanyak 440,53 ribu orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada September 2019 yang berjumlah 3.679,40 ribu orang (10,58 persen). Demikian pula dengan jumlah pengangguran terbuka yang juga mengalami peningkatan. Jumlah pengangguran pada Agustus 2020 sebanyak 1,21 juta orang (6,48 persen), mengalami kenaikan sekitar 396 ribu orang dibanding Agustus 2019 yang sebanyak 0,82 juta orang (4,44 persen).

3.2. Kondisi Perekonomian Daerah

Multiplier efek dari pandemi COVID-19 yang terjadi sepanjang tahun 2020 mempengaruhi kondisi perekonomian di seluruh Indonesia tak terkecuali Banyumas. Berdasarkan rilis dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Banyumas pada 21 April 2021, multiplier efek dari pandemi COVID-19 yang terjadi sepanjang tahun 2020 mempengaruhi kondisi

perekonomian di seluruh Indonesia tak terkecuali Banyumas. Perekonomian Banyumas untuk pertama kalinya sejak tahun 2010 mengalami kontraksi sebesar -1,65 persen *(y-on-y)* setelah selama satu dasawarsa lamanya mampu mencatatkan pertumbuhan di atas 5 persen. Dari sisi produksi, kontraksi terjadi pada 11 lapangan usaha dengan kontraksi terdalam dialami oleh lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar -33,15 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, kontraksi terdalam tercatat pada Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar -6,18 persen. Struktur ekonomi Banyumas tahun 2020 dari sisi produksi masih didominasi oleh lapangan usaha Industri Pengolahan dengan kontribusi sebesar 25,37 persen, sedangkan dari sisi pengeluaran didominasi oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga dengan kontribusi sebesar 66,89 persen.

Sebelas kategori lapangan usaha mengalami kontraksi dan hanya enam kategori yang mengalami pertumbuhan positif. Transportasi dan Pergudangan merupakan lapangan usaha yang mengalami kontraksi terdalam yaitu sebesar -31,84 persen. Segala bentuk kebijakan pemerintah untuk mengurangi penyebaran COVID-19 selama tahun 2020 mulai dari Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM), *Work From Home* (bekerja dari rumah), *School From Home* (sekolah dari rumah), pelarangan mudik, dan pembatasan transportasi selama perayaan hari besar menekan kinerja seluruh lapangan usaha, utamanya Transportasi dan Pergudangan yang bergantung pada mobilitas masyarakat. Lapangan usaha lain yang juga mengalami kontraksi cukup dalam meliputi Jasa Lainnya yang menurun sebesar -5,44 persen serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang terkontraksi sebesar -7,08 persen. Sementara lapangan usaha yang mampu mencatatkan pertumbuhan tertinggi sepanjang tahun 2020 adalah Informasi dan Komunikasi yang tumbuh sebesar 13,81 persen seiring meningkatnyakebutuhan pembelajaran online serta penyelesaian pekerjaan dan pertemuan secara virtual.

Pertumbuhan ekonomi Banyumas pada Tahun 2020 yang tercatat -1,65 persen merupakan andil dari lapangan usaha transportasi dan pergudangan yang menyumbang kontraksi ekonomi sebesar -1,25 persen; diikuti perdagangan besar dan eceran sebesar -0,62 persen; konstruksi sebesar -0,48 persen; dan penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar -0,26 persen. Tekanan kontraksi ekonomi Banyumas tertahan oleh andil positif dari lapangan usaha informasi dan komunikasi yang menyumbang pertumbuhan sebesar 0,96 persen; pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 0,17 persen; dan jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 0,08 persen.

Struktur PDRB Banyumas menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku selama tahun 2020 masih didominasi oleh empat lapangan usaha utama, yaitu Industri Pengolahan sebesar 25,37 persen; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 15,23 persen; Konstruksi sebesar 12,82 persen dan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 12,45 persen.

Dari tujuh belas lapangan usaha, kategori Informasi dan Komunikasi tumbuh paling cepat dibandingkan tahun 2019 yang naik 2,07 poin menjadi 13,81 persen. Percepatan pertumbuhan ini seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap paket data untuk menunjang pelaksanaan *Work From Home* dan *Study From Home* serta agenda meeting dan conference yang dilakukan secara daring, disamping peningkatan akses informasi terhadap berita online yang menyangkut COVID-19.

Dari sisi pengeluaran ekonomi Banyumas tahun 2020 yang mengalami kontraksi sebesar -1,65 persen, disebabkan terkontraksinya seluruh komponen PDRB dari sisi pengeluaran. Komponen PMTB terkontraksi paling dalam sebesar -6,18 persen dan komponen impor terkontraksi sebesar -4,54 persen. Namun komponen impor barang dan jasa sebagai komponen pengurang PDRB, sehingga kontraksi pada komponen ini berfungsi sebagai penahan laju kontraksi PDRB agar tidak lebih dalam.

Komponen lainnya yaitu Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PKP), Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (PKLNPRT) dan mengalami kontraksi. Masing-masing komponen, secara berurutan mencatat kontraksi sebesar -4,26 persen, -2,16 persen dan -1,21 persen. Penundaan berbagai proyek pembangunan baik dari swasta maupun pemerintah karena pandemi COVID-19 dan pengalihan belanja pemerintah menyebabkan tertekannya pertumbuhan komponen PMTB dan komponen PKP.

Pandemi COVID-19 juga sangat berdampak pada kondisi kesejahteraan masyarakat di Banyumas. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran. Pada tahun 2020, jumlah penduduk miskin di Banyumas mencapai 225.840 orang, bertambah sebanyak 14.240 orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada tahun 2019 yang berjumlah 211.600 orang. Demikian pula dengan jumlah pengangguran yang juga mengalami peningkatan. Jumlah pengangguran pada tahun 2020 sebanyak 52.689 orang, mengalami kenaikan sekitar 16.153 orang dibanding tahun 2019 yang sebanyak 36.536 juta orang.

3.3. Kinerja Keuangan Daerah

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Pengelolan Keuangan Daerah sampai dengan tahun 2020 disusun mendasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan mulai tahun 2021 disusun sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 2 menyebutkan ruang lingkup Keuangan Daerah diantaranya meliputi hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman; kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga; penerimaan daerah; pengeluaran daerah; dan kekayaan daerah. Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas secara umum yang diterapkan dalam APBD dapat ditinjau dari pendapatan, belanja dan pembiayaan.

3.3.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Banyumas meliputi pencapaian kinerja pendapatan daerah, perkembangan belanja daerah dan pembiayaan daerah.

3.3.1.1. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah Kabupaten Banyumas yang meliputi komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah selama kurun waktu Tahun 2016-2020 secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.1.
Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2020
(Rp. Milyard)

No.	Uraian	Th. 2016			Th. 2017			Th. 2018			Th. 2019			Th. 2020		
		Target RPJMD (2013-2018)	Penetapan APBD	Realisasi	Target RPJMD (2013-2018)	Penetapan APBD	Realisasi	Target RPJMD	Penetapan APBD	Realisasi	Target RPJMD	Penetapan APBD	Realisasi	Target RPJMD	Penetapan APBD	Realisasi
1.	**Pendapatan Asli Daerah (PAD)**	**386,51**	**450,49**	**541,42**	**511,34**	**520,86**	**619,70**	**630,77**	**586,34**	**648,33**	**636,51**	**636,51**	**686,81**	**715,38**	**729,89**	**668,21**
1.1.	Pendapatan Pajak Daerah	113,90	118,05	147,36	123,95	123,95	199,61	200,20	173,35	211,55	208,90	208,90	229,38	212,18	275,50	208,65
1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah	21,69	22,45	27,31	23,91	26,48	27,69	29,81	28,27	32,45	32,17	32,17	32,64	32,17	31,98	23,71
1.3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang	11,72	13,81	12,42	14,11	14,11	13,54	24,77	12,47	24,79	13,81	13,81	12,91	15,42	13,50	15,80
1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	239,20	296,18	354,34	349,37	356,32	378,86	375,99	372,26	379,54	381,63	381,63	411,88	455,61	408,91	420,05
2.	**Dana Perimbangan**	**1.425,02**	**1.602,42**	**1.869,10**	**2.042,41**	**2.055,69**	**1.868,37**	**1.917,84**	**1.917,84**	**1.894,41**	**2.003,43**	**2.003,43**	**1.940,35**	**2.119,77**	**2.046,99**	**1.854,29**
2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya	76,64	63,10	57,70	45,61	60,65	45,04	53,76	53,76	42,91	42,25	42,25	28,66	60,93	42,14	49,47
2.2.	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.277,83	1.398,54	1.398,54	1.398,54	1.525,15	1.373,97	1.373,97	1.373,97	1.373,97	1.442,33	1.442,33	1.437,04	1.528,74	1.461,11	1.306,92
2.3.	Dana Alokai Khusus (DAK)	70,55	140,78	412,85	598,26	469,88	449,36	490,11	490,11	477,53	518,85	518,85	474,66	530,10	543,73	497,91
3.	**Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah**	**716,80**	**791,29**	**442,45**	**411,84**	**491,68**	**733,19**	**712,11**	**752,83**	**723,19**	**788,03**	**788,03**	**807,77**	**877,72**	**791,69**	**807,68**
Jumlah Pendapatan Daerah (1+2+3)		**2.528,33**	**2.844,20**	**2.852,97**	**2.965,58**	**3.068,22**	**3.221,26**	**3.260,72**	**3.257,00**	**3.265,93**	**3.427,96**	**3.427,96**	**3.434,93**	**3.712,87**	**3.568,57**	**3.330,19**

Sumber: Bappedalitbang Kab. Banyumas, BAPENDA Kab. Banyumas dan BPKAD Kab. Banyumas, 2021.

Pendapatan daerah Kabupaten Banyumas kurun waktu Tahun 2016-2020 bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dengan kontribusi terbesar pada komponen Dana Perimbangan. Selama kurun waktu tahun 2016-2020, realisasi pendapatan daerah cenderung fluktuatif dan di tahun 2020 mengalami penurunan dikarenakan dampak dari pandemi COVID-19. Penurunan utamanya pada PAD dan sumber PAD yang mengalami penurunan yaitu untuk penerimaan Pajak Daerah seperti Pajak Hotel, Restoran, Pajak hiburan dan Pajak Parkir, dikarenakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, penerapan *social distancing* dan *physical distancing*, belum optimal penerimaan tersebut karena persoalan ketidaktransparan dalam pelaporan dari pengelola dan menurunnya kemampuan masyarakat dalam membayar pajak akibat terdampak pandemi COVID-19, serta kurang optimalnya kegiatan *door to door* dan razia pada masa pandemi. Penerimaan pajak penerangan jalan juga mengalami penurunan disebabkan adanya pelaksanaan diskon tarif tenaga listrik dan pembebasan biaya beban atau *abonemen*.

Sumber PAD lainnya yang juga mengalami penurunan yaitu dari retribusi daerah. Penurunan ini antara lain dikarenakan adanya penerapan *social distancing* dan *physical distancing* sehingga berdampak pada menurunnya jumlah pasien pada Balai Kesehatan Masyarakat, penggunaan aula/asrama/gedung, jumlah penyewa alat berat, jumlah tamu yang menginap di villa, penurunan penerimaan dari pemanfaatan fasilitas di terminal, penurunan penjualan benih, tutupnya pelayanan kantin dan beberapa obyek wisata, pembatasan kegiatan pada pengujian kayu, serta banyaknya tenaga kerja asing yang tidak kembali atau tidak memperpanjang kontrak akibat COVID-19.

Sementara itu, dari komponen Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah realisasi terhadap target RPJMD cenderung berfluktuasi. Hal ini disebabkan kedua komponen tersebut merupakan sumber pendapatan yang berasal dari Pemerintah Pusat yang tidak dapat dipastikan besarannya dan dalam penyusunan targetnya dalam dokumen perencanaan sebagaimana amanat peraturan perundangan diasumsikan sama dengan tahun berjalan.

Tabel 3.2.
Proposi Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas
Tahun 2016-2020 (Persen)

No.	Uraian	Th. 2016			Th. 2017			Th. 2018			Th. 2019			Th. 2020		
		Target RPJMD (2013-2018)	Penetapan APBD	Realisasi	Target RPJMD (2013-2018)	Penetapan APBD	Realisasi	Target RPJMD	Penetapan APBD	Realisasi	Target RPJMD	Penetapan APBD	Realisasi	Target RPJMD	Penetapan APBD	Realisasi
1.	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	15,29	15,84	18,98	17,24	16,98	19,24	19,34	18,00	19,85	18,57	18,57	19,99	19,27	20,45	20,07
2.	Dana Perimbangan	56,36	56,34	65,51	68,87	67,00	58,00	58,82	58,88	58,01	58,44	58,44	56,49	57,09	57,36	55,68
3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	28,35	27,82	15,51	13,89	16,02	22,76	21,84	23,11	22,14	22,99	22,99	23,52	23,64	22,19	24,25
Jumlah Pendapatan Daerah (1+2+3)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Bappedalitbang Kab. Banyumas dan BAPENDA Kab. Banyumas, 2021.

Pendapatan daerah Kabupaten Banyumas kurun waktu Tahun 2016-2020 bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD

), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Selama kurun waktu tersebut, Dana Perimbangan menempati porsi terbesar dengan rata-rata kontribusi terhadap Pendapatan Daerah sebesar 58,74 persen diikuti Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar 21,64 persen dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 19,63 persen. Sumber pendapatan utama PAD Kabupaten Banyumas berasal dari Pajak Daerah yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak PBB Perdesaan dan Perkotaan dan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Walaupun Lain-lain Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber PAD yang paling besar namun pendapatan yang di dapat dari BLUD (RSUD Banyumas, RSUD Ajibarang) tersebut digunakan kembali untuk belanja oleh BLUD tersebut.

3.3.1.2. Belanja Daerah

Komposisi Belanja Daerah sampai dengan tahun 2020 disusun mendasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Kinerja belanja daerah Tahun 2016-2020 terinci sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.3.
Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2020
(Rp. Milyard)

No.	Uraian	Th. 2016			Th. 2017			Th. 2018			Th. 2019			Th. 2020		
		Target RPJMD	Penetapan APBD	Realisasi	Target RPJMD	Penetapan APBD	Realisasi	Target RPJMD	Penetapan APBD	Realisasi	Target RPJMD	Penetapan APBD	Realisasi	Target RPJMD	Penetapan APBD	Realisasi
1.	**Belanja Tidak Langsung**	**1.935,89**	**2.190,91**	**1.890,94**	**2.061,75**	**2.267,16**	**1.903,45**	**2.063,09**	**2.056,96**	**1.944,83**	**2.166,93**	**2.166,93**	**2.024,93**	**2.189,81**	**2.209,35**	**1.976,90**
1.1.	Belanja Pegawai	1.655,65	1.700,56	1.365,11	1.652,84	1.610,20	1.231,07	1.368,23	1.369,94	1.274,58	1.429,88	1.429,88	1.312,83	1.767,82	1.456,02	1.255,17
1.2.	Belanja Hibah	29,00	13,64	24,84	33,80	25,57	53,34	71,54	69,05	77,23	48,40	48,40	40,86	73,50	41,35	72,04
1.3.	Belanja Bantuan Sosial	6,50	13,74	13,28	5,72	11,22	11,67	20,18	16,51	14,97	17,03	17,03	13,86	18,72	24,74	6,02
1.4.	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	13,56	14,39	9,69	14,79	14,80	14,77	23,00	20,16	19,31	24,11	24,11	25,04	25,24	30,75	26,16
1.5.	Belanja Bantuan Keuangan	226,77	443,56	477,30	349,61	601,38	591,14	576,13	577,30	558,61	639,51	639,51	631,81	300,00	651,50	536,51
1.6.	Belanja Tidak Terduga	4,41	5,00	0,72	5,00	4,00	1,47	4,00	4,00	0,13	8,00	8,00	0,53	4,53	5,00	81,01
2.	**Belanja Langsung**	**592,72**	**975,23**	**1.011,91**	**951,43**	**1.156,08**	**1.297,24**	**1.528,96**	**1.415,29**	**1.374,23**	**1.584,44**	**1.454,44**	**1.432,62**	**1.781,83**	**1.534,57**	**1.272,24**
Jumlah Belanja Daerah (1+2)		**2.528,61**	**3.166,13**	**2.902,85**	**3.013,18**	**3.423,24**	**3.200,69**	**3.592,05**	**3.472,25**	**3.319,06**	**3.751,36**	**3.621,36**	**3.457,55**	**3.971,65**	**3.743,92**	**3.249,14**

Sumber: Bappedalitbang Kab. Banyumas dan BPKAD Kab. Banyumas, 2021.

Selama kurun waktu tahun 2016-2019, belanja daerah Kabupaten Banyumas rata-rata mengalami kenaikan. Tahun 2020 belanja daerah mengalami penurunan dikarenakan menurunya pendapatan daerah sebagai dampak dari pandemi COVID 19. Apabila dilihat dari realisasi masing-masing komponen belanja daerah dapat dijelaskan bahwa komponen belanja pegawai kurun waktu 2016-2023 di bawah target RPJMD. Hal ini dikarenakan menyesuaikan dengan kondisi jumlah pegawai pada tahun bersangkutan. Untuk belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga kurun waktu 2016-2023 tumbuh fluktuatif dari target RPJMD.

Belanja Bantuan Keuangan fluktuatif sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan prioritas pembangunan daerah. Tahun 2020 bantuan keuangan meningkat dari target RPJMD Tahun 2018-2023. Belanja bantuan keuangan tersebut diarahkan pada kegiatan yang dapat mendorong perekonomian dan kesejahteraan rakyat dengan pola padat karya, peningkatan ketahanan dan pemberdayaan masyarakat desa sebagai respon upaya pengurangan dampak pandemi COVID-19.

Belanja Tidak Terduga tahun 2020 mengalami kenaikan signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang bersumber dari *refocussing* belanja. Hal ini sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah. Kenaikan Belanja Tidak Terduga diperuntukkan bagi penanganan Pandemi COVID-19 yang penggunaanya diarahkan utamanya untuk penanganan di sektor kesehatan, penyediaan jaring pengaman ekonomi, dan jaring pengaman sosial dengan sasaran masyarakat terdampak COVID-19.

Demikian pula dengan belanja langsung tahun 2020 yang mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019 dikarenakan menurunnya pendapatan dan pengalihan sebagian belanja langsung menjadi belanja tidak terduga untuk penanggulangan dampak pandemi COVID-19. Dengan kondisi demikian, maka pada belanja langsung tahun 2020 dilakukan adaptasi penyesuaian pola kerja sesuai dengan protokol COVID-19, refocussing dan realokasi belanja, agar dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas sehingga kinerja pembangunan utamanya pada pelayanan, kesehatan dan perekonomian dapat tetap baik.

3.3.1.3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah mencakup seluruh penerimaan yang perlu dibayar dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, dan pada hakekatnya meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus.

a. Penerimaan Pembiayaan

Selama pelaksanaan RPJMD Tahun 2018-2023, penerimaan pembiayaan fluktuatif berasal dari Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya (Penarikan dana Bergulir) pada tahun 2018 dan pemanfaatan SiLPA yang didasarkan atas hasil audit BPK atas pelaksanaan APBD tahun sebelumnya. Penerimaan pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya.

b. Pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Pengeluaran Pembiayaan selama kurun waktu 2018-2023 utamanya terdiri dari Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah dan Pengeluaran Investasi Non Permanen Lainnya (Pemberian Pinjaman Daerah). Pada Tahun 2020 pengeluaran pembiayaan tidak dialokasikan dikarenakan pengalihan pendanaan untuk Belanja Tidak Terduga guna penanganan dampak pandemi COVID-19.

Pembiayaan daerah secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.4.
Pembiayaan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2020
(Rp. Milyard)

No.	Jenis Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan	Th. 2016			Th. 2017			Th. 2018			Th. 2019			Th. 2020		
		Target RPJMD	Penetapan APBD	Realisasi	Target RPJMD	Penetapan APBD	Realisasi	Target RPJMD	Penetapan APBD	Realisasi	Target RPJMD	Penetapan APBD	Realisasi	Target RPJMD	Penetapan APBD	Realisasi
1.	**Penerimaan Pembiayaan**															
1.1.	SILPA	68,69	340,93	461,71	50,00	376,02	389,74	382,32	254,00	382,32	360,00	230,00	290,35	301,26	200,00	242,71
1.2.	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	1,50	6,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya (Penarikan dana Bergulir)	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	6,12	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan		**18,00**	**340,93**	**461,71**	**51,50**	**382,02**	**389,74**	**382,32**	**254,00**	**388,44**	**360,00**	**230,00**	**290,35**	**301,26**	**205,00**	**242,71**
2.	**Pengeluaran Pembiayaan**															
2.1.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	-	(19,00)	22,08	4,00	(24,50)	25,73	48,49	(36,25)	43,18	34,10	(34,10)	23,44	39,74	(28,15)	28,15
2.2.	Pengeluaran Investasi Non Permanen Lainnya (Pemberian Pinjaman Daerah)	-	-	-	-	(2,50)	-	2,50	(2,50)	1,78	2,50	(2,50)	1,58	2,74	(1,50)	1,37
2.3.	Pembayaran Pokok Hutang	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	Pengeluaran Investasi Non Pemerintah	-	-	-	-	-	2,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan		**18,00**	**(19,00)**	**22,08**	**4,00**	**(27,00)**	**27,99**	**50,99**	**(38,75)**	**44,96**	**36,60**	**(36,60)**	**25,02**	**42,49**	**(29,65)**	**29,52**
Jumlah Pembiayaan Netto		**-**	**321,93**	**439,62**	**47,50**	**355,02**	**361,74**	**331,32**	**215,25**	**343,48**	**323,40**	**193,40**	**265,33**	**258,78**	**175,35**	**213,19**

Sumber : Bappedalitbang Kab. Banyumas dan BPKAD Kab. Banyumas, 2021.

3.3.2. Analisis Kesehatan Keuangan Daerah

Analisis kesehatan keuangan daerah ini diadopsi dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Republik Indonesia. Alat pengukuran ini memotret kondisi "kesehatan fiskal" antar pemerintah daerah (Pemda) dengan berdasarkan beberapa rasio sederhana, yang setiap rasionya terfokus pada empat aspek kesehatan fiskal yaitu pendapatan, pengeluaran, posisi operasi dan struktur hutang.

3.3.2.1. Analisis Pendapatan Daerah Perkapita

Pendapatan Daerah per Kapita Rasio ini menunjukkan ukuran riil dari besarnya pendapatan daerah dibagi dengan jumlah penduduk yang harus dilayani oleh Pemda. Semakin besar jumlah penduduk, maka semakin besar pula beban yang harus ditanggung oleh Pemerintah Daerah. Hal ini perlu diatasi dengan mendorong upaya dalam meningkatkan pendapatan daerah di masa mendatang. Pendapatan Perkapita Pemerintah Kabupaten Banyumas menunjukan kondisi yang membaik dari tahun 2016 sampai tahun 2020, meskipun pada tahun 2020 pertumbuhanya sedikit melambat dikarenakan dampak pandemi COVID-19 yang berdampak pada perlambatan pertumbuhan pendapatan daerah. Gambaran pendapatan per kapita Kabupaten Banyumas tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.5.
Tabel Pendapatan Daerah Perkapita Tahun 2016-2020

Tahun	Total Pendapatan Daerah (Rp.)	Jumlah Penduduk	Pendapatan Per kapita (Rp.000)
2016	2.852.968.390.191	1.650.625	1.728,42
2017	3.221.258.052.894	1.665.025	1.934,66
2018	3.265.926.651.861	1.679.124	1.945,02
2019	3.434.925.995.303	1.693.006	2.028,89
2020	3.330.186.788.242	1.806.347	1.843,60

Sumber: Bappedalitbang Kab. Banyumas, 2021

3.3.2.2. Kemandirian Keuangan

Kemandirian keuangan daerah merupakan indikator untuk menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mendanai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kemandirian daerah dihitung dari rasio PAD dengan total pendapatan daerah. Semakin besar angka rasio PAD terhadap total pendapatan daerah, maka kemandirian daerah semakin besar. Namun demikian, peningkatan rasio ini dapat

bermakna negatif jika sumber PAD adalah pendapatan bunga yang menunjukkan besarnya dana pemerintah daerah yang disimpan di bank dan tidak dibelanjakan. Kondisi kemandirian keuangan Pemerintah Kabupaten Banyumas kurun waktu 2016-2020 meningkat. Tahun 2020 kemandirian keuangan meningkat dibandingkan tahun 2019, namun diikuti dengan penurunan pendapatan asli daerah yang akhirnya berdampak terhadap penurunan pendapatan daerah sebagai dampak pandemi COVID-19. Secara lebih terinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.6.
Tabel Rasio Kemandirian Keuangan Tahun 2016-2020

Tahun	Total Pendapatan Daerah (Rupiah)	Total Pendapatan Asli Daerah (Rupiah)	Kemandirian Keuangan
2016	2.852.968.390.191	541.418.386.912	18,98
2017	3.221.258.052.894	619.701.627.380	19,24
2018	3.265.926.651.861	648.326.914.035	19,85
2019	3.434.925.995.303	686.805.512.326	19,99
2020	3.330.186.788.242	668.211.148.299	20,07

Sumber: Bappedalitbang Kab. Banyumas, 2021

3.3.2.3. Ruang Fiskal

Indikator ini menunjukkan seberapa besar keleluasaan (diskresi) yang dimiliki Pemda dalam menggunakan dananya secara bebas dalam menentukan prioritas belanja, sehingga perlu menjadi perhatian dalam menentukan prioritas agar dapat menyelesaikan permasalahan yang ada di Banyumas, kondisi Ruang Fiskal di Banyumas kurun waktu tahun 2016-2020 cenderung fluktuatif. Mendasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang mengakibatkan meningkatnya pendanaan untuk belanja pegawai. Ruang fiskal daerah tahun 2016-2020 sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 3.7.
Ruang Fiskal Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2020

Tahun	Total Pendapatan (Rp.)	Pendapatan Hibah (Rp.)	Dana Alokasi Khusus (Rp.)	Dana Otsus/Penyesuaian/ Darurat (Rp.)	Belanja Pegawai (Rp.)	Ruang Fiskal (%)
2016	2.852.968.390.191	14.075.240.800	412.853.809.576	205.450.575.000	1.365.106.607.402	29,99
2017	3.221.258.052.894	175.521.251.417	449.360.479.699	53.859.923.000	1.231.069.947.011	40,71
2018	3.265.926.651.861	169.332.334.519	477.533.051.326	34.250.000.000	1.274.582.003.301	40,12
2019	3.434.925.995.303	167.439.942.427	474.659.908.721	44.828.869.000	1.312.828.039.831	41,78
2020	3.330.186.788.242	182.105.101.820	497.906.166.804	39.577.682.000	1.255.169.826.604	40,70

Sumber: Bappedalitbang Kab. Banyumas, 2021

3.3.2.4. Kemampuan Mendanai Belanja Daerah

Semakin besar rasio penerimaan daerah dan penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran daerah dan pengeluaran pembiayaan, maka kemampuan mendanai belanja daerah semakin besar pula. Kurun waktu tahun 2016-2020, kondisi kemampuan mendanai belanja Pemerintah Kabupaten Banyumas secara umum baik karena seluruh pengeluaran dapat dibiayai. Untuk lebih detilnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.8.
Tabel Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas
Tahun 2016-2020

Tahun	Total Pendapatan Daerah (Rp.)	Penerimaan Pembiayaan (Rp.)	Total Penerimanan (Rp.)	Total Belanja (Rp.)	Pengeluaran Pembiayaan (Rp.)	Total Pengeluaran (Rp.)	Kemandirian (%)
2016	2.852.968.390.191	461.705.862.364	3.314.674.252.555	2.902.853.581.862	22.084.000.000	2.924.937.581.862	1,13
2017	3.221.258.052.894	389.736.670.693	3.610.994.723.587	3.200.686.516.259	27.992.500.000	3.228.679.016.259	1,12
2018	3.265.926.651.861	388.439.356.857	3.654.366.008.718	3.319.060.759.043	44.959.920.000	3.364.020.679.043	1,09
2019	3.434.925.995.303	290.345.329.675	3.725.271.324.978	3.457.550.201.497	25.016.000.000	3.482.566.201.497	1,07
2020	3.330.186.788.242	242.705.123.481	3.572.891.911.723	3.249.141.935.364	29.519.500.000	3.278.661.435.364	1,09

Sumber: Bappedalitbang Kab. Banyumas, 2021

3.3.2.5. Belanja Modal

Salah satu ukuran kualitas belanja yang baik adalah semakin besarnya proporsi belanja modal terhadap belanja daerah keseluruhan. Belanja modal yang besar diharapkan akan memberikan dampak yang positif bagi pertumbuhan ekonomi di daerah yang kemudian akan meningkatkan potensi penerimaan daerah yang baru. Kondisi rasio belanja modal Pemerintah Kabupaten Banyumas tahun 2016-2020 berfluktuatif sejalan dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah dan nasional. Belanja modal dari tahun 2016-2020 yang tertinggi yaitu untuk belanja jalan, irigasi dan jaringan. Tahun 2020 belanja modal mengalami penurunan signifikan dikarenakan adanya pengalihan alokasi penganggaran untuk penanganan dampak pandemi COVID-19. Kondisi kualitas belanja modal Pemerintah Kabupaten Banyumas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.9.
Rasio Belanja Modal Daerah Kabupaten Banyumas
Tahun 2016-2020

Tahun	Belanja Modal (Rp.)	Total Belanja (Rp.)	Kualitas Belanja Modal (%)
2016	400.832.864.576	2.902.853.581.862	13,81
2017	472.485.470.290	3.200.686.516.259	14,76
2018	525.416.939.614	3.319.060.759.043	15,83
2019	478.797.497.271	3.457.550.201.497	13,85
2020	363.470.409.584	3.249.141.935.364	11,19

Sumber: Bappedalitbang Kab. Banyumas, 2021.

3.3.2.6. Belanja Pegawai Tidak Langsung

Semakin membaiknya kualitas belanja daerah bisa juga dilihat dari semakin menurunnya porsi Belanja Tidak Langsung (belanja pegawai) dalam APBD, sehingga terjadi peningkatan Belanja Langsung, terutama Belanja Modal dan Belanja Barang dan Jasa, terkait dengan layanan publik yang dapat mendorong roda perekonomian daerah. Periode tahun 2016-2020 kualitas belanja pegawai di Kabupaten Banyumas cenderung fluktuatif, dimana rata-rata sebesar 40,09 persen selama 5 tahun. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.10.
Tabel Kualitas Belanja Pegawai Kabupaten Banyumas
Pada Tahun 2016-2020

Tahun	Belanja Pegawai (Rp.)	Total Belanja (Rp.)	Kualitas Belanja Pegawai (%)
2016	1.365.106.607.402	2.902.853.581.862	47,03
2017	1.231.069.947.011	3.200.686.516.259	38,46
2018	1.274.582.003.301	3.319.060.759.043	38,40
2019	1.312.828.039.831	3.457.550.201.497	37,97
2020	1.255.169.826.604	3.249.141.935.364	38,63

Sumber: Bappedalitbang Kab. Banyumas, 2021

3.3.2.7. Tax Ratio

Rasio tersebut dipergunakan untuk menilai tingkat kepatuhan pembayaran pajak oleh masyarakat dalam suatu daerah dan digunakan untuk mengetahui perkiraan besaran porsi pajak dalam perekonomian daerah. Dengan demikian, pada hakikatnya *tax ratio* bisa dipergunakan untuk melihat indikasi besarnya beban pajak *(tax burden)* yang harus

ditanggung masyarakat. Karena sifatnya yang demikian itu, maka sebenarnya *tax burden* terkait dengan *ability to pay*, di mana orang yang lebih mampu seharusnya membayar pajak lebih banyak. *Tax burden* terkait pula dengan keadilan. *Tax ratio* sebesar 0,39 persen pada tahun 2020 masih belum menggambarkan kondisi kepatuhan membayar pajak. Perhitungan *tax ratio* sesuai kewenangan Kabupaten meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak PBB perdesaan dan perkotaan dan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, sehingga perluasan basis pajak masih di perlukan. Indikasi penyebab rendahnya angka *tax ratio* daerah diantaranya belum optimalnya unit pemungut pajak dalam melakukan intensifikasi maupun ekstensifikasi dan tingkat kesadaran dari pembayar pajak yang masih perlu ditingkatkan. Untuk mengetahui rincian tax ratio Banyumas tahun 2016-2020 dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 3.11.
Tax Ratio Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2020

Tahun	Y Pajak (Rp.)	PDRB (Rp.)	Tax Ratio (%)
2016	147.356.151.979	42.016.940.500.000	0,35
2017	199.612.331.442	45.585.979.730.000	0,44
2018	211.550.291.844	49.896.126.750.000	0,42
2019	229.377.285.773	53.948.860.050.000	0,43
2020	208.645.380.657	53.682.118.370.000	0,39

Sumber: Bappedalitbang Kab. Banyumas, 2021

3.3.2.8. Perkembangan Neraca Daerah

Neraca Pemerintah Daerah memberikan informasi bagi pengguna laporan mengenai posisi keuangan berupa aset, kewajiban (utang) dan ekuitas pada tanggal pelaporan.

a. Aset dalam neraca menginformasikan tentang sumber daya ekonomi yang dimiliki pemerintah daerah yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial di masa mendatang. Pertumbuhan aset Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2020 menunjukkan flutuatif. Aset diklasifikasikan menjadi:

   1. Aset Lancar merupakan kas dan setara kas yang siap digunakan dan tidak terikat penggunaannya serta aset lainnya yang dapat segera diubah menjadi kas dan setara kas dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Pertumbuhan aset lancar fluktuatif pada Tahun 2016-2020, pada Tahun 2017-2019 menurun dan pada Tahun 2020 meningkat kembali. Penurunan terjadi pada

pos kas dan setara kas yang berisi sisa saldo kas yang berada pada Rekening Kas Umum Daerah dan penempatan deposito daerah serta pada pos persediaan pada SKPD yang menandakan pengadaan barang habis pakai, langsung digunakan untuk melaksanakan kegiatan dan tidak banyak menghasilkan sisa persediaan.

2. Investasi Jangka Panjang berupa investasi permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen di Pemerintah Kabupaten Banyumas berupa penyertaan modal pada BUMD/BUMN. Pertumbuhan Investasi Jangka Panjang pada Tahun 2016-2020 mengalami kenaikan, hal ini dikarenakan Pemerintah Kabupaten Banyumas menambah pembiayaan penyertaan modal pada BUMD.
3. Aset Tetap merupakan aset berwujud yang dimilik pemerintah daerah yang secara aktif digunakan untuk kegiatan operasi pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Pertumbuhan aset tetap Tahun 2016-2020 mengalami kenaikan, hal ini menunjukkan peningkatan sarana dan prasarana fisik pemerintah daerah berupa pengadaan dan pembangunan infrastruktur baru atau perbaikan yang menambah nilai aset tetap.
4. Dana Cadangan merupakan dana yang disisihkan atau dibatasi penggunaannya, dkhususkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relative besar yang tidak dapat dipenuhi dalam sat tahun anggaran. Dana cadangan pada Pemerintah Kabupaten Banyumas dilakukan pada Tahun 2016-2017 yang digunakan untuk pembiayaan pelaksanaan pemilihan kepala daerah.
5. Aset Lainnya pada Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2020 berupa aset kemitraan dengan pihak ketiga, aset tak berwujud dan aset lainnya (barang yang diusulkan penghapusan) yang mengalami peningkatan.

b. Kewajiban pada neraca menginformasikan kepada pengguna laporan keuangan tentang utang pemerintah daerah kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas pemerintah daerah. Kewajiban yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas nilainya cukup signifikan. Walaupun kewajiban cukup siginifikan masih dapat tertutup dengan nilai aktiva yang dibayar pada tahun berikutnya.

c. Ekuitas pada neraca menginformasikan kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih anara aset dan kewajiban pemerintah daerah atau dapat dikatakan sebagai hak residual pemerintah daerah atas aktiva pemerintah setelah dikurangi semua kewajiban. Untuk mengetahui rincian Neraca Kabupaten Banyumas tahun 2016-2020 dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 3.12.
Neraca Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2020

No.	Uraian	Tahun 2016 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
1.	**Aset**					
1.1.	**Aset Lancar**	**497.361.930.629,86**	**480.266.308.100,03**	**421.131.968.060,98**	**393.503.349.043,84**	**450.804.921.753,17**
1.1.1.	Kas	398.675.479.688,40	383.054.327.899,40	291.001.753.539,23	243.492.888.706,00	295.086.103.313,00
1.1.2.	Investasi Jangka Pendek	-	-			-
1.1.3.	Piutang	66.192.101.864,69	62.635.247.775,86	83.920.296.532,28	104.782.136.234,25	105.394.102.577,71
	Piutang Pendapatan	122.522.035.870,22	121.786.731.317,22	159.946.912.399,35	183.419.387.107,50	187.921.289.789,50
	Piutang Lain-lain	-	-	-	-	-
	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	(56.329.934.005,53)	(59.151.483.541,36)	(76.026.615.867,07)	(78.637.250.873,25)	(82.527.187.211,79)
1.1.4.	Beban Dibayar di Muka	10.000.000,00	37.024.767,00	56.972.500,00	33.450.000,00	56.021.004,17
1.1.5.	Persediaan	32.484.349.076,77	34.539.707.657,77	46.152.945.489,47	45.194.874.103,59	50.268.694.858,29
1.2.	**Investasi Jangka Panjang**	**214.646.152.155,02**	**255.365.693.134,17**	**304.217.687.975,82**	**339.715.998.092,87**	**378.325.392.053,97**
1.2.1.	Investasi Non Permanen	6.636.842.673,70	8.790.378.320,85	4.217.375.329,50	5.486.264.507,55	6.356.763.406,65
	Dana Bergulir	8.850.313.631,00	11.108.813.631,00	7.231.396.285,00	8.825.605.435,00	10.220.282.762,00
	Dana Bergulir Diragukan Tertagih	(2.213.470.957,30)	(2.318.435.310,15)	(3.014.020.955,50)	(3.339.340.927,45)	(3.863.519.355,35)
1.2.2.	Investasi Permanen	208.009.309.481,32	246.575.314.813,32	300.000.312.646,32	334.229.733.585,32	371.968.628.647,32
1.3.	**Aset Tetap**	**4.272.597.175.495,92**	**4.584.300.038.851,92**	**5.574.971.557.300,92**	**5.323.888.752.221,15**	**5.548.937.845.924,09**
1.3.1.	Tanah	2.334.569.556.143,00	2.380.053.882.103,00	3.034.902.309.299,00	3.111.132.568.046,00	3.163.257.002.332,00
1.3.2.	Peralatan dan Mesin	701.438.053.913,45	829.487.321.107,45	914.531.634.533,45	999.660.908.976,13	1.107.278.625.911,13
1.3.3.	Gedung dan Bangunan	1.292.414.298.767,56	1.436.733.903.153,56	1.576.643.570.027,56	1.615.403.164.161,56	1.718.790.176.492,56
1.3.4.	Jalan, Jaringan dan Instalasi	1.560.706.689.442,00	1.755.817.176.064,00	2.125.880.392.701,00	2.336.298.143.598,00	2.523.120.152.801,00
1.3.5.	Aset Tetap Lainnya	101.790.062.138,36	103.571.579.201,36	109.033.835.397,36	102.399.853.759,86	108.539.801.887,86
1.3.6.	Konstruksi dalam Pengerjaan	12.622.707.788,00	8.778.565.923,00	20.233.549.923,00	46.779.359.223,00	48.949.644.437,00
1.3.7.	Akumulasi Penyusutan	(1.730.944.192.696,45)	(1.930.142.388.700,45)	(2.206.253.734.580,45)	(2.887.785.245.543,40)	(3.120.997.557.937,46)
1.4.	**Dana Cadangan**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1.4.1.	Dana Cadangan	-	-	-	-	-
1.5.	**Aset Lainnya**	**143.608.723.415,00**	**143.845.341.931,00**	**119.543.839.116,00**	**169.544.316.154,82**	**118.237.419.304,79**
1.5.1.	Tagihan Piutang Penjualan Angsuran	-	-	-	-	-
1.5.2.	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	111.200.000,00	111.200.000,00	-	-	-
1.3.3.	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	117.951.191.565,00	117.951.191.565,00	117.951.191.565,00	97.060.888.565,00	61.877.241.715,00
1.3.4.	Aset Tidak Berwujud	-	428.282.284,00	488.232.775,00	322.499.375,00	271.262.772,00
1.3.5.	Aset Lain-lain	32.044.340.740,00	31.725.812.972,00	10.847.931.208,00	132.331.217.370,82	105.165.119.528,50
1.3.6.	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(6.498.008.890,00)	(6.371.144.890,00)	(9.743.516.432,00)	(60.170.289.156,00)	(49.076.204.710,71)
	Jumlah Aset	**5.128.213.981.695,80**	**5.463.777.382.017,12**	**6.419.865.052.453,72**	**6.226.652.415.512,68**	**6.496.305.579.036,02**

No.	Uraian	Tahun 2016 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
2.	**Kewajiban**					
2.1.	**Kewajiban Jangka Pendek**	**39.369.582.708,34**	**40.163.426.452,34**	**47.584.450.428,00**	**48.022.508.588,25**	**55.245.963.960,00**
2.1.1.	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	257.360.504,00	292.620.830,00	467.202.961,00	543.554.646,00	524.042.513,00
	Utang Bunga	-	-	-	-	-
	Utang Pajak	-	-	-	-	-
2.2.2.	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	10.500.000.000,00	5.000.000.000,00	11.500.000.000,00	11.500.000.000,00	11.500.000.000,00
2.2.3.	Pendapatan Diterima Dimuka	1.459.484.647,34	1.322.204.363,34	1.468.880.768,00	1.160.892.742,25	453.131.465,00
2.2.4.	Utang Beban	27.152.737.557,00	33.548.601.259,00	30.516.311.240,00	34.804.861.200,00	37.127.158.668,00
2.2.5.	Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-	3.632.055.459,00	13.200.000,00	5.641.631.314,00
2.2.	**Kewajiban Jangka Panjang**	**11.000.000.000,00**	**6.500.000.000,00**	**-**	**-**	**-**
2.2.1.	Utang Dalam Negeri	11.000.000.000,00	6.500.000.000,00	-	-	
2.2.2.	Utang Luar Negeri	-	-			
	Jumlah Kewajiban	**50.369.582.708,34**	**46.663.426.452,34**	**47.584.450.428,00**	**48.022.508.588,25**	**55.245.963.960,00**
3.	**Ekuitas**					
	Jumlah Ekuitas	**5.077.844.398.987,00**	**5.417.113.955.564,78**	**6.372.280.602.025,72**	**6.178.629.906.924,43**	**6.441.059.615.076,02**
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana		**5.128.213.981.695,34**	**5.463.777.382.017,12**	**6.419.865.052.453,72**	**6.226.652.415.512,68**	**6.496.305.579.036,02**

Sumber: BPKAD Kabupaten Banyumas, 2021

3.3.2.9. Rasio Likuiditas

Rasio Likuiditas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Walaupun pemerintah daerah sudah menyusun anggaran kas, tetapi analisis likuiditas akan lebih bermaanfaat bagi manajemen dibandingkan jika hanya mendasarkan pada anggaran kas saja. Analisis yang digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas menggunakan:

a. Rasio lancar (*Current Ratio*) membandingkan antara aktiva lancar yang dimiliki pemerintah daerah pada tanggal neraca dengan Kewajiban Lancar (utang jangka pendek). Rasio ini menunjukkan apakah pemerintah daerah memiliki aset yang cukup untuk melunasi utangnya. Rasio lancar (*Current Ratio*) Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 mengalami penurunan namun masih pada nilai positif, hal ini menandakan bahwa Pemerintah Kabupaten Banyumas memiliki aset yang cukup untuk melunasi kewajiban lancarnya. Untuk mengetahui rincian *Current Ratio* Kabupaten Banyumas tahun 2016-2020 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.13.
***Current Ratio* Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2020**

Tahun	Aktiva Lancar (Rp.)	Kewajiban Lancar (Rp.)	Ratio (%)
2016	497.361.930.629,86	39.369.582.708,34	12,63
2017	480.266.308.100,03	40.163.426.452,34	11,96
2018	421.131.968.060,98	47.584.450.428,00	8,85
2019	393.503.349.043,84	48.022.508.588,25	8,19
2020	450.804.921.753,17	55.245.963.960,00	8,16

Sumber: BPKAD Kabupaten Banyumas, 2021

b. Rasio Kas (*Cash Ratio*) membandingkan antara kas yang tersedia dalam pemerintah daerah ditambah investasi jangka pendek dibagi dengan kewajiban lancar. Rasio kas bermanfaat untuk mengetahui kemampuan pemerintah daerah dalam membayar kewajiban yang segera harus dipenuhi dengan kas dan investasi jangka pendek yang dimiliki pemerintah daerah. Rasio kas Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2020 fluktuatif tahun 2016-2019 mengalami penurunan dan tahun 2020 mengalami kenaikan, walaupun terjadi penurunan tetapi rasio ini masih dalam kategori aman artinya Pemerintah Kabupaten Banyumas dapat memenuhi/melunasi semua kewajibannya. Untuk mengetahui rincian *Cash Ratio Kabupaten* Banyuma tahun 2016-2020 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.14.
***Cash Ratio* Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2020**

Tahun	Kas (Rp.)	Kewajiban Lancar (Rp.)	Ratio (%)
2016	398.675.479.688,40	39.369.582.708,34	10,13
2017	383.054.327.899,40	40.163.426.452,34	9,54
2018	291.001.753.539,23	47.584.450.428,00	6,12
2019	243.492.888.706,00	48.022.508.588,25	5,07
2020	295.086.103.313,00	55.245.963.960,00	5,34

Sumber: BPKAD Kabupaten Banyumas, 2021.

c. Rasio Cepat (*quick ratio*) membandingkan antara aktiva lancar setelah dikurangi persediaan dengan kewajiban. Rasio cepat mengindikasikan apakah pemerintah daerah dapat membayar kewajibannya dengan cepat, semakin tinggi nilai rasio cepat semakin tinggi tingkat likuiditas keuangan pemerintah daerah. Rasio cepat Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2020 menurun. Walaupun mengalami penurunan masih menunjuk-kan angka positif, hal ini menunjukkan bahwa tingkat likuiditas keuangan tinggi sehingga dapat memenuhi semua kewajibannya dengan cepat. Untuk mengetahui rincian *Quick Ratio* Kabupaten Banyumas tahun 2016-2020 dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3.15.
***Quick Ratio* Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2020**

Tahun	Aktiva Lancar (Rp.)	Persediaan (Rp.)	Kewajiban Lancar (Rp.)	Ratio (%)
2016	497.361.930.629,86	32.484.349.076,77	39.369.582.708	11,81
2017	480.266.308.100,03	34.539.707.657,77	40.163.426.452	11,10
2018	421.131.968.060,98	46.152.945.489,47	47.584.450.428	7,88
2019	393.503.349.043,84	45.194.874.103,59	48.022.508.588	7,25
2020	450.804.921.753,17	50.268.694.858,29	55.245.963.960	7,25

Sumber: BPKAD Kabupaten Banyumas, 2021

3.3.2.10. Rasio Solvabilitas

Rasio Solvabilitas digunakan untuk melihat kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi seluruh kewajibannya, baik kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang. Suatu pemerintah daerah dikatakan solvable apabila pemerintah daerah tersebut mempunyai aktiva atau kekayaan yang cukup untuk membayar semua hutang-hutangnya, sebaliknya apabila jumlah aktiva tidak cukup atau lebih kecil daripada jumlah hutang, berarti pemerintah daerah tersebut dalam keadaan insolvable. Rasio Solvabilitas Pemerintah Kabupaten Banyumas menunjukkan kenaikan yang signifikan pada Tahun 2016-2018, namun mengalami penurunan pada tahun 2019 dan 2020. Walaupun ratio tersebut mengalami kenaikan maupun penurunan kemampuan Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam memenuhi seluruh kewajibannya masih sangat *solvable*. Untuk mengetahui rincian Rasio Solvabilitas Kabupaten Banyumas tahun 2016-2020 dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3.16.
Rasio *Solvabilitas* Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2020

Tahun	Total Aktiva (Rp.)	Total Kewajiban (Rp.)	Ratio (%)
2016	5.128.213.981.695,80	50.369.582.708,34	101,81
2017	5.463.777.382.017,12	46.663.426.452,34	117,09
2018	6.419.865.052.453,72	47.584.450.428,00	134,92
2019	6.226.652.415.512,68	48.022.508.588,25	129,66
2020	6.496.305.579.036,02	55.245.963.960,00	117,59

Sumber: BPKAD Kabupaten Banyumas, 2021

3.3.2.11. Rasio Laverage

Rasio Utang (leverage) sangat penting bagi kreditor dan calon kreditor potensial pemerintah daerah dalam mebuat keputusan pemberian kredit. Rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat leverage yaitu Rasio utang terhadap ekuitas *(Total Debt to Equity Ratio/DER).* DER merupakan rasio yang digunakan untuk mengetahui bagian dari setiap rupiah ekuitas dana yang dijadikan jaminan untuk keseluruhan utang. Rasio ini mengindikasikan seberapa besar pemerintah daerah mungkin sudah kelebihan utang *(over–laveraged)* dan harus segera mencari jalan untuk mengurangi utang. Semakin besar rasio ini menunjukkan risiko pemberian utang semakin besar. Rasio DER pada Pemerintah Kabupaten Banyumas menunjukkan trend penurunan Tahun 2017-2019 dan kenaikan pada Tahun 2020, walaupun mengalami penurunan dan kenaikan rasio menunjukkan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mempunyai aktiva atau kekayaan yang tinggi untuk membayar semua kewajibannya dengan modal yang telah dimiliki. Untuk mengetahui rincian *DER* Jawa Tengah tahun 2016-2020 dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3.17.
Debt to Equity Ratio Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2020

Tahun	Total Kewajiban (Rp.)	Total Ekuitas (Rp.)	Ratio (%)
2016	50.369.582.708,34	5.077.844.398.987,00	0,01
2017	46.663.426.452,34	5.417.113.955.564,78	0,01
2018	47.584.450.428,00	6.372.280.602.025,72	0,01
2019	48.022.508.588,25	6.178.629.906.924,43	0,01
2020	55.245.963.960,00	6.441.059.615.076,02	0,01

Sumber: BPKAD Kabupaten Banyumas, 2021

3.4. Kerangka Pendanaan

Proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2022-2023 disusun dengan mempertimbangkan capaian kinerja tahun 2016-2020 dan penetapan tahun 2021. Pendapatan Asli Daerah tahun 2022 utamanya dari sektor pajak disusun mendasarkan pada proyeksi penerimaan pada tahun 2021, trend realisasi pendapatan 10 tahun terakhir, asumsi pertumbuhan ekonomi 4,5 persen dan asumsi bahwa tahun 2022 masuk dalam fase *recovery*. Sedangkan target proyeksi PAD tahun 2023 menggunakan asumsi seperti yang digunakan pada tahun 2022 dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi sebesar 5 persen serta optimis bahwa tahun 2023 kondisi sudah normal kembali. Untuk Tahun 2021-2023 PAD diproyeksikan meningkat rata-rata sebesar Rp. 89,34 milyar atau 12,19 persen.

Guna pencapaian target PAD tahun 2022 dan 2023 akan dilakukan upaya peningkatan kinerja pendapatan daerah melalui kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi. Upaya intensifikasi pendapatan ditempuh melalui upaya :

a. Pemetaan potensi daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
b. Meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam pembayaran pajak.

c. Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Daerah dengan Pemerintah Pusat dan SKPD/OPD Penghasil.
d. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
e. Meningkatkan peran dan fungsi UPT, UPPD dan Balai Penghasil dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan.

Sedangkan upaya *ekstensifikasi* pendapatan daerah melalui:

a. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dan menjaga tingkat kesehatan BUMD untuk dapat meningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah.
b. Penguatan kelembagaan dan sinergitas antar BUMD dan OPD serta mengembangkan potensi usaha.
c. Revitalisasi dan pendayagunaan aset milik pemerintah sebagai sumber pendapatan daerah.
d. Perlunya menggerakkan sektor-sektor lain sebagai sumber pembiayaan.

Selain itu, dengan kondisi fiskal yang semakin terbatas menuntut pemerintah untuk berinovasi dalam pembiayaan program-program pembangunan melalui kolaborasi dengan sektor swasta utamanya untuk mendanai proyek-proyek infrastruktur strategis yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Komposisi Belanja Daerah sampai dengan tahun 2020 disusun mendasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Mulai tahun 2021, struktur belanja daerah disusun sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Belanja daerah pada perubahan RPJMD Tahun 2018-2023 disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja, memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta perkiraan situasi dan kondisi pada tahun mendatang, serta dilakukan secara selektif, akuntabel, transparan, dan berkeadilan.

Kebijakan Belanja Daerah Tahun 2022–2023 diarahkan untuk:

1. Memenuhi pelaksanaan program prioritas daerah yang dijaring melalui aspirasi masyarakat dalam Musrenbang sesuai dengan urusan pemerintahan yang harus dilaksanakan;
2. Mengutamakan pemenuhan belanja untuk urusan wajib yang terkait pelayanan dasar sesuai standar pelayanan minimal;
3. Mengedepankan program-program yang menunjang pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan dan pengangguran, peningkatan kualitas sumberdaya manusia serta ketahanan terhadap bencana baik alam maupun non alam;
4. Memenuhi alokasi prosentase belanja sebagaimana amanat peraturan perundangan diantaranya untuk fungsi pendidikan; fungsi kesehatan; dan infrastruktur.

Struktur belanja daerah pada Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023 mendasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021-2023 diproyeksikan meningkat rata-rata sebesar Rp. 77,90 milyar atau 2,04 persen, struktur Belanja Daerah terdiri dari:

1. Belanja Operasi, untuk Tahun 2021-2023 diproyeksikan meningkat rata-rata sebesar Rp. 95,21 milyar atau 3,66 persen. Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan rutin Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi :
   a. Belanja Pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan/ Anggota DPRD, dan Pegawai ASN dan PPPK yang dianggarkan pada belanja OPD bersangkutan serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk Tahun 2021-2023 belanja pegawai diproyeksikan meningkat rata-rata sebesar Rp. 87,78 milyar atau 5,44 persen, kenaikan tersebut dikarenakan adanya rencana penerimaan CPNS dan PPPK untuk Kabupaten Banyumas, dan untuk *acrees* 2,5% yang digunakan anata lain untuk kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, kenaikan tunjangan PNS dan PPPK.
   b. Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan untuk mendukung pelaksanaan aktifitas dengan prinsip efektifitas, effisiensi, akutabilitas, manfaat dan memperhatikan protokol COVID-19 dalam pelaksanaan *New Nomal*. Belanja Barang dan Jasa. Untuk Tahun 2021-2023 diproyeksikan meningkat rata-rata sebesar Rp. 1,68 milyar atau 0,19 persen, hal ini dikarena diperkirakan adanya kenaikan kebutuhan dan harga atas barang/jasa pada tahun yang akan datang, seperti kenaikan kebutuhan barang/jasa terkait pendemi COVID-19 dan biaya jasa Non PNS yang setiap tahunnya naik dengan adanya kenaikan UMR untuk Wilayah Kabupaten Banyumas.
   c. Belanja Hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja Hibah, untuk Tahun 2021-2023 diproyeksikan meningkat rata-rata sebesar Rp. 3,93 milyar atau 5,75 persen yang digunakan untuk hibah kepada KPU dan Bawaslu sebagai dana cadangan untuk penyelenggara Pilkada Bupati dan Wakil Bupati periode 2023-2028 , Belanja hibah antara lain digunakan untuk bantuan operasional PAUD dan TK, SD, MI dan SMP, stimulan kesejahteraan pendidik keagamaan, Ponpes, PMI, Pramuka, organisasi olahraga/KONI, sarana peribadatan/keagamaan, kebudayaan, serta hibah kepada partai politik.
   d. Bantuan Sosial merupakan pemberian bantuan berupa uang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Pengelolaan bantuan sosial diatur melalui Peraturan Bupati Banyumas Nomor 17 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengangaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hubah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas. Belanja Bantuan Sosial, untuk Tahun 2021-2023 diproyeksikan meningkat rata-rata sebesar Rp. 1,23 milyar atau

7,23 persen. Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk meningkatkan status sosial masyarakat baik secara langsung kepada anggota masyarakat yang terkena dampak COVID-19 maupun melalui kelompok dan organisasi kemasyarakatan di bidang pendidikan, keagamaan, kesehatan, pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan, serta kelompok sosial lainnya.

2. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah dan batas minimal kapitalisasi aset. Belanja modal sebagian besar berada pada urusan Pendidikan, Kesehatan dan Pekerjaan Umum. Belanja Modal, untuk Tahun 2021-2023 diproyeksikan meningkat rata-rata sebesar Rp. 6,44 milyar atau 2,10 persen, penurunan terjadi dikarena pada Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Banyumas yang rencananya akan menerima pinjaman PEN dari pemerintah Pusas yang peruntukannya untuk Belanja Modal untuk peningkatan fasilitas Pariwisata Baturraden dengan tujuan akan adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Banyumas.

3. Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Penganggaran Belanja Tidak Terduga tersebut dianggarkan secara rasional untuk keadaan darurat yang meliputi :

   a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa.
   b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau
   c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik serta keadaan yang mendesak yang meliputi :
      1) Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan.
      2) Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.
      3) Pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
      4) Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

   Belanja Tidak Terduga, untuk Tahun 2021-2023 diproyeksikan menurun rata-rata sebesar minus Rp. 29,55 milyar atau minus 46,10 persen, penurunan tersebut diharapkan bahwa Pendemi COVID-19 sudah berkurang, mereda, bahwa sudah tidak ada lagi.

4. Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya (Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa). Belanja Transfer, untuk Tahun 2021-2023 diproyeksikan meningkat rata-rata sebesar Rp. 18,63 milyar atau 2,94 persen.

   Belanja transfer tahun dirinci atas jenis:
   a. Belanja Bagi Hasil adalah pajak daerah kepada pemerintah kabupaten/kota. Belanja Bagi Hasil, untuk Tahun 2021-2023 diproyeksikan meningkat rata-rata sebesar Rp. 1,69 milyar atau 4,89 persen. Meningkatnya dana transfer diperkirakan karena adanya

penerimaan CPNS dan PPPK untuk Kabupaten Banyumas dan diharapkan ada penambahan dana transfer yang ditujukan untuk Pemerintah Desa/kelurahan.

b. Belanja Bantuan Keuangan merupakan dana yang diberikan kepada Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya dalam rangka sinergitas dan percepatan pencapaian sasaran pembangunan. Belanja Bantuan Keuangan, untuk Tahun 2021-2023 diproyeksikan meningkat rata-rata sebesar Rp. 16,94 milyar atau 2,83 persen, proyeksi peningkatan tersebut di proyeksikan Pemerintah Pusat dan pemerintah Provinsi akan memberiakn bantuan kepada Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa/Kelurahan dalam rangka pemulihan Ekonomi (UMKM) dan untuk pembangunan dalam rangka pemerataan pembangunan.

5. Dari sisi pembiayaan daerah, penerimaan pembiayaan daerah pada Perubahan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 diproyeksikan bersumber dari Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat pada tahun 2021 dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun anggaran sebelumnya dan Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah pada tahun berkenaan. Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah dialokasikan untuk pembentukan dana cadangan Pilkada sampai dengan tahun 2023, penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban penyertaan modal BUMD yang dikelola dengan prinsip kehati-hatian *(prudential)* berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlau, dan pada tahun 2023 dikeluarkan juga untuk Angsuran Pokok Pinjaman PEN Daerah dan pemberian pinjaman daerah yang akan dibayarkan pada tahun berkenaan.

Untuk lebih jelasnya maka Proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021-2023 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.18.
Target Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah pada Perubahan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023

No.	URAIAN	Tahun 2021 *) (Rp.)	Tahun 2022 (Rp.)	Tahun 2023 (Rp.)
1.	**Pendapatan Asli Daerah (PAD)**	**690.938.747.939**	**773.871.785.788**	**869.618.580.432**
1.1.	Pajak Daerah	237.887.970.118	312.710.291.463	370.528.048.749
1.2.	Retribusi Daerah	34.625.803.400	35.491.448.485	62.778.734.697
1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	16.537.124.821	13.735.000.000	14.078.375.000
1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	401.887.849.600	411.935.045.840	422.233.421.986
2.	**Pendapatan Transfer**	**2.521.791.430.337**	**2.804.277.321.493**	**2.927.065.254.194**
2.1.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.278.055.711.135	2.524.044.411.310	2.633.159.320.102
2.2.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	243.735.719.202	280.232.910.183	293.905.934.092
3.	**Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah**	**193.754.809.000**	**198.515.001.450**	**203.414.652.563**
3.1.	Pendapatan Hibah	29.503.209.000	30.777.250.000	32.512.197.000
3.2.	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentun Peraturan Perundang-Undangan	164.251.600.000	167.737.751.450	170.902.455.563
	Jumlah Pendapatan Daerah	**3.406.484.987.276**	**3.776.664.108.731**	**4.000.098.487.189**
4.	**Belanja Operasi**	**2.569.855.670.440**	**2.718.284.823.115**	**2.760.284.816.572**
4.1.	Belanja Pegawai	1.586.971.635.810	1.727.213.367.988	1.762.541.034.170
4.2.	Belanja Barang dan Jasa	887.968.526.574	888.403.452.995	891.322.452.995
4.3.	Belanja Bunga	10.900.000.000	10.900.000.000	12.090.000.000
4.4.	Belanja Hibah	67.569.521.050	74.482.639.000	75.427.466.120
4.5.	Belanja Bantuan Sosial	16.445.987.006	17.285.363.132	18.903.863.287
5.	**Belanja Modal**	**586.306.558.764**	**449.934.796.369**	**573.537.671.597**
6.	**Belanja Tidak Terduga**	**64.102.708.973**	**5.000.000.000**	**5.000.000.000**
7.	**Belanja Transfer**	**625.024.989.458**	**647.525.489.247**	**662.275.999.020**
7.1.	Belanja Bagi Hasil	33.970.901.458	34.650.319.487	37.343.325.870
7.2.	Belanja Bantuan Keuangan	591.054.088.000	612.875.169.760	624.932.673.150
	Jumlah Belanja Daerah	**3.845.289.927.635**	**3.820.745.108.731**	**4.001.098.487.189**
	Surplus / (Defisit)	**(438.804.940.359)**	**(44.081.000.000)**	**(1.000.000.000)**

No.	URAIAN	Tahun 2021 *) (Rp.)	Tahun 2022 (Rp.)	Tahun 2023 (Rp.)
8.	**Penerimaan Pembiayaan**	**489.150.940.359**	**95.581.000.000**	**80.100.000.000**
8.1.	SILPA	294.230.476.359	94.581.000.000	79.100.000.000
8.2.	Penerimaan Pinjaman Daerah	191.920.464.000	-	-
8.3.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	3.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
9.	**Pengeluaran Pembiayaan**	**50.346.000.000**	**51.500.000.000**	**79.100.000.000**
9.1.	Pembentukan Dana Cadangan	20.000.000.000	25.000.000.000	10.000.000.000
9.2.	Penyertaan Modal Daerah	28.846.000.000	25.000.000.000	25.000.000.000
9.3.	Pengeluaran Angsuran Pokok Pinjaman PEN Daerah	-	-	42.600.000.000
9.4.	Pemberian Pinjaman Daerah	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000
	Pembiayaan Netto	**438.804.940.359**	**44.081.000.000**	**1.000.000.000**
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	**-**	**-**	**-**

Sumber: Bappedalitbang, BAPENDA dan BPKAD Kab. Banyumas, 2021.
*Keterangan: *) Perubahan RKPD 2021.*

BAB IV
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

Gambaran kondisi Kabupaten Banyumas yang telah diuraikan pada bab sebelumnya menunjukkan fakta bahwa masih ada persoalan pembangunan daerah yang harus diselesaikan sampai dengan tahun 2023. Permasalahan pembangunan daerah juga tidak terlepas dari pengaruh global, regional, dan nasional, seperti kondisi sosial, politik, dan ekonomi, serta berbagai kebijakan di tataran global dan nasional. Kondisi lingkungan global, regional, dan nasional yang semakin dinamis dan tidak bisa diperkirakan dalam jangka menengah akan menjadi tantangan sekaligus peluang dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Banyumas.

4.1. Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah merupakan gap antara kinerja pembangunan yang dicapai dengan yang direncanakan serta antara kondisi yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan. Secara garis besar permasalahan-permasalahan pembangunan di Kabupaten Banyumas telah diselaraskan dengan permasalahan-permasalahan yang didasarkan pada indikator TPB serta kondisi sumber daya dan lingkungan hidup, baik yang belum tercapai maupun yang perlu upaya untuk mencapai target akhir Kabupaten Banyumas tahun 2023.

Berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi terkait pelaksanaan capaian kinerja RPJMD sampai dengan Tahun 2020 diidentifikasi beberapa indikator kinerja utama bupati tidak dapat tercapai dengan adanya kondisi terdampak pandemi COVID 19 sehingga target menjadi terlalu tinggi untuk dicapai pada akhir periode RPJMD antara lain sebagai berikut:

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

   Capaian IPM Kabupaten Banyumas tahun 2019 sebesar 71,96 meningkat menjadi 71.98 pada tahun 2020, namun belum dapat mencapai target 2020 yaitu sebesar 72,55 serta perlu upaya keras untuk mencapai target akhir RPJMD sebesar 74,35. Target IPM menjadi terlalu tinggi karena dengan adanya pandemi COVID 19 berdampak pada pencapaian komponen IPM yaitu angka harapan hidup, yang mewakili bidang kesehatan, harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah yang mewakili capaian pembangunan di bidang pendidikan, dan pengeluaran per kapita untuk mengukur akses terhadap sumberdaya untuk mencapai standar hidup layak. Dari tiga aspek pembangunan manusia, kualitas kesehatan dan pendidikan masyarakat Kabupaten Banyumas mengalami peningkatan, namun dari sisi pengeluaran per kapita yang disesuaikan untuk non pangan mengalami penurunan yaitu dari 52,31% pada tahun 2019 turun menjadi 51,08% di tahun 2020. Pandemi COVID-19 membawa pengaruh terhadap pembangunan manusia di Kabupaten Banyumas. Hal ini terlihat dari perlambatan pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2020 dibanding tahun-tahun sebelumnya yaitu tumbuh hanya 0,02% dari sebelumnya yang tumbuh sebesar 0,92%.

2. Persentase penduduk miskin

   Persentase penduduk miskin di Kabupaten Banyumas tahun 2019 sebesar 12,53% meningkat 5,83% menjadi 13,26% pada tahun 2020, belum dapat mencapai target tahun 2020 yaitu sebesar 11,53% atau baru tercapai 85% serta perlu upaya keras untuk mencapai target akhir RPJMD sebesar 8,56% karena baru tercapai 45,09%. Target penurunan persentase penduduk miskin menjadi terlalu tinggi karena dengan adanya pandemi COVID-19 justru berdampak pada meningkatnya penduduk miskin sebesar 5,83%, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap target tahun 2021-2023 dengan penyesuaian target akhir RPJMD sebesar 11%.

3. Pertumbuhan Ekonomi

   Dengan terjadinya Pandemi COVID-19 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyumas tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar minus 1,65% tercapai minus 25,58% dari target tahun 2020 atau minus 24,81% dari target akhir RPJM. Dengan melihat kondisi ini maka Pemerintah Kabupaten Banyumas telah mengoreksi target pertumbuhan ekonomi yang terlalu tinggi menjadi 5% pada akhir RPJMD, sejalan dengan perubahan target pertumbuhan ekonomi nasional dan Provinsi Jawa Tengah.

4. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

   Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Banyumas masih menjadi permasalahan pembangunan yang akan datang. Selama kurun waktu 2016-2019 Tingkat pengangguran terbuka fluktuatif cenderung naik dan kemudian meningkat tajam pada tahun 2020 menjadi sebesar 6 atau tercapai 40,43% dari target akhir RPJM 3,76%. Hal ini disebabkan pada tahun 2020 pembatasan kegiatan masyarakat selama pandemi COVID-19 berdampak pada bertambahnya jumlah pengangguran. Dengan adanya pandemi yang diperkirakan masih berdampak lama dan membutuhkan waktu dalam pemulihannya, maka diperlukan penyesuaian target TPT menjadi sebesar 4,5% di akhir RPJMD.

5. Angka Kriminalitas

   Angka kriminalitas yang terjadi di Kabupaten Banyumas dalam kurun waktu tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi, naik sampai tahun 2018 dan kemudian menurun sampai dengan tahun 2020. Sedangkan jumlah kriminal terus meningkat dari kurun waktu 2016 sampai dengan tahun 2019 dan mulai menurun di tahun 2020, dengan persentase kasus kriminal yang tertangani fluktuatif cenderung menurun, sehingga perlu upaya lebih keras untuk menekan dan menanganinya, karena stabilitas keamanan menjadi faktor yang dipertimbangkan investor dalam melakukan aktivitas ekonomi di suatu daerah. Namun dikarenakan indikator yang digunakan dalam RPJM adalah angka kriminalitas sedangkan target yang digunakan merupakan jumlah kasus kriminalitas, maka perlu penyesuaian rumusan target terhadap indikator angka kriminalitas melihat kondisi umum dan capaiannya.

Tabel 4.1.
Permasalahan Pembangunan Daerah dan Penyesuaian target Indikator Daerah dalam RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023

No.	Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah	Satuan	Target dan Penyesuaian target							
			2021	penyesuaian target	2022	penyesuaian target	2023	penyesuaian target	Akhir RPJMD	penyesuaian target
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		73,15	**72,18**	73,75	**72,38**	74,35	**72,58**	74,35	**72,58**
2	Persentase penduduk miskin	%	10,54	**12,51**	9,55	**11,76**	8,56	**11,00**	8,56	**11,00**
3	Pertumbuhan Ekonomi / Persentase Pertumbuhan PDRB	%	6,5	**4,1**	6,6	**4,5**	6,65	**5**	6,65	**5**
4	PDRB per kapita	juta rupiah	34,885	**32,332**	36,770	**33,725**	38,655	**35,513**	38,655	**35,513**
5	Angka Kriminalitas	Per 10.000 pnddk	823	**1,656**	891	**1,586**	950	**1,516**	950	**1,516**
6	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	4,06	**5,75**	3,93	**5**	3,76	**4,5**	3,76	**4,5**

Sedangkan permasalahan-permasalahan yang dirumuskan berdasarkan kondisi umum wilayah Kabupaten Banyumas per bidang urusan dapat jelaskan sebagai berikut:

Tabel 4.2.
Permasalahan Berdasarkan Kondisi Umum Wilayah Kabupaten Banyumas per Bidang Urusan

1.	**Pendidikan** ● *Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs/Paket B ke SMA/SMK/MA/Paket B* *Capaian Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs/Paket B ke SMA/SMK/MA/Paket B tahun 2020 (96,2%) belum mencapai target 2020 sebesar 96,4% dan target akhir RPJMD (97%)* ● *Angka harapan lama sekolah belum optimal* Capaian Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Banyumas tahun 2020 (12,85 tahun) lebih tinggi dari angka harapan lama sekolah Provinsi Jawa Tengah (12,87 tahun), namun lebih rendah dari capaian nasional (12,98 tahun). Capaian tersebut belum mencapai target tahun 2020 (13,08) dan masih jauh dari target akhir RPJMD (13,15). ● *Angka rata-rata lama sekolah belum optimal* Rata-rata lama sekolah penduduk di Kabupaten Banyumas pada tahun 2020 yaitu 7,52 tahun lebih rendah dibanding rata-rata lama sekolah di Provinsi Jawa Tengah dan nasional pada tahun yang sama yaitu 7,69 untuk Provinsi Jawa Tengah dan nasional mencapai 8.48 tahun. Capaian tersebut belum memenuhi target tahun 2020 (7,55 tahun) dan target akhir RPJMD (7,70 tahun).

	● *Angka Partisipasi Kasar PAUD / RA / Sederajat* *Capaian Angka Partisipasi Kasar PAUD / RA / Sederajat Kabupaten Banyumas tahun 2020 yaitu 77,5, masih sedikit lebih rendah dari target tahun 2020 sebesar 77,75 dan target akhir RPJMD sebesar 78,5* ● *Angka partisipasi kasar (APK) SMP belum optimal.* Capaian APK SMP/MTs/Paket B Kabupaten Banyumas tahun 2020 sebesar 85,04% belum mencapai target tahun 2020 dan target akhir RPJMD. Dibandingkan dengan capaian kabupaten lain di Barlingmascakeb dan provinsi yang diatas 90%, maka capaian kabupaten Banyumas masih sangat rendah, sehingga masih perlu perhatian dalam rangka pendidikan dasar sembilan tahun dan pembangunan sumber daya manusia. ● *Angka partisipasi murni (APM) SD dan SMP belum optimal.* Capaian APM SD/MI/Paket A pada tahun 2020 sebesar 98,54 mengalami sedikit penurunan dan belum mencapai target tahun 2020 dan target akhir RPJMD. Sedangkan Capaian APM SMP/MTs/Paket B pada tahun 2020 sebesar 81,23 belum mencapai target tahun 2020 dan target akhir RPJMD. ● *Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD* *Angka Partisipasi Sekolah (SD) Kabupaten Banyumas pada tahun 2020 sebesar 99%, sedikit berada di bawah target tahun 2020 sebesar 99,85% dan target akhir RPJMD 99,7%* ● *Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP* *Angka Partisipasi Sekolah (SD) Kabupaten Banyumas pada tahun 2020 sebesar 95%, sedikit berada di bawah target tahun 2020 sebesar 95,29% dan target akhir RPJMD 95,32%* ● *Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs / Paket B ke SMA / SMK / Paket B* *Capaian Angka Melanjutkan SMP / MTs / Paket B ke SMA / SMK/ Paket B masih sedikit di bawah target 2020 sebesar 96,4 dan target akhir RPJMD sebesar 97%* ● *Masih tingginya anak putus sekolah* Angka Putus Sekolah tingkat SD dan SMP Kabupaten Banyumas cenderung menurun. Pada tahun 2020 APS SD sebesar 0,034% dan APS SMP sebesar 0,102%, belum mencapai target tahun 2020 dan target akhir RPJMD ● *Angka rata-rata nilai USABN SD* *Capaian angka rata-rata nilai UASBN SD Kabupaten Banyumas masih rendah yaitu 65,7, yang mana masih jauh dari target 2020 sebesar 72 dan target akhir RPJMD 78* ● *Angka rata-rata nilai UASBN SMP* *Angka rata-rata nilai UASBN SMP Kabupaten Banyumas sudah mencapai target 2020 sebesar 59, namun masih perlu usaha keras untuk mencapai target akhir RPJMD sebesar 65.*

	● *Persentase peningkatan pendidik dan tenaga kependidikan PAUD/ Dikmas Berprestasi* *Peningkatan pendidik dan tenaga kependidikan PAUD / Dikmas Berprestasi tahun 2020 sebesar 6%. Belum mencapai target tahun 2020 sebesar 8,33% maupun target akhir RPJMD sebesar 6,83%* ● *Persentase satuan pendidikan SMP terakreditasi* *Persentase satuan pendidikan SMP terakreditasi sebesar 93,36. Masih belum mencapai target tahun 2020 sebesar 95% dan target akhir RPJMD sebesar 100%* ● *Persentase satuan pendidikan non formal terakreditasi* *Satuan pendidikan non formal terakreditasi telah mencapai target tahun 2020 yaitu sebesar 18%, namun belum mencapai target akhir RPJMD sebesar 25%* ● *Persentase peningkatan siswa SD dan SMP berprestasi* *Persentase peningkatan siswa SD berprestasi telah mencapai target tahun 2020 sebesar 9%. Namun target RPJMD sebesar 67%. Ini menunjukkan target akhir terlalu tinggi sehingga perlu melakukan perubahan target. Dan untuk SMP juga masih belum mencapai target baik target tahun 2020 maupun target akhir RPJMD* ● *Kondisi bangunan Sekolah SD/MI dan SMP/MTs masih belum optimal* Belum semua bangunan sekolah baik SD/MI dan SMP / MTs dalam kondisi baik. Capaian realisasi tahun 2020 bangunan sekolah SD / MI dalam kondisi baik baru sebesar 71,64% sedang bangunan sekolah SMP / MTs kondisi baik baru tercapai 61,99%, belum mencapai target tahun 2020 dan target akhir RPJMD.
2.	**Kesehatan** ● *Rasio tenaga ahli gizi belum memadai* Standar kebutuhan ahli gizi (Rasio tenaga ahli gizi) adalah 48 tenaga ahli gizi per 100.000 penduduk. Di Kabupaten banyumas baru tercapai 7 tenaga ahli gizi per 100.000 penduduk. ● *Angka kesakitan dan kematian masih tinggi* *Angka Kematian Ibu (AKI) masih tinggi* Penurunan AKI tetap menjadi perhatian untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan / SDG's. Angka Kematian ibu selama 5 tahun terakhir dari tahun 2016-2020 fluktuatif cenderung menurun sampai dengan tahun 2019 yaitu sebesar 37,62 namun kembali naik di tahun 2020 sebesar 41,50. *Angka Kematian Bayi (AKB) masih tinggi* Jumlah kematian bayi di Kabupaten Banyumas masih termasuk tinggi yaitu sebanyak 187 kasus di tahun 2020, paling tinggi dibandingkan Kabupaten lain di Barlingmascakeb. *Perlunya menurunkan Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000*

	*kelahiran hidup (*TPB)* Angka kematian balita per 1.000 kelahiran hidup di Kabupaten Banyumas dalam periode tahun 2017-2019 cenderung mengalami peningkatan, yaitu dari angka 8,28 di tahun 2017 menjadi 9,2 di tahun 2019, walaupun menurun menjadi 8,95 pada tahun 2020. *Masih tingginya prevalensi Tuberculosis (per 100.000 penduduk)* Meskipun capaian prevalensi Tuberculosis (per 100.000 penduduk) di Kabupaten Banyumas tahun 2020 sebesar 58 telah melampaui target akhir RPJMD, akan tetapi sesuai data Dinkes Provinsi Jawa Tengah sampai dengan Juni tahun 2020, jumlah penderita tuberkulosis (TBC) di Kabupaten Banyumas tertinggi keempat di Jawa Tengah. • Kasus stunting dan bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) Kasus stunting di Kabupaten Banyumas seacara agregat wilayah sampai dengan tahun 2020 tercapai sebesar 14,12% dibawah target prevalensi stunting Kabupaten Banyumas sebesar 17%. Namun dari 301 desa ada beberapa desa yang memiliki kasus stunting tinggi. Untuk Persentase bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) tahun 2020 tercapai sebesar 6.87% belum mencapai target 2020 sebesar 4% dan target akhir RPJMD sebesar 3%, serta dari 301 desa ada beberapa desa dengan kasus BBLR tinggi. Untuk itu perlu upaya tambahan prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita untuk mencapai tujuan TPB. • *Belum optimalnya Jaminan Kesehatan Nasional* Capaian Jaminan Kesehatan Nasional tahun 2020 baru tercapai 83,14% dari target akhir RPJM 100%. • *Perlunya meningkatkan layanan upaya kesehatan jiwa di tingkat Puskesmas (*TPB)* Layanan kesehatan jiwa di Kabupaten Banyumas hanya ditangani oleh RSUD, sementara di Puskesmas belum tersedia, sehingga perlu diupayakan layanan kesehatan jiwa di Puskesmas untuk lebih menjangkau pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tujuan TPB.
3.	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang** • *Masih rendahnya jalan dan jembatan kabupaten dalam kondisi baik* Panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap (kondisi baik + kondisi sedang) tahun 2020 adalah sebesar 76,28%. Panjang jalan dalam kondisi baik tahun 2020 baru mencapai 47,51%, kondisi sedang 28,76%, dan kondisi rusak 23,72% dari total panjang jalan kabupaten sepanjang 1.508 km. Kondisi jalan baik tersebut belum mencapai target 2020 sebesar 53,06% dan belum mencapai target akhir RPJMD sebesar 68,06%. Sedangkan dari 915 jembatan dengan total panjang 7.665,57 m, baru 720 ruas jembatan (78,69%) dalam kondisi baik. Realisasi peningkatan jalan hotmix sampai dengan tahun 2020 sepanjang 166,68 km, belum mencapai target akhir hasta krida

	peningkatan jalan hotmix 570 km. Dengan adanya refocusing anggaran untuk penanganan dan pemulihan pandemi COVID 19 mengakibatkan pencapaian target menjadi terkendala, sehingga dibutuhkan penyesuaian target untuk pemenuhannya. ● *Masih terdapat kerusakan pada irigasi kabupaten* Panjang irigasi kabupaten tahun 2020 adalah 641.081, Panjang Jaringan Irigasi Kabupaten dalam kondisi baik adalah 78,31 %. Walaupun telah melampaui target tahun 2020 sebesar 73,1% dan target akhir RPJMD sebesar 77,6%, namun panjang jaringan irigasi kabupaten kondisi rusak masih sebesar 21,69%. ● *Belum memadainya rencana tata ruang sebagai perangkat perijinan investasi* Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031 masih belum memadai sebagai perangkat perijinan, sementara perubahan RTRW Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031 masih dalam proses dan Rencana Detail Tata Ruang yang telah diperdakan baru RDTR Kawasan perkotaan Purwokerto, sedangkan kawasan strategis lainnya belum memiliki rencana detail tata ruang. Perijinan investasi perlu percepatan agar bisa mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah Kabupaten Banyumas, juga untuk mendukung kawasan pengembangan prioritas nasional, khususnya Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang. ● *Tingginya alih fungsi lahan pertanian* Luas lahan pertanian bukan sawah pada tahun 2019 seluas 68.798 Ha sedangkan lahan pertanian sawah pada tahun 2019 seluas 31.915 Ha. Lahan pertanian bukan sawah setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan, sedangkan lahan pertanian sawah setiap tahun selalu mengalami penurunan. Oleh karena itu alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Banyumas masih relatif tinggi. Hal ini dapat diakibatkan karena terjadinya kecenderungan penggunaan lahan untuk kawasan terbangun yang semakin meningkat serta kebutuhan untuk kegiatan non pertanian yang semakin meluas. Kawasan terbangun umumnya digunakan untuk pembangunan perumahan/permukiman, industri serta jasa dan perdagangan. ● *Belum optimalnya pengembangan kawasan peruntukan industri* Kawasan peruntukan industri realisasinya baru terdapat 4 KPI, sedangkan targetnya sampai dengan 2023 sebanyak 5 KPI. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas (2011-2031) yang masih berlaku hingga saat ini terdapat total luas kawasan peruntukan industri (KPI) kurang lebih 500 Ha yang berada tersebar di Kecamatan Ajibarang, Wangon, Sokaraja, dan Kemranjen. Dalam draf revisi RTRW direncanakan kawasan peruntukan industri bertambah menjadi kurang lebih 2.000 ha, tersebar di 6 Kecamatan yaitu Kecamatan Wangon, Lumbir, Ajibarang, Jatilawang, Rawalo, dan Kalibagor. ● *Masih rendahnya bangunan pemerintah dalam kondisi baik* Salah satu aspek pendukung pelayanan publik adalah

	bangunan gedung yang baik untuk menunjang kenyamanan kebutuhan pegawai dalam bekerja. Target indikator persentase bangunan gedung pemerintah daerah dalam kondisi baik pada tahun 2020 sebesar 66,6% belum mencapai target tahun 2020 sebesar 66,7%. ● *Belum seluruh rumah tangga memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan (*TPB)* Air minum merupakan kebutuhan dasar yang menjadi hak seluruh masyarakat. Akses terhadap layanan air minum layak dan berkelanjutan merupakan salah satu indikator SDGs/TPB Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan, Target 1.4 Memastikan bahwa semua pria dan wanita, khususnya masyarakat miskin dan rentan memiliki hak yang sama terhadap akses pelayanan dasar, dan Tujuan 6 Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua, Target 6.1. Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua. Sampai dengan tahun 2020 rumah tangga akses air minum baru menjangkau 75,45% dari seluruh rumah tangga, belum memenuhi akses menyeluruh terhadap air minum sebagai kebutuhan dasar. ● *Belum seluruh rumah tangga memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan (*TPB)* Akses terhadap layanan sanitasi juga merupakan kebutuhan dasar masyarakat dan merupakan indikator SDGs/TPB Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan, Target 1.4 Memastikan bahwa semua pria dan wanita, khususnya masyarakat miskin dan rentan memiliki hak yang sama terhadap akses pelayanan dasar, dan Tujuan 6 Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua Target 6.2. Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan perempuan dan anak perempuan serta kelompok masyarakat rentan. Rumah tangga dengan akses terhadap layanan sanitasi (air limbah) sampai dengan tahun 2020 baru mencapai 88,45%. ● *Masih kurangnya fasilitas IPLT daerah* Kabupaten Banyumas memiliki 1 IPLT yang perlu direvitalisasi fisik dan kelembagaan pengelolaannya agar dapat memberikan pelayanan yang yang optimal. Peningkatkan kualitas pengelolan IPLT merupakan indikator SDGs/TPB Tujuan 6 Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua, Target 6.3 Meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global. ● *Perlunya mengembangkan infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala perkotaan, kawasan dan komunal (*TPB)*

	Penurunan kualitas air karena peningkatan beban cemar dan keterbatasan daya dukung lahan terutama di kawasan perkotaan memerlukan upaya penyediaan air limbah domestik komunal. Jumlah IPAL Komunal di Kabupaten Banyumas tahun 2020 sebanyak 72 unit, perlu upaya untuk mencapai target akhir RPJMD sebanyak 87 unit.
4.	**Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman** ● *Berkembangnya lingkungan permukiman kumuh perkotaan* Kondisi lingkungan permukiman kumuh di Kabupaten Banyumas sampai dengan Tahun 2020 masih diangka 7,8%, masih lebih tinggi dari target universal access sebesar 0%. Penanganan permukiman kumuh menjadi salah satu tujuan SDGs/TPB yaitu Tujuan 11 Menjadikan kota dan permukiman yang inklusif, aman tangguh dan berkelanjutan. Sehingga diperlukan upaya pemerintah dalam mengatasi lingkungan permukiman kumuh perkotaan. ● *Masih banyaknya jumlah rumah tidak layak huni (RTLH)* Salah satu parameter kumuh adalah banyaknya rumah layak huni. Rasio rumah layak huni menjadi indikator SDGs/TPB Tujuan 11 Menjadikan kota dan permukiman yang inklusif, aman tangguh dan berkelanjutan, Target 11.1. Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar permukiman, serta merata kawasan kumuh. Jumlah RTLH di Kabupaten Banyumas berdasarkan Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) 2015 adalah 116.677 unit. Sampai dengan tahun 2020 sudah tertangani 90.833 unit RTLH yang belum ditangani. Kondisi rumah layak huni meskipun terus meningkat tetapi baru mencapai 85,2 % pada tahun 2020.
5.	**Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat** ● *Masih belum optimalnya Tingkat Waktu Tanggap (Responsive Time Rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK) kabupaten* Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK) di Kabupaten Banyumas yang merupakan total waktu yang dihitung dari saat berita kebakaran diterima, pengiriman pasukan dan sarana pemadam kebakaran ke lokasi kebakaran sampai dengan kondisi siap untuk melaksanakan operasi pemadaman (biasa ditandai dengan keluarnya air / penyemprotan air pertama) sebesar 100% sesuai dengan target tahun 2020 dan target akhir RPJM. Namun sebenarnya terdapat kekeliruan perhitungan target tingkat waktu tanggap dan cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten banyumas, dimana seharusnya tingkat waktu tanggap tahun 2020 baru mencapai 53% menurun dari tahun 2019 sebesar 53,11%, belum mencapai target 2020 (60%) dan target akhir RPJMD (75%) dan masih dibawah standar nasional sebesar 75%, sehingga masih perlu ditingkatkan. Sedangkan cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten banyumas di tahun 2020 yang sebenarnya telah tercapai 100 %.

	● *Penanganan Gangguan keamanan ketertiban antara lain Penanganan kasus kriminalitas belum optimal (*TPB)* Persentase kasus kriminalitas tertangani di Kabupaten Banyumas sebesar 50,78% berdasarkan jumlah kasus kriminalitas tertangani (sebesar 324 kasus) terhadap jumlah kriminalitas (638 kasus). Angka tersebut menunjukan bahwa tindak kriminalitas di Kabupaten Banyumas masih cukup tinggi. Perlunya perhitungan kembali target angka kriminalitas yang sebelumnya belum diperhitungkan per 10.000 penduduk. Dengan perhitungan per 10.000 penduduk maka angka kriminalitas adalah sebesar 1,730 yang menunjukkan bahwa dari 10.000 penduduk Kabupaten Banyumas ada 1,730 kasus kriminal. ● *Belum optimalnya Rasio pengurangan Resiko Bencana (IRB) (*TPB)* Rasio pengurangan resiko bencana di Kabupaten Banyumas sebesar 30% belum mencapai target tahun 2020 sebesar 35% dan target akhir RPJMD sebesar 50%.
6.	**Kesatuan Bangsa dan Politik** ● *Belum optimalnya pemilih yang menyalurkan hak pilihnya dalam pemilu* Persentase pemilih pemula yang memberikan hak pilih pada pemilu /pemilukada baru sebesar 78% masih belum mendekati pencapaian 100%.
7.	**Sosial** ● *Tingginya jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)* Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) atau sekarang disebut dengan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kabupaten Banyumas tahun 2020 masih tinggi yaitu sebanyak 105.293 PMKS/PPKS. ● *Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan (*TPB)* Presentase penduduk dibawah garis kemiskinan masih ting gi yaitu sebesar 13,26%, belum mencapai target 2020 yaitu sebesar 11,53%, lebih tinggi dibandingkan persentase penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah sebesar 11,41% dan Nasional sebesar 9,78%. ● *Belum optimalnya penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti* Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti di tahun 2020 sebesar 26,91%, masih jauh dari target 2020 dan target akhir RPJMD yaitu sebesar 100%. ● *Belum optimalnya penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial* Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang menerima jaminan sosial baru tercapai

	15,66% belum mencapai target 2020 sebesar 39,58% dan target akhir RPJMD yaitu sebesar 60,18%.
8.	**Tenaga Kerja** ● *Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) masih rendah* Dampak pandemi covid 19 menyebabkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Banyumas yang masih rendah menurun pada tahun 2020 sebesar 66,66% jika dibandingkan dengan capaian tahun 2019 sebesar 67,34%, yang artinya dari 100 orang penduduk usia kerja, hanya sekitar 67 orang yang termasuk penduduk aktif secara ekonomi. ● *Tingkat pengangguran terbuka yang relatif masih tinggi* Adanya pembatasan kegiatan masyarakat selama pandemi COVID-19 berdampak pada meningkatnya secara tajam Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Banyumas pada tahun 2020 menjadi sebesar 6, sehingga belum mencapai target tahun 2020 sebesar 4,23 dan perlu upaya keras untuk mencapai target akhir RPJM 3,76%. Dengan adanya pandemi yang diperkirakan masih berdampak lama dan membutuhkan waktu dalam pemulihannya, maka diperlukan penyesuaian target TPT menjadi sebesar 4,5%. ● *Masih rendahnya besaran pencari kerja yang terdaftar dan ditempatkan* Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan pada tahun 2020 sebesar 48,75%, belum mencapai target 2020 sebesar 57% dan target akhir RPJMD sebesar 63%. ● *Masih rendahnya penyelesaian kasus dengan perjanjian kerjasama* Penyelesaian kasus tenaga kerja dengan perjanjian kerjasama tahun 2020 sebesar 54,54%, belum mencapai target 2020 (80%) dan target akhir RPJMD (100%).
9.	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak** ● *Indek Pembangunan Gender (IPG) dan Indek pemberdayaan Gender (IDG) yang masih rendah* IPG Kabupaten Banyumas pada tahun 2020 sebesar 88,27 lebih rendah dari Jawa Tengah sebesar 92,18 dan berada di peringkat ke-4 jika dibandingkan dengan 5 kabupaten sekitar. Sedangkan IDG Kabupaten Banyumas di tahun 2019 sebesar 71,92 lebih rendah dari Jawa Tengah sebesar 72,18, menempati peringkat ke-2 dibandingkan dengan 5 Kabupaten sekitar. Nilai IDG yang masih rendah disebabkan beberapa permasalahan antara lain rendahnya keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif dan eksekutif, rendahnya sumbangan perempuan dalam ekonomi rumah tangga dan sebagian perempuan sebagai pekerja domestik (ibu rumah tangga). ● *Masih adanya kekerasan terhadap anak dan perempuan serta perlu meningkatkan layanan komprehensif terhadap korban*

	*kekerasan (*TPB)* Kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Banyumas pada tahun 2020 cenderung menurun, namun tidak signifikan. Pada tahun 2020 masih terdapat kasus kekerasan terhadap perempuan yang terlaporkan sebanyak 17 kasus, dan kekerasan terhadap anak yang terlaporkan sebanyak 62 kasus.
10.	**Pangan** ● *Tingkat Ketersediaan protein belum optimal* Tingkat ketersediaan protein Kabupaten Banyumas tahun 2020 sebesar 81,26%, belum mencapai target 2020 (93%) dan target akhir RPJMD (96%). ● *Masih terdapat Daerah Rawan Pangan* Persentase penanganan daerah rawan pangan tahun 2020 sebesar 71,43% dari target akhir RPJMD sebesar 100%.
11.	**Pertanahan** ● *Masih terdapat lahan yang belum bersertifikat* Kabupaten Banyumas mempunyai luas wilayah 132.759 Ha dengan jumlah bidang tanah kurang lebih 1.076.945 (NOP tahun 2019) bidang. Dari jumlah tersebut bidang tanah yang terdaftar baru 426.385 bidang (40%), dan belum terdaftar sebanyak 650.560 bidang (60%).
12.	**Lingkungan Hidup** ● *Timbulan sampah yang didaur ulang masih rendah* Total timbulan sampah di Kabupaten Banyumas mencapai 850 ton per hari dari rumah tangga (40% berupa anorganik) dan 10–15 ton dihasilkan dari non rumah tangga. Volume sampah yang tertangani di kawasan perkotaan telah mencapai lebih dari 90%, dan pengurangan sampah melalui 3R baru mencapai 22%. ● *TPA yang ada sudah tidak mampu menampung sampah* TPA yang ada saat ini sebanyak 2 unit yaitu TPA Kaliori dan TPA Tipar Kidul sudah melampaui masa penggunaan sehingga tidak mampu menampung sampah, dan dibutuhkan TPA baru. ● *Masih kurangnya RTH publik* RTH yang berada di kawasan perkotaan belum mencapai 20%. Keterbatasan ruang terbuka hijau berdampak pada kawasan resapan air, kawasan penyerap polusi udara serta terbatasnya ruang-ruang sosial bagi masyarakat di kawasan perkotaan. ● *Menurunnya daya dukung air* Analisis KLHS kebutuhan air (domestik, industri dan pertanian) di Kabupaten Banyumas mencapai 1.031,41 juta m3/tahun. Potensi ketersediaan air permukaan sebesar 1.303,19 juta m3/tahun. Daya Dukung Air Permukaan sebesar 1,26 dengan status sedang (bersyarat). Kecenderungan penurunan daya dukung air akan terus terjadi sampai 2023. Pada kawasan pertanian di wilayah kecamatan yang Daya Dukung Airnya rendah terdapat ancaman kekeringan di musim kemarau. ● *Perlunya peningkatan kerentanan adaptasi perubahan iklim pada desa yang berada pada kategori cukup rentan.*

	Tingkat kerentanan perubahan iklim desa/kelurahan di Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut: 21 desa/kelurahan tidak rentan, 85 desa/kelurahan kurang rentan dan 225 agak rentan. Berdasarkan data tersebut kategori agak rentan lebih besar dibandingkan dengan kategori kerentanan terhadap perubahan iklim lainnya, sehingga kewaspadaan terhadap potensi bencana perubahan iklim perlu ditingkatkan di seluruh wilayah Kabupaten Banyumas. ● *Perlunya penurunan Emisi GRK* Berdasarkan peningkatan jumlah penduduk, peningkatan kebutuhan energi dan kegiatan industri, perubahan lahan pertanian, peternakan, serta kegiatan manusia lainnya, maka di masa yang akan datang emisi GRK diperkirakan akan terus mengalami kenaikan. Perkiraan Emisi GRK di Tahun 2023 di Kabupaten Banyumas berdasarkan hasil proyeksi mencapai 2.857.582 Ton CO2e atau naik sebesar 27% selama 8 tahun atau rata-rata naik 3,5% per tahun. ● *Penurunan keanekaragaman hayati* Indeks keanekaragaman hayati di perkotaan rendah antara lain disebabkan oleh pesatnya laju pertumbuhan penduduk dan kegiatan pembangunan yang mengakibatkan peningkatan kebutuhan bahan hayati dan lahan untuk pengembangan pertanian serta kegiatan pembangunan lainnya.
13.	**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil** ● *Masih belum optimalnya Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil* Capaian IKM Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Tahun 2020 sebesar 86,46 belum mencapai target 2020 (87,89%) dan target akhir RPJMD (89,12%). Sedangkan dari 100% target akhir RPJMD, capaian tahun 2020 untuk rasio bayi berakte kelahiran baru tercapai 93,15%, cakupan penerbitan KTP baru tercapai 96,94% dan cakupan penerbitan Akta Kelahiran baru tercapai 97,15%.
14.	**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa** ● *Masih rendahnya kelembagaan kawasan perdesaan yang terbentuk* Capaian pembangunan kawasan Perdesaan di Kabupaten Banyumas tahun 2019 terbentuk 2 lembaga dan tahun 2020 terbentuk 1 lembaga belum memenuhi target 2020 sejbanyak 2 lembaga. ● *Belum optimalnya Desa dengan administrasi yang baik* Dari 301 desa di Kabupaten Banyumas yang telah melaksanakan administrasi dengan baik baru sebanyak 11%, dari 100% target tahun 2020 dan target akhir RPJM. . ● *Masih kurangnya status desa maju mandiri (*TPB)* Indeks Desa Membangun tahun 2020 sebesar 0,699 dengan status berkembang perlu peningkatan status menjadi maju dan mandiri untuk mencapai target RPJMD (0,694).

15.	**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana** ● *Angka pemakaian kontrasepsi CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49 tahun* Angka pemakaian kontrasepsi CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 tahun 2020 sebesar 73,67% belum mencapai tahun 2020 sebesar 76,39%. ● *Belum optimalnya tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan KB dan alat kontrasepsi metode modern atau Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (*TPB)* Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi, tahun 2020 sebesar 35,73% belum mencapai target tahun 2020 sebesar 70% dan target akhir RPJMD sebesar 74%.
16.	**Perhubungan** ● *Belum terpenuhinya sarana dan prasarana lalu lintas di Kabupaten Banyumas* Jumlah sarana prasarana lalu lintas terus bertambah dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, namun demikian jumlahnya masih belum memenuhi kebutuhan riil sarana prasarana lalu lintas di lapangan, antara lain kebutuhan Halte/ Shelter bus baru diantaranya halte dan marka untuk pemenuhan prasarana dalam rangka pengembangan angkutan umum massal dengan konsep Buy The Service (BTS). ● *Belum tercapainya ketersediaan terminal yang memadai* Kebutuhan terminal di Kabupaten Banyumas berdasarkan arahan pemanfaatan ruang RTRW Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031 terdiri atas 1 terminal tipe A, 2 terminal tipe B, dan 5 terminal tipe C. Infrastruktur terminal yang ada di Kabupaten Banyumas terdiri atas 1 unit Terminal Tipe A dan 2 unit Terminal Tipe C. Terminal tipe C yang merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten Banyumas ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 480/324/2016 tanggal 4 Maret 2016 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Wangon dan Terminal Penumpang Ajibarang sebagai Terminal Penumpang Tipe C. Sehingga ketersediaan terminal yang memadai belum memenuhi kebutuhan yaitu sebanyak 8 terminal. ● *Belum maksimalnya persentase kendaraan bermotor yang melakukan uji kendaraan bermotor* Jumlah Kendaraan Wajib Uji pada tahun 2020 adalah 15.585 unit terdiri atas mobil penumpang umum, bus, mobil barang, dan mobil gandengan. Dari jumlah tersebut yang telah melakukan uji adalah 43 unit mobil penumpang umum, 1.601 unit bus, 12.114 unit mobil barang, dan 41 mobil gandengan. Sebanyak 1.785 unit kendaraan wajib uji tidak melakukan uji kendaraan/tidak melakukan uji kendaraan di Kabupaten Banyumas.

17.	**Komunikasi dan Informatika** ● *Belum optimalnya SDM yang melek IT* Persentase SDM yang melek IT tahun 2020 sebesar 30%, meningkat 20% dibandingkan tahun 2019. Namun belum mencapai target 2020 sebesar 40%. ● *Belum tercapainya target peringkat tingkat keterbukaan informasi publik* Target peringkat 4 tingkat keterbukaan informasi publik di Jawa Tengah tidak tercapai, karena capaian 2020 masih sama dengan capaian 2019 yaitu sebesar 8. ● *Masih terdapat OPD yang belum terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinkominfo* Sampai dengan 2020 baru 27 perangkat daerah di Kabupaten Banyumas telah terhubung dengan fiber optic yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika untuk mendukung penerapan SPBE.
18.	**Koperasi dan Usaha Kecil Menengah** ● *Masih banyaknya koperasi yang tidak sehat* Persentase koperasi tidak sehat sebesar 71,56% dari total koperasi aktif sebanyak 450 koperasi dan koperasi yang terdaftar sebanyak 558. Sehingga persentase koperasi yang sehat hanya sebanyak 28,44%, belum mencapai target tahun 2020 sebanyak 30,25% dan target akhir RPJMD sebanyak 31%. ● *Persentase pertumbuhan usaha mikro belum optimal dan belum didukung data usaha Mikro yang aktif* Capaian persentase pertumbuhan UMKM dan IKM tahun 2020 sebesar 0,34% belum mencapai target 2020 dan target akhir RPJMD sebesar 0,46%. Sesuai kewenangannya maka Kabupaten hanya membina usaha mikro saja, sehingga perhitungan indikator disesuaikan dan diretargeting menjadi 0,253%. Pertumbuhan usaha mikro di Kabupaten Banyumas belum didukung oleh data usaha mikro yang aktif, sehingga pembinaan usaha mikro belum efektif. ● *Masih rendahnya omzet Usaha mikro yang dibina* Perkembangan omset usaha dan keuntungan yang diperoleh sebagian besar UMK masih kecil, dengan realisasi peningkatan omzet baru mencapai 1,06% belum mencapai target 2020 sebesar 3% atau baru tercapai 35,33% dan target akhir RPJM sebesar 6% atau baru tercapai 17,67%.
19.	**Penanaman Modal** ● *Masih rendahnya Investor yang berminat menanamkan modal di Kabupaten Banyumas* Jumlah investor yang berminat menanamkan modal di Kabupaten Banyumas tahun 2020 sejumlah 3 Loi menurun dari tahun 2019 sejumlah 4 Loi. Sedangkan jumlah Investor yang menanamkan modalnya di Kabupaten Banyumas tahun 2020 sejumlah 413 investor, meningkat dibandingkan tahun 2019 yaitu sejumlah 210 investor. Namun, sangat menurun jika dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 1.041 investor.

	• *Belum optimalnya Investasi berbasis padat karya yang didu kung oleh data.* Realisasi investasi di Kabupaten Banyumas meningkat d ari 583 Milyar pada tahun 2019 menjadi 1.008 Milyar pada tahun 2020, melampaui target tahun 2020 sebesar 260 Milyar dan target akhir RPJM sebesar 275 Milyar, namun realisasi investasi ini belum menyediakan data investasi yang berbasis padat karya untuk mendukung misi kelima Bupati. • *Masih belum adanya investasi di kawasan industri* Investasi di kawasan industri di Kabupaten Banyumas baru ditargetkan di tahun 2022, sehingga belum ada realisasi investasi di kawasan industri di tahun 2019 dan 2020. Untuk memperluas lapangan kerja, Pemerintah Kabupaten Banyumas belum merealisasikan pengembangan dan penetapan kawasan industri, dan baru menetapkan kawasan peruntukan industri (KPI) sebanyak 5 KPI dengan ketersediaan luas kawasan peruntukan industri (KPI) kurang lebih 500 Ha berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas (2011-2031) yang masih berlaku hingga saat ini, dan direncanakan bertambah menjadi kurang lebih 2.000 Ha dalam draf revisi RTRW.
20.	**Kepemudaan dan Olahraga** • *Belum optimalnya prestasi olahraga di tingkat Propinsi dan Nasional* Capaian perolehan medali tingkat provinsi dan Nasional pada tahun 2020 hanya sebesar 1,25% belum mencapai target sebesar 19,35%. • *Masih belum optimalnya cakupan pembinaan atlet muda atau pelajar dan cakupan pelatih yang bersertifikasi* Capaian cakupan pembinaan atlet muda/pelajar tahun 2020 sebesar 1,6% dari target akhir RPJM 18,75%. Sedangkan capaian cakupan pelatih yang bersertifikat level dasar pada tahun 2020 tercapai sebesar 23% dari target akhir RPJM 100%.
21.	**Persandian** • *Belum semua perangkat daerah menggunakan layanan keamanan informasi* Dari 56 Perangkat Daerah (29 dinas/badan, 27 kecamatan) di Pemerintah daerah Kabupaten Banyumas, baru 43% yang telah menggunakan layanan keamanan data dan informasi.
22.	**Statisik** • *Belum tervalidasinya data informasi dan statistik daerah yang tersedia* Data statistik sektoral senantiasa dilakukan update setiap tahunnya, namun belum melalui proses validasi data sebagaimana ketentuan penyelenggaraan satu data.
23.	**Kebudayaan** • *Belum optimalnya revitalisasi dan inventarisasi karya budaya*

	Capaian persentase karya budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi sampai dengan 2020 baru sebesar 72,73% dari target akhir RPJM sebesar 100%. ● *Masih rendahnya penetapan cagar budaya dan pelestarian budaya dengan SK Bupati* Capaian persentase penetapan cagar budaya dengan SK Bupati pada tahun 2020 sebesar 36%, belum mencapai target 2020 yaitu 44%, dan harus ditingkatkan hingga mencapai target akhir RPJMD yaitu sebesar 100%.
24.	**Perpustakaan** ● *Masih rendahnya jumlah perpustakaan terbina* Dari 919 perpustakaan yang ada di Kabupaten Banyumas, persentase jumlah perpustakaan terbina tahun 2020 sebesar 30,64% belum mecapai target akhir RPJMD sebesar 47,22%. ● *Menurunnya jumlah pengunjung perpustakaan daerah* Jumlah pengunjung perpustakaan tahun 2020 (587.339 pengunjung) menurun signifikan dibanding tahun 2019 (1.332.677 pengunjung). Persentase peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan daerah ditahun 2020 sebasar 3,56 belum mencapai target RPJMD tahun 2020 sebesar 5,93 dan target akhir RPJMD sebesar 7,89.
25.	**Kearsipan** ● *Belum optimalnya pengelolaan arsip secara baku pada perangkat daerah* Pengelolaan arsip secara baku pada tahun 2020 baru dilakukan di 28 SKPD di Kabupaten Banyumas atau baru tercapai 14,5%, dari target akhir RPJMD sebesar 36,4%. Sedangkan pengelolaan arsip secara baku di SKPD Kecamatan, UPT Puskesmas, Unit Pendidikan Kecamatan dan Pemerintahan Desa belum dilakukan. ● *Belum optimalnya pengelolaan arsip statis dalam kondisi baik di Pemerintah Kabupaten Banyumas* Persentase pengelolaan arsip statis dalam kondisi baik di pemerintah Kabupaten Banyumas tahun 2020 baru tercapai sebesar 40% dari target akhir RPJMD sebesar 90%.
26.	**Kelautan dan Perikanan** ● *Belum optimalnya produksi perikanan.* Luas perikanan di Kabupaten Banyumas tahun 2019 seluas 1.293 ha untuk perikanan tangkap, dan 424,50 ha untuk perikanan budidaya, dengan jumlah produksi perikanan sebesar 11.857,95 ton baru tercapai 20% atau masih perlu upaya keras untuk mencapai target akhir RPJMD sebesar 58.157 ton. ● *Masih belum maksimalnya produksi olahan hasil perikanan.* Jumlah usaha pengolahan ikan di Kabupaten Banyumas tahun 2020 sejumlah 139 unit usaha dengan produksi olahan sebesar 188,5 ton baru tercapai sebesar 20,32% atau masih perlu upaya keras untuk mencapai target akhir RPJMD sebesar 903,4 ton.
	● *Konsumsi ikan masyarakat Banyumas masih jauh dari angka*

	*Provinsi Jawa Tengah dan nasional (*TPB).* Konsumsi ikan tahun 2020 sebesar 21,05 kg/Kpt/th, masih jauh dari target konsumsi ikan untuk mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sebesar 54,5 kg/kapita/ tahun, masih lebih rendah dari konsumsi ikan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2020 sebesar 33 kg/kapita/th dan angka konsumsi ikan nasional tahun 2020 sebesar 56,39 kg/kapita.
27.	**Pariwisata** ● *Rata-rata lama tinggal wisatawan masih rendah* Rata-rata lama tinggal wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara tidak mengalami perubahan selama kurun waktu tahun 2016-2019 yaitu hanya satu hari. Kondisi ini menunjukkan bahwa berbagai potensi pariwisata di Kabupaten Banyumas memerlukan penanganan yang lebih serius untuk dapat menambah lama tinggal wisatawan. ● *Jumlah kunjungan wisata masih rendah (*TPB).* Jumlah kunjungan wisatawan pada tahun 2020 hanya sebanyak 1.866.157 wisatawan, menurun drastis dibandingkan tahun 2019 sebanyak 3.580.743 wisatawan, dan masih jauh dari target tahun 2020 sebanyak 3.134.193 wisatawan serta target akhir RPJMD sebanyak 16.598.729 wisatawan, dikarenakan pembatasan kegiatan untuk pencegahan pandemi COVID-19 dimana pada awal triwulan III tahun 2020 tempat wisata sempat di tutup dan dibuka kembali dengan protokol kesehatan berupa pembatasan jumlah pengunjung dan pemberlakuan pembelian tiket wisata on line. ● *Kurang optimalnya promosi pariwisata* Potensi pariwisata di Kabupaten Banyumas masih belum diimbangi dengan promosi pariwisata yang agresif, dapat dilihat dari belum adanya peningkatan kegiatan promosi pariwisata di tahun 2020 atau baru tercapai 40% dari 100% target akhir RPJMD. ● *Kurangnya SDM kepariwisataan yang bersertifikasi* Capaian persentase SDM kepariwisataan yang bersertifikasi tahun 2020 sebesar 73% perlu upaya untuk mencapai target akhir RPJM sebesar 100%.
28.	**Pertanian** ● *Penurunan luas lahan pertanian mengancam peningkatan produksi tanaman pangan* Luas lahan pertanian Kabupaten Banyumas mengalami penurunan tiap tahunnya dari mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2020, karena kecenderungan penggunaan lahan untuk kawasan terbangun yang semakin meningkat serta kebutuhan untuk kegiatan non pertanian yang semakin meluas. Hal ini mengancam penurunan produksi pangan pokok dan daya dukung pangan Kabupaten Banyumas, selain penurunan produktivitas lahan. Dapat dilihat dari presentase peningkatan produksi tanaman pertanian yang hanya sebesar -1,39% dan peningkatan produktivitas tanaman pangan sebesar -8,90% dari target 2020 sebesar 1% dan target akhir RPJMD sebesar 5%.

	● *Produktivitas komoditas pertanian tanaman pangan belum maksimal* Persentase peningkatan produktivitas komoditas pertanian tanaman pangan Kabupaten Banyumas untuk ketersediaan pangan utama pada tahun 2020 tidak tercapai atau menurun sebesar -8,90% dari tahun 2019 sebesar 1,03% dan masih jauh dari target peningkatan sebesar 1% serta target akhir RPJMD sebesar 5%. Hal ini dapat dilihat dari belum signifikannya produktivitas tanaman padi tahun 2020 dengan rata-rata kenaikan produktivitas tanaman padi selama 5 tahun hanya 3,03% dan menurunnya produktivitas tanaman jagung dari 7,50 ton/ha di tahun 2019 menjadi 6,12 ton/ha di tahun 2020 dan menurunnya produktivitas kedelai dari 1,28 di tahun 2019 menjadi 1,25 di tahun 2020. ● *Masih belum maksimalnya peningkatan populasi ternak.* Cenderung menurunnya capaian Populasi ternak besar tahun 2020 dibandingkan tahun 2016 dan masih perlunya upaya untuk mencapai target akhir RPJM dengan melihat capaian tahun 2020 untuk populasi sapi potong sebanyak 15.253 ekor dari target akhir sebanyak 16.636 ekor, populasi sapi perah sebanyak 2.427 ekor dari target akhir sebanyak 2.642 ekor, populasi kambing sebanyak 175.835 ekor dari target akhir sebanyak 192.092 ekor, populasi domba sebanyak 17.269 ekor dari target akhir sebanyak 17.609 ekor, populasi ayam petelur sebanyak 1.483.844 ekor dari target akhir sebanyak 1.618.759 ekor, populasi ayam buras/kampung sebanyak 1.189.202 ekor dari target akhir sebanyak 1.221.805 ekor, dan populasi itik sebanyak 150.940 ekor dari target akhir sebanyak 164.688 ekor. ● *Belum optimalnya cakupan bina kelompok petani* Cakupan bina kelompok tani di Kabupaten Banyumas tahun 2020 baru tercapai 80% dari target akhir RPJMD 100%. ● *Masih belum optimal peningkatan kapasitas tenaga penyuluh* Capaian Persentase penyuluh pertanian terlatih baru tercapai 80% dari 100% yang ditargetkan, dengan jumlah Penyuluh Pertanian yang mengikuti training pada tahun 2020 baru tercapai 17% yaitu sebanyak 104 penyuluh dari target akhir RPJM sebanyak 610 penyuluh. ● *Belum optimalnya penurunan angka kesakitan dan kematian ternak* Penurunan angka kesakitan dan kematian ternak masih belum signifikan ditekan, dapat dilihat dari angka kesakitan ternak tahun 2020 tidak mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019 (14,06%), dan penurunan kesakitan dan kematian ternak besar, kecil dan unggas rata-rata hanya berkisar 0,06% setiap tahunnya.

29.	**Perdagangan** ● *Belum maksimalnya jumlah gula kelapa terekspor* Jumlah gula kelapa terekspor sebesar 12.234 ton pada tahun 2020 masih perlu upaya keras untuk mencapai target akhir RPJMD sebesar 80.000 ton. ● *Cakupan bina kelompok pedagang masih rendah* Capaian bina kelompok pedagang sebesar 96 kelompok di tahun 2020, cenderung menurun dibandingkan tahun 2016-2018, dan masih jauh untuk mencapai target akhir RPJMD sebanyak 270 kelompok.
30.	**Perindustrian** ● *Cakupan bina kelompok pengrajin masih rendah* Capaian bina kelompok pedagang sebesar 153 kelompok di tahun 2020, cenderung menurun dibandingkan tahun 2016-2018, dan masih jauh untuk mencapai target akhir RPJMD sebanyak 331 kelompok.
31.	**Transmigrasi** ● *Kurangnya minat calon transmigran yang ingin ditempatkan* Tidak dilaksanakannya kegiatan sosialiasi pendaftaran, pembekalan, dan pemberangkatan bagi calon transmigran umum dan sharing, karena tidak adanya calon transmigran yang berminat dan diberangkatkan serta ditempatkan pada tahun 2020.
32.	**Administrasi Pemerintahan** ● *Belum optimalnya Indek reformasi birokrasi* Indek Reformasi Birokrasi tahun 2020 sebesar 69,07 masih perlu upaya keras untuk mecapai target akhir RPJMD sebesar 75. ● *Masih belum optimalnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah* Nilai Akuntabilitas Kinerja Kabupaten Banyumas tahun 2020 sebesar 74,96 masih perlu upaya keras untuk mencapai target akhir RPJMD sebesar 80.
33.	**Keuangan** ● *Penerimaan PAD belum optimal* Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2020 sebesar 668,203 Milyar belum mencapai yang ditargetkan sebesar 715,379 Milyar. ● *Penerimaan pajak untuk PAD belum optimal (*TPB)* Rasio penerimaan pajak terhadap PAD pada tahun 2020 sebesar 208,616 Milyar baru tercapai sebesar 31,22%. • *Persentase SILPA masih tinggi* SILPA tahun 2020 masih tinggi sebesar 242,705 Milyar, atau 8,24% dari APBD.
34.	**Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan** ● *Belum optimalnya ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan pengembangan potensi jabatan*

	Pemenuhan standar kompetensi aparatur sipil negara yang dilakukan dengan pengembangan kompetensi melalui diklat-diklat teknis, fungsional, dan Dikpim, hanya diikuti oleh 600 ASN dari 12.551 ASN yang ada di Kabupaten Banyumas pada tahun 2019, dan tidak adanya keiikutsertaan ASN dalam diklat tahun 2020 karena tidak diselenggarakannya diklat bagi ASN di Kabupaten Banyumas pada tahun 2020 dikarenakan kondisi Pandemi COVID -19.
35.	**Pengawasan** ● *Tidak tersedia data Indek Persepsi Korupsi (IPAK) di tingkat Kabupaten (*TPB)* Penilaian anti korupsi di Kabupaten Banyumas tidak diukur dengan Indek Persepsi Korupsi namun dilihat dari Nilai survey eksternal persepsi korupsi yang terdapat dalam komponen penilaian Reformasi Birokrasi, dimana pencapaian tahun 2019 sebesar 3,73 naik menjadi 3,85 di tahun 2020 dari skala tertinggi 4. ● *Belum optimalnya Kapabilitas APIP* Kapabilitas APIP tahun 2020 baru tercapai sebesar 2 atau 62,5% dari target tahun 2020 sebesar 3,2 dan baru tercapai 54,05% dari target akhir RPJM sebesar 3,7. ● *Belum optimalnya tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan APIP yang diselesaikan* Persentase tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan APIP yang terselesaikan tahun 2020 sebesar 42% atau baru tercapai 58,33% dari target 72%, menurun dibandingkan tahun 2019 yaitu sebesar 60%, dan baru tercapai 53,85% dari target akhir RPJM sebesar 78%. ● *Belum optimalnya tindak lanjut temuan BPK yang diselesaikan* Persentase tindak lanjut temuan BPK belum 100% terselesaikan atau baru terselesaikan 94% di tahun 2020.
36.	**Perencanaan Pembangunan** ● *Belum optimalnya kualitas perencanaan pembangunan daerah* Nilai kualitas dokumen perencanaan pembangunan di Kabupaten Banyumas belum optimal dengan nilai penghargaan pembangunan daerah untuk Kabupaten Banyumas tahun 2020 sebagai Kabupaten terbaik ke III ditingkat Provinsi Jawa Tengah, dimana masih kurangnya aspek inovasi dan masih kurangnya pendekatan Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS) dalam penyusunan dokumen perencanaan. ● *Belum optimalnya kualitas pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah* Hasil pengendalian dan evaluasi terhadap rata-rata pencapaian tujuan Perangkat Daerah (IKU OPD) masih rendah dibawah 50% pada tahun 2020 sehingga berdampak pada rendahnya pencapaian tujuan Pemkab (IKU Bupati). Hal ini dikarenakan belum diimplementasikannya pengelolaan resiko dalam pencapaian tujuan.

37.	**Penelitian dan Pengembangan** ● *Kurangnya penelitian dan pengembangan yang ditindak-lanjuti sebagai bahan kebijakan pembangunan daerah.* Penelitian serta Pengembangan untuk inovasi masih belum menjadi bahan kebijakan pembangunan daerah. ● *Masih kurangnya pemanfaatan hasil Kelitbangan* Hasil kelitbangan yang berupa kajian dan hasil karya cipta kreativitas dan Inovasi daerah. Hasil karya cipta kreativitas dan Inovasi daerah (krenova) yang dimanfaatkan masih sangat kurang yaitu baru sebanyak 7 buah dari 58 peserta krenova pada tahun 2019 dan 64 hasil krenova pada tahun 2020. Demikian pula pemanfaatan hasil kajian atau penelitian masih sangat kurang dan perlu ditingkatkan.
36.	**Kecamatan** ● *Masih kurang optimalnya pelayanan kecamatan* Rata-rata Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan kecamatan kepada masyarakat di tahun 2020 sebesar 81,46, masih kurang dan perlu peningkatan.

**) hasil anaisis KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023*

4.2. Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas daerah dan masyarakat di masa datang. Suatu kondisi menjadi isu strategis jika kondisi tersebut perlu diantisipasi agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar, atau sebaliknya akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang jika tidak dimanfaatkan.

Karakteristik isu strategis adalah bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/ keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis. Bagi daerah yang telah mengembangkan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah, dapat melakukan upaya-upaya rutin untuk memantau peluang dan ancaman lingkungan eksternal, sehingga kebijakan Pemerintah Daerah tidak lagi bersifat reaktif tetapi lebih antisipatif, Pemerintah Daerah mampu meraih peluang-peluang penting, serta mampu mengantisipasi ancaman yang tidak dikenali.

Sumber informasi bagi perumusan isu strategis bisa diperoleh dari lingkungan eksternal (masyarakat, dunia swasta, perguruan tinggi, dunia riset, lembaga nonprofit, dan lain-lain), kebijakan skala regional, nasional, dan internasional yang berkorelasi atau mempengaruhi tujuan dan sasaran pembangunan. Informasi tersebut merupakan unsur penting yang perlu diperhatikan dan menjadi masukan dalam menganalisis isu-isu strategis pembangunan jangka menengah daerah.

Penentuan data atau informasi menjadi isu strategis sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan;
2. Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
3. Luasnya dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat;
4. Memiliki daya ungkit yang sigiifikan terhadap pembangunan daerah;
5. Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola; dan
6. Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan.

Penentuan isu strategis pembangunan daerah dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan dan keselarasan dengan isu-isu global, nasional, maupun regional, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, isu strategis RPJMN, isu strategis RPJMD Provinsi Jawa Tengah serta isu strategis RPJPD Kabupaten Banyumas.

Isu Global

Semakin terbukanya negara-negara di dunia menyebabkan perubahan-perubahan yang terjadi di suatu kawasan regional maupun global akan mempengaruhi domestik negara-negara tersebut. Hal ini didukung oleh semakin lancar dan efisiennya fasilitas transportasi dan informasi yang memperlancar hubungan antar Negara. Dengan demikian, perubahan di suatu kawasan dapat dengan mudah mempengaruhi perubahan kondisi suatunegara, baik secara langsung maupun tidak langsung.

- **Globalisasi**

Globalisasi merupakan keterkaitan dan ketergantungan antar bangsa dan antar manusia di seluruh dunia melalui perdagangan, investasi, perjalanan, budaya populer, dan bentuk-bentuk interaksi yang lain sehingga batas-batas suatu negara menjadi semakin sempit. Proses Globalisasi terjadi akibat adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dipengaruhi juga oleh perdagangan internasional. Karena berkaitan erat dengan faktor ekonomi dan sosial budaya, tentunya globalisasi juga memiliki dampak di bidang ekonomi dan sosial budaya, yaitu meluasnya pengaruh ilmu pengetahuan dan kebudayaan di seluruh dunia, sehingga tidak jelas lagi batas yang membedakan pengetahuan dan budaya yang satu dengan yang lain dan tidak ada batas untuk mendapatkan akses terhadap suatu pengetahuan dan budaya dari negara lain.

- **Globalisasi ekonomi.** Globalisasi perekonomian ini erat kaitannya dengan perdagangan bebas yang berusaha menghilangkan hambatan-hambatan perdagangan internasional. Hambatan-hambatan tersebut biasanya terjadi karena tarif ekspor atau impor yang terlalu tinggi sehingga membuat harga barang tidak kompetitif. Bisa juga hambatannya berupa politik dagang yang diberlakukan suatu negara untuk melindungi produksi dalam negeri.

  Contoh globalisasi ekonomi tanpa mengenal batasan teritorial atau kewilayahan antar negara adalah globalisasi Informasi. Ada empat sektor di Indonesia yang mengalami dampak globalisasi ekonomi, yaitu sektor ekspor, impor, investasi, dan tenaga kerja.

  Sisi positifnya, Indonesia dapat mengalami pertambahan frekuensi perdagangan dan investasi pada sektor yang dapat diperdagangkan, serta industri nasional yang lebih kompetitif. Dari sisi negatifnya, hal

ini dapat merusak kenyamanan publik. Globalisasi membuat sektor ekonomi tradisional mulai ditinggalkan dan berubah menjadi sektor ekonomi modern. Masyarakat sudah mulai merasa bahwa pasar-pasar tradisional mulai tertinggal sehingga membawa dampak pada kebijakan pelaku ekonomi yang mengikuti globalisasi.

- **Globalisasi sosial budaya**. Dampak positif dari globalisasi sosial budaya yaitu modernisasi. Modernisasi merupakan perubahan dan perkembangan sesuatu yang belum maju menjadi maju**.** Modernisasi ini tidak hanya berlaku pada teknologi, tapi juga berlaku pada pola pikir masyarakat yang dipengaruhi oleh kemajuan ilmu pengetahuan.
- **Globalisasi secara fisik** ditandai dengan perkembangan kota-kota yang menjadi bagian dari jaringan kota dunia. Hal ini dapat dilihat dari infrastruktur telekomunikasi, jaringan transportasi, perusahaan-perusahaan berskala internasional serta cabang-cabangnya. Dampak positif dari globalisasi adalah terjadinya perubahan tata nilai dan sikap, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, tingkat kehidupan yang lebih baik. Sedangkan dampak negatif dari globalisasi adalah, pola hidup konsumtif, sikap individualistik, gaya hidup kebarat-baratan serta kesenjangan sosial.

- **Industrialisasi Dan Revolusi Industri 4.0**

Industrialisasi merupakan proses modernisasi ekonomi yang mencakup seluruh sektor ekonomi yang berkaitan satu sama lain dengan industri pengolahan, bertujuan meningkatkan nilai tambah seluruh sektor ekonomi dengan sektor industri pengolahan sebagai sektor utama. Dengan adanya perkembangan industri maka akan memacu dan mengangkat pembangunan sektor-sektor lainnya. Industrialisasi telah menjadi kunci bagi pertumbuhan ekonomi modern dan pesatnya peningkatan pendapatan masyarakat.

Beberapa dampak positif industrialisasi:

1. Peningkatan pendapatan nasional

Industrialisasi memungkinkan negara-negara mengoptimalkan sumber daya mereka yang mulai berkurang dan meningkatkan kuantitas dan kualitas akan barang-barang yang diproduksi suatu perusahaan, sehingga membuat kontribusi lebih besar pada produk nasional bruto atau Gross National Product (GNP).

2. Standar hidup yang lebih tinggi

Dalam masyarakat industri, tenaga kerja lebih berharga, sehingga ketika produktivitas lebih tinggi maka pendapatan individu meningkat.

3. Stabilitas ekonomi

Negara yang bergantung pada produksi dan ekspor bahan mentah saja tidak dapat mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang cepat. Permintaan yang terbatas dan fluktuatif akan produk pertanian dan bahan mentah didukung ketidakpastian alam akan menghambat kemajuan ekonomi. Kemajuan ekonomi yang terhambat mengarah pada ekonomi yang tidak stabil atau tidak aman.

4. Peningkatan neraca pembayaran

Industrialisasi mengubah pola perdagangan luar negeri di dalam suatu negara. Peningkatan ekspor barang-barang manufaktur lebih menguntungkan dalam valuta asing. Pada saat yang sama memproses bahan mentah di dalam negeri akan membatasi impor barang sehingga menghemat devisa. Dampak orientasi ekspor dan substitusi impor dari industrialisasi membantu meningkatkan neraca pembayaran.

5. Menstimulasi kemajuan sektor lain

Industrialisasi mendorong kemajuan sektor-sektor ekonomi lainnya. Perkembangan pada satu industri berdampak pada pengembangan dan perluasan industri terkait.

6. Peningkatan peluang kerja

Industrialisasi memberikan peningkatan kesempatan kerja di industri skala kecil dan besar. Industri menyerap pekerja yang menganggur dan pengangguran dari sektor pertanian sehingga meningkatkan pendapatan masyarakat.

7. Spesialisasi pekerja lebih besar

Industrialisasi membuka jalan pada tenaga kerja khusus atau tenaga kerja ahli untuk lebih dikenal. Pembagian kerja ini meningkatkan produk nilai marjinal tenaga kerja. Tenaga kerja khusus lebih menguntungkan. Pendapatan sektor pekerja di industri rata-rata akan lebih tinggi daripada pekerja di sektor pertanian.

Sedangkan dampak negatif industrialisasi antara lain:

1. Urbanisasi

Orang-orang dari pedesaan akan migrasi ke kota karena mencari pekerjaan di pabrik, kibatnya, populasi penduduk di kota meningkat.

2. Pencemaran lingkungan

Proses industrial dapat menyebabkan masalah kesehatan pada manusia hingga punahnya spesies baik tanaman maupun hewan akibat eksploitasi.

3. Kesenjangan pendapatan

Pemisahan modal dan tenaga kerja menciptakan perbedaan pendapatan antara buruh dan orag-orang yang mengendalikan sumber daya modal.

- **Revolusi Industri 4.0**

Industri 4.0 adalah tren di dunia industri yang menggabungkan teknologi otomatisasi dengan teknologi siber. Pada industri 4.0, teknologi manufaktur sudah masuk pada tren otomatisasi dan pertukaran data. Revolusi industri 4.0 menanamkan teknologi cerdas yang dapat terhubung dengan berbagai bidang kehidupan manusia, menjadi inovasi baru, serta membuka lahan bisnis yang sangat besar karena menghadirkan usaha baru, lapangan kerja baru, dan profesi baru.

- **Sustainable Development Goals (SDGs)**

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia, guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. SDGs berisi 17 Tujuan dan 169 Target yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030.

- **Pandemi COVID-19**

Pandemi COVID-19 merupakan keadaan darurat dan luar biasa yang diakibatkan oleh Virus Corona. Peningkatan kasus COVID-19 tengah terjadi di sejumlah negara karena semakin meluasnya penularan virus corona varian baru, Delta. Faktor utama yang menyebabkan angka kasus-kasus COVID-19 di sejumlah negara meningkat, yaitu faktor pertama, meningkatnya pergerakan, aktivitas, dan interaksi penduduk. Jika kita mengambil parameter transportasi publik dan tempat kerja (perkantoran dan pabrik), secara konsisten terlihat bahwa peningkatan jumlah kasus selalu didahului oleh peningkatan aktivitas dan pergerakan manusia. Kedua, faktor varian baru virus corona. Munculnya varian-varian baru dengan daya tular tinggi dan kemampuan menembus sistem imun *(immune evasiveness)* memberi kontribusi signifikan dalam gelombang penularan terbaru yang jauh lebih tinggi daripada gelombang-gelombang sebelumnya.

Pandemi COVID-19 yang melanda secara global di seluruh dunia sejak akhir Desember 2019 memberikan guncangan cukup besar terhadap perekonomian dunia. Akibatnya ekonomi global mengalami kontraksi yang cukup parah di tahun 2020. Perekonomian negara maju diperkirakan akan menyusut, yang disebabkan terjadinya gangguan permintaan dan penawaran, perdagangan, serta keuangan dalam negeri. Sementara ekonomi negara berkembang mengalami kontraksi sepanjang 2020, dan berakibat pada penurunan pendapatan per kapita yang akan membawa jutaan orang menjadi miskin. Tekanan pandemi COVID-19 ini terutama paling terasa di negara-negara yang memiliki ketergantungan besar terhadap perdagangan global, pariwisata, ekspor komoditas dan pembiayaan eksternal.

Sementara pertumbuhan ekonomi di Asia Timur dan Pasifik mengalami kontraksi sepanjang 2020. Ekonomi regional Asia Timur dan Pasifik telah dipengaruhi pandemi melalui faktor domestik maupun eksternal. Kebijakan lockdown yang mahal secara ekonomis, tetapi dibutuhkan mengakibatkan kontraksi tajam dalam kegiatan ekonomi. Kebijakan shutdown domestik, pengurangan aktivitas pariwisata, gangguan terhadap perdagangan dan manufaktur, hingga spillover dari pasar keuangan terjadi di negara-negara wilayah Asia Timur dan Pasifik ini.

Isu Nasional dan Regional

Kondisi perekonomian Indonesia termasuk Jawa Tengah, di tahun 2020 juga mengalami pelambatan. Pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar 2,07 persen, dan ekonomi Jawa Tengah terkontraksi sebesar 2,65 persen. Kondisi ini dipengaruhi oleh perekonomian global yang melambat, berimbas terhadap harga-harga komoditas, serta konsumsi masyarakat. Kondisi tersebut berakibat pada bertambahnya penduduk miskin Indonesia pada tahun 2020. Dampak lainnya akibat terjadinya kontraksi ekonomi secara global dari sisi penyelenggaraan

pemerintahan adalah menurunnya kapasitas fiskal karena pendapatan negara dan daerah juga menurun.

Pandemi COVID-19 ini merupakan goncangan yang sulit diantisipasi. Tidak ada yang memperkirakan pandemi terjadi dan bahkan belangsung dalam waktu yang lama, bahkan sampai hari ini belum dapat diperkirakan kapan pandemi akan berakhir. Kondisi ini memberikan dampak yang besar di semua sektor utamanya sektor sosial, kesehatan, dan ekonomi. Sejauh mana dampak yang besar tersebut bisa diredam tergantung pada kombinasi efektivitas dua respon kebijakan yaitu respon kebijakan kesehatan, dan respon kebijakan mitigasi dampak sosial ekonomi.

Kondisi pandemi yang belum dapat diprediksikan kapan akan berakhir mendorong pemerintah Indonesia dan pemerintah daerah harus terus intensif melakukan program kegiatan penanganan COVID-19, terutama penyiapan jaring pengaman sosial dan jaring pengaman ekonomi bagi masyarakat. Termasuk juga mendorong kebijakan untuk meningkatkan kapasitas fiskal negara dan daerah, dengan harapan dapat mendorong pertumbuhan perekonomian nasional dan daerah sampai dengan tingkat pemerintah kabupaten/kota.

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024 menghadapi tantangan Perekonomian yaitu:

1. Ketidakpastian Global
   Ke depan, risiko ketidakpastian masih akan mewarnai perkembangan perekonomian dunia. Pertumbuhan ekonomi dan perdagangan dunia diperkirakan akan cenderung stagnan dengan tren melambat sepanjang 2020-2024. Harga komoditas internasional ekspor utama Indonesia diperkirakan juga akan cenderung menurun, seiring dengan beralihnya permintaan dunia ke produk yang lain. Selain itu, risiko ketidakpastian lainnya yang perlu diantisipasi antara lain perang dagang, perlambatan ekonomi China, dan risiko geopolitik di Timur Tengah.

2. Pertumbuhan Ekonomi stagnan
   Stagnannya pertumbuhan ekonomi utamanya disebabkan oleh tingkat produktivitas yang rendah seiring belum optimalnya transformasi struktural.

   Faktor yang menjadi kendala utama yang mengikat (the most binding constraint) pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah regulasi yang tidak mendukung penciptaan dan pengembangan bisnis, bahkan cenderung membatasi, serta kualitas institusi yang rendah. Selain itu, kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi kendala mengikat bagi pertumbuhan ekonomi jangka menengah-panjang. Jika tidak diatasi saat ini, rendahnya kualitas SDM akan menghalangi Indonesia untuk bersaing di era digital dan sulit untuk beralih ke manufaktur berteknologi tinggi. Kendala lain yang masih harus diatasi adalah rendahnya penerimaan perpajakan dan kualitas belanja, serta infrastruktur yang masih harus ditingkatkan, terutama terkait konektivitas.

3. Defisit Transaksi Berjalan yang Meningkat
   Tidak berkembangnya industri pengolahan berdampak pada kinerja perdagangan internasional Indonesia. Hingga saat ini, ekspor Indonesia masih didominasi oleh ekspor komoditas. Rasio ekspor terhadap PDB terus menurun, akibatnya, Indonesia masih mengalami defisit transaksi berjalan. Peningkatan defisit transaksi berjalan menjadi penghambat bagi

akselerasi pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat di tengah kondisi keuangan global yang ketat.

4. Revolusi Industri 4.0 dan Ekonomi Digital
   Saat ini dunia telah memasuki era revolusi industri 4.0. Revolusi tersebut memberikan tantangan dan peluang bagi perkembangan perekonomian ke depan. Di satu sisi, digitalisasi, otomatisasi, dan penggunaan kecerdasan buatan dalam aktivitas ekonomi akan meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam produksi modern, serta memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi konsumen. Digital teknologi juga membantu proses pembangunan di berbagai bidang di antaranya pendidikan melalui distance learning, di pemerintahan melalui e-government, inklusi keuangan melalui fin-tech, dan pengembangan UMKM seiring berkembangnya e-commerce. Namun di sisi lain, perkembangan revolusi industri 4.0 berpotensi menyebabkan hilangnya pekerjaan di dunia.

RPJMN 2020-2024 telah mengidentifikasi beberapa kondisi yang dapat berpengaruh terhadap pembangunan nasional, termasuk berpengaruh terhadap Kabupaten Banyumas, antara lain Pengelolaan sumber daya ekonomi menghadapi tantangan terkait daya dukung lingkungan, ketersediaan lahan, keterbatasan infrastruktur, penataan ruang, serta kesejahteraan petani-nelayan dan masyarakat yang bergantung penghidupannya pada pemanfaatan sumber daya alam.

Tantangan lain yang tidak kalah penting adalah peningkatan kebutuhan pangan seiring dengan peningkatan populasi penduduk sebesar 1,2 persen. Pengelolaan sumber daya pangan dan pertanian menghadapi isu semakin meningkatnya kebutuhan akan lahan dan air sebagai dampak dari peningkatan aktivitas perekonomian. Kondisi ini menyebabkan peningkatan persaingan dalam pemanfaatan lahan dan air, khususnya di antara sektor pertanian, industri pengolahan, dan perumahan.

Dalam rangka mencapai sasaran ekonomi makro pembangunan jangka menengah Tahun 2020-2024, pertumbuhan ekonomi diharapkan meningkat, melalui peningkatan produktivitas, investasi yang berkelanjutan, perbaikan pasar tenaga kerja, dan peningkatan kualitas SDM.

Pertumbuhan ekonomi di setiap wilayah diharapkan berjalan beriringan dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Kebijakan di setiap wilayah diharapkan selaras dengan kebijakan di tingkat nasional, dengan tetap memperhatikan keunggulan dan karakteristik wilayah dalam rangka mengurangi ketimpangan antar wilayah. Pulau Jawa – Bali tetap menjadi wilayah yang memiliki porsi (share) terbesar dalam perekonomian didorong oleh pergeseran struktur ekonomi ke sektor jasa dengan tetap mempertahankan pertumbuhan di sektor industri pengolahan. Pergeseran struktur ekonomi ini diharapkan mampu menjaga pertumbuhan ekonomi pulau Jawa - Bali yang lebih stabil sebagai penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional.

Aspek lain pembangunan ekonomi ke depan adalah aspek lingkungan. Perubahan iklim dan menurunnya daya dukung lingkungan dapat berdampak negatif terhadap pencapaian target pertumbuhan ekonomi. Oleh karenanya pembangunan ke depan diarahkan untuk mempertahankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, target penurunan dan intensitas emisi serta kapasitas daya dukung SDA dan daya tampung LH saat ini dan di masa yang akan datang. Salah satu parameter daya dukung

sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup yang perlu diperhatikan Kabupaten Banyumas adalah Kawasan Rawan Bencana dan Ketersediaan Air. Kerusakan tutupan hutan diperkirakan akan memicu terjadinya kelangkaan air baku khususnya pada pulau-pulau yang memiliki tutupan hutan sangat rendah seperti Pulau Jawa, Bali dan Nusa Tenggara. Kelangkaan air baku juga mulai terjadi pada beberapa wilayah lainnya dikarenakan dampak dari perubahan iklim global yang menerpa sebagian besar wilayah Indonesia. Saat ini ketersediaan air sudah tergolong langka hingga kritis di sebagian besar wilayah Pulau Jawa dan Bali.

Dalam rangka mencapai sasaran pembangunan jangka menengah, sasaran RPJMN Tahun 2020-2024 yaitu Pertumbuhan ekonomi untuk Jawa sebesar 5,9%, Tingkat kemiskinan 5-6%, Tingkat Pengangguran 3,6 – 4,3%, dan sebagai pelaksanaan arah kebijakan dan pembangunan wilayah, maka ditetapkan lokasi prioritas pembangunan berdasar koridor pertumbuhan dan pemerataan. Pembangunan wilayah Jawa-Bali dilakukan dalam kerangka koridor pertumbuhan dan pemerataan dengan lokasi antara lain adalah Kabupaten Banyumas. Dalam tahun 2020-2024, pembangunan Wilayah Jawa-Bali akan mencakup kegiatan prioritas: (1) pengembangan sektor unggulan; (2) pengembangan kawasan strategis; (3) pengembangan kawasan perkotaan; (4) pembangunan desa, kawasan perdesaan dan transmigrasi, daerah tertinggal, dan kawasan perbatasan; (5) penataan kelembagaan dan B daerah

Pembangunan program/kegiatan/proyek strategis yang akan dikembangkan di Kabupaten Banyumas sebagai keberlanjutan implementasi RPJMN Tahun 2020-2024 yaitu:

a. Pembangunan instalasi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL)
b. Pengurangan risiko krisis kesehatan
c. Peningkatan Jalan Banyumas - Klampok, Kab. Purbalingga
d. Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
e. Pengendalian Penggunaan Dana Desa
f. Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa Tahun 2020
g. Desa Digital (P3PD)
h. Pengembangan Sumber Daya Air Minum Berkelanjutan Berbasis Masyarakat
i. Usaha Ekonomi Desa yang dikembangkan yang terintegrasi dengan BUMDes
j. BUMDes yang Dikembangkan untuk Mendukung Produk Unggulan Desa

Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal–Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang, merupakan pedoman percepatan pembangunan kawasan dengan lampiran Rencana Induk Pembangunan Kawasan (Rencana Induk). Berdasarkan Rencana Induk terdapat 7 usulan program/kegiatan di Kawasan Barlingmascakeb yang ada di Wilayah Kabupaten Banyumas untuk mendukung pengembangan kawasan Brebes-Tegal- Pemalang. Pemerintah Kabupaten Banyumas perlu menyelaraskan program/kegiatan pengembangan kawasan Barlingmascakeb dan usulan program/kegiatan lintas Kawasan yang ada di Kabupaten Banyumas dengan program dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 antara lain melalui program-program sebagai berikut:

Tabel 4.3.
Penyelarasan Program/Kegiatan sesuai Perpres 79 Tahun 2019 dengan Program Perubahan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023

No.	Program/Kegiatan Perpres 79 Tahun 2019	Program Perubahan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023
	Pengembangan Kawasan Barlingmascakeb	
1	Pembangunan Waduk Kaliurip di Kecamatan Purwojati	· Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
2	Pembangunan Jembatan Kali Serayu yang menghubungkan Desa Pegalongan–Desa Mandirancan Kecamatan Patikraja	· Program Penyelenggaraan Jalan
3	Pembangunan Anjungan Pelayanan Jalan (APJ)	· Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
4	Pembangunan Fly over Tambaknegara	· Program Penyelenggaraan Jalan
5	Pembangunan Fly over Veteran	
6	Peningkatan Terminal Tipe A	· Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
7	Pembangunan STA (Sub Terminal Agrobisnis)	. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
	Lintas Kawasan	
8	Pembangunan Tol Pejagan-Cilacap, Kab. Brebes, Kab. Cilacap dan Kab. Banyumas	· Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)· · Program Penyelenggaraan Jalan · Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
9	Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Jawa Tengah	· Program Pengembangan Perumahan
10	Pengembangan amenitas pariwisata berbasis homestay/desa wisata	· Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata · Program Pemasaran Pariwisata
11	Pengembangan ekonomi berbasis koperasi dan UMKM	· Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) · Program Pengembangan UMKM
13	Penanggulangan dan pencegahan stunting dan gizi buruk	· Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat· · Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah · Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Isu Strategis Provinsi Jawa Tengah

Hasil telaah dari gambaran kondisi daerah, serta isu-isu global, nasional, dan regional, terutama kondisi terkini yang dipengaruhi oleh pandemi Covid-19 dan perubahan kebijakan nasional, maka isu strategis pembangunan daerah Jawa Tengah saat ini sampai dengan tahun 2023 yaitu sebagai berikut.

1. Penanggulangan Kemiskinan

Kemiskinan merupakan isu global yang juga menjadi isu daerah saat ini. Sejalan dengan amanat SDG's, kemiskinan di tahun 2030 diupayakan menjadi nol (zero poverty). Isu pandemi Covid-19 yang telah menyebar sampai hampir ke pelosok Indonesia dan Jawa Tengah, juga menimbulkan kerentanan lain dari aspek sosial dan ekonomi. Ditambah

lagi dengan kondisi tekanan ekonomi global yang berdampak pada sektor ekonomi antara lain ditunjukkan dengan adanya tekanan di sektor produksi akibat ketergantungan industri pada bahan baku impor, turunnya ekspor, dan perlahan diikuti dengan rasionalisasi jumlah tenaga kerja, mengakibatkan sebagian kelompok masyarakat yang sebelumnya berada pada kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan menengah menjadi masuk ke dalam kelompok masyarakat miskin (dari desil 5-6 menjadi desil 1-4). Yaitu kelompok pekerja yang terkena PHK atau dirumahkan oleh industri atau UMKM. Sebanyak 11.676 orang pekerja telah di PHK dan 40.797 orang dirumahkan akibat tekanan ekonomi akibat Covid-19. Kondisi inilah kemudian yang diproyeksikan akan berdampak pada meningkatnya jumlah pengangguran dan penduduk miskin di Jawa Tengah.

2. Peningkatan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia

Keberhasilan pembangunan SDM salah satunya diukur dari nilai IPM. Isu strategis yang berkaitan sumber daya manusia adalah tantangan bonus demografi dimana usia produktif lebih besar dibandingkan usia non produktif. Tantangan ke depan adalah bagaimana memanfaatkan bonus demografi untuk mendorong percepatan pembangunan daerah, dengan memanfaatkan penduduk usia produktif sebagai tenaga kerja yang berkualitas dan berdaya saing.

Pada kondisi dan situasi pandemi ini isu pendidikan dan kesehatan cukup mengemuka dalam konteks pembangunan kualitas sumber daya manusia. Di bidang pendidikan telah terjadi perubahan pola penyelenggaraan pendidikan dan metode pembelajaran dari luring menjadi daring. Berbagai kendala dijumpai dalam pelaksanaan daring baik dari sisi guru maupun siswa, sehingga muncul kekhawatiran terhadap kualitas hasil proses pembelajaran dan perubahan karakter anak usia sekolah, sehingga perlu pemikiran serius bagaimana konsep, sistem dan metode pembelajaran yang efektif dan aman pada situasi pandemi ini, lalu bagaimana menyiapkan sarana prasarana sekolah yang memenuhi syarat protokol kesehatan serta tidak kalah penting menyiapkan sumber daya manusia baik guru dan tenaga pendidik maupun siswa agar secara serius dapat mematuhi pelaksanaan pembelajaran sesuai protokol kesehatan. Di sisi lain, revolusi industri 4.0 menuntut manusia untuk semakin meningkatkan pemahaman dan kemampuan terhadap pemanfaatan dan pengembangan teknologi informasi, menciptakan sumber daya manusia dengan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) dan siap kerja.

Isu kesehatan juga masih menjadi hal penting kaitannya dengan kualitas hidup manusia. Meskipun angka harapan hidup masyarakat Jawa Tengah lebih baik dibandingkan daerah lain di Pulau Jawa dan nasional, namun angka kesakitan dan angka kematian masih cukup tinggi. Sehingga penanganan kesehatan masyarakat tetap menjadi hal penting untuk diperhatikan dalam pembangunan ke depan. Paradigma

pembangunan kesehatan selama ini yang mengarah pada tindakan kuratif, yang ke depan akan mulai bergeser pada tindakan preventif dan promotif. Hal tersebut tetap harus didukung dengan upaya penurunan disparitas akses dan mutu pelayanan kesehatan, pemenuhan prasarana dan sarana kesehatan, serta tenaga kesehatan, yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Terjadinya pandemi Covid-19 berdampak pada penurunan pelayanan kesehatan sehingga mengancam status kesehatan masyarakat. Penularan dan penyebaran virus Covid-19 tidak hanya menjadi ancaman bagi kelompok lanjut usia, ibu hamil, dan anak-anak, namun juga menjadi ancaman bagi kelompok usia produktif. Faktor penyebabnya adalah meningkatnya risiko penyakit tidak menular penyerta yang bersifat kronis yang menyerang orang usia produktif.

Pembelajaran dari pandemi Covid-19 adalah bagaimana mendorong penguatan pembangunan sektor kesehatan dengan penguatan sistem kesehatan daerah dalam rangka penguatan ketahanan kesehatan (health security) melalui pengendalian penyakit, penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, pemenuhan dan pemerataan tenaga kesehatan, kemandirian farmasi dan alat kesehatan, pembiayaan kesehatan, serta digitalisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Ancaman terhadap sumber daya manusia lainnya yang saat ini tengah menggejala secara nasional adalah melemahnya pemahaman budaya bangsa, dan sendi “kebinekatunggalikaan”, serta banyaknya kasus kekerasan karena tumbuhnya paham radikalisme dan terorisme, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, terutama kasus kekerasan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang cenderung meningkat telah mengkawatirkan semuanya dan dapat mengancam kualitas sumber daya manusia. Ancaman peredaran NAPZA juga telah menjadi isu krusial secara nasional, bahkan Indonesia telah menetapkan “darurat narkoba” sebagai implikasi peredaran NAPZA yang semakin tak terkendali. Kelompok anak dan remaja merupakan salah satu yang menjadi sasaran korban penyalahgunaan NAPZA.

3. Daya saing ekonomi dan peningkatan kesempatan berusaha

Ekonomi Jawa Tengah dalam konstelasi nasional dalam beberapa tahun terakhir masih dinilai cukup baik, dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah yang relatif stabil dan berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Namun karena terjadinya pandemi Covid-19 perekonomian Jawa Tengah di tahun 2020 terjadi kontraksi..

a. Sektor Industri Pengolahan

Industri pengolahan masih merupakan sektor penyumbang terbesar pada ekonomi Jawa Tengah. Namun demikian kondisinya saat ini industri yang berkembang masih didominasi oleh industri padat karya, yang lebih banyak menyerap tenaga kerja dengan tingkat pendidikan dan keterampilan rendah. Disisi lain perkembangan industri sudah mulai mengarah pada industri padat modal yang menuntut tingkat pendidikan, keterampilan, dan kompetensi tenaga kerja tinggi. Ditambah dengan perkembangan industri global menuju pada industri 4.0 (industri yang mengkombinasikan kecerdasan

buatan, data raksasa, komputasiawan, serba internet dan cetak tiga dimensi).

Kondisi lain yang harus diantisipasi adalah ketergantungan industri terhadap bahan baku dan barang modal impor. Persoalan lainnya adalah ketersediaan sarana dan prasarana industri yang belum memadai, kurang tersedianya sumber daya manusia sesuai kebutuhan industri, serta tingkat kesiapterapan teknologi yang masih rendah.

b. Sektor Perdagangan dan Jasa

Salah satu sektor unggulan Jawa Tengah lainnya adalah perdagangan dan jasa, yang trennya dari tahun ke tahun mulai meningkat. Meskipun meningkat, persoalan yang dihadapi di sektor perdagangan adalah neraca perdagangan defisit, dimana impor masih lebih tinggi dibandingkan ekspor. Penyebabnya antara lain rendahnya ekspor antardaerah, dan pasar ekspor yang masih terbatas pada pangsa pasar konvensional.

Selain itu, sektor produksi didominasi pada skala Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang menghadapi teknologi sederhana, lemahnya akses permodalan, akses pasar, daya saing produk, dan manajemen usaha. Tren pengembangan e-commerce juga belum dibarengi kemampuan sumberdaya manusia dalam pemanfaatan e-commerce tersebut.

Pengembangan usaha pada sektor jasa, pariwisata, dan ekonomi kreatif juga masih perlu didorong untuk menjadi kekuatan pertumbuhan ekonomi yang baru. Pariwisata sebagai salah satu penyumbang ekonomi daerah dan pendapatan daerah, perlu didorong terutama bagaimana menyiapkan prasarana dan sarana pariwisata pada destinasi wisata unggulan, aksesibilitas dan konektivitas antar destinasi wisata, promosi wisata, dan penyiapan sumberdaya manusia.

Pengembangan pariwisata juga diarahkan dengan dengan menempatkan masyarakat desa sebagai subyek pembangunan serta didukung interkoneski antar desa, pemerintah, swasta, perguruan tinggi, komunitas dan pelaku wisata.

c. Sektor Pertanian

Sebagai salah satu sektor unggulan dan penyumbang PDRB ketiga terbesar di Jawa Tengah, sektor pertanian menjadi tumpuan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah. Persoalan terjadi saat ini adalah justru sektor pertanian makin terdesak dan menurun kontribusinya pada PDRB dari tahun ke tahun. Meskipun di tahun 2020 sektor pertanian ini justru tetap tumbuh positif ditengah kondisi pandemi Covid-19. Selain itu, persoalan lain adalah makin kurangnya minat angkatan kerja yang menekuni sektor pertanian, dan memilih untuk bekerja di sektor industri serta perdagangan. Hal tersebut didukung

dengan semakin terbatasnya lahan pertanian karena meningkatnya permintaan perubahan alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan permukiman dan industri.

Persoalan sektor pertanian, yang pertama, sebagian besar masyarakat Jawa Tengah bekerja di sektor pertanian, meskipun kecenderungannya semakin menurun dan yang tersisa adalah petani usia tua. Kedua, dinamika sektor pertanian masih terbatas karena penggunaan teknologi yang belum begitu maju. Ketiga, sebagian besar penduduk yang dikategorikan hidup dalam garis kemiskinan adalah masyarakat petani. Keempat, infrastruktur yang mendukung proses produksi dan pemasaran, seperti irigasi serta transportasi dan komunikasi belum memadai. Kelima, terbatasnya akses pada informasi pasar. Sebagian besar petani belum memiliki atau menggunakan teknologi untuk pertukaran informasi tentang kebutuhan dan harga-harga komoditas di pasar. Kondisi tersebut kemudian pada akhirnya menyebabkan nilai tukar petani dan nilai tukar nelayan rendah.

d. Penanaman modal

Beberapa permasalahan penanaman modal yang dihadapi seperti kendala pelaku usaha saat starting up meliputi ketersediaan lahan/tata ruang, perizinan, dan tenaga kerja sesuai kompetensi yang diperlukan; ketersediaan infrastruktur pendukung penanaman modal; persepsi dan partisipasi masyarakat terhadap kehadiran penanaman modal; pertumbuhan dan persebaran penanaman modal yang belum merata di Jawa Tengah; dan pelambatan pertumbuhan ekonomi akibat dampak Covid-19.

Selain itu, isu penting terkait dengan ekonomi daerah adalah peran pemerintah provinsi dalam pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah yang dapat dilihat dari kontribusi APBD terhadap PDRB pada komponen pengeluaran konsumsi pemerintah dan PMTB.

Kondisi perekonomian daerah berkorelasi dengan sektor tenaga kerja dimana kondisi perekonomian yang baik akan memberikan peluang kesempatan kerja dan kesempatan berwirausaha yang semakin luas. Akan tetapi persoalan kualitas calon tenaga kerja dan tenaga kerja menjadi hal penting untuk diperhatikan. Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat Jawa Tengah berdampak pada kualitas dan daya saing sumberdaya manusia yang berkaitan dengan ketenagakerjaan. Maka tantangan ke depan adalah bagaimana menyiapkan tenaga kerja yang berkualitas dan mampu bersaing di pasar kerja global.

Namun terjadinya pandemi Covid-19 di awal tahun 2020 di Indonesia berdampak pada sektor tenaga kerja. Jumlah kepulangan penduduk migran Jawa Tengah sebesar 1.124.000 orang. Sesuai dengan hasil survei yang dilakukan oleh Tim Relawan Melawan Covid-19 (TRMC-19) di Jawa Tengah diperoleh gambaran kepulangan migran Jawa Tengah 62,57 persen mudik tidak dengan keluarga dan 43,43 persen mudik bersama keluarga dan tanggungan; pemudik karena kehilangan pekerjaan sebanyak 53,65 persen, dan 46,35 persen karena sebab

lainnya, diantaranya adalah kegiatan pendidikan sementara dihentikan. Data dari sisi penghasilan menunjukkan 8,73 persen pemudik memiliki lebih dari 1 (satu) sumber penghasilan, sedangkan 91,27 persen hanya mempunyai 1 (satu) sumber penghasilan. Tambahan keterangan lain 42,46 persen pemudik bergantung pada keluarga yang ditumpangi, sejumlah 7,7 persen pemudik dengan tanggungan keluarga, sejumlah 89 persen pemudik tidak dapat memastikan sampai kapan akan tinggal di desa atau kembali ke aktivitas sebelumnya. Kondisi ini yang diproyeksikan akan meningkatkan tingkat pengangguran terbuka di Jawa Tengah di atas 6 persen di tahun 2020 (TPT Bulan Agustus 2020 sebesar 6,48 persen).

Selain itu tekanan ekonomi akibat pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini juga berdampak pada sektor-sektor perekonomian antara lain sektor koperasi, UMKM, dan IKM yang ditunjukkan dengan menurunnya aset, omset, dan tenaga kerja. Permasalahan yang terjadi antara lain pada penyediaan bahan baku, produksi, pemasaran, dan pembiayaan. Namun untuk UMKM yang berbasis online justru mengalami peningkatan omset cukup signifikan. Permasalahan juga terjadi pada 848 pasar rakyat di Jawa Tengah dimana terjadi penurunan jumlah pedagang sampai 25,6 persen dan omset sampai dengan 47,5 persen.

Demikian juga sektor pertanian terdampak pandemi Covid-19 yang tergambarkan dari pertumbuhan negatif sektor pertanian pada PDRB Jawa Tengah. Kelompok masyarakat di sektor ini yang terdampak antara lain petani, peternak, nelayan, pembudidaya ikan, pelaku usaha pengolah dan pemasar produk pertanian, peternakan, dan perikanan, dan petambak garam rakyat. Permasalahan yang dihadapi sektor ini antara lain menurunnya permintaan pasar akibat penurunan daya beli masyarakat, penurunan penjualan produk pertanian dan produk olahan pertanian, penurunan pasokan, ketidakpastian harga, pembatasan mobilitas petani, pembatasan distribusi sarana produksi pertanian dan produksi hasil pertanian, yang kemudian berakibat pada penurunan pendapatan para pelaku sektor pertanian.

Sektor lain yang terdampak cukup signifikan adalah sektor pariwisata. Menurunnya minat masyarakat untuk bepergian ke destinasi wisata yang sangat tajam berakibat pada menurunnya roda perekonomian bagi para pelaku usaha bidang pariwisata. Dampak yang tampak antara lain banyaknya hotel berbintang dan non bintang yang tutup sementara, tingkat hunian hotel yang menurun drastis, biro wisara dan agen wisata menghentikan usahanya sementara, tutupnya daya tarik wisata (DTW) termasuk desa wisata, menurunnya usaha ekonomi kreatif bidang pariwisata, yang seluruhnya mengakibatkan banyaknya tenaga kerja yang di PHK atau di rumahkan.

Dari sektor transportasi sebagai pendukung pembangunan ekonomi juga mengalami dampak cukup signifikan selama masa pandemi Covid-19. Kebijakan pemerintah untuk menghentikan penularan virus Covid-19 dengan melakukan pembatasan pergerakan manusia dari dan menuju luar daerah/negara menyebabkan terhentinya operasional usaha transportasi umum darat, laut, dan udara. Hal tersebut berakibat pada

penurunan pendapatan para pelaku usaha di bidang transportasi termasuk pelaku usaha yang berdampingan dengan sektor transportasi seperti UMKM, karena ditutupnya usaha yang ada di terminal atau bandara.

Demikian juga di sektor infrastruktur yang akibat adanya kebijakan pengalihan anggaran pemerintah untuk penanganan Covid-19 berakibat pada terhentinya beberapa pembangunan infrastruktur di Jawa Tengah. Termasuk juga tertundanya pembangunan infrastruktur strategis di Jawa Tengah yang mendukung pada proyek strategis nasional. Tertundanya pembangunan infrastruktur ini juga berdampak pada berkurangnya lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja di sektor ini.

4. Keberlanjutan Pembangunan Dengan Memperhatikan Daya Dukung Lingkungan dan Kelestarian Sumber Daya Alam

Isu pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup menjadi isu yang penting baik secara global maupun nasional khususnya terkait dengan daya dukung lingkungan dan isu perubahan iklim. Adanya dampak yang ditimbulkan oleh bencana banjir, longsor dan kekeringan menuntut pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan, dan implementasi konsep pembangunan rendah karbon yang mempertimbangkan pengurangan emisi gas rumah kaca. Hal ini seiring dengan isu pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) di mana 3 dari 17 tujuannya adalah berkaitan dengan lingkungan, yaitu penanganan perubahan iklim, pemeliharaan ekosistem laut dan pemeliharaan ekosistem darat.

Berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya air di Jawa Tengah terdapat penurunan kuantitas dan kualitas air permukaan dan cadangan air tanah yang disebabkan oleh terganggunya kawasan tangkapan air/catchment area, pencemaran limbah industri dan domestik, eksploitasi air tanah oleh industri, dan pemanfaatan kawasan pesisir/mangrove untuk tambak atau fungsi lainnya.

Persoalan penting lainnya terkait pengelolaan lingkungan adalah peningkatan jumlah penduduk dengan dinamika aktivitasnya yang berdampak pada peningkatan jumlah timbulan sampah yang belum seimbang dengan peningkatan layanan persampahan baik di perkotaan maupun perdesaan.

Sedangkan dari sisi kesadaran masyarakat terhadap kelestarian lingkungan hidup juga dirasa masih perlu menjadi perhatian antara lain ditunjukkan dengan kebiasaan membuang sampah tidak pada tempatnya, pengelohan lahan yang kurang memperhatikan konservasi tanah dan air, serta kurangnya budaya hemat energi dan air.

Dikaitkan dengan isu kebencanaan kebijakan pemerintah tentang percepatan pembangunan wilayah melalui pembentukan pusat pertumbuhan baru dan implementasi proyek strategis nasional perlu didukung dengan upaya pengurangan risiko bencana. Hal ini dimaksudkan sebagai langkah antisipasi untuk mengurangi kemungkinan kerugian akibat bencana terhadap hasil-hasil

pembangunan serta untuk menghindari potensi hambatan pertumbuhan ekonomi wilayah.

5. Kedaulatan pangan dan energi

Produksi pertanian akan mempengaruhi pada penyediaan pangan bagi masyarakat. Perkembangan produksi pertanian di Jawa Tengah saat ini secara statistik mampu mencukupi kebutuhan pangan masyarakat utamanya beras, bahkan mampu berkontribusi terhadap produksi beras nasional. Namun tidak demikian dengan produksi kedelai yang masih harus ditingkatkan ke depan. Disisi lain, arus bahan pangan impor semakin terbuka dan tidak dibarengi dengan kebijakan mekanisme pengamanan yang kuat dari pemerintah. Perubahan lahan pertanian (LP2B) menjadi tantangan tersendiri karena desakan kebutuhan lahan untuk industri dan permukiman, serta makin menurunnya tenaga kerja di sektor pertanian akan berpotensi menurunnya persediaan dan produksi pangan.

Isu lain adalah terkait sistem distribusi pangan, dimana pemerintah harus mampu memfasilitasi kemudahan akses pasar produk-produk pangan lokal yang sehat, yang terbentuk dalam satu sistem logistik daerah. Hal tersebut juga harus didukung dengan penyediaan jaringan informasi tepat guna hingga level desa guna memudahkan akses informasi pasar dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan pengembangan pertanian lokal. Selain itu, penting juga untuk penguatan jaringan pergudangan melalui sistem resi gudang, penguatan kelembagaan koperasi pertanian melalui pendampingan secara berkelanjutan, dan penyediaan infrastruktur sebagai sarana distribusi pangan, kesemuanya harus berbasis masyarakat.

Tingkat keberagaman konsumsi pangan masyarakat juga masih menjadi isu penting dalam kedaulatan pangan. Melihat skor Pola Pangan Harapan dibawah angka 100 dan cakupan konsumsi masyarakat Jawa Tengah tertinggi adalah beras, bisa digambarkan bahwa konsumsi pangan masyarakat Jawa Tengah belum beragam. Hal tersebut berkaitan dengan budaya pangan masyarakat pada umumnya, yang memiliki ketergantungan pada beras. Mutu dan keamanan pangan juga harus tetap diperhatikan, karena saat ini mulai banyak ditemukan produk pangan yang diindikasi tidak terjamin mutu dan keamanannya.

Satu tantangan lain adalah bagaimana menyiapkan produk pangan kita berorientasi ekspor, dan mampu bersaing di pasar global nasional, baik produk pangan mentah maupun olahan dalam rangka meningkatkan nilai tambah bagi petani.

Isu lain adalah terkait dengan kedaulatan energi yang menunjukkan pentingnya ketersediaan energi guna menunjang dinamika pembangunan. Tantangan pemenuhan energi di Jawa Tengah ke depan adalah penyediaan energi untuk industri, perlunya penguatan kehandalan sistem dan sistem pasokan bagi pusat-pusat pertumbuhan

ekonomi baru dalam upaya mendorong investasi utamanya terkait jaringan listrik dan jaringan gas, serta pemanfaatan energi baru terbarukan. Pembangunan dan peningkatan kapasitas pembangkit listrik di Jawa Tengah sebagai kesatuan sistem Jawa-Madura-Bali merupakan potensi yang harus dioptimalkan untuk pemanfaatan energi listrik guna keperluan produktif.

Selain itu kondisi rasio elektrifikasi di Jawa Tengah sampai dengan Desember tahun 2019 baru mencapai 99,88 persen, meskipun seluruh wilayah desa dan kelurahan di Jawa Tengah telah memiliki akses jaringan listrik. Sebanyak 0,12 persen kepala keluarga (KK) belum berlistrik yang sebagian besar berasal dari rumah tangga miskin yang perlu didukung pemerintah.

6. Kesenjangan wilayah

Isu lainnya bukan hanya tentang daya saing ekonomi, namun juga ekonomi yang berkualitas, inklusif, dan merata. Wilayah Jawa Tengah saat ini perkembangannya belumlah merata, yang ditunjukkan dengan Indeks Williamson sebesar 0,62 di tahun 2019. Selain itu masih cukup banyak kabupaten yang masuk kategori relatif tertinggal dibanding kabupaten/kota lain di Jawa Tengah. Di samping itu juga terdapat kesenjangan antara wilayah desa dan kota. Kesenjangan pembangunan antara desa dan kota maupun antara kota dan kota lainnya perlu ditangani secara serius untuk mencegah terjadinya urbanisasi, yang pada gilirannya akan memberikan beban dan masalah sosial di wilayah perkotaan.

Untuk itu membuka akses antar wilayah menjadi isu penting, terutama untuk menghubungkan daerah-daerah tertinggal dengan pusat-pusat pertumbuhan, transportasi kota-desa, pergantian/integrasi antar moda, serta untuk meningkatkan kemudahan distribusi barang dan jasa. Penyediaan akses berupa prasarana jalan dan jembatan, dilengkapi dengan transportasi publik yang memadai (termasuk revitalisasi kereta api), jaringan komunikasi, dan jaringan energi menjadi prioritas.

Keserasian pembangunan pantura dan pansela semakin perlu untuk menjadi perhatian sejalan dengan dikembangkan dan dibangunnya Kawasan Industri Kendal, Kawasan Industri Terpadu Batang, dan Kawasan Industri Brebes yang berpotensi untuk semakin mendorong dan memantapkan perkembangan perekonomian wilayah di Pantura..

7. Tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah

Aparatur sebagai pelayan publik dituntut untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Keterbukaan dan transparansi informasi serta komunikasi menjadi penting dalam membangun bentuk pelayanan publik yang prima. Ruang pengaduan masyarakat harus lebih semakin terbuka, guna meningkatkan nilai aparatur sebagai pelayan masyarakat. Selain itu pelayanan perijinan, kemudahan berusaha, pelayanan administrasi kependudukan, hingga pelayanan pendidikan dan

kesehatan juga harus semakin ditingkatkan. Maka pengembangan teknologi dan inovasi pelayanan publik menjadi hal cukup penting sebagai instrumen komunikasi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik.

Penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah juga menjadi satu kriteria pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (result oriented government). Akuntabilitas kinerja dibangun sejak proses perencanaan, penganggaran, hingga implementasi. Dalam rangka meningkatkan kinerja akuntabilitas daerah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ke depan lebih meningkatkan kinerja dengan mengefektifkan budaya kinerja yang tinggi melalui perbaikan proses perencanaan dan penganggaran, serta peningkatan kinerja organisasi agar lebih selaras dengan pencapaian tujuan, sasaran strategis, dan indikator kinerja, memanfaatkan hasil pengukuran kinerja individu dengan kinerja organisasi sebagai dasar pemberian reward and punishment, serta melakukan pembinaan kepada pemerintah kabupaten/ kota yang implementasi akuntabilitas kinerjanya belum baik.

Isu yang berkaitan dengan akuntabilitas kinerja pembangunan daerah salah satunya adalah tentang kemandirian fiskal. Dari tingkat kontribusi PAD dan DBH Provinsi Jawa Tengah terhadap pendapatan daerah, Jawa Tengah termasuk daerah yang cukup mandiri. Namun demikian, dari tren selama lima tahun terakhir diketahui bahwa kemampuan fiskal daerah Jawa Tengah yang dilihat dari kontribusi PAD dan DBH terhadap pendapatan daerah cenderung menurun. Kondisi tersebut menggambarkan dua hal, yaitu pertama adalah belum optimalnya kebijakan ekstensifikasi dan intensifikasi sumber-sumber PAD di Provinsi Jawa Tengah. Sumber-sumber PAD yang ada selama ini (kondisi eksisting) tidak mampu membiayai kenaikan beban belanja APBD Provinsi Jawa Tengah yang terus meningkat setiap tahun. Kedua adalah adanya kenaikan secara signifikan beban belanja APBD Provinsi Jawa Tengah yang relatif memberikan tekanan terhadap pembiayaan APBD. Hal ini berimplikasi pada meningkatnya kewajiban pemerintah daerah untuk menjaga pelayanan pemerintahan, pelayanan umum sekaligus pembangunan di daerah.

Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih akan tercapai apabila didukung ASN yang kompeten, progresif, dan adaptif, serta kelembagaan yang optimal. Untuk itu, penerapan sistem merit dan manajemen talenta ASN menjadi kunci mutlak yang harus dilakukan. Hal tersebut didukung dengan penempatan talenta ASN yang tepat pada jabatan, dan pengembangan talenta ASN melalui Jawa Tengah Corporate University (Jateng CorpU). Selain itu juga perlu dilakukan penataan dan penguatan kelembagaan/organisasi birokrasi agar efektif, efisien, dan tepat ukuran sesuai dengan proses bisnis, dengan mempertimbangkan kinerja utama yang dihasilkannya, dan hasil evaluasi kelembagaan dalam rangka penyederhanaan organisasi.

Kondisi pandemi Covid-19 yang saat ini masih melanda secara global juga berdampak pada aspek tata kelola pemerintahan. Dampak nyata terjadi pada perubahan tata kelola, pola dan sistem kerja birokrasi,

dimana diberlakukan pola work from home atau bekerja di rumah bagi sebagian besar ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Pola kerja yang demikian menuntut optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi sebagai media komunikasi dalam bekerja (digitalisasi tata kelola). Maka pelayanan publik secara online, tata naskah dinas elektronik, rapat/pertemuan online, serta pembelajaran pendidikan dan pelatihan online menjadi hal yang harus dioptimalkan dalam pola kerja birokrasi di Jawa Tengah dengan tetap memperhatikan aspek akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi kerja dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan.

Tantangan lainnya dalam implemetasi tata kelola pemerintahan di Jawa Tengah yaitu penerapan dynamic governance agar pemerintah daerah lebih dapat bertindak progresif dan adaptif dalam penanganan berbagai persoalan pembangunan daerah dari sudut pandang lintas sektor. Kebijakan ini juga sejalan dengan kebijakan nasional dalam mewujudkan dynamic governance dalam rangka menuju birokrasi kelas dunia.

Sedangkan dalam rangka menjaga kondusivitas ke depan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus melaksanakan koordinasi dan kerjasama antar tingkat pemerintahan serta lintas sektor sebagai upaya peningkatan kualitas kehidupan demokrasi yang damai, aman, dan toleran bagi seluruh elemen masyarakat Jawa Tengah. Aspek kondusivitas wilayah menjadi prasyarat penting dan strategis dalam menunjang kelancaran dan keberhasilan program-program pembangunan di Jawa Tengah. Penciptaan kondusivitas wilayah ini juga diharapkan mampu mewujudkan iklim sejuk untuk menjaga kerukunan antar umat beragama, meningkatkan perlindungan bagi kebebasan sipil masyarakat, dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Jawa Tengah yang harmonis dari dimensi ketertiban sosial.

Isu Strategis Pembangunan Daerah

Hasil telaah dari gambaran kondisi daerah, serta isu-isu global, nasional, dan regional, terutama kondisi terkini yang dipengaruhi oleh pandemi COVID-19 dan perubahan kebijakan nasional, maka diidentifikasi isu strategis pembangunan daerah Kabupaten Banyumas saat ini sampai dengan tahun 2023 yaitu sebagai berikut.

1. Kualitas Sumberdaya Manusia

Isu strategis nasional yaitu sumber daya manusia baik di bidang pendidikan dan kesehatan, sejalan dengan isu strategis daerah yaitu kualitas sumberdaya manusia. Pembangunan Sumber Daya Manusia di Kabupaten Banyumas mengalami peningkatan yang ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Banyumas Tahun 2019 sebesar 71,96 menjadi 71,98 di tahun 2020.

Upaya peningkatan pembangunan sumber daya manusia antara lain didorong oleh peningkatan derajat pendidikan masyarakat; derajat kesehatan masyarakat; pengendalian pertumbuhan penduduk; kualitas hidup perempuan, anak serta pemuda.

Isu strategis yang berkaitan sumber daya manusia adalah tantangan bonus demografi dimana usia produktif lebih besar dibandingkan usia non produktif. Tantangan ke depan adalah bagaimana memanfaatkan bonus demografi untuk mendorong percepatan pembangunan daerah, dengan memanfaatkan penduduk usia produktif sebagai tenaga kerja yang berkualitas dan berdaya saing. Paska terjadinya bonus demografi yang diproyeksikan terjadi di Jawa Tengah sampai dengan sepuluh tahun ke depan adalah terjadinya penuaan penduduk (population aging) dimana jumlah penduduk usia lanjut akan meningkat proporsinya. Lanjut usia mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam semua aspek kehidupan. Potensi dan kemampuan yang dimiliki dapat dikembangkan untuk memajukan kesejahteraan diri, keluarga dan masyarakat.

Komitmen Peningkatan derajat pendidikan masyarakat adalah upaya untuk mendukung pencapaian tujuan dalam sasaran Global SDGs/TPB Tujuan 4 Menjamin Pendidikan Yang Inklusif Dan Merata Serta Mempromosikan Belajar Sepanjang Hayat serta tujuan SDGs/TPB pertama tanpa kemiskinan target keempat yaitu memastikan bahwa semua pria dan wanita, khususnya masyarakat miskin dan rentan memiliki hak yang sama terhadap akses pelayanan dasar, dalam hal ini adalah pendidikan serta pencapaian Tujuan 5 Mencapai Keseteraan Gender Dan Memperdayakan Kaum Perempuan.

Peningkatan derajat pendidikan masyarakat ditunjukkan dengan indikator Angka Rata-rata Lama Sekolah yang menunjukkan kualitas pendidikan masyarakat melalui pendidikan formal diukur dengan indikator Angka Partisipasi Murni (APM) baik PAUD, SD/MI maupun SMP/Mts serta indikator Harapan Lama Sekolah yang menunjukkan kualitas sistem pendidikan di berbagai jenjang baik formal maupun non formal/kesetaraan dan mengurangi Angka Putus Sekolah (APS). Secara umum Angka Partisipasi Murni (APM) di Kabupaten Banyumas masih belum optimal di semua jenjang pendidikan dimana kondisinya belum mencapai 100%.

Sedangkan isu strategis nasional karakter bangsa dimana masih rendahnya budaya literasi masyarakat sejalan dengan isu daerah terkait dengan derajat pendidikan masyarakat yang didorong oleh peningkatan budaya baca masyarakat dengan indikator Nilai Kegemaran Membaca Masyarakat, dimana pada masa pandemi COVID 19 aktivitas membaca lebih mengarah pada pemanfaatan teknologi melalui internet, maka berdampak pada kunjungan ke perpustakaan menjadi sangat menurun. Untuk itu digitasi perpustakaan menjadi sangat diperlukan.

Upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat adalah untuk mendukung pencapaian Tujuan Global SDGs/TPB ke-3 Menjamin Kehidupan Yang Sehat Dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia.

Peningkatan derajat kesehatan masyarakat diukur dengan Angka Harapan Hidup (AHH) didorong dengan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang dapat diukur dengan penurunan angka kesakitan dan kematian masyarakat. Angka kesakitan dan kematian masyarakat dapat diturunkan antara lain dengan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengakses pelayanan dasar kesehatan. Akses masyarakat terhadap pelayanan dasar kesehatan meliputi keterjangkauan layanan maupun kualitas layanan kesehatan masyarakat.

Terjadinya pandemi COVID-19 berdampak pada penurunan pelayanan kesehatan sehingga mengancam status kesehatan masyarakat. Penularan dan penyebaran virus COVID-19 tidak hanya menjadi ancaman bagi kelompok lanjut usia, ibu hamil, dan anak-anak, namun juga menjadi ancaman bagi kelompok usia produktif. Faktor penyebabnya adalah meningkatnya risiko penyakit tidak menular penyerta yang bersifat kronis yang menyerang orang usia produktif

Sampai dengan Tahun 2020, beberapa layanan kesehatan dan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Banyumas belum memenuhi kondisi yang ideal, diantaranya adalah jumlah/rasio dokter spesialis dan tenaga medis, rasio rumah sakit per satuan penduduk, serta rasio poliklinik per satuan penduduk, angka kematian ibu, Prevelansi gizi buruk, prevalansi stunting.

Pembelajaran dari pandemi COVID-19 adalah bagaimana mendorong penguatan pembangunan sektor kesehatan dengan penguatan sistem kesehatan daerah dalam rangka penguatan ketahanan kesehatan (health security) melalui pengendalian penyakit, penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, pemenuhan dan pemerataan tenaga kesehatan, kemandirian farmasi dan alat kesehatan, pembiayaan kesehatan, serta digitalisasi dan pemberdayaan masyarakat. Pandemi ini diproyeksikan masih akan berlangsung di tahun 2021, maka pengendalian penyebaran COVID-19 terus diupayakan dengan tetap menjaga perilaku 3M (memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak), menerapkan pola hidup bersih dan sehat, mendukung pelaksanaan vaksinasi COVID-19 secara bertahap serta meningkatkan kapasitas pelayanan kesehatan.

Pengendalian pertumbuhan penduduk yang diukur dengan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia, termasuk didalamnya adalah kualitas hidup perempuan yang diukur dengan Indek Pembangunan Gender (IPG), kualitas hidup anak yang dapat dilihat dari bagaimana Kabupaten memberikan ruang yang layak untuk anak dengan Nilai Kabupaten Layak Anak.

2. Ketersediaan Infrastruktur

Keterbatasan infrastruktur merupakan isu nasional yang juga menjadi isu daerah ketersediaan infrastruktur. Penyediaan infrastruktur juga merupakan upaya untuk mendorong pencapaian Tujuan SDG's/TPB ke-9 yaitu Membangun Infrastruktur Yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan Serta Mendorong Inovasi serta Tujuan SDG's/TPB ke-11 Menjadikan Kota dan Permukiman Yang Inklusif, Aman Tangguh dan Berkelanjutan.

Beberapa infrastruktur dasar selain yang menjadi pendorong bagi pencapaian tujuan DGS's/TPB dan mendorong pertumbuhan ekonomi diantaranya adalah infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang seperti jaringan jalan, irigasi; Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman seperti air bersih, sanitasi, dan permukiman; Infrastruktur Perhubungan yang mendukung konektivitas dan pelayanan transportasi.

Kondisi panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik di wilayah Kabupaten Banyumas pada tahun 2020 sebesar 47,51. Untuk jaringan irigasi dalam kondisi baik di wilayah Kabupaten Banyumas sampai

dengan Tahun 2020 baru mencapai 79,01%. Guna mencukupi kebutuhan air untuk daerah irigasi seluas 23.716 Ha terdapat jaringan irigasi sepanjang 641,081 km.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh telah dilaksanakan identifikasi permukiman kumuh yang ditetapkan menjadi Keputusan Bupati Banyumas Nomor: 660/630 Tahun 2020 tentang Lokasi dan Luasan Permukiman Kumuh Perkotaan di Kabupaten Banyumas. Berdasarkan keputusan Bupati tersebut luasan kawasan permukiman kumuh perkotaan di Kabupaten Banyumas adalah 115,7 Ha.

Kondisi lingkungan permukiman kumuh di Kabupaten Banyumas sampai dengan Tahun 2020 masih diangka 7,8%, masih lebih tinggi dari target universal access sebesar 0%. Sedangkan untuk kondisi rumah layak huni meskipun terus meningkat tetapi baru mencapai 78,76 % pada tahun 2020.

Sedangkan dari sisi pelayanan air bersih dan sanitasi adalah upaya untuk mendorong pencapaian Tujuan SDGs/TPB ke-6 Menjamin Ketersediaan Serta Pengelolaan Air Bersih Dan Sanitasi Yang Berkelanjutan Untuk Semua. Cakupan rumah tangga yang memiliki akses terhadap air bersih pada tahun 2019 baru mencapai 87,79% dan cakupan rumah tangga bersanitasi baru mencapai 88,45% pada tahun 2020. Cakupan pelayanan air bersih dan sanitasi tersebut masih lebih rendah dari target universal access sebesar 100% cakupan akses air bersih dan 100% cakupan akses sanitasi pada tahun 2020.

Untuk mengatasi permasalahan infrastruktur tersebut, Pemerintah Kabupaten Banyumas harus berupaya melalui program dan kegiatan untuk meningkatkan jumlah maupun kualitas berbagai sarana dan prasarana baik berupa jaringan jalan, jaringan irigasi, air bersih, sanitasi, pemukiman serta transportasi sehingga dapat mendorong laju pertumbuhan eknonomi yang lebih mantap. Namun demikian akibat adanya kebijakan pengalihan anggaran pemerintah untuk penanganan COVID-19 berakibat pada terhentinya beberapa pembangunan infrastruktur di Kabupaten Banyumas. Termasuk juga tertundanya pembangunan infrastruktur strategis di Banyumas yang mendukung pada proyek strategis nasional. Tertundanya pembangunan infrastruktur ini juga berdampak pada berkurangnya lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja di sektor ini.

3. Pengembangan Potensi Daerah untuk meningkatkan Pendapatan Masyarakat

Pengembangan potensi daerah merupakan upaya untuk mendorong pencapaian Tujuan SDG's/TPB ke-Tujuan 8 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Insklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja Yang Produktif dan Menyeluruh, Serta Pekerjaan Yang Layak Untuk Semua serta pencapaian tujuan 10 Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antar Negara.

Perekonomian Kabupaten Banyumas sangat terdampak pandemi COVID-19 di tahun 2020, termasuk pada sektor unggulan Kabupaten Banyumas (industri pengolahan, perdagangan dan jasa). Terjadinya pandemi COVID-19 juga berdampak pada sektor tenaga kerja, dimana

kesempatan berusaha atau bekerja masyarakat menjadi berkurang karena banyak usaha yang tidak beroperasi sehingga pemanfaatan tenaga kerja berkurang baik jumlah atau waktunya.

Penurunan aktivitas usaha sektor perekonomian di masa pandemi COVID-19 juga ditunjukkan dengan menurunnya aset, omset, penurunan pendapatan para pelaku usaha terutama di bidang pertanian akibat penurunan daya beli masyarakat, penurunan penjualan produk pertanian dan produk olahan pertanian, penurunan pasokan, ketidakpastian harga, pembatasan mobilitas pelaku usaha dan petani, pembatasan distribusi sarana produksi pertanian dan produksi hasil pertanian; pembatasatas kunjungan di sektor pariwisata, pembatasan transportasi dan tertundanya pembangunan infrastruktur.

Isu penting dalam peningkatan daya saing dan kesempatan berusaha diantaranya adalah meningkatkan peluang wirausaha, usaha kerakyatan dan ekonomi kreatif dengan memanfaatkan teknologi terutama pada sektor-sektor perekonomian yang cukup bertahan di masa pandemi COVID-19 seperti sektor koperasi, Usaha Mikro, dan Industri Kecil dengan mendorong peningkatan usahanya melalui online atau jasa antar.

Permasalahan pengembangan potensi daerah adalah belum teridentifikasinya seluruh potensi Kabupaten Banyumas yang ada agar dapat dikembangkan secara optimal, terarah, terencana dan berkelanjutan agar potensi tersebut dapat menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi daerah, sumber pendapatan daerah serta peningkatan pendapatan masyarakat.

Pengembangan usaha mikro merupakan salah satu potensi daerah yaitu dalam hal pembiayaan modal usaha, sumber daya manusia dan kurang memiliki kemampuan manajerial serta promosi produk yang kurang menarik.

Untuk itu Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas berupaya menumbuhkembangkan melalui program dan kegiatan yang mendorong dan meningkatkan koperasi dan usaha mikro kecil serta pengembangan aktifitas ekonomi kreatif dan pariwisata

4. Kemiskinan dan Pengangguran

Kemiskinan merupakan isu global yang juga menjadi isu nasional dan daerah saat ini. Sejalan dengan amanat SDG's, kemiskinan di tahun 2030 diupayakan menjadi nol (zero poverty). Kabupaten Banyumas mempunyai komitmen untuk menurunkan tingkat kemiskinan dalam rangka mendukung sasaran Tujuan pertama dalam sasaran Global SDGs/TPB dimana Pada Tahun 2030, mengurangi setidak-tidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasioanal.

Persentase penduduk miskin Kabupaten Banyumas, meskipun dari tahun ke tahun mengalami penurunan namun masih lebih tinggi dari rata-rata nasional maupun Provinsi Jawa Tengah. Pada tahun 2020 Persentase penduduk miskin justru mengalami kenaikan. Meningkatnya angka kemiskinan pada tahun 2020 dikarenakan adanya pandemi COVID-19 yang memberi dampak multisektoral. Pada tahun 2019 angka kemiskinan Kabupaten Banyumas sebesar 12,53%. Sedangkan tahun

2020 terdapat kenaikan jumlah penduduk miskin Kabupaten Banyumas menjadi 13,26%. Hal ini menunjukkan adanya tingkat kenaikan angka kemiskinan tahun 2020 terhadap tahun 2019 sebesar 5,83%. Dengan kejadian luar biasa pandemi COVID-19 pemerintah dan pemerintah daerah melakukan penyesuaian target indikator persentase penduduk miskin menjadi 11% dari target akhir RPJMD sebelumnya sebesar 8,56%. Dengan jumlah penduduk yang besar maka jumlah penduduk miskin di Kabupaten Banyumas juga tinggi. Dalam lingkup regional wilayah Barlingmascakeb prosentase penduduk miskin Kabupaten Banyumas tahun 2020 menempati peringkat ke-2 terendah dari 5 kabupaten. Namun dari sisi jumlah penduduk miskin Kabupaten Banyumas memiliki jumlah penduduk miskin tertinggi. Jumlah penduduk miskin bertambah 14.190 jiwa dari 211.650 pada tahun 2019 menjadi 225.840 pada tahun 2020.

Isu kemiskinan penduduk Kabupaten Banyumas terkait akses pelayanan dasar antara lain akses rumah layak, pangan, pendidikan dan kesehatan dan juga kesempatan berusaha dan bekerja, aspek ketrampilan dan produktivitas kelompok serta belum terintegrasinya sasaran program dan kegiatan serta lokasi intervensi penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi. Hal lain yang mendorong penurunan angka kemiskinan dan pengangguran adalah peningkatan akses ekonomi. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di kecamatan akan mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Banyumas.

Komitmen Kabupaten Banyumas untuk menurunkan pengangguran adalah dalam rangka mendukung sasaran Tujuan kedelapan dalam sasaran Global SDGs/TPB yaitu mempromosikan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja yang layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah, termasuk melalui akses pada layanan keuangan.

Selama kurun waktu lima tahun terakhir TPT Kabupaten Banyumas mengalami perkembangan fluktuatif, dengan kecenderungan lebih rendah dibanding TPT Provinsi Jawa Tengah dan nasional. Semakin rendah TPT semakin baik, hal ini berarti jumlah pengangguran di Kabupaten Banyumas lebih rendah dibandingkan pengangguran di Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Banyumas masih menjadi permasalahan pembangunan yang akan datang. Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Banyumas tahun 2019 sebesar 4,21% sedangkan tahun 2020 adalah sebesar 6%. Kenaikan tingkat pengangguran ini juga dikarenakan dampak COVID-19 yang mengakibatkan adanya pengurangan tenaga kerja ataupun Pemutusan Hubungan Kerja di banyak perusahaan serta pembatasan kegiatan masyarakat selama pandemi COVID-19.

Tantangan pengurangan pengangguran adalah bagaimana meningkatkan penanaman modal atau investasi sehingga dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat yang didukung dengan kebijakan penanaman modal yang sehat dan kompetitif dan saling menguntungkan, mendorong pengembangan UMKM, inovasi daerah, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

5. Pertanian mendukung Kedaulatan Pangan

Kedaulatan pangan di Kabupaten Banyumas dipersepsikan dengan Ketahan Pangan. Dimana upayanya adalah meningkatkan ketersediaan pangan baik ketersediaan energi maupun protein dengan target akhir RPJMD sebesar 96% dengan inovasi produk dan tata kelola hasil tanaman pangan serta agrobisnis. Komitmen Peningkatan Pertanian untuk mendukung Kedaulatan Pangan adalah upaya untuk mendukung pencapaian tujuan dalam sasaran Global SDGs/TPB Tujuan 2 Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan Dan Gizi Yang Baik, Serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan.

Ketersediaan pangan utama di Kabupaten Banyumas dalam hal ini adalah untuk mencukupi ketersediaan energi dengan ketersediaan tahun 2020 baru tercapai sebesar 91,52% yang tercukupi dari hasil produksi padi dan palawija dengan target kapasitas produksi padi sebesar 500.000 ton per tahun. Sedangkan untuk mencapai target tersebut masih banyak kendala yang harus diatasi antara lain karena sempitnya kepemilikan lahan, menurunnya kesuburan tanah, ketersediaan air irigasi, serangan OPT, iklim yang tidak menentu dan kurang menguntungkannya budidaya padi dibandingkan dengan budidaya hortikultura.

Produksi tanaman padi Kabupaten Banyumas belum bisa mencapai kapasitas yang ditargetkan dapat dilihat dari pencapaian produksi tahun 2020 371.827,14 ton walaupun naik dibanding produksi tahun 2019 sebesar 368.957,25. Namun angka tahun 2020 masih dibawah tahun 2018 sebesar 409.053,81 ton. Sementara produksi tanaman kedelai terus menurun terlihat di tahun 2020 turun drastis yaitu sebesar 298,51 ton dibandingkan tahun 2019 sebesar 1.262,66ton.

Pemakaian pupuk kimia yang belum terkendali menyebabkan lahan pertanian menjadi rusak dan berkurang kesuburan pada lahan pertanian. Hal ini menjadi salah satu yang menyebabkan produksi dan produktivitas hasil pertanian cenderung menurun.

Sedangkan ketersediaan protein dicukupi dari produksi hasil peternakan yaitu daging, telur dan susu, dimana tingkat ketersediaan protein tahun 2020 baru tercapai sebesar 81,26%.

Permasalahan lain yang perlu diperhatikan adalah bagaimana terus meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas pangan strategis, dengan dukungan kebijakan dan ketersediaan sarana produksi terutama pupuk dan benih unggul serta alat mesin pertanian yang lengkap serta masalah alih fungsi lahan pertanian. Selain itu, pemerintah juga perlu memperhatikan perawatan infrastruktur sebagai faktor yang mendukung akses dan distribusi sarana produksi pertanian serta pemasaran.

6. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan

Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan merupakan isu yang mendapat perhatian cukup serius dalam proses pembangunan, baik di tingkat regional maupun nasional yaitu isu terkait lingkungan hidup dan bencana meliputi penurunan kualitas lingkungan hidup, kerusakan tutupan hutan, hilangnya keanekaragaman hayati, kelangkaan air, dan kelangkaan energi, bahkan isu tingkat global, terutama untuk pencapaian Tujuan SDG's/TPB ke-6 Menjamin Ketersediaan Serta Pengelolaan Air Bersih Dan Sanitasi Yang Berkelanjutan Untuk Semua, dalam hal ini terkait dengan pencapaian Indeks Kualitas Air, kemudian terkait dengan penanganan sampah mendorong pencapaian Tujuan

SDG's/TPB ke-11 Menjadikan Kota dan Permukiman Yang Inklusif, Aman Tangguh dan Berkelanjutan dan tujuan SDG's/TPB ke-12 Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi Yang Berkelanjutan, serta upaya mengurangi permasalahan dampak emisi gas rumah kaca untuk mendorong pencapaian Tujuan ke-13 Mengatasi Langkah Segera Untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya serta Tujuan 14 Pelestarian dan Pemanfaatan Ekosistem Lautan dan Tujuan 15 Pelestarikan dan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan. Apalagi dengan banyaknya kejadian bencana alam yang melanda hampir di seluruh wilayah Indonesia yang disebabkan karena permasalahan sumber daya alam dan lingkungan yang tidak dikelola dengan baik serta akibat dampak perubahan iklim serta ditingkatkan juga dalam peningkatan penanganan bencana dimana Kabupaten Banyumas adalah termasuk daerah rawan bencana.

Belum adanya regulasi terkait sumber mata air di Kabupaten Banyumas menyebabkan pengelolaan sumber daya alam menjadi belum maksimal, salah satunya dalam mengelola kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik 20% dari luas wilayah perkotaan dan 10% RTH Privat di Perkotaan, Radius 200 meter dari mata air harus dilindungi dan perbukitan sebagai daerah konservasi.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Banyumas tahun 2019 adalah 64,62 sedangkan tahun 2020 adalah 74. Nilai IKLH tersebut menggambarkan kualitas lingkungan Kabupaten Banyumas tahun 2020 cukup baik. Jika dilihat dari tiap komponen IKLH, yang terdiri dari Indeks Kualitas Air = 59,33, Indeks Kualitas Udara = 85,07 dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan = 70,04, kualitas air di Kabupaten Banyumas rendah. Hal ini sejalan dengan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis Perubahan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 yang menunjukan daya dukung air di Kabupaten Banyumas telah banyak menurun sehingga diperkirakan wilayah Kabupaten Banyumas akan mengalami defisit air pada tahun 2030 jika tidak melakukan upaya konservasi dan pengendalian pemanfaatan sumber daya air. Sementara dari sisi kualitas sungai-sungai yang melintas di kawasan perkotaan di Kabupaten Banyumas memiliki kandungan minyak dan lemak, colifecal dan coliform melebihi ambang batas, yang diduga kontribusi pencemarannya dari buangan sampah dan masukan limbah rumah tangga serta kotoran makhluk hidup baik manusia maupun hewan. Sungai Serayu yang melintas di wilayah Kabupaten Banyumas terdapat indikasi pencemaran dari kegiatan pertanian terutama pestisida yang diindikasikan dengan klorin bebas yang melebih ambang batas baku mutu.

Permasalahan lingkungan lain yang masih perlu perhatian adalah pengelolaan sampah. Pelayanan penanganan sampah masih terpusat pada kawasan perkotaan. Untuk itu perlu ditingkatkan peran dan kesadaran mayarakat dalam pengelolaan sampah melalui pengelolaan berbasis masyarakat

7. Tata Kelola Pemerintahan

Isu strategis nasional karakter bangsa yaitu masih rendahnya inovasi, dan kreativitas sejalan dengan isu strategis daerah. Dimana tekanan di berbagai sektor ini termasuk di sektor ekonomi membuat semua pihak untuk berpikir secara kreatif dan inovatif agar dapat lepas

dari keterpurukan. Banyak cara diupayakan secara inovatif agar perekonomian tetap berjalan namun protokol kesehatan juga tetap bisa diterapkan. Hal penting yang perlu direspon saat pandemi adalah inovasi yang dapat membantu Indonesia keluar dari kondisi ketidakpastian. Dalam menciptakan kondisi ekosistem yang kondusif agar inovasi dapat berjalan dengan baik diperlukan peran pemerintah. Pemerintah, lanjutnya, berperan dalam menciptakan regulasi yang dapat mendukung perkembangan inovasi.

Inovasi dilaksanakan di berbagai sektor, inovasi ini salah satunya untuk menjembatani bagaimana sektor kehidupan tetap berjalan tetapi aman terhadap resiko penyebaran virus corona. Prinsip yang utama untuk dijadikan dasar inovasi adalah "contactless" atau tidak adanya kontak langsung. Segala macam bisnis dijalankan dengan tanpa kontak atau minimal mengurangi adanya kontak sebagai contoh dengan e-comerse. Data Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), pertumbuhan e-commerce di Indonesia meningkat tajam, 91 persen selama pandemi. Sementara, penetrasi pengguna internet juga melonjak 73,7 persen.

Pemerintah Kabupaten Banyumas masih perlu banyak melaksanakan inovasi dalam hal pelayanan publik untuk mendukung Misi ke 1 Bupati Banyumas yaitu Mewujudkan Banyumas sebagai Barometer Pelayanan Publik. Beberapa contoh Inovasi dalam Pelayanan masyarakat yang telah diaplikasikan antara lain pelayanan di Puskesmas terkait dengan pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak untuk mengurangi kematian ibu dan anak, upaya pelayanan Sosial oleh Dinas Kesehatan yang Cepat, Tanggap dan Tuntas dalam pendampingan Warga Miskin Penderita Sakit Kronis, pelayanan dan fasilitasi terhadap Penyandang Disabilitas yang dilaksanakan oleh Dinsospermasdes, pelayanan Pendidikan dengan berbagai inovasi yang diterapkan di sekolah SD dan SMP, serta upaya pelayanan perijinan satu atap melalui Mal Pelayanan Publik ditambah dengan pelayanan Perizinan dengan Perjanjian dan Pengiriman melalui Kantor Pos serta dan kendaraan keliling yang dilaksanakan oleh DPMPTSP dan tentunya masih diperlukan inovasi pelayanan publik lainnya yang dilaksanakan oleh perangkat daerah dalam upayanya mendukung tata kelola pemerintahan yang baik terutama dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat, upaya pemerintah juga adalah dengan memberikan keamanan dan ketertiban di masyarakat, meningkatkan kapasitas ASN, dan menjaga kerukunan beragama, berbangsa dan bernegara. Hal ini sesuai dengan isu strategis nasional terkait Politik, Hukum, Pertahanan Dan Keamanan.

Terkait dengan isu tata kelola pemerintahan telah menjadi bahasan dalam SDG's / TPB khususnya pada tujuan ke-16 yaitu meningkatkan perdamaian termasuk masyarakat untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses untuk keadilan bagi semua orang termasuk lembaga dan bertanggung jawab untuk seluruh kalangan serta Tujuan 17 Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global.

Pewujudan tata kelola pemerintahan yang baik dengan sasaran meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, Meningkatnya birokrasi yang kapabel, Meningkatnya pelayanan publik yang prima antara lain Pelayanan Pemerintah daerah dalam memberikan akses

informasi publik dan pelayanan aduan masyarakat menjadi indikator dalam pencapaiannya.

Peningkatan birokrasi yang bersih dan akuntabel Pemerintah Kabupaten Banyumas melalui Nilai AKIP Kabupaten Banyumas pada tahun 2020 adalah 74.96 atau BB sementara Indek Reformasi Birokrasi tahun 2020 adalah 69,07 atau B. Beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik adalah perlu adanya road map Reformasi Birokrasi, Peningkatan profesionalisme aparatur, pengembangan kompetensi SDM aparatur; keterbukaan dan transparansi informasi; pelayanan publik yang mudah, cepat dan murah berbasis inovasi dan IT serta komitmen bersama mulai dari level pimpinan tertinggi sampai dengan staf yang paling rendah serta partisipasi seluruh elemen masyarakat dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan,

Selain itu juga diperlukan kapasitas fiskal yang besar terutama untuk pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan penyediaan infrastruktur daerah untuk menunjang pertumbuhan ekonomi dan sosial budaya.

Salah satu isu strategis tata kelola pemerintahan lain yang perlu mendapat perhatian adalah berkaitan dengan pemekaran wilayah sebagaimana diamanatkan dalam RPJP Kabupaten Banyumas tahun 2005-2025. Pemekaran wilayah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ditujukan untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, meningkatkan daya saing Daerah, serta memelihara keunikan adat istiadat, tradisi, dan budaya Daerah, peningkatan peran dan daya saing pemuda serta peningkatan Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat antara lain terkait kepatuhan masyarakat akan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Hal ini sesuai dengan isu strategis Nasional

Berkenaan dengan hal tersebut, sesuai arah kebijakan pembangunan pada RPJP Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025 khususnya periode RPJMD ketiga yang mengamanatkan untuk dilakukan pengusulan pembentukan Kota Purwokerto, Pemerintah Kabupaten Banyumas akan melakukan beberapa upaya agar dapat memenuhi persyaratan baik secara admninitrasi maupun secara teknis untuk pengusulan pembentukan Kota Purwokerto.

Keterkaitan dan keselarasan isu strategis daerah dengan isu strategis Provinsi, Nasional maupun dengan isu strategis dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau SDG's dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 4.4.
Keterkaitan Isu-Isu Pembangunan Global, Nasional, dan Daerah

Isu Global (SDG's)	Isu Nasional/ Agenda Nasional (Rpjmn)	Isu Strategis RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2018-2023	Isu Strategis RPJPD 2005-2025	Isu Strategis KLHS RPJMD 2018-2023	Isu Strategis TPB/SDG'S dalam KLHS Perubahan RPJMD 2018-2023	Isu Strategis RPJMD Kabupaten Banyumas 2018-2023
					PILAR EKONOMI	
8. Pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas Dan Berkeadilan	3. Daya saing ekonomi dan peningkatan kesempatan berusaha	2. Ekonomi	8.Pengangguran	Pertumbuhan ekonomi dan daya saing ekonomi	3. Pengembangan Potensi Daerah untuk meningkatkan Pendapatan Masyarakat
. Kesenjangan	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	6. Kesenjangan wilayah				
2. Pangan dan Gizi		5.Kedaulatan pangan dan energi		6. Ketahanan pangan		5. Pertanian mendukung Kedaulatan Pangan
					PILAR SOSIAL	
1.Kemiskinan		1.Penanggulangan Kemiskinan		1. Kemiskinan	Penanggulangan warga pra-sejahtera dan perlindungan sosial	4.Kemiskinan dan Pengangguran
	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas Dan Berdaya Saing	2.Peningkatan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia		5. Kualitas SDM		1.Kualitas Sumberdaya Manusia
3.Kesehatan				4. Kesehatan	Kualitas derajat kesehatan masyarakat	
4.Pendidikan				3. Pendidikan	Kualitas dan daya saing sumber daya manusia melalui pendidikan	
5.Gender				7.Kesetaraan gender dan jaminan sosial	Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan	

Isu Global (SDG's)	Isu Nasional/ Agenda Nasional (Rpjmn)	Isu Strategis RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2018-2023	Isu Strategis RPJPD 2005-2025	Isu Strategis KLHS RPJMD 2018-2023	Isu Strategis TPB/SDG'S dalam KLHS Perubahan RPJMD 2018-2023	Isu Strategis RPJMD Kabupaten Banyumas 2018-2023
					PILAR LINGKUNGAN	
9. Infrastruktur 11.Kota dan Permukiman 6. Air bersih dan sanitasi	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		3.Sarana dan prasarana 6.Pertanahan dan penataan ruang	2.Akses terhadap infrastruktur permukiman (air minum dan sanitasi), perumahan, dan energi	Peningkatan kualitas sumber daya air dan sanitasi	2.Ketersediaan Infrastruktur
12.Produksi dan konsumsi berkelanjutan 14.Sumberdaya kelautan 15.Ekosistem daratan 7. Energi 13.Perubahan iklim	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, Dan Perubahan Iklim	4. Beberlanjutan Pembangunan Dengan Memperhatikan Daya Dukung Lingkungan dan Kelestarian Sumber Daya Alam	7.Sumber daya air dan lingkungan hidup	14.Penurunan daya dukung lingkungan 13.Penurunan lahan pertanian mengancam produksi pangan pokok dan daya dukung pangan 12.Resiko bencana dan keretanan terhadap perubahan iklim	Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan Penurunan risiko bencana serta peningkatan adaptasi perubahan iklim	6.Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan

Isu Global (SDG's)	Isu Nasional/ Agenda Nasional (Rpjmn)	Isu Strategis RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2018-2023	Isu Strategis RPJPD 2005-2025	Isu Strategis KLHS RPJMD 2018-2023	Isu Strategis TPB/SDG'S dalam KLHS Perubahan RPJMD 2018-2023	Isu Strategis RPJMD Kabupaten Banyumas 2018-2023
					PILAR HUKUM & TATA KELOLA	
16. Masyarakat inklusif dan damai, akses keadilan, dan membangun kelembagaan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Revolusi Mental Dan Pembangunan Kebudayaan		5. Ketertiban dan keamanan 1. Sosial budaya dan kehidupan beragama		Keamanan dan ketertiban masyarakat	
17.Kemitraan global		7. Tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah	4. Tata pemerintahan, politik dan hukum 8.Ilmu pengetahuan dan teknologi	10.Tata kelola pemerintahan 11.Rendahnya persentase PAD terhadap pendapatan 9.Akses penduduk terhadap teknologi dan informasi	Tata kelola pemerintah untuk peningkatan pelayanan masyarakat	7. Tata Kelola Pemerintahan

BAB V
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1. Visi

Visi RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023 dirumuskan berdasarkan Visi Bupati dan Wakil Bupati Banyumas yang telah disampaikan pada saat kampanye Pilkada tahun 2018, yaitu

"Menjadikan Banyumas yang Maju, Adil-Makmur dan Mandiri"

Visi tersebut mengandung tiga frase, yaitu sebagai berikut:

1. Maju

Secara harfiah, maju berarti berjalan (bergerak) ke muka atau menjadi lebih baik, atau berkembang. Maju dimaknai sebagai sebuah harapan kondisi Kabupaten Banyumas yang tumbuh dan berkembang dengan pesat, dengan keunggulan tertentu yang membedakan dengan daerah lainnya. Kemajuan akan ditandai dengan perkembangan kehidupan masyarakat dalam berbagai aspek, baik ekonomi, sosial, pemerintahan maupun infrastruktur menuju ke arah yang lebih baik. Perkembangan daerah tersebut akan menjadikan wilayah Kabupaten Banyumas ideal untuk ditinggali dan mampu menjadikan masyarakat bahagia. Masyarakat Banyumas yang maju adalah sumber daya manusia yang berkualitas, menguasai teknologi, dan memanfaatkan teknologi untuk kehidupan yang lebih baik. Daerah yang maju adalah yang mampu mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki dengan tetap memperhatian keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan, karena kemajuan yang dicapai tidak disertai dengan kemunduran atau penurunan kualitas lingkungan.

2. Adil-Makmur

Adil secara harfiah berarti sama atau tidak memihak, sedangkan makmur berarti banyak hasil atau serba kecukupan (tidak kekurangan). Adil-makmur dimaknai sebagai sebuah upaya agar seluruh masyarakat Kabupaten Banyumas mampu mengakses seluruh kebutuhan dasarnya, serta memiliki lebih banyak pilihan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemakmuran antara lain ditandai dengan berkurangnya penduduk miskin dan meningkatnya pemerataan pendapatan. Kemakmuran yang adil berarti kemakmuran berkelanjutan yang dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya masyarakat Kabupaten Banyumas saat ini tetapi juga generasi yang akan datang.

3. Mandiri

Secara harfiah mandiri berarti keadaan dapat berdiri sendiri atau tidak bergantung pada orang lain. Mandiri dimaknai sebagai sebuah harapan agar daerah dan masyarakat mampu mengembangkan potensi dan kekuatan yang dimiliki untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi, dan mengurangi ketergantungan dengan daerah lain. Kemandirian didorong dengan mengembangkan pertanian

sehingga Kabupaten Banyumas mampu menjadi Pelopor Kedaulatan Pangan di Jawa Tengah, serta mengembangkan potensi lokal untuk pengembangan industri, pariwisata, dan ekonomi kreatif, sehingga mampu menciptakan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat.

5.2. Misi

Visi RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023 dijabarkan kedalam delapan Misi yang pelaksanaannya dituangkan dalam program Hasta Krida, yaitu:

1. **Mewujudkan Banyumas sebagai Barometer Pelayanan Publik**

   Misi ini dilaksanakan melalui Hasta Krida pertama yaitu Banyumas sebagai Barometer Pelayanan Publik Jawa Tengah dengan pengembangan lapak publik untuk mendukung Mall pelayanan publik, peningkatan kualitas pelayanan publik yang cepat dan profesional, dan lebih mendekatkan layanan kepada pengguna layanan, didukung dengan inovasi dan teknologi informasi, sehingga mampu memberikan kepuasan masyarakat yang tinggi. Selain itu melalui misi ini dilaksanakan reformasi birokrasi dapat berjalan efektif, sehingga adanya keterbukaan informasi publik, transparansi dan akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah, dan didukung dengan aparatur sipil negara yang kompeten dan profesional.

2. **Meningkatkan kualitas hidup warga terutama pemenuhan dan layanan dasar pendidikan dan kesehatan**

   Misi ini mengarah pada peningkatan pemerataan akses dan mutu pelayanan pendidikan dan kesehatan sehingga menjadikan tercipta masyarakat Banyumas yang berkualitas, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan, serta pembangunan kepemudaan sehingga pembangunan dapat dirasakan adil bagi seluruh lapisan masyarakat. Salah satu pelaksanaanya melalui Hasta Krida kedua yaitu mewujudkan 92 paket beasiswa, 1 desa 3 sarjana, program wajib belajar, serta peningkatan jangkauan pelayanan kesehatan.

3. **Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan**

   Misi ini mengarah pada meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, tidak hanya sekedar tumbuh, tetapi memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran. Untuk mendukung Misi ini dilaksanakan melalui Hasta Krida ketiga yaitu pengembangan agribisnis unggulan untuk mewujudkan peningkatan ekspor gula kelapa 30.000 ton, dan penerapan *safety belt* penderes, durian.

4. **Mewujudkan Banyumas sebagai Kabupaten Pelopor Kedaulatan Pangan**

   Misi ini mengarah pada perwujudan Kabupaten Banyumas sebagai penopang ketersediaan pangan di Provinsi Jawa Tengah dengan

menghasilkan padi sebagai sumber pangan utama, melalui Hasta Krida keempat yaitu Banyumas sebagai pelopor kedaulatan pangan untuk mewujudkan produksi padi 500.000 ton/tahun.

5. **Menciptakan iklim investasi yang berorientasi perluasan kesempatan kerja yang berbasis potensi lokal dan ramah lingkungan**

   Misi ini mengarah pada peningkatan iklim investasi dan dunia usaha sehingga mampu mendorong peningkatan investasi dan penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Banyumas, didukung dengan pembangunan kawasan industri dan pengembangan kawasan strategis. Selain itu peningkatan investasi juga diikuti dengan pengendalian pemanfaatan ruang agar sesuai dengan rencana tata ruang dan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup, sehingga daya dukung dan daya tampung lingkungan dapat dipertahankan untuk menunjang kehidupan masyarakat. Misi ini dilaksanakan dengan Hasta Krida kelima yaitu memperluas minimal 20.000 kesempatan kerja untuk mewujudkan pengembangan desa wisata, menciptakan 3.000 *enterpreneur* muda, investasi berbasis padat karya, dan membangun kawasan industri.

6. **Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar yang merata dan memadai sebagai daya ungkit pembangunan**

   Misi ini mengarah pada peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur, baik infrastruktur dasar maupun infrastruktur penunjang terutama jalan, drainase, irigasi, sanitasi, air bersih, perhubungan, maupun penataan kawasan permukiman. Salah satu pelaksanaan Misi ini adalah dengan Hasta Krida keenam yaitu pembangunan infrastruktur merata dan memadai untuk mewujudkan peningkatan anggaran irigasi, peningkatan jalan hotmix 570 km, dan membangun pasar desa.

7. **Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan industri kerakyatan, pariwisata, dan industri kreatif berbasis sumber daya lokal**

   Misi ini mengarah pada pengembangan kawasan wisata dan ekonomi kreatif, serta pengembangan industri kecil menengah dan Usaha mikro kecil dan menengah berbasis sumberdaya lokal agar mampu meningkatkan kunjungan wisatawan di Kabupaten Banyumas dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Misi ini dilaksanakan dengan Hasta Krida ketujuh yaitu menggerakkan industri kerakyatan, pariwisata perdesaan, industri kreatif untuk mewujudkan pengembangan desa wisata, dan pengembangan UMKM.

8. **Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya serta berkepribadian dengan menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan religius.**

   Misi ini mengarah pada aktualisasi nilai-nilai budaya, agama dan kebangsaan dalam kehidupan masyarakat, serta peningkatan peran dan daya saing pemuda, sehingga masyarakat memiliki kepribadian yang baik, dan hidup dalam suasana yang rukun dan damai dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Misi ini didukung dengan pelaksanaan Hasta Krida kedelapan yaitu gerakan

memakmurkan pesantren dan masjid dengan mewujudkan bantuan untuk Marbot masjid, KBS untuk santri pesantren, serta KBS, KBP dan tunjangan makan untuk yatim piatu.

5.3. Tujuan dan Sasaran

Dalam rangka mengarahkan pencapaian visi Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023, maka berdasarkan misi yang telah ditetapkan dijabarkan lebih lanjut kedalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah disertai dengan indikator kinerjanya. Penyesuaian Indikator dan Target Indikator Kinerja Utama Daerah dalam RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023 dapat dijelaskan dalam Tabel 5.1.

Selanjutnya penjabaran tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Banyumas tahun 2021-2023 diuraikan dalam Tabel 5.2.

Tabel 5.1.
Penyesuaian Indikator dan Target Indikator Kinerja Utama Daerah dalam RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023

No.	Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah	Satuan	Kinerja Tahun 2019		Kinerja Tahun 2020		Target Akhir RPJMD	Capaian RPJM		Target Kinerja						Penyesuai-an Target Akhir RPJMD	Keterangan
			Target	Reali-sasi	Target	Reali-sasi		Tahun 2020 (%)	Target akhir RPJMD (%)	2021	Penyesuai-an target 2021	2022	Penyesua ian target 2022	2023	Penyesuai-an target 2023		
1	Indek Reformasi Birokrasi		66,00	68,76	68,00	69,07	75,00	90,79	83,72	70,00		73,00		75,00			tetap
2	PDRB per kapita	juta rupiah	31,115	31,870	33,000	30,210	38,655	96,58	82,45	34,885	**32,332**	36,770	**33,725**	38,655	**35,513**	**35,513**	Penyesuaian target
3	Indeks Ketahanan Pangan		74,00	73,99	74,01	79,27	74,04	107,11	107,06	74,02		74,03		74,04			Tetap
4	Persentase Pertumbuhan Nilai investasi Daerah	%	2	21,74	2	41,54	2	2.077	415,4	2		2		2			Tetap
5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)		63,79	64,62	63.88	70,04	64,15	109,64	109,18	63,97		64,06		64,15			Tetap
6	Pertumbuhan Ekonomi / Persentase Pertumbuhan PDRB	%	6,4	6,32	6,45	-1,65	6,65	-25,58	-24,81	6,5	**4,1**	6,6	**4,5**	6,65	**5**	**5**	Penyesuaian target
7	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		71,95	71,96	72,55	71,98	74,35	99,21	96,81	73,15	**72,18**	73,75	**72,38**	74,35	**72,58**	**72,58**	Penyesuaian target
8	Persentase penduduk miskin	%	12,51	12,53	11,53	13,26	8,56	85	45,09	10,54	**12,51**	9,55	**11,76**	8,56	**11,00**	**11,00**	Penyesuaian target
9	Angka Kriminalitas	Per 10.000 pnddk	731 (kasus)	894 (kasus)	792	620	950	121,72	134,74	823	**1,656**	891	**1,586**	950	**1,516**	**1,516**	Penyesuaian formulasi dan target
10	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	4,36	4,21	4,23	6	3,76	58,16	40,43	4,06	**5,75**	3,93	**5**	3,76	**4,5**	**4,5**	Penyesuaian target

No.	Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah	Satuan	Kinerja Tahun 2019		Kinerja Tahun 2020		Target Akhir RPJMD	Capaian RPJM		Target Kinerja						Penyesuai-an Target Akhir RPJMD	Keterangan
			Target	Reali-sasi	Target	Reali-sasi		Tahun 2020 (%)	Target akhir RPJMD (%)	2021	Penyesuai-an target 2021	2022	Penyesua ian target 2022	2023	Penyesuai-an target 2023		
11	Indeks Daya Saing Infrastruktur	%	80,01	65,48	80,01	78,00	82,56	97,49	94,48	82,25	-	82,41	-	82,56	-	-	Penyesuaian indikator, formulasi dan target
	Persentase Kinerja Infrastruktur	**%**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**53,31**	**-**	**69,33**	**-**	**78,87**	**78,87**	**pengganti**
12	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisata (Wisman dan Wisnus)	%	2	51,53	5,86	-61,85	6,35	-1.055,46	-127,58	5,48	-	5,48	-	6,35	-	-	Penyesuaian indikator, formulasi dan target
	Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PAD	**%**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4**	**-**	**5**	**-**	**7**	**7**	**pengganti**
13	Indeks Gini		0,308	0,310	0,307	NA	0,304	NA	NA	0,306		0,305		0,304			Tidak tersedia data
14	Indeks ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional)		0,3416	0,560	0,3376	NA	0,3256	NA	NA	0,3336		0,3296		0,3256			
15	Nilai Tukar Petani (NTP)		100,83	104,05	101.33	NA	102,86	NA	NA	101,84		102,35		102,86			
16	Indeks Demokrasi		77,83	72,00	79,30	72	86	NA	NA	80,31		84,54		86			
17	Persentase penurunan konflik sosial	%	5	0,7	5	0,19	25	3,8	0,76	5		5		5			Menjadi indikator sasaran daerah / indikator OPD
18	Persentase Pertumbuhan Industri Kreatif	%	-	-	5	5,65	15	113	37,67	5		10		15			
19	Persentase Pelestarian Budaya Banyumas	%	32,87	32,87	47,47	72,72	100	153,19	72,72	68,68		85,29		100			

Tabel 5.2.
Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Banyumas
Tahun 2021-2023 Dalam RPJMD Perubahan Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023

No.	Misi	No.	Tujuan	No.	Indikator Tujuan	No.	Sasaran	No.	Indikator Sasaran	Satuan	2021	2022	2023	Kondisi Akhir
1	Mewujudkan Banyumas sebagai barometer pelayanan publik	1	Pewujudan tata kelola pemerintahan yang baik	1	Indek Reformasi Birokrasi	-		-	-		70,00	73,00	75,00	75,00
						1	Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	1	Opini BPK status WTP terhadap laporan keuangan daerah	%	100	100	100	100
								2	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)		76,00	78,00	80,00	80,00
								3	Nilai Survey Eksternal Persepsi Korupsi		3,86	3,87	3,88	3,88
								4	Nilai Maturitas SPIP	level	2	2	3	3
						2	Meningkatnya birokrasi yang kapabel	5	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)		3,10	3,20	3,30	3,30
								6	Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP)		95	96	97	97
						3	Meningkatnya pelayanan publik yang prima	7	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP)	.	81	82	83	83
2	Meningkatkan kualitas hidup warga terutama pemenuhan dan layanan dasar pendidikan dan kesehatan	2	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia terutama derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat	2	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	-		-	-		72,18	72,38	72,58	72,58
						4	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	8	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7,53	7,54	7,55	7,55
								9	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,87	12,89	12,91	12,91
						5	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	10	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	73,73	73,83	73,93	73,93
						6	Meningkatnya pengendalian pertumbuhan penduduk	11	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	%	0,84	0,83	0,82	0,82

No.	Misi	No.	Tujuan	No.	Indikator Tujuan	No.	Sasaran	No.	Indikator Sasaran	Satuan	2021	2022	2023	Kondisi Akhir
						7	Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak	12	Indeks Pembangunan Gender (IPG)		87,65	87,66	87,67	87,67
								13	Nilai Kabupaten Layak Anak		600	625	650	650
		3	Meningkatkan pembangunan yang berkeadilan	3	Persentase penduduk miskin	-		-	-	%	12,51	11,76	11,00	11,00
						8	Meningkatnya perlindungan, pemenuhan kebutuhan dasar dan pemberdayaan masyarakat miskin	14	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	100	100	100	100
								15	Persentase Lingkungan Permukiman yang layak huni	%	86,17	87,17	88,17	88,17
								16	Persentase penanganan korban bencana	%	100	100	100	100
3	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan	4	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan meningkatkan peran sektor pertanian dan non pertanian	4	Pertumbuhan Ekonomi	-		-	-	%	4,1	4,5	5,0	5,0
						9	Meningkatnya pertumbuhan industri pengolahan dan perdagangan	17	Persentase Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor	%	4,49	4,51	4,52	4,52
								18	Persentase Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	%	5,83	5,85	5,86	5,86

No.	Misi	No.	Tujuan	No.	Indikator Tujuan	No.	Sasaran	No.	Indikator Sasaran	Satuan	2021	2022	2023	Kondisi Akhir
						10	Meningkatnya produksi pertanian melalui pengembangan komoditas unggulan, inovasi produk dan perlindungan kepada petani	19	Persentase Pertumbuhan PDRB sektor pertanian Kehutanan dan Perikanan	%	2,26	3,11	3,91	3,91
				5	PDRB per Kapita	-		-	-	juta rupiah	32,332	33,725	35,513	35,513
4	Mewujudkan Banyumas sebagai Kabupaten Pelopor Kedaulatan Pangan	5	Meningkatkan ketahanan pangan melalui sektor agribisnis	6	Indeks Ketahanan Pangan	-		-	-		74,02	74,03	74,04	74,04
						11	Meningkatnya inovasi produk dan tata kelola hasil tanaman pangan dan agrobisnis untuk ketersediaan pangan utama	20	Persentase Ketersediaan Pangan Utama	%	96	96	97	97
5	Menciptakan iklim investasi yang berorientasi perluasan kesempatan kerja yang berbasis potensi lokal dan ramah lingkungan	6	Perwujudan kawasan peruntukan industri dan kawasan strategis yang berwawasan lingkungan untuk perluasan kesempatan kerja	7	Persentase Pertumbuhan Nilai investasi Daerah	-		-	-	%	2	2	2	10
						12	Meningkatnya investasi daerah	21	Nilai investasi daerah	Milyar Rupiah	500	545	600	600
				8	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	-		-	-	%	5,75	5,00	4,50	4,50
						13	Meningkatnya kesempatan berusaha	22	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	66,66	66,67	66,68	66,68
				9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	-		-	-		63,97	64,06	64,15	64,15
						14	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dengan mengurangi dampak kerusakan lingkungan hidup	23	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)		63,97	64,06	64,15	64,15
								24	Persentase Kinerja Pengelolaan Sampah	%	24	26	27	27

No.	Misi	No.	Tujuan	No.	Indikator Tujuan	No.	Sasaran	No.	Indikator Sasaran	Satuan	2021	2022	2023	Kondisi Akhir
						15	Meningkatnya kualitas perencanaan, pemanfaatan, pengendalian tata ruang serta pengembangan kawasan strategis yang berwawasan lingkungan	25	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang	%	99,983	99,984	99,985	99,985
						16	Meningkatnya penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim	26	Indeks Resiko Bencana		185	180	175	175
6	Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar yang merata dan memadai sebagai daya ungkit pembangunan	7	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat	10	Persentase Kinerja Infrastruktur	-		-	-	%	53,31	69,33	78,87	78,87
						17	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang merata dan memadai	27	Persentase Kinerja Infrastruktur Perhubungan	%	33,335	63,075	78,570	78,570
								28	Persentase Kinerja Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	%	73,29	75,59	79,16	79,16
7	Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan industri kerakyatan, Pariwisata, dan Industri Kreatif berbasis sumber daya lokal	8	Menumbuhkan dan mengembangkan Daya Tarik pariwisata dan ekonomi kreatif	11	Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PAD	-		-	-	%	4	5	7	7
						18	Meningkatnya Industri Pariwisata dan ekonomi kreatif yang terintegrasi berbasis potensi sumber daya lokal	29	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisata	%	5,48	5,48	6,35	6,35
								30	Persentase Peningkatan Pelaku Ekonomi Kreatif	%	5	10	15	15

No.	Misi	No.	Tujuan	No.	Indikator Tujuan	No.	Sasaran	No.	Indikator Sasaran	Satuan	2021	2022	2023	Kondisi Akhir
						19	Meningkatnya pertumbuhan pelaku ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro	31	Persentase Koperasi Sehat	%	28,88	30	31,11	31,11
								32	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro	%	0,244	0,249	0,254	0,254
8	Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya serta berkepribadian dengan menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan religius	9	Meningkatkan aktualisasi nilai-nilai budaya, agama dan kebangsaan dalam kehidupan masyarakat	12	Angka Kriminalitas	-		-	-	per 10,000 penduduk	1,656	1,586	1,516	1,516
						20	Meningkatnya kerukunan dan peran masyarakat dalam kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara serta menciptakan kehidupan masyarakat yang aman dan tentram	33	Persentase kriminalitas yang tertangani	%	50	50	50	50
						21	Meningkatnya kelestarian kebudayaan daerah	34	Persentase Pelestarian Budaya Banyumas	%	68,68	85,29	100	100
						22	Meningkatnya peran dan daya saing pemuda	35	Persentase peningkatan prestasi pemuda dan olahraga	%	2,59	2,94	3,27	3,27

Tabel 5.3.
Penyelarasan Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Banyumas Tahun 2021-2023 Dalam RPJMD Perubahan Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 terhadap Target SDG's / Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

Misi / Indikator Tujuan/Indikator Sasaran Kabupaten	Sumber Data	Satuan	Target			Keterangan Indikator	Goals SDGs/ Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi
			2021	2022	2023				
1. Mewujudkan Banyumas sebagai barometer pelayanan publik							Target 16.6. Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat		
Opini BPK status WTP terhadap laporan keuangan daerah	BKAD	%	100	100	100	Indikator Sasaran Bupati	16.6.1 (a)	Prosentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan keuangan daerah dengan opini WTP
Hasil evaluasi SAKIP pada komponen Nilai Pelaporan Kinerja	Setda	Indek	7,15	7,15	7,15	Indikator Sasaran Bupati	16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota)	Nilai SAKIP
2. Meningkatkan kualitas hidup warga terutama pemenuhan dan layanan dasar pendidikan dan kesehatan							Target 1.2. Pada Tahun 2030 mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi		
Persentase penduduk miskin	BPS	%	12,51	11,76	11,00	Indikator Tujuan Bupati	1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Tingkat Kemiskinan
2. Meningkatkan kualitas hidup warga terutama pemenuhan dan layanan dasar pendidikan dan kesehatan							Target 5.1. Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan anak perempuan dimanapun		
*I*ndeks Pembangunan Gender (IPG)	BPS	%	87,65	87,66	87,67	Indikator Sasaran Bupati	5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	Rasio kabupaten/kota yang menerapkan kebijakan responisf gender dalam RPJMD, Rencana Strategis SKPD

Misi / Indikator Tujuan/Indikator Sasaran Kabupaten	Sumber Data	Satuan	Target			Keterangan Indikator	Goals SDGs/ Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi
			2021	2022	2023				
2. Meningkatkan kualitas hidup warga terutama pemenuhan dan layanan dasar pendidikan dan kesehatan							Target 10.1. Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada dibawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional		
Persentase penduduk miskin	BPS	%	12,51	11,76	11,00	Indikator Tujuan Bupati	10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan							Target 17.1. Penguatan mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional untuk negara-negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya		
PDRB per kapita	BPS	juta rupiah	32,332	33,725	35.,13	Indikator Tujuan Bupati	17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadapPDB menurut sumbernya	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDM menurut sumbernya
Persentase Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan besar dan eceran reparasi mobil dan sepeda motor	BPS	%	4,49	4,51	4,52	Indikator Sasaran Bupati	17.1.1 (a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan							Target 8.1. Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara-negara kurang berkembang		
Pertumbuhan Ekonomi / Persentase Pertumbuhan PDRB	BPS	%	4,1	4,5	5,0	Indikator Tujuan Bupati	8.1.1*	Laju pertumbuhan PDRB perkapita	Laju pertumbuhan PDRB
PDRB per kapita	BPS	juta rupiah	32,332	33,725	35,513	Indikator Tujuan Bupati	8.1.1. (a)	PDRB per kapita	PDRB per kapita

Misi / Indikator Tujuan/Indikator Sasaran Kabupaten	Sumber Data	Satuan	Target			Keterangan Indikator	Goals SDGs/ Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi
			2021	2022	2023				
4. Mewujudkan Banyumas sebagai Kabupaten Pelopor Kedaulatan Pangan							Target 2.1. Pada tahun 2030, mengakhiri kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan rentan, termasuk bayi, untuk memperoleh makanan yang aman, bergizi dan cukup sepanjang tahun		
Persentase Ketersediaan Pangan Utama	Dinpertan KP	%	96	96	97	Indikator Sasaran Bupati	2.1.1*	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishmen)	Ketersediaan pangan utama beras (ton)
5. Menciptakan iklim investasi yang berorientasi perluasan kesempatan kerja yang berbasis potensi lokal dan ramah lingkungan							Target 8.3. Mempromosikan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja yang layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah, termasuk melalui akses pada layanan keuangan		
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Dinaker Kop UKM	%	66,66	66,67	66,68	Indikator Sasaran Bupati	8.3.1. (a)	Presentase Tenaga kerja formal.	Presentase Tenaga kerja formal
Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro	Dinaker kop UKM	%	0,244	0,249	0,254	Indikator Sasaran Bupati	8.3.1.(c)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.	
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	BPS	%	6,00	5,00	4,50	Indikator Tujuan Bupati	8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur

BAB VI
STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

6.1. Strategi

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Rumusan strategi pembangunan jangka menengah Kabupaten Banyumas dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 6.1
Rumusan Strategi dan Keterkaitannya dengan Tujuan dan Sasaran
Jangka Menengah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2021

RPJMD 2018-2023					Perubahan RPJM 2018-2023				
Misi / Tujuan		**Sasaran**		**Strategi**	**Misi / Tujuan**		**Sasaran**		**Strategi**
Misi 1. Mewujudkan Banyumas sebagai barometer pelayanan publik dengan membangun sistem integritas birokrasi yang profesional, bersih, partisipatif, inovatif dan bermartabat					**Misi 1. Mewujudkan Banyumas sebagai barometer pelayanan publik dengan membangun sistem integritas birokrasi yang profesional, bersih, partisipatif, inovatif dan bermartabat**				
1	Pewujudan tata kelola pemerintahan yang baik	1	Meningkatnya kualitas SDM Aparatur Sipil Negara	• Meningkatkan kapasitas dan kompetensi ASN melalui berbagai diklat dan pelatihan. • Melakukan penataan ASN sesuai dengan kompet ensi.	1	Pewujudan tata kelola pemerintahan yang baik	1	Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	• Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan dengan melaksanakan pengendalian dan evaluasi serta koordinasi dan sinkronisasi perencanaan daerah
									• Optimalisasi pencapaian reformasi birokrasi dalam Manajemen Perubahan, Penataan Peraturan Perundangan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penguatan Tatalaksana, Penguatan Akuntabilitas, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
									• Melakukan penataan ASN sesuai dengan kompetensiMeningkatkan kapasitas ASN dan melakukan penataan ASN sesuai kompetensi

RPJMD 2018-2023					Perubahan RPJM 2018-2023				
Misi / Tujuan		Sasaran		Strategi	Misi / Tujuan		Sasaran		Strategi
									• Meningkatkan kualitas penyelenggaraan kearsipan dengan menyediakan SDM terlatih dan sarana prasarana kearsipan yang memadai agar mendorong pengelolaan arsip secara baku, tertib perizinan penggunaan arsip serta perlindungan dan penyelamatan arsip
									• Meningkatkan pemanfaatan hasil kelitbangan sesuai rencana induk dengan meningkatkan implementasi kajian strategis dan inovasi daerah
									• Meningkatkan pelayanan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD
									• Meningkatkan Pengelolaan PAD
									• Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah (TPB 16)
		2	Meningkatnya Integritas pemerintahan Daerah	• Meningkatkan sistem pengendalian kebijakan daerah, pengawasan, dan pencegahan KKN di lingkungan pemerintah					• Meningkatkan kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dengan mengoptimalkan kapabilitas APIP dan mendorong OPD menerapkan SPIP

RPJMD 2018-2023					Perubahan RPJM 2018-2023				
Misi / Tujuan		Sasaran		Strategi	Misi / Tujuan		Sasaran		Strategi
		3	Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan	• Meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada sub komponen: Manajemen Perubahan, Penataan Peraturan Perundang-undangan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penguatan Tatalaksana, Penguatan Akuntabilitas, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik • Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dengan upaya pemekaran wilayah • Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat dan pelibatan aktif masyarakat dan tenaga ahli dalam proses perencanaan dan penganggaran. • Meningkatkan kualitas, sinergitas dan keterpaduan perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah menggunakan e-planning dan e-budgeting. • Meningkatkan kualitas SDM pengelola kearsipan, dan mendorong seluruh perangkat daerah dalam pengelolaan arsip secara baku dengan menyediakan SDM terlatih dan sarana dan prasarana kearsipan			2	Meningkatnya birokrasi yang kapabel	• Optimalisasi pengelolaan e-Goverment dengan meningkatkan pengelolaan data statistik sektoral, layanan informasi publik serta keamanan data dan sistem informasi (TPB 16)

RPJMD 2018-2023				Perubahan RPJM 2018-2023			
Misi / Tujuan		Sasaran		Strategi	Misi / Tujuan		Sasaran		Strategi
				yang memadai. • Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah dalam hal perencanaan, pertanggungjawaban maupun pelaporan. • Meningkatkan kualitas pelayanan pajak dan retribusi daerah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi.					
		4	Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis elektronik terpadu	• Meningkatkan penerapan standar pelayanan, dan meningkatkan kompetensi petugas dan optimalisasi pemanfaatan teknologi dalam pelayanan perijinan. • Mendekatkan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di kecamatan secara terpadu, dan dengan penerapan standar pelayanan • Mengembangan sistem jaringan komunikasi dan informatika • Meningkatkan kompetensi aparatur dalam pemanfaatan aplikasi government			3	Meningkatnya pelayanan publik yang prima	• Peningkatan kualitas pelayanan perijinan, serta penyebarluasan informasi potensi dan peluang investasi • Meningkatkan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil (TPB 1) • Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan jangkauan pelayanan publik untuk mendukung kesiapan pemekaran wilayah (TPB 16) • Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan lembaga masyarakat serta penataan desa

RPJMD 2018-2023					Perubahan RPJM 2018-2023				
Misi / Tujuan		**Sasaran**		**Strategi**	**Misi / Tujuan**		**Sasaran**		**Strategi**
Misi 2. Meningkatkan kualitas hidup warga terutama pemenuhan kebutuhan dan layanan dasar pendidikan dan kesehatan					**Misi 2. Meningkatkan kualitas hidup warga terutama pemenuhan kebutuhan dan layanan dasar pendidikan dan kesehatan**				
1	Meningkatkan kualitas SDM terutama derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat	1	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	• Mendorong partisipasi seluruh anak usia sekolah untuk bersekolah dengan penyediaan beasiswa bagi siswa kurang mampu dan optimalisasi pemanfaatan Bantuan Operasional Sekolah. • Meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan agar sesuai standar nasional. • Meningkatkan mutu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Dasar dengan mendorong akreditasi sekolah • Meningkatkan kualitas pendidikan dengan melakukan rehabilitasi dan pembangunan sarana pendidikan sesuai kebutuhan, terutama ruang kelas, perpustakaan, laboratorium. • Memberikan bantuan pendidikan untuk penyelesaian program sarjana • Meningkatkan promosi minat baca dan peningkatan layanan perpustakaan dengan pemenuhan standar nasional.	1	Meningkatkan kualitas SDM terutama derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat	1	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	• Meningkatkan akses pendidikan (TPB 4) • Meningkatkan kualitas pendidikan (TPB4) • Meningkatkan promosi minat baca dan peningkatan layanan perpustakaan dengan pemenuhan standar nasional

RPJMD 2018-2023					Perubahan RPJM 2018-2023				
Misi / Tujuan		Sasaran		Strategi	Misi / Tujuan		Sasaran		Strategi
		2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	• Meningkatkan status gizi masyarakat serta upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan penyakit tidak menular • Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan dengan akreditasi Rumah Sakit dan Puskesmas, meningkatkan kompetensi petugas kesehatan, dan penyediaan sarana prasarana yang memadai. • Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam perilaku hidup bersih dan sehat.			2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	• Menurunkan angka kematian dan kesakitan dengan meningkatkan status gizi masyarakat dan perbaikan kualitas faskes (TPB 3) • Meningkatkan Ratio Dokter melalui perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan SDMK yang baik serta mengembangkan mutu dan kompetensi SDMK serta pemberian ijin praktek tenaga kesehatan (TPB 3) • Memenuhi sediaan farmasi dan alat kesehatan serta terawasinya kualitas makanan dan minuman • Meningkatkan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan untuk meningkatkan rasio desa siaga aktif mandiri dan posyandu mandiri
2	Meningkatkan pembangunan yang berkeadilan	1	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	• Meningkatkan pemenuhan hak perempuan dan anak dengan mendorong partisipasi seluruh perangkat daerah dalam pelaksanaan anggaran responsif gender dan anak. • Meningkatkan upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sesuai dengan standar			4	Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak	• Meningkatkan pembangunan, pemberdayaan, perlindungan perempuan serta kualitas keluarga (TPB 5) • Meningkatkan perlindungan dan pemenuhan hak anak (TPB 5)

RPJMD 2018-2023					Perubahan RPJM 2018-2023				
Misi / Tujuan		Sasaran		Strategi	Misi / Tujuan		Sasaran		Strategi
		4	Meningkatnya Pengendalian Pertumbuhan Penduduk	• Mengoptimalkan kualitas pelayanan dan peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam program Keluarga Berencana.			3	Meningkatnya pengendalian pertumbuhan penduduk	• Mengoptimalkan kualitas pelayanan dan peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam program Keluarga Berencana (TPB 3)
		2	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat miskin melalui pemberdayaan masyarakat dan desa	• Meningkatkan perlindungan bagi penduduk miskin, dan mendorong penumbuhan usaha ekonomi produktif penduduk miskin. • Meningkatkan pengembangan kewirausahaan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial, dan pemberian jaminan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial non produktif	2	Meningkatkan pembangunan yang berkeadilan	1	Meningkatnya perlindungan, pemenuhan kebutuhan dasar dan pemberdayaan masyarakat miskin	• Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman layak huni dengan Pencegahan timbulnya perumahan dan kawasan permukiman kumuh dan rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi keluarga kurang mampu (TPB 11) • Pemenuhan kebutuhan dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) melalui perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan serta rehabilitasi sosial (TPB 1)
		3	Meningkatnya penanganan bencana	• Meningkatkan ketersediaan logistik dan kerjasama dengan berbagai pihak dalam pencegahan, penanganan bencana, dan pemulihan pasca bencana.					• Meningkatkan penanganan korban bencana dengan penyediaan logistik dan kerjasama dengan berbagai pihak dalam pencegahan, penanganan bencana, dan pemulihan pasca bencana (TPB 11)

RPJMD 2018-2023					Perubahan RPJM 2018-2023				
Misi / Tujuan		Sasaran		Strategi	Misi / Tujuan		Sasaran		Strategi
Misi 3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan					**Misi 3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan**				
1	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan meningkatkan peran sektor pertanian dan non pertanian	1	Meningkatnya produksi pertanian melalui pengembangan komoditas unggulan, inovasi produk dan perlindungan kepada petani	• Meningkatkan penyediaan sarana produksi, pengendalian OPT, dan penerapan teknologi budidaya pertanian, • Meningkatkan penyediaan sarana produksi budidaya, optimalisasi pembenihan ikan, serta meningkatkan keterampilan pembudidaya ikan dalam penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) komoditas unggulan perikanan • Meningkatkan penyediaan sarana produksi, pengendalian OPT, penerapan teknologi budidaya pertanian komoditas unggulan pertanian • Mengembangkan usaha agribisnis hasil pertanian dan hasil peternakan agar memiliki nilai tambah ekonomi. • Meningkatkan pembinaan kelompok tani dan gabungan kelompok tani, dan pembinaan terhadap petani penderes agar menerapkan standar keselamatan. • Meningkatkan jumlah pelaku ekspor gula kelapa	1	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan meningkatkan peran sektor pertanian dan non pertanian	2	Menurunnya ketimpangan pendapatan	• Mengembangkan Wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan

RPJMD 2018-2023					Perubahan RPJM 2018-2023				
Misi / Tujuan		Sasaran		Strategi	Misi / Tujuan		Sasaran		Strategi
				• Meningkatkan kualitas dan jumlah produk gula kelapa sesuai standar ekspor • Meningkatkan keselamatan petani penderes dengan safety belt					
		2	Meningkatnya pertumbuhan industri pengolahan, perdagangan dan jasa	• Meningkatkan produktivitas industri kecil sehingga mampu memiliki daya saing baik dari sisi harga maupun kualitas produk • Mengembangkan usaha perdagangan dengan meningkatkan kelayakan pasar tradisional dan meningkatkan kerjasama perdagangan. • Meningkatkan pengendalian inflasi dengan mengoptimalkan peran Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID).			1	Meningkatnya pertumbuhan industri pengolahan dan perdagangan	• Meningkatkan produktivitas industri kecil sehingga mampu memiliki daya saing baik harga maupun kualitas produk • Mengembangkan usaha perdagangan dengan meningkatkan kelayakan pasar tradisional dan meningkatkan kerjasama perdagangan
Misi 4. Mewujudkan Banyumas sebagai Kabupaten Pelopor Kedaulatan pangan					**Misi 4. Mewujudkan Banyumas sebagai Kabupaten Pelopor Kedaulatan pangan**				
1	Meningkatkan ketahanan pangan melalui sektor agribisnis	1	Meningkatnya inovasi produk dan tata kelola hasil tanaman pangan dan agrobisnis untuk ketersediaan pangan utama	• Meningkatkan produksi padi dengan penyediaan saprodi, penggunaan teknologi pertanian, dan pembinaan kelompok tani secara berkelanjutan. • Mendorong sinergi sektor pertanian, perikanan, dan peternakan dalam penyediaan bahan pangan.	1	Meningkatkan ketahanan pangan melalui sektor agribisnis	1	Meningkatnya inovasi produk dan tata kelola hasil tanaman pangan dan agrobisnis untuk ketersediaan pangan utama	• Mewujudkan Kedaulatan Pangan dengan meningkatkan sumber daya ekonomi, diversifikasi dan ketersediaan pangan, penanganan kerawanan pangan serta pengawasan keamanan pangan (TPB 2) • Meningkatkan kualitas SDM dan sarpras pendukung produksi pertanian dan peternakan

RPJMD 2018-2023					Perubahan RPJM 2018-2023				
Misi / Tujuan		Sasaran		Strategi	Misi / Tujuan		Sasaran		Strategi
				• Mengoptimalkan kerjasama dengan lembaga/pelaku usaha distribusi pangan untuk memastikan ketersediaan pasokan pangan dan stabilitas harga pangan pokok. • Meningkatkan penganekaragaman pangan dengan memanfaatkan lahan untuk penyediaan bahan pangan lokal. • Meningkatkan dan mengoptimalkan jaringan irigasi serta penerapan teknologi tepat guna sektor pertanian • Memfasilitasi penyediaan lumbung pangan dan jalan usaha tani • Membatasi alih fungsi lahan kawasan strategis pada sentra unggulan berbasis potensi pertanian					• Meningkatkan kualitas pengelolaan dan pengawasan perikanan serta nilai tambah olahan hasil perikanan (TPB 14) • Mengembangkan usaha agribisnis hasil pertanian, peternakan dan perikanan agar memiliki nilai tambah ekonomi dengan mengoptimalkan diversifikasi usaha, meningkatkan produksi dan olahan hasil, akses petani terhadap teknologi, modal, dan pasar
Misi 5. Menciptakan iklim investasi yang berorientasi perluasan kesempatan kerja yang berbasis potensi lokal dan ramah lingkungan					**Misi 5. Menciptakan iklim investasi yang berorientasi perluasan kesempatan kerja yang berbasis potensi lokal dan ramah lingkungan**				
1	Perwujudan pembangunan kawasan industri dan strategis yang berwawasan lingkungan untuk perluasan kesempatan kerja	1	Pembangunan kawasan industri dengan meningkatkan investasi padat karya	• Mengembangkan kawasan peruntukan industri Meningkatkan minat investasi dengan mendorong pemenuhan infrastruktur penunjang investasi, khususnya kawasan industri • Peningkatan kualitas pelayanan perijinan, serta penyebarluasan informasi potensi dan peluang investasi.	1	Perwujudan pembangunan kawasan industri dan strategis yang berwawasan lingkungan untuk perluasan kesempatan kerja	1	Meningkatnya investasi daerah	• Meningkatkan minat investasi melalui promosi, pengendalian pelaksanaan, dan pengembangan iklim investasi dengan pemenuhan infrastruktur penunjang investasi dan mendorong pengembangan kawasan peruntukan industri

RPJMD 2018-2023				Perubahan RPJM 2018-2023			
Misi / Tujuan		Sasaran		Strategi	Misi / Tujuan		Sasaran		Strategi
				• Meningkatkan kualitas tenaga kerja dengan mengoptimalkan peran Balai Latihan Kerja (BLK), dan menjalin kemitraan dengan Lembaga Pelatihan Keterampilan (LPK).			2	Meningkatnya kesempatan berusaha	• Meningkatkan kualitas tenaga kerja dengan mengoptimalkan peran Balai Latihan Kerja (BLK), dan menjalin kemitraan dengan Lembaga Pelatihan Keterampilan (LPK) (TPB 10)
		2	Meningkatnya kualitas perencanaan, pemanfaatan, pengendalian tata ruang serta pengembangan kawasan strategis yang berwawasan lingkungan	• Meningkatkan penyediaan rencana tata ruang berupa RDTR dan RTBL serta mengintensifkan pengendalian dalam pemanfaatan ruang sesuai rencana peruntukannya. • Memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung kawasan peruntukan industry dan kawasan industry • Mengendalikan dampak negatif kegiatan budidaya agar tidak menurunkan kualitas lingkungan hidup • Mengembangkan kawasan			3	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dengan mengurangi dampak kerusakan lingkungan hidup	• Meningkatkan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup (TPB 12) • Meningkatkan penanganan sampah perkotaan dan pedesaan terpadu (TPB 11)
							4	Meningkatnya penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim	• Meningkatkan mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim dengan penumbuhan desa tangguh bencana (TPB 13) • Mengurangi resiko bencana (TPB 13)
							5	Meningkatnya kualitas perencanaan, pemanfaatan, pengendalian tata ruang serta pengembangan kawasan strategis yang berwawasan lingkungan	• Meningkatkan penyediaan rencana tata ruang berupa RDTR dan RTBL serta mengintensifkan pengendalian dalam pemanfaatan ruang sesuai rencana peruntukannya

RPJMD 2018-2023					Perubahan RPJM 2018-2023				
Misi / Tujuan		Sasaran		Strategi	Misi / Tujuan		Sasaran		Strategi
									• Penertiban lahan yang belum bersertifikat antisipasi alih fungsi lahan (TPB 15)
Misi 6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar yang merata dan memadai sebagai daya ungkit pembangunan					**Misi 6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar yang merata dan memadai sebagai daya ungkit pembangunan**				
1	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat	1	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur	• Mengembangkan prasarana dan sarana penunjang kegiatan kegiatan ekonomi masyarakat • Mengembangkan sistem jaringan air limbah dan drainase • Meningkatkan penanganan sampah perkotaan dan pedesaan terpadu • Mengembangkan jaringan jalan penghubung perdesaan dan perkotaan sesuai fungsi jalan • Mengembangkan dan meningkatkan sarana transportasi wilayah dengan membangun terminal penumpang • Meningkatkan sistem jaringan prasarana sumberdaya air • Meningkatkan kualitas jalan dan jembatan serta penataan saluran drainase, revitalisasi jaringan irigasi dan embung.	1	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat	1	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang merata dan memadai	• Mengembangkan jaringan jalan penghubung perdesaan dan perkotaan sesuai fungsi jalan, meningkatkan kualitas jalan, jembatan dan irigasi serta bangunan pelengkap jalan dan jembatan (TPB 9) • Meningkatkan penyediaan infrastruktur air minum aman dan berkelanjutan (TPB 1) • Meningkatkan kualitas serta penataan kawasan dan bangunan pemerintah • Meningkatkan penyediaan infrastruktur sanitasi (TPB 1) • Meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman (TPB 11) • Meningkatkan Pelayanan Lalu Lintas Angkutan Jalan

RPJMD 2018-2023					Perubahan RPJM 2018-2023				
Misi / Tujuan		Sasaran		Strategi	Misi / Tujuan		Sasaran		Strategi
				• Membangun pusat kantor pemerintahan • Meningkatkan penataan lingkungan permukiman kumuh, dan penyediaan sarana sanitasi dan air minum. • Meningkatkan rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi keluarga kurang mampu • Meningkatkan pemenuhan prasarana dan sarana, SDM dan manajemen transportasi umum yang terintegrasi. • Meningkatkan dukungan pembiayaan infrastruktur jalan dan irigasi dari dana di luar APBD kabupaten • Melakukan penyusunan regulasi untuk pembiyaan infrastruktur melalui anggaran desa					
Misi 7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan industri kerakyatan, Pariwisata dan industri kreatif berbasis sumber daya local					**Misi 7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan industri kerakyatan, Pariwisata dan industri kreatif berbasis sumber daya lokal**				
1	Menumbuhkan dan mengembangkan Daya Tarik pariwisata dan ekonomi kreatif.	1	Meningkatnya Industri Pariwisata yang terintegrasi berbasis potensi sumber daya lokal	• Mengembangkan destinasi wisata yang memiliki keunikan/kekhasan, memberdayakan pelaku jasa wisata profesional dalam pengembangan paket wisata, dan memberdayakan kelompok sadar wisata. • Mengembangkan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pariwisata.	1	Menumbuhkan dan mengembangkan Daya Tarik pariwisata dan ekonomi kreatif.	1	Meningkatnya Industri Pariwisata yang terintegrasi berbasis potensi sumber daya lokal	• Meningkatkan daya tarik wisata dengan mendorong pemasaran serta pengembangan sumberdaya pariwisata dan ekonomi kreatif (TPB 8)

RPJMD 2018-2023					Perubahan RPJM 2018-2023				
Misi / Tujuan		Sasaran		Strategi	Misi / Tujuan		Sasaran		Strategi
				• Meningkatkan pembinaan dan fasilitasi dalam rangka mendorong pengembangan industri kreatif pada usaha yang pertumbuhannya masih rendah • Menumbuhkembangkan usaha kreatif pemula (start up), dan mendorong pemasaran produk ekonomi kreatif di tingkat nasional maupun global • Meningkatkan kuantitas dan kapabilitas kelompok sadar wisata desa • Mengembangkan pariwisata dengan keterlibatan masyarakat.					
		2	Meningkatnya kesempatan kerja, pertumbuhan UMKM dan IKM melalui pemanfaatan IPTEK	• Mengembangkan ketrampilan pelaku UMKM, IKM, koperasi dan pengembangan pasar desa dan usaha ekonomi perdesaan berbasis potensi sumberdaya lokal • Meningkatkan promosi, jumlah pelatihan, akses permodalan, dan akses pemasaran untuk wirausaha muda. • Meningkatkan sinergi dan kerjasama antara lembaga perguruan tinggi dalam pengembangan teknologi untuk memenuhi kebutuhan			2	Meningkatnya pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif melalui pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro	• Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kreatif melalui peningkatan kapasitas pelaku ekonomi kreatif dan pemanfaatan serta perlindungan Hak Kekayaan Intelektualnya • Memantapkan kelembagaan koperasi meningkatkan pendidikan dan pelatihan, pemberdayaan dan perlindungan serta pengawasan Koperasi • Meningkatkan kualitas Usaha kerakyatan dengan pengembangan dan pemberdayaan Usaha Mikro (TPB 8)

RPJMD 2018-2023					Perubahan RPJM 2018-2023				
Misi / Tujuan		Sasaran		Strategi	Misi / Tujuan		Sasaran		Strategi
				industri dan UMKM • Melakukan penyusunan rencana induk kelitbangan (RIK)					
Misi 8. Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya serta berkepribadian dengan menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan religious					**Misi 8. Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya serta berkepribadian dengan menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan religius**				
1	Meningkatkan aktualisasi nilai-nilai budaya, agama dan kebangsaan dalam kehidupan masyarakat	1	Meningkatnya kerukunan masyarakat dan peran pemuda dalam kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara	• Mewujudkan Gerakan Memakmurkan Pesantren, Masjid serta tempat-tempat ibadah lainnya dengan memberikan bantuan untuk marbot masjid dan penjaga tempat ibadah lainnya serta layanan kesehatan untuk santri pesantren • Meningkatkan pemberian bantuan layanan kesehatan dan pendidikan, tunjangan makan untuk anak yatim/yatim piatu dan berkebutuhan khusus/Difabel • Meningkatkan wawasan kebangsaan masyarakat. • Meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilu dengan meningkatkan kesadaran dan pengetahuan politik masyarakat • Meningkatkan penegakan Perda/ Perbup dengan mengoptimalkan pelaksanaan patroli dan operasi yustisi dengan melibatkan lembaga terkait.	1	Meningkatkan aktualisasi nilai-nilai budaya, agama dan kebangsaan dalam kehidupan masyarakat	1	Meningkatnya kerukunan dan peran masyarakat dalam kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara serta menciptakan kehidupan masyarakat yang aman dan tentram	• Meningkatkan wawasan kebangsaan masyarakat, serta memantapkan nilai-nilai kebangsaan dan bela negara (TPB 16) • Meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilu dengan meningkatkan kesadaran dan pengetahuan politik masyarakat • Peningkatan kualitas fasilitasi pelayanan keagamaan dengan memakmurkan Pesantren, Masjid serta tempat-tempat ibadah lainnya serta meningkatkan peran forum komunikasi,dialog, dan diskusi antar umat beragam • Meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan penegakan Perda/ Perbup dan mengoptimalkan pelayanan keamanan masyarakat

RPJMD 2018-2023					Perubahan RPJM 2018-2023				
Misi / Tujuan		Sasaran		Strategi	Misi / Tujuan		Sasaran		Strategi
				• Meningkatkan pembinaan organisasi pemuda dan pengembangan prestasi dan karakter pemuda. • Meningkatkan prestasi olahraga dengan meningkatkan kompetensi pelatih dan pembinaan atlet, serta membudayakan olahraga pada masyarakat			2	Meningkatnya peran dan daya saing pemuda	• Meningkatkan daya saing keolahragaan, kepramukaan dan kepemudaan
		2	Meningkatnya kelestarian kebudayaan daerah	• Melestarikan seni dan budaya dengan memfasilitasi aktualitasi nilai adat dan tradisi masyarakat, serta memfasilitasi pementasan seni budaya. • Meningkatkan pelestarian/revitalisasi benda dan bangunan cagar budaya.			3	Meningkatnya kelestarian kebudayaan daerah	• Meningkatkan pelestarian budaya dengan fasilitasi, pelestarian dan perlindungan terhadap nilai-nilai budaya

6.2. Strategi dan Arah Pengembangan Wilayah

6.2.1 Arah Pengembangan Wilayah

Arah pengembangan wilayah di Kabupaten Banyumas ditujukan untuk mewujudkan ruang Kabupaten Banyumas sebagai pusat pertumbuhan ekonomi regional yang berbasis pertanian, pariwisata, serta perdagangan dan jasa didukung pemanfaatan sumberdaya alam yang berkelanjutan. Secara regional Provinsi Jawa Tengan, Kabupaten Banyumas telah ditetapkan sebagai bagian dari kawasan strategis provinsi dengan sudut kepentingan ekonomi Barlingmascakeb yang meliputi Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Cilacap, dan Kabupaten Kebumen. Dalam kebijakan pengembangan wilayah Provinsi Jawa Tengah, Barlingmascakeb merupakan bagian dari pengembangan poros selatan-selatan dan poros pengembangan utara-selatan. Poros selatan-selatan bertujuan untuk dapat meningkatkan ekonomi dan pembangunan wilayah selatan Provinsi Jawa Tengah, sedangkan poros utara-selatan dimaksudkan untuk meningkatkan pemerataan dan keserasian pembangunan wilayah antara pantura dan pansela.

Kabupaten Banyumas merupakan bagian Kawasan Barlingmascakeb yang akan dikembangkan untuk mendukung dan memberikan nilai tambah dalam percepatan pembangunan ekonomi kawasan prioritas pengembangan Brebes-Tegal-Pemalang. Berdasarkan Perpres Nomor 79 tahun 2019 di Kabupaten Banyumas terdapat 7 Program/Proyek dalam strategis dan program lintas kawasan yang dilaksanakan di Kabupaten Banyumas.

Kebijakan dan strategi pengembangan wilayah di Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut:

a. pengembangan kegiatan pertanian sebagai sektor pertumbuhan ekonomi;
b. pengembangan pariwisata berwawasan lingkungan dan berbasis kerakyatan;
c. pengembangan fungsi kegiatan perdagangan dan jasa berskala lokal dan regional;
d. pengembangan pusat kegiatan yang terintegrasi dan terpadu;
e. pengembangan sistem jaringan prasarana utama dan sistem jaringan prasarana lainnya sebagai pendukung potensi wilayah;
f. pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan lindung;
g. pengembangan kawasan budidaya melalui pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan;
h. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara; dan
i. meningkatkan akses dan peluang investasi kawasan budidaya dalam rangka meningkatkan perekonomian wilayah.

6.2.2 Kebijakan Pengembangan Struktur Ruang

Berdasarkan rencana pengembangan struktur ruang, secara hirarki sistem perkotaan Kabupaten Banyumas terdiri atas pusat kegiatan dan fungsi pelayanan. Pusat kegiatan meliputi:

a. Pusat Kegiatan Wilayah atau PKW di Perkotaan Purwokerto. PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota. PKW di Perkotaan

Purwokerto dengan fungsi pelayanan utama berupa perdagangan berskala regional, pemerintahan, pendidikan, kesehatan, transportasi, dan perbankan meliputi:

1. Kecamatan Purwokerto Utara;
2. Kecamatan Purwokerto Timur;
3. Kecamatan Purwokerto Selatan;
4. Kecamatan Purwokerto Barat;
5. sebagian Kecamatan Sumbang;
6. sebagian Kecamatan Baturaden;
7. sebagian Kecamatan Kedungbanteng;
8. sebagian Kecamatan Kembaran;
9. sebagian Kecamatan Karanglewas;
10. sebagian Kecamatan Sokaraja; dan
11. sebagian Kecamatan Patikraja.

b. Pusat Kegiatan Lokal atau PKL PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan. PKL di Kabupaten Banyumas meliputi:

1. Perkotaan Banyumas. PKL Perkotaan Banyumas dengan fungsi pelayanan utama berupa pemerintahan dan kesehatan di Kecamatan Banyumas.
2. Perkotaan Ajibarang. PKL Perkotaan Ajibarang dengan fungsi pelayanan utama berupa kesehatan, transportasi, industri, dan perdagangan skala kabupaten di Kecamatan Ajibarang.
3. Perkotaan Sokaraja. PKL Perkotaan Sokaraja dengan fungsi pelayanan utama berupa pendidikan, kesehatan, perdagangan skala kabupaten, dan industri di Kecamatan Sokaraja.
4. Perkotaan Wangon. PKL Perkotaan Wangon dengan fungsi pelayanan utama berupa perdagangan skala kabupaten, transportasi, dan industri di Kecamatan Wangon

c. Pusat Pelayanan Kawasan atau PPK. PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan pelayanan pemerintahan, pendidikan, dan kesehatan skala kecamatan atau beberapa desa. PPK di Kabupaten Banyumas meliputi:

1. perkotaan Jatilawang;
2. perkotaan Sumpiuh;
3. perkotaan Patikraja;
4. perkotaan Baturaden;
5. perkotaan Cilongok;
6. perkotaan Lumbir;
7. perkotaan Gumelar;
8. perkotaan Pekuncen;
9. perkotaan Purwojati;
10. perkotaan Rawalo;
11. perkotaan Kemranjen;
12. perkotaan Tambak;
13. perkotaan Sumbang;
14. perkotaan Kembaran;
15. perkotaan Karanglewas;
16. perkotaan Kebasen;
17. perkotaan Somagede;
18. perkotaan Kedungbanteng; dan
19. perkotaan Kalibagor.

Pusat pusat kegiatan ini merupakan pusat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Banyumasl. Untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi tersebut diperlukan jaringan prasarana wilayah meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan ptasarana energi, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, dan. sistem jaringan prasarana wilayah lainnya yang terdiri dari sistem persampahan, sistem jaringan air limbah, sistem jaringan drainase, jalur dan ruang evakuasi bencana alam dan bencana geologi, dan sistem pelayanan fasilitas umum dan sosial.

Strategi pengembangan struktur ruang Kabupaten Banyumas dilakukan antara lain melalui:

a. mendorong pengembangan pusat kegiatan di kawasan perkotaan berskala regional;
b. mendorong pengembangan pusat pelayanan berskala kecamatan atau beberapa desa;
d. mendorong pengembangan pusat pelayanan berskala antar desa;
e. meningkatkan interaksi antara pusat kegiatan perdesaan dan perkotaan secara berjenjang;
f. mengembangkan jaringan jalan penghubung perdesaan dan perkotaan sesuai fungsi jalan;
g. mengembangkan dan meningkatkan sarana transportasi wilayah meliputi terminal penumpang dan terminal barang;
h. mengembangkan jaringan energi dan sumber daya energi alternatif;
i. meningkatkan jangkauan pelayanan jaringan telekomunikasi ke seluruh wilayah;
j. meningkatkan sistem jaringan prasarana sumberdaya air;
k. meningkatkan penanganan sampah perkotaan dan pedesaan terpadu;
l. mengembangkan jaringan transportasi sungai sebagai pendukung sarana wisata;
m. mengembangkan dan meningkatkan sarana dan prasarana transportasi kereta api;
n. mengembangkan sistem jaringan air limbah dan drainase; dan
o. mengembangkan jalur evakuasi bencana pada kawasan rawan bencana alam.

6.2.3 Kebijakan Pengelolaan Kawasan Lindung

Kawasan lindung berfungsi utama melindungi kelestarian sumber daya alam, sumber daya buatan, serta nilai budaya dan sejarah bangsa. Di dalam kawasan ini tidak diperkenankan adanya kegiatan budidaya yang dapat mengurangi atau merusak fungsi lindungnya, kecuali digunakan untuk meningkatkan fungsi lindungnya. Kawasan lindung di Kabupaten Banyumas, baik dalam konteks internal wilayah maupun regional, harus membentuk suatu kesatuan yang secara sinergis memberikan perlindungan dari daerah hulu hingga hilir tanpa dibatasi oleh batasan-batasan administratif.

Fokus perwujudan kawasan lindung diarahkan pada kawasan hutan lindung, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan di bawahnya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya, kawasan rawan bencana alam, kawasan lindung geologi serta kawasan lindung lainnya. Pengendalian

pemanfaatan ruang pada kawasan lindung dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut:

a. menetapkan kawasan lindung sesuai fungsinya;
b. mengembalikan fungsi hutan lindung yang mengalami kerusakan;
c. membatasi kegiatan budidaya yang dapat mengganggu fungsi kawasan lindung;
d. mempertahankan dan melestarikan kawasan resapan air;
e. mengendalikan secara ketat pemanfaatan sumber air baku;
f. melestarikan habitat dan ekosistem khusus pada kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya;
g. membatasi kegiatan pariwisata pada radius pengamanan kawasan pada kawasan perlindungan setempat;
h. mengembangkan kawasan ruang terbuka hijau;
i. meningkatkan fungsi kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya sebagai tempat wisata, dan obyek penelitian;
j. mengembangkan tanaman konservasi di kawasan rawan bencana tanah longsor; dan
k. mengembangkan sistem peringatan dini, jalur, dan ruang evakuasi bencana.

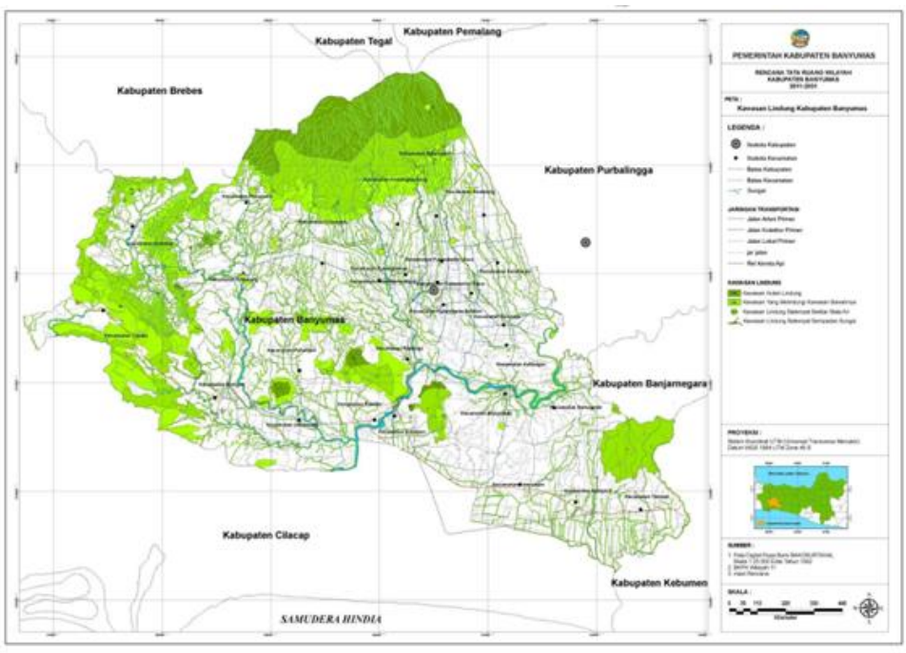

Gambar 6.1.
Kawasan Lindung Kabupaten Banyumas
Sumber: RTRW Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031

6.2.4 Kebijakan Pengelolaan Kawasan Budidaya

Alokasi pemanfaatan ruang untuk pengembangan kegiatan budidaya dilakukan dengan memperhatikan berbagai aspek. Untuk mencapai tujuan pemanfaatan ruang yang optimal maka alokasi pemanfaatan ruang memperhatikan asas kelestarian, kesesuaian dan kemanfaatan. Asas kelestarian dimaksudkan agar pemanfaatan ruang tidak mengurangi nilai manfaat dimasa yang datang dengan memberikan perlindungan terhadap kualitas ruang. Asas kesesuaian bertujuan untuk memanfaatkan ruang sesuai dengan potensi yang dikandungnya sedangkan asas kemanfaatan ditujukan agar nilai manfaat ruang dapat memberikan dampak bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat secara optimal.

Fokus perwujudan kawasan budidaya diarahkan pada kawasan hutan produksi, kawasan hutan rakyat, kawasan pertanian, kawasan perikanan, kawasan pertambangan, kawasan peruntukan industri, kawasan pariwisata dan kawasan permukiman dan kawasan peruntukan lainnya. Pengembangan kawasan budidaya melalui pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutandilakukan melalui strategi sebagai berikut:

a. menetapkan kawasan budidaya sesuai fungsinya berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
b. mengendalikan dampak negatif kegiatan budidaya agar tidak menurunkan kualitas lingkungan hidup;
c. mengembangkan kawasan budidaya melalui peningkatan nilai ekonomis kawasan dan fungsi sosial;
d. mengembangkan sektor kehutanan dan pengolahan hasil hutan;
e. mengembangkan sentra produksi dan usaha berbasis perikanan;
f. mengendalikan secara ketat pengelolaan lingkungan kawasan peruntukan pertambangan;
g. mengembangkan kawasan peruntukan industri pada jalur ansportasi regional dan nasional;
h. mengembangkan dan memberdayakan industri berbasis bahan baku lokal dari hasil pertanian, peternakan, perkebunan, dan hasil tambang;
i. mengembangkan kawasan peruntukan permukiman terpadu;
j. menetapkan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
k. mengembangkan kawasan pertanian;
l. mengembangkan irigasi setengah teknis atau sederhana menjadi sawah beririgasi teknis;
m. mengembangkan kawasan agropolitan dan sistem agribisnis pertanian;
n. mengembangkan sektor peternakan dan perkebunan;
o. mengembangkan dan meningkatkan daya tarik wisata;
p. mengembangkan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pariwisata;
q. mengendalikan pengembangan lahan terbangun pada kawasan pariwisata;
r. mengembangkan pariwisata dengan keterlibatan masyarakat;
s. mengembangkan fungsi kawasan perdagangan dan jasa berskala regional, lokal, dan lingkungan;
t. mendorong fungsi kawasan perdagangan dan jasa berskala nasional;
u. mengembangkan sarana dan prasarana pendukung kawasan perdagangan dan jasa; dan
v. mengembangkan dan meningkatkan peran dan fungsi kawasan pertanian, pariwisata, perdagangan dan jasa, serta industri.

6.2.5 Kebijakan Pengembangan Kawasan Strategis

Kawasan strategis merupakan kawasan yang secara spesifik berpengaruh besar terhadap pencapaian tujuan penataan ruang. Penataan ruang dengan pendekatan nilai strategis kawasan dimaksudkan untuk mengembangkan, melestarikan, melindungi dan/atau mengkoordinasikan keterpaduan pembangunan nilai strategis kawasan demi terwujudnya pemanfaatan yang berhasil guna, berdaya guna, dan berkelanjutan. Penetapan kawasan strategis pada setiap jenjang wilayah administratif didasarkan pada pengaruh kawasan yang dipandang penting bagi aspek kedaulatan negara, pertahanan,

keamanan, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk kawasan yang ditetapkan sebagai warisan dunia. Pengaruh aspek kedaulatan negara, pertahanan, dan keamanan lebih ditujukan bagi penetapan kawasan strategis nasional. Sedangkan aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan ditujukan untuk penetapan kawasan strategis nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, yang diukur berdasarkan pendekatan eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi penanganan kawasan yang bersangkutan.

Pendekatan penataan ruang berdasarkan nilai strategis kawasan dan visi misi Kabupaten Banyumas meliputi Kawasan Strategis Bidang Pertumbuhan Ekonomi, Kawasan Strategis Bidang Sosial dan Budaya, Kawasan Strategis Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan/atau Teknologi, dan Kawasan Strategis Bidang Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup.

Kawasan strategis Provinsi Jawa Tengah di wilayah Kabupaten Banyumas terdiri atas:

a. kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi berupa kawasan Agropolitan MANGGAMAS dan Kawasan Strategis Pariwisata Lereng Gunung Slamet dan Sekitarnya; dan
b. kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup berupa Kawasan Gunung Slamet.

Kawasan strategis wilayah kabupaten merupakan bagian wilayah kabupaten yang penataan ruangnya diprioritaskan, karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial budaya, dan/atau lingkungan. Kawasan strategis Kabupaten Banyumas terdiri atas:

a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, meliputi:
   - kawasan Perkotaan Purwokerto;
   - kawasan agropolitan;
   - kawasan minapolitan; dan
   - kawasan perbatasan.
b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya, meliputi:
   - kawasan Kota Lama Banyumas;
   - kawasan Masjid Saka Tunggal di Desa Cikakak, Kecamatan Wangon;
   - kawasan Desa Tradisional di Desa Plana, Kecamatan Somagede; dan
   - kawasan Budaya Tradisional Desa Pekuncen, Kecamatan Jatilawang.
c. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi berupa Kawasan Pariwisata Baturraden.
d. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup berupa Kawasan Gunung Slamet.

Strategi pengembangan dan pengendalian kawasan strategis Kabupaten Banyumas sesuai dengan penetapannya dilakukan melalui:

a. menetapkan kawasan strategis sesuai dengan nilai strategis dan kekhususannya;
b. mengembangkan prasarana dan sarana penunjang kegiatan ekonomi

masyarakat;

c. mengembangkan hasil produksi pada kawasan sentra ekonomi unggulan dan sarana prasarana pendukung perekonomian;
d. membatasi alih fungsi lahan kawasan strategis pada sentra unggulan berbasis potensi pertanian;
e. menetapkan, mengembangkan, dan mempertahankan luasan lahan pada kawasan minapolitan;
f. melindungi dan melestarikan kawasan dalam mempertahankan karakteristik nilai sosial dan budaya kawasan;
g. memanfaatkan kawasan bagi kegiatan dengan nilai ekonomi dan meningkatkan identitas sosial budaya kawasan;
h. mengendalikan kegiatan sesuai tujuan pemanfaatan kawasan dalam wilayah kerja pertambangan panas bumi dengan tetap memperhatikan fungsi lindung kawasan;
i. memanfaatkan kawasan bagi penelitian dan pendidikan yang berbasis lingkungan hidup;
j. mempertahankan keanekaragaman hayati pada kawasan suaka alam dan hutan lindung; dan
k. mengendalikan pemanfaatan ruang di sekitar kawasan Gunung Slamet yang berpotensi mengurangi fungsi lindung kawasan.

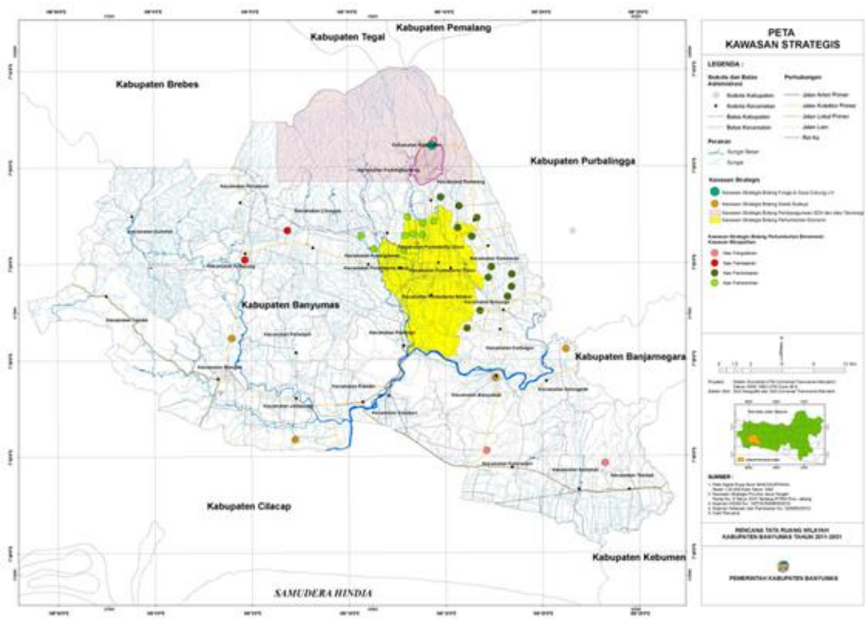

Gambar 6.2.
Kawasan Strategis Kabupaten Banyumas
Sumber: RTRW Kabupaten banyumas Tahun 2011-2031

6.3. Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan keputusan dari *stakeholder* sebagai pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode RPJMD memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan.

Arah arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Banyumas ditetapkan dengan tema/fokus pembangunan tahunan sejak tahun 2019 hingga tahun 2023. Pada masing-masing tema/fokus disusun prioritas pembangunan yang akan ditangani.

Tabel 6.2
Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Banyumas Tahun 2019-2023

Arah Kebijakan							
Tahun 2019	**Tahun 2020**	**Tahun 2021**	**Perubahan Tahun 2021**	**Tahun 2022**	**Perubahan Tahun 2022**	**Tahun 2023**	**Perubahan Tahun 2023**
Tema: Peningkatan kualitas sumber daya manusia, memperluas pelayanan dasar, memantapkan kondusifitas wilayah serta memperhatikan keberlanjutan lingkungan	Tema: Pengembangan Usaha Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Sumberdaya Lokal, dan Penguatan Kemandirian Pangan	Tema : Penguatan Perekonomian Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	Tema: Peningkatan Daya Saing Potensi Daerah untuk Percepatan Pemulihan Perekonomian Masyarakat	Tema: Penguatan Daya Saing Menuju Daerah yang Maju dan Mandiri	Tema: Peningkatan Perekonomian Daerah didukung Penguatan Daya Saing Ekonomi dan Sumber Daya Manusia	Tema: Perwujudan Masyarakat Kabupaten Banyumas yang Adil-Makmur	Tema: Penguatan Daya Saing Ekonomi dan Sumber Daya Manusia untuk Mewujudkan Kabupaten Banyumas yang Maju, Adil dan Mandiri
Prioritas 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik 2. Penurunan kemiskinan dan pengangguran 3. Peningkatkan keterjangkauan jaminan kesehatan masyarakat dan perlindungan sosial 4. Peningkatan keterjangkauan dan mutu pendidikan serta penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun	Prioritas 1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia 2. Peningkatan ketersedian dan kualitas infrastruktur 3. Pengurangan disparitas pendapatan masyarakat 4. Pengembangan program penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 5. Peningkatan produktivitas pertanian untuk mendukung kedaulatan pangan	Prioritas 1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia 2. Peningkatan kualitas infrastruktur dan pemenuhan infrastruktur dasar 3. Pengembangan dan pemerataan kegiatan ekonomi masyarakat 4. Pengembangan model program-program penanggulangan kemiskinan 5. Pemantapan produktivitas pertanian untuk mendukung kedaulatan pangan	Prioritas 1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia 2. Peningkatan kualitas infrastruktur untuk pemenuhan pelayanan dasar dan pengembangan ekonomi 3. Pengembangan Potensi Daerah dan pemerataan kegiatan ekonomi masyarakat 4. Penanggulangan kemiskinan dan Pengangguran untuk Mengurangi Kesenjangan	Prioritas 1. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia 2. Pemantapan infrastruktur untuk mendukung investasi. 3. Pengembangan teknologi untuk kegiatan ekonomi masyarakat 4. Optimalisasi model program-program penanggulangan kemiskinan	Prioritas **1.** Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan kualitas lingkungan hidup serta peningkatan ketahanan bencana (TPB 2, 8, 12 dan 13) 2. Percepatan penanggulangan kemiskinan (TPB 1 dan 10) 3. Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia (TPB 3, 4 dan 5)	Prioritas 1. Penguatan kualitas sumber daya manusia menuju *smart people* dengan pemanfaatan teknologi informasi 2. Pemerataan pembangunan infrastruktur antar wilayah 3. Pemanfaatan tekhnologi dalam pengembangan produk unggulan daerah, sehingga mampu meningkatkan nilai tambah ekonomi masyarakat	Prioritas 1. Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi serta ketahanan bencana (TPB 2, 8, 12 dan 13) 2. Pemantapan Percepatan penanggulangan kemiskinan (TPB 1 dan 10) 3. Pemantapan kualitas infrastruktur untuk memperkuat daya saing daerah (TPB 6, 9 dan 11)

Arah Kebijakan							
Tahun 2019	**Tahun 2020**	**Tahun 2021**	**Perubahan Tahun 2021**	**Tahun 2022**	**Perubahan Tahun 2022**	**Tahun 2023**	**Perubahan Tahun 2023**
5. Penyediaan infrastruktur untuk mendukung pemerataan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi 6. Pengurangan ketimpangan akibat disparitas pendapatan masyarakat 7. Peningkatan iklim investasi dan iklim usaha 8. Peningkatan peran koperasi, industri kecil menengah dan usaha mikro kecil menengah 9. Peningkatan produksi dan produktifitas pertanian dan perikanan 10. Pengembangan pariwisata 11. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup 12. Pengurangan resiko bencana dan peningkatan kelembagaan penanggulangan bencana	6. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	6. Pengelolaan sumber daya alam dengan memperhatikan kualitas lingkungan hidup 7. Pemantapan tata kelola pemerintahan	5. Pengelolaan lingkungan hidup dan Peningkatan Ketahanan Bencana 6. Pemantapan tata kelola pemerintahan	5. Diversifikasi produk pertanian dan nilai tambah hasil pertanian 6. Pengelolaan sumber daya alam dengan memperhatikan kualitas lingkungan hidup 7. Pengembangan *smart goverment* dalam peningkatan kualitas pelayanan publik	4. Peningkatan kualitas infrastruktur untuk memperkuat daya saing daerah (TPB 6, 9 dan 11) 5. Pengembangan smart goverment dalam peningkatan kualitas pelayanan publik (TPB 16)	4. Penerapan model program penanggulangan kemiskinan berbasis sumberdaya lokal 5. Optimalisasi produk pertanian untuk kesejahteraan masyarakat 6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam yang mendukung pembangunan berkelanjutan 7. Penguatan *smart goverment* dalam perbaikan kualitas pelayanan publik	4. Pemantapan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia (TPB 3,4 dan 5) 5. Perwujudan smart goverment dalam peningkatan kualitas pelayanan publik (TPB 16) 6. Peningkatan kemandirian ekonomi dengan menggerakan industri kerakyatan, Pariwisata, dan Industri Kreatif berbasis sumber daya lokal (TPB 8) 7. Peningkatan tatanan masyarakat yang berbudaya serta berkepribadian dengan menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan religius

6.4. Program Prioritas Pembangunan Daerah

Program prioritas pembangunan daerah Kabupaten Banyumas disusun dengan mendasarkan pada program unggulan Bupati - Wakil Bupati Banyumas Periode 2018-2023 yang dijabarkan dalam Hasta Krida. Secara ringkas daftar program prioritas pembangunan daerah yang akan mendukung masing-masing misi tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 6.3
Program Unggulan Bupati-Wakil Bupati dan Program Pembangunan Daerah

Misi	Penjabaran Hasta Krida	Rincian Penjabaran Hasta Krida	Program Unggulan Bupati-Wakil Bupati Banyumas 2019-2020	Program Unggulan Bupati-Wakil Bupati Banyumas 2021-2023
1. Mewujudkan Banyumas sebagai Barometer Pelayanan Publik	1. Banyumas Barometer Pelayanan Publik Jawa Tengah	• Pengembangan Lapak Publik Untuk mendukung Mall Pelayanan Publik	➢ Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan, Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Perangkat Daerah ➢ Program Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan ➢ Program Penanganan Aduan dan Peningkatan Layanan Perizinan	➢ Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik ➢ Program Pelayanan Penanaman Modal
2. Meningkatkan kualitas hidup warga melalui pemenuhan dan layanan dasar pendidikan dan kesehatan	2. Pendidikan dan Kesehatan	• Mewujudkan 92 Paket Beasiswa • Program Wajib Belajar • Program 1 Desa 1 Sarjana • Meningkatkan jangkauan pelayanan kesehatan	➢ Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Tingkat Sekolah Dasar dan Sederajat, ➢ Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Tingkat Sekolah Menengah Pertama dan Sederajat ➢ Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan ➢ Program Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD	➢ Program Pengelolaan Pendidikan ➢ Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan	3. Pengembangan Agrobisnis Unggulan	• Peningkatan ekspor gula kelapa 30.000 ton • Penerapan teknologi safety belt penderes, durian dll	➢ Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri dan Luar Negeri ➢ Program Pengembangan Produksi Tanaman Perkebunan	➢ Program Pengembangan Ekspor
4. Mewujudkan Banyumas sebagai Kabupaten Pelopor Kedaulatan Pangan	4. Banyumas Pelopor Kedaulatan Pangan	• Produksi padi 500.000 ton/tahun	➢ Program Pengembangan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	➢ Program Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian
5. Menciptakan iklim investasi yang berorientasi perluasan kesempatan kerja yang berbasis potensi lokal dan ramah lingkungan	5. Memperluas minimal 20.000 kesempatan kerja	• Menciptakan 3.000 enterprener muda • Investasi berbasis padat karya • Membangun kawasan industri	➢ Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah ➢ Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi ➢ Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi ➢ Program Penyiapan	➢ Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal ➢ Program Promosi Penanaman Modal ➢ Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja ➢ Program

Misi	Penjabaran Hasta Krida	Rincian Penjabaran Hasta Krida	Program Unggulan Bupati-Wakil Bupati Banyumas 2019-2020	Program Unggulan Bupati-Wakil Bupati Banyumas 2021-2023
			Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah ➢ Program Peningkatan Investasi di Kawasan Industri ➢ Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja ➢ Program Peningkatan Kesempatan kerja.	Penempatan Tenaga Kerja
6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar yang merata dan memadai sebagai daya ungkit pembangunan	6. Pembangunan Infrastruktur merata dan memadai	● Peningkatan anggaran irigasi ● Peningkatan jalan hotmix 570 km	➢ Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya ➢ Program Pembangunan dan Peningkatan Jalan	➢ Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) ➢ Program Penyelenggaraan Jalan
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan industri kerakyatan, Pariwisata, dan Industri Kreatif berbasis sumber daya lokal	7. Menggerakkan industri kerakyatan, pariwisata perdesaan, industri kreatif	● Pengembangan desa wisata ● Pengembangan UMKM ● Membangun pasar desa	➢ Program Pengembangan Destinasi Pariwisata ➢ Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan ➢ Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi ➢ Pengembangan Industri Kecil dan Menengah ➢ Program Pengembangan Sistem Inovasi dan Kreativitas	➢ Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata ➢ Program Pengembangan UMKM ➢ Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif ➢ Program Administrasi Pemerintahan Desa
8. Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya serta berkepribadian dengan menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan religius.	8. Gerakan memakmurkan pesantren dan masjid	● Bantuan untuk marbot masjid ● KBS untuk santri pesantren ● KBS, KBP dan tunjangan makan untuk yatim piatu	➢ Program Sosial Keagamaan ➢ Program Pembinaan Keagamaan ➢ Program Pelayanan, Perlindungan, Jaminan dan Rehabilitasi	➢ Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat

Secara lengkap Program, Indikator, Target dan Rencana Pendanaan dari program unggulan daerah Hasta Krida tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 6.4
Program, Indikator, Target dan Rencana Pendanaan Program Unggulan Kabupaten Banyumas Tahun 2021-2023

Kode / Hasta Krida ke-			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								OPD
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp. RPJMD	Target	Rp. RPJMD	Target	Rp. RPJMD	Target	Rp. RPJMD	
1			**BANYUMAS BAROMETER PELAYANAN PUBLIK JAWA TENGAH**				**1.126.853.365**		**1.456.417.600**		**1.405.908.000**		**3.989.178.965**	
701	2		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				986.104.240		1.140.773.600		1.090.755.000		3.217.632.840	
701	2	1		*Persentase pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*	*%*	*100*	*35.012.500*	*100*	*43.912.500*	*100*	*40.608.000*	*100*	*119.533.000*	
701	2	2		*Persentase pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik*	*%*	*100*	*951.091.740*	*100*	*1.096.861.100*	*100*	*1.050.147.000*	*100*	*3.098.099.840*	
218	4		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL				140.749.125		315.644.000		315.153.000		771.546.125	DPMPTSP
218	4	1		*Persentase penerbitan perizinan dan non perizinan sesuai Standar Pelayanan (SP)*	*%*	*90*	*140.749.125*	*90*	*315.644.000*	*90*	*315.153.000*	*90*	*771.546.125*	DPMPTSP
2			**PENDIDIKAN DAN KESEHATAN**				**483.269.422.969**		**445.587.071.471**		**485.232.814.969**		**1.414.089.309.409**	
101	2		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				243.725.503.961		245.116.469.540		246.712.618.940		735.554.592.441	DINDIK
101	2	1		*APK SD*	*%*	*102.30*	*147.625.693.087*	*101.70*	*148.579.746.400*	*101.00*	*149.822.005.000*	*101.00*	*446.027.444.487*	DINDIK
101	2	2		*APK SMP*	*%*	*95.00*	*63.389.278.674*	*97.00*	*63.640.866.140*	*99.00*	*63.719.829.940*	*99.00*	*190.749.974.754*	DINDIK

Kode / Hasta Krida ke-			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								OPD
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp. RPJMD	Target	Rp. RPJMD	Target	Rp. RPJMD	Target	Rp. RPJMD	
101	2	3		*APK PAUD*	*%*	*78.00*	*32.710.532.200*	*78.25*	*32.895.857.000*	*78.50*	*33.170.784.000*	*78.50*	*98.777.173.200*	DINDIK
102	2		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				237,002,937,185		200.470.601.931		238.520.196.029		678.534.716.968	DINKES | RSUD AJIBARANG | RSUD BANYUMAS
102	2	1		*Prosentase Jenis UKM UKP sesuai standar yang terpenuhi*	*%*	*100*	*136,795,752,145*	*100*	*117.543.784.255*	*100*	*147.200.918.029*	*100*	*404.681.436.252*	DINKES
102	2	5		*Persentase ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan UKM UKP di RSUD Ajibarang*	*%*	*84*	*13.339.585.000*	*85*	*8.982.474.676*	*85*	*9.094.366.000*	*85*	*31.416.425.676*	RSUD AJIBARANG
102	2	6		*Persentase ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan UKM UKP di RSUD Banyumas*	*%*	*85*	*86.267.600.040*	*85*	*73.944.343.000*	*85*	*82.224.912.000*	*85*	*242.436.855.040*	RSUD BANYUMAS
102	2	11		*Prosentase Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Rumah Sakit Khusus Mata (RSKM) Purwokerto yang Terpenuhi*	*%*		*600,000,000*		-		*1,000,000,000*		*1,600,000,000* -	DINKES
3			**PENGEMBANGAN AGROBISNIS UNGGULAN**				**150.000.000**		**300.000.000**		**313.711.000**		**763.711.000**	
330	5		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR				150.000.000		300.000.000		313.711.000		763.711.000	DINPERINDAG
330	5	1		*Nilai Ekspor Bersih Perdagangan*	*USD*	*0.26*	*150.000.000*	*0.27*	*300.000.000*	*0.28*	*313.711.000*	*0.28*	*763.711.000*	DINPERINDAG
4			**BANYUMAS PELOPOR KEDAULATAN PANGAN**				**1.397.753.300**		**2.291.684.000**		**904.490.000**		**4.593.927.300**	
327	2		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				1.397.753.300		2.291.684.000		904.490.000		4.593.927.300	DINKANNAK | DINPERTA

Kode / Hasta Krida ke-			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								OPD
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp. RPJMD	Target	Rp. RPJMD	Target	Rp. RPJMD	Target	Rp. RPJMD	
														N KP
327	2	1		*Persentase peningkatan jumlah sarana pertanian*	*%*	*50*	*647.753.300*	*50*	*1.646.684.000*	*50*	*379.490.000*	*50*	*2.673.927.300*	DINKANNAK | DINPERTAN KP
327	2	2		*Peningkatan Populasi Ternak*	*%*	*3*	*750.000.000*	*3*	*645.000.000*	*3*	*525.000.000*	*3*	*1.920.000.000*	DINKANNAK
5			**MEMPERLUAS MINIMAL 20.000 KESEMPATAN KERJA**				**705.871.030**		**821.166.100**		**859.557.000**		**2.386.594.130**	
207	3		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA				537.006.000		438.012.100		474.730.000		1.449.748.100	DINAKERKOP UKM
207	3	2		*Persentase Penerapan Program PBK dengan kualifikasi Klaster*	*%*	*100*	*515.756.000*	*100*	*387.923.100*	*100*	*424.431.000*	*100*	*1.328.110.100*	DINAKERKOP UKM
207	3	4		*Persentase LPK yang mendapatkan Perijinan*	*%*	*100*	*21.250.000*	*100*	*29.089.000*	*100*	*29.299.000*	*100*	*79.638.000*	DINAKERKOP UKM
207	3	5		*Persentase Produktivitas pada Perusahaan Kecil*	*%*		*-*		*0*	*5.65*	*21.000.000*	*6.7*	*42.000.000*	DINAKERKOP UKM
207	4		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA				46.276.600		117.638.000		118.095.000		282.009.600	DINAKERKOP UKM
207	4	1		*Prosentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten/kota*	*%*	*30*	*46.276.600*	*40*	*117.638.000*	*50*	*118.095.000*	*50*	*282.009.600*	DINAKERKOP UKM
218	2		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL				46.206.500		125.196.000		125.658.000		297.060.500	DPMPTSP

Kode / Hasta Krida ke-			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								OPD
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp. RPJMD	Target	Rp. RPJMD	Target	Rp. RPJMD	Target	Rp. RPJMD	
218	2	1		*Persentase pemberian fasilitasi/ insentif penanaman modal*	*%*	*70*	*46.206.500*	*75*	*125.196.000*	*80*	*125.658.000*	*80*	*297.060.500*	DPMPTSP
218	3		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL				76.381.930		140.320.000		141.074.000		357.775.930	DPMPTSP
218	3	1		*Persentase peningkatan jumlah investor yang berminat menanamkan modal di Kabupaten Banyumas*	*%*	*75*	*76.381.930*	*80*	*140.320.000*	*85*	*141.074.000*	*85*	*357.775.930*	DPMPTSP
6			**PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR MERATA DAN MEMADAI**				**114.903.845.490**		**119.886.925.500**		**130.383.009.000**		**365.173.779.990**	
103	2		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)				31.940.584.955		37.318.060.500		30.986.355.000		100.245.000.455	DPU
103	2	1		*Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di wilayah sungai kewenangan Kab/kota*		*50*	*10.961.001.575*	*60*	*16.412.028.000*	*75*	*11.216.576.000*	*75*	*38.589.605.575*	DPU
103	2	2		*Rasio luas daerah irigasi kewenangan kab/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi*		*80*	*20.979.583.380*	*82*	*20.906.032.500*	*84*	*19.769.779.000*	*84*	*61.655.394.880*	DPU
103	10		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				82.963.260.535		82.568.865.000		99.396.654.000		264.928.779.535	DPU
103	10	1		*Tingkat kemantapan jalan kab/kota*		*40*	*82.963.260.535*	*50*	*82.568.865.000*	*60*	*99.396.654.000*	*60*	*264.928.779.535*	DPU
7			**MENGGERAKKAN INDUSTRI KERAKYATAN, PARIWISATA PERDESAAN, INDUSTRI KREATIF**				**30.343.414.508**		**6.612.275.561**		**6.520.618.870**		**43.476.308.939**	

Kode / Hasta Krida ke-			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								OPD
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp. RPJMD	Target	Rp. RPJMD	Target	Rp. RPJMD	Target	Rp. RPJMD	
213	4		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA				4.504.939.508		4.460.463.561		4.558.897.000		13.524.300.069	DINSOSPERMASDES
213	4	1		*Persentase desa dengan administrasi baik*	*%*	*30*	*4.504.939.508*	*30*	*4.460.463.561*	*40*	*4.558.897.000*	*100*	*13.524.300.069*	DINSOSPERMASDES
326	2		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA				25.528.475.000		1.035.414.000		944.256.250		27.508.145.250	DINPORA BUDPAR
326	2	1		*Persentase tingkat layanan destinasi wisata*	*%*	*50*	*25.528.475.000*	*667*	*1.035.414.000*	*100*	*944.256.250*	*100*	*27.508.145.250*	DINPORA BUDPAR
326	5		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF				220.000.000		830.788.000		776.999.250		1.827.787.250	DINPORA BUDPAR
326	5	1		*Persentase SDM kepariwisataan yang bersertifikasi*	*%*	*60*	*220.000.000*	*80*	*780.788.000*	*100*	*626.999.250*	*100*	*1.627.787.250*	DINPORA BUDPAR
326	5	2		*Persentase pelaku ekonomi kreatif sub sektor pariwisata yang aktif*	*%*		*-*	*32.7*	*50.000.000*	*33.3*	*150.000.000*	*33.3*	*200.000.000*	DINPORA BUDPAR
217	8		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM				90.000.000		285.610.000		240.466.370		616.076.370	DINAKERKOP UKM
217	8	1		*Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan*	*%*	*0.243*	*90.000.000*	*0.249*	*285.610.000*	*0.254*	*240.466.370*	*0.254*	*616.076.370*	DINAKERKOP UKM
8			**GERAKAN MEMAKMURKAN PESANTREN DAN MASJID**				**9.552.038.495**		**9.602.350.095**		**9.682.871.000**		**28.837.259.590**	
401	2		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				9.552.038.495		9.602.350.095		9.682.871.000		28.837.259.590	SETDA
401	2	1		*Skor Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)*	*Skor*	*4,21*	*297.960.350*	*422*	*299.027.375*	*423*	*301.529.000*	*423*	*898.516.725*	SETDA

Kode / Hasta Krida ke-			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								OPD
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp. RPJMD	Target	Rp. RPJMD	Target	Rp. RPJMD	Target	Rp. RPJMD	
401	2	2		*Persentase kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat yang disusun*	*%*	*100*	*8.561.887.400*	*100*	*8.600.248.000*	*100*	*8.672.269.000*	*100*	*25.834.404.400*	SETDA
401	2	3		*persentase kasus kasus hukum yang ditangani*	*%*	*100*	*642.190.970*	*100*	*652.895.720*	*100*	*658.475.000*	*100*	*1.953.561.690*	SETDA
401	2	4		*Persentase kerjasama Daerah dan pengembangan potensi daerah yang tersusun*	*%*	*100*	*49.999.775*	*100*	*50.179.000*	*100*	*50.598.000*	*100*	*150.776.775*	SETDA

Sedangkan program pembangunan daerah Kabupaten Banyumas secara keseluruhan yang mendukung visi Bupati - Wakil Bupati Banyumas Periode 2018-2023, masing-masing misi tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 6.5
Program Pembangunan Kabupaten Banyumas Tahun 2021-2023 Pendukung Visi-Misi Bupati

No.	Tujuan	No.	Indikator Tujuan	No.	Sasaran	No.	Indikator Sasaran	Satuan	2021	2022	2023	Kondisi Akhir	No.	Program	SKPD
1	Pewujudan tata kelola pemerintahan yang baik	1	Indek Reformasi Birokrasi	-		-	-		70	73	75	75			
				1	Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	1	Opini BPK status WTP terhadap laporan keuangan daerah	%	100	100	100	100	*1*	*X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA*	*BKAD*
															BAPENDA
													2	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	BKAD
													3	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	BKAD
													4	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	BAPENDA
						2	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)		76	78	80	80	*1*	*X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA*	*SETWAN*
															BAPPEDA LITBANG
															BKPSDM
															DINARPUSDA
															SETDA
													5	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	SETWAN
													6	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	BKPSDM

No.	Tujuan	No.	Indikator Tujuan	No.	Sasaran	No.	Indikator Sasaran	Satuan	2021	2022	2023	Kondisi Akhir	No.	Program	SKPD
													7	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	BAPPEDA LITBANG
													8	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	SETDA
													19	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	BAPPEDA LITBANG
													10	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	DINARPUSDA
													11	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	BKPSDM
													12	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	SETDA
													13	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	BAPPEDA LITBANG
													14	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	DINARPUSDA

No.	Tujuan	No.	Indikator Tujuan	No.	Sasaran	No.	Indikator Sasaran	Satuan	2021	2022	2023	Kondisi Akhir	No.	Program	SKPD
													15	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	DINARPUSDA
						3	Nilai Survey Eksternal Persepsi Korupsi		3,86	3,87	3,88	3,88	*1*	*X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA*	*INSPEKTORAT*
													16	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	INSPEKTORAT
						4	Nilai Maturitas SPIP	Level	2	2	3	3	17	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	SETDA
													18	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	BAPPEDA LITBANG
													19	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	INSPEKTORAT
				2	Meningkatnya birokrasi yang kapabel	5	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)		3,1	3,2	3,3	3,3	20	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	DINKOMINFO
													21	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	DINKOMINFO

No.	Tujuan	No.	Indikator Tujuan	No.	Sasaran	No.	Indikator Sasaran	Satuan	2021	2022	2023	Kondisi Akhir	No.	Program	SKPD
													1	*X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA*	*DINKOMINFO*
						6	Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP)		95	96	97	97	22	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	DINKOMINFO
													23	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	DINKOMINFO
				3	Meningkatnya pelayanan publik yang prima	7	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP)	.	81	82	83	83	24	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KECAMATAN
													1	*X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA*	*KECAMATAN*
													25	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	KECAMATAN
													26	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	DINSOSPER
															MASDES
													27	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	DINDUKCAPIL

No.	Tujuan	No.	Indikator Tujuan	No.	Sasaran	No.	Indikator Sasaran	Satuan	2021	2022	2023	Kondisi Akhir	No.	Program	SKPD
													28	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	DINDUKCAPIL
													29	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	DINDUKCAPIL
													30	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	DINDUKCAPIL
													31	PROGRAM PENATAAN DESA	DINSOSPER
															MASDES
													32	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	KECAMATAN
													33	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	DINSOSPER
															MASDES
													34	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	DPMPTSP
													35	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	KECAMATAN
													36	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	DINSOSPER
															MASDES

No.	Tujuan	No.	Indikator Tujuan	No.	Sasaran	No.	Indikator Sasaran	Satuan	2021	2022	2023	Kondisi Akhir	No.	Program	SKPD
2	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia terutama derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat	2	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	-		-	-		72,18	72,38	72,58	72,58			
				4	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	8	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7,53	7,54	7,55	7,55	37	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	DINDIK
													1	*X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA*	*DINDIK*
						9	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,87	12,89	12,91	12,91	38	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	DINARPUSDA
													39	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	DINARPUSDA
													40	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	DINDIK
				5	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	10	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	73,73	73,83	73,93	73,93	41	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	RSUD AJIBARANG
															DINKES
															RSUD BANYUMAS
													42	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	DINKES
															RSUD BANYUMAS
															RSUD AJIBARANG
													1	*X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN*	*RSUD AJIBARANG*
															DINKES

No.	Tujuan	No.	Indikator Tujuan	No.	Sasaran	No.	Indikator Sasaran	Satuan	2021	2022	2023	Kondisi Akhir	No.	Program	SKPD
														DAERAH KABUPATEN/ KOTA	*RSUD BANYUMAS*
													43	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	DINKES
													44	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	DINKES
				6	Meningkatnya pengendalian pertumbuhan penduduk	11	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	%	0,84	0,83	0,82	0,82	*1*	*X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA*	*DPPKBP3A*
													45	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	DPPKBP3A
													46	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	DPPKBP3A
													47	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	DPPKBP3A
				7	Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak	12	Indeks Pembangunan Gender (IPG)		87,65	87,66	87,67	87,67	48	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA.	DPPKBP3A
													49	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	DPPKBP3A

No.	Tujuan	No.	Indikator Tujuan	No.	Sasaran	No.	Indikator Sasaran	Satuan	2021	2022	2023	Kondisi Akhir	No.	Program	SKPD
													50	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	DPPKBP3A
													51	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	DPPKBP3A
						13	Nilai Kabupaten Layak Anak		600	625	650	650	52	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	DPPKBP3A
													53	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	DPPKBP3A
3	Meningkatkan pembangunan yang berkeadilan	3	Persentase penduduk miskin	-		-	-	%	12,51	11,76	11	11,76			
				8	Meningkatnya perlindungan, pemenuhan kebutuhan dasar dan pemberdayaan masyarakat miskin	14	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	51,57	51,62	51,66	51,66	54	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	DINSOSPER MASDES
													55	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	DINSOSPER MASDES
													56	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	DINSOSPER MASDES
													1	*X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA*	*DINSOSPER* *MASDES*
													57	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	DINSOSPER MASDES
													58	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM	DINSOSPER MASDES

No.	Tujuan	No.	Indikator Tujuan	No.	Sasaran	No.	Indikator Sasaran	Satuan	2021	2022	2023	Kondisi Akhir	No.	Program	SKPD
														PAHLAWAN	
						15	Persentase Lingkungan Permukiman yang layak huni	%	73,29	75,59	79,16	79,16	59	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	DINPERKIM
													60	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	DINPERKIM
													61	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	DINPERKIM
													62	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	DINPERKIM
						16	Persentase penanganan korban bencana	%	100	100	100	100	63	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	DINPERKIM
4	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan meningkatkan peran sektor pertanian dan non pertanian	4	Pertumbuhan Ekonomi	-		-	-	%	4,1	4,5	5	5			
				9	Meningkatnya pertumbuhan industri pengolahan dan perdagangan	17	Persentase Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor	%	4,49	4,51	4,52	4,52	64	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	DINPERINDAG
													1	*X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA*	*DINPERINDAG*
													65	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	DINPERINDAG

No.	Tujuan	No.	Indikator Tujuan	No.	Sasaran	No.	Indikator Sasaran	Satuan	2021	2022	2023	Kondisi Akhir	No.	Program	SKPD
													66	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	DINPERINDAG
													67	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	DINPERINDAG
													68	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	DINPERINDAG
													69	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	DINPERINDAG
						18	Persentase Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	%	5,83	5,85	5,86	5,86	70	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	DINPERINDAG
													71	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	DINPERINDAG
													72	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	DINPERINDAG
				10	Meningkatnya produksi pertanian melalui pengembangan komoditas	19	Persentase Pertumbuhan PDRB sektor pertanian Kehutanan dan	%	2,26	3,11	3,91	3,91	*1*	*X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA*	*DINKANNAK*

No.	Tujuan	No.	Indikator Tujuan	No.	Sasaran	No.	Indikator Sasaran	Satuan	2021	2022	2023	Kondisi Akhir	No.	Program	SKPD
					unggulan, inovasi produk dan perlindungan kepada petani		Perikanan						73	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	DINKANNAK
													74	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	DINKANNAK
													75	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	DINKANNAK
													76	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	DINPERTAN KP
													77	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	DINKANNAK
													78	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	DINKANNAK
													79	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	DINKANNAK DINPERTAN KP
													80	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN	DINKANNAK DINPERTAN KP

No.	Tujuan	No.	Indikator Tujuan	No.	Sasaran	No.	Indikator Sasaran	Satuan	2021	2022	2023	Kondisi Akhir	No.	Program	SKPD
														SARANA PERTANIAN	
													81	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	DINPERTAN KP
													82	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	DINKANNAK
		5	PDRB per Kapita	-		-	-	juta rupiah	32,332	33,725	35,513	35,513			
5	Meningkatkan ketahanan pangan melalui sektor agribisnis	6	Indeks Ketahanan Pangan	-		-	-		74,02	74,03	74,04	74,04			
				11	Meningkatnya inovasi produk dan tata kelola hasil tanaman pangan dan agrobisnis untuk ketersediaan pangan utama	20	Persentase Ketersediaan Pangan Utama	%	96	96	97	97	*1*	*X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA*	*DINPERTAN KP*
													83	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	DINPERTAN KP
													84	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	DINPERTAN KP
													85	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	DINPERTAN KP

No.	Tujuan	No.	Indikator Tujuan	No.	Sasaran	No.	Indikator Sasaran	Satuan	2021	2022	2023	Kondisi Akhir	No.	Program	SKPD
													86	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	DINPERTAN KP
6	Perwujudan kawasan peruntukan industri dan kawasan strategis yang berwawasan lingkungan untuk perluasan kesempatan kerja	7	Persentase Pertumbuhan Nilai investasi Daerah	-		-	-	%	2	2	2	10			
				12	Meningkatnya investasi daerah	21	Nilai investasi daerah	Milyar Rupiah	500	545	600	600	87	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	DPMPTSP
													88	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	DPMPTSP
													89	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	DPMPTSP
													90	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	DPMPTSP
													1	*X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA*	*DPMPTSP*
		8	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	-		-	-	%	5,75	5	4,5	4,5			
				13	Meningkatnya kesempatan berusaha	22	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	66,66	66,67	66,68	66,68	*1*	*X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA*	*DINAKERKOP UKM*

No.	Tujuan	No.	Indikator Tujuan	No.	Sasaran	No.	Indikator Sasaran	Satuan	2021	2022	2023	Kondisi Akhir	No.	Program	SKPD
													91	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	DINAKERKOP UKM
													92	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	DINAKERKOP UKM
													93	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	DINAKERKOP UKM
													94	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	DINAKERKOP UKM
													95	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	DINAKERKOP UKM
		9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	-		-	-		63,97	64,06	64,15	64,15			
				14	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dengan mengurangi dampak kerusakan lingkungan hidup	23	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)		63,97	64,06	64,15	64,15	96	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	DLH
													97	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	DLH

No.	Tujuan	No.	Indikator Tujuan	No.	Sasaran	No.	Indikator Sasaran	Satuan	2021	2022	2023	Kondisi Akhir	No.	Program	SKPD
													98	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	DLH
													99	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	DLH
													1	*X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA*	*DLH*
													100	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	DLH
													101	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	DLH
													102	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	DLH

No.	Tujuan	No.	Indikator Tujuan	No.	Sasaran	No.	Indikator Sasaran	Satuan	2021	2022	2023	Kondisi Akhir	No.	Program	SKPD
						24	Persentase Kinerja Pengelolaan Sampah	%	24	26	27	27	103	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	DLH
				15	Meningkatnya kualitas perencanaan, pemanfaatan, pengendalian tata ruang serta pengembangan kawasan strategis yang berwawasan lingkungan	25	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang	%	99,983	99,984	99,985	99,985	104	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	DINPERKIM
													105	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	DINPERKIM
				16	Meningkatnya penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim	26	Indeks Resiko Bencana		185	180	175	175	*1*	*X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA*	*BPBD*
													106	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	BPBD
7	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat	10	Persentase Kinerja Infrastruktur	-		-	-	%	53,31	69,33	78,87	78,87			
				17	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang merata dan memadai	27	Persentase Kinerja Infrastruktur Perhubungan	%	33,335	63,075	78,57	78,57	*1*	*X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA*	*DINHUB*
													107	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	DINHUB

No.	Tujuan	No.	Indikator Tujuan	No.	Sasaran	No.	Indikator Sasaran	Satuan	2021	2022	2023	Kondisi Akhir	No.	Program	SKPD
													108	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	DINHUB
						28	Persentase Kinerja Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	%	73,29	75,59	79,16	79,16	*1*	*X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA*	*DPU*
															DINPERKIM
													109	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	DPU
													110	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	DLH
													111	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	DPU
													112	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	DPU
													113	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	DINPERKIM
													114	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	DPU
															DINPERKIM

No.	Tujuan	No.	Indikator Tujuan	No.	Sasaran	No.	Indikator Sasaran	Satuan	2021	2022	2023	Kondisi Akhir	No.	Program	SKPD
													115	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	DINPERKIM
													116	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	DPU
													117	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	DPU
8	Menumbuhkan dan mengembangkan Daya Tarik pariwisata dan ekonomi kreatif	11	Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PAD	-		-	-	%	4	5	7	7			
				18	Meningkatnya Industri Pariwisata dan ekonomi kreatif yang terintegrasi berbasis potensi sumber daya lokal	29	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisata	%	5,48	5,48	6,35	6,35	118	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	DINPORABUDPAR
													119	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	DINPORABUDPAR
													120	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	DINPORABUDPAR
						30	Persentase Peningkatan Pelaku Ekonomi Kreatif	%	5	10	15	15	121	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	DINPORABUDPAR
				19	Meningkatnya pertumbuhan pelaku ekonomi kerakyatan	31	Persentase Koperasi Sehat	%	28,88	30	31,11	31,11	122	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	DINAKERKOP UKM

No.	Tujuan	No.	Indikator Tujuan	No.	Sasaran	No.	Indikator Sasaran	Satuan	2021	2022	2023	Kondisi Akhir	No.	Program	SKPD
					melalui pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikr								123	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	DINAKERKOP UKM
													124	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	DINAKERKOP UKM
													125	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	DINAKERKOP UKM
													126	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	DINAKERKOP UKM
						32	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro	%	0,244	0,249	0,254	0,254	127	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	DINAKERKOP UKM
													128	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	DINAKERKOP UKM
9	Meningkatkan aktualisasi nilai-nilai budaya, agama dan	12	Angka Kriminalitas	-		-	-	per 10.000 penduduk	1,656	1,586	1,516	1,516			

No.	Tujuan	No.	Indikator Tujuan	No.	Sasaran	No.	Indikator Sasaran	Satuan	2021	2022	2023	Kondisi Akhir	No.	Program	SKPD
	kebangsaan dalam kehidupan masyarakat			20	Meningkatnya kerukunan dan peran masyarakat dalam kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara serta menciptakan kehidupan masyarakat yang aman dan tentram	33	Persentase kriminalitas yang tertangani	%	50	50	50	50	129	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	KESBANGPOL
													1	*X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA*	*SATPOL PP* KESBANGPOL
													130	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	SATPOL PP
													131	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	KESBANGPOL
													132	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	SATPOL PP

No.	Tujuan	No.	Indikator Tujuan	No.	Sasaran	No.	Indikator Sasaran	Satuan	2021	2022	2023	Kondisi Akhir	No.	Program	SKPD
													133	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	KESBANGPOL
													134	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	KESBANGPOL
													135	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	KESBANGPOL
				21	Meningkatnya kelestarian kebudayaan daerah	34	Persentase Pelestarian Budaya Banyumas	%	68,68	85,29	100	100	136	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	DINPORABUDPAR
													137	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	DINPORABUDPAR
													138	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	DINPORABUDPAR
													139	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	DINPORABUDPAR

No.	Tujuan	No.	Indikator Tujuan	No.	Sasaran	No.	Indikator Sasaran	Satuan	2021	2022	2023	Kondisi Akhir	No.	Program	SKPD
													140	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	DINPORABUDPAR
				22	Meningkatnya peran dan daya saing pemuda	35	Persentase peningkatan prestasi pemuda dan olahraga	%	2,59	2,94	3,27	3,27	141	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	DINPORABUDPAR
													1	*X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA*	*DINPORABUD PAR*
													142	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	DINPORABUDPAR
													143	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	DINPORABUDPAR

BAB VII
KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini dicantumkan seluruh program baik yang bersifat strategis maupun operasional dan kinerjanya menjadi tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah, beserta indikator kinerja, pagu indikatif target kinerja. Program strategis (Program pembangunan daerah) menjadi tanggung jawab bersama Kepala Perangkat Daerah dengan kepala daerah pada tingkat kebijakan, sedangkan program operasional murni menjadi tanggung jawab kepala perangkat daerah. Seluruh program yang tercantuk akan dirumuskan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.

Penganggaran program perangkat daerah memperhatikan kerangka pendanaan pembangunan, dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 7.1
Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021-2023

KAPASITAS RIIL / BELANJA	Tahun 2021 (Rp.)	Tahun 2022 (Rp.)	Tahun 2023 (Rp.)
Kapasitas Riil Keuangan	**3.845.300.923.635**	**3.820.745.108.731**	**4.001.098.487.189**
Jumlah Belanja Daerah	**3.845.300.923.635**	**3.820.745.108.731**	**4.001.098.487.189**
Belanja Operasi	**2.593.851.114.913**	**2.718.284.823.115**	**2.760.284.816.572**
Belanja Pegawai	1.611.074.344.783	1.727.213.367.988	1.762.541.034.170
Belanja Barang dan Jasa	887.861.262.074	888.403.452.995	891.322.452.995
Belanja Bunga	10.900.000.000	10.900.000.000	12.090.000.000
Belanja Hibah	67.569.521.050	74.482.639.000	75.427.466.120
Belanja Bantuan Sosial	16.445.987.006	17.285.363.132	18.903.863.287
Belanja Modal	**586.424.819.264**	**449.934.796.369**	**573.537.671.597**
Belanja Tidak Terduga	**40.000.000.000**	**5.000.000.000**	**5.000.000.000**
Belanja Transfer	**625.024.989.458**	**647.525.489.247**	**662.275.999.020**
Belanja Bagi Hasil	33.970.901.458	34.650.319.487	37.343.325.870
Belanja Bantuan Keuangan	591.054.088.000	612.875.169.760	624.932.673.150

Sumber : Bappedalitbang, BAPENDA dan BPKAD Kab. Banyumas, 2021

Berdasarkan kerangka pendanaan diatas selanjutnya dijabarkan program prioritas masing-masing perangkat daerah sebagaimana tercantum pada tabel 7.2.

Tabel 7.2.
Indikasi Rencana Program Prioritas Kabupaten Banyumas

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								OPD
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						Target Renstra	Renstra (Rp)	Target Renstra	Renstra (Rp)	Target Renstra	Renstra (Rp)	Target Renstra	Renstra (Rp)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			TOTAL				3.845.300.923.635		3.820.745.108.731		4.001.098.487.189		11.667.144.519.555	ALL
101			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				281.528.543.961		283.055.240.540		284.968.462.940		849.552.247.441	DINDIK
101	2		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				243.725.503.961		245.116.469.540		246.712.618.940		735.554.592.441	DINDIK
101	2	1		APK SD	%	102,91	147.625.693.087	102,31	148.579.746.400	101,61	149.822.005.000	101,61	446.027.444.487	DINDIK
101	2	2		APK SMP	%	95	63.389.278.674	97	63.640.866.140	99	63.719.829.940	99	190.749.974.754	DINDIK
101	2	3		APK PAUD	%	77,75	32.710.532.200	78	32.895.857.000	78,25	33.170.784.000	78,25	98.777.173.200	DINDIK
101	4		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN				37.803.040.000		37.938.771.000		38.255.844.000		113.997.655.000	DINDIK
101	4	1		Persentase formasi pendidik dan tenaga kendidikan yang terpenuhi	%	80	37.803.040.000	82	37.938.771.000	85	38.255.844.000	85	113.997.655.000	DINDIK
102			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				259.569.467.558		220.647.576.221		256.828.691.382		737.045.735.161	DINKES | RSUD AJIBARANG | RSUD BANYUMAS
102	2		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				237.002.937.185		200.470.601.931		238.520.196.029		675.993.735.145	DINKES | RSUD AJIBARANG | RSUD BANYUMAS

102	2	1		Prosentase Jenis UKM UKP sesuai standar yang terpenuhi	%	100	136.795.752.145	100	117.543.784.255	100	146.200.918.029	100	400.540.454.429	DINKES
102	2	5		Persentase ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan UKM UKP di RSUD Ajibarang	%	84	13.339.585.000	85	8.982.474.676	85	9.094.366.000	85	31.416.425.676	RSUD AJIBARANG
102	2	6		Persentase ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan UKM UKP di RSUD Banyumas	%	85	86.267.600.040	85	73.944.343.000	85	82.224.912.000	85	242.436.855.040	RSUD BANYUMAS
102	2	11		Prosentase Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Rumah Sakit Khusus Mata (RSKM) Purwokerto yang Terpenuhi	%		600.000.000		-		1.000.000.000		1.600.000.000	DINKES
102	3		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				20.986.245.200		18.298.615.740		16.408.980.803		55.693.841.743	DINKES | RSUD AJIBARANG | RSUD BANYUMAS
102	3	1		Prosentase Unsur Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai standar	%	100	10.386.245.200	100	8.817.615.740	100	6.927.980.803	100	26.131.841.743	DINKES

102	3	5		Persentase Kapasitas Sumberdaya Manusia Kesehatan yang sesuai Standar RSUD Banyumas	%	100	6.195.000.000	100	5.076.000.000	100	5.076.000.000	100	16.347.000.000	RSUD BANYUMAS
102	3	6		Persentase Kapasitas Sumberdaya Manusia Kesehatan yang sesuai Standar RSUD Ajibarang	%	100	4.405.000.000	100	4.405.000.000	100	4.405.000.000	100	13.215.000.000	RSUD AJIBARANG
102	4		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN				313.937.000		393.007.000		395.788.000		1.102.732.000	DINKES
102	4	1		Prosentase Sarana Produksi, Distribusi dan Sediaan, Farmasi, Alat Kesehatan , Makanan, Minuman yang sesuai standard	%	50	313.937.000	100	393.007.000	100	395.788.000	100	1.102.732.000	DINKES
102	5		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				1.266.348.173		1.485.351.550		1.503.726.550		4.255.426.273	DINKES
102	5	1		Prosentase Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	%	67	1.266.348.173	100	1.485.351.550	100	1.503.726.550	100	4.255.426.273	DINKES

103			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				332.175.634.291		237.003.409.350		241.201.730.250		810.380.773.891	DINPERKIM | DLH | DPU
103	2		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)				31.940.584.955		37.318.060.500		30.986.355.000		100.245.000.455	DPU
103	2	1		Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di wilayah sungai kewenangan Kab/kota		52	10.961.001.575	53	16.412.028.000	54	11.216.576.000	54	38.589.605.575	DPU
103	2	2		Rasio luas daerah irigasi kewenangan kab/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi		80,1	20.979.583.380	81,1	20.906.032.500	82,1	19.769.779.000	82,1	61.655.394.880	DPU
103	3		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				10.552.932.000		11.082.972.000		10.721.837.000		32.357.741.000	DINPERKIM
103	3	1		Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan permukaan dan bukan jaringan	%	74,46	10.552.932.000	75,58	11.082.972.000	77,08	10.721.837.000	77,08	32.357.741.000	DINPERKIM

				perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh Kab/Kota										
103	4		PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL				10.688.047.351		12.337.418.850		12.685.910.250		35.711.376.451	DLH
103	4	1		persentase peningkatan infrastruktur pengelolaan sampah	%	5	10.688.047.351	5	12.337.418.850	5	12.685.910.250	5	35.711.376.451	DLH
103	5		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				16.407.707.677		17.447.828.000		16.834.726.000		50.690.261.677	DINPERKIM
103	5	1		Persentase rumah tinggal berakses sanitasi	%	88	16.407.707.677	90	17.447.828.000	92	16.834.726.000	92	50.690.261.677	DINPERKIM
103	6		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE				3.772.826.263		7.125.544.000		3.853.576.000		14.751.946.263	DINPERKIM | DPU
103	6	1		Persentase panjang drainase perkotaan kondisi baik	%	70,29	2.489.861.263	71,62	5.317.973.000	72,94	2.555.244.000	72,94	10.363.078.263	DPU
103	6	2		Persentase panjang drainase lingkungan kondisi baik	%	11,53	1.282.965.000	11,58	1.807.571.000	11,63	1.298.332.000	11,63	4.388.868.000	DINPERKIM
103	7		PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN				12.525.070.000		13.323.709.000		12.595.095.000		38.443.874.000	DINPERKIM

103	7	1		Rasio Permukiman Layak Huni	%	79,9	12.525.070.000	79,99	13.323.709.000	80,1	12.595.095.000	80,1	38.443.874.000	DINPERKIM
103	8		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG				114.280.814.130		40.942.853.000		34.678.052.000		189.901.719.130	DPU
103	8	1		Persentase bangunan gedung Pemerintah Daerah yang dikelola	%	69,7	114.280.814.130	72,7	40.942.853.000	75,7	34.678.052.000	75,7	189.901.719.130	DPU
103	9		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA				47.984.714.250		13.251.250.000		18.335.383.000		79.571.347.250	DPU
103	9	1		Persentase luas kawasan yang dilakukan penataan	%	50	47.984.714.250	65	13.251.250.000	80	18.335.383.000	80	79.571.347.250	DPU
103	10		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				82.963.260.535		82.568.865.000		99.396.654.000		264.928.779.535	DPU
103	10	1		Tingkat kemantapan jalan kab/kota		40	82.963.260.535	50	82.568.865.000	60	99.396.654.000	60	264.928.779.535	DPU
103	11		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI				405.195.130		927.487.000		431.059.000		1.763.741.130	DPU
103	11	1		Persentase realisasi penyedia jasa konstruksi yang dibina	%	25,42	405.195.130	30,27	927.487.000	35,11	431.059.000	35,11	1.763.741.130	DPU
103	12		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG				654.482.000		677.422.000		683.083.000		2.014.987.000	DINPERKIM
103	12	1		Presentase Dokumen penyelenggaraan	%	100	654.482.000	100	677.422.000	100	683.083.000	100	2.014.987.000	DINPERKIM

				penataan ruang yang diterbitkan										
104			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				6.851.360.400		7.931.326.000		10.486.964.000		25.269.650.400	DINPERKIM
104	2		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN				-		80.000.000		80.000.000		160.000.000	DINPERKIM
104	2	1		Persentase ketersediaan rumah bagi korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota	%	0	-	100	80.000.000	100	80.000.000	100	160.000.000	DINPERKIM
104	3		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN				6.782.712.650		4.466.900.000		7.021.950.000		18.271.562.650	DINPERKIM
104	3	1		Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha di Kab/Kota yang ditangani	%	7,31	6.782.712.650	8,53	4.466.900.000	9,75	7.021.950.000	9,75	18.271.562.650	DINPERKIM
104	4		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH				-		3.314.176.000		3.314.176.000		6.628.352.000	DINPERKIM
104	4	1		Cakupan ketersediaan rumah layak huni	%	77,07	-	77,33	3.314.176.000	77,58	3.314.176.000	77,58	6.628.352.000	DINPERKIM
104	5		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)				68.647.750		70.250.000		70.838.000		209.735.750	DINPERKIM

104	5	1		Persentase Perumahan yang sudah dilengkapi PSU	%	88,89	68.647.750	92,59	70.250.000	96,3	70.838.000	96,3	209.735.750	DINPERKIM
105			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				5.396.014.775		5.450.845.000		6.208.183.000		17.055.042.775	BPBD | SATPOL PP
105	2		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				1.720.478.275		2.098.703.875		2.649.383.000		6.468.565.150	SATPOL PP
105	2	1		Persentase penanganan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	%	100	1.535.695.000	100	1.863.728.000	100	2.488.665.000	100	5.888.088.000	SATPOL PP
105	2	2		Persentase penanganan pelanggaran PERDA	%	100	184.783.275	100	234.975.875	100	160.718.000	100	580.477.150	SATPOL PP
105	3		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA				2.376.846.200		2.415.528.625		2.463.800.000		7.256.174.825	BPBD
105	3	1		Persentase mitigasi bencana yang dilaksanakan	%	100	560.370.325	100	578.563.875	100	595.000.000	100	1.733.934.200	BPBD
105	3	2		Persentase jumlah korban bencana alam yang selamat	%	100	1.776.697.250	100	1.831.676.625	100	1.853.800.000	100	5.462.173.875	BPBD
105	3	3		Persentase masyarakat yang mendapatkan Rehabilitasi dan	%	100	39.778.625	100	5.288.125	100	15.000.000	100	60.066.750	BPBD

				Rekonstruksi Pasca Bencana										
105	4		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN				1.298.690.300		936.612.500		1.095.000.000		3.330.302.800	SATPOL PP
105	4	1		Tingkat waktu tanggap (respons time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK)		80	1.298.690.300	80	936.612.500	80	1.095.000.000	80	3.330.302.800	SATPOL PP
106			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				4.107.465.206		4.052.873.450		4.206.361.000		12.366.699.656	DINSOSPERM ASDES
106	2		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL				584.436.475		662.236.750		603.983.000		1.850.656.225	DINSOSPERM ASDES
106	2	1		Persentase lembaga masyarakat (PSKS) yang aktif	%	30	584.436.475	39	662.236.750	40	603.983.000	50	1.850.656.225	DINSOSPERM ASDES
106	4		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				1.606.507.194		1.514.566.000		1.676.951.000		4.798.024.194	DINSOSPERM ASDES
106	4	1		Persentase PPKS terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	1.606.507.194	100	1.514.566.000	100	1.676.951.000	100	4.798.024.194	DINSOSPERM ASDES
106	5		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL				1.674.267.537		1.626.878.700		1.719.321.000		5.020.467.237	DINSOSPERM ASDES

106	5	1		Persentase PPKS yang menerima perlindungan Sosial	%	100	1.674.267.537	100	1.626.878.700	100	1.719.321.000	100	5.020.467.237	DINSOSPERMASDES
106	6		PROGRAM PENANGANAN BENCANA				90.072.350		122.784.000		118.391.000		331.247.350	DINSOSPERMASDES
106	6	1		Persentase korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat	%	100	90.072.350	100	122.784.000	100	118.391.000	100	331.247.350	DINSOSPERMASDES
106	7		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN				152.181.650		126.408.000		87.715.000		366.304.650	DINSOSPERMASDES
106	7	1		Nilai kondisi makam pahlawan terhadap standar nasional		1	152.181.650	1	126.408.000	1	87.715.000	1	366.304.650	DINSOSPERMASDES
207			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				784.310.213		864.860.100		903.825.000		2.552.995.313	DINAKERKOPUKM
207	2		PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA				-		10.000.000		10.000.000		20.000.000	DINAKERKOPUKM
207	2	1		Persentase perencanaan tenaga kerja yang tersedia	%	0	-	100	10.000.000	100	10.000.000	100	20.000.000	DINAKERKOPUKM
207	3		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA				537.006.000		438.012.100		474.730.000		1.449.748.100	DINAKERKOPUKM
207	3	2		Persentase Penerapan Program PBK	%	100	515.756.000	100	387.923.100	100	424.431.000	100	1.328.110.100	DINAKERKOPUKM

				dengan kualifikasi Klaster										
207	3	4		Persentase LPK yang mendapatkan Perijinan	%	100	21.250.000	100	29.089.000	100	29.299.000	100	79.638.000	DINAKERKOP UKM
207	3	5		Persentase Produktivitas pada Perusahaan Kecil	%	0	-	5,65	21.000.000	6,7	21.000.000	6,7	42.000.000	DINAKERKOP UKM
207	4		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA				46.276.600		117.638.000		118.095.000		282.009.600	DINAKERKOP UKM
207	4	1		Prosentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten/kota	%	30	46.276.600	40	117.638.000	50	118.095.000	50	282.009.600	DINAKERKOP UKM
207	5		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL				201.027.613		299.210.000		301.000.000		801.237.613	DINAKERKOP UKM
207	5	1		Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola yang layak (PP, PKB, LKS, Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS ketenagakerjaan)	%	7,33	201.027.613	8,18	299.210.000	9,03	301.000.000	9,03	801.237.613	DINAKERKOP UKM

208			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				760.528.800		782.630.375		789.110.000		2.332.269.175	DPPKBP3A
208	2		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				187.000.000		187.669.000		189.237.000		563.906.000	DPPKBP3A
208	2	1		Persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG	%	100	32.000.000	100	32.114.000	100	32.382.000	100	96.496.000	DPPKBP3A
208	2	2		Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD.	%	22	155.000.000	22	155.555.000	22	156.855.000	22	467.410.000	DPPKBP3A
208	3		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				251.395.000		268.475.125		270.823.000		790.693.125	DPPKBP3A
208	3	2		Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	%	100	251.395.000	100	268.475.125	100	270.823.000	100	790.693.125	DPPKBP3A
208	4		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA				20.000.000		20.071.000		20.239.000		60.310.000	DPPKBP3A

208	4	1		Persentase keluarga yang mendapat pengarahan terkait peningkatan kualitas keluarga	%	0,008	20.000.000	0,01	20.071.000	0,05	20.239.000	0,05	60.310.000	DPPKBP3A
208	5		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK				-		5.017.000		5.059.000		10.076.000	DPPKBP3A
208	5	1		Persentase perangkat daerah yang memanfaatkan data gender dan anak sebagai dasar perencanaan pembangunan	%	0	-	35,71	5.017.000	42,86	5.059.000	42,86	10.076.000	DPPKBP3A
208	6		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)				20.948.800		21.024.000		21.199.000		63.171.800	DPPKBP3A
208	6	1		Persentase lembaga Pemenuhan Hak Anak (PHA) yang sesuai standar yang aktif (Forum Anak Kabupaten dan Kecamatan)	%	100	20.948.800	100	21.024.000	100	21.199.000	100	63.171.800	DPPKBP3A
208	7		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK				281.185.000		280.374.250		282.553.000		844.112.250	DPPKBP3A
208	7	1		Rasio anak korban kekerasan	Angka	0,011	281.185.000	0,009	280.374.250	0,007	282.553.000	0,007	844.112.250	DPPKBP3A
209			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				766.508.999		2.439.636.000		777.190.000		3.983.334.999	DINPERTANKP

209	2		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN				638.621.000		1.942.297.000		647.664.000		3.228.582.000	DINPERTANKP
209	2	1		Tingkat ketersediaan energy	%	94	638.621.000	95	1.942.297.000	96	647.664.000	96	3.228.582.000	DINPERTANKP
209	3		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT				87.888.000		363.311.000		89.050.000		540.249.000	DINPERTANKP
209	3	1		Konsumsi protein	gram/kapita/hari	52,55	55.000.000	54,8	330.195.000	57	55.657.000	57	440.852.000	DINPERTANKP
209	3	2		Stabilitas harga dan pasokan pangan	%	98	32.888.000	99	33.116.000	100	33.393.000	100	99.397.000	DINPERTANKP
209	4		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN				29.999.999		80.106.000		30.358.000		140.463.999	DINPERTANKP
209	4	1		Persentase peningkatan jumlah desa rawan pangan yang ditangani	%	5	29.999.999	5	80.106.000	10	30.358.000	10	140.463.999	DINPERTANKP
209	5		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN				10.000.000		53.922.000		10.118.000		74.040.000	DINPERTANKP
209	5	1		Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	%	95,43	10.000.000	96,43	53.922.000	97,43	10.118.000	97,43	74.040.000	DINPERTANKP
210			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				212.500.000		250.897.000		252.994.000		716.391.000	DINPERKIM
210	1		PROGRAM				212.500.000		250.897.000		252.994.000		716.391.000	DINPERKIM

	0		PENATAGUNAAN TANAH											
210	1 0	1		Presentase Luas Petak Tanah yang tertata (bersertifikat)	%	38,83	212.500.000	39,16	250.897.000	39,47	252.994.000	39,47	716.391.000	DINPERKIM
211			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				53.570.665.650		11.438.329.500		13.534.000.000		78.542.995.150	DLH
211	2		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP				85.000.000		725.000.000		1.265.000.000		2.075.000.000	DLH
211	2	1		Persentase ketersediaan dokumen lingkungan hidup	%	100	85.000.000	100	725.000.000	100	1.265.000.000	100	2.075.000.000	DLH
211	3		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				622.000.000		675.000.000		825.000.000		2.122.000.000	DLH
211	3	1		Persentase kegiatan pengendalian, pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	%	70	622.000.000	100	675.000.000	100	825.000.000	100	2.122.000.000	DLH
211	4		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)				35.355.130.000		6.245.299.000		7.088.000.000		48.688.429.000	DLH
211	4	1		Persentase RTH publik	%	7,70	35.355.130.000	7,99	6.245.299.000	8,28	7.088.000.000	8,28	48.688.429.000	DLH

211	5		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)				-		150.000.000		225.000.000		375.000.000	DLH
211	5	1		Persentase Rincian Teknis (Rintek) pengelolaan Limbah B3 yang diterbitkan	%	0	-	100	150.000.000	100	225.000.000	100	375.000.000	DLH
211	6		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)				109.800.000		375.000.000		400.000.000		884.800.000	DLH
211	6	1		Persentase Ketaatan penanggungjawab usaha dan atau kegiatan terhadap ijin lingkungan, ijin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh Pemda	%	60	109.800.000	70	375.000.000	80	400.000.000	80	884.800.000	DLH
211	8		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				60.000.000		200.000.000		255.000.000		515.000.000	DLH

211	8	1		Persentase jumlah SDM yang mengikuti pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	%	100	60.000.000	100	200.000.000	100	255.000.000	100	515.000.000	DLH
211	10		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP				90.000.000		100.000.000		125.000.000		315.000.000	DLH
211	10	1		Persentase sengketa dan pengaduan lingkungan hidup yang ditangani	%	100	90.000.000	100	100.000.000	100	125.000.000	100	315.000.000	DLH
211	11		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				17.248.735.650		2.968.030.500		3.351.000.000		23.567.766.150	DLH
211	11	1		Persentase sampah yang terkurangi melalui 3R	%	24	17.248.735.650	26	2.968.030.500	27	3.351.000.000	27	23.567.766.150	DLH
212			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				1.402.569.625		900.991.625		942.598.000		3.246.159.250	DINDUKCAPIL
212	2		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK				831.818.525		255.000.000		330.000.000		1.416.818.525	DINDUKCAPIL
212	2	1		Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk		95	831.818.525	96	255.000.000	97	330.000.000	97	1.416.818.525	DINDUKCAPIL
212	3		PROGRAM PENCATATAN SIPIL				89.560.050		135.500.000		106.627.000		331.687.050	DINDUKCAPIL
212	3	1		Persentase pelayanan pencatatan sipil	%	100	89.560.050	100	135.500.000	100	106.627.000	100	331.687.050	DINDUKCAPIL

				sesuai SOP										
212	4		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN				396.236.500		380.500.000		404.775.000		1.181.511.500	DINDUKCAPIL
212	4	1		Persentase ketersediaan data dan informasi kependudukan	%	100	396.236.500	100	380.500.000	100	404.775.000	100	1.181.511.500	DINDUKCAPIL
212	5		PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN				84.954.550		129.991.625		101.196.000		316.142.175	DINDUKCAPIL
212	5	1		Persentase ketersediaan Profil Kependudukan	%	100	84.954.550	100	129.991.625	100	101.196.000	100	316.142.175	DINDUKCAPIL
213			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				6.156.931.241		6.111.268.561		6.223.499.000		18.491.698.802	DINSOSPERM ASDES
213	2		PROGRAM PENATAAN DESA				493.549.993		495.321.000		499.461.000		1.488.331.993	DINSOSPERM ASDES
213	2	1		Persentase peningkatan status desa mandiri	%	30	493.549.993	30	495.321.000	40	499.461.000	100	1.488.331.993	DINSOSPERM ASDES
213	3		PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA				31.702.500		31.815.000		32.081.000		95.598.500	DINSOSPERM ASDES
213	3	1		Persentase desa yang membentuk kerjasama antar desa	%	2	31.702.500	2	31.815.000	2	32.081.000	6	95.598.500	DINSOSPERM ASDES
213	4		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA				4.504.939.508		4.460.463.561		4.558.897.000		13.524.300.069	DINSOSPERM ASDES
213	4	1		Persentase desa	%	30	4.504.939.508	30	4.460.463.561	40	4.558.897.000	100	13.524.300.069	DINSOSPERM

				dengan administrasi baik										ASDES
213	5		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT				1.126.739.240		1.123.669.000		1.133.060.000		3.383.468.240	DINSOSPERM ASDES
213	5	1		Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang aktif	%	100	1.126.739.240	100	1.123.669.000	100	1.133.060.000	100	3.383.468.240	DINSOSPERM ASDES
214			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				9.613.509.805		9.147.179.000		9.187.304.000		27.947.992.805	DPPKBP3A
214	2		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK				82.545.000		82.832.000		83.532.000		248.909.000	DPPKBP3A
214	2	1		Rata-rata jumlah anak per keluarga	anak	2,5	82.545.000	2,4	82.832.000	2,3	83.532.000	2,3	248.909.000	DPPKBP3A
214	3		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)				8.610.658.905		8.104.652.000		8.172.446.000		24.887.756.905	DPPKBP3A
214	3	1		Rasio Petugas Pembina KB desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	%	100	4.332.696.000	100	3.811.386.000	100	3.843.244.000	100	11.987.326.000	DPPKBP3A
214	3	2		Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	40	2.943.947.905	41	2.954.466.000	42	2.979.209.000	42	8.877.622.905	DPPKBP3A
214	3	3		Presentase Kampung KB yang	%	50	1.334.015.000	65	1.338.800.000	80	1.349.993.000	80	4.022.808.000	DPPKBP3A

				terfasilitasi										
214	4		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)				920.305.900		959.695.000		931.326.000		2.811.326.900	DPPKBP3A
214	4	1		Persentase Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap kecamatan	%	7,41	920.305.900	18,52	959.695.000	25,93	931.326.000	25,93	2.811.326.900	DPPKBP3A
215			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				10.337.188.031		14.126.465.025		14.309.905.000		38.773.558.056	DINHUB
215	2		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				10.337.188.031		13.771.465.025		13.739.905.000		37.848.558.056	DINHUB
215	2	1		Persentase implementasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kab/Kota	%	0	-	100	300.000.000	100	25.000.000	100	325.000.000	DINHUB
215	2	2		Persentase ketersediaan kelengkapan jalan	%	53	8.306.507.000	56	11.161.209.000	59	11.320.885.000	59	30.788.601.000	DINHUB
215	2	3		Persentase terminal yang beroperasi sesuai ketentuan	%	66,67	623.528.500	83,3	836.971.000	100	692.294.000	100	2.152.793.500	DINHUB
215	2	4		Persentase perparkiran yang beroperasi sesuai ketentuan	%	100	227.500.000	100	180.897.000	100	182.994.000	100	591.391.000	DINHUB
215	2	5		Persentase kendaraan	%	95	333.673.875	95	393.966.000	96	597.259.000	96	1.324.898.875	DINHUB

				bermotor yang melakukan pengujian kendaraan										
215	2	6		Persentase kegiatan pengendalian dan pengawasan lalulintas	%	98	42.496.281	99	50.175.000	100	50.594.000	100	143.265.281	DINHUB
215	2	8		Persentase Jumlah Angkutan Umum (angkot, angkutdes, taksi, lainnya) yang mempunyai standar keselamatan sesuai UU LLAJ	%	100	144.500.000	100	55.610.025	100	72.036.000	100	272.146.025	DINHUB
215	2	9		Persentase pelaksanaan MRLL	%	100	658.982.375	100	792.637.000	100	798.843.000	100	2.250.462.375	DINHUB
215	3		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN				-		355.000.000		570.000.000		925.000.000	DINHUB
215	3	1		Persentase ketersediaan prasarana angkutan sungai	%	5	-	42,85	355.000.000	57,14	570.000.000	57,14	925.000.000	DINHUB
216			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				2.018.263.375		2.375.590.000		2.660.103.000		7.053.956.375	DINKOMINFO
216	2		PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK				393.468.375		470.773.000		470.773.000		1.335.014.375	DINKOMINFO
216	2	1		Persentase Perangkat Daerah yang memberikan akses informasi	%	100	393.468.375	100	470.773.000	100	470.773.000	100	1.335.014.375	DINKOMINFO

				publik										
216	3		PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA				1.624.795.000		1.904.817.000		2.189.330.000		5.718.942.000	DINKOMINFO
216	3	1		Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara on line dan terintegrasi	%	30	18.120.000	35	25.825.000	40	25.825.000	40	69.770.000	DINKOMINFO
216	3	2		Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan Pemda	%	45	1.606.675.000	50	1.878.992.000	55	2.163.505.000	55	5.649.172.000	DINKOMINFO
217			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				585.071.450		1.266.746.500		1.237.002.370		3.088.820.320	DINAKERKOP UKM
217	2		PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM				-		27.728.000		28.392.000		56.120.000	DINAKERKOP UKM
217	2	1		Presentase fasilitasi penerbitan rekomendasi izin koperasi usaha simpan pinjam	%	0	-	100	27.728.000	100	28.392.000	100	56.120.000	DINAKERKOP UKM
217	3		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI				16.881.800		35.500.000		35.500.000		87.881.800	DINAKERKOP UKM
217	3	1		Persentase pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang dilakukan	%	3,58	16.881.800	8,96	35.500.000	8,96	35.500.000	8,96	87.881.800	DINAKERKOP UKM

217	4		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI				16.881.800		35.500.000		35.500.000		87.881.800	DINAKERKOP UKM
217	4	2		Persentase Koperasi Simpan Pinjam (KSP)/Unit Simpan Pinjam (USP) yang dinilai kesehatannya	%	4,65	16.881.800	8,96	35.500.000	8,96	35.500.000	8,96	87.881.800	DINAKERKOP UKM
217	5		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN				16.881.800		35.500.000		35.500.000		87.881.800	DINAKERKOP UKM
217	5	1		Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan	%	8,96	16.881.800	13,44	35.500.000	13,44	35.500.000	13,44	87.881.800	DINAKERKOP UKM
217	6		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI				16.881.800		35.500.000		35.500.000		87.881.800	DINAKERKOP UKM
217	6	1		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha	%	4,48	16.881.800	8,96	35.500.000	8,96	35.500.000	8,96	87.881.800	DINAKERKOP UKM
217	7		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)				427.544.250		811.408.500		826.144.000		2.065.096.750	DINAKERKOP UKM
217	7	1		Persentase usaha mikro yang menjadi	%	0,95	427.544.250	1,18	811.408.500	1,42	826.144.000	1,42	2.065.096.750	DINAKERKOP UKM

				wirausaha										
217	8		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM				90.000.000		285.610.000		240.466.370		616.076.370	DINAKERKOP UKM
217	8	1		Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	%	0,243	90.000.000	0,249	285.610.000	0,254	240.466.370	0,254	616.076.370	DINAKERKOP UKM
218			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				658.966.680		1.031.526.000		1.032.251.000		2.722.743.680	DPMPTSP
218	2		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL				46.206.500		125.196.000		125.658.000		297.060.500	DPMPTSP
218	2	1		Persentase pemberian fasilitasi/ insentif penanaman modal	%	70	46.206.500	75	125.196.000	80	125.658.000	80	297.060.500	DPMPTSP
218	3		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL				76.381.930		140.320.000		141.074.000		357.775.930	DPMPTSP
218	3	1		Persentase peningkatan jumlah investor yang berminat menanamkan modal di Kabupaten Banyumas	%	75	76.381.930	80	140.320.000	85	141.074.000	85	357.775.930	DPMPTSP
218	4		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL				140.749.125		315.644.000		315.153.000		771.546.125	DPMPTSP
218	4	1		Persentase penerbitan perizinan dan non perizinan sesuai	%	90	140.749.125	90	315.644.000	90	315.153.000	90	771.546.125	DPMPTSP

				Standar Pelayanan (SP)										
218	5		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL				395.629.125		400.366.000		400.366.000		1.196.361.125	DPMPTSP
218	5	1		Persentase investor yang wajib Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	%	85	395.629.125	88	400.366.000	90	400.366.000	90	1.196.361.125	DPMPTSP
218	6		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL				-		50.000.000		50.000.000		100.000.000	DPMPTSP
218	6	1		Persentase penyajian data pada sistem informasi penanaman modal	%	0	-	80	50.000.000	85	50.000.000	85	100.000.000	DPMPTSP
219			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				6.294.729.350		8.445.209.000		8.515.789.000		23.255.727.350	DINPORABUD PAR
219	2		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN				85.429.350		95.340.000		96.137.000		276.906.350	DINPORABUD PAR
219	2	1		Persentase organisasi pemuda yang aktif	%	0	-	77	10.000.000	89	10.000.000	89	20.000.000	DINPORABUD PAR
219	2	2		Persentase peningkatan wirausaha muda	%	57,5	85.429.350	58,7	85.340.000	60	86.137.000	60	256.906.350	DINPORABUD PAR

219	3		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN				4.709.300.000		6.844.484.000		6.901.686.000		18.455.470.000	DINPORABUD PAR
219	3	1		Persentase peningkatan Pelatih Olahraga yang bersertifikasi	%	7,35	4.709.300.000	9,59	6.844.484.000	13,75	6.901.686.000	13,75	18.455.470.000	DINPORABUD PAR
219	4		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN				1.500.000.000		1.505.385.000		1.517.966.000		4.523.351.000	DINPORABUD PAR
219	4	1		Persentase kepramukaan aktif	%	100	1.500.000.000	100	1.505.385.000	100	1.517.966.000	100	4.523.351.000	DINPORABUD PAR
220			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				42.500.000		70.179.000		70.179.000		182.858.000	DINKOMINFO
220	2		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL				42.500.000		70.179.000		70.179.000		182.858.000	DINKOMINFO
220	2	1		Persentase ketersediaan data informasi dan statistik daerah	%	100	42.500.000	100	70.179.000	100	70.179.000	100	182.858.000	DINKOMINFO
221			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				166.996.500		167.595.000		167.595.000		502.186.500	DINKOMINFO
221	2		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI				166.996.500		167.595.000		167.595.000		502.186.500	DINKOMINFO
221	2	1		Tingkat keamanan informasi pemerintah		3	166.996.500	3	167.595.000	3	167.595.000	3	502.186.500	DINKOMINFO

222			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				1.481.173.000		1.601.487.000		1.619.871.000		4.702.531.000	DINPORABUD PAR
222	2		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN				521.410.000		637.038.000		642.362.000		1.800.810.000	DINPORABUD PAR
222	2	1		Persentase karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	%	83,51	521.410.000	89,69	637.038.000	100	642.362.000	100	1.800.810.000	DINPORABUD PAR
222	3		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL				265.000.000		265.951.000		268.174.000		799.125.000	DINPORABUD PAR
222	3	1		Persentase Jenis Kesenian yang dilestarikan	%	77,36	265.000.000	90,57	265.951.000	100	268.174.000	100	799.125.000	DINPORABUD PAR
222	4		PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH				-		5.000.000		5.000.000		10.000.000	DINPORABUD PAR
222	4	1		Persentase pembinaan sejarah lokal	%	0	-	66,7	5.000.000	100	5.000.000	100	10.000.000	DINPORABUD PAR
222	5		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA				54.763.000		56.201.000		56.670.000		167.634.000	DINPORABUD PAR
222	5	1		Persentase cagar budaya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah	%	25	54.763.000	32	56.201.000	40	56.670.000	40	167.634.000	DINPORABUD PAR
222	6		PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN				640.000.000		637.297.000		647.665.000		1.924.962.000	DINPORABUD PAR
222	6	1		Persentase koleksi museum yang dikelola oleh Pemerintah Daerah	%	100	640.000.000	100	637.297.000	100	647.665.000	100	1.924.962.000	DINPORABUD PAR

				Kabupaten Banyumas										
223			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				484.098.500		612.043.000		616.825.000		1.712.966.500	DINARPUSDA
223	2		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN				484.098.500		572.043.000		576.825.000		1.632.966.500	DINARPUSDA
223	2	1		Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Perpustakaan	Nilai	82,25	246.083.500	82,27	291.039.000	82,3	293.472.000	82,3	830.594.500	DINARPUSDA
223	2	2		Rata-rata jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Orang	202	238.015.000	225	281.004.000	250	283.353.000	250	802.372.000	DINARPUSDA
223	3		PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO				-		40.000.000		40.000.000		80.000.000	DINARPUSDA
223	3	1		Persentase Naskah Kuno milik masyarakat yang dialihmediakan	%	NA	-	20	40.000.000	40	40.000.000	40	80.000.000	DINARPUSDA
224			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN				182.750.000		295.769.000		297.573.000		776.092.000	DINARPUSDA
224	2		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP				182.750.000		215.769.000		217.573.000		616.092.000	DINARPUSDA
224	2	1		Persentase pengelolaan arsip statis dalam kondisi baik di Pemerintah Kab.Banyumas	%	52	121.750.000	65	125.537.000	77	126.795.000	77	374.082.000	DINARPUSDA
224	2	2		Persentase unit kerja / OPD yang mempunyai	%	20	61.000.000	27	90.232.000	35	90.778.000	35	242.010.000	DINARPUSDA

				daftar arsip sesuai standar										
224	3		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP				-		60.000.000		60.000.000		120.000.000	DINARPUSDA
224	3	1		Prosentase arsip yang dilindungi dan diselamatkan	%	NA	-	0,3	60.000.000	0,6	60.000.000	0,6	120.000.000	DINARPUSDA
224	4		PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP				-		20.000.000		20.000.000		40.000.000	DINARPUSDA
224	4	1		Prosentase arsip tertutup yang diizinkan untuk digunakan	%	NA	-	0,02	20.000.000	0,04	20.000.000	0,04	40.000.000	DINARPUSDA
325			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				1.369.464.250		1.350.000.000		1.229.098.000		3.948.562.250	DINKANNAK
325	3		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP				42.800.000		75.000.000		75.598.000		193.398.000	DINKANNAK
325	3	1		Produksi Perikanan Tangkap	Ton	932,53	42.800.000	942,32	75.000.000	956,46	75.598.000	2831,31	193.398.000	DINKANNAK
325	4		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA				1.234.982.500		1.100.000.000		978.500.000		3.313.482.500	DINKANNAK
325	4	1		Produksi Perikanan Budidaya	Ton	11095,37	1.234.982.500	11261,80	1.100.000.000	11599,65	978.500.000	33959,82	3.313.482.500	DINKANNAK
325	5		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN				50.000.000		50.000.000		50.000.000		150.000.000	DINKANNAK
325	5	1		Persentase Perairan Umum Yang Ter Re Stocking Ikan	%	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	10	150.000.000	DINKANNAK

325	6		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN				41.681.750		125.000.000		125.000.000		291.681.750	DINKANNAK
325	6	1		Produksi olahan hasil perikanan	Ton	192,29	41.681.750	196,14	75.000.000	200,06	75.000.000	588,49	191.681.750	DINKANNAK
325	6	2		Peningkatan angka konsumsi ikan	kg/kapita/tahun	0,1	-	0,1	50.000.000	0,1	50.000.000	0,1	100.000.000	DINKANNAK
326			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				26.168.325.000		2.317.817.000		2.176.643.500		30.662.785.500	DINPORABUDPAR
326	2		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA				25.528.475.000		1.035.414.000		944.256.250		27.508.145.250	DINPORABUDPAR
326	2	1		Persentase tingkat layanan destinasi wisata	%	50	25.528.475.000	66,7	1.035.414.000	100	944.256.250	100	27.508.145.250	DINPORABUDPAR
326	3		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA				419.850.000		451.615.000		455.388.000		1.326.853.000	DINPORABUDPAR
326	3	1		Persentase Capaian Pemasaran dan Promosi Pariwisata	%	52	419.850.000	73	451.615.000	97,9	455.388.000	97,9	1.326.853.000	DINPORABUDPAR
326	5		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF				220.000.000		830.788.000		776.999.250		1.827.787.250	DINPORABUDPAR
326	5	1		Persentase SDM kepariwisataan yang bersertifikasi	%	60	220.000.000	80	780.788.000	100	626.999.250	100	1.627.787.250	DINPORABUDPAR
326	5	2		Persentase pelaku ekonomi kreatif sub sektor pariwisata yang aktif	%	0	-	32,7	50.000.000	33,3	150.000.000	33,3	200.000.000	DINPORABUDPAR

327			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				9.650.480.650		13.216.195.609		15.104.305.364		37.970.981.623	DINKANNAK | DINPERTANKP
327	2		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				1.397.753.300		2.291.684.000		904.490.000		4.593.927.300	DINKANNAK | DINPERTANKP
327	2	1		Persentase peningkatan jumlah sarana pertanian	%	50	647.753.300	50	1.646.684.000	50	379.490.000	50	2.673.927.300	DINPERTANKP
327	2	2		Peningkatan Populasi Ternak	%	3	750.000.000	3	645.000.000	3	525.000.000	3	1.920.000.000	DINKANNAK
327	3		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				5.964.943.000		8.074.995.625		11.234.123.000		25.274.061.625	DINKANNAK | DINPERTANKP
327	3	1		Persentase peningkatan jumlah prasarana pertanian	%	50	5.930.387.500	50	7.487.436.525	50	11.009.123.000	50	24.426.947.025	DINPERTANKP
327	3	1		Persentase peningkatan jumlah prasarana pertanian	%		-		-		-		-	DINKANNAK
327	3	2		Persentase kawasan ternak yang dikelola	%	20	34.555.500	20	587.559.100	20	225.000.000	20	847.114.600	DINKANNAK
327	4		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER				228.650.300		422.701.000		426.098.364		1.077.449.664	DINKANNAK
327	4	1		Dokumen Peta sebaran penyakit hewan	Dokumen	1	228.650.300	1	422.701.000	1	426.098.364	3	1.077.449.664	DINKANNAK

327	5		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN				241.328.800		375.987.000		278.293.000		895.608.800	DINPERTANKP
327	5	1		Persentase kasus bencana Pertanian yang tertangani	%	40	241.328.800	50	375.987.000	60	278.293.000	60	895.608.800	DINPERTANKP
327	6		PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN				-		50.000.000		75.000.000		125.000.000	DINKANNAK
327	6	1		Persentase usaha peternakan yang berizin	%	0	-	1	50.000.000	1	75.000.000	1	125.000.000	DINKANNAK
327	7		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN				1.817.805.250		2.000.827.984		2.186.301.000		6.004.934.234	DINPERTANKP
327	7	1		Cakupan bina kelompok petani	%	85,84	1.817.805.250	93,11	2.000.827.984	100	2.186.301.000	100	6.004.934.234	DINPERTANKP
330			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				9.473.663.230		9.907.978.000		9.428.955.000		28.810.596.230	DINPERINDAG
330	2		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN				92.900.000		100.357.000		101.197.000		294.454.000	DINPERINDAG
330	2	1		Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan	%	84,44	92.900.000	84,95	100.357.000	85,19	101.197.000	85,19	294.454.000	DINPERINDAG
330	3		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN				8.685.763.230		8.950.667.000		8.452.522.000		26.088.952.230	DINPERINDAG
330	3	1		Persentase penerimaan PAD dari retribusi pelayanan pasar	%	100	8.613.913.230	100	8.275.398.000	100	8.376.624.000	100	25.265.935.230	DINPERINDAG
330	3	2		Persentase PKL yang tertata dan	%	49	71.850.000	50	675.269.000	52	75.898.000	52	823.017.000	DINPERINDAG

				terbina sesuai tempat yang diijinkan										
330	4		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING				70.000.000		80.250.000		80.837.000		231.087.000	DINPERINDAG
330	4	1		Koefisien variasi harga barang	%	15	70.000.000	15	80.250.000	15	80.837.000	15	231.087.000	DINPERINDAG
330	5		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR				150.000.000		300.000.000		313.711.000		763.711.000	DINPERINDAG
330	5	1		Nilai Ekspor Bersih Perdagangan	USD	25000000	150.000.000	30000000	300.000.000	35000000	313.711.000	35000000	763.711.000	DINPERINDAG
330	6		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN				350.000.000		351.256.000		354.191.000		1.055.447.000	DINPERINDAG
330	6	1		Persentase alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang	%	99,03	350.000.000	99,51	351.256.000	100	354.191.000	100	1.055.447.000	DINPERINDAG
330	7		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI				125.000.000		125.448.000		126.497.000		376.945.000	DINPERINDAG
330	7	1		Persentase pelaku usaha yang dipromosikan	%	0,6	125.000.000	0,7	125.448.000	0,8	126.497.000	0,8	376.945.000	DINPERINDAG
331			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				1.079.849.000		1.280.795.000		1.661.740.000		4.022.384.000	DINPERINDAG
331	2		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN				946.899.500		1.110.257.000		1.489.945.000		3.547.101.500	DINPERINDAG

			INDUSTRI											
331	2	1		Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembagunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	%	91	946.899.500	91	1.110.257.000	91	1.489.945.000	91	3.547.101.500	DINPERINDAG
331	3		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA				42.949.500		60.179.000		60.598.000		163.726.500	DINPERINDAG
331	3	1		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha industri (IUI), Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Menengah, Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang dikeluarkan oleh instansi terk	%	130	42.949.500	127	60.179.000	125	60.598.000	125	163.726.500	DINPERINDAG
331	4		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI				90.000.000		110.359.000		111.197.000		311.556.000	DINPERINDAG

			INDUSTRI NASIONAL											
331	4	1		Persentase data informasi industri yang tersedia	%	40	90.000.000	40	110.359.000	40	111.197.000	40	311.556.000	DINPERINDAG
332			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI				-		2.000.000		2.000.000		4.000.000	DINAKERKOP UKM
332	3		PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI				-		2.000.000		2.000.000		4.000.000	DINAKERKOP UKM
332	3	1		Persentase Calon Transmigran Yang Akan Ditempatkan	%	0	-	100	2.000.000	100	2.000.000	100	4.000.000	DINAKERKOP UKM
401			SEKRETARIAT DAERAH				13.305.770.045		13.742.097.081		13.558.763.986		40.606.631.112	SETDA
401	2		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				9.552.038.495		9.602.350.095		9.682.871.000		28.837.259.590	SETDA
401	2	1		Skor Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	Skor	4,21	297.960.350	4,22	299.027.375	4,23	301.529.000	4,23	898.516.725	SETDA
401	2	2		Persentase kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat yang disusun	%	100	8.561.887.400	100	8.600.248.000	100	8.672.269.000	100	25.834.404.400	SETDA
401	2	3		persentase kasus kasus hukum yang ditangani	%	100	642.190.970	100	652.895.720	100	658.475.000	100	1.953.561.690	SETDA
401	2	4		Persentase kerjasama Daerah dan	%	100	49.999.775	100	50.179.000	100	50.598.000	100	150.776.775	SETDA

				pengembangan potensi daerah yang tersusun										
401	3		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN				3.753.731.550		4.139.746.986		3.875.892.986		11.769.371.522	SETDA
401	3	1		Persentase pengembangan usaha daerah dan BUMD yang sehat dan profitable	%	100	199.999.325	100	250.717.000	100	252.394.000	100	703.110.325	SETDA
401	3	2		Persentase pelaporan kinerja pelaksanaan pembangunan tepat waktu	%	100	126.796.375	100	200.487.979	100	401.746.000	100	729.030.354	SETDA
401	3	3		Persentase jumlah paket tender pengadaan barang/jasa yang berhasil	%	100	610.587.750	100	953.341.775	100	961.309.000	100	2.525.238.525	SETDA
401	3	4		Persentase Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	%	100	2.816.348.100	100	2.735.200.232	100	2.260.443.986	100	7.811.992.318	SETDA
402			SEKRETARIAT DPRD				12.648.647.625		14.865.680.300		15.395.571.531		42.909.899.456	SETWAN
402	2		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD				12.648.647.625		14.865.680.300		15.395.571.531		42.909.899.456	SETWAN
402	2	2		Persentase Capaian penetapan dokumen penganggaran tepat waktu	%	100	1.053.008.175	100	1.505.000.000	100	1.505.000.000	100	4.063.008.175	SETWAN

402	2	3		Persentase Capaian rekomendasi hasil pengawasan kebijakan dan pembangunan daerah	%	100	1.495.854.250	100	2.860.000.000	100	2.860.000.000	100	7.215.854.250	SETWAN
402	2	4		Persentase Capaian Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	%	100	4.477.006.000	100	3.851.670.700	100	3.851.670.831	100	12.180.347.531	SETWAN
402	2	5		Persentase Capaian hasil Hearing dan RESES	%	100	980.410.000	100	1.521.628.900	100	2.050.128.900	100	4.552.167.800	SETWAN
402	2	8		Persentase Persetujuan bersama bupati dan DPRD terhadap Raperda	%	70	4.642.369.200	70	5.127.380.700	70	5.128.771.800	70	14.898.521.700	SETWAN
501			PERENCANAAN				2.029.349.310		2.575.770.593		2.675.701.606		7.280.821.509	BAPPEDA LITBANG
501	2		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH				840.453.900		1.106.579.593		1.206.510.606		3.153.544.099	BAPPEDA LITBANG
501	2	1		Persentase program RPJMD yang dijabarkan dalam RKPD	%	100	734.354.400	100	981.131.593	100	981.550.593	100	2.697.036.586	BAPPEDA LITBANG
501	2	2		Rata-rata persentase capaian indikator	%	70	106.099.500	80	125.448.000	90	224.960.013	90	456.507.513	BAPPEDA LITBANG

				kinerja Program										
501	3		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				1.188.895.410		1.469.191.000		1.469.191.000		4.127.277.410	BAPPEDA LITBANG
501	3	1		Persentase program RPJMD yang dijabarkan dalam Renstra Perangkat Daerah	%	100	1.188.895.410	100	1.469.191.000	100	1.469.191.000	100	4.127.277.410	BAPPEDA LITBANG
502			KEUANGAN				687.375.669.483		719.792.473.642		802.110.177.978		2.209.278.321.103	BAPENDA | BKAD
502	2		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				680.148.542.258		709.520.100.542		791.486.976.946		2.181.155.619.746	BKAD
502	2	1		Persentase Ketepatan Waktu Penetapan APBD	%	100	679.032.095.508	100	708.226.004.542	100	790.176.731.946	100	2.177.434.831.996	BKAD
502	2	2		Persentase Penyampaian LKPD Tepat Waktu	%	100	1.116.446.750	100	1.294.096.000	100	1.310.245.000	100	3.720.787.750	BKAD
502	3		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH				4.267.974.500		4.820.090.000		4.860.373.000		13.948.437.500	BKAD
502	3	1		Persentase perangkat daerah yang mengelola administrasi barang milik daerah dengan baik	%	95	4.267.974.500	95	4.820.090.000	98	4.860.373.000	98	13.948.437.500	BKAD
502	4		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				2.959.152.725		5.452.283.100		5.762.828.032		14.174.263.857	BAPENDA

502	4	1		Persentase Sub Komponen PAD yang realisasinya melebihi target pendapatan	%	46	2.959.152.725	50	5.452.283.100	56	5.762.828.032	56	14.174.263.857	BAPENDA
503			KEPEGAWAIAN				2.653.062.500		2.537.893.000		2.256.346.000		7.447.301.500	BKPSDM
503	2		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH				2.653.062.500		2.537.893.000		2.256.346.000		7.447.301.500	BKPSDM
503	2	1		Persentase jumlah ASN yang menduduki jabatan sesuai dengan syarat jabatan	%	95	2.653.062.500	95	2.537.893.000	95	2.256.346.000	95	7.447.301.500	BKPSDM
504			PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				1.200.000.000		1.304.308.000		1.244.373.000		3.748.681.000	BKPSDM
504	2		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				1.200.000.000		1.304.308.000		1.244.373.000		3.748.681.000	BKPSDM
504	2	2		Prosentase ASN yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan formal sesuai dengan kebutuhan	%	0,8	1.200.000.000	0,8	1.304.308.000	0,8	1.244.373.000	2,4	3.748.681.000	BKPSDM
505			PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				1.151.726.000		1.534.863.000		1.425.476.992		4.112.065.992	BAPPEDA LITBANG
505	2		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				1.151.726.000		1.534.863.000		1.425.476.992		4.112.065.992	BAPPEDA LITBANG
505	2	1		Persentase implementasi kelitbangan	%	100	1.151.726.000	100	1.534.863.000	100	1.425.476.992	100	4.112.065.992	BAPPEDA LITBANG
601			INSPEKTORAT DAERAH				1.459.853.300		1.471.961.525		1.624.007.000		4.555.821.825	INSPEKTORAT

601	2		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN				960.607.300		971.094.000		1.118.785.000		3.050.486.300	INSPEKTORAT
601	2	1		Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) APIP yang diselesaikan	%	45	210.000.000	50	325.094.000	55	340.000.000	55	875.094.000	INSPEKTORAT
601	2	2		Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) BPK RI yang diselesaikan	%	94	750.607.300	95	646.000.000	96	778.785.000	96	2.175.392.300	INSPEKTORAT
601	3		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI				499.246.000		500.867.525		505.222.000		1.505.335.525	INSPEKTORAT
601	3	1		Persentase Capaian Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah)	%	85	499.246.000	86	500.867.525	87	505.222.000	87	1.505.335.525	INSPEKTORAT

701			KECAMATAN				12.308.443.584		9.357.333.381		9.610.318.013		31.276.094.978	KEC. AJIBARANG | KEC. BANYUMAS | KEC. BATURRADEN | KEC. CILONGOK | KEC. GUMELAR | KEC. JATILAWANG | KEC. KALIBAGOR | KEC. KARANGLEWAS | KEC. KEBASEN | KEC. KEDUNGBANTENG | KEC. KEMBARAN | KEC. KEMRANJEN | KEC. LUMBIR | KEC. PATIKRAJA | KEC. PEKUNCEN | KEC. PURWOJATI | KEC. PWT BARAT | KEC. PWT SELATAN | KEC. PWT TIMUR | KEC.

														PWT UTARA | KEC. RAWALO | KEC. SOKARAJA | KEC. SOMAGEDE | KEC. SUMBANG | KEC. SUMPIUH | KEC. TAMBAK | KEC. WANGON
701	2		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				749.522.140		870.233.300		835.457.000		2.455.212.440	KEC. AJIBARANG | KEC. BANYUMAS | KEC. BATURRADEN | KEC. CILONGOK | KEC. GUMELAR | KEC. JATILAWANG | KEC. KALIBAGOR | KEC. KARANGLEWAS | KEC. KEBASEN | KEC. KEDUNGBANT

														ENG | KEC. KEMBARAN | KEC. KEMRANJEN | KEC. LUMBIR | KEC. PATIKRAJA | KEC. PEKUNCEN | KEC. PURWOJATI | KEC. PWT BARAT | KEC. PWT SELATAN | KEC. PWT TIMUR | KEC. PWT UTARA | KEC. RAWALO | KEC. SOKARAJA | KEC. SOMAGEDE | KEC. SUMBANG | KEC. SUMPIUH | KEC. TAMBAK | KEC. WANGON
701	2	1		Persentase pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat	%	100	13.500.000	100	14.067.500	100	15.179.000	100	42.746.500	KEC. PWT UTARA

				Kecamatan										
701	2	1		Persentase pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	%	100	10.102.000	100	11.500.000	100	12.649.000	100	34.251.000	KEC. PWT TIMUR
701	2	1		Persentase pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	%	100	6.910.500	100	8.145.000	100	8.227.000	100	23.282.500	KEC. PWT SELATAN
701	2	1		Persentase pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	%	100	4.500.000	100	10.200.000	100	4.553.000	100	19.253.000	KEC. PWT BARAT
701	2	2		Persentase pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik	%	100	9.900.000	100	9.900.000	100	10.018.000	100	29.818.000	KEC. KARANGLEWAS
701	2	2		Persentase pemohon Pelayanan di	%	100	17.500.000	100	17.544.600	100	17.708.000	100	52.752.600	KEC. JATILAWANG

				Kecamatan yang terlayani dengan baik										
701	2	2		Persentase pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik	%	100	36.250.000	100	35.280.000	100	36.684.000	100	108.214.000	KEC. GUMELAR
701	2	2		Persentase pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik	%	100	15.600.000	100	16.450.000	100	15.785.000	100	47.835.000	KEC. CILONGOK
701	2	2		Persentase pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik	%	100	16.514.000	100	11.850.000	100	11.850.000	100	40.214.000	KEC. BATURRADEN
701	2	2		Persentase pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik	%	100	94.700.000	100	118.701.000	100	113.341.000	100	326.742.000	KEC. BANYUMAS
701	2	2		Persentase pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik	%	100	12.725.000	100	18.420.000	100	12.876.000	100	44.021.000	KEC. AJIBARANG
701	2	2		Persentase pemohon Pelayanan di	%	100	15.550.000	100	17.561.000	100	17.708.000	100	50.819.000	KEC. WANGON

				Kecamatan yang terlayani dengan baik										
701	2	2		Persentase pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik	%	100	29.024.000	100	29.124.000	100	29.373.000	100	87.521.000	KEC. TAMBAK
701	2	2		Persentase pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik	%	100	22.800.000	100	22.880.000	100	23.072.000	100	68.752.000	KEC. SUMPIUH
701	2	2		Persentase pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik	%	100	13.077.000	100	13.111.000	100	13.232.000	100	39.420.000	KEC. SUMBANG
701	2	2		Persentase pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik	%	100	17.500.000	100	16.000.000	100	17.708.000	100	51.208.000	KEC. KALIBAGOR
701	2	2		Persentase pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik	%	100	12.600.000	100	16.250.000	100	12.750.000	100	41.600.000	KEC. SOMAGEDE
701	2	2		Persentase pemohon Pelayanan di	%	100	10.035.100	100	10.447.000	100	10.534.000	100	31.016.100	KEC. SOKARAJA

				Kecamatan yang terlayani dengan baik										
701	2	2		Persentase pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik	%	100	8.550.000	100	8.565.000	100	8.652.000	100	25.767.000	KEC. RAWALO
701	2	2		Persentase pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik	%	100	42.500.000	100	51.342.500	100	43.008.000	100	136.850.500	KEC. PWT UTARA
701	2	2		Persentase pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik	%	100	10.625.000	100	12.725.000	100	12.648.000	100	35.998.000	KEC. PWT TIMUR
701	2	2		Persentase pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik	%	100	90.481.140	100	112.390.000	100	107.723.000	100	310.594.140	KEC. PWT SELATAN
701	2	2		Persentase pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik	%	100	40.144.500	100	40.700.000	100	48.037.000	100	128.881.500	KEC. PWT BARAT
701	2	2		Persentase pemohon Pelayanan di	%	100	13.580.000	100	13.725.000	100	14.400.000	100	41.705.000	KEC. PURWOJATI

				Kecamatan yang terlayani dengan baik										
701	2	2		Persentase pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik	%	100	24.690.000	100	26.470.000	100	24.985.000	100	76.145.000	KEC. PEKUNCEN
701	2	2		Persentase pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik	%	100	17.114.900	100	50.000.000	100	50.000.000	100	117.114.900	KEC. PATIKRAJA
701	2	2		Persentase pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik	%	100	31.752.000	100	35.000.000	100	32.131.000	100	98.883.000	KEC. LUMBIR
701	2	2		Persentase pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik	%	100	5.000.000	100	5.017.000	100	5.059.000	100	15.076.000	KEC. KEMRANJEN
701	2	2		Persentase pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik	%	100	24.650.000	100	25.420.000	100	24.944.000	100	75.014.000	KEC. KEMBARAN
701	2	2		Persentase pemohon Pelayanan di	%	100	53.447.000	100	63.147.700	100	52.087.000	100	168.681.700	KEC. KEDUNGBANTENG

				Kecamatan yang terlayani dengan baik										
701	2	2		Persentase pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik	%	100	28.200.000	100	28.300.000	100	28.536.000	100	85.036.000	KEC. KEBASEN
701	3		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				7.496.239.149		7.747.651.601		7.707.702.014		22.951.592.764	KEC. AJIBARANG | KEC. BANYUMAS | KEC. BATURRADEN | KEC. CILONGOK | KEC. GUMELAR | KEC. JATILAWANG | KEC. KALIBAGOR | KEC. KARANGLEWAS | KEC. KEBASEN | KEC. KEDUNGBANTENG | KEC. KEMBARAN | KEC. KEMRANJEN | KEC. LUMBIR | KEC. PATIKRAJA |

														KEC. PEKUNCEN | KEC. PURWOJATI | KEC. PWT BARAT | KEC. PWT SELATAN | KEC. PWT TIMUR | KEC. PWT UTARA | KEC. RAWALO | KEC. SOKARAJA | KEC. SOMAGEDE | KEC. SUMBANG | KEC. SUMPIUH | KEC. TAMBAK | KEC. WANGON
701	3	1		Persentase Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	%	100	20.120.000	100	20.153.000	100	20.359.000	100	60.632.000	KEC. SUMBANG
701	3	1		Persentase Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	%	100	9.900.000	100	9.900.000	100	10.018.000	100	29.818.000	KEC. KARANGLEWAS
701	3	1		Persentase Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan	%	100	44.300.000	100	43.000.000	100	44.829.000	100	132.129.000	KEC. KALIBAGOR

				masyarakat										
701	3	1		Persentase Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	%	100	46.135.740	100	46.300.000	100	46.687.000	100	139.122.740	KEC. JATILAWANG
701	3	1		Persentase Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	%	100	64.100.000	100	74.445.000	100	64.866.000	100	203.411.000	KEC. GUMELAR
701	3	1		Persentase Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	%	100	30.850.000	100	30.850.000	100	31.217.000	100	92.917.000	KEC. CILONGOK
701	3	1		Persentase Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	%	100	18.825.000	100	20.205.000	100	19.049.000	100	58.079.000	KEC. BANYUMAS
701	3	1		Persentase Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	%	100	32.925.000	100	39.800.000	100	33.318.000	100	106.043.000	KEC. AJIBARANG
701	3	1		Persentase Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	%	100	40.000.000	100	40.400.000	100	40.477.000	100	120.877.000	KEC. KEMBARAN
701	3	1		Persentase Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan	%	100	59.998.800	100	58.838.000	100	60.717.000	100	179.553.800	KEC. KEMRANJEN

				masyarakat										
701	3	1		Persentase Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	%	100	50.000.000	100	66.000.000	100	50.597.000	100	166.597.000	KEC. LUMBIR
701	3	1		Persentase Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	%	100	24.150.000	100	34.243.000	100	24.438.000	100	82.831.000	KEC. KEBASEN
701	3	1		Persentase Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	%	100	10.706.000	100	58.025.000	100	50.000.000	100	118.731.000	KEC. PATIKRAJA
701	3	1		Persentase Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	%	100	38.999.000	100	104.099.000	100	39.465.000	100	182.563.000	KEC. PEKUNCEN
701	3	1		Persentase Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	%	100	64.000.000	100	49.165.000	100	64.000.000	100	177.165.000	KEC. PURWOJATI
701	3	1		Persentase Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	%	100	14.845.000	100	20.134.000	100	15.021.000	100	50.000.000	KEC. RAWALO
701	3	1		Persentase Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan	%	100	37.422.600	100	39.450.000	100	39.779.000	100	116.651.600	KEC. SOKARAJA

				masyarakat										
701	3	1		Persentase Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	%	100	32.710.000	100	41.875.000	100	33.100.000	100	107.685.000	KEC. SOMAGEDE
701	3	1		Persentase Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	%	100	34.200.000	100	34.320.000	100	34.608.000	100	103.128.000	KEC. SUMPIUH
701	3	1		Persentase Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	%	100	57.576.000	100	57.689.000	100	58.356.000	100	173.621.000	KEC. TAMBAK
701	3	1		Persentase Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	%	100	60.618.750	100	69.246.000	100	69.825.000	100	199.689.750	KEC. WANGON
701	3	1		Persentase Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	%	85	42.083.200	86	43.038.000	87	43.038.000	90	128.159.200	KEC. BATURRADEN
701	3	1		Persentase Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	%	88	31.100.000	89	38.325.000	90	31.471.000	90	100.896.000	KEC. KEDUNGBANTENG
701	3	2		Persentase Kelurahan yang aktif dalam kegiatan	%	100	1.543.167.654	100	1.463.241.030	100	1.476.606.014	100	4.483.014.698	KEC. PWT BARAT

				pemberdayaan masyarakat										
701	3	2		Persentase Kelurahan yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	%								-	KEC. SUMPIUH
701	3	2		Persentase Kelurahan yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	%	100	1.554.500.700	100	1.536.795.500	100	1.563.113.000	100	4.654.409.200	KEC. PWT UTARA
701	3	2		Persentase Kelurahan yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	%	100	1.342.634.700	100	1.350.572.771	100	1.362.783.000	100	4.055.990.471	KEC. PWT TIMUR
701	3	2		Persentase Kelurahan yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	%	100	1.530.371.005	100	1.527.874.300	100	1.548.563.000	100	4.606.808.305	KEC. PWT SELATAN
701	3	3		Prosentase Pelaksanaan PPKM Mikro Tingkat Kelurahan	%								-	KEC. PWT UTARA
701	3	3		Prosentase Pelaksanaan PPKM Mikro Tingkat Kelurahan	%								-	KEC. PWT TIMUR

701	3	3		Prosentase Pelaksanaan PPKM Mikro Tingkat Kelurahan	%								-	KEC. PWT SELATAN
701	3	3		Prosentase Pelaksanaan PPKM Mikro Tingkat Kelurahan	%								-	KEC. PWT BARAT
701	3	3		Prosentase Pelaksanaan PPKM Mikro Tingkat Kelurahan	%								-	KEC. SUMPIUH
701	4		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				3.345.525.295		391.843.980		391.842.999		4.129.212.274	KEC. AJIBARANG | KEC. BANYUMAS | KEC. BATURRADEN | KEC. CILONGOK | KEC. GUMELAR | KEC. JATILAWANG | KEC. KALIBAGOR | KEC. KARANGLEWAS | KEC. KEBASEN | KEC. KEDUNGBANTENG | KEC. KEMBARAN | KEC. KEMRANJEN |

														KEC. LUMBIR | KEC. PATIKRAJA | KEC. PEKUNCEN | KEC. PURWOJATI | KEC. PWT BARAT | KEC. PWT SELATAN | KEC. PWT TIMUR | KEC. PWT UTARA | KEC. RAWALO | KEC. SOKARAJA | KEC. SOMAGEDE | KEC. SUMBANG | KEC. SUMPIUH | KEC. TAMBAK | KEC. WANGON
701	4	1		Persentease pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	%	100	12.100.300	100	12.671.000	100	12.776.000	100	37.547.300	KEC. SOKARAJA
701	4	1		Persentease pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	%	100	15.000.000	100	25.070.000	100	15.178.000	100	55.248.000	KEC. AJIBARANG

701	4	1		Persentease pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	%	100	8.975.000	100	5.375.000	100	9.081.000	100	23.431.000	KEC. BANYUMAS
701	4	1		Persentease pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	%	100	14.662.000	100	12.905.000	100	12.905.000	100	40.472.000	KEC. BATURRADEN
701	4	1		Persentease pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	%	100	14.000.000	100	14.425.000	100	14.167.000	100	42.592.000	KEC. CILONGOK
701	4	1		Persentease pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	%	100	15.000.000	100	11.958.200	100	15.177.000	100	42.135.200	KEC. GUMELAR
701	4	1		Persentease pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	%	100	7.000.000	100	7.125.000	100	7.083.000	100	21.208.000	KEC. JATILAWANG
701	4	1		Persentease pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	%	100	12.575.000	100	12.750.000	100	12.725.000	100	38.050.000	KEC. KALIBAGOR
701	4	1		Persentease pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	%	100	4.950.000	100	4.950.000	100	5.009.000	100	14.909.000	KEC. KARANGLEWAS

701	4	1		Persentease pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	%	100	11.700.000	100	11.375.000	100	11.839.000	100	34.914.000	KEC. KEBASEN
701	4	1		Persentease pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	%	100	21.205.000	100	25.875.000	100	26.458.000	100	73.538.000	KEC. KEMBARAN
701	4	1		Persentease pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	%	100	12.500.000	100	5.017.000	100	20.147.999	100	37.664.999	KEC. KEMRANJEN
701	4	1		Persentease pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	%	100	35.350.000	100	33.093.000	100	35.722.000	100	104.165.000	KEC. LUMBIR
701	4	1		Persentease pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	%	100	5.037.920	100	25.000.000	100	25.000.000	100	55.037.920	KEC. PATIKRAJA
701	4	1		Persentease pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	%	100	11.700.000	100	11.700.000	100	11.839.000	100	35.239.000	KEC. PEKUNCEN
701	4	1		Persentease pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	%	100	6.000.000	100	6.550.000	100	7.000.000	100	19.550.000	KEC. PURWOJATI

701	4	1		Persentease pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	%	100	719.804.425	100	30.600.000	100	26.006.000	100	776.410.425	KEC. PWT BARAT
701	4	1		Persentease pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	%	100	711.135.000	100	13.137.800	100	13.256.000	100	737.528.800	KEC. PWT SELATAN
701	4	1		Persentease pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	%	100	604.175.650	100	6.223.980	100	5.059.000	100	615.458.630	KEC. PWT TIMUR
701	4	1		Persentease pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	%	100	707.500.000	100	8.275.000	100	7.589.000	100	723.364.000	KEC. PWT UTARA
701	4	1		Persentease pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	%	100	6.350.000	100	6.370.000	100	6.425.000	100	19.145.000	KEC. RAWALO
701	4	1		Persentease pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	%	100	5.250.000	100	10.000.000	100	5.312.000	100	20.562.000	KEC. SOMAGEDE
701	4	1		Persentease pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	%	100	11.855.000	100	11.800.000	100	11.995.000	100	35.650.000	KEC. SUMBANG

701	4	1		Persentease pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	%	100	327.000.000	100	27.096.000	100	27.322.000	100	381.418.000	KEC. SUMPIUH
701	4	1		Persentease pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	%	100	20.000.000	100	20.050.000	100	20.260.000	100	60.310.000	KEC. TAMBAK
701	4	1		Persentease pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	%	100	13.500.000	100	15.052.000	100	15.178.000	100	43.730.000	KEC. WANGON
701	4	1		Persentease pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	%	85	11.200.000	90	17.400.000	90	11.334.000	90	39.934.000	KEC. KEDUNGBANTENG
701	6		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				717.157.000		347.604.500		675.316.000		1.740.077.500	KEC. AJIBARANG | KEC. BANYUMAS | KEC. BATURRADEN | KEC. CILONGOK | KEC. GUMELAR | KEC. JATILAWANG | KEC. KALIBAGOR | KEC. KARANGLEWA

														S | KEC. KEBASEN | KEC. KEDUNGBANTENG | KEC. KEMBARAN | KEC. KEMRANJEN | KEC. LUMBIR | KEC. PATIKRAJA | KEC. PEKUNCEN | KEC. PURWOJATI | KEC. RAWALO | KEC. SOKARAJA | KEC. SOMAGEDE | KEC. SUMBANG | KEC. SUMPIUH | KEC. TAMBAK | KEC. WANGON
701	6	1		Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES	%	100	10.000.000	100	8.410.000	100	25.119.000	100	43.529.000	KEC. KEMRANJEN

701	6	1		Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES	%	100	36.359.900	100	25.000.000	100	15.000.000	100	76.359.900	KEC. PATIKRAJA
701	6	1		Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES	%	100	51.400.000	100	21.607.500	100	52.015.000	100	125.022.500	KEC. LUMBIR
701	6	1		Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES	%	100	54.999.900	100	19.600.000	100	35.239.000	100	109.838.900	KEC. KEMBARAN
701	6	1		Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES	%	100	4.998.000	100	-	100	20.057.000	100	25.055.000	KEC. GUMELAR
701	6	1		Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES	%	100	33.500.000	100	7.526.000	100	33.900.000	100	74.926.000	KEC. JATILAWANG

701	6	1		Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES	%	100	9.500.000	100	4.525.000	100	4.613.000	100	18.638.000	KEC. KALIBAGOR
701	6	1		Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES	%	100	34.220.000	100	8.200.000	100	8.200.000	100	50.620.000	KEC. BATURRADEN
701	6	1		Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES	%	100	35.600.000	100	9.620.000	100	36.025.000	100	81.245.000	KEC. BANYUMAS
701	6	1		Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES	%	100	39.000.000	100	39.135.000	100	54.466.000	100	132.601.000	KEC. AJIBARANG
701	6	1		Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES	%	100	11.475.000	100	11.850.000	100	11.612.000	100	34.937.000	KEC. CILONGOK

701	6	1		Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES	%	100	40.850.000	100	14.850.000	100	41.338.000	100	97.038.000	KEC. KARANGLEWAS
701	6	1		Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES	%	100	38.650.000	100	13.440.000	100	42.801.000	100	94.891.000	KEC. KEBASEN
701	6	1		Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES	%	100	14.600.000	100	22.400.000	100	15.774.000	100	52.774.000	KEC. KEDUNGBANTENG
701	6	1		Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES	%	100	7.075.000	100	10.035.000	100	25.119.000	100	42.229.000	KEC. WANGON
701	6	1		Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES	%	100	46.000.000	100	20.050.000	100	40.260.000	100	106.310.000	KEC. TAMBAK

701	6	1		Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES	%	100	37.394.000	100	11.440.000	100	37.841.000	100	86.675.000	KEC. SUMPIUH
701	6	1		Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES	%	100	40.000.000	100	8.025.000	100	28.095.000	100	76.120.000	KEC. SUMBANG
701	6	1		Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES	%	100	44.450.100	100	44.700.000	100	44.982.000	100	134.132.100	KEC. SOMAGEDE
701	6	1		Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES	%	100	37.800.100	100	5.996.000	100	38.429.000	100	82.225.100	KEC. SOKARAJA
701	6	1		Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES	%	100	5.200.000	100	5.210.000	100	5.262.000	100	15.672.000	KEC. RAWALO

701	6	1		Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES	%	100	36.485.000	100	10.485.000	100	11.000.000	100	57.970.000	KEC. PURWOJATI
701	6	1		Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES	%	100	47.600.000	100	25.500.000	100	48.169.000	100	121.269.000	KEC. PEKUNCEN
801			KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				4.653.675.915		4.873.061.225		4.911.266.753		14.438.003.893	KESBANGPOL
801	2		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN				98.205.000		98.205.000		128.722.000		325.132.000	KESBANGPOL
801	2	1		Prosentase peserta pembinaan yang paham tentang penguatan nilai ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	%	90	98.205.000	90	98.205.000	90	128.722.000	90	325.132.000	KESBANGPOL
801	3		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK				3.007.014.800		3.032.414.800		3.055.058.753		9.094.488.353	KESBANGPOL

801	3	1		Persentase Parpol yang aktif dalam Kegiatan Pendidikan Politik	%	75	3.007.014.800	75	3.032.414.800	75	3.055.058.753	75	9.094.488.353	KESBANGPOL
801	4		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN				84.399.800		102.076.800		101.197.000		287.673.600	KESBANGPOL
801	4	1		Persentase Ormas yang terlibat dalam kegiatan wawasan kebangsaan	%	100	84.399.800	100	102.076.800	100	101.197.000	100	287.673.600	KESBANGPOL
801	5		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA				365.006.750		430.371.750		406.184.000		1.201.562.500	KESBANGPOL
801	5	1		Prosentase peserta pembinaan yang memahami materi Penguatan Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Agama	%	100	365.006.750	100	430.371.750	100	406.184.000	100	1.201.562.500	KESBANGPOL
801	6		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL				1.099.049.565		1.209.992.875		1.220.105.000		3.529.147.440	KESBANGPOL
801	6	1		Prosentase Penanganan	%	100	1.099.049.565	100	1.209.992.875	100	1.220.105.000	100	3.529.147.440	KESBANGPOL

				Potensi Konflik Ipoleksosbudhankam dengan baik										
XXX			NON URUSAN				2.073.625.196.333		2.200.545.209.128		2.249.645.736.524		6.523.816.141.985	BAPENDA | BAPPEDA LITBANG | BKAD | BKPSDM | BPBD | DINAKERKOP UKM | DINARPUSDA | DINDIK | DINDUKCAPIL | DINHUB | DINKANNAK | DINKES | DINKOMINFO | DINPERINDAG | DINPERKIM | DINPERTANKP | DINPORABUDPAR | DINSOSPERMASDES | DLH | DPMPTSP | DPPKBP3A | DPU | INSPEKTORAT | KEC. AJIBARANG | KEC. BANYUMAS | KEC.

														BATURRADEN | KEC. CILONGOK | KEC. GUMELAR | KEC. JATILAWANG | KEC. KALIBAGOR | KEC. KARANGLEWAS | KEC. KEBASEN | KEC. KEDUNGBANTENG | KEC. KEMBARAN | KEC. KEMRANJEN | KEC. LUMBIR | KEC. PATIKRAJA | KEC. PEKUNCEN | KEC. PURWOJATI | KEC. PWT BARAT | KEC. PWT SELATAN | KEC. PWT TIMUR | KEC. PWT UTARA | KEC. RAWALO | KEC. SOKARAJA | KEC.

														SOMAGEDE | KEC. SUMBANG | KEC. SUMPIUH | KEC. TAMBAK | KEC. WANGON | KESBANGPOL | RSUD AJIBARANG | RSUD BANYUMAS | SATPOL PP | SETDA | SETWAN

XXX	1		X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				2.073.625.196.333		2.200.545.209.128		2.249.645.736.524		6.523.816.141.985	BAPENDA | BAPPEDA LITBANG | BKAD | BKPSDM | BPBD | DINAKERKOP UKM | DINARPUSDA | DINDIK | DINDUKCAPIL | DINHUB | DINKANNAK | DINKES | DINKOMINFO | DINPERINDAG | DINPERKIM | DINPERTAN KP | DINPORABUD PAR | DINSOSPERM ASDES | DLH | DPMPTSP | DPPKBP3A | DPU | INSPEKTORAT | KEC. AJIBARANG | KEC. BANYUMAS | KEC. BATURRADEN | KEC. CILONGOK |

														KEC. GUMELAR | KEC. JATILAWANG | KEC. KALIBAGOR | KEC. KARANGLEWAS | KEC. KEBASEN | KEC. KEDUNGBANTENG | KEC. KEMBARAN | KEC. KEMRANJEN | KEC. LUMBIR | KEC. PATIKRAJA | KEC. PEKUNCEN | KEC. PURWOJATI | KEC. PWT BARAT | KEC. PWT SELATAN | KEC. PWT TIMUR | KEC. PWT UTARA | KEC. RAWALO | KEC. SOKARAJA | KEC. SOMAGEDE | KEC. SUMBANG |

														KEC. SUMPIUH | KEC. TAMBAK | KEC. WANGON | KESBANGPOL | RSUD AJIBARANG | RSUD BANYUMAS | SATPOL PP | SETDA | SETWAN
XXX	1	1		Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	2.285.811.561	100	2.762.214.938	100	2.856.023.900	100	7.904.050.399	BAPENDA | BAPPEDA LITBANG | BKAD | BKPSDM | DINAKERKOP UKM | DINDIK | DINDUKCAPIL

														| DINHUB | DINPERINDAG | DINPERKIM | DINPERTANKP | DINPORABUDPAR | DINSOSPERMASDES | DPMPTSP | DPPKBP3A | DPU | INSPEKTORAT | KESBANGPOL | SETDA
XXX	1	1		Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	201.196.810	100	260.711.400	100	269.123.000	100	731.031.210	KEC. AJIBARANG | KEC. BANYUMAS | KEC. BATURRADEN | KEC. CILONGOK | KEC. GUMELAR | KEC. JATILAWANG | KEC. KALIBAGOR | KEC. KARANGLEWAS | KEC. KEBASEN | KEC. KEDUNGBANT

														ENG | KEC. KEMBARAN | KEC. KEMRANJEN | KEC. LUMBIR | KEC. PATIKRAJA | KEC. PEKUNCEN | KEC. PURWOJATI | KEC. PWT BARAT | KEC. PWT SELATAN | KEC. PWT TIMUR | KEC. PWT UTARA | KEC. RAWALO | KEC. SOKARAJA | KEC. SOMAGEDE | KEC. SUMBANG | KEC. SUMPIUH | KEC. TAMBAK | KEC. WANGON
XXX	1	1		Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat	%	100	580.336.678	100	561.511.121	100	508.157.000	100	1.650.004.799	BPBD | DINARPUSDA | DINKANNAK | DINKES | DINKOMINFO | DLH | SATPOL PP

				Daerah										
XXX	1	1		Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	151.749.700	100	178.530.481	100	178.529.300	100	508.809.481	SETWAN
XXX	1	2		Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	119.037.054.828	100	118.065.481.038	100	124.073.593.914	100	361.176.129.780	BPBD | DINARPUSDA | DINKANNAK | DINKES
XXX	1	2		Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	75.387.415.008	100	83.412.737.983	100	84.407.911.062	100	243.208.064.053	KEC. AJIBARANG | KEC. BANYUMAS | KEC. BATURRADEN | KEC. CILONGOK | KEC. GUMELAR | KEC. JATILAWANG | KEC. KALIBAGOR | KEC. KARANGLEWAS | KEC. KEBASEN | KEC. KEDUNGBANT

														ENG | KEC. KEMBARAN | KEC. KEMRANJEN | KEC. LUMBIR | KEC. PATIKRAJA | KEC. PEKUNCEN | KEC. PURWOJATI | KEC. PWT BARAT | KEC. PWT SELATAN | KEC. PWT TIMUR | KEC. PWT UTARA | KEC. RAWALO | KEC. SOKARAJA | KEC. SOMAGEDE | KEC. SUMBANG | KEC. SUMPIUH | KEC. TAMBAK | KEC. WANGON

XXX	1	2		Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	1.261.464.403.159	100	1.346.235.835.215	100	1.380.753.227.622	100	3.988.453.465.996	BAPENDA | BAPPEDA LITBANG | BKAD | BKPSDM | DINAKERKOP UKM | DINDIK | DINDUKCAPIL | DINHUB | DINKOMINFO | DINPERINDAG | DINPERKIM | DINPERTAN KP | DINPORABUD PAR | DINSOSPERM ASDES | DLH | DPMPTSP | DPPKBP3A | DPU | INSPEKTORAT | KESBANGPOL | RSUD AJIBARANG | RSUD BANYUMAS | SATPOL PP | SETDA | SETWAN

XXX	1	3		Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	%	100	4.553.379.352	100	6.072.364.800	100	6.055.585.285	100	16.681.329.437	KEC. AJIBARANG | KEC. BANYUMAS | KEC. BATURRADEN | KEC. CILONGOK | KEC. GUMELAR | KEC. JATILAWANG | KEC. KALIBAGOR | KEC. KARANGLEWAS | KEC. KEBASEN | KEC. KEDUNGBANTENG | KEC. KEMBARAN | KEC. KEMRANJEN | KEC. LUMBIR | KEC. PATIKRAJA | KEC. PEKUNCEN | KEC. PURWOJATI | KEC. PWT BARAT | KEC. PWT SELATAN | KEC. PWT TIMUR | KEC.

														PWT UTARA | KEC. RAWALO | KEC. SOKARAJA | KEC. SOMAGEDE | KEC. SUMBANG | KEC. SUMPIUH | KEC. TAMBAK | KEC. WANGON
XXX	1	3		Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	%	90	587.854.000	90	952.556.000	95	960.674.000	95	2.501.084.000	BKAD
XXX	1	3		Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	%	100	1.464.376.400	100	1.457.340.000	100	1.738.432.895	100	4.660.149.295	BPBD | DINARPUSDA | DINKES
XXX	1	3		Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	%	100	20.956.388.464	100	26.872.889.791	100	26.845.183.295	100	74.674.461.550	BAPENDA | BAPPEDA LITBANG | BKPSDM | DINAKERKOP UKM | DINDIK | DINDUKCAPIL | DINHUB | DINKOMINFO | DINPERINDAG | DINPERKIM | DINPERTAN KP |

														DINPORABUDPAR | DINSOSPERMASDES | DLH | DPMPTSP | DPPKBP3A | DPU | INSPEKTORAT | KESBANGPOL | SATPOL PP | SETDA | SETWAN
XXX	1	3		Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	%	75	408.770.500	75	721.174.500	75	712.683.000	75	1.842.628.000	DINKANNAK
XXX	1	4		Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	18.398.444.304	100	20.678.587.926	100	20.655.103.464	100	59.732.135.694	KEC. AJIBARANG | KEC. BANYUMAS | KEC. BATURRADEN | KEC. CILONGOK | KEC. GUMELAR | KEC. JATILAWANG | KEC. KALIBAGOR | KEC. KARANGLEWAS | KEC. KEBASEN | KEC.

														KEDUNGBANTENG | KEC. KEMBARAN | KEC. KEMRANJEN | KEC. LUMBIR | KEC. PATIKRAJA | KEC. PEKUNCEN | KEC. PURWOJATI | KEC. PWT BARAT | KEC. PWT SELATAN | KEC. PWT TIMUR | KEC. PWT UTARA | KEC. RAWALO | KEC. SOKARAJA | KEC. SOMAGEDE | KEC. SUMBANG | KEC. SUMPIUH | KEC. TAMBAK | KEC. WANGON
XXX	1	4		Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	90	30.331.146.689	90	31.207.474.978	95	31.468.296.000	95	93.006.917.667	BKAD

XXX	1	4		Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	5.540.555.701	100	5.784.896.165	100	5.813.818.669	100	17.139.270.535	BPBD | DINARPUSDA | DINKES
XXX	1	4		Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	73.695.295.954	100	92.996.570.692	100	94.010.126.583	100	260.701.993.229	BAPENDA | BAPPEDALITBANG | BKPSDM | DINAKERKOPUKM | DINDIK | DINDUKCAPIL | DINHUB | DINKANNAK | DINKOMINFO | DINPERINDAG | DINPERKIM | DINPERTANKP | DINPORABUDPAR | DINSOSPERMASDES | DLH | DPMPTSP | DPPKBP3A | DPU | INSPEKTORAT | KESBANGPOL | SATPOL PP | SETDA | SETWAN
XXX	1	5		Indeks Kepuasan Pelayanan BLUD	Indeks	77	122.238.424.000	77,5	124.748.644.830	78,5	129.429.019.435	78,5	376.416.088.265	DINKES

XXX	1	5		Indeks Kepuasan Pelayanan BLUD	Indeks	85	195.000.000.000	85	195.700.144.000	90	197.335.708.000	90	588.035.852.000	RSUD BANYUMAS
XXX	1	5		Indeks Kepuasan Pelayanan BLUD	Indeks	84	95.125.000.000	85	95.466.544.000	85	95.112.565.000	85	285.704.109.000	RSUD AJIBARANG
XXX	1	6		Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan dan Kerumahtanggaan Pimpinan Daerah	%	100	4.922.844.265	100	4.912.305.760	100	4.953.532.000	100	14.788.682.025	SETDA
XXX	1	7		Hasil evaluasi SAKIP pada komponen Nilai Pelaporan Kinerja		7	423.436.500	7,15	501.794.000	7.15	505.987.000	7,15	1.431.217.500	SETDA
XXX	1	8		Persentase terlaksananya penyelenggaraan acara kedinasan dan pelayanan tamu Bupati/Wa Bupati/Sekretaris Daerah yang sesuai dengan SOP	%	100	848.903.360	100	904.085.410	100	911.642.000	100	2.664.630.770	SETDA
XXX	1	11		Cakupan Pelayanan Administrasi Umum DPRD	%	100	40.022.409.100	100	40.090.814.100	100	40.090.814.100	100	120.204.037.300	SETWAN

BAB VIII
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

8.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama Daerah

Penetapan indikator kinerja utama bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi misi Bupati dan wakil Bupati Banyumas dari sisi penyelenggaraan pemerintahan daerah pada akhir periode masa jabatan. lndikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator sasaran (impact) daerah sebagaimana termuat pada Bab V RPJMD. Suatu indikator kinerja utama dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja sasaran berkenaan setelah program prioritas ditetapkan.

Penetapan indikator kinerja utama Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023 sebagaimana tertuang pada Tabel 8.1.

Tabel 8.1
Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Banyumas Tahun 2021-2023

No	Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja (T) dan Realisasi (R) RPJMD Murni					Target Kinerja RPJMD Murni (T) dan Target RPJMD Perubahan (P)					Target Akhir	
			2017	2018	2019 T	2019 R	2020 T	2020 R	2021 T	2021 P	2022 T	2022 P	2023 T	2023 P	Murni	Peru-bahan
1	Indek Reformasi Birokrasi		63,79	NA	66,00	68,76	68,00	69,07	70,00	70,00	73,00	73,00	75,00	75,00	75,00	75,00
2	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		70,75	71,35	71,95	70,75	72,55	71,98	72,38	72,18	73,75	72,38	74,35	72,58	74,35	72,58
3	Persentase penduduk miskin	%	17,05	13,5	12,51	12,53	11,53	13,26	10,54	12,51	9,55	11,76	8,56	11,00	8,56	11,00
4	Pertumbuhan Ekonomi	%	6,34	6,35	6,40	6,32	6,45	-1,65	6,50	4,1	6,60	4,5	6,65	5,0	6,65	5,0
5	PDRB per Kapita	juta rupiah	27.380	29.230	31.115	31.87	33.000	30.21	34.885	32.332	36.770	33.725	38.655	35.513	38.655	35.513
6	Indeks Ketahanan Pangan		NA	73,99	74,00	NA	74,01	79,27	74,02	74,02	74,03	74,03	74,04	74,04	74,04	74,04
7	Persentase Pertumbuhan Nilai investasi Daerah	%	2	2	2	2	2	41,54	2	2	2	2	2	2	10	2
8	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	4,62	4,49	4,36	4,62	4,23	6	4,06	5,75	3,93	5,00	3,76	4,50	3,76	4,50
9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)		NA	64,81	63,79	64,62	63,88	62,27	63,97	63,97	64,06	64,06	64,15	64,15	64,15	64,15
10	Persentase Kinerja Infrastruktur	%	NA	NA	-	NA	-	NA	-	53,31	-	69,33	-	78,87	-	78,87
11	Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PAD	%	NA	-	-	-	-	-	-	4	-	5	-	7	-	7
12	Angka Kriminalitas	per 10,000 penduduk	599 (kasus)	677 (kasus)	731 (kasus)	599	792 (kasus)	638	823 (kasus)	1,656	891 (kasus)	1,586	950 (kasus)	1,516	950 (kasus)	1,516

8.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023

Indikator kinerja utama perangkat daerah sebagaimana tertuang pada tabel 8,2 merupakan indikator tujuan perangkat daerah pada setiap perangkat daerah di Kabupaten Banyumas,

Tabel 8.2
Penetapan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas
Tahun 2018-2023

No	Indikator Kinerja Utama (IKU) OPD / *TPB	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja (T) dan Realisasi (R) RPJMD Murni					Target RPJMD Murni (T) dan RPJMD Perubahan (P)					Target Akhir	
			2017	2018	2019 T	2019 R	2020 T	2020 R	2021 T	2021 P	2022 T	2022 P	2023 T	2023 P	Murni	Perubahan
	DINAS PENDIDIKAN															
1.	Harapan Lama Sekolah *TPB 4	Tahun	12,63	12,78	12,93	12, 82	13,08	12,85	13,23	12,87	13,38	12,89	13,53	12,91	13,53	12,91
2.	Rata-rata Lama Sekolah *TPB 4	Tahun	7,40	7,45	7,50	7,42	7,55	7,52	7,60	7,53	7,65	7,54	7,70	7,55	7,70	7,55
	DINAS KESEHATAN															
3.	Angka Kematian Ibu (AKI)	/100,000 Kelahiran Hidup	54,16	67,87	67,80	37,6	67,50	41,5	67,25	67,25	67,00	67	66,50	66,5	66,50	66,5
4.	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	73,33	73,43	73,53	73,33	73,63	73,72	73,73	73,73	73,83	73,83	73,93	73,93	73,93	73,93
	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANYUMAS															
5.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Rumah Sakit		76,78	74,89	75,00	76,78	76,00	79	78,00	80	80,00	85	85,00	85	85,00	85
	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG															
6.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Rumah Sakit		76,78	79,00	82,00	76,78	83,00	82,58	84,00	84	85	85	85	85	85	85
7.	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit	%	75	79	82	75	83	88,47	84	84	85	85	85	85	85	85

No	Indikator Kinerja Utama (IKU) OPD / *TPB	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja (T) dan Realisasi (R) RPJMD Murni					Target RPJMD Murni (T) dan RPJMD Perubahan (P)					Target Akhir	
			2017	2018	2019 T	2019 R	2020 T	2020 R	2021 T	2021 P	2022 T	2022 P	2023 T	2023 P	Murni	Perubahan
	DINAS PEKERJAAN UMUM															
8.	Persentase Kinerja Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	%	-	-	-	-	-	-	-	72,77	-	76,21	-	82,13	-	82,13
	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN															
9.	Persentase Jumlah Rumah Layak Huni untuk Korban Bencana	%	-	-	-		-		-	100	-	100	-	100	-	100
10.	Persentase Lingkungan Permukiman yang Layak Huni *TPB 11	%	NA	83,17	84,17	NA	85,17	85,2	86,17	86,17	87,17	87,17	88,17	88,17	88,17	88,17
11.	Persentase Kinerja Infrastruktur Pendukung Perumahan dan Kawasan Permukiman	%	-	-	-	-	-	-	-	73,80	-	74,96	-	76,19	-	76,19
12.	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang	%	99,979	99,980	99,981	99,979	99,982	99,982	99,983	99,983	99,984	99,984	99,985	99,985	99,985	99,985
	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH															
13.	Indeks Resiko Bencana		-	-	-	-	-	-	-	175	-	166	-	160	-	160
	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK															
14.	Persentase Penurunan Potensi Koflik IPOLEKSOSBUDHANKAM *TPB 16	%	NA	NA	5	NA	5	-0	5	5	5	5	5	5	25	15
	SATUAN POLISI															

No	Indikator Kinerja Utama (IKU) OPD / *TPB	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja (T) dan Realisasi (R) RPJMD Murni					Target RPJMD Murni (T) dan RPJMD Perubahan (P)					Target Akhir	
			2017	2018	2019 T	2019 R	2020 T	2020 R	2021 T	2021 P	2022 T	2022 P	2023 T	2023 P	Murni	Perubahan
	PAMONG PRAJA															
15.	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan)	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
16.	Persentase penegakan Perda	%	90	95	100	90	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA															
17.	Indeks Desa Membangun	%	0,660 (Nilai)	0,663 (Nilai)	0,668 (Nilai)	0,689	0,674 (Nilai)	0,6988	0,681 (Nilai)	0,681	0,688 (Nilai)	0,688	0,694 (Nilai)	0,694	0,694 (Nilai)	0,694
18.	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya*TPB 1	%	-	-	-	-	-	-	-	100	-	100	-	100	-	50
	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH															
19.	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro *TPB 8	%	0,34	1,05	0,47	0,34	0,47	0,615	0,47	0,244	0,47	0,249	0,47	0,254	0,47	0,254
20.	Persentase Koperasi Sehat	%	29,12	29,71	30,00	29,12	30,25	22,4	30,50	28,88	30,75	30	31,00	31,11	31,00	31,11
21.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja *TPB 8	%	65,19	65,70	66,09	65,19	66,49	-	66,89	66,66	67,30	66,67	67,71	66,68	67,71	66,68
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP															
22.	Persentase cakupan layanan persampahan *TPB 11	%				NA		52		100		100		100		100

No	Indikator Kinerja Utama (IKU) OPD / *TPB	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja (T) dan Realisasi (R) RPJMD Murni					Target RPJMD Murni (T) dan RPJMD Perubahan (P)					Target Akhir	
			2017	2018	2019 T	2019 R	2020 T	2020 R	2021 T	2021 P	2022 T	2022 P	2023 T	2023 P	Murni	Perubahan
23.	Persentase peningkatan RTH publik	%	-	-	-	-	-	-	-	2		2		2		2
24.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)		NA	64,81	63,79	64,62	63,88	62,27	63,97	56,50	64,06	42,50	64,15	42,60	64,15	42,60
25.	Persentase peningkatan rekomendasi persetujuan lingkungan	%	-	-	-	-	-	-	-	5		5		5		5
26.	Indeks Kualitas Air (IKA)		NA	NA	54,20	34,67	54,40	49,33	54,60	54,60	54,80	53,85	55,00	53,92	55,00	53,92
27.	Indeks Kualitas Udara (IKU) *TPB 13		85,72	82,78	83,10	85,72	83,20	85,07	83,30	83,30	83,40	85,20	83,50	85,30	83,50	85,30
28.	Persentase jumlah sampah yang tertangani *TPB 11	%				54		97		98		99		99		99
	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL															
29.	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Administrasi Kependudukan *TPB 1	Skor	-	-	-	-	-	-	-	87		88		89		89
	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB, PP DAN PA															
30.	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) *TPB 3	%	0,87	NA	0,86	0,87	0,85	1,8	0,84	1,79	0,83	1,78	0,82	1,77	0,82	1,77
31.	Nilai Kabupaten Layak Anak *TPB 16		426	514	550	426	600	528	650	600	700	625	750	650	750	650
32.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) *TPB 16		67,32	NA	67,45	67,32	67,50	71,92	67,55	71,92	67,57	71,93	67,60	71,94	67,60	71,94
	DINAS PERHUBUNGAN															
33.	Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota		-	-	-	-	-	-	-	0,6865		0,8275		0,89		0,89

No	Indikator Kinerja Utama (IKU) OPD / *TPB	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja (T) dan Realisasi (R) RPJMD Murni					Target RPJMD Murni (T) dan RPJMD Perubahan (P)					Target Akhir	
			2017	2018	2019 T	2019 R	2020 T	2020 R	2021 T	2021 P	2022 T	2022 P	2023 T	2023 P	Murni	Perubahan
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA															
34.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) *TPB 16		NA	2,63	2,80	NA	2,90	3,09	3,20	3,10	3,30	3,20	3,50	3,30	3,50	3,30
35.	Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP) *TPB 16		-	-	-	-	-	-	-	95		96		97		97
	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU															
36.	Nilai investasi daerah	Milyar Rupiah	583	625	255	583	260	1077	265	500	270	545	275	600	275	600
37.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan		77,23	83,60	86,00	77,23	87,00	89,5	88,00	88,00	89,00	89,00	90,00	90,00	90,00	90,00
	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA															
38.	Persentase Kebudayaan daerah yang dilestarikan	%	NA	NA	37,74	NA	50,94	100	77,36	72	90,57	84	100	100	100	100
39.	Persentase pertumbuhan pelajar dan pemuda berprestasi	%	-	-	-	-	-	-	-	2,59	-	2,94	-	3,27	-	3,27
40.	Persentase Cakupan pelaku ekonomi kreatif sub sektor pariwisata yang terfasilitasi	%	-	-	-	-	-	-	-	0	-	3,27	-	33,3	-	33,3
41.	Jumlah Kunjungan Wisata	orang	-	-	-	NA	-	-	-	1.250.000	-	1.500.000	-	1.750.000	-	4.500.000
	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN															

No	Indikator Kinerja Utama (IKU) OPD / *TPB	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja (T) dan Realisasi (R) RPJMD Murni					Target RPJMD Murni (T) dan RPJMD Perubahan (P)					Target Akhir	
			2017	2018	2019 T	2019 R	2020 T	2020 R	2021 T	2021 P	2022 T	2022 P	2023 T	2023 P	Murni	Perubahan
42.	Nilai Kegemaran Membaca Masyarakat		-	-	-	-	-	-	-	53		54		55		55
43.	Nilai Pengawasan Kearsipan		-	-	-	-	-	-	-	60		61		62		62
	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN															
44.	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan *TPB 14	%	1,38	1,09	1,50	4,53	1,50	2,07	1,50	1,5	1,50	1,5	1,50	1,5	7,50	1,5
45.	Persentase Peningkatan Produksi Peternakan	%	6,19	3,07	3,00	6,19	3,00	4,99	3,00	3	3,00	3	3,00	3	15,00	3
	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN															
46.	Coefisien of Variant (CoV)	%	-	-	-	-	-	-	-	25,17		24,83		24		24
47.	Persentase peningkatan luasan lahan pangan lokal yang dikembangkan *TPB 2	%	-	-	-	-	-	-	-	70		70		70		70
48.	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pertanian	%	NA	NA	1	NA	1	-1,36	1	1	1	1	1	1	5	1
49.	Persentase ketersediaan pangan (tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan) *TPB 2	%	90	94	94	90	95	109,12	96	96	96	96	97	97	97	97
	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN															
50.	Persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB *TPB 17	%	-	-	-	-	-	-	-	15,23		15,24		15,25		15,25
51.	Persentase kontribusi sektor industri pengolahan terhadap	%	-	-	-	-	-	-	-	24,32		24,33		24,34		24,34

No	Indikator Kinerja Utama (IKU) OPD / *TPB	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja (T) dan Realisasi (R) RPJMD Murni					Target RPJMD Murni (T) dan RPJMD Perubahan (P)					Target Akhir	
			2017	2018	2019 T	2019 R	2020 T	2020 R	2021 T	2021 P	2022 T	2022 P	2023 T	2023 P	Murni	Perubahan
	PDRB															
	SEKRETARIAT DAERAH															
52.	Nilai Maturitas SPIP	level								2		2		3		3
53.	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Sekretariat Daerah		-	-	-	-	-	-	-	86,9		86,9		87		87
	SEKRETARIAT DPRD															
54.	Indeks Kepuasan Dewan	%	80	80	80	80	81	100	82	100	83	100	84	100	84	100
	INSPEKTORAT DAERAH															
55.	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)		-	-	-	-	-	-	-	2		2		3		3
56.	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)		-	-	-	-	-	-	-	3		3		3		3
	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH															
57.	Manajemen Risiko Indeks (MRI)		-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	3	-	3
58.	Nilai Penghargaan Perencanaan Daerah		-	-	-	-	-	-	-	7,6	-	7,65	-	7,7	-	7,7
59.	Persentase hasil-hasil penelitian yang direkomendasikan sebagai bahan kebijakan	%	-	-	-	-	-	-	-	75	-	80	-	85	-	85
	BADAN PENDAPATAN DAERAH															

No	Indikator Kinerja Utama (IKU) OPD / *TPB	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja (T) dan Realisasi (R) RPJMD Murni					Target RPJMD Murni (T) dan RPJMD Perubahan (P)					Target Akhir	
			2017	2018	2019 T	2019 R	2020 T	2020 R	2021 T	2021 P	2022 T	2022 P	2023 T	2023 P	Murni	Perubahan
60.	Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD	%	-	-	-	-	-	-	-	19,4	-	19,5	-	19,6		19,6
	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH															
61.	Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah *TPB 16	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA															
62.	Indeks Profesionalitas ASN,	%	82,79	82,80	83,10	81,1	83,40	67,48	83,60	71	83,60	71	83,70	71	83,70	71
	KECAMATAN															
63.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan		52,39	53,28	82,00	74,14	82,94	81,46	83,89	83,93	84,87	84,87	85,81	85,81	85,93	85,81

8.3 Penetapan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Penyajian indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) dibagi menjadi 3 (tiga) aspek, yaitu: aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, serta aspek daya saing daerah, Indikator pada aspek kesejahteraan masyarakat menggambarkan suatu kondisi indikator makro ekonomi dan sosial, Indikator pada aspek pelayanan umum memberikan tolok ukur atas pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan urusan pemerintahan, baik wajib maupun pilihan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, Indikator kinerja pada aspek daya saing daerah memberikan gambaran daya dukung mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan,

Penetapan indikator kinerja daerah terhadap capaian penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Banyumas tertuang pada Tabel 8,3,

Tabel 8.3
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal		Target (T) dan Realisasi (R) RPJMD Murni					Target (T) RPJMD Murni dan (P) RPJMD Perubahan					Kondisi Akhir RPJMD	
			2017	2018	2019 T	2019 R	2020 T	2020 R	2021 T	2021 P	2022 T	2022 P	2023 T	2023 P	Murni	Peru-bahan
	A, Aspek Kesejahteraan Masyarakat															
1.	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,63	12,78	12,93	12,63	13,08	12,85	13,23	12,87	13,38	12,89	13,53	12,91	13,53	12,91
2.	Indeks Ketahanan Pangan		-	-	-	NA	-	79,27	-	74,02	-	74,03	-	74,04	-	74,04
3.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		70,75	71,35	71,95	70,75	72,55	71,98	73,15	72,18	73,75	72,38	74,35	72,58	74,35	72,58
4.	Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PAD	%	-	-	-	-	-	-	-	4	-	5	-	7	-	7
5.	PDRB per Kapita	juta rupiah	27.38	29.23	31.115	27.38	33	31.87	34.885	32.332	36.77	33.725	38.655	35.513	38.655	35.513
6.	Presentase Lingkungan Permukiman Layak Huni	%								86,17		87,17		88,17		88,17
7.	Persentase penduduk miskin	%	17,05	13,5	12,51	12,53	11,53	13,26	10,54	12,51	9,55	11,76	8,56	11	8,56	11
8.	Persentase Peningkatan Pelaku Ekonomi Kreatif	%	-	-	-	-	-	-	-	5		10		15		15
9.	Persentase Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	%	5,78	5,8	5,81	7,99	5,82	-0,05	5,83	5,83	5,85	5,85	5,86	5,86	5,86	5,86
10.	Persentase Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor	%	4,44	4,45	4,47	4,44	4,48	8,11	4,49	4,49	4,51	4,51	4,52	4,52	4,52	4,52
11.	Persentase Pertumbuhan PDRB sektor pertanian Kehutanan dan Perikanan	%	3,17	3,28	3,36	0,31	3,58	1,51	3,72	2,26	3,85	3,11	4,03	3,91	4,03	3,91
12.	Pertumbuhan Ekonomi	%								4,1		4,5		5,0		5,0

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal		Target (T) dan Realisasi (R) RPJMD Murni					Target (T) RPJMD Murni dan (P) RPJMD Perubahan					Kondisi Akhir RPJMD	
			2017	2018	2019 T	2019 R	2020 T	2020 R	2021 T	2021 P	2022 T	2022 P	2023 T	2023 P	Murni	Peru-bahan
13.	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun								7,53		7,54		7,55		7,55
14.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	65,19	65,7	66,09	65,19	66,49	0	66,89	66,66	67,3	66,67	67,71	66,68	67,71	66,68
15.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	4,62	4,49	4,36	4,62	4,23	6	4,06	5,75	3,93	5,00	3,76	4,50	3,76	4,50
16.	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	73,33	73,43	73,53	73,33	73,63	73,72	73,73	73,73	73,83	73,83	73,93	73,93	73,93	73,93
	B. Aspek Daya Saing															
17.	Angka Kriminalitas	per 10,000 pendu-duk	599 (kasus)	677 (kasus)	731 (kasus)	599 (kasus)	792 (kasus)	2480 (kasus)	823 (kasus)	1,656	891 (kasus)	1,586	950 (kasus)	1,516	950 (kasus)	1,516
18.	Indek Reformasi Birokrasi		63,79	NA	66	63,79	68	68,76	70	70,00	73	73,00	75	75,00	75	75,00
19.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)		NA	64,81	63,79	64,62	63,88	70,04	63,97	63,97	64,06	64,06	64,15	64,15	64,15	64,15
20.	Persentase kriminalitas yang tertangani	%	-	-	-	-	-	-	-	50	-	50	-	50	-	50
21.	Persentase Pertumbuhan Nilai investasi Daerah	%	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	2
	C. Aspek Pelayanan Umum															
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN															
22.	APM PAUD	%	-	-	-	-	-	-	-	75,05	-	75,10	-	75,15	-	75,15
23.	APM SD/MI	%	98,75	98,8	98,85	92,47	98,9	98,54	98,95	98,05	98,95	98,10	98,95	98,15	98,95	98,15
24.	APM SMP/MTs	%	81,41	81,45	81,5	92,47	81,6	81,23	81,65	81,55	81,7	81,60	81,75	81,65	81,75	81,65

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal		Target (T) dan Realisasi (R) RPJMD Murni					Target (T) RPJMD Murni dan (P) RPJMD Perubahan					Kondisi Akhir RPJMD	
			2017	2018	2019 T	2019 R	2020 T	2020 R	2021 T	2021 P	2022 T	2022 P	2023 T	2023 P	Murni	Perubahan
25.	Peningkatan Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang terakreditasi	%	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN															
26.	Angka Kematian Ibu (AKI)	/100,000 Kelahiran Hidup	54,16	67,87	67,8	37,6	67,5	41,5	67,25	67,25	67	67	66,5	66,5	66,5	66,5
27.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Rumah Sakit		76,78	74,89	75	76,78	76	79	78	80	80	85	85	85	85	85
28.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Rumah Sakit		76,78	79	82	76,78	83	82,58	84	84	85	85	85	85	85	85
29.	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit	%	68,18	72,73	77,27	68,18	77,27	80	81,82	81,82	81,82	85	86,36	85	86,36	85
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG															
30.	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan permukaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh Kab/Kota	%	-	-	-	-	-	-	-	74,46	-	75,58	-	77,08	-	77,08
31.	Persentase jumlah sampah yang tertangani	%	-	-	-	-	-	-	-	98	-	99	-	99	-	99
32.	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang	%	99,979	99,98	99,981	99,979	99,982	99,982	99,983	99,983	99,984	99,984	99,985	99,985	99,985	99,985

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal		Target (T) dan Realisasi (R) RPJMD Murni					Target (T) RPJMD Murni dan (P) RPJMD Perubahan					Kondisi Akhir RPJMD	
			2017	2018	2019 T	2019 R	2020 T	2020 R	2021 T	2021 P	2022 T	2022 P	2023 T	2023 P	Murni	Peru-bahan
33.	Presentase Kinerja Infrastruktur Pekerjaan Umum	%								72,77		76,21		82,13		82,13
34.	Persentase Kinerja Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	%	-	-	-	-	-	-	-	73,29	-	75,59	-	79,16	-	79,16
35.	Persentase menurunnya pelanggaran tata ruang	%	0,021	0,02	0,019	0,021	0,018	0,018	0,017	0,017	0,016	0,016	0,015	0,015	0,015	0,015
36.	Persentase rumah tinggal berakses sanitasi	%	75,33	82,88	84	75,33	86	88,45	88	88	90	90	92	92	92	92
37.	Presentase Kinerja Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman	%	-	-	-	-	-	-	-	73,80	-	74,96	-	76,19	-	76,19
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN															
38.	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	%	NA	76,3	76,55	NA	76,81	78,76	77,07	77,07	77,33	77,33	77,58	77,58	77,58	77,58
39.	Presentase Jumlah Rumah layak huni untuk korban Bencana	%								N/A		100		100		100
40.	Persentase Kinerja Infrastruktur Pendukung Perumahan dan Kawasan Permukiman	%								73,80		74,96		76,19		76,19
41.	Persentase Lingkungan Permukiman yang Layak Huni	%	NA	83,17	84,17	NA	85,17	85,2	86,17	86,17	87,17	87,17	88,17	88,17	88,17	88,17
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT															

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal		Target (T) dan Realisasi (R) RPJMD Murni					Target (T) RPJMD Murni dan (P) RPJMD Perubahan					Kondisi Akhir RPJMD	
			2017	2018	2019 T	2019 R	2020 T	2020 R	2021 T	2021 P	2022 T	2022 P	2023 T	2023 P	Murni	Peru-bahan
42.	Indeks Ketahanan Daerah		-	--	-	-	-	-	-	0,64	-	0,74	-	0,80	-	0,80
43.	Indeks Resiko Bencana		-	-	-	-	-	-	-	175	-	166	-	160	-	160
44.	Persentase penanganan korban bencana	%	-	-	-	-	-	-	-	100	-	100	-	100	-	100
45.	Persentase penegakan Perda	%	90	95	100	90	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
46.	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan)	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL															
47.	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) terehabilitasi	%	-	-	-	-	-	-	-	100	-	100	-	100	-	100
48.	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) terlindungi	%	-	-	-	-	-	-	-	100	-	100	-	100	-	100
49.	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	43,19	47,55	51,41		51,5		51,57	100	51,62	100	51,66	100	51,66	51,66
50.	Presentase taman makam pahlawan dalam kondisi baik	%	-	-	-	-	-	-	-	100	-	100	-	100	-	100
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA															
51.	Prosentase Angkatan Kerja	%	-	-	-	-	-	-	-	66,66	-	66,66	-	66,66	-	66,66
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK															
52.	Indeks Pembangunan Gender		87,62	NA	87,63	88,20	87,64	88,27	87,65	87,65	87,66	87,66	87,6	87,67	87,67	87,67

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal		Target (T) dan Realisasi (R) RPJMD Murni					Target (T) RPJMD Murni dan (P) RPJMD Perubahan					Kondisi Akhir RPJMD	
			2017	2018	2019 T	2019 R	2020 T	2020 R	2021 T	2021 P	2022 T	2022 P	2023 T	2023 P	Murni	Peru-bahan
	(IPG)												7			
53.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)		67,32	NA	67,45	67,32	67,5	68,12	67,55	71,92	67,57	71,93	67,6	71,94	67,6	71,94
54.	Nilai Kabupaten Layak Anak		426	514	550	426	600	528	650	600	700	625	750	650	750	650
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN															
55.	Persentase ketersediaan pangan (tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan)	%	-	-	-	-	-	-	-	96	-	96	-	97	-	97
56.	Persentase Ketersediaan Pangan Utama	%	90	94	94	90	95	109,12	96	96	96	96	97	97	97	97
57.	Persentase Penanganan daerah rawan pangan	%	-	-	-	-	-	-	-	65	-	66	-	67	-	67
58.	Persentase Penguatan Cadangan Pangan	%	70	75	75	70	80	81,97	82	82	84	84	86	86	86	86
59.	Persentase peningkatan jumlah sampel pangan yang diuji dalam rangka keamanan pangan	%	-	-	-	-	-	-	-	2	-	5	-	5	-	5
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN															
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP															
60.	Indeks Kualitas Air (IKA)		46,94	34,67	54,2	46,94	54,4	59,33	54,6	54,60	54,8	53,85	55	53,92	55	53,92
61.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)		NA	73,94	56,5	NA	56,5	70,04	56,5	56,50	56,5	42,50	56,5	42,60	56,5	42,60
62.	Indeks Kualitas Udara (IKU)		85,72	82,78	83,1	85,72	83,2	85,07	83,3	83,30	83,4	85,20	83,5	85,30	83,5	85,3

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal		Target (T) dan Realisasi (R) RPJMD Murni					Target (T) RPJMD Murni dan (P) RPJMD Perubahan					Kondisi Akhir RPJMD	
			2017	2018	2019 T	2019 R	2020 T	2020 R	2021 T	2021 P	2022 T	2022 P	2023 T	2023 P	Murni	Peru-bahan
63.	Persentase cakupan layanan persampahan	%	NA	NA	50	NA	52	52	54	100	56	100	58	100	58	100
64.	Persentase Kinerja Pengelolaan Sampah	%	-	-	-	-	-	-	-	24	-	26	-	27	-	27
65.	Persentase peningkatan rekomendasi persetujuan lingkungan	%	-	-	-	-	-	-	-	5	-	5	-	5	-	5
66.	Persentase peningkatan RTH publik	%	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	2
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL															
67.	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Administrasi Kependudukan	Skor	-	-	-	-	-	-	-	87	-	88	-	89	-	89
68.	Presentase Pelayanan Administrasi Kependudukan yang terlayani sesuai SOP	%	-	-	-	-	-	-	-	100	-	100	-	100	-	100
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA															
69.	Indeks Desa Membangun	%	0,66	0,663	0,668	0,66	0,674	0,6988	0,681	0,681	0,688	0,688	0,694	0,694	0,694	0,694
70.	Persentase desa yang meningkat statusnya	%	-	-	-	-	-	-	-	60	-	70	-	80	-	100
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA															
71.	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	%	0,87	NA	0,86	0,87	0,85	0,83	0,84	1,79	0,83	1,78	0,82	1,77	0,82	1,77

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal		Target (T) dan Realisasi (R) RPJMD Murni					Target (T) RPJMD Murni dan (P) RPJMD Perubahan					Kondisi Akhir RPJMD	
			2017	2018	2019 T	2019 R	2020 T	2020 R	2021 T	2021 P	2022 T	2022 P	2023 T	2023 P	Murni	Perubahan
72.	Penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	%	-	-	-	-	-	-	-	0,01		0,01		0,01		0,01
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN															
73.	Indeks konektivitas angkutan jalan		-	-	-	-	-	-	-	0,78		0,8		0,8		0,8
74.	Indeks konektivitas angkutan sungai		-	-	-	-	-	-	-	0,125		0,375		0,5		0,5
75.	Persentase Kinerja Infrastruktur Perhubungan	%	-	-	-	-	-	-	-	33,35		63,075		78,570		78,570
76.	Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota		-	-	-	-	-	-	-	0,6865		0,8275		0,89		0,89
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA															
77.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)		NA	2,63	2,8	NA	2,9	3,09	3,2	3,10	3,3	3,20	3,5	3,30	3,5	3,30
78.	Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP)		-	-	-	-	-	-	-	95		96		97		97
79.	Persentase OPD yang memanfaatkan TIK dalam tata kelola pemerintahan daerah	%	-	-	-	-	-	-	-	80		90		100		100
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH															
80.	Persentase Koperasi Aktif	%	76	76	76,25	76	76,5	80,6	76,75	81,18	77	81,54	77,25	82,07	77,25	82,07
81.	Persentase Koperasi Sehat	%	29,12	29,71	30	29,12	30,25	22,4	30,5	28,88	30,75	30	31	31,11	31	31,11
82.	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro	%	0,34	1,05	0,47	0,34	0,47	0,615	0,47	0,244	0,47	0,249	0,47	0,254	0,47	0,254

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal		Target (T) dan Realisasi (R) RPJMD Murni					Target (T) RPJMD Murni dan (P) RPJMD Perubahan					Kondisi Akhir RPJMD	
			2017	2018	2019 T	2019 R	2020 T	2020 R	2021 T	2021 P	2022 T	2022 P	2023 T	2023 P	Murni	Peru-bahan
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL															
83.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan		77,23	83,6	86	77,23	87	89,5	88	88,00	89	89,00	90	90,00	90	90,00
84.	Nilai investasi daerah	Milyar Rupiah	583	625	255	583	260	1.077	265	500	270	545	275	600	275	600
85.	Persentase penyelesaian aduan masyarakat terhadap pelayanan publik	%	-	-	-	-	-	-	-	100		100		100		100
86.	Pertumbuhan proyek investasi daerah	%	-	-	-	-	-	-	-	1		1		1		7
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA															
87.	Persentase peningkatan prestasi pemuda dan olahraga	%	NA	35,5	35,5	NA	1,31	-23,33	2,59	2,59	2,94	2,94	3,27	3,27	45,61	3,27
88.	Persentase peningkatan kejuaraan yang diikuti oleh pelajar dan pemuda	%	-	-	-	-	-	-	-	40	-	42,9	-	50	-	50
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK															
89.	Persentase Data Statistik Sektoral yang dikelola dengan baik	%	-	-	-	-	-	-	-	90		100		100		100
90.	Persentase Jenis Informasi Publik yang dikelola	%	-	-	-	-	-	-	-	100		100		100		100
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN															
91.	Persentase OPD yang menggunakan layanan keamanan informasi	%	0	0	21	0	43	43	64	64	86	86	100	100	100	100

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal		Target (T) dan Realisasi (R) RPJMD Murni					Target (T) RPJMD Murni dan (P) RPJMD Perubahan					Kondisi Akhir RPJMD	
			2017	2018	2019 T	2019 R	2020 T	2020 R	2021 T	2021 P	2022 T	2022 P	2023 T	2023 P	Murni	Peru-bahan
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN															
92.	Persentase Pelestarian Budaya Banyumas	%	NA	NA	32,87	NA	47,47	72,72	68,68	68,68	85,29	85,29	100	100	100	100
93.	Persentase peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya	%	-	-	-	-	-	-	-	9,4	-	10,3	-	12,5	-	12,5
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN															
94.	Nilai Kegemaran Membaca Masyarakat		-	-	-	-	-	-	-	53		54		55		55
95.	Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk	Rasio	NA	NA	0,053	NA	0,053	0,48	0,053	0,48	0,053	0,48	0,053	0,48	0,053	0,48
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN															
96.	Nilai Pengawasan Kearsipan		-	-	-	-	-	-	-	60		61		62		62
97.	Persentase Perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	%	NA	5,5	9,1	NA	14,5	14,5	20	20	27,3	27	36,4	35	36,4	35
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN															
98.	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan	%	1,38	1,09	1,50	4,53	1,50	2,07	1,50	1,5	1,50	1,5	1,50	1,5	7,50	1,5
99.	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	%	NA	NA	1,5	5,05	1,5	1,52	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	7,5	1,5
100.	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	%	NA	NA	1,5	3,56	1,5	2,63	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	7,5	1,5

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal		Target (T) dan Realisasi (R) RPJMD Murni					Target (T) RPJMD Murni dan (P) RPJMD Perubahan					Kondisi Akhir RPJMD	
			2017	2018	2019 T	2019 R	2020 T	2020 R	2021 T	2021 P	2022 T	2022 P	2023 T	2023 P	Murni	Peru-bahan
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA															
101.	Persentase Cakupan pelaku ekonomi kreatif sub sektor pariwisata yang terfasilitasi	%								0		32,7		33,3		33,3
102.	Persentase Capaian Daya Tarik wisata di Destinasi wisata yang dikelola Pemda	%	-	-	-	-	-	-	-	90	-	96	-	100	-	100
103.	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisata	%	NA	11,91	25,36	NA	5,86	-61,85	5,48	5,48	5,48	5,48	6,35	6,35	48,48	6,35
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN															
104.	Coefisien of Variant (CoV)	%	-	-	-	-	-	-	-	25,17		24,83		24		24
105.	Persentase peningkatan ketersediaan prasarana pendukung produksi pertanian	%	-	-	-	-	-	-	-	50		50		50		50
106.	Persentase peningkatan ketersediaan sarana pendukung produksi pertanian	%	-	-	-	-	-	-	-	50		50		50		50
107.	Persentase peningkatan komoditas pangan lokal yang dikembangkan	%	-	-	-	-	-	-	-	20		25		30		30
108.	Persentase peningkatan luasan lahan pangan lokal yang dikembangkan	%	-	-	-	-	-	-	-	70		70		70		70
109.	Persentase Peningkatan Produksi Peternakan	%	6,19	3,07	3,00	6,19	3,00	4,99	3,00	3	3,00	3	3,00	3	15,00	3
110.	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pertanian	%	NA	NA	1	NA	1	-1,36	1	1	1	1	1	1	5	1
	URUSAN PEMERINTAHAN															

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal		Target (T) dan Realisasi (R) RPJMD Murni					Target (T) RPJMD Murni dan (P) RPJMD Perubahan					Kondisi Akhir RPJMD	
			2017	2018	2019 T	2019 R	2020 T	2020 R	2021 T	2021 P	2022 T	2022 P	2023 T	2023 P	Murni	Peru-bahan
	BIDANG KEHUTANAN															
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL															
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN															
111.	Persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	%								15,23		15,24		15,25		15,25
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN															
112.	Persentase kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB	%	-	-	-	-	-	-	-	24,32		24,33		24,34		24,34
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI															
	SEKRETARIAT DAERAH															
113.	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP)	,	-	-	-	-	-	-	-	3,79		3,82		3,85		3,85
114.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)		60,22	70,95	72	73,84	74	74,96	76	76,00	78	78,00	80	80,00	80	80,00
115.	Capaian kinerja instansi lingkup asisten Pemerintahan dan Kesra	%	-	-	-	-	-	-	-	100		100		100		100
116.	Capaian kinerja instansi lingkup asisten Administrasi Umum	%	-	-	-	-	-	-	-	100		100		100		100
117.	Capaian kinerja instansi lingkup asisten ekonomi dan pembangunan	%	-	-	-	-	-	-	-	100		100		100		100
118.	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Sekretariat Daerah			-	-	-	-	-	-	76		78		80		80

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal		Target (T) dan Realisasi (R) RPJMD Murni					Target (T) RPJMD Murni dan (P) RPJMD Perubahan					Kondisi Akhir RPJMD	
			2017	2018	2019 T	2019 R	2020 T	2020 R	2021 T	2021 P	2022 T	2022 P	2023 T	2023 P	Murni	Peru-bahan
119.	Nilai Maturitas SPIP	level								2		2		3		3
120.	Persentase Jumlah Perangkat Daerah yang dikoordinasikan penilaian mandiri SPIP	%								51		51		51		51
	SEKRETARIAT DPRD															
121.	Indeks Kepuasan Dewan	%	80	80	80	80	81	100	82	100	83	100	84	100	84	100
122.	Persentase kegiatan DPRD yang terfasilitasi	%	-	-	-	-	-	-	-	100		100		100		100
	PERENCANAAN															
123.	Manajemen Risiko Indeks (MRI)		-	-	-	-	-	-	-	2		2		3		3
124.	Nilai Penghargaan Perencanaan Daerah		-	-	-	-	-	-	-	7,6		7,65		7,7		7,7
125.	Persentase kesesuaian prioritas daerah dan nasional	%	-	-	-	-	-	-	-	60		70		80		80
126.	Rata-rata presentase capaian indikator kinerja utama pemerintah daerah	%								70		80		90		90
	KEUANGAN															
127.	Opini BPK status WTP terhadap laporan keuangan daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100
128.	Persentase atas pengamanan aset daerah	%	-	-	-	-	-	-	-	90		95		95		95
129.	Persentase kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	%	-	-	-	-	-	-	-	3,75		4,00		4,25		4,25
130.	Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD	%	-	-	-	-	-	-	-	19,4		19,5		19,6		19,6
131.	Persentase pengalokasian anggaran belanja sesuai ketentuan	%	-	-	-	-	-	-	-	100		100		100		100

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal		Target (T) dan Realisasi (R) RPJMD Murni					Target (T) RPJMD Murni dan (P) RPJMD Perubahan					Kondisi Akhir RPJMD	
			2017	2018	2019 T	2019 R	2020 T	2020 R	2021 T	2021 P	2022 T	2022 P	2023 T	2023 P	Murni	Peru-bahan
132.	Persentase penyerapan APBD	%	-	-	-	-	-	-	-	90		90		95		95
	KEPEGAWAIAN															
133.	Indeks Profesionalitas ASN,	%	82,79	82,80	83,10	82,79	83,40	67,48	83,60	71	83,60	71	83,70	71	83,70	71
134.	Persentase ASN yang mendapatkan penilaian kinerja kategori BAIK	%	-	-	-	-	-	-	-	100		100		100		100
	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN															
135.	Persentase ASN yang lulus pengembangan kompetensi sesuai dengan jabatan nya	%	-	-	-	-	-	-	-	100		100		100		100
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN															
136.	Persentase hasil-hasil penelitian yang direkomendasikan sebagai bahan kebijakan	%	-	-	-	-	-	-	-	75		80		85		85
137.	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	%	NA	NA	60	50	62	66,67	65	65	67	67	70	70		70
	PENGELOLAAN PERBATASAN															
	INSPEKTORAT DAERAH															
138.	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)		-	-	-	-	-	-	-	2		2		3		3
139.	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)		-	-	-	-	-	-	-	3		3		3		3
140.	Nilai Survey Eksternal Persepsi Korupsi		-	-	-	-	-	-	-	3,86		3,87		3,88		3,88
	KECAMATAN															

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal		Target (T) dan Realisasi (R) RPJMD Murni					Target (T) RPJMD Murni dan (P) RPJMD Perubahan					Kondisi Akhir RPJMD	
			2017	2018	2019 T	2019 R	2020 T	2020 R	2021 T	2021 P	2022 T	2022 P	2023 T	2023 P	Murni	Peru-bahan
141.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan		51,33	52,26	82	74,14	82,98	81,46	83,96	83,93	84,94	84,87	85,92	85,81	85,92	85,81
142.	Persentase Layanan Kecamatan diselesaikan tepat Waktu	%	-	-	-	-	-	-	-	100		100		100		100
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK															
143.	Persentase Penurunan Potensi Konflik IPOLEKSOSBUDHANKAM	%	-	-	-	-	-	-	-	5	-	5	-	5	-	15
144.	Persentase wilayah kecamatan yang kondisinya aman	%	-	-	-	-	-	-	-	70	-	75	-	80	-	80
145.	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam bidang politik	%	-	-	-	70	-	78	-	75	-	75	-	75	-	75

BAB IX

PENUTUP

Perubahan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 dilaksanakan dalam rangka sinkronisasi dengan kebijakan nasional terutama dengan ditetapkannya RPJMN Tahun 2020-2024, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah. Perubahan ini juga sebagai penyesuaian kebijakan pembangunan daerah yang dipengaruhi oleh terjadinya pandemi COVID-19. Perubahan dalam RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 tersebut terutama ditekankan pada perubahan untuk perencanaan tahun 2022 dan 2023. Perubahan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 berdasarkan rekomendasi hasil evaluasi RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 berupa penyesuaian program kegiatan dalam RPJMD, perbaikan indikator dan target, program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD serta perbaikan pengukuran kinerja daerah dan OPD (cascading).

Melalui perubahan RPJMD ini diharapkan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Banyumas semakin realistis untuk dicapai melalui penajaman berbagai program dan kegiatan yang dalam implementasinya didukung oleh seluruh pelaku pembangunan dan masyarakat Kabupaten Banyumas. Perencanaan pembangunan yang dituangkan dalam dokumen perubahan RPJMD ini dapat diwujudkan dengan didukung komitmen yang tinggi para penyelenggara pemerintahan dalam melaksanakan program dan kegiatan, peran serta para pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan dan peran serta masyarakat.

Agar pelaksanaan Perubahan RPJMD dapat berjalan dengan baik, perlu diatur beberapa pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

9.1. Pedoman Transisi

RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023 berlaku untuk kurun waktu lima tahun sejak tahun 2019 hingga tahun 2023. Sedangkan Perubahan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 ditekankan pada perubahan untuk perencanaan tahun 2022 dan 2023. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan perencanaan setelah RPJMD tahun berakhir, maka Perubahan RPJMD ini menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD dan RAPBD tahun 2024 di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2023-2028 dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025.

9.2. Kaidah Pelaksanaan

Perubahan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif. Perubahan RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023 merupakan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Banyumas serta pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan pembangunan.

Kaidah pelaksanaan Perubahan RPJMD yang dapat dilakukan sebagai berikut:

a. Bupati Banyumas berkewajiban menyebarluaskan Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Perubahan RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023 kepada masyarakat;
b. Seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas dan pemangku kepentingan agar melaksanakan program-program Perubahan RPJMD dengan sebaik-baiknya yang mengarah pada pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023;
c. Seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas wajib melakukan penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang mengacu pada Perubahan RPJMD. Renstra tersebut akan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun 2022-2023;
d. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Perubahan RPJMD, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah berkewajiban melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil Perubahan RPJMD.

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN